PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

"Planning for a better Babel"

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang digunakan sebagai instrument evaluasi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2020 meliputi:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2020 berfungsi sebagai:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
    b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
    c. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.

(2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPJMD Provinsi serta mengacu pada RKP 2020;

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020; dan

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2020.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020.

(5) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2020.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 .....

BAB I PENDAHULUAN I.1
- 1.1. Latar Belakang I.1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I.7
- 1.3. Hubungan antar Dokumen I.9
- 1.4. Maksud dan Tujuan I.10
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD I.11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II.1
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.26
    - 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi II.26
    - 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.35
    - 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.57
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II.60
    - 2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib II.60
    - 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.114
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II.129
    - 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.129
    - 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.132
    - 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II.133
    - 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II.137
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2017 Dan Realisasi RPJMD II.138
- 2.3. Permasalahan Pembangunan sDaerah II.205
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II.205
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II.206
- 2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD II.228
- 2.5. Capaian Inovasi Daerah II.301

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III.1
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1
  - 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi III.3
    - 3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III.3

Halaman

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi III.6
3.1.1.3. PDRB Perkapita III.8
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah III.9
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB III.11
3.1.1.6. Tingkat Inflasi III.11
3.1.1.7. Tingkat Investasi III.13
3.1.1.8. Ekspor dan Impor III.14
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan III.16
3.1.2.1. Pengangguran III.16
3.1.2.2. Kemiskinan III.16
3.1.2.3. Ketimpangan Regional III.17
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan III.18
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019 ..... III.19
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019 ..... III.19
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019 ..... III.20
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 ..... III.21
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.22
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.23
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.25
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.28
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III.28
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III.30
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.34

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1. Tema, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.4
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.8
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran pembangunan IV.17
4.2.1. Prioritas Pembangunan daerah tahun 2020 ..... IV.17
4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah IV.58
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional IV.59
4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah IV.62
4.2.5. Penyelarasan Target Capaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional IV.89
4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs IV.89

Halaman

4.2.7. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) IV.114
4.2.8. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengentasan Kemiskinan IV.123
4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan IV.125
4.2.10. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Revolusi Mental IV.126
4.2.11. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) IV.132
4.2.12. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya IV.133
4.2.13. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Transformasi Digital IV.135
4.2.14. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Lintas Bidang Kerentanan Bencana IV.137
4.2.15. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perubahan Iklim IV.138
4.2.16. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik IV.140
4.2.17. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan IV.143
4.2.18. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan IV.143
4.2.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Energi IV.146
4.2.20. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Pangan IV.147
4.2.21. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata IV.150
4.2.22. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman IV.155
4.2.23. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Wilayah IV.156
4.2.24. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan IV.169
4.2.25. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia IV.171
4.2.26. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Sumber Daya Air IV.175
4.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunanlintas Bidang melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial IV.176
4.3.1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.176
4.3.2. Pembangunan Bahari IV.185
4.3.3. Pengembangan Pariwisata IV.192

Halaman

4.3.4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.202
4.3.5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah IV.209
4.3.6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.211
4.3.7. Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur IV.217
4.3.8. Pembangunan Pendidikan IV.221
4.3.9. Pembangunan Kesehatan IV.225
4.3.10. Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik IV.228
4.3.11. Pembangunan Demokrasi IV.239
4.3.12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.242
4.3.13. Pengendalian Lingkungan Hidup IV.244
4.4. Pagu Indikatif per Prioritas Daerah Tahun 2020 ..... IV.248

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V.1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang V.2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka V.7
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat V.16
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah V.24
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan V.37
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung V.50
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur V.60
5.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) V.68
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... V.69

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI.1
6.1. Rencana Program Prioritas VI.1
6.2. Pagu Indikatif VI.7

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII.1
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) VII.1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VII.4

BAB VIII PENUTUP VIII.1

LAMPIRAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	II.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.3
Tabel	II.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.3
Tabel	II.3	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.4
Tabel	II.4	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.5
Tabel	II.5	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.5
Tabel	II.6	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
Tabel	II.7	Sistem Pelabuhan Laut Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.9
Tabel	II.8	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA	II.11
Tabel	II.9	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030	II.12
Tabel	II.10	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.	II.20
Tabel	II.11	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.21
Tabel	II.12	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013–2017	II.23
Tabel	II.13	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017	II.23
Tabel	II.14	Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (x1000)	II.25
Tabel	II.15	PDRB Tahun 2014–2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.26
Tabel	II.16	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014–2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.28
Tabel	II.17	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.28
Tabel	II.18	Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.29

Halaman

Tabel II.19 Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen) II.30

Tabel II.20 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)..... II.30

Tabel II.21 Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)) II.31

Tabel II.22 Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Menurut Kelompok Pengeluaran..... II.33

Tabel II.23 Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017 II.35

Tabel II.24 Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.36

Tabel II.25 Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.37

Tabel II.26 Angka Harapan Sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.37

Tabel II.27 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016..... II.38

Tabel II.28 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.40

Tabel II.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.41

Tabel II.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.42

Tabel II.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.42

Tabel II.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.43

Tabel II.33 Perkembangan APM Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.45

Tabel II.34 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.46

Tabel II.35 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2014-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47

Halaman

Tabel II.36 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48

Tabel II.37 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49

Tabel II.38 Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49

Tabel II.39 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ..... II.51

Tabel II.40 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.51

Tabel II.41 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.52

Tabel II.42 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.52

Tabel II.43 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa) II.53

Tabel II.44 Persentase penduduk miskin di Pulau SumateraTahun 2013-2017 ..... II.53

Tabel II.45 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55

Tabel II.46 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55

Tabel II.47 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56

Tabel II.48 Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2014 s.d 2018 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56

Tabel II.49 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.57

Tabel II.50 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.58

Tabel II.51 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.52 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.53 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.54 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.60

Halaman

Tabel II.55 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.61

Tabel II.56 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.62

Tabel II.57 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013 s.d 2017 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung II.63

Tabel II.58 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.63

Tabel II.59 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.64

Tabel II.60 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.65

Tabel II.61 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.65

Tabel II.62 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.66

Tabel II.63 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.66

Tabel II.64 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.67

Tabel II.65 Jumlah Kasus HIV Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.68

Tabel II.66 Jumlah Kasus Penyakit DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017..... II.68

Tabel II.67 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.69

Tabel II.68 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.70

Tabel II.69 Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.70

Tabel II.70 Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ..... II.72

Tabel II.71 Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.73

Tabel II.72 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018 ..... II.74

Halaman

Tabel II.73 Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2018 ..... II.75

Tabel II.74 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ..... II.76

Tabel II.75 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.77

Tabel II.76 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.78

Tabel II.77 Data Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.78

Tabel II.78 Data TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.79

Tabel II.79 Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.79

Tabel II.80 Data Tingkat Pengangguran Tahun 2013 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.80

Tabel II.81 Data Pengangguran Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.81

Tabel II.82 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.81

Tabel II.83 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.82

Tabel II.84 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.82

Tabel II.85 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.83

Tabel II.86 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.84

Tabel II.87 Data Ketergantungan Beras 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.85

Tabel II.88 Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.86

Tabel II.89 Data Ketersediaan Pangan 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.86

Halaman

Tabel II.90 Luas Lahan (m^2) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.88

Tabel II.91 Luas Lahan (m^2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.88

Tabel II.92 Luas Lahan (m2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.89

Tabel II.93 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.90

Tabel II.94 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.90

Tabel II.95 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.91

Tabel II.96 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.91

Tabel II.97 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.92

Tabel II.98 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.93

Tabel II.99 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.93

Tabel II.100 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.94

Tabel II.101 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.95

Tabel II.102 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.96

Tabel II.103 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.97

Tabel II.104 Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil II.97

Tabel II.105 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.98

Tabel II.106 Jumlah Bumdes yang Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.99

Tabel II.107 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.99

Halaman

Tabel II.108 Jumlah Sekolah Dasar (Sd) Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.100

Tabel II.109 Jumlah Aparatur Desa Yang Terlatih Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung g II.101

Tabel II.110 Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 sd Tahun 2018 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.101

Tabel II.111 Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 sd Tahun 2017 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.102

Tabel II.112 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.104

Tabel II.113 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.104

Tabel II.114 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.105

Tabel II.115 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.107

Tabel II.116 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.107

Tabel II.117 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.108

Tabel II.118 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.108

Tabel II.119 Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.109

Tabel II.120 Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110

Tabel II.121 Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110

Tabel II.122 Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.111

Tabel II.123 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017 Kepulauan Bangka Belitung II.112

Tabel II.124 Jumlah Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.112

Tabel II.125 Urusan Perpustakaan II.113

Tabel II.126 Urusan Kearsipan II.113

Halaman

Tabel II.127 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 ..... II.114

Tabel II.128 Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.116

Tabel II.129 Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (Hari) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.117

Tabel II.130 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2016 ..... II.117

Tabel II.131 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 ..... II.118

Tabel II.132 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2013 – 2017 ..... II.118

Tabel II.133 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.119

Tabel II.134 Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .. II.120

Tabel II.135 Potensi Sumber Daya Mineral Logam (ton) Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.121

Tabel II.136 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$) II.121

Tabel II.137 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.122

Tabel II.138 Penggunaan Lahan di Kawasan Batu Betumpang II.123

Tabel II.139 Kondisi Transmigrasi Di Wilayah Pulau Bangka II.125

Tabel II.140 Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Belitung II.127

Tabel II.141 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.129

Tabel II.142 Nilai Tukar etani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.129

Tabel II.143 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.130

Tabel II.144 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.131

Tabel II.145 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.131

Tabel II.146 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.132

Tabel II.147 Infrastruktur Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.132

Halaman

Tabel II.148 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016 ..... II.133

Tabel II.149 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016 ..... II.134

Tabel II.150 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(dalam Rp. Juta) II.136

Tabel II.151 Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.136

Tabel II.152 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.137

Tabel II.153 Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.138

Tabel II.154 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 ..... II.140

Tabel II.155 Identifikasi Isu Strategis Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2020 ..... II.218

Tabel II.156 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya II.226

Tabel II.157 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.229

Tabel II.158 Konsistensi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2018 dengan Permasalahan dan Isu Strategis II.284

Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah) III.4

Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2014-2018(Juta rupiah) III.5

Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2020..... III.8

Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2020 (dalam persen) III.10

Tabel III.5 Ditribusi PDRB Menurut PengeluaranAtas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2016–2020 (dalam persen). III.11

Tabel III.6 Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2018 ..... III.12

Tabel III.7 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2018 ..... III.13

Halaman

Tabel III.8 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 ..... III.14

Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2020 (dalam persen) III.16

Tabel III.10 Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012–2019) III.18

Tabel III.11 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013–2019) III.19

Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d tahun 2021 ..... III.27

Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d Tahun 2021 ..... III.32

Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021 ..... III.35

Tabel IV.1 Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ..... IV.5

Tabel IV.2 Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan 2020 ..... IV.6

Tabel IV.3 Target Tujuan Tahun 2020 ..... IV.6

Tabel IV.4 Target Sasaran Tahun 2020 ..... IV.7

Tabel IV.5 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.9

Tabel IV.6 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan I (utama) RKPD 2020 ..... IV.20

Tabel IV.7 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2020 ..... IV.37

Tabel IV.8 Keselarasan antara Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.58

Tabel IV.9 Keselarasan antara Prioritas nasional, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.60

Tabel IV.10 Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.64

Tabel IV.11 Keselarasan Target Indikator Pembangunan Makro antara Target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.89

Tabel IV.12 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian *Sustainabel Developement Goals* (SDGs) IV.91

Halaman

Tabel IV.13 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pendidikan IV.114

Tabel IV.14 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Kesehatan IV.116

Tabel IV.15 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV.117

Tabel IV.16 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV.118

Tabel IV.17 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV.119

Tabel IV.18 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Sosial IV.120

Tabel IV.19 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2020 ..... IV.123

Tabel IV.20 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2020 ..... IV.125

Tabel IV.21 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental RKP 2020 ..... IV.127

Tabel IV.22 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2020 ..... IV.132

Tabel IV.23 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya RKP 2020 ..... IV.133

Tabel IV.24 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Transformasi Digital RKP 2020 ..... IV.135

Tabel IV.25 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Kerentanan Bencana RKP 2020 ..... IV.137

Tabel IV.26 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim RKP 2020 .. IV.138

Halaman

Tabel IV.27 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik RKP 2020 ..... IV.140

Tabel IV.28 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan RKP 2020 ..... IV.143

Tabel IV.29 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan RKP 2020 ..... IV.144

Tabel IV.30 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Energi RKP 2020 ..... IV.146

Tabel IV.31 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Pangan RKP 2020 ..... IV.147

Tabel IV.32 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata RKP 2020 ..... IV.151

Tabel IV.33 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman RKP 2020 ..... IV.155

Tabel IV.34 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah RKP 2020 ..... IV.157

Tabel IV.35 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan RKP 2020 ..... IV.169

Tabel IV.36 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia RKP 2020 ..... IV.171

Tabel IV.37 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air RKP 2020 ..... IV.175

Tabel IV.38 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.176

Tabel IV.39 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.179

Tabel IV.40 *Stakeholder* Yang Mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.184

Halaman

Tabel IV.41 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Bahari IV.185

Tabel IV.42 Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Bahari IV.186

Tabel IV.43 *Stakeholder* Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Bahari IV.191

Tabel IV.44 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata IV.192

Tabel IV.45 Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata IV.194

Tabel IV.46 *Stakeholder* yang mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata IV.202

Tabel IV.47 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.203

Tabel IV.48 Program PembangunanPerangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.204

Tabel IV.49 *Stakeholder* yang mendukung Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.209

Tabel IV.50 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah..... IV.209

Tabel IV.51 Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah IV.210

Tabel IV.52 *Stakeholder* yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah IV.211

Tabel IV.53 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.211

Tabel IV.54 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.213

Tabel IV.55 *Stakeholder* yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.216

Tabel IV.56 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur IV.217

Tabel IV.57 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur IV.219

Tabel IV.58 *Stakeholder* yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur IV.220

Halaman

Tabel IV.59 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.221

Tabel IV.60 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.222

Tabel IV.61 *Stakeholder* yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.224

Tabel IV.62 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan IV.225

Tabel IV.63 Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan IV.225

Tabel IV.64 *Stakeholder* yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan IV.228

Tabel IV.65 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik IV.229

Tabel IV.66 Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik IV.231

Tabel IV.67 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Pembangunan Demokrasi IV.240

Tabel IV.68 Program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Demokrasi IV.240

Tabel IV.69 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.242

Tabel IV.70 Program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.243

Tabel IV.71 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup IV.245

Tabel IV.72 Program Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup IV.245

Tabel IV.73 Pagu Indikatif per Prioritas Daerah Tahun 2020 ..... IV.249

Tabel V.1 Sasaran Pemerataan Pembangunan antar Kabupaten/Kota: Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. V.2

Tabel V.2 Indikator capaian Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2014-2018 V.3

Tabel V.3 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ..... V.4

Tabel V.4 Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka V.8

Tabel V.5 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2020 ..... V.9

Halaman

Tabel	V.6	Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Barat	V.17
Tabel	V.7	Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	V.18
Tabel	V.8	Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah	V.25
Tabel	V.9	Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020	V.26
Tabel	V.10	Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan	V.38
Tabel	V.11	Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020	V.39
Tabel	V.12	Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung	V.51
Tabel	V.13	Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2020	V.53
Tabel	V.14	Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung Timur	V.61
Tabel	V.15	Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020	V.63
Tabel	V.16	Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034	V.71
Tabel	V.17	Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah	V.108
Tabel	VI.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	VI. 7
Tabel	VII.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	VII. 2
Tabel	VII.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	VII. 5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi	I.6
Gambar I.2	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	I.10
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II.2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.2
Gambar II.4	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.13
Gambar II.5	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.18
Gambar II.6	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.20
Gambar II.7	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.22
Gambar II.8	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung	II.116
Gambar II.9	Peta Penilaian Rencana Kawasan Transmigrasi	II.124
Gambar II.10	Peta Lokasi Transmigrasi di Kabupaten Bangka Selatan	II.125
Gambar II.11	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah	II.126
Gambar II.12	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat	II.126
Gambar II.13	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung	II.127
Gambar II.14	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur	II.128
Gambar IV.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022	IV.1
Gambar IV.2	Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dalam dokumen RPJMD 2017-2022	IV.2
Gambar V.1	Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	V.1
Gambar V.2	Perkembangan Indikator Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2018	V.3
Gambar V.3	Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020	V.4
Gambar V.4	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018	V.8
Gambar V.5	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2020	V.9
Gambar V.6	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018	V.17
Gambar V.7	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	V.18
Gambar V.8	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017/2018	V.25

Halaman

Gambar V.9	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020	V.26
Gambar V.10	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018	V.38
Gambar V.11	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020	V.39
Gambar V.12	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Tahun 2018	V.51
Gambar V.13	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020	V.52
Gambar V.14	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017	V.61
Gambar V.15	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020	V.62

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik	II.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	II.24
Grafik	II.2	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020	II.26
Grafik	II.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 – 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.27
Grafik	II.4	PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018	II.32
Grafik	II.5	Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Kota Pangkalpinang	II.32
Grafik	II.6	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2018 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional	II.33
Grafik	II.7	Gini Ratio Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.34
Grafik	II.8	Indeks *Williamson* Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.35
Grafik	II.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.44
Grafik	II.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2014-2018	II.45
Grafik	II.11	Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.46
Grafik	II.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.47
Grafik	II.13	Persentase Bayi Kurus dan Stunting Tahun 2017 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.50
Grafik	II.14	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2017	II.54
Grafik	II.15	Panjang Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018	II.75
Grafik	II.16	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.84
Grafik	II.17	Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d. 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *(update* grafik*)*	II.105

Halaman

Grafik	II.18	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015	II.106
Grafik	III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020	III.7
Grafik	III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)	III.9
Grafik	III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	III.10
Grafik	III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2016-2020	III.12
Grafik	III.5	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016- 2020 (dalam juta US$)	III.15
Grafik	III.6	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (dalam juta US$)	III.15
Grafik	III.7	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019 (dalam persen)	III.17



BAB I

➢ PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2020, Penyusunan RKPD 2020 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memerhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut.

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memerhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain sebagai berikut.

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memerhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi:
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi:
   a. perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
      1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
      2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
      4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
      5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
1) pendahuluan;
2) gambaran umum kondisi daerah;
3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5) arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
6) rancangan kerja dan pendanaan daerah;.
7) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
8) penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan:
a. rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
2) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
3) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
5) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.

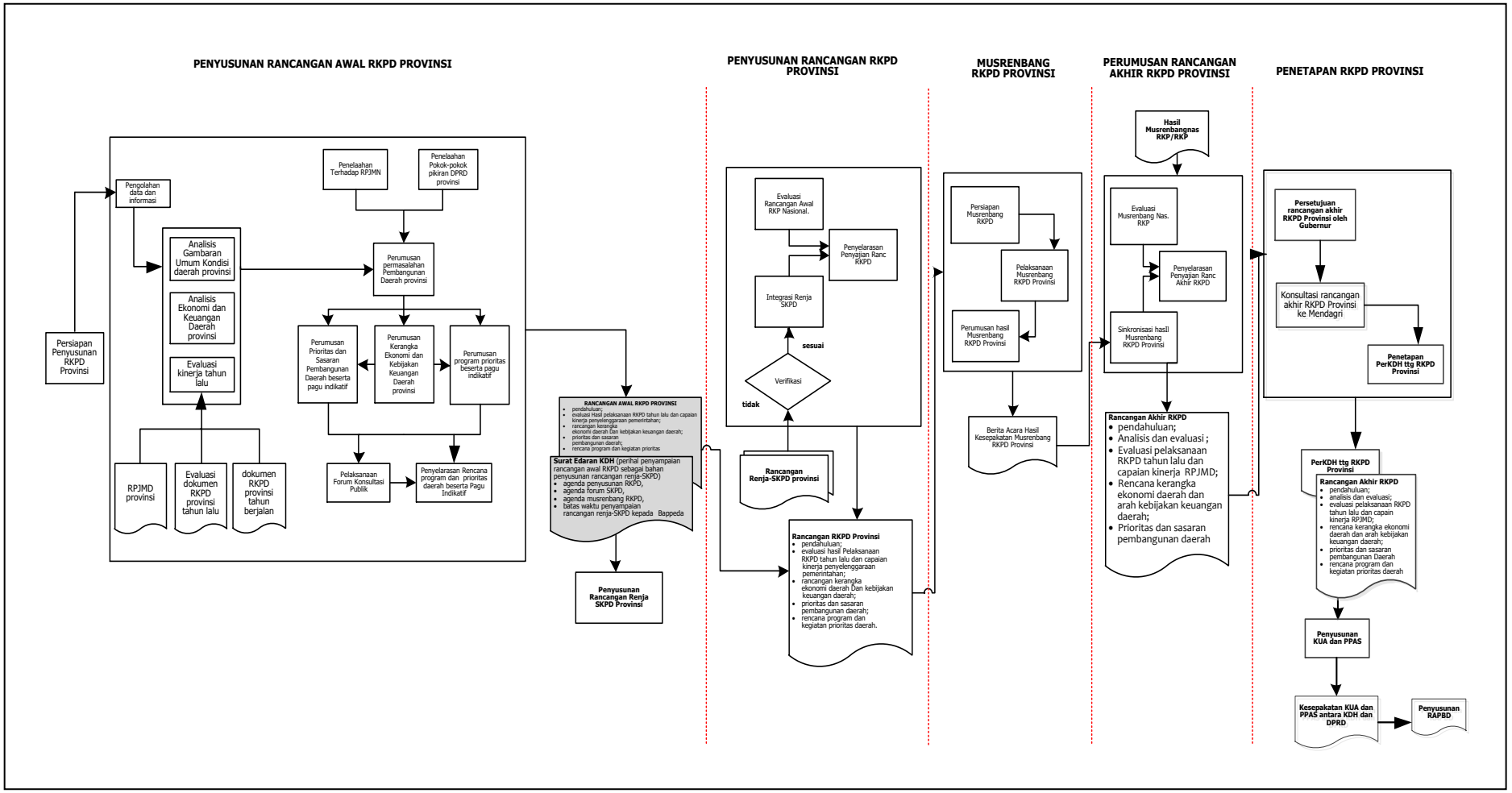
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD.
    1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai:
        a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
        b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
        c. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.
    2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

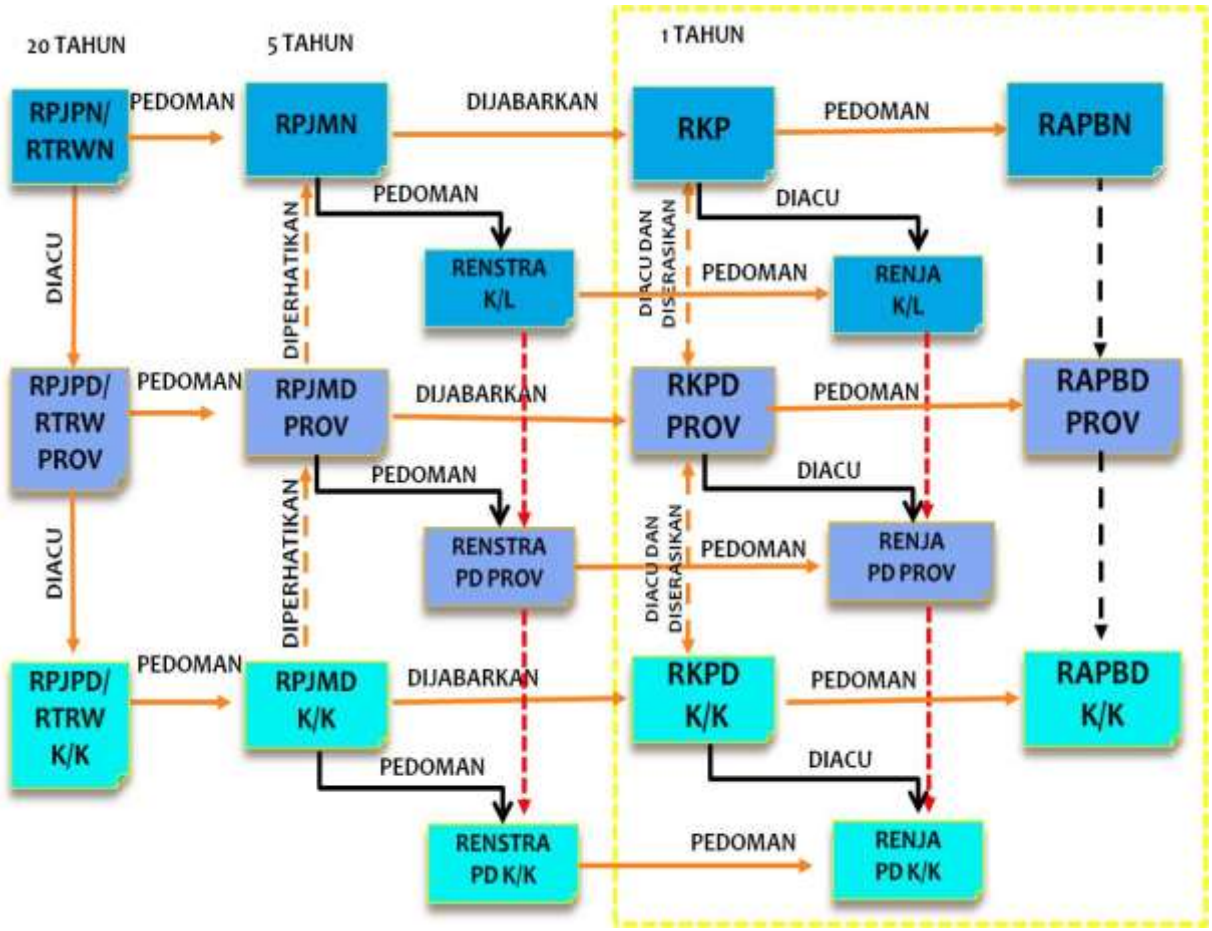
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 disusun dengan memerhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 - 2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2020 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama - sama diacu oleh RKPD.

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut.

Gambar I.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah



Sumber: Diolah dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2020.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahu berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2019), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (tahun 2018) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.



BAB II

- **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Kondisi Astronomis dan Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1

Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Di samping itu, letak yang berdekatan dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau

Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini dan di masa yang akan datang.

Gambar II.2

Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Walaupun demikian juga terdapat potensi ancaman di ALKI I, terutama terkait apabila ada konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan; digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3.

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Posisi Provinsi ini berbatasan sebelah Barat dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebagaimana terlihat pada peta Gambar II.3. Dikelilingi oleh laut dan

merupakan daerah kepulauan,dinamai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km^2. Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km^2 atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km^2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara terperinci dapat dilihat pada data tabel II.1.

Tabel II.1

Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km^2)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kep. Babel		**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Kemudian melakukan pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, yang membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), dengan 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**47**	**47**	**47**	**47**	**47**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari Tabel II.2 di atas, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah administrasi kecamatan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan. Kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi kecamatannya adalah Kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Total seluruh kecamatan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 kecamatan.

Tabel II.3

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	48	42	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**313**	**309**	**309**	**309**	**309**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel II.3 di atas, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah administrasi desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa, sedangkan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa. Total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 309 desa.

Tabel II.4

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	9	15	15	19	19
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	7	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**72**	**78**	**78**	**82**	**82**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel II.4 di atas, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah administrasi kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel II.5

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km²)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel II.5 di atas, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 Km^2, sedangkan kabupaten yang paling kecil luas wilayah administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,8 Km^2. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari luas lautan sebesar 65.301,23 Km^2 dan luas daratan sebesar 16.424,23 Km^2.

3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe granit *main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit *biotit* dan granit *muskovit* yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yaang diperkirakan umurnya Trias (sumber: Arsip PT Koba Tin: *Survey* dan *Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* ($ZrSiO_4$), *Monazite* ((Ce, La, Dy)PO_4 (ThSi)O_2), *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* ($FeTiO_3$), dan *Xenotime* (YPO_4).

Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun.

Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lain nya seperti pasir kwarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Dari kajian hidrologi, daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitng merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

4. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 ^{o}C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan di Kepulauan Bangka Belitung, angin kencang, dan ombak laut cenderung meninggi.

5. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa tanah kosong yang tidak termanfaatkan cukup luas mencapai 55.987 Ha dan lahan pekarangan seluas 529.810 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.6. Dari seluruh luas lahan lebih kurang 35,40 persen telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan lahan pemukiman dan penggembalaan.

Tabel II.6
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Lahan	Luas (Ha)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	13.262	15.719	15.719	22.771	**25.058**
Tegalan	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038
Ladang	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435
Perkebunan	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064
Hutan Rakyat	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315
Tambak	*	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*	*
Pengembalaan	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987
Lain-Lain (pekarangan)	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810

Jenis Lahan	Luas (Ha)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Permukiman	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080
Hutan Negara	*	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*	*
JUMLAH	**1.642.414**	**1.642.414**	**1.642.027**	**1.642.027**	**1.664.018**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)*

Luas penggunaan lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 489.080 Ha dan perkebunan sebesar 391.064 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

B. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi , sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan dimana Kota

Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antarmoda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

1. sistem transportasi darat yang ada di provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan;
2. sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran; dan
3. sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang udara.

a) Sistem Transportasi Darat

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b) Sistem Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran.

Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan pemerintah provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	KLASIFIKASI & NAMA PELABUHAN	KABUPATEN/KOTA
A	**Pelabuhan Utama**	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	**Pelabuhan Pengumpul**	

No.	KLASIFIKASI & NAMA PELABUHAN	KABUPATEN/KOTA
A	**Pelabuhan Utama**	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	**Pelabuhan Pengumpan**	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kelian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
E	**Pelabuhan Khusus (Wisata)**	
1	Pelabuhan Tanjungpandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut.

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kab. Bangka Barat) – Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kab. Bangka Barat) – Pelabuhan Belinyu (Kab. Bangka).
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang) – Tanjung Pandan (Kab. Belitung).
4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kab. Bangka Selatan) – Tanjung Pandan (Kab. Belitung) & Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

c) Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalulintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari bandar udara pengumpul (*hub*) dan bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan.

Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100%. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN, beban puncak energi listrik PLN terhadap daya mampu yang tersedia sebesar 275,77 MW, dengan daya yang seluruhnya terpakai pada saat beban puncak yaitu 192,11 MW. Sehingga dari pembangkit yang tersedia telah terdapat surplus 83,66 MW. (Data PLN Desember 2018)

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di kabupaten/kota di antaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
	JUMLAH	**477.159**	**507.309**	**553.487**	**603.875**	**654.842**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
	JUMLAH	**146.283**	**152.588**	**161.327**	**170.566**	**181.919**
	JUMLAH TOTAL	**623.442**	**659.897**	**714.814**	**774.441**	**836.761**

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik, maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

6. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. pelayanan umum dan komersil: 15% dari domestik;
2. wartel: 250 jiwa per wartel;
3. telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya, seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	**112.683**	**124.942**	**136.315**	**148.724**	**158.861**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	**33.451**	**34.830**	**36.825**	**38.934**	**40.986**
	JUMLAH TOTAL	**146.134**	**159.772**	**173.140**	**187.658**	**199.847**

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

7. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai; sistem jaringan irigasi; sistem jaringan air baku; sistem pengendalian banjir; dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut.

a Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung.
b Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi.
c Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku; sistem pengelolaan air baku; dan peruntukan air baku.
d Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan; pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi; pengamanan sempada sungai; pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air; dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai; serta normalisasi sungai.
e Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan; pengamanan gundukan pasir; pemecah ombak; turap dan pengamanan sempadan pantai.

8. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan non beracun berbahaya; sistem drainase; sistem pengelolaan air minun (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

Gambar II.4

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

9. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

10. Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan; kawasan cagar budaya serta;
e. kawasan rawan bencana alam.

a Hutan Lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 Ha, dimana 32% di antaranya (atau 156.730 Ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kebupaten Bangka Barat (28.589 Ha), Bangka (15.736 Ha), Bangka Tengah (32.226 Ha), Bangka Selatan (28.234 Ha), Belitung (37.583 Ha) dan Belitung Timur (45.874 Ha).

b Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan/atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

c Kawasan Perlindungan Setempat

1.) **Sempadan Pantai**. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2.) **Sempadan Sungai**. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang

tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

3.) **Sempadan Kolong.** Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapt diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

d Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Situs Dan; Kawasan Cagar Budaya

1.) **Kawasan Cagar Alam.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang – Belitung; Gunung Menumbing; Gunung Maras; Gunung Mangkol; Gunung Permisan; Jering Menduyung; dan kawasan Gunung Tajam Belitung.

2.) **Taman Wisata Alam Laut.** Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

3.) **Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kelian dan Benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, Mesjid Jami dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Di Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Cagar Budaya.

e Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

1.) kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kab. Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kab. Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kab. Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kec. Manggar, Sungai Mayang Kec. Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kab. Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kab. Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kab. Bangka);

2.) kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kab. Bangka Barat); Kec. Koba, Kec. Lubuk Besar, Kec. Pangkalan Baru (Kab. Bangka Tengah); Kec. Membalong, Kec. Badau, Kec. Tanjung Pandan,

Kec. Selat Nasik dan Kec. Sijuk (Kab. Belitung); Kec. Manggar, Kec. Gantung, Kec. Simpang Pesak, Kec. Dendang dan Kec. Damar (Kab. Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kec. Lepar Pongo, Kec. Tukak Sadai, Kec. Simpang Rimba Permis, Kec. Toboali (Kab. Bangka Selatan); Kec. Sungailiat, Kec. Belinyu (Kab. Bangka); dan

3.) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kec. Simpang Teritip (Kab. Bangka Barat).

11. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

a kawasan peruntukan hutan produksi;
b kawasan peruntukan pertanian;
c kawasan peruntukan perikanan;
d kawasan peruntukan pertambangan;
e kawasan peruntukan industri;
f kawasan peruntukan pariwisata;
g kawasan peruntukan permukiman; dan
h kawasan peruntukan lainnya.

a Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.357/MenHut-II/ 2004, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat hutan produksi seluas 466.090 Ha yang tersebar di Kabupaten Bangka Barat (77.841 Ha), Kabupaten Bangka (65.884 Ha), Kabupaten Bangka Tengah (84.990 Ha), Kabupaten Bangka Selatan (106.154 Ha), Kabupaten Belitung (40.377 Ha) dan Kabupate Belitung Timur (57.638 Ha). Sebagian hutan produksi ini mengalami penurunan luas hutan (deforetasi), sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.

b Kawasan Peruntukan Pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 ha kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan (seluas 355.453 ha), pertanian hortikultura (seluas 221.512 Ha), perkebunan (seluas 316.383 Ha) dan kawasan peternakan (seluas 10.102 Ha).

c Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas:

1.) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
2.) PPN Sungailiat
3.) PPN Tanjung Pandan*
4.) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)
5.) PPI Bangka Kota;
6.) PPI Permis;
7.) PPI Pulau Pongok;
8.) PPI Batubetumpang;
PPI Tanjung Sangkar;
9.) PPI Ketapang;

10.) PPI Batu Dinding Belinyu;
11.) PPI Kurau;
12.) PPI Manggar;
13.) PPI Muntok;
14.) PPI Batu Beriga
15.) PPI Sadai;
16.) PPI Selat Nasik;
17.) PPI Pulau Seliu;
18.) PPI Sungai Selan;
19.) PPI Tanjung Binga;
20.) PPI Toboali;
21.) PPI Selendang; dan
22.) PPI Dendang.

d Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Luasan kawasan peruntukan pertambangan dapat berkurang sesuai dengan perkembangan keadaan.

e Kawasan Peruntukan Industri

Arahan lokasi pengembangan kawasan industri di provinsi ini adalah:

1.) kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
2.) kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Belinyu di Kabupaten Bangka;
3.) kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
4.) kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkal Pinang;
5.) kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
6.) kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
7.) kawasan industri terpadu Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

f Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

1.) Wisata Alam, meliputi:
a) seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
b) kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di kabupaten/kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
c) kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
d) kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
e) taman wisata laut;
f) kawasan strategis pariwisata Tanjung Kelayang; serta

g) kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di kabupaten/kota.

2.) Wisata budaya, meliputi:

a) kawasan kota tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
b) kawasan situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
c) kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan/atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
d) kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;

3.) Wisata buatan, meliputi: kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

g Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 59.188 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland*) dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas.

h Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungai Liat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (air weapon range/AWR), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

Gambar II.5

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

12. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a) tata ruang di wilayah sekitarnya;
b) kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

a) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, meliputi:

1.) kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
2.) kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
3.) kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
4.) kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. A. S. Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5.) kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
6.) kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
7.) kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
8.) kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9.) kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
10.) kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
11.) kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12.) kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13.) kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14.) kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15.) kawasan lintas timur Pulau Bangka.

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

c) **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

Gambar II.6

Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

C. Wilayah Rawan Bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel II.10.

Tabel II.10

Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Kejadian	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Meninggal	Korban	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	(11)	(12)
Banjir Bandang/Rob/Bah	143 (67,77%)	3	19.019 KK/ 22 Jiwa	0	2	9.984

Kejadian	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Meninggal	Korban	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	(11)	(12)
Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11 (5,21%	4	111 KK	7	8	95
Di Laut/Pantai	6 (2,84%)	7	18 jiwa	0	0	0
Di sungai	0	0	0	0	0	0
Longsoran Tanah/Batu/Pasir	8 (3,79%)	10	20 jiwa	0	0	0
Kebakaran Hutan/Lahan	1 (0,47%)	0	0	0	0	0
Kebakaran Rumah/Perumahan	11 (5,21%)	0	8 KK/13 jiwa	9	2	2
Kebakaran Gedung Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Kantor/Sekolah swasta, warung/toko dan lainnya	7 (3,32%)	1	10 jiwa	4	0	2
Kabut Asap	0	0	0	0	0	0
Gempa Bumi (3 Kec)	15 (7,11%)	0	0	0	0	0
Bencana Sosial	2 (0,95%)	0	2 jiwa	0	0	0
Tersambar Petir	**7 (3,32%**	**2**	**24 jiwa**	**0**	**4**	**0**

Sumber: Data dan Informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.11

Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	banjir dan puting beliung	sedang
2	Bangka Tengah	banjir, pergerakan tanah	rendah
3	Bangka Selatan	banjir, puting beliung, pergerakan tanah	sedang, tinggi
4	Bangka Barat	banjir, puting beliung, pergerakan tanah	sedang
5	Belitung	banjir, puting beliung, pergerakan tanah	sedang
6	Belitung Timur	banjir, puting beliung, pergerakan tanah	rendah, sedang
7	**Pangkalpinang**	**banjir, puting beliung**	**rendah, sedang**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antra lain sebagai berikut.

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka).
2. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka).
3. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

Gambar II.7
Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



D. Demografi

Kondisi Demografis Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan Kesepakatan Pemuktahiran Data Kesehatan Tahun 2018 yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 mencapai 1.368.467 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,07 persen, menurun sebesar 0,04 persen bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2016 dengan rasio jenis kelamin 105,86 dan rasio ketergantungan 46,20.

Tabel II.12
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*
Demografi						
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
a. Laki-Laki	jiwa	682.653	697.897	713.223	728.580	743.931
b. Perempuan	jiwa	632.470	645.984	659.590	673.247	686.934
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	2,22	2,19	2,15	2,11	2,07
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	80	82	84	85	87
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	107,90	108	108,10	108,20	105,86
5. Rasio Ketergantungan	**persen**	**46,83**	**46,40**	**46,06**	**45,74**	**46,05**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Data 2017 diperoleh dari Pemutahiran Data Kesehatan Tahun 2018*

Penduduk terbanyak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 324.305 jiwa atau 22,66%, dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 124.587 jiwa atau 8,71% dari total penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang, 1.720 orang/km^2, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur 50 orang/km^2. Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada Tabel II.13

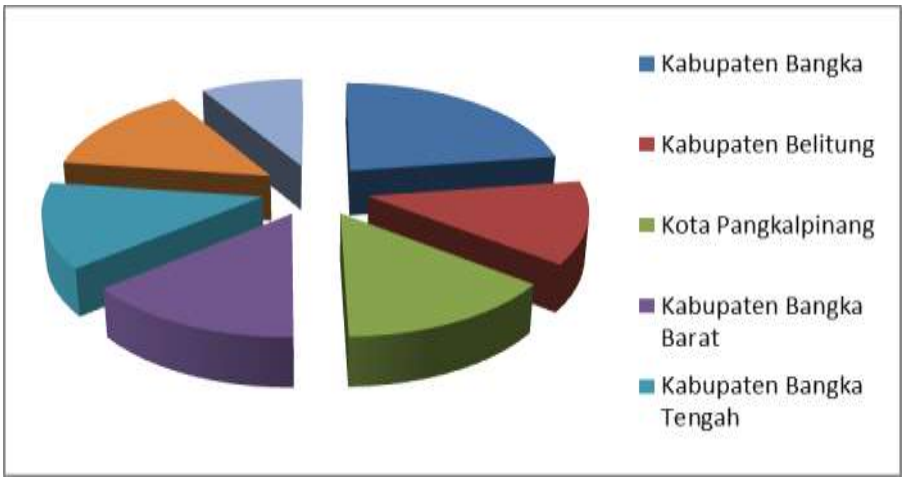
Tabel II.13
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (org/km^2)
	Km^2	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	324.305	23,10%	110
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	182.418	12,99%	80
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	204.392	13,43%	1.720
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	204.778	14,59%	73
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	188.603	14,37%	89

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (org/km²)
	Km²	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	201.782	14,56%	56
Kabupaten Belitung Timur	2.507,0	15,26%	124.587	8,87%	50
Luas Daratan	**16.424,23**	**20,10%**			
Luas Perairan	**65.301,00**	**79,90%**			
Prov.Kep.Bangka Belitung	**81.725,23**		**1.430.865**		**87**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Grafik II.1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 sebesar 105,86, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 85 jiwa per km² pada tahun 2016 menjadi 87 jiwa per km². Sementara itu, meskipun Penduduk Bangka Belitung saat ini didominasi usia produktif, namun rasio ketergantungan masih terhitung tinggi (46,05). Pada tahun 2017 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 27,12%, usia 15-64 tahun berjumlah 68,47%, dan usia 65+ tahun berjumlah 4,41 persen. Artinya saat ini di Bangka Belitung 2 orang usia produktif menanggung kurang dari 1 orang tidak produktif, atau dari 100 orang penduduk produktif harus menanggung beban tanggungan 46,05 orang penduduk usia nonproduktif. Angka rasio ketergantungan menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi yang agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi pembangunan di daerah.

Tabel II.14

Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (x1000)

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0-4	57.271	53.331	110.602	107,39%
2	5-9	67.373	63.440	130.813	106,20%
3	10-14	66.924	62.827	129.751	106,52%
4	15-19	57.019	54.804	111.823	104,04%
5	20-24	54.410	51.733	106.143	105,17%
6	25-29	60.678	59.389	120.067	102,17%
7	30-34	66.692	62.704	129.396	106,36%
8	35-39	64.354	58.088	122.442	110,79%
9	40-44	51.861	47.290	99.151	109,67%
10	45-49	41.760	38.644	80.404	108,06%
11	50-54	34.095	32.564	66.659	104,70%
12	55-59	29.622	28.136	57.758	105,28%
13	60-64	22.359	20.825	43.184	107,37%
14	65-69	13.591	13.171	26.762	103,19%
15	70-74	7.862	7.775	15.637	101,12%
16	74+	7.862	10.033	17.895	78,36%
JUMLAH		**703.733**	**664.754**	**1.368.487**	**105,86%**
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				**46,05**	

Sumber: Pemutahiran Data Kesehatan Tahun 2018

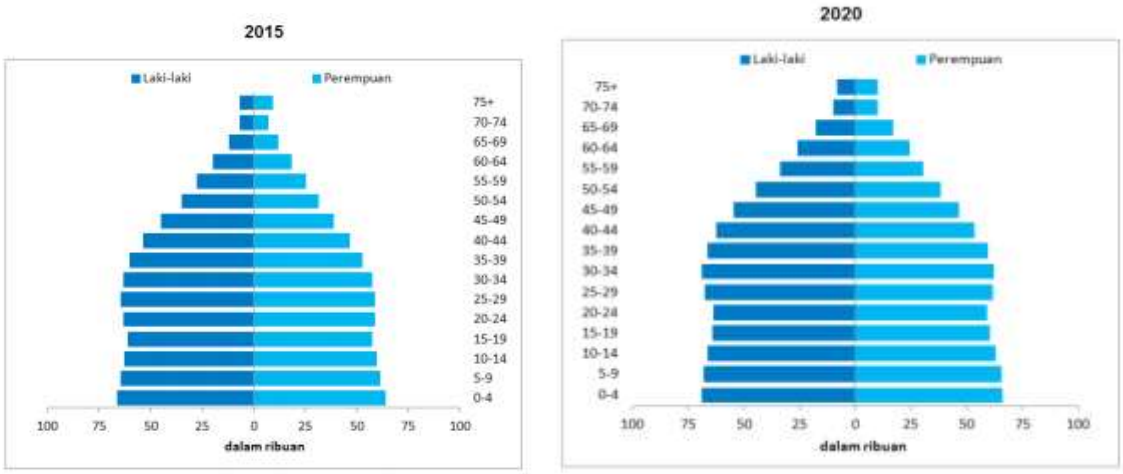
Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (United Nations population Fund), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (Expansive) (Gambar II.8), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi dimana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

Penduduk Bangka Belitung saat ini didominasi usia produktif, dengan angka ketergantungan 46,05. Pada tahun 2017 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 27,12%, usia 15-64 tahun berjumlah 68,47%, dan usia 65+ tahun berjumlah 4,41 persen. Artinya

di Bangka Belitung saat ini dalam bonus demografi dimana 2 orang usia produktif menanggung kurang dari 1 orang tidak produktif.

Grafik II.2

Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020



Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO 2013

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu.

Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2013-2017 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel II.15. berikut.

Tabel II.15

PDRB Tahun 2014 –2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

No.	PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

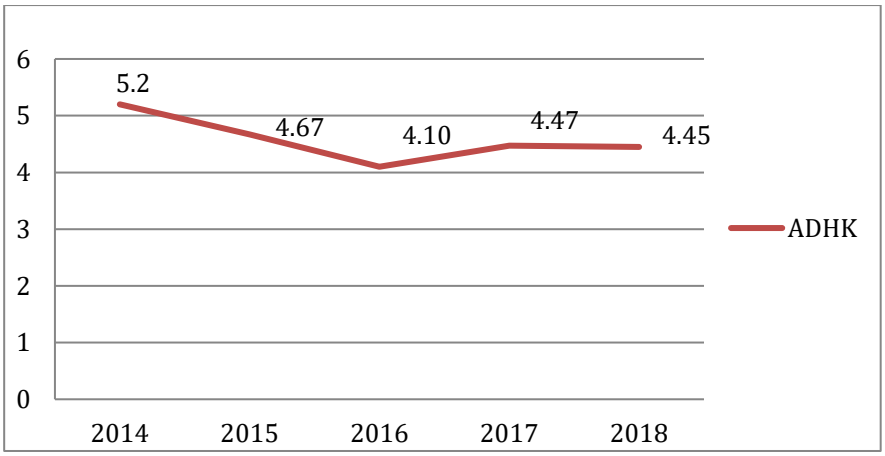
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Perekonomian Provinsi Kepuluan Bangka Belitung tahun 2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp73.069 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp52.212 miliar. Berdasarkan tabel II.15 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010.

Berdasarkan grafik II.3 menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45 persen melambat dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,47 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapanga usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selanjutnya PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Grafik II.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel II.16 terlihat bahwa perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2018 ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian meliputi (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (ii) Pertambangan dan Penggalian; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari ke empat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 sebesar Rp7.741,5 miliar mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp8.182,0 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel II.16

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014–2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalian	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik dan Gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estat	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7
Jasa lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
Produk Domestik Regional Bruto	**56.373,6**	**60.987,3**	**65.048,2**	**69.861,2**	**73.069,3**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.17

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp Miliar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557,7	8.254,3	8.743,5	9.116,9	9.083,8
Pertambangan dan Penggalian	6.230,2	6.354,1	6.458,09	6.491,1	6.633.04
Industri Pengolahan	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,4	11.363,05
Pengadaan Listrik dan Gas	31,5	34,4	38,9	43,7	45.864
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,3	7,7	8,1	8,6	9.406
Konstruksi	3.414,7	3.552,4	3.760,1	4.021,6	4.252,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.727,7	7.259,8
Transportasi dan Pergudangan	1.484,8	1.570,8	1.662,3	1.752,3	1.892,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,5	1.136,5
Informasi dan Komunikasi	740,2	790,9	849,0	926,9	1.002,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	728,3	766,6	807,9	860,0	881,3
Real Estat	1.312,6	1.403,9	1.442	1.494,8	1.572,5
Jasa Perusahaan	108,1	115,7	120,3	120,4	127,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.014,4	2.149,8	2.337,1	2.478,7	2.604,2

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Wajib					
Jasa Pendidikan	903,7	964,9	1.060,0	1.139,4	1.183,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475,3	500,6	533,8	559,6	605,39
Jasa lainnya	261,0	281,7	304,6	334,4	354,9
Produk Domestik Regional Bruto	**42.190,9**	**44.159,4**	**45.962,3**	**47.850,8**	**50.007,751**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dengan demikian, distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.18, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,45 persen.

Tabel II.18
Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,40	19,22	19,78	20,16	18,79
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,09	13,52	12,68	11,89	11,69
C.	Industri Pengolahan	23,99	22,84	21,13	20,11	20,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,08	0,08	0,10	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,21	8,36	8,63	8,84	9,12
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,24	13,51	14,16	14,81	15,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,70	3,77	4,04	4,06	4,15
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,34	2,39	2,47	2,48
J.	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,51	1,54	1,59	1,62
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,77	1,80	1,83	1,83
L.	Real Estate	3,18	3,23	3,22	3,24	3,27
M, N.	Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	5,37	5,69	5,81	5,88
P.	Jasa Pendidikan	2,33	2,42	2,69	2,86	2,80
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,17	1,17	1,21
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,63	0,66	0,70	0,76	0,78
	PDRB	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.19, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 65,25 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 20,2 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder, sektor primer yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,29 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 11,02 persen, Sedangkan untuk

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor tersier memiliki kontribusi sekitar 15,74 persen.

Tabel II.19
Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	18,69	19,03	19,06	18,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,77	14,39	14,06	13,57	11,02
C.	Industri Pengolahan	24,04	23,26	22,63	22,29	20,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,09	8,04	8,18	8,40	9,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,86	13,90	13,93	14,07	15,74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,56	3,61	3,66	4,19
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,27	2,25	2,27	2,53
J.	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,79	1,85	1,94	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,74	1,74	1,80	1,83
L.	Real Estate	3,11	3,18	3,14	3,12	3,38
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,29
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,87	5,08	5,20	6,17
P.	Jasa Pendidikan	2,14	2,19	2,31	2,39	2,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,13	1,16	1,17	1,22
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,62	0,64	0,66	0,71	0,82
	PDRB	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.20 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB kabupaten/kota tahun 2013–2017 atas dasar harga berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren menunjukkan terus mengalami peningkatan. Besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karena itu, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel II.20
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	9.139.67	10.174.80	11.001.41	11.771.68	12.807.94
Kabupaten Bangka Barat	9.538.46	10.686.71	11.473.70	12.249.17	13.221.42
Kabupaten Bangka Tengah	6.198.20	6.690.27	7.056.17	7.468.64	7.971.97
Kabupaten Bangka Selatan	5.820.02	6.435.91	6.947.75	7.541.29	8.165.16
Kabupaten Belitung	6.000.33	6.731.14	7.328.17	8.001.86	8.738.19
Kabupaten Belitung Timur	5.082.82	5.666.81	6.125.94	6.604.09	7.151.86
Kota Pangkalpinang	8.414.61	9.359.68	10.234.63	11.116.23	12.113.98
Provinsi Kepulauan Bangka	50.388,4	5.6373,6	60.992,1	69.861,2	73.069,3

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belitung					
Nasional	**9.546.134.0**	**10.569.705.3**	**11.531.716.9**	**12.406.809.8**	**13.588.797.30**

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.21, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.21
Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.769.12	8.143.12	8.512.42	8.906,23	9.355.33
Kabupaten Bangka Barat	7.972.79	8.349.26	8.769.64	9.189.73	9.673.06
Kabupaten Bangka Tengah	5.178.28	5.255.77	5.271.87	5.432.80	5.620.43
Kabupaten Bangka Selatan	4.852.97	5.068.27	5.284.64	5.511.77	5.763.78
Kabupaten Belitung	4.934.00	5.167.07	5.400.94	5.669.54	5.969.54
Kabupaten Belitung Timur	4.258.05	4.487.30	4.675.21	4.873.90	5.110.24
Kota Pangkalpinang	6.951.02	7.247.50	7.555.02	7.945.99	8.358.48
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.104.9	42.190.9	44.159.4	49.986.8	52.212
Nasional	**7.727.083.4**	**8.156.497.8**	**8.564.866.6**	**8.982.511.3**	**9.912.749.30**

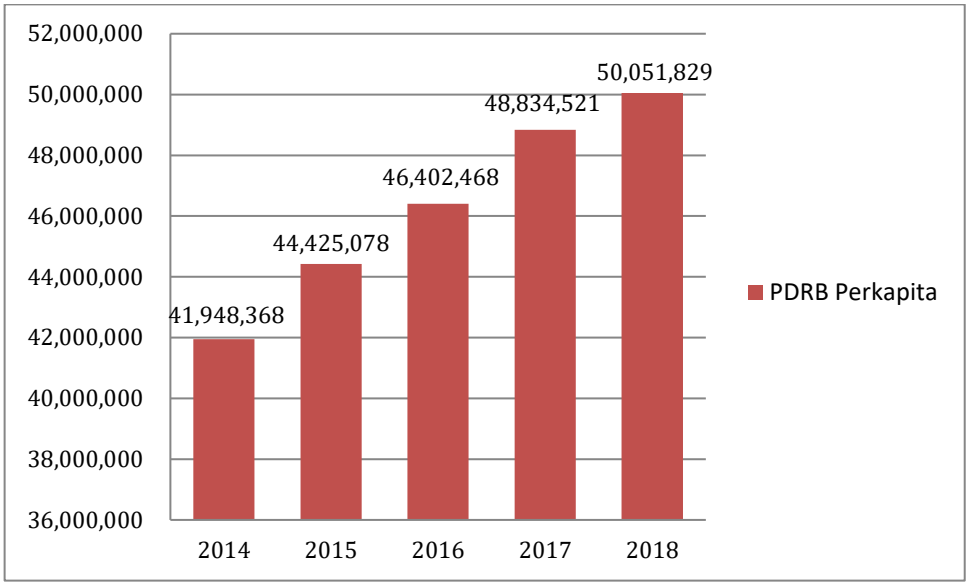
Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

B. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp41.948.368 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnnya menjadi Rp50.051.829. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

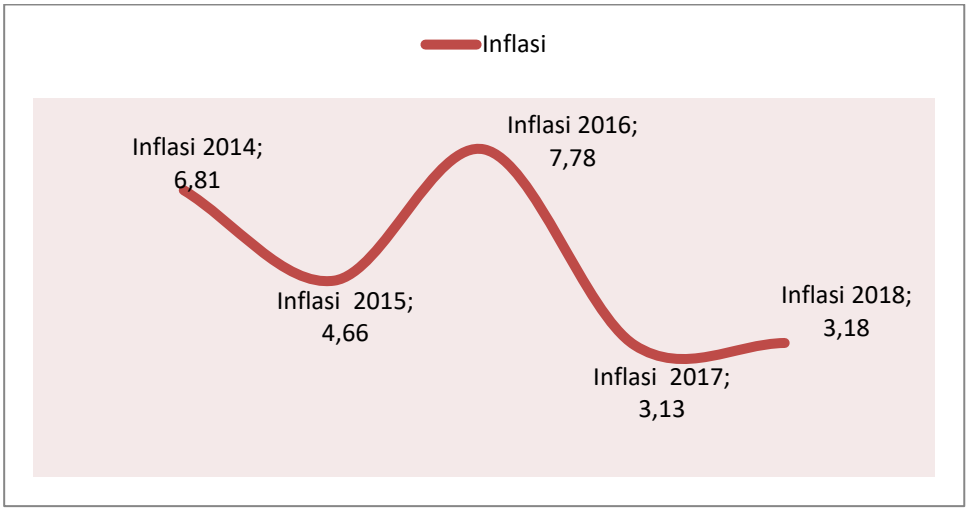


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2019

C. Tingkat Inflasi

Berdasarkan grafik II.5 menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2014-2018 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai 3,18 persen, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,13 persen. Semenjak tahun 2017 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam level yang ideal yaitu 3-4 persen.

Grafik II.5
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada semua kelompok pengeluaran. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2018 kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangsih terbesar adalah bahan makanan sebesar 0,87 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang paling kecil sumbangan/andilnya adalah kesehatan sebesar 0,11 persen.

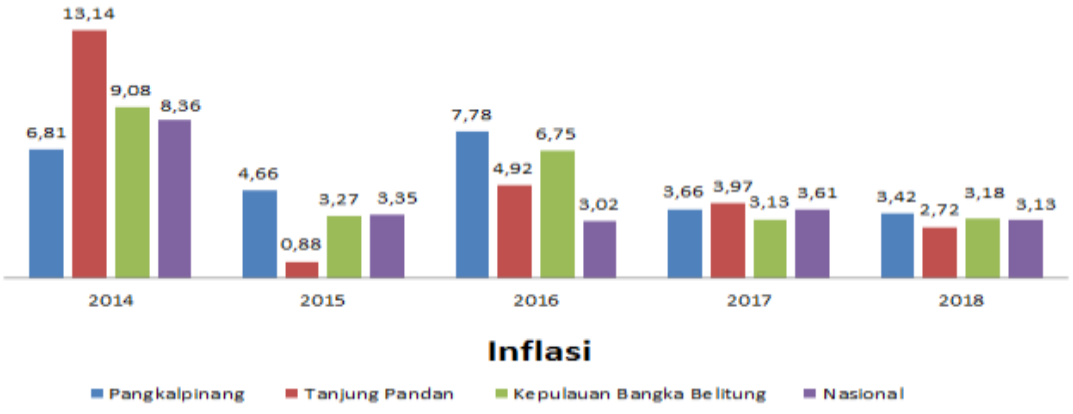
Tabel II.22
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	**6,81**	**4,66**	**7,78**	**3,13**	**3,18**
1. Bahan Makanan	3,39	6,63	13,49	1,66	0,87
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,63	7,92	4,77	2,90	0,67
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,85	3,74	3,59	5,63	0,62
4. Sandang	6,61	2,60	7,63	2,06	0,13
5. Kesehatan	8,13	5,50	4,31	3,61	0,11
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	6,65	8,62	4,04	3,36	0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	6,98	-2,04	11,42	2,09	0,53

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tingkat inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional selama tahun 2014-2018 tren bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai capaiannya di atas nasional dan tetap terjaga sesuai koridornya 3-4 persen. Kota Pangkalpinang tahun 2018 merupakan wilayah di Bangka Belitung yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi sebesar 3,42 persen. Selanjutnya inflasi di Bangka Belitung masih relatif terkendali yang didukung oleh koordinasi yang kuat antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan instansi terkait dalam mengendalikan harga-harga bergejolak *(volatile food).* Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik II.6 .

Grafik II.6
Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2018 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

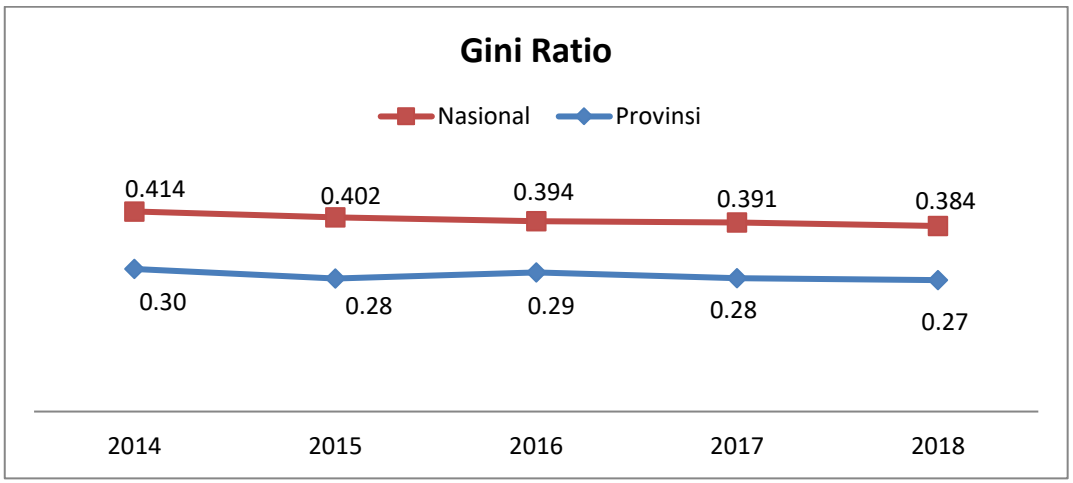


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

D. Indeks Gini

Berdasarkan Grafik II.7 nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2014-2018 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai Gini Ratio terendah se-Indonesia yaitu sebesar 0,272. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta memiliki Gini Ratio tertinggi yaitu sebesar 0,422. Gini Ratio di daerah perkotaan di Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan di Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 0,222. Berdasarkan daerah tempat tinggal ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan yang terjadi di perdesaan.

Grafik II.7
Gini Ratio Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



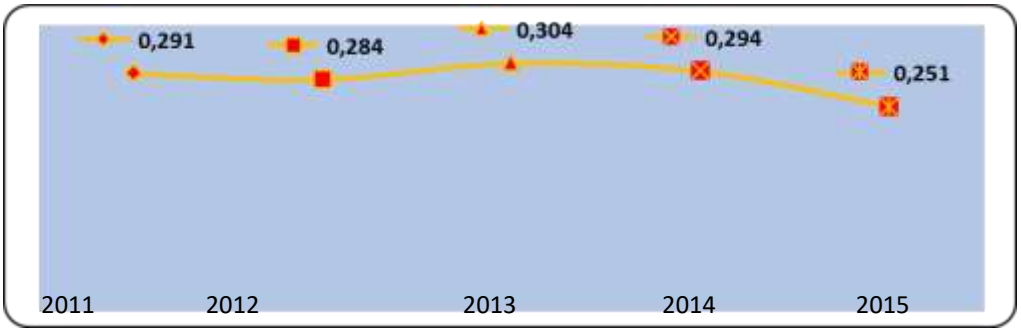
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

E. Indeks Ketimpangan *Williamson*

Pada periode 2011 sampai 2015 Indeks Ketimpangan *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun pada periode akhir. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284 dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,294 dan kembali turun menjadi 0,251 di akhir periode 2015. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.8 berikut.

Grafik II.8

Indeks *Williamson* Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda tahun 2016, data diolah.

Data di atas menggambarkan pembangunan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1) Angka melek huruf

Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berada pada 97,63 persen, artinya sekitar 98 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf ini merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel II.23

Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 s.d. 2017

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	96,8	98,24	97,87	97,77	97,87
2	Bangka Barat	94,08	95,15	96,36	96,51	96,36
3	Bangka Tengah	96,81	97,29	97,78	97,47	95,44
4	Bangka Selatan	94,60	95,71	95,44	96,84	97,78
5	Belitung	97,65	98,68	98,86	97,35	98,86
6	Belitung Timur	97,63	98,92	98,77	98,28	98,77
7	Kota Pangkalpinang	98,3	99,26	98,60	99,41	98,60
	Provinsi Kep. Bangka Belitung	**96,44**	**97,60**	**97,63**	**97,66**	**97,63**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.24 berikut.

Tabel II.24
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.356	97,87
2	Kabupaten Bangka Barat	133,731	138,783	96,36
3	Kabupaten Bangka Selatan	129,505	135,693	95,44
4	Kabupaten Bangka Tengah	124,504	127,331	97,78
5	Kabupaten Belitung	126,995	128,459	98,86
6	Kabupaten Belitung Timur	86,9828	88,066	98,77
7	Kota Pangkalpinang	142,962	144,992	98,60
	Jumlah	**963,278**	**986,680**	**97,63**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sementara Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia *a* pada tahun *t* dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia *a* dan tahun *t*. Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8,04. Meskipun grafiknya selama 2013-2017 mengalami peningkatan, namun masih di bawah rata-rata nasional 8,42. Dari 7 kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Pangkalpinang (9,66) dan Kabupaten Belitung Timur (8,51) yang angka di atas rata-rata nasional. Kabupaten Bangka Selatan memiliki RLS penduduk usia 15 tahun ke atas terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (6,63). (lihat Table II.25)

Tabel II.25

Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/kota	Rata - rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bangka	8	7.89	7.96	8.38	8,19
2	Belitung	8.25	7.99	8.27	8.14	8,11
3	Bangka Barat	6.80	7.19	7.43	7.56	7,06
4	Bangka Tengah	7.15	7	6.97	7.17	6,79
5	Bangka Selatan	6.40	6.40	5.75	6.63	6,12
6	Belitung Timur	7.46	7.98	7.86	7.95	8,00
7	Pangkalpinang	9.52	9.67	9.99	9.76	9,77
Jumlah		**7.70**	**7.76**	**7.79**	**7,62**	**7,78**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan (tidak termasuk tahun mengulang). Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel II.26

Angka Harapan Sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bangka	12.01	12.33	12.36	12.37	12.58
2	Belitung	10.60	10.77	11.32	11.47	11.51
3	Bangka Barat	10.70	10.99	11.48	11.49	11.50
4.	Bangka Tengah	11.10	11.40	11.72	11.73	11.74
5.	Bangka Selatan	10.45	10.86	10.88	11.25	11.34
6.	Belitung Timur	10.71	10.94	11.28	11.46	11.48
7.	Pangkalpinang	12.69	12.74	12.76	12.77	12.78
	Provinsi	**10.96**	**11.18**	**11.60**	**11.71**	**11.83**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Angka Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walau menunjukkan peningkatan dari 10,96 pada tahun 2013 menjadi 11,83 pada tahun 2017, tetapi masih dibawah Angka Harapan Sekolah (HLS) Indonesia dengan angka 12,85. Dan

apabila dilihat dari peringkat secara nasional, posisi HLS berada pada posisi 2 terbawah (urutan ke-33 dari 34 provinsi), hanya sedikit lebih tinggi sebesar 1,29 dari angka daerah posisi terbawah. Saat ini Angka Harapan Sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi di Kota Pangkalpinang (12,78), terendah di kabupaten Bangka Selatan (11,34). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap angka IPM secara keseluruhan.

3) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah angka yang menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Penyebab anak putus sekolah antara lain karena masalah biaya, ingin membantu orang tua dengan bekerja, atau penyebab lainnya seperti menikah dini. Kasus anak putus sekolah berdampak seperti siklus. Selain berkorelasi dengan persoalan kemiskinan, putus sekolah juga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu seterusnya karena tingkat pendapatan rendah, kemampuan untuk mengakses ke pendidikan formal pun sulit dicapai.

Tabel II.27
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (%)								
	2012	2013	2014	2015			2016		
				SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Bangka	n/a	n/a	n/a	0,54	8,75	21,63	0,60	8,07	3,65
Belitung	n/a	n/a	n/a	1,05	10,39	16,62	0,00	5,62	3,76
Bangka Barat	n/a	n/a	n/a	0,21	6,64	16,08	0,77	13,47	6,67
Bangka Tengah	n/a	n/a	n/a	1,34	6,25	11,72	0,46	6,32	6,41
Bangka Selatan	n/a	n/a	n/a	0,83	7,46	21,93	0,37	7,98	23,05
Belitung Timur	n/a	n/a	n/a	2,27	12,58	9,45	0,00	7,68	13,01
Kota Pangkal Pinang	n/a	n/a	n/a	0,00	4,25	11,51	0,00	7,73	3,67
Kep. Bangka Belitung	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**0,77**	**7,87**	**15,92**	**0,37**	**8,11**	**7,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

APTS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi terutama untuk tingkat Sekolah Menengah yang dapat diamati pada tabel diatas. Tahun 2016 APT SMP meningkat dari 7,87 di tahun 2015 menjadi 8,11 persen di tahun 2016 berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 8 sampai 9 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 8 anak yang putus

sekolah. Sementara itu APK SMA menunjukkan penurunan cukup besar dari 15,92 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen ditahun 2016, namun demikian angka ini juga terbilang tinggi mengingat secara rata-rata dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 sampai 8 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 7 anak yang putus sekolah. APTS SD sangat baik dari 0,77 persen tahun 2015 menjadi 0,37 persen di tahun 2016 yang berarti bahwa secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah.

Untuk tingkat kabupaten/kota, APTS cukup tinggi terutama untuk tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2016, APTS tertinggi SMP ada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 13,47 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 13 sampai 14 anak putus sekolah untuk rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun. Sementara kabupaten lainnya berkisar antara 5 sampai 8 dari rata-rata 100 anak yang putus sekolah. sementara untuk APTS SMA, persentase tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 23,05 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 23 sampai 24 anak putus sekolah dan cenderung 23 anak putus sekolah usia 16-18 tahun darai rata-rata 100 anak di usia itu. Disusul Kabupaten Belitung Timur sebesar 13,01 persen yang berarti berarti secara rata-rata dari 100 anak yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 13 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Sementara di Kota Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan APTS SMA cukup rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu masing-masing 3,76 persen dan 3,67 persen yang menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak merata untuk SMA yang berlokasi jauh dari pusat kota

4) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

APS juga merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia tertentu di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel II.28

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	**APS 16-18 tahun**	**65,9**	**52,13**	**51,37**	**54,58**	**52,52**

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada Table II.28 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedang untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah. Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah, artinya hampir separuh (47,48 persen) penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

5) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari

100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel II.29
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI/Paket A**					
	APK SD/MI/Paket A	113,22	111,07	111,75	110,58	104,63
	APM SD/MI/Paket A	96,49	96,66	96,75	97,42	91,29
2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	APK SMP/MTs/Paket B	82,52	87,6	84,38	84,53	83,2
	APM SMP/MTs/Paket B	71,83	72,42	72,75	73,02	60,18
3.	**SMA/MA/SMK/Paket C**					
	APK SMA/MA/SMK/Paket C	75,51	76,41	79,1	82,88	76,71
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	56,93	57,02	57,22	57,69	52,52

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai jenjang pendidikan walau menunjukkan peningkatan dari 2013-2017 (lihat Table II.29). Dari besaran APK dan APM yang dicapai, baru APK & APM pada jenjang SD/MI yang dikatakan berhasil. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan tidak saja belum semua anak bersekolah, namun juga banyak anak bersekolah kurang atau lebih dari usia ideal. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, atau berdomisili di luar zona daerah di mana sekolah berada.

a. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Tabel II.30-32 di bawah ini. APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, dan APK SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014.

Tabel II.30

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014/2018 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SD/MI/Paket A				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Bangka	115,11	111,67	110,35	107,72	102,43
2	Belitung	109,53	103,33	101,44	98,65	97,67
3	Bangka Barat	116,77	112,71	110,7	108,3	106,53
4.	Bangka Tengah	115,64	111,6	110,21	107,77	107,69
5.	Bangka Selatan	108,67	114,44	112,17	110,51	109,64
6.	Belitung Timur	117,44	104,64	102,2	98,45	97,4
7.	Pangkal pinang	118,32	115,74	113,77	113,71	108,68
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**114,38**	**111,11**	**109,3**	**107,11**	**104,63**
Indonesia		**109,05**	**107,96**	**106,4**	**105,89**	**91,13**

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

Secara keseluruhan pada tahun 2018, APK SD/MI di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikatakan berhasil. Artinya anak berusia SD/MI telah bersekolah seluruhnya. Dan apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi APK SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (104,63) masih di atas APK Nasional (91,13).

Tabel II.31

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014/2018 menurut Kabupaten/Kota/ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SMP/MTs/Paket B				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Bangka	96,72	97,05	98,08	99,71	81,51
2	Belitung	97,92	98,46	99,32	100,9	93,08
3	Bangka Barat	95,56	96,23	97,2	101,93	86,72
4.	Bangka Tengah	91,32	92,14	93,67	94,82	72,9
5.	Bangka Selatan	77,36	78,03	78,47	79,21	72,97
6.	Belitung Timur	97,24	97,88	98,77	100,53	87,77
7.	Pangkal pinang	99,91	100,25	100,42	101,44	93,08
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**93,39**	**93,98**	**94,82**	**96,54**	**83,2**
Indonesia		**76,35**	**100,72**	**101,05**	**102,08**	**76,35**

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, APK tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (93,08) dan Kabupaten Belitung (93,08), APK terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Tengah (72,9). Dari 7 kabupaten/kota, 5 kabupaten/kota memiliki APK di atas rata-rata nasional, sementara dua kabupaten yaitu Kabupaten Bangka tengah dan Kabupaten Bangka Selatan APK nya masih di bawah rata-rata nasional. Sementara untuk tingkat provinsi, APK Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih di atas rata-rata nasional (lihat Tabel II.32).

Tabel II.32

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014/2018 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

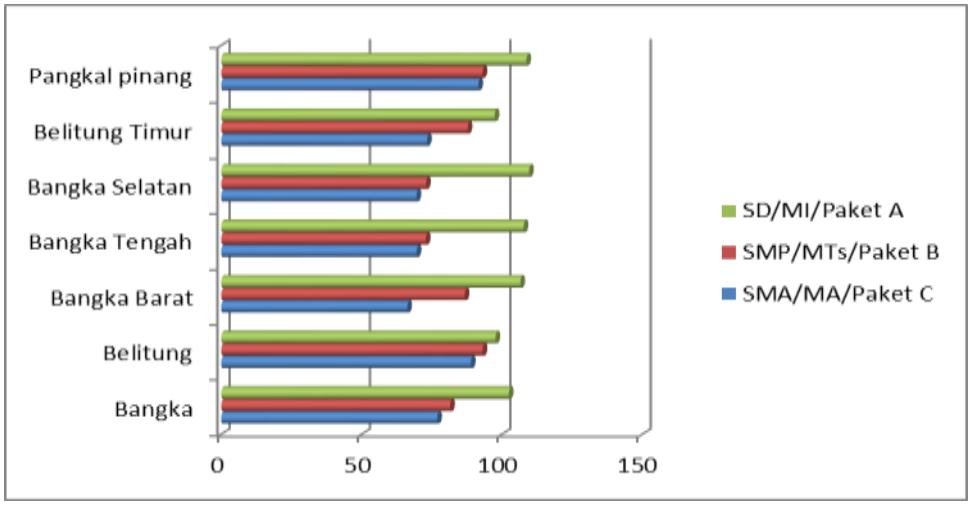
No	Kabupaten/Kota	SMA/MA/Paket C				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Bangka	68,17	71,76	74,53	80,42	76,92
2	Belitung	78,48	82,47	85,12	93,36	88,94
3	Bangka Barat	54,69	59,56	62,19	68,71	66,28
4.	Bangka Tengah	59,51	65,2	68,57	72,82	69,61
5.	Bangka Selatan	53,34	58,21	61,04	68,3	69,57
6.	Belitung Timur	54,34	60,03	63,04	73,66	73,3
7.	Pangkal pinang	86,47	90,82	93,21	96,16	91,55
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**65,9**	**70,57**	**73,13**	**79,34**	**76,71**
Indonesia		**75,53**	**76,45**	**81,95**	**86,94**	**77,77**

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

Untuk Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (91,55), dan terendah Kabupaten Bangka Barat (66,28). Dari 7 kabupaten/kota, hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata provinsi (76,71) yaitu Kabupaten Bangka (76,92), Kota Pangkalpinang (91,55) dan Kabupaten Belitung (88,94), dan hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang APK SMA/MA/SMK/Paket C nya di atas rata-rata nasional (77,77), yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. Sementara 5 kabupaten lainnya memiliki APK SMA/MA/SMK/Paket C di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

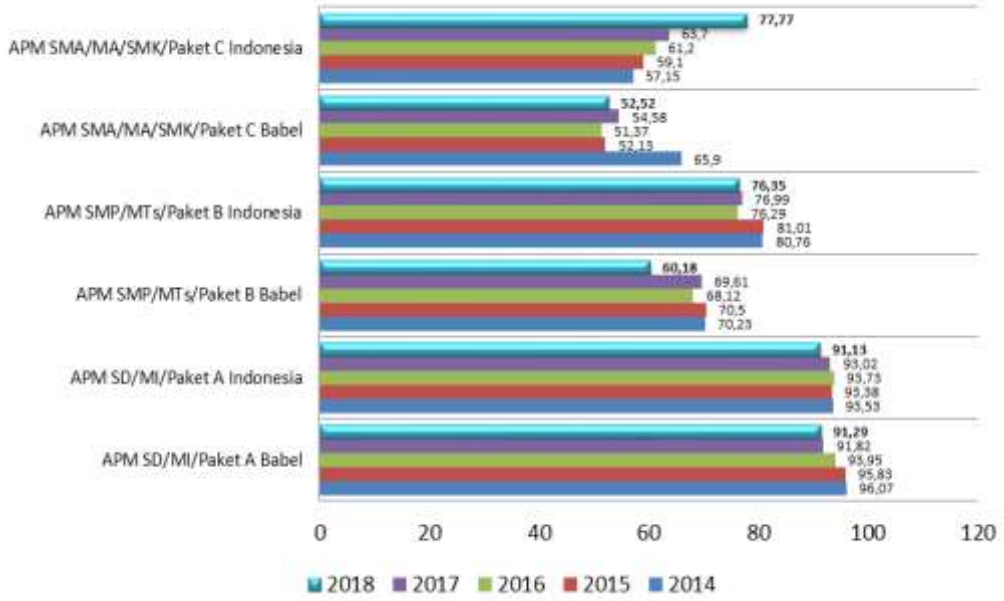
Pada tahun 2018, khusus capaian kabupaten/kota, SMA/MA/SMK/Paket C tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (91,55), terendah Kabupaten Bangka Barat (66,28). APM SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (93,08) dan Kabupaten Belitung (93,08), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Tengah 72,9. Sementara untuk jenjang APK SD/MI/Paket A capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan (109,64), terendah oleh Kabupaten Belitung Timur (97,4).

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Grafik II.10 dan Tabel II.33 di bawah ini. APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, dan APM SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014, berbeda dengan perkembangan APM Nasional, yang menunjukkan tren meningkat pada semua jenjang pendidikan dari 2014. Pada tahun 2018, hanya APM SD/MI/Paket A yang berada di atas rata-rata Nasional, sementara APM SMP/MTs/Paket B dan APM SM/SMK/MA/Paket C, capaiannya di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.10

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018 (diolah)

Tabel II.33

Perkembangan APM Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	*Uraian*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
	APM SD/MI/Paket A	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
	APM SMP/MTs/Paket B	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52

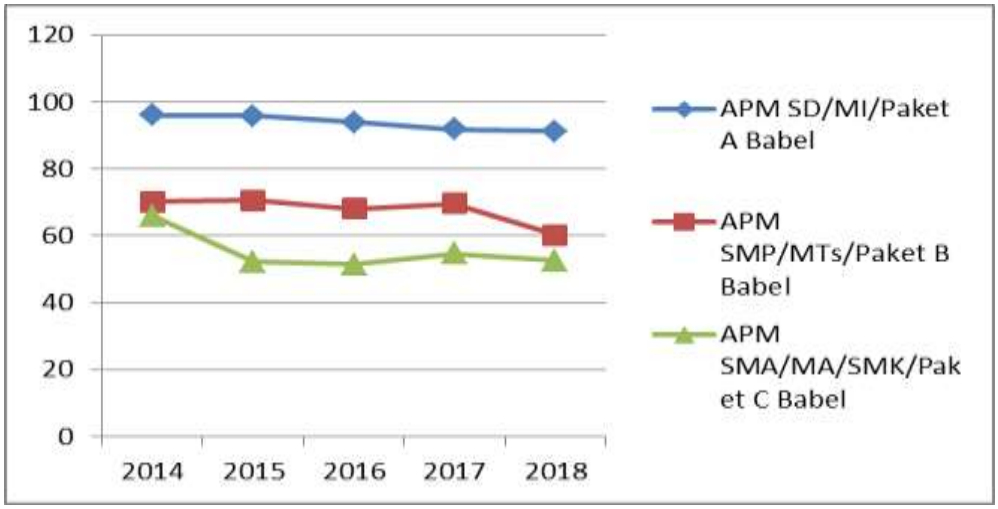
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada kurun waktu tahun 2014-2018 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C, seluruhnya menunjukkan tren

menurun (lihat Grafik II.11).

Gafik II.11

Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Tabel II.34

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI/ Paket A	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs/ Paket B	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/ SMK/ Paket C	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	31.354	35.464	88,41	9.649	16.826	57,35	8.089	15.530	52,09
2	Belitung	16.474	19.732	83,49	5.786	8.789	65,83	4.890	8.190	59,71
3	Bangka Barat	19.681	21.319	92,32	5.779	9.295	62,17	4.459	9.944	44,84
4.	Bangka Tengah	22.050	23.154	95,23	5.775	10.435	55,15	4.923	10.120	48,65
5.	Bangka Selatan	21.468	22.101	97,14	6.472	11.585	55,87	4.980	9.834	50,64
6.	Belitung Timur	11.123	13.254	83,92	3.915	6.084	64,35	3.481	7.076	49,19
7.	Pangkalpinang	20.986	21.776	96,37	7.059	10.786	65,45	6.941	11.206	61,94
Prov. Kep. Bangka Belitung		**143.136**	**156.800**	**91,29**	**44.415**	**73.800**	**60,8**	**37.763**	**71.900**	**52,52**
Indonesia		**22.494.720**	**27.843.400**	**91,13**	**7.633.842**	**13.440.400**	**76,35**	**7.418/348**	**13.305.400**	**77,77**

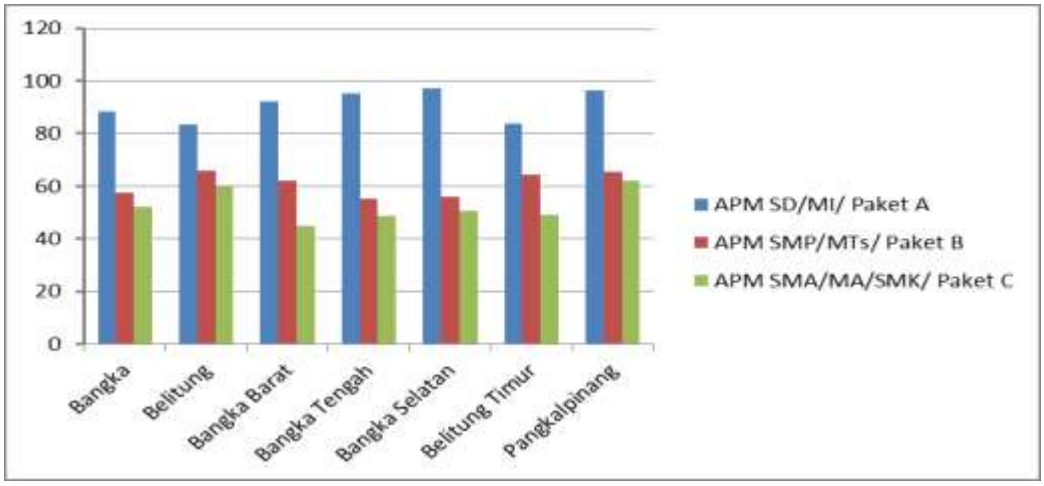
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berada di

atas rata-rata nasional, di mana APM SD/MI/Paket A sebesar 91,29, APM nasional (91,13), dan APM SMP/MTs/Paket B sebesar 83,2, APM nasional (76,35). Hanya APM SMA/MA/SMK (52,52) yang berada jauh di bawah APM nasional (77,77).

Grafik II.12

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Khusus capaian kabupaten/kota, APM SD/MI/Paket tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan (97,14), terendah Kabupaten Belitung (83,49), APM SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung (65,83), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Tengah (55,15). Sementara untuk jenjang APM SMA/MA/SMK APM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (61,94), terendah oleh Kabupaten Bangka Barat (44,84).

B. Kesehatan

1) Angka kelangsungan bayi hidup

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel II.35

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2014-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	5,35	6,73	7,54	9,58	7,43	8,23	1,52	2,37
2	Belitung	12,91	13,81	11,29	12,26	12,17	14,02	10,04	12,12
3	Bangka Tengah	5,74	6,74	6,46	7,86	6,46	6,46	5,11	6,01
4	Bangka Barat	7,61	7,87	7,37	8,38	6,63	7,14	6,52	8,35

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Bangka Selatan	7,37	8,42	6,28	7,38	5,85	7,52	1,81	2,41
6	Belitung Timur	10,22	11,15	8,25	8,25	6,71	8,62	3,98	1,99
7	Kota Pangkalpinang	2,92	3,16	3,38	3,38	6,33	6,33	3,11	3,59
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	6,92	7,78	7,05	8,13	7,22	8,07	4,20	5,03

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2014–2017 di kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan menurun. Untuk Tahun 2017 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 10,04 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,12. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka kematian bayi sebesar 4,20 dan balita sebesar 5,03 pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 di mana angka kematian bayi sebesar 7.22 dan balita sebesar 8.07.

2) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 69,95 tahun. UHH tertinggi masih berada di Kota Pangkalpinang 72,64 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur 71,13 tahun, Kabupaten Bangka 70,56 tahun, dan Kabupaten Belitung 70,38 tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,49 tahun, Kabupaten Bangka Barat 69,56 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,13 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.36
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,45	70,47	70,48	70,52	70,56
Belitung	70,20	70,22	70,32	70,38	70,44
Bangka Barat	69,44	69,46	69,47	69,52	69,56
Bangka Tengah	69,95	69,98	70,28	70,38	70,49
Bangka Selatan	66,51	66,56	66,86	66,99	67,13
Belitung Timur	71,01	71,03	71,23	71,30	71,37
Pangkalpinang	72,29	72,31	72,51	72,57	72,64
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**69,64**	**69,72**	**69,88**	**69,92**	**69,95**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

3) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebanyak 21 orang menurun dari tahun 2016 sebanyak 24 orang. Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia, infeksi dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.37 berikut.

Tabel II.37
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	7	12	6	4
Belitung	4	3	4	6
Bangka Barat	6	6	5	4
Bangka Tengah	4	2	2	0
Bangka Selatan	4	3	0	2
Belitung Timur	1	1	2	1
Pangkalpinang	2	4	5	4
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**28**	**31**	**24**	**21**

Sumber: Pemutahiran Data Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2014 s.d. 2018

4) Bayi dengan Gizi buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun, akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak, serta disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Berikut ini pada Tabel II.38 menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan 2017, di mana untuk tahun 2017 kasus Gizi Buruk paling tinggi di Kota Pangkalpinang dengan 17 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung dengan 6 kasus.

Tabel II.38
Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
		BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	N.A	N.A	195	26	179	16	169	7
2	Belitung	N.A	N.A	143	3	137	7	158	6

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
		BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Bangka Tengah	N.A	N.A	107	10	128	6	183	8
4	Bangka Barat	N.A	N.A	171	13	182	14	142	10
5	Bangka Selatan	N.A	N.A	119	10	128	7	125	10
6	Belitung Timur	N.A	N.A	123	6	117	4	115	13
7	Kota Pangkalpinang	N.A	N.A	113	10	117	21	145	17
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**N.A**	**N.A**	**971**	**78**	**988**	**75**	**1.037**	**71**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

BBLR adalah neonatus dengan berat badan lahir pada saat kelahiran kurang dari 2500 gram (sampai 2499 gram) tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Untuk keperluan bidan di desa berat lahir diterima dalam 24 jam pertama setelah lahir. Terdapat 2 penyebab kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR), yaitu karena umur kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan lebih rendah dari semestinya, sekalipun umur kehamilan cukup atau kombinasi keduanya.

5) Persentase *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berikut ini pada Grafik II.13 menjelaskan kondisi persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2017, dengan Gizi Buruk paling tinggi di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 14,3%, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 7,5 %.

Grafik II.13

Persentase Bayi Kurus dan Stunting Tahun 2017 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Buku Saku Nasional PSG Tahun 2017

6) Penyakit Menular

Perkembangan jumlah kasus penyakit menular cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel II.39
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	HIV	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	70	62	3.904	785	0,05
2	Belitung	31	2	2.552	435	0,01
3	Bangka Barat	34	50	3.706	165	0,24
4	Bangka Tengah	13	87	4.272	212	0,00
5	Bangka Selatan	8	45	3.746	219	0,16
6	Belitung Timur	3	41	4.439	344	0,00
7	Kota Pangkalpinang	111	52	604	117	0,01
	Kepulauan Bangka Belitung	**270**	**339**	**23.223**	**2.277**	**0,24**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Kasus tertinggi adalah diare (26.938 kasus). Sementara kasus HIV terendah, tetapi jumlah secara absolute relative sudah besar.

7) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,25 persen pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan tahun 2014 menjadi sebesar 4,97 persen dan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 5,30 persen. Kenaikan ini cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas.

Tabel II.40
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	67,2	74,1	72,8	74.1	76,3
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	469.814	488.701	534.229	587.530	631.467
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,60	0,67	0,67	0,49	0,69

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September 2018

Tabel II.41
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,47	3,04	2,77	2,67	3.00
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,97	6,84	6,83	7,57	7.92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Memperhatikan Tabel II.41, sepanjang periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sebesar 3% dan 7,92% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana Tingkat Kemiskinan Kota 2,67% dan Tingkat Kemiskinan Desa 7,57%. Disamping itu, kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.42
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47
Belitung	7,36	8,38	7.85	7,77	7,56
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05
Bangka Tengah	3,27	5,67	5,64	6,07	5,81
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06
Kota Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95
Kepulauan Bangka Belitung	**4,97**	**5,40**	**5,22**	**5,20**	**5,25**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.42, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel II.43 berikut.

Tabel II.43
Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 menurut Provinsi di Pulau Sumatera
(ribu jiwa)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	855,71	837,42	859,41	841,31	829,80
Sumatera Utara	1.390,80	1.360,60	1.508,14	1.452,55	1.320,57
Sumatera Barat	380,63	354,74	349,53	376,51	359.99
Riau	522,53	498,28	562,92	501,59	496.39
Jambi	281,57	281,75	311,56	290,81	278.61
Sumatera Selatan	1108,21	1.085,80	1.112,53	1.096,50	1086.76
Bengkulu	320,41	316,50	322,83	325,60	302.62
Lampung	1134,28	1.143,93	1.100,68	1.139,78	1083.74
Kepulauan Bangka Belitung	70,90	67,23	66,62	71,07	76.20
Kepulauan Riau	125,02	124,17	114,83	119,14	128.43

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Grafik II.14, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain yaitu 5,3 % pada tahun 2017. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel II.44
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2013-2017

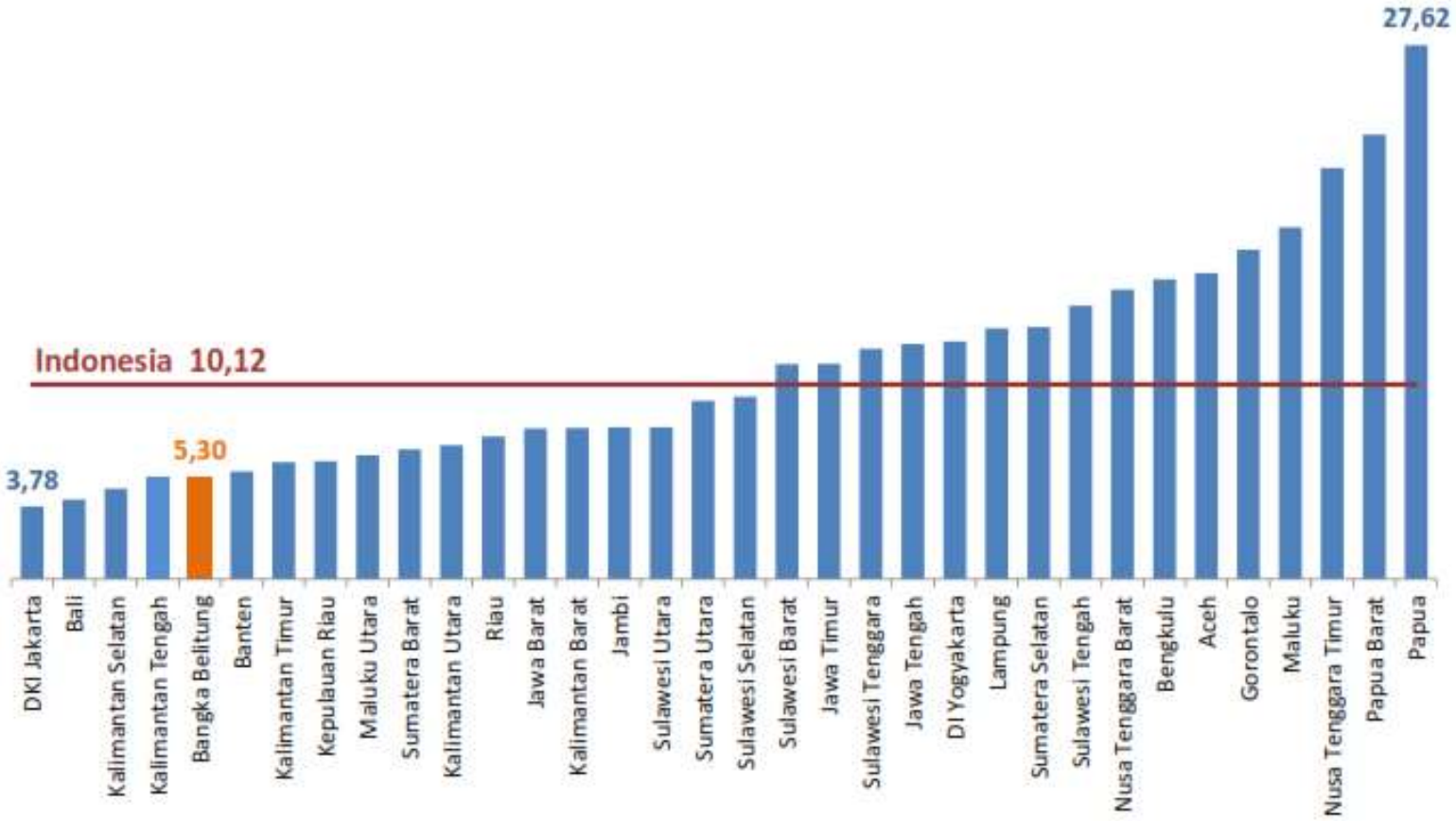
Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92
Sumatera Utara	10,39	9,85	10,79	10,27	9,27
Sumatera Barat	7,56	6,89	6,71	7,14	6,75
Riau	8,42	7,99	8,82	7,67	7,41
Jambi	8,42	8,38	9,12	8,37	7,90
Sumatera Selatan	14,06	13,62	13,77	13,39	13,10
Bengkulu	17,75	17,09	17,16	17,03	15,59
Lampung	14,39	14,21	13,53	13,86	13,04
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,97	4,83	5,02	5,30
Kepulauan Riau	6,35	6,40	5,78	5,84	6,13

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).

Grafik II.14

Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

8) Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima tahun (2014-2018) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif. Melonjak secara dramatis di tahun 2016 pada angka 0,97 kemudian menurun kembali pada tahun 2017 berada di angka 0,96 dan berlanjut hingga tahun 2018.

Tabel II.45
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	973.192	998.120	1.022.955	1.047.683	1.073.861
2.	Angkatan Kerja	636.959	665.842	705.173	699.017	727.918
3.	Penduduk yang Bekerja	604.223	623.949	686.830	672.618	701.366
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.95	0.94	0,97	0,96	0,96

Sumber: Sakernas, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel II.46 di bawah dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel II.46
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TKPK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
2014	604,223	32,736	636,959	94.86	81,426	225,100	29,707	336,233	973,192	65.45
2015	623,949	41,893	665,842	93.71	75,602	220,803	35,873	332,278	998,120	66.71
2016	686,830	18,343	705,173	97.40	66,849	216,542	34,391	317,782	1,022,955	68.93
2017	672,618	26,399	699,017	96.22	80,170	235,882	32,614	348,666	1,047,683	66.72
2018	701,366	26,552	727,918	96.35				333,099	1,061,017	68.61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.47, tren TPAK dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 persen dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,93 persen. Turun kembali di tahun 2017 menjadi 66,72 persen, sedangkan ditahun 2018 naik ke angka 67,79 persen.

Tabel II.47
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,09	66.71	68,93	66,72	67.79
2.	Tingkat Pengangguran	5.14	6.29	2,60	3,78	3.65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus 2018)

Pada tahun 2018, struktur penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja menurut lapangan pekerjaan sektor primer mengalami penurunan dari tahun 2017, hal ini dipengaruhi dengan adanya penurunan pada lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan pada lapangan pertambangan dan penggalian cenderung stagnan. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier mengalami peningkatan dari tahun 2017. Lapangan pekerjaan yang masih dominan selain pertanian adalah perdagangan yang mengalami peningkatan dari angka 17,48 di tahun 2017 menjadi 18,81 di tahun 2018.

Tabel II.48
Penduduk 15 Tahun ke Atas Tahun 2014 s.d. 2018 menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjan Utama	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,41	36,63	32,13	32,56	*30,99*
2. Pertambangan dan Penggalian	17,5	10,47	10,81	13,59	*13,65*
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,88	5,75	8,17	6,56	*7,05*
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,21	0,61	0.91	0,46	*0,53*
5. Bangunan	5,16	4,61	3,21	5,28	*5,08*

Lapangan Pekerjan Utama	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	20,45	17,55	19,21	17,48	*18,81*
7. Transportasi dan Pergudangan	2,86	2,62	2,39	2,04	1,74
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	3,14	4,07	3,54	3,9
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat	14,35	1,49	1,32	1,7	1,65
10. Jasa Perusahaan		0,98	1,04	0,75	0,97
11. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		5,48	5,28	6,37	6,33
12. Jasa Pendidikan		4,26	5,01	3,75	3,96
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1,64	1,18	1,91	1,54
14. Jasa Lainnya		2,99	4,6	4,01	3,82
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1) Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel II.49

Tabel II.49
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,65	1,72	1,68	1,70	1,73
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0076	0,0074	0,0073	0,0075	0,0077

(Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000)
Sumber: SKPD yang menangani urusan

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2013-2017 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian di mana tahun 2013 sebesar 1,65 meningkat tahun 2015 menjadi 1,68 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,73. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian tahun 2017 sebesar 0,0077 meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,0076.

Tabel II.50
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017
menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
	Jumlah	**1,894**	**1**

(Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000)
Sumber: SKPD yang menangani urusan

B. Pemuda dan Olahraga

1) Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari PD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga: atletik; sepakbola; bola voli; bola basket; bulutangkis; dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335 perkumpulan), kemudian bola voli (84 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan).

Tabel II.51

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013 s.d. 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	3
2.	Kab. Belitung	1	3	1	2	3
3.	Kab. Bangka Barat	1	2	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1	1
5.	Kab. Bangka Selatan	7	7	6	7	7
6.	Kab. Belitung Timur	1	2	1	1	2
7.	Kota Pangkal Pinang	2	2	1	2	2
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**15**	**19**	**13**	**16**	**20**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.52

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2013 s.d. 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	33	34	31	34	34
2.	Kab. Belitung	66	66	62	66	66
3.	Kab. Bangka Barat	64	64	64	64	64
4.	Kab. Bangka Tengah	36	36	30	36	30
5.	Kab. Bangka Selatan	58	133	51	68	103
6.	Kab. Belitung Timur	65	65	65	65	65
7.	Kota Pangkal Pinang	13	25	11	15	22
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**335**	**423**	**314**	**348**	**384**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

Tabel II.53

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2013 s.d. 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	4	9	3	4	9
2.	Kab. Belitung	15	15	15	15	15
3.	Kab. Bangka Barat	19	20	19	20	20
4.	Kab. Bangka Tengah	16	23	15	20	23
5.	Kab. Bangka Selatan	23	159	15	30	100
6.	Kab. Belitung Timur	4	10	2	4	10
7.	Kota Pangkal Pinang	3	10	3	5	7
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**84**	**246**	**71**	**98**	**184**

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

2) Jumlah gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007-2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.54
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah gedung olahraga	10	10	10	10	10
2.	Jumlah lapangan olahraga	1.730	1.731	1.731	1.734	1.735

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah gedung olahraga sebanyak 10 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2018 sebanyak 1.735 buah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib

A. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2014 s/d 2018 disajikan pada Tabel II.55.

Tabel II.55
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	APS 16-18 tahun	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada Tabel II.55 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedang untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah. Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah, artinya hampir separuh (47,48 persen) penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena factor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

2) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel II.56
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah gedung sekolah	815	812	830	825	832
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	145.469	148.649	151.846	149.549	150.252
	Rasio	56,03	54,63	54,66	54,63	54,66
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah gedung sekolah	231	232	244	248	255
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	70.740	72.284	73.840	74.754	75.115
	Rasio	32,65	32,10	33,04	33,10	33,40
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah gedung sekolah	157	139	139	140	140
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	70.438	71.981	73.531	73.885	74.530
	Rasio	22,29	19,31	19,60	19,85	19,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2017)

Menurut Tabel II.56, pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah mencapai 58,13 sekolah per 10.000 penduduk, dan menurun hingga 54,63 sekolah pada Tahun 2017. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah sedikit meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 54,66 sekolah per 10.000 penduduk.

Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan tersebut berjumlah 73.531 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 139 sekolah atau dengan rasio 18,90.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah tahun 2016/2017 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.57.

Tabel II.57

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	187	34.382	54,39	59	16.803	35,11	34	16.503	20,60
2	Belitung	121	19.118	63,29	29	9.700	29,90	17	9.677	17,57
3	Bangka Barat	138	22.444	61,49	43	10.325	41,65	22	9.965	22,08
4.	Bangka Tengah	97	20.603	47,08	26	10.126	25,68	13	10.254	12,68
5.	Bangka Selatan	94	22.914	41,02	36	11.010	32,70	18	10.745	16,75
6.	Belitung Timur	105	12.865	81,62	24	6.072	39,53	13	5.896	22,05
7.	Pangkalpinang	88	19.520	45,08	27	9.804	27,54	18	10.491	17,16
	Jumlah	830	151.846	54,66	244	73.840	33,04	139	73.531	18,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2017)

Rasio ketersediaan sekolah tahun 2016/2017 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 41,02, tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 25,68 dan 12,68.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah tahun 2016/2017 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 81,62, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 41,65 dan 22,08.

3) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.58 berikut.

Tabel II.58

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**SD/MI**					
	Jumlah guru	9.694	9.875	9.635	9.767	9.303
	Jumlah murid	159.012	161.533	162.152	161.932	165.520
	Rasio	16,40	16,36	16,83	16,58	17,79
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah guru	3.799	3.934	3.841	4.005	3.784
	Jumlah murid	52.688	58.517	59.863	60.101	65.331
	Rasio	13,87	14,87	15,58	15,01	17,26

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah guru	3.326	3.458	3.788	3.444	3.059
	Jumlah murid	38.435	41.999	44.269	42.930	46.914
	Rasio	11,55	12,14	11,69	12,46	15,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2017)

Pada kurun waktu 2013-2017, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 17,79 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2017 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel II.59, rasio guru dan murid pada tahun 2017 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 20,60, tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 19,46 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yaitu 15,46.

Tabel II.59

Jumlah Guru dan Murid Tahun 2013 s.d. 2017 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	2.049	37.580	18,34	919	15.345	16,70	712	10.458	14,69
2	Belitung	1.269	19.334	15,23	441	8.393	19,03	272	6.324	23,25
3	Bangka Barat	1.412	24.590	17,41	565	8.665	15,34	403	6.229	15,46
4.	Bangka Tengah	1.167	22.964	19,68	423	8.232	19,46	347	5.009	14,43
5.	Bangka Selatan	1.221	24.042	19,70	541	8.502	15,71	366	5.346	14,61
6.	Belitung Timur	1.032	13.253	12,84	353	5.806	16,45	300	3.816	12,72
7.	Pangkalpinang	1.153	23.757	20,60	542	10.388	19,17	659	9.732	14,77
	Jumlah	9.303	165.520	17,79	3.784	65.331	17,26	3.059	46.914	15,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

B. Urusan Kesehatan

1) Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2012-2017, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.60.

Tabel II.60
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2012 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	1	2	2	2	2	3
Belitung	1	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1	1
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.61
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	8	8	8	*
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah	1	1	1	1	1	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-	9
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta						9
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	9	20
7.	Jumlah Penduduk	1.289.321	1.339.773	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.368.487
8.	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 (= RSUD)*

Tabel II.62

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	2	0,01	1	0,00	-	-	-	-	2	0,01	5	0,02
2	Kab. Bangka Barat	1	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,01
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4.	Kab. Bangka Selatan	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
5.	Kab. Belitung	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01	2	0,01
6.	Kab. Belitung Timur	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
7.	Kota Pangka lpinang	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	Jumlah	**8**	**0,04**	**35**	**0,00**	**-**	**-**	**-**		**7**	**0,03**	**16**	**0,08**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.63 di bawah, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas (layak) pada tahun 2017 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan seperti terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur. Dari 7 kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten yang realisasinya di bawah target indikator dan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur yang tidak mencapai 75, sementara dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka yang berada di bawah rata-rata provinsi. Hanya Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat yang berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel II.63

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	87,7	87,7	75,3	77,94	78,14
2	Belitung	75,6	75,6	84,5	74,22	76,08
3	Bangka Tengah	48,2	48,2	47,7	56,84	59,52
4	Bangka Barat	87,4	87,4	83,7	89,46	88,82
5	Bangka Selatan	76,4	76,4	59,6	74,75	73,62
6	Belitung Timur	100	100	76,6	76,02	74,97
7	Kota Pangkalpinang	92,0	92,0	87,7	88,70	94,38
Kepulauan Bangka Belitung		80,2	80,2	73,7	77,64	78,66

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel II.64
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk Tahun 2012 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	1,67	0,97	0,48	0,21	0,13	0,05
2	Belitung	1,97	0,66	1,31	0,09	0,01	0,01
3	Bangka Tengah	4,28	2,13	2,28	0,19	0,36	0,24
4	Bangka Barat	4,52	4,23	0,98	0,74	0,09	0,00
5	Bangka Selatan	2,08	0,66	1,63	0,30	0,17	0,16
6	Belitung Timur	1,58	0,57	0,98	0,05	0,07	0,00
7	Kota Pangkalpinang	0,67	0,39	0,31	5,18	0,92	0,01
	Kepulauan Bangka Belitung	**2,36**	**1,39**	**0,68**	**0,97**	**0,18**	**0,24**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Target eliminasi malaria di Bangka Belitung adalah sampai tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia serta dengan dukungan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2009 tentang eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mencapai Bangka Belitung bebas malaria diupayakan angka API < 1 ‰. Selama tiga tahun berturut-turut tidak ada kasus indigenous dengan sistem surveilans yang sudah baik. Pada tahun 2017 di seluruh provinsi ditemukan kasus malaria sebanyak 94 kasus atau mampu menekan kasus < dari 1/1000 penduduk, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 359 kasus. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menerima sertifikat eliminasi malaria sebanyak 5 sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan hasil surveilans kasus AIDS di rumah sakit, pada tahun 2017, laporan Kasus HIV direkapitulasi dari data SIHA online yang dikirim dari kabupaten/kota, laporan kegiatan konseling dan tes HIV yang dilakukan di layanan KTHIV di 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di layanan konseling dan tes sukarela jumlah yang positif HIV sebanyak 270 orang, jumlah kasus HIV meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV dimana peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan. Jumlah kasus HIV/AIDS per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.65
Jumlah Kasus HIV
Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	56	53	25	33	70
2	Belitung	20	34	27	22	31
3	Bangka Tengah	7	19	35	5	13
4	Bangka Barat	18	14	16	15	34
5	Bangka Selatan	9	15	0	6	8
6	Belitung Timur	5	3	4	1	3
7	Kota Pangkalpinang	53	67	65	63	111
	Kepulauan Bangka Belitung		**205**	**162**	**111**	**270**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2018

Tabel II.66
Jumlah Kasus Penyakit DBD
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	131	74	206	67	62
2	Belitung	190	36	114	158	2
3	Bangka Tengah	123	95	158	126	50
4	Bangka Barat	193	45	77	65	87
5	Bangka Selatan	48	55	89	24	45
6	Belitung Timur	8	9	26	12	41
7	Kota Pangkalpinang	47	18	77	38	52
	Kepulauan Bangka Belitung	**740**	**332**	**747**	**498**	**339**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2015 di mana angka kasus lebih tinggi daripada tahun 2013, namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan di mana angka penurunan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung dari 190 kasus pada tahun 2013 menjadi 2 kasus pada tahun 2017, sementara kabupaten yang terus mengalami kenaikan signifikan adalah Kabupaten Belitung Timur, dari hanya ditemukan 8 kasus pada tahun 2013 menjadi 41 kasus pada tahun 2017. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berarti. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* ini kerap menimbulkan kepanikan di masyarakat karena penyebarannya yang cepat dan potensinya menyebabkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang potensial untuk menimbulkan kejadian luar biasa. Penyakit Dengue (DBD) dapat

menyerang semua umur, terutama anak - anak. Penyakit ini pun rawan menimbulkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pencapaian keberhasilan pengendalian penyakit DBD mengacu pada indikator kinerja utama program pengendalian penyakit arbovirosis adalah kabupaten/kota dengan *inciden rate* DBD ≤ 49 per 100.000 penduduk dan *cases fatality rate* (CFR) ≤ 1%.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: (a) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; (b) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; (c) Hidup dalam lingkungan sehat dan; (d) Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.67
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	12	12	12	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	7	8	8	8	8
4	Bangka Barat	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	9	9	9	9	10
6	Belitung Timur	6	6	7	7	7
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9
	Kepulauan Bangka Belitung	**60**	**61**	**62**	**62**	**63**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Tabel II.68

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	37	12	36	12	33	12	35	12	33
2	Belitung	9	31	9	31	9	33	9	32	9	33
3	Bangka Tengah	7	21	7	18	8	19	8	20	8	19
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	18	8	19	8	18
5	Bangka Selatan	8	28	9	29	9	29	9	28	10	29
6	Belitung Timur	6	17	6	18	6	18	7	17	7	18
7	Kota Pangkalpinang	9	7	9	19	9	19	9	19	9	19
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	58	160	60	169	61	169	62	170	63	169

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Tabel II.69

Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2013			2014			2015				2016				2017			
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	Sp G	U	G	Sp	Sp G	U	G	Sp	Sp G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10	0	1	10	0	1	25	7	23	0	24	1	9	0	27	7	24	0
Bangka	61	9	16	61	9	16	82	17	47	3	68	25	40	0	107	21	27	0
Belitung	40	10	6	40	10	6	45	14	18	0	67	14	39	1	39	11	25	1
Bangka Tengah	44	7	5	44	7	5	47	11	6	0	39	9	7	1	46	10	20	0
Bangka Barat	36	7	3	36	7	3	42	5	7	0	48	9	7	0	65	10	8	0
Bangka Selatan	23	7	3	23	7	3	32	7	6	0	28	5	11	0	36	6	9	0
Belitung Timur	32	10	4	32	10	4	41	9	10	0	37	8	11	1	53	8	9	1
Pangkalpinang	56	19	42	56	19	42	69	25	44	5	75	24	46	5	80	22	28	3
Jumlah	**292**	**69**	**83**	**292**	**69**	**83**	**383**	**95**	**161**	**8**	**386**	**95**	**179**	**8**	**453**	**95**	**150**	**5**

Keterangan :

U : Dokter Umum G : Dokter gigi Sp : Dokter Spesialis

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2018

Berdasarkan data pada Tabel II.69 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah, dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

3) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah

posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan tata ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpadu, berimbang dan berkeadilan berbasis agro-bahari untuk menunjang pariwisata serta pengendalian wilayah pertambangan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 TAHUN 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884 Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000 Ha), kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman (59.188 Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750 Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, maka lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah kriteria sangat kritis dan kritis, sedangkan kriteria agak kritis dan sangat kritis dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*).

Tabel II.70
Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Kelas Lahan Kritis (Ha)					
	Tidak kritis	Potensial kritis	Agak kritis	Kritis	Sangat kritis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Bangka	58.469	151.187	87.079	4.832		301.566
Bangka Barat	82.764	148.768	49.279	4.006	12	284.739
Bangka Selatan	63.503	221.296	79.855	4.630	191	369.475
Bangka Tengah	52.017	91.008	71.149	1.776	57	216.007
Belitung	93.307	86.806	44.995	977		226.084
Belitung Timur	106.771	89.947	59.569	4.189		260.476
Pangkalpinag	4.568	5.679	232			10.569
Jumlah	**461.576**	**794.718**	**392.437**	**20.428**	**260**	**1.669.419**

Sumber: Review Lahan Kritis Tahun 2018 / BPDASHL Baturusa Cerucuk

Dari Tabel II.70 dapat diketahui bahwa total lahan yang dikategorikan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 20.688 Ha atau 1,24 persen, total lahan yang dikategorikan kurang produktif seluas 1.187.155 Ha atau 71,11 persen, dan total lahan tidak kritis seluas 461.576 Ha atau 27,65 persen.

Apabila dibandingkan dengan data kelas lahan kritis tahun 2014 yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan luas lahan kriteria kritis dan sangat kritis yang cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2014, luas kelas lahan kriteria kritis adalah 140.887 Ha dan luas kelas lahan kriteria sangat kritis adalah 112.879 Ha sehinga masing-masing kriteria tersebut turun sebesar 85,50 persen dan turun sebesar 99,77 persen. Penurunan tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan luas lahan kriteria tidak kritis yang berlipat-lipat. Sementara itu, luas lahan kriteria potensial kritis menunjukkan peningkatan sebesar 27,25 persen dari 624.532 Ha (tahun 2014) menjadi 794.718 Ha (tahun 2018). Hal ini disebabkan oleh kondisi alami lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar berupa rawa-rawa.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah, yaitu terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perancanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel II.71 berikut.

Tabel II.71
Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57	20.98
Ketaatan terhadap RTRW	95.00	100.00	100.00	100.00	80.14
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	3.50	6.89	17.20	19.20	21
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Berdasarkan Tabel II.71 diatas, dapat terlihat persentase capaian luas kawasan lindung terhadap luas wilayah Bangka Belitung meningkat dari 11,57 persen menjadi 20,98 persen, begitupula dengan persentase kawasan strategis yang dikembangkan meningkat sedikit dari 17,20 persen di tahun 2015 menjadi 21 persen di tahun 2017. Angka-angka tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi ketaatan terhadap rencana tata

ruang wilayah menunjukkan penurunan sebesar 19,86 persen dan berada di bawah target RPJMD yaitu 100 persen.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapakan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

2.) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang di dalam Tabel II.72 berikut.

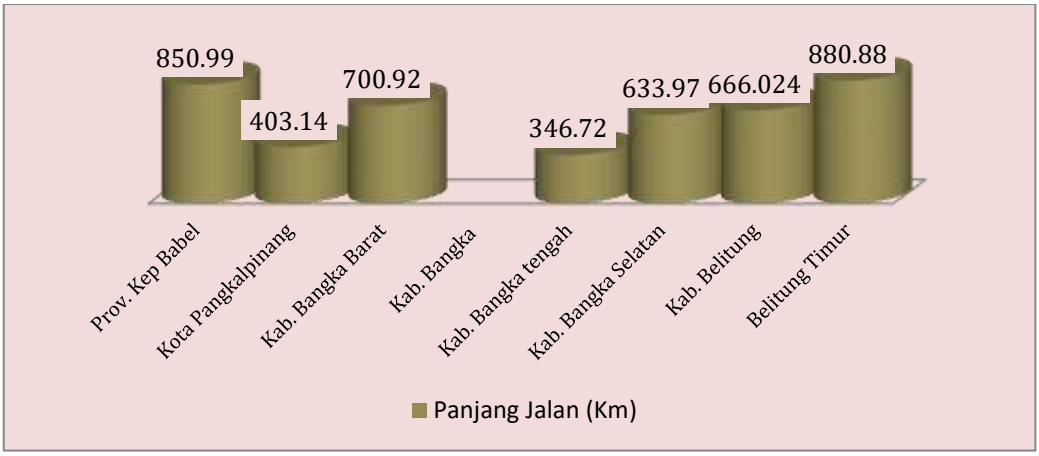
Tabel II.72

Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Jenis Permukaan**		
	Diaspal	600,4	850,09
	Kerikil	0,00	0,90
	Tanah	0,00	0,00
2.	**Kondisi Jalan**		
	Baik	534,18	475,96
	Sedang	64,72	235,96
	Rusak	1,50	84,21
	Rusak Berat	0	54,86

Sumber: Dinas PUPR, 2018

Grafik II.15
Panjang Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018



Ket: Untuk Kabupaten Bangka Belum Terisi Masih dianalisis
Sumber: Dinas PUPR, 2018

Berdasarkan data di atas panjang jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 850,990 Km dengan rincian terdapat 84,21 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak, 235,96 km kondisi jalan dalam keadaaan sedang dan 475,96 km kondisi jalan dalam keadaaan baik. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.73
Panjang Jembatan menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2018

Jenis Kontruksi		Negara	Provinsi
(1)		(2)	(3)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu		0,00	19,00
2. Beton Bertulang		1.689,30	2.258,91
3. Rangka baja		1.122,30	759,70
Jumlah/Total	**2018**	**2.811,60**	**3.037,61**
	2017	**-**	**-**
	2016	**-**	**-**
	2015	**-**	**-**
	2014	**-**	**-**

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Tahun 2018

Berdasarkan data diatas, pembangunan jembatan sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 3.037,61 Meter yang terdiri dari 19 Meter untuk Jembatan Beton+Kayu/Baja+Kayu, sedangkan untuk Kontruksi Jembatan Beton Bertulang sudah mencapai 2.258,91 Meter, sedangkan kontruksi jembatan dari Rangka Baja sepanjang 759,70 panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak, 235,96 km kondisi jalan dalam keadaaan sedang dan 475,96 km kondisi jalan dalam

keadaaan baik. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

D. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah bersanitasi, pengurangan kawasan kumuh, rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada Tabel II.74.

Tabel II.74
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Kawasan Kumuh
Bangka	91,67	98,11	98,01	0,02
Belitung	81,60	100,00	94,42	0,04
Bangka Barat	82,68	89,16	98,92	0,03
Bangka Tengah	90,05	80,32	97,13	0,02
Bangka Selatan	79,63	72,38	97,14	0,01
Belitung Timur	69,39	76,22	54,53	0,04
Kota Pangkalpinang	94,47	94,47	95,45	1,59
Kepulauan Bangka Belitung	84,21	87,24	89,91	0,25

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepu. Bangka Belitung Tahun 2017

Persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 84,21%. Kabupaten yang bersanitasi tertingi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 91,67%, dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung dengan capaian 81,60%.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 87,24%. Dengan Kabupaten yang menggunakan air bersih tertingi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 100%. Dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian 72,38%.

Persentase rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 87,24%. Kabupaten yang benguunakan air bersih tertingi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 100%, dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian 72,38%.

Persentase Kawasan Kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 0,25 %. Kabupaten yang penanganan Kawasan Kumuh tertingi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 1,59%, dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian 0,01%.

E. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.75 di mana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2017 turun menjadi 48.521.

Tabel II.75
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	38.506	43.968	52.346	49.579	48.521

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

F. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya angka pengangguran yang dilakukan melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha yang ditandai dengan meningkatnya penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan meningkatnya kualitas hidup serta peran perempuan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatan penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Dalam menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), di mana TPAK merupakan

persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.76, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif di mana tahun 2015 sebesar 66,71 dan tahun 2016 naik menjadi 68,93 sedangkan tahun 2017 turun menjadi 66,72.

Tabel II.76
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.45	66.71	68,93	66,72	67,79
2.	Tingkat Pengangguran	5.14	6.29	2,6	3,78	3,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel II.77, penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2017 terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 219.002. Pada sektor sekunder di tahun 2017 mengalami penurunan di industri pengolahan, listrik, gas dan air dibandingkan tahun 2016 dan pada bangunan di tahun 2017 terjadi peningkatan. Sedangkan sektor tersier pada tahun 2017 terjadi peningkatan di industri perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan telekomunikasi, pada lapangan pekerjaan utama keuangan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel II.77
Data Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sektor Primer					
1.	Pertanian	178.107	189.774	228.578	220.658	219.002
2.	Pertambangan	121.104	105.754	76.399	78.856	91.438
	Sektor Sekunder					
1.	Industri Pengolahan	35.151	35.500	35.225	55.056	42.623
2.	Listrik, Gas dan Air	1.317	1.250	2.870	6.240	2.502
3.	Bangunan	34.101	31.168	28.787	22.041	35.520
	Sektor Tersier					
1.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	134.514	123.591	122.789	148.989	134.065
2.	Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	16.820	17.294	18.175	19.766	17.409
3.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	14.886	13.209	13.139	13.662	11.856
4.	Jasa Kemasyarakatan	87.848	86.683	97.987	121.562	118.203
	Total Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**623.758**	**604.223**	**623.949**	**686.830**	**672.618**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2017

Berdasarkan Tabel II.78 secara kewilayahan untuk melihat gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat diketahui melalui Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua kabupaten/kota. Untuk tahun 2018 TPAK hampir diseluruh kabupaten/kota meningkat kecuali di Kabupaten Bangka yang menurun sebesar 1,65 point dari tahun 2017 yang berada di angka 65,75 persen. Angka TPAK tahun 2018 tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,93 persen dan terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 63,64 persen, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar 67,79 persen.

Tabel II.78
Data TPAK Tahun 2014 s.d. 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	65,45	63,88	n/a	65,75	64,10
2.	Kab. Belitung	63.48	67,64	n/a	69,29	70,36
3.	Kab. Bangka Barat	67.12	65,47	n/a	68,17	70,47
4.	Kab. Bangka Tengah	62.48	66,48	n/a	69,26	70,99
5.	Kab. Bangka Selatan	67.08	70,32	n/a	64,7	67,40
6.	Kab. Belitung Timur	68.79	68,11	n/a	68	71,93
7.	Kota Pangkal Pinang	64.90	67,41	n/a	63,42	63,64
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**65.45**	**66,71**	**68,93**	**66,72**	**67,79**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka di mana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang, turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang, sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, dan untuk tahun 2016 penduduk yang bekerja sebanyak 686.830 orang.

Tabel II.79
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d. 2017 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	132.508	132.128	131.559	n/a	98.373
2.	Kab. Belitung	81.599	82.200	83.903	n/a	59.060
3.	Kab. Bangka Barat	88.601	84.219	86.480	n/a	62.668

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Kab. Bangka Tengah	73.376	74.102	79.971	n/a	61.775
5.	Kab. Bangka Selatan	82.739	88.740	94.575	n/a	63.483
6.	Kab. Belitung Timur	53.758	58.259	59.159	n/a	41.744
7.	Kota Pangkal Pinang	84.205	84.575	88.302	n/a	56.173
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**596.786**	**604.223**	**623.949**	**686.830**	**443.276**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Dari Tabel II.80, Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, sedangkan di tahun 2018 rata rata menunjukkan penurunan, hanya ada dua Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,36 point menjadi 2,93 persen, dan Kabupaten Bangka Selatan meningkat sebesar 1,61 point menjadi 4,35 persen. Untuk TPT tahun 2018 yang tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 4,70 persen dan yang terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,50, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,65 persen lebih rendah dari rata-rata nasional di mana rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.

Tabel II.80

Data Tingkat Pengangguran Tahun 2013 s.d. 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Kab. Bangka	4,26	8,36	8,87	n/a	4,29	4,12
2.	Kab. Belitung	2,59	3,03	4,57	n/a	2,57	2,93
3.	Kab. Bangka Barat	3,91	1,21	5,92	n/a	4,23	3,11
4.	Kab. Bangka Tengah	3,47	5,64	6,58	n/a	3,38	3,93
5.	Kab. Bangka Selatan	1,64	3,26	2,01	n/a	2,74	4,35
6.	Kab. Belitung Timur	2,20	2,61	2,55	n/a	2,62	1,50
7.	Kota Pangkal Pinang	6.,66	8,84	10,64	n/a	5,8	4,70
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**3,70**	**5,14**	**6,29**	**2,60**	**3,78**	**3,65**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.80, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.81
Data Pengangguran Tahun 2013 s.d. 2017 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	5.900	12.053	12.805	n/a	6.693
2.	Kab. Belitung	2.169	2.635	4.015	n/a	2.429
3.	Kab. Bangka Barat	3.605	1.083	5.443	n/a	4.244
4.	Kab. Bangka Tengah	2.639	4.430	5.631	n/a	3.161
5.	Kab. Bangka Selatan	1.377	2.769	1.936	n/a	2.553
6.	Kab. Belitung Timur	1.211	1.562	1.550	n/a	1.667
7.	Kota Pangkal Pinang	6.013	8.204	10.513	n/a	5.652
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**22.657**	**32.736**	**41.893**	**18.343**	**26.399**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

G. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.82 dan Tabel II.83.

Tabel II.82
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N0	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32
2.	Belitung	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00
3.	Bangka Barat	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37
4.	Bangka Tengah	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71
5.	Bangka Selatan	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93
6.	Belitung Timur	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04
7.	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**56,03**	**56,54**	**57,29**	**56,12**	**56,29**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel II.83
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	88,07
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	88,31
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	89,01
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	90,55
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	82,93
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	86,50
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09	93,82
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	**87,10**	**87,54**	**87,73**	**87,74**	**88,37**	**88,90**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maret 2018

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional IDG masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34 Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV.

Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.84
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4	3
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon	51	52	49	51

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	III				
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191	196
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403	1.406
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	250.771	229.342

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,54 di tahun 2017, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.

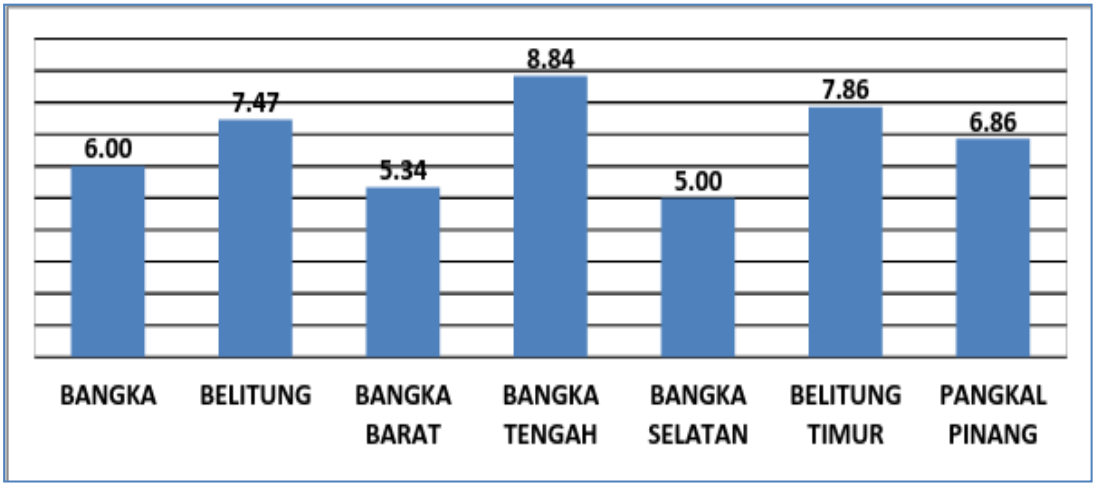
Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah menurut kabupaten/kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.85 dan Grafik II.16 berikut.

Tabel II.85
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
	Jumlah	**13.411**	**229.342**	**6,56**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Grafik II.16
Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Grafik II.16, persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2017 berdasarkan kabupaten/kota menunjukan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.86
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	115	84	88	92	90
2.	Jumlah Rumah Tangga	371.242	368.504	345.928	353.520	354.127
3.	Rasio KDRT	0,031	0,023	0,025	0,023	0,025

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Berdasarkan Tabel II.86 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan dari 115 di tahun 2013 menjadi 90 di tahun 2017.

H. Urusan Pangan

Ketersediaan Pangan dapat bersumber dari produksi pangan lokal maupun didatangkan dari luar daerah/negara. Ketersediaan pangan (terutama beras) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berasal dari luar daerah, hanya sebagian kecil yang merupakan produksi dari dalam daerah. Salah satu penyebab utama rendahnya kemampuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyediakan pangan dari produksi lokal adalah iklim dan jenis tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Bedasarkan Tabel II.87 menjelaskan bahwa perbandingan antara kebutuhan beras/tahun (ton) dengan kemampuan produksi bersih beras lokal (ton), Angka Kebutuhan Beras di tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 121.876 ton dari 119.663 ton di tahun 2016, tetapi dengan adanya peningkatan produksi bersih beras (produksi lokal) yaitu 21.772 ton dari 20.706 ton di tahun 2016 menyebabkan kondisi ketersediaan beras sebagai pangan utama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik menjadi 17,82% dari 17,30% di tahun 2016, dan menurunkan angka ketergantungan beras dari luar daerah dari 82,70% di tahun 2016 menjadi 82,18% di tahun 2017.

Angka kebutuhan beras penduduk bergantung pada jumlah penduduk dan angka kebutuhan per kapita. Dengan adanya program diversifikasi pangan untuk kebutuhan karbohidrat terlhat bahwa terjadi penurunan angka kebutuhan beras per kapita berganti ke asupan karbohidrat dari bahan non beras sejak tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel II.87 tersebut dapat terlihat bahwa produksi beras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan beberapa upaya peningkatan luas tanam padi di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan produksi padi lokal dengan intensifikasi lahan tanam padi yang telah ada dan memastikan ketersediaan beras dari luar daerah (impor) tetap stabil.

Tabel II. 87
Data Ketergantungan Beras 2013-2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.428.275
2	Kebutuhan Beras/ Tahun (ton)	120.073	124.621	117.535	119.663	121.876
3	Produksi Bersih Beras (ton)	16.652	16.873	15.838	20.706	21.772
4	Kondisi ketersediaan (%)	13,87	13,54	13.48	17,30	17,82
5	Ketergantungan (%)	86,13	86,46	86,52	82,70	82,18

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Tabel II.87 menunjukkan bahwa produksi padi (ton) kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif. Produksi padi (ton) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat tahun 2017 sebesar 37.123 ton, meningkat dari tahun 2016 lalu yaitu sebesar 35.388 ton. Sejak 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah yang mempunyai produksi padi (ton) paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Kota Pangkalpinang merupakan wilayah bukan penghasil padi sawah maupun padi ladang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak ada produksi padi (ton). Faktor yang mempengarusi produksi padi (ton) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya

Tabel II.88
Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2013-2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/ Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Bangka	3.728	4.681	9.303	6.862	9.666
2	Kabupaten Bangka Tengah	588	470	365	884	905
3	Kabupaten Bangka Barat	4.846	6.296	3.753	6.171	5.556
4	Kabupaten Bangka Selatan	16.046	7.803	8.002	16.728	15.471
5	Kabupaten Belitung	1.785	1.614	1.477	1.557	1.650
6	Kabupaten Belitung Timur	1.487	2.617	4.170	2.186	3.876
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.459	23.481	27.068	35.388	37.123

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel II.89
Data Ketersediaan Pangan 2013-2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan					
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	16.652,00	16.873,00	15.838,00	20.706,00	21,722,00
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	46.420,00	95.390,00	125.011,00	122.457,00	124.994,00
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	63.072,00	112.263,00	140.849,00	143,163,00	146.716,00
4	Kebutuhan Beras	Ton/Thn	120.073	124.621	117.535	119.663	121.876
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap /Hari	2.768,82	2.437,20	2.490,00	2.455,00	2.643,27
6	Ketersediaan Protein	Gr/Kap/ Hari	65,07	79,38	71,56	71,08	82,73

No	Keterangan	Satuan					
			2013	2014	2015	2016	2017
7	Ketersediaan Lemak	Gr/Kap/ Hari	120,53	144,63	76,55	91,81	94,08
8	PPH Ketersediaan	Skor	57,24	78,50	78,78	87,10	87,84

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel II.89 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013 s.d. tahun 2017 dengan Angka Tetap (ATAP) tahun berjalan terlihat ketersediaan beras sebagai pangan utama pada tahun 2017 naik dari tahun 2016. Peningkatan ketersediaan beras tersebut baik dari ketersediaan beras lokal maupun yang berasal dari luar daerah. Ketersediaan beras lokal pada tahun 2017 naik menjadi 21.722 ton dari tahun 2016 sejumlah 20.706 ton, sementara untuk ketersediaan beras impor tahun 2016 sebanyak 122.457 ton naik menjadi 124.994 ton di tahun 2017. Akumulasi ketersediaan beras di tahun 2017 sejumlah 146.716 ton naik dari tahun 2016 yaitu sejumlah 143.163 ton. Ketersediaan beras di tahun 2017 telah memenuhi kebutuhan beras di tahun tersebut dengan kebutuhan sebanyak 121.876 ton.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 ditetapkan angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/kap/hari, sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 gram/kap/hari. Selanjutnya berdasarkan Tabel II.89 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi kondisi ideal yang dipersyaratkan.

I. Urusan Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.90

Luas Lahan (m^2) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	8.380	-	293.511	-	-	49.684	-	1.101.464	-	-	604.086	-	2.648.055	-	-
2	Bangka Tengah	39.464	-	1.144.196	-	-	22.440	-	1.445.234	-	-	74.197	-	2.004.134	-	-
3	Bangka Barat	-	-	27.672.000	-	-	-	-	4.290.460	-	-	25.855	-	1.694.620	-	-
4	Bangka Selatan	68.096	139.457.500	44.842.708	61.937	-	70.014	139.457.500	48.664.372	276.502	-	101.951	139.457.500	52.813.040	602.411	-
5	Pangkalpinang	264.335	-	357.960	-	-	422.363	-	657.138	-	-	732.862	-	149.645	-	-
6	Belitung	143.353	-	5.260.054	-	-	197.045	-	5.725.718	-	-	1.071.801	55.855.200	2.968.993	-	-
7	Belitung Timur	49.495	14.764.520	378.629	-	-	75.676	-	1.857.907	-	-	5.064	55.855.200	743.650	-	-
	Jumlah	573.123	154.222.020	79.949.058	61.937	-	837.222	139.457.500	63.742.293	276.502	-	2.615.816	251.167.900	63.022.137	602.411	-
	Total Luas Wilayah	**756.527.919**														

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.91

Luas Lahan (m^2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinanng	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
	Jumlah	**2.146.277**	**139.457.500**	**81.912.992**	**977.115**	**194.723**	**3.910.875**	**140.243.391**	**69.636.110**	**1.496.977**	**-**	**10.842**	**3.525.160**	**153.400.366**	**75.759.684**	**1.768.093**	**550.000**	**10.842**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf.

Tabel II.92

Luas Lahan (m^2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No.	Kabupaten/Kota	2017						2018						Jumlah	Luas(*)
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW		WILAYAH(m2)
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004	424.668.655	2.950.880.000
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0	45.004.540	2.155.770.000
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0	61.705.493	2.820.610.000
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,1	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,3	0,0084	0	0	77.542.657	3.607.080.000
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0	14.057.302	89.400.000
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0	91.690.199	2.293.690.000
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001	60.201.739	2.506.910.000
	Jumlah	**0,0186**	**0,95**	**0,25**	**0,0163**	**0,0003**	**0**	**0,0378**	**0,65**	**0,65**	**0,0194**	**0,0002**	**0,0001**	**774.870.585**	**16.424.340.000**
	Total Luas Wilayah														

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

Tabel II.93

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	2,94	-	102,91	-	-	17,04	-	377,75	-	-	202,70	-	888,57	-	-
2	Bangka Tengah	23,80	-	690,07	-	-	13,23	-	852,30	-	-	42,80	-	1.156,15	-	-
3	Bangka Barat	-	-	15.363,09	-	-	-	-	2.328,89	-	-	13,73	-	900,10	-	-
4	Bangka Selatan	38,27	78.369,36	25.199,75	34,81	-	38,16	76.004,44	26.522,12	150,69	-	54,96	75.173,57	28.468,49	324,73	-
5	Pangkalpinang	147,11	-	190,50	-	-	229,80	-	342,27	-	-	390,01	-	76,27	-	-
6	Belitung	88,00	-	3.240,00	-	-	118,00	-	3.415,00	-	-	622,00	32.423,00	1.723,00	-	-
7	Belitung Timur	45,18	13.477,67	345,63	-	-	67,59	-	1.659,39	-	-	4,52	49.887,19	664,19	-	-
	Jumlah	**345,30**	**91.847,03**	**45.131,95**	**34,81**	**-**	**483,83**	**76.004,44**	**35.497,72**	**150,69**	**-**	**1.330,73**	**157.483,76**	**33.876,77**	**324,73**	**-**
	Total Luas Wilayah		**791.385,01**													

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

Tabel II.94

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
	Jumlah	1.132,21	73.595,46	44.312,00	515,65	109,88	2.284,45	72.631,83	36.666,99	773,30	-	5,60	1.756,35	75.229,09	39.360,49	494,48	-	5,48

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

Tabel II.95
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2017						2018					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,10	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,30	0,0084	0	0
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001
	Jumlah	**0,0186**	**0,95**	**0,25**	**0,0163**	**0,0003**	**0**	**0,0378**	**0,65**	**0,65**	**0,0194**	**0,0002**	**0,0001**
	Total Luas Wilayah												

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik , HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel II.96
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten / Kota	2011			2012			2013		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	-	-	-	3	1	33,3	5	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bangka Barat	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	3	-	-	3	-	-	2	-	-

No.	Kabupaten / Kota	2011			2012			2013		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
6	Belitung	3	-	-	4	-	-	7	2	42
7	Belitung Timur	2	-	-	4	1	25	1	-	-
	Jumlah Kasus Terdaftar	**8**			**13**			**16**		
	Jumlah Kasus Diselesaikan		**-**			**2**			**2**	
	Penyelesaian Kasus (%)			**-**			**15,4**			**12,5**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.97

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten / Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	**Kasus Diselesaikan**	**Penyelesaian Kasus (%)**	**Kasus Terdaftar**	**Kasus Diselesaikan**	**Penyelesaian Kasus (%)**	**Kasus Terdaftar**	**Kasus Diselesaikan**	**Penyelesaian Kasus (%)**
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah Kasus Terdaftar	**20**			**18**			**39**		
	Jumlah Kasus Diselesaikan		**5**			**1**			**15**	
	Penyelesaian Kasus (%)			**25**			**5,5**			**38,4**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.98

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/kota	2017			2018		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	2	2	100	1	1	100
2	Bangka Tengah	0	0	0	3	2	66,67
3	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	1	1	100
5	Pangkalpinang	2	2	100	3	2	66,67
6	Belitung	0	0	0	0	0	0
7	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4	4	100	8	6	75

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel II.99

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	-	-	-	4	4	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	3	3	100	-	-	-
3	Bangka Barat	5	5	100	2	2	100	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
5	Pangkalpinang	-	-	-	6	6	100	-	-	-
6	Belitung	-	-	-	2	2	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	5	5	100	-	-	-
	Permohonan Izin Lokasi	**10**	**10**		**22**	**22**		**0**	**0**	
	Pemberian Izin Lokasi	**10**	**10**		**22**	**22**		**0**	**0**	
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	**100**	**100**		**100**	**100**		**0**	**0**	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.100

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	5	5	100	5	5	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	4	4	100	14	14	100	-	-	-
3	Bangka Barat	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	9	9	100	2	2	100	-	-	-
6	Belitung	5	5	100	9	9	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	-	-	-	-	-	-
	Permohonan Izin Lokasi	**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
	Pemberian Izin Lokasi	**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100	100		100	100		0	0	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.101

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	1	1	100	11	11	100
2	Bangka Tengah	4	4	100	9	9	100
3	Bangka Barat	3	3	100	5	5	100
4	Bangka Selatan	1	1	100	2	2	80
5	Pangkalpinang	7	7	100	8	8	100
6	Belitung	23	23	100	15	15	100
7	Belitung Timur	4	4	100	2	2	100
	TOTAL	**43**	**43**	**100**	**52**	**43**	**82,69**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

J. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.102.

Tabel II.102
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kualitas Air	84.36	61.3	62.05	82.08	72.50
Indeks Kualitas Udara	64.25	90.39	90.61	80.4	94.97
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	36.77	36.77	36.77	0	0
Indek Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	0	0	0	35.35	44.05
Nilai IKLH	**59.29**	**60.22**	**60.56**	**56.88**	**67.85**

Sumber: IKLH Indonesia (2013 - 2017)

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif, Pada tahun 2017 nilai IKA Provinsi menurun dibandingkan tahun 2016 sedangkan untuk nilai IKU meningkat. Peningkatan signifikan terdapat pada Nilai IKTH yaitu dari 35.35 menjadi 44.05, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan tahun 2016 dengan meyempurnakan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial. Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.102, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.103

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih

Tahun 2012 s.d. 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	81,39	87,7	73.82	75,3	77,9
2	Belitung	78,44	75,6	73.73	84,5	74,2
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	38.68	47,7	56,8
4	Bangka Barat	54,66	87,4	77.58	83,7	89,5
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	75.18	59,6	74,8
6	Belitung Timur	72,39	100	73.82	76,6	76,0
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	86.72	87,7	88,7
	Kepulauan Bangka Belitung	**76,38**	**80,2**	**71.24**	**73,7**	**77,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

K. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data Tabel II.104 di bawah ini terlihat rasio penduduk ber KTP meningkat, karena kepemilikan KTP meningkat dan kepemilikan akta kelahiran juga meningkat.

Tabel II.104

Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	41	58	60	59	63
Rasio Bayi Berakte Kelahiran				95.5	95.1
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah					
Kepemilikan KTP	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	287	328	407	292	491
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	2.349.199	1.269.381	1.281.099	1.292.863	1.321.117
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan, pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, KB, 2017

L. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahan desa dalam

pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa dan stabilitas lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, di mana tahun 2013 jumlah binaan LPM sebanyak 1.575 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3.176. Kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2018 yaitu sebanyak 571 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling rendah yaitu sebanyak 476 LPM.

Tabel II.105
Kelompok LPM dan PKK Tahun 2013 s.d. 2017 menurut Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	LPM	PKK	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bangka	158	385	482	1.231	501	527	1.642	1.499	527	1.642	527	1.642
2	Belitung	262	310	330	709	492	487	818	767	487	818	487	818
3	Bangka Barat	374	887	462	1.370	503	626	1.584	1.480	626	1.584	626	1.584
4.	Bangka Tengah	266	721	281	776	502	489	1.397	1.202	489	1.397	489	1.397
5.	Bangka Selatan	291	757	439	1.078	483	476	1.424	1.481	476	1.424	476	1.424
6.	Belitung Timur	224	534	552	960	581	571	1.056	1.058	571	1.056	571	1.056
	Jumlah	**1.575**	**3.594**	**2.546**	**6.124**	**3.062**	**3.176**	**7.921**	**7.487**	**3.176**	**7.921**	**3.176**	**7.921**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, di mana tahun 2013 jumlah kelompok PKK sebanyak 3.594 meningkat, pada tahun 2014 menjadi sebesar 6.124, pada tahun 2015 sebesar 7.487 dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7.921. Kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebanyak 1.642 kelompok PKK, dan kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 818 kelompok PKK.

Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantarannya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif, jumlah posyandu aktif, jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil, jumlah aparatur desa terlatih dan jumlah kawasan perdesaan yang dibangun.

Tabel II. 106
Jumlah Bumdes yang Aktif Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	STATUS BUMDes 2017			STATUS BUMDes 2018				
		Persiapan	Terbentuk	Aktif	Pemula	Berkembang	Maju	Mandiri	Unggulan
1	Bangka	16	32	32	38	12	-	-	1
2	Bangka Tengah	-	44	44	28	17	6	1	5
3	Bangka Barat	-	21	21	2	25	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	17	17	40	-	-	-	-
5	Belitung	2	9	9	26	-	-	-	-
6	Belitung Timur	-	24	24	18	5	3	2	3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**18**	**147**	**147**	**152**	**59**	**3**	**3**	**9**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarkan data di atas ada perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Tanggal 29 September 2017 tentang Petunjuk Teknis Operasioanal dan Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, Harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

Tabel II. 107
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Kelurahan		Desa		Puskesmas		Posyandu		Posyandu Aktif	Posyandu Aktif
												Jumlah	Jumlah
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Bangka	8	8	15	19	62	62	12	12	221	227	164	168
2	Belitung	5	5	7	7	42	42	9	9	174	177	119	127
3	Bangka Barat	6	6	4	4	60	60	8	8	171	182	86	112

No	Kabupaten	Kecamatan		Kelurahan		Desa		Puskesmas		Posyandu		Posyandu Aktif	Posyandu Aktif
												Jumlah	Jumlah
4	Bangka Tengah	6	6	7	7	56	56	8	9	136	138	27	25
5	Bangka Selatan	8	8	3	3	50	50	9	10	121	121	33	45
6	Belitung Timur	7	7	0	0	39	39	7	7	133	134	131	121
7	Pangkalpinang	7	7	42	42	0	0	9	9	116	116	87	88
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**47**	**47**	**78**	**82**	**309**	**309**	**62**	**64**	**1072**	**1095**	**647**	**687**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Melihat data posyandu aktif yang terdapat di setiap kabupaten/kota menunjukan adanya peningkatan keaktifan posyandu hal ini terlihat dari jumlah peningkatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 dengan total 647 menjadi 687 di tahun 2018 ini menunjukan ada peningkatan keaktifan sebanyak 40 posyandu aktif.

Tabel II. 108

Jumlah Sekolah Dasar (SD) Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Jumlah SD Penerima		Jumlah Siswa Penerima PMT-AS	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Bangka	Riau Silip Puding Besar Mendo Barat	Bakam	1 1 1	1	409	90
2	Bangka Barat	Muntok Simpang Tritip Jebus Parit Tiga Kelapa	Tempilang	2 1 1 1 1	1	409	90
3	Bangka Tengah	Lubuk Besar Sungai Selan	Lubuk Besar	1 3	1	408	90
4	Bangka Selatan	Air Gegas Pulau Besar Simpang Rimba	Air Gegas	1 1 1	1	408	90
5	Belitung	Membalong Badau Sijuk Tanjungpandan	Badau	2 2 1 1	1	408	90
6	Belitung Timur	Manggar Dendang Simpang Pesak	Simpang Pesak	1 1 1	1	408	90
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				**25**	**6**	**2450**	**540**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Tabel II. 109
Jumlah Aparatur Desa yang Terlatih Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Jenis Pelatihan 2017			Jenis Pelatihan 2018		
		Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)
1	Bangka	9	11	-	-	-	-
2	Bangka Tengah	8	11	-	-	-	7
3	Bangka Barat	9	13	-	-	-	5
4	Bangka Selatan	8	11	-	-	-	6
5	Belitung	8	12	-	-	-	8
6	Belitung Timur	8	12	-	-	-	12
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**50**	**70**	**-**	**-**	**-**	**38**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarakan data di atas pada tahun 2017 masih belum ada pelatihan bagi kepala desa dalam pelatihan revolusi mental, sebaliknya pada tahun 2018 telah dilakukan pelatihan bagi kepala desa sebanyak 38 orang dari 6 (enam) kabupaten, dan harapannya pelatihan tersebut dapat mengikutsertakan kepala desa yang lainnya. Pelatihan tidak hanya revolusi mental namun masih banyak pelatihan yang harus ditingkatkan lagi terutama bagi bendahara desa dan pengurus desa lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat pada saat ini banyak sekali anggaran yang diperuntukkan bagi desa namun banyak juga pengurus yang masih belum semuanya dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan baik. Dengan melihat data diatas dapat untuk dipertimbangkan kembali pelatihan terkait dengan pengurus desa.

Tabel II. 110
Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Tahun 2018 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
1	Bangka	Bakam Pemali Belinyu Riau Silip	- Petanian dan Pariwisata - Pertumbuhan Ekonomi Baru - Pertanian dan Pariwisata - Perikanan dan Pariwisata	-	-	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	Koba	Kawasan Ekowisata, Sungai dan Pulau
3	Bangka Barat	-	-	-	-	Parit Tiga	Kawasan Mina Politan dan Pariwisata
4	Bangka Selatan	Air Gegas Payung	Pengembangan Lada Putih	Air Gegas Payung	Pengembangan Lada Putih	Air Gegas Payung	Pengembangan Lada Putih

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
5	Belitung	Selat Nasik	Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Mina Agro Wisata
6	Belitung Timur	Manggar	Minapolitan	Manggar	Minapolitan	Manggar	Minapolitan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Upaya pemerintah baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten telah melakukan banyak intervensi berkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan. Melihat data di atas pada tahun 2016 Pemeritah Pusat, Provinsi dan Kabupaten telah melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Berbeda halnya dengan kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah yang belum menyelesaikan administrasi dalam dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) di tahun 2016. Namun Pada tahun 2018, pemerintah provinsi membantu untuk menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan harapannya dengan tersedianya dokumen RPKP tersebut dapat membantu kabupaten untuk mengembangkan kawasan dan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Tabel II. 111

Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 s.d. Tahun 2017 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status Perkembangan Desa Tertinggal		Status Perkembangan Desa Berkembang	
				2016	2017	2016	2017
1	Bangka	3	4	2	2	2	2
2	Belitung	4	8	4	4	4	4
3	Bangka Barat	6	18	9	9	9	9
4	Bangka Tengah	3	3	3	3	-	-
5	Bangka Selatan	8	41	12	12	29	29
6	Belitung Timur	3	6	2	2	4	4
	TOTAL	**27**	**80**	**32**	**32**	**48**	**48**

Sumber: Kepmendes, PDT dan Transmigrasi No. 126, 2017

Berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun pada lampiran nomor urut 2(dua) menyatakan klasifikasi status desa.

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
b. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
d. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

a. Desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
b. Desa maju atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
c. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,7072 dan lebih besar (>) dari0,5989.
d. Desa tertinggal atau desa pra-madya adalah desa yang memilik indeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,5989 dan lebih besar (>)dari 0,4907.
e. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan lebih kecil (=) dari 0,4907.

M. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh keluarga berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program keluarga berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB mandiri tinggi, kepesertaan KB pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel II.112.

Tabel II.112
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,22	2,19	2,15	2,11	2,07

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Memperhatikan data di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2013 terjadi tren penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB *(*akseptor*)* menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

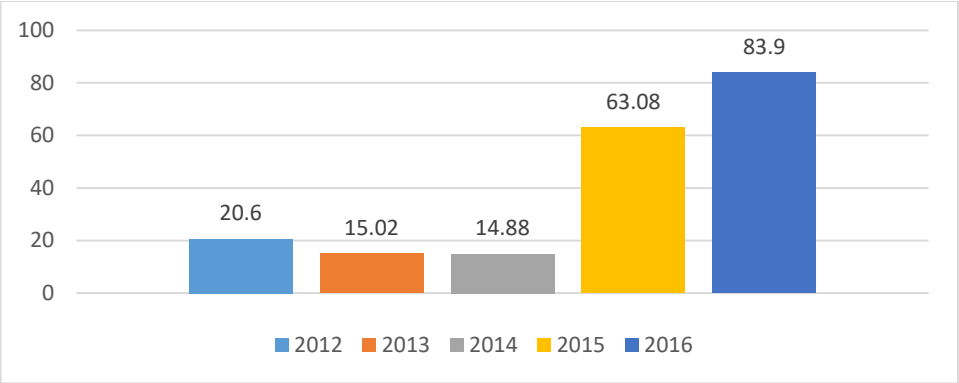
Tabel II.113
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d. 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah akseptor KB	52.762	40.976	37.576	38.967	229.251
2.	Jumlah pasangan usia subur	256.116	272.808	252.481	279.880	273.191
3.	Rasio akseptor KB	20,60	15,02	14,88	13,92	83,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Berdasarkan Tabel II.113 pada kurun waktu 2012-2015 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, namun di tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 13,92 ditahun 2015 menjadi 83,92 pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut :

Grafik II.17
Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d. 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *(update* grafik*)*



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahapandiantaranya**,** Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.114 sebagai berikut:

Tabel II.114
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248	20.648
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259	107.369
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928	318.438

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.114 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang drastis, terutama meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I. Artinya terjadi peningkatan jumlah keluarga Sejahtera 1+ secara drastic, namun bersamaan dengan itu terjadi juga peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera hampir dua kali.

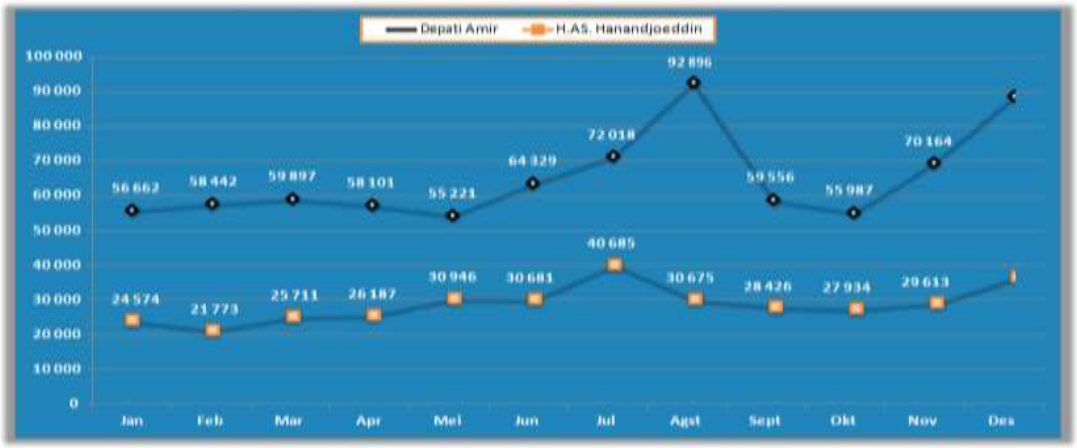
N. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.18.

Grafik II.18

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada tabel II.115 berikut:

Tabel II.115
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	8	4.389
b. Nonreguler	92	180.044
2. Pelayaran Dalam Negeri	1.988	2.870.313
3. Pelayaran Rakyat	316	63.288
4. Pelayaran Perintis	-	-
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 1.988 unit dengan berat total 2.870.313 *Grosston.*

Disisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2012 – 2016 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada tabel II.116.

Tabel II.116
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	2 359	42 262	4 169	16 633	8 166	307 604
2015	2 615	39 543	4 275	17 701	8 499	325 432
2014	2 610	35 599	4 295	17 096	8 237	328 114
2013	2 648	31 137	4 325	16 640	8 124	333 802
2012	2 672	26 006	4 036	15 604	7 585	325 196

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013 – 2016.

O. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal,belum optimalnya pengembangan layanan *e-Gov* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan*e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional.

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengambangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

Tabel II.117
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	738	782	798	812	821
2.	Jumlah Koperasi	950	998	1.076	1.103	1.149
3.	Persentase Koperasi Aktif	77.70	78.35	74.16	73.61	71,45

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan, dari data di atas tahun 2013 sebesar 78, 35 % menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,16 % dan menjadi 71,45 % pada tahun 2016.

Tabel II.118
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2012 UKM sebanyak 284.859 meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 291.322 dan 292.456 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 293.985.

Q. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: "Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional". Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.
Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyajikan data terkini (up to date) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Tabel II.119
Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Investor	46	64	104	74	164	282
2	Nilai Investasi (Triliun Rp)	1.706,77	1.738,75	2.056,98	1.156,00	3.061,08	5.939,80

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Keterangan : 2018** : sampai dengan Triwulan III

R. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olahraga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaanperencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalammemberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjangpenyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel II.120
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	15	15	14	12	14

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari data Tabel di atas, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2013 s.d 2017) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda.

Tabel II.121
Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Klub/Organisasi Olahraga	595	595	595	595	595

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil tanpa perubahan yaitu sebanyak 595 klub/organisasi.

S. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing

Tabel II.122
Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

T. Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural esselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah: (a). jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (b). jumlah Penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol. Dan (c). adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika. Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemanan informasi dan persandian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

U. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

V. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan bangka Belitung relatif menurun walaupun pada tahun 2013 meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di bawah sebesar 8.105 orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 5.100 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 3.623 orang.

Tabel II.123
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017
Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Pengunjung	8.105	5.100	2.271	3.250	3.623

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu perpustakaan milikPemerintah /Pemdadan Perpustakaan Non Pemda. Dari tabel di bawah ini Jumlah Perpustakaan milikpemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 12 buah sedangkan perpustakaan non pemda terjadi penambahan dimana tahun 2013 sebanyak 1.323 buah menjadi 1.340 pada tahun 2017.

Tabel II.124
Jumlah Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perpustakaan Milik Pemda	12	12	12	12	12
2.	Perpustakaan Non Pemda	1.323	1.340	1.340	1.340	1.340

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.125
Urusan Perpustakaan

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	938	2.533	1.724
2	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun			5.893	4.335
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.787 / 20.715	11.008 / 21.137	11.554 / 23.055	11.617 / 22.191
4	Rasio perpustakaan per satuan penduduk				1.341 / 1.459.873 x 1000
5	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/hari			10	8
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.787	11.008	11.554	11.713
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	1 / 13 x 100% = 3,1%	1 / 13 x 100% = 3,1%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

W. Urusan Kearsipan

Tata kelola kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70%. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 baru sebanyak 20 arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 36, angka ini masih belum mencukupi.

Tabel II.126
Urusan Kearsipan

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	6 / 40 x 100% = 15%	15 / 41 x 100% =36,59%	17/ 42 x 100% = 40,47%	19 /42 = 45,24%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	6 keg	1 keg	1 keg	-
3	LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	-	34.84	39.25	-

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nomenklatur kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km^2 atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton) dan produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.127.

Tabel II.127
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Perikanan Tangkap (persentase)**	**18,81**	**19,20**	**13,18**	**18,57**	**19,64**
a	Potensi Produksi (ton)	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
b	Produksi (ton)	199.241,40	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7
2.	**Perikanan Budidaya (persentase)**	**0,22**	**0,32**	**0,33**	**0,35**	**0,29**
a	Potensi Produksi (ton)	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
b	Produksi (ton)	2.939,12	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97

Sumber: Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

a) Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya wilayah Bangka Belitung dengan panjang pantai 1,295.83 Km dan 950 pulau menyimpan potensi yang cukup besar untuk usaha budidaya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk perikanan budidaya yaitu sejumlah 104,863 Ha untuk budidaya laut; 64,050 Ha untuk budidaya air payau dan 1,602 Ha untuk budidaya air tawar. Sentara produksi perikanan budidaya sebagai berikut :

1. Udang Vaname (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka).
2. Kerapu (Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur).
3. Lele (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur).
4. Bandeng (Kabupaten Bangka Selatan).
5. Ikan Hias (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung).
6. Rumput Laut (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan).

Berdasarkan Tabel II.128 menunujukkan bahwa perkembangan perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 3.844,97 ton mengalami penurunan dari produksi tahun 2016 yang lalu sebesar 4.618,87. Tahun 2016 produksi terbesar disumbangkan oleh komoditas udang vaname dengan nilai produksi sebesar Rp140.880.620.000. Produksi tertinggi diperoleh dari jenis budidaya tambak yaitu sebesar 1, 683.69 ton disusul budidaya jaring apung tawar dan tancap tawar sebesar 1, 224.33 ton.

Kota Pangkalpinang tercatat sebagai daerah penyumbang produksi budidaya terbesar yaitu sebesar 1,464.83 ton disusul oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan produksi sebesar 1,428 ton. Tahun 2016 juga terjadi pergeseran jenis budidaya dimana pembudidaya mulai memanfaatkan kolong-kolong eks galian timah sebagai media budidaya. Hal tersebut menyebabkan jumlah budidaya kolam menurun dan budidaya jaring tancap tawar meningkat enam kali lipat dibndingkan tahun sebelumnya. Tahun 2016 tercatat sebanyak 1759 orang pembudidya. Menurut Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka Bangka Belitung 2016, kendala terbesar dalam usaha budidaya perikanan adalah faktor alam, serta kurangnya ketersediaan benih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Perikanan Tangkap

Sumber daya perikanan tangkap di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber: KEP MEN KP Nomor: KEPULAUAN 45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumber daya ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia). Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km^2atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Sentra produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Belitung sebagai berikut :

1. Tongkol (Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkapinang).
2. Tenggiri (Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka tengah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah).
3. Kerapu (Kabupaten Belitung, Kota Pangkapinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah).

Berdasarkan Tabel II.129 menunujukkan bahwa pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 208.019,7 ton dibandingkan tahun 2016 lalu yaitu 196.704,00 ton. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 3 (tiga) terkahir terus mengalami peningkatan. Artinya hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap memberikan kontribusi yang bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka Bangka Belitung 2016, jumlah

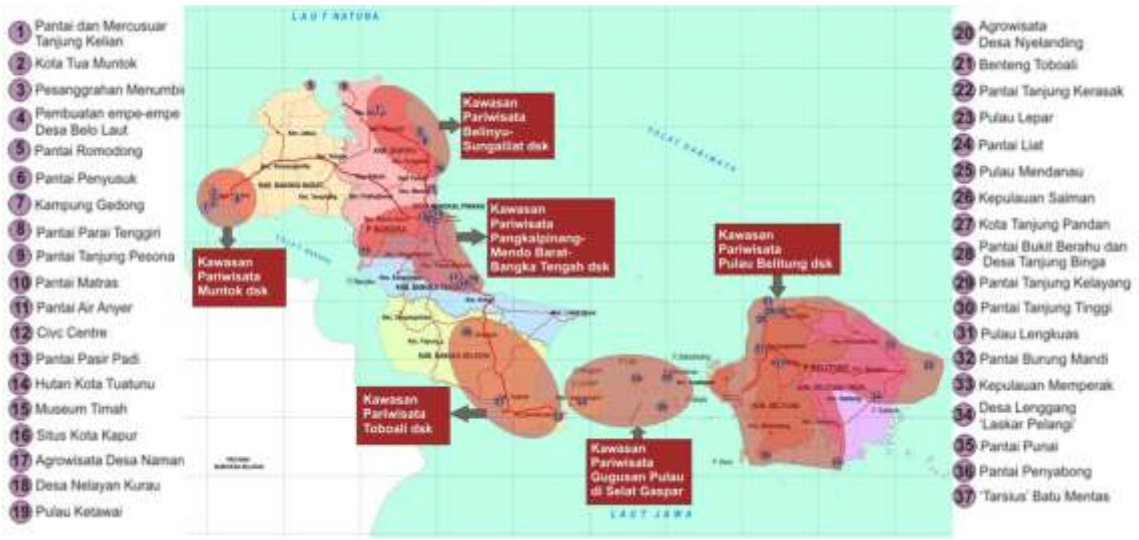
nelayan di tahun 2016 adalah sebanyak 46.506 orangg. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 21.389 orang nelayan. Adapun melonjak jumlah nelayan adalah karena sektor pertambangan yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun sebaran nelaya terbanyak ada di Kabupaten Belitung sebnayak 13.111 orang disusul oleh Kabupaten Bangka Barat sebanyak 8.267 orang nelayan. Selanjutnya jumlah perahu/kapal perikanan di tahun 2016 adalah sejumlah 6284 unit, dengan unit terbanyak yaitu kapal motor tempel berukuran kurang dari 5GT. Berdasarkan hasil data statistik, Kapal Motor Tempel terbesar yang terdata adalah ukuran di atas 30 GT sebanyak 43 unit.

B. Urusan Pariwisata

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi dan saat ini mulai mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.8 berikut :

Gambar II.8
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Tabel II.128
Kunjungan Wisatawan Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Wisatawan Domestik	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279	384.596

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143	7.497
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422	390.465

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2018

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan dibagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan hal ini akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 238.405 orang dan meningkat secara bertahap setiap tahunnya menuju 369.422 orang pada tahun 2017.

Tabel II.129

Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (Hari) Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Wisatawan Mancanegara	2,22	2,94	3,28	2,11	3,10
2.	Wisatawan Domestik	1,93	2,02	1,90	1,76	1,79

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara tahun 2013 selama 2,22 hari dan meningkat menjadi 3,10 hari pada tahun 2017, sedangkan rata-rata lama menginap wisatawan domestik selama 1,93 hari pada tahun 2013 dan menurun menjadi 1,79 hari pada tahun 2017. Rata-rata lama menginap wisatawan domestik cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan wisatawan mancanegara dikarenakan tujuan wisatawan domestik mengunjungi suatu daerah adalah dalam rangka mengunjungi teman atau keluarga maupun tugas kedinasan.

Tabel II.130

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2016

No	Kabupaten/Kota	TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA					
		2015			2016		
		Tersertifikasi	Jumlah	%	Tersertifikasi	Jumlah	%
1	BANGKA	25	396	6,31	10	395	2,53
2	BELITUNG	46	732	6,28	50	889	5,62
3	BANGKA BARAT	9	93	9,68	4	92	4,35
4	BANGKA TENGAH	24	316	7,59	10	303	3,30
5	BANGKA SELATAN	5	28	17,86	4	30	13,33
6	BELITUNG TIMUR	36	98	36,73	25	103	24,27

No	Kabupaten/Kota	TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA					
		2015			2016		
		Tersertifikasi	Jumlah	%	Tersertifikasi	Jumlah	%
7	PANGKAL PINANG	56	604	9,27	13	583	2,23
	Total	**201**	**2.267**	**8,87**	**116**	**2.395**	**4,84**

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 8,87% di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016 menjadi 4,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi masih jauh dari ideal untuk mendukung pelayanan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.131
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017

NO	KAB/KOTA	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	PANGKALPINANG	7.336.894.862	8.801.420.374	9.631.350.478	9.954.137.659	11.583.060.799,00
2	BANGKA	3.599.872.745	4.136.429.771	4.236.244.364	4.850.669.654	4.496.786.900,33
3	BANGKA TENGAH	6.472.305.848	7.431.657.014	7.419.934.320	10.835.828.660	10.130.943.652,90
4	BANGKA BARAT	982.272.425	1.088.258.520	1.268.342.766	1.279.951.251	2.029.081.180,70
5	BANGKA SELATAN	880.910.600	1.292.168.800	1.254.853.300	1.228.007.952	1.453.701.050,00
6	BELITUNG	5.415.332.790	7.223.515.080	10.606.105.256	14.168.692.380	16.498.482.650,60
7	BELITUNG TIMUR	1.117.619.224	1.830.114.107	1.421.310.603	1.319.978.955	1.504.338.120,00
	PAD 7 Kab/Kota	25.805.208.493	31.803.563.666	35.838.141.086	43.637.266.511	47.696.394.354,00
	Kenaikan	37,82	23,24	12,69	21,76	9,30

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan realisasi PAD sektor pariwisata Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disebabkan oleh berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung setelah ditetapkannya Pulau Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Geopark Pulau Belitong sebagai Geopark Nasional.

C. Urusan Pertanian

Analisa berdasarkan produksi yaitu kenaikan produksi komoditi utama dan meningkatnya daya serap pasar dan lapangan usaha sektor pertanian seperti data dibawah ini :

Tabel II.132
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2013 – 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	18,58	19,38	19,93	20,31	18,93

*Catatan/Notes : *) Angka Sementara / Preliminary Figures*
Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik.

Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.133.

Tabel II.133

Luas Lahan (Ha) menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	**LAHAN PERTANIAN**	**1.174.938**
I.1.	Lahan Sawah	**25.058**
	a. Irigasi	4.234
	b. Tadah hujan	17.878
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	**1.149.880**
	a. Tegal	99.038
	b. Ladang	27.435
	c. Perkebunan	391.064
	d. Hutan rakyat	43.315
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	55.987
	g. Lain-lain	529.810
II	**LAHAN NON PERTANIAN**	**489.080**
II.1	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	489. 080
	Jumlah	**1.664.018**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah,

meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertani, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

satu dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

D. Urusan Kehutanan

Luas hutan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan luasan 657.378,26 Ha yang terdiri dari 35.750,84 Ha Hutan Konservasi, 184.276,95 Ha Hutan Lindung, 436.647,89 Ha Hutan Produksi dan 692,58 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.134.

Tabel II.134
Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	189.965	184.276,95
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.473	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	**659.014,58**	**659.014,58**	**659.014,58**	**659.014,58**	**657.378,26**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.135 berikut.

Tabel II.135
Potensi Sumber Daya Mineral Logam (ton) Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(2)
1	Timah	5.280.682
2	Bauksit	855.904
3	Monasit	129.891
4	Xenotin	14
5	Diabas	53..669.063.446
6	Titan Plaser	10.794
7	Besi Primer	18.524.953
8	Seng	10.232
9	Timbal	849.250
10	Perak	731

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

F. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.136.

Tabel II.136
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Ekspor (us Dollar)**	**1.761,5**	**1.596,4**	**1.653,1**	**1.191,1**	**1.290,7**	**1.614,6**
	Timah	1.527,9	1.374,9	1.376,8	973,2	963,8	1.264,8
	Non Timah	233,6	221,7	276,3	217,9	326,8	349,7
2.	**Impor (us Dollar)**	**88,9**	**49,1**	**58,9**	**49,9**	**132,0**	**70,5**
	Migas	15,3	14,3	20,3	31,4	41,4	52,4
	Non Migas	73,6	34,8	37,7	18,5	90,61	18,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2012, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.527,9 juta USD, namun

pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 973,2 juta USD dan pada tahun 2017 mengalami peningktan menjadi 1.264,8 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2012, impor mencapai 73,6 juta USD dan menurun pada tahun 2013 dan 2014 meningkat menjadi 37,7 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2015 menjadi 18,5 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2012 – 2017 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

G. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.137
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Industri Kecil	8.956	10.954	12.094	12.737	12.954
	Laju pertumbuhan	0,33	0,22	0,10	0,05	0,05
2.	Industri Menengah	109	103	112	106	109

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Laju pertumbuhan	0,36	-0,06	0,09	-0,05	0,04

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.139 laju pertumbuhan baik industri kecil maupun menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2013 sebesar 0,33 persen dan secara konsisten turun menjadi 0,22 persen ditahun 2014 dan pada tahun 2016 menjadi 0,05 persen. Sementara itu pada kegiatan industri menengah, laju pertumbuhan pada tahun 2013 mencapai 0,36 persen dan menunjukan penurunan jumlah di tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan -0,06 persen, tumbuh sedikit ditahun 2015 sebesar 0,09 persen dan tumbuh sebesar 0,04 persen di tahun 2017.

H. Urusan Transmigrasi

Pada urusan transmigrasi terdapat kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategi Provinsi dengan luas 41.100,3 ha. Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut No. 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL).

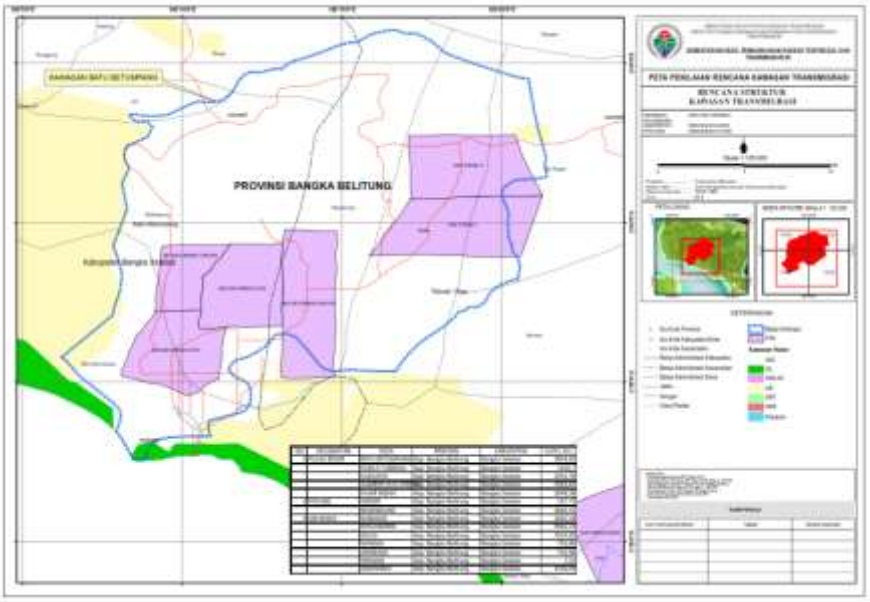
Tabel II.138

Penggunaan Lahan di Kawasan Batu Betumpang

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Hutan	2.512,20	6,11%
Hutan Rawa	3.731,56	9,08%
Vegetasi Pantai	6,04	0,01%
Kebun	6.787,10	16,51%
Pemukiman	842,28	2,05%
Semak Belukar	4.046,02	9,84%
Tambak	3,57	0,01%
Pertambangan/Bekas Tambang	572,35	1,39%
Tanah Kosong	5,96	0,01%
Tegalan/Ladang	22.593,22	54,97%
Total	41.100,3	100,00%

Sumber: Diolah dari Peta SPOT 5 dan Kecamatan Dalam Angka 2007

Gambar II.9
Peta Penilaian Rencana Kawasan Transmigrasi



Transmigrasi di Pulau Bangka dimulai sejak tahun 1981, dimana daerah tujuan transmigrasi adalah Kabupaten Bangka dengan lokasi di Kawasan Mudel (UPT Batu RusaTengah) dan saat ini telah diserahkan kepada kepada pemerintah daerah, kemudian telah berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan sehingga batasan dahulu merupakan kawasan transmigrasi sudah tidak terlihat lagi.

Perkembangan transmigrasi di Kabupaten Bangka Tengah awalnya ditempatkan sejumlah 100 kepala keluarga (421 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Transmigrasi daerah setempat yang ditempatkan di UPT Kurau, dengan bidang usaha adalah nelayan, dan pada tahun 1982, 1983 Kabupaten Bangka Tengah dijadikan lagi daerah tujuan Transmigrasi dengan sejumlah 150 kepala keluarga (817 jiwa) yang berasal dari wilayah setempat, dengan bidang usaha yang sama yaitu nelayan.

Kabupaten Bangka Selatan dijadikan tempat transmigrasi mulai pada tahun 1982-1983 dengan jumlah transmigrasi sebanyak 298 kepala keluarga (1376 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wialayah setempat, yang bergerak dibidang usaha pertanian, yang ditempatkan di UPT Rias Toboali I, dan pada tahun 1986 dan tahun 1991 di UPT Rias Toboali II ditempatkan lagi transmigrasi sebanyak 350 kepala keluarga (1284 jiwa), yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Transmigrasi wilayah setempat, yang bergerak di bidang usaha pertanian.

UPT Batu Betumpang/Payung selama empat periode (Tahun 1990-1991, 1991-1993-1996, 1994-1995, dan tahun menjadi daerah tujuan transmigrasi yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali Kabupaten tujuan penempatan transmigrasi terbesar adalah di Kabupaten Bangka Selatan dimana dari 4.396 kepala keluarga sebanyak 2.877 kepala keluarga atau 65,45 persen di tempat Bangka Selatan. Ada beberapa titik yang menjadi tujuan transmigrasi di Pulau Bangka yang salah satunya yaitu UPT Rias dan UPT Bukit Anda di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan padaTahun 2014 ada penempatan transmigrasi di UPT Jebus sebanyak 43 kepala keluarga terdiri dari 10 KK transmigrasi daerah asal Provinsi DIY, 10 KK dari

Provinsi Jawa Timur dan 23 KK dari transmigrasi daerah setempat dari Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, lebih lengkapnya data transmigrasi di Pulau bangka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.139

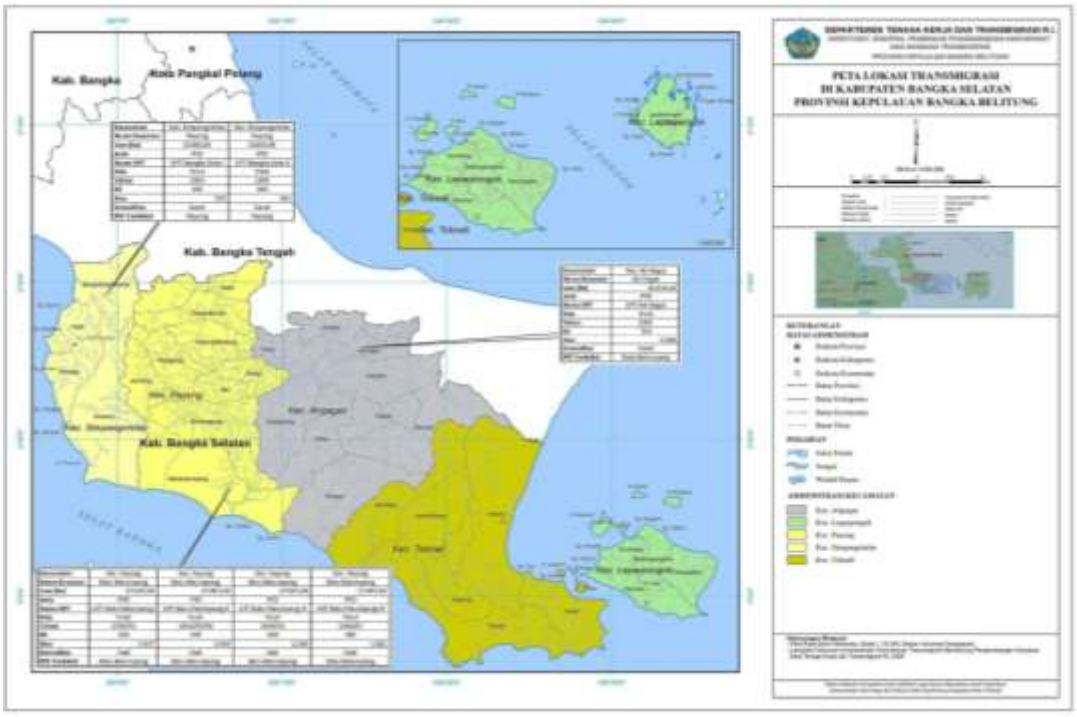
Kondisi Transmigrasi Di Wilayah Pulau Bangka

NO	NAMA UPT	LOKASI	JML KK	JML JIWA	ASAL TRANS	BIDANG USAHA	TH PENEMPATAN	KETERANGAN
	PULAU BANGKA							
1	Kurau I	Kab. Bangka Tengah	100	421	Jateng, Lokal	Nelayan	1981-1983	
2	Kurau II	Kab. Bangka Tengah	150	817	Kurau(Lokal)	Nelayan	1982 - 1983	
3	Rias Toboali I	Kab. Bangka Selatan	298	1376	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1982 – 1983	
4	Rias Toboali II	Kab. Bangka Selatan	350	1284	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1991, 1986	
5	Batu Betumpang I/Payung	Kab. Bangka Selatan	500	1917	Jateng, Jabar,Jatim,DIY, Lokal	Pertanian	1990 – 1991	
6	Batu Betumpang II/Payung	Kab. Bangka Selatan	499	1958	Jateng, Jabar,Jatim,DIY,Bali, Lokal	Pertanian	1991-1993 - 1996	
7	Batu Betumpang III/Payung	Kab. Bangka Selatan	400	1280	Jateng, Jabar,Jatim,Bali, Lokal	Pertanian	1994 – 1995	
8	Batu Betumpang VI/Payung	Kab. Bangka Selatan	380	1382	DKI,Bali, Jabar,Jatim,Jateng, Lokal	Pertanian	1996 – 1997	
9	Bangka Kota I	Kab. Bangka Selatan	100	372	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1992	
10	Bangka Kota II	Kab. Bangka Selatan	100	361	Jabar, Jateng	Pertanian	1994	
11	PERMIS	Kab. Bangka Selatan	100	356	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1995	
12	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	100	391	Jateng	Pertanian	2004	Belum terbit sk sertifikat lahan kerena tumpang tindih dgn kebun sawit perusahaan
13	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	50	166	Wonosobo	Pertanian	200600%	
14	Jebus	Kab. Bangka Barat	43	158	DIY, Jatim, Lokal	Pertanian	201400%	

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Gambar II.10

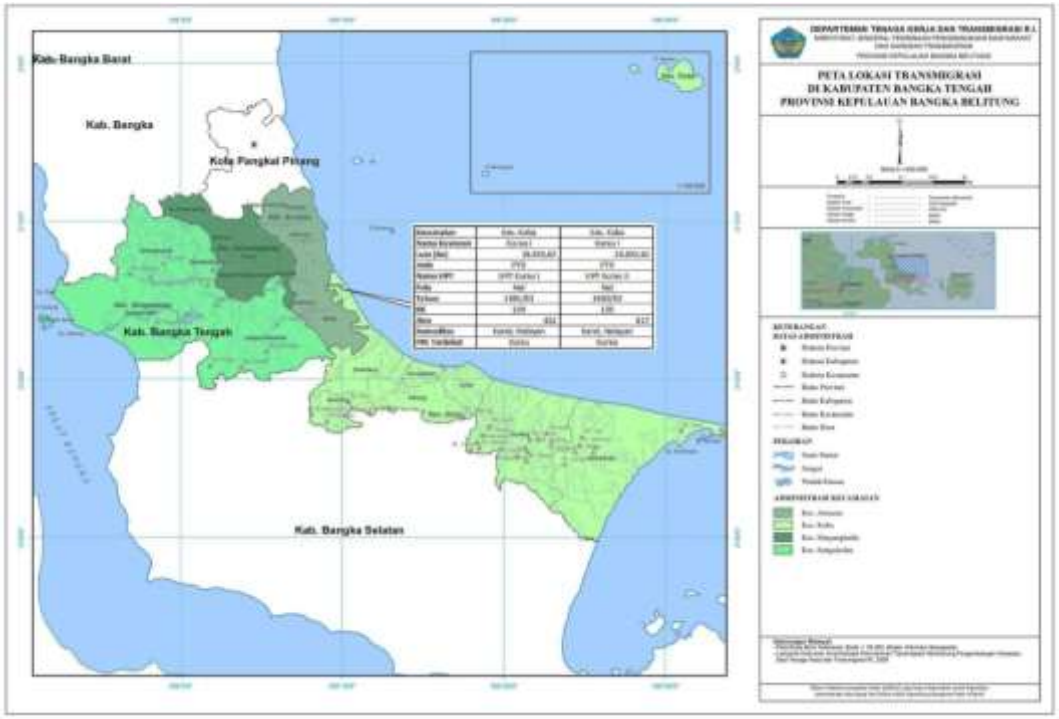
Peta Lokasi Transmigrasi di Kabupaten Bangka Selatan



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Gambar II.11

Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Gambar II.12

Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Pulau Belitung yang meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, dijadikan tempat transmigrasi mulai pada tahun 1986-1993

dengan asal transmigran dari Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan Lokal dengan menempati 9 UPT, dengn bidang usaha sektor pertanian, Untuk lebih jelasnya keberadaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Belitung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.140

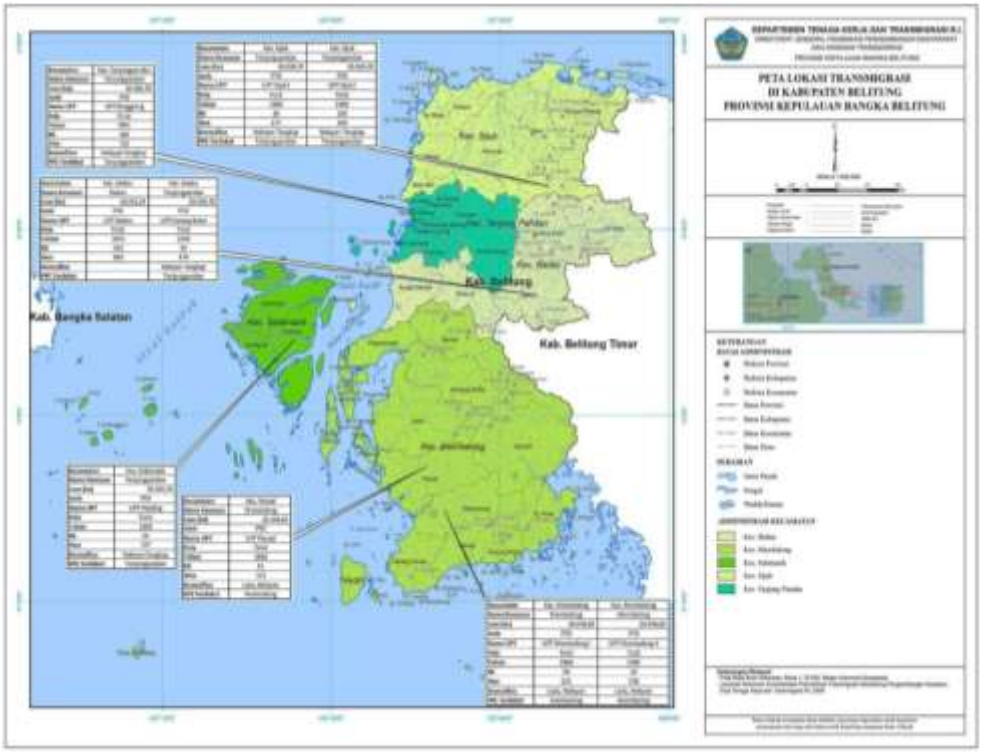
Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Belitung

NO	NAMA UPT	LOKASI	JML KK	JML JIWA	ASAL TRANS	BIDANG USAHA	TH PENEMPATAN	KETERANGAN
	PULAU BELITUNG							
1	Perpat	Kab. Belitung	51	172	Jateng	Pertanian	1986	
2	Membalong I	Kab. Belitung	50	215	Jateng	Pertanian	1986	Belum terbitnya sertifikat lahan kerena tumpang tindih dgn lahan timah
3	Membalong II	Kab. Belitung	100	328	Jatim, Jateng	Pertanian	1996	
4	Petaling, Selat Nasik	Kab. Belitung	50	197	Jateng, Jatim	Pertanian	1988	
5	Sijuk I	Kab. Belitung	50	177	Jabar, Bali	Pertanian	1989	
6	Sijuk II	Kab. Belitung	100	304	Bali	Pertanian	1989	
7	Kacang Butor	Kab. Belitung	93	374	Jateng	Pertanian	1990	
8	Renggiang	Kab. Belitung	100	310	Jatim,Jateng,DIY,Lokal	Pertanian	1991	
9	Badau	Kab. Belitung	100	368	Jabar,DKI, Jateng	Pertanian	1993	
10	Dendang	Kab. Belitung Timur	50	206	Jateng, Lokal	Pertanian	1995	
11	Lilangan I	Kab. Belitung Timur	100	513	Jabar,DKI	Pertanian	1996	
12	Lilangan II	Kab. Belitung Timur	150	513	DIY, Jabar,Jateng	Pertanian	2005	
13	Birah	Kab. Belitung Timur	100	339	DKI, Jatim	Pertanian	1998	
14	Selinsing	Kab. Belitung Timur	100	416	Jabar, Lokal	Pertanian	2005	
15	Selinsing	Kab. Belitung Timur	75	262	Jabar	Pertanian	2007	
	JUMLAH		**1269**	**4694**				

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Gambar II.13

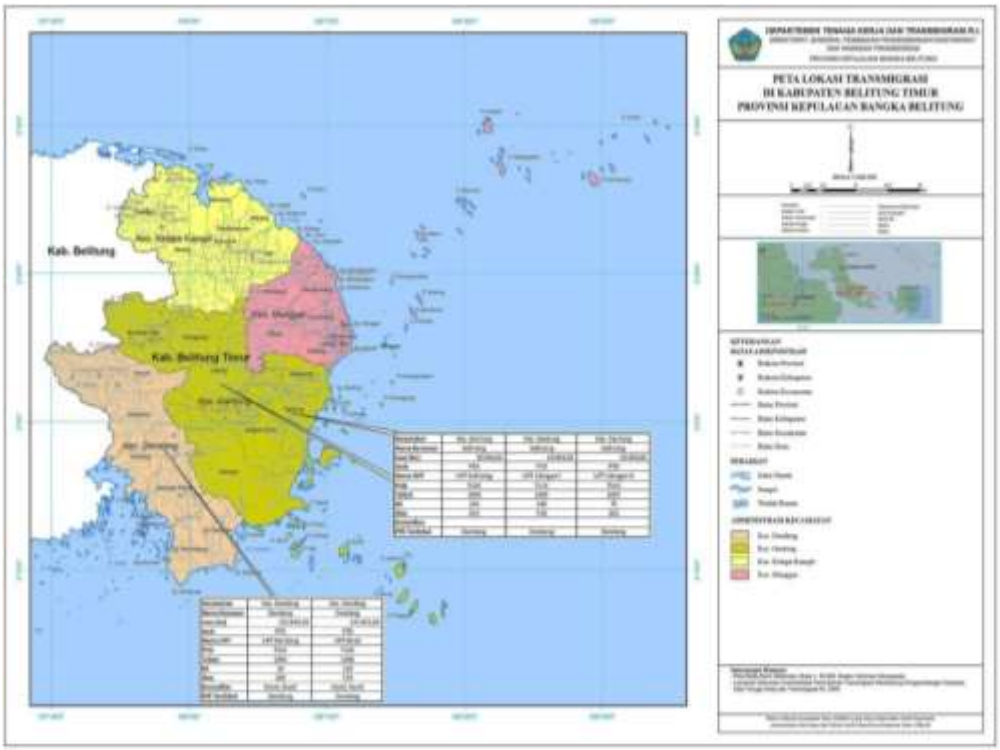
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Gambar II.14

Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Kabupaten Belitung Timur program transmigrasi di mulai tahun 1995, yang jadi tempat tujuan transmigrasi adalah UPT Dendang, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 50 kepala keluarga (206 jiwa), berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan berasal dari transmigrasi wilayah setempat. Pada tahun 1996 yang dijadikan tempat transmigrasi adalah UPT Lilangan I, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 100 kepala keluarga (513 jiwa), yang berasal dari Provinsi Jabar dan DKI, dan pada tahun 1998 yang dijadikan daerah tujuan transmigrasi adalah Lilangan II, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 150 kepala keluarga (513 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Jawa Tengah. Pada tahun 1998 UPT Birah, menjadi daerah tujuan transmigrasi dari asal Provinsi Jawa Timur, dan DKI dengan jumlah transmigrasi adalah 100 kepala keluarga (339 jiwa).

Pada tahun 2005 dan 2007 di Kabupaten Belitung Timur yang dijadikan daerah transmigrasi adalah UPT Selinsing, dengan jumlah transmigrasi 100 kepala keluarga (410 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, dan transmigrasi berasal dari wilayah setempat. Untuk tahun 2007 jumlah transmigrasi yang ditempatkan di UPT Selingsing sebanyak 75 kepala keluarga (262 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan transmigrasi dari wilayah setempat, bergerak di bidang pertanian.

Potensi Wilayah transmigrasi di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut.

1. Perkebunan : lada, sawit, karet, coklat, durian, dan kopi.
2. Pertanian : Sayur mayur, padi, jagung, dan kedelai.
3. Perikanan : Tambak, keramba, dan rumput laut.
4. Peternakan : Sapi, Kambing, dan unggas.

Lokasi Transmigrasi Bina, ada di

- Kecamatan : Gantung
- Desa : Selinsing
- Dusun : Danau Merantih
- Luas Areal : 1.500 ha
- Daya Tampung : 175 Kepala Keluarga (KK)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.141.

Tabel II.141
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d. Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata pengeluaran per kapita	936.726	1.047.711	1.118.101	1.211.879	1.360.994

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp936.726 pada tahun 2013 menjadi Rp1.360.994 pada tahun 2017.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.142.

Tabel II.142
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d. Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks yang diterima petani (lt)	128,47	112,62	121,95	120,77	116,43	106,13

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	128,14	110,89	116,47	119,09	122,09	125,73
3	Rasio	1,003	1,016	1,05	1,01	0,96	0,84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel II.142 menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2018 bersifat fluktuatif. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2103-2015 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Selanjutnya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2018 disebabkan oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,21 persen, subsektor peternakan sebesar 0,72 persen dan subsektor perikanan sebesar 0,23 persen. Artinya dengan adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 (tiga) tahun terakhir, akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani.

C. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.143 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 s.d. 2015 yaitu sebesar Rp8.746.368 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp9.286.512 pada tahun 2015. Namun menurun signifikan di tahun 2016 menjadi Rp615.498. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu lima tahun relatif konstan.

Tabel II.143
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.746.368	9.082.432	9.286.512	615.498	N/A
2	Total pengeluaran	16.063.118	16.671.131	17.264.385	1.211.879	N/A
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.144 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu

wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Bedasarkan tabel II.144 secara keseluruhan total pengeluran tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.211.879. Total pengeluaran paling tinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar Rp1.499.317, sedangkan total pengeluran paling kecil adalah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp1.034.887.

Tabel II.144

Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	627.426	1.205.228	0,52
2	Kabupaten Bangka Barat	537.508	1.118.834	0,48
3	Kabupaten Bangka Selatan	520.345	1.046.885	0,31
4	Kabupaten Bangka Tengah	513.860	1.034.887	0,50
5	Kabupaten Belitung	596.381	1.211.879	0,49
6	Kabupaten Belitung Timur	610.456	1.206.380	0,51
7	Kota Pangkalpinang	816.751	1.499.317	0,54
	Provinsi	615.498	1.211.879	0,51

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

D. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.145.

Tabel II.145

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d. Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	19.664	12.532	12.532	8.255	16.264	N/A
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	39	40	40	104	156	164
3	Rasio daya serap tenaga kerja	504,20	313,30	313,30	79,37	104.26	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.146.

Tabel II.146
Rasio luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	233.977 Ha	295.068 Ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 Ha	282.061 Ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 Ha	360.707 Ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 Ha	212.677 Ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 Ha	229.369 Ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 Ha	250.691 Ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 Ha-	11.840 Ha	0,19
	Jumlah	**1.186.652 Ha**	**1.542.414 Ha**	**0,73**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

B. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.147.

Tabel II.147
Infrastruktur Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,25	5,83	3,21	4,35	4,62
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus	26	26	26	26	26
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	100	100	100
4.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	69,13	67,95	80,96	82,15	84,25
5.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	92,81	80,96	88,96	91,15	62,25
6.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71
7.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,93	0,95	0,90	0,92	0,93

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.148
Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksusal	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
Total		**2625**	**1429**	**2654**	**1685**	**2158**	**1282**	**2478**	**1489**	**816**	**302**

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

*Tahun 2016 data sampai dengan bulan Mei.
Keterangan:
JTP = Jumlah Tindak Pidana
PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah

laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

B. Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relatif lebih aman. Jumlah demo tahun 2010–2016 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun–tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.149.

Tabel II.149
Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Bidang Politik	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	8	7	10	24	15
3	Pemogokan Kerja	4	1	2	3	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	14	9	17	30	17

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Data tahun 2016 sampai dengan bulan Mei.

C. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.** Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember 2010 dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik

perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, sektor komunikasi dan informatika, sektor koperasi dan UKM, sektor kehutanan, sektor perhubungan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

D. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.150 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2013-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tabel II. 150
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d. Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp juta)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Kendaraan Bermotor	149.719,57	162.036,29	172.239,98	171.879,40	197.962,27
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	154.884,48	139.175,29	110.239,08	111.656,78	169.320,29

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	139.313,51	163.479,97	165.429,32	151.587,72	182.118,10
4	Pajak Air Permukaan	3.544,64	4.036,07	4.860,32	5.707,53	7.541,44
5	Pajak Rokok	-	39.534,99	54.176,24	67.152,03	72.194,35
Jumlah		**447.462,20**	**508.262,62**	**506.944,94**	**507.983,46**	**710.029,19**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari data realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2016 besar PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp507.983,46 meningkat signifikan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp710.029,19.

F. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.151, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2010-2017 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

Tabel II. 151
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit

No	Nomor	Peraturan Daerah
		Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.152
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.152 di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per-10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga

kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.153 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2013 sebesar 46,83 persen dan konstan sepanjang tahun 2014 s.d. 2015, tetapi kemudian meningkat menjadi 46,92 persen. Namun pada tahun 2017 menunjukksn penurunan menjadi 46,16 persen.

Tabel II.153
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	369.912	377.995	386.133	392.371	392.057
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	49.520	50.602	51.688	55.372	59.810
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	419.432	428.597	437.821	447.743	451.867
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	895.691	915.284	934.992	954.224	978.998
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,83	46,83	46,83	46,92	46,16

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2017 dan realisasi RPJMD 2012-2017 sampai dengan tahun 2016 dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun 2016 dan realisasi renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017 Triwulan IV. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing perangkat daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja tiap perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.176.302.017.342,00, mengalami perubahan menjadi Rp1.181.957.576,235,26 atau bertambah sebesar Rp5.655.558.893,29 (bertambah sebesar 0,48%). Sampai dengan akhir triwulan IV terealisasi sebesar Rp1.033.912.343.998,00 dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 87,47% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,43% dengan predikat kinerja masing-masing "tinggi".

Tabel II.154

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	1			**URUSAN PENDIDIKAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				WAJIB												
2	1		1	PAUD	APK PAUD	50.83%	44.51%	50,83%	38,19%	75%	50.83%			50.83%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase PAUD terakreditasi minimal B	40%	35%	40%		0%	40%			40%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD Sederajat	116,26%	116,25%	116,26%	116,24%	100%	116.26%			116.26%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM SD Sederajat	97%	96.61%	97%	96,23%	99%	97%			97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APK SMP Sederajat	98%	96.85%	98%	95,74%	98%	98%			98%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM SMP Sederajat	84%	80.07%	84%	76,14%	91%	84%			84%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UAS SD Sederajat	6,75	6,7	6,75		0%	6.75			6.75	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UN SMP Sederajat	7	6,9	7		0%	7			7	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SD sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%			90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%			90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		3	Pendidikan Menengah dan Tinggi	APK Pendidkan Menengah	89%	85%	89%		0%	89%			89%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					APM Pendidkan Menengah	75%	69.53%	75%		0%	75%			75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Nilai rata-rata UN SMA IPA	7,5	7,4	7,5		0%	7.5			7.5	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Nilai rata-rata UN SMK	7,3	7,25	7,3		0%	7.3			7.3	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B	85%	80%	85%		0%	85%			85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase tingkat melanjutkan lulusan pendidikan menengah	10%	5%	10%		0%	10%			10%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
					ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kepulauan Bangka Belitung											
					Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melajutkan keperguruan tinggi	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Pendidikan Menengah dan Tinggi	Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		4	Pendidikan Non Formal	Angka Buta Aksara		3.10%	3%	3,25%	108%				3%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Lembaga Kursus Terakreditasi		30%	35%		0%					Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill	25%	-	-		#VALUE!	25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		5	Manajemen Layanan Pendidikan	Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan		100%	100%	100%	100%					Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1		6	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota		#VALUE!	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota			Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Pendidikan	Biro Kesra
2	**2**			**KESEHATAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	66,49%	100%	91,27%	91%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	24,28%	100%	90,86%	91%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	95,28%	100%	87,49%	87%	100%			100%	Kesehatan	RSUP

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100%	99,34%	99%	100%			100%	Kesehatan	RSUP
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			#DIV/0!					Kesehatan	RSJ
				WAJIB												
2	2		1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%		0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
2	2		2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar					#DIV/0!					Kesehatan	RSUP
2	2		3	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75%	75	65	70		0%	75			75	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSUP	0	0	6	85,80%	14%	0			90	Kesehatan	RSUP
					Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSJ	90	0	85		0%	90			90	Kesehatan	RSJ
2	2		4	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%	30%	50%	40%		0%	30%			30%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		5	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98%	84%	74%	84%		0%	84%			98%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menualar 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		7	Standarisasi	Persentase fasilitasi pelayanan					#DIV/					Kesehatan	Dinas

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				pelayanan kesehatan	kesehatan di provinsi dan kab/kota					0!						Kesehatan
					Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional	0	0	0		#DIV/0!	0			44%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP	80	70	75		0%	80			100	Kesehatan	RSUP
					Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP	85	77	80		0%	85			100	Kesehatan	RSUP
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP)	100	60	80		0%	100			100	Kesehatan	RSUP
					Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
					Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		8	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%-95%	95%	85%	90%		0%	95%			95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		9	Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80	34,46%	75%	57,96%	77%	80			80	Kesehatan	RSUP
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		10	Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara	80	88,34%	75%	91,47%	122%	80			80	Kesehatan	RSUP
					Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2		12	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28	28	30	29		0%	28			28	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		13	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase pembinaan pelayanan kesehatan lansia	80%	50%	75%		0%	80%			80%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		14	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40%	40%	37%	39%		0%	40%			40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		15	Peningkatan keselamatan ibu dan anak	persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%	27	29	28		0%	27			98	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27	26	27	27		0%	26			26	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		1	Kebijakan dan	Persentase ketersediaan bank	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
			6	manajemen pembangunan kesehatan	data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100%											Kesehatan
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		17	Pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya	Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas	90%	75%	85%		0%	90%			90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		18	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana labkesda	persentase sarana dan prasarana labkesda	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan & BKD Pemprov
2	2		19	Sumber daya kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	100	77.1	88.4		#VALUE!	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2		20	Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagan penanggulangan bidang kesehatan	25%				#DIV/0!	25%			100.00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	**3**			**PEKERJAAN UMUM**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
				WAJIB												
2	3		1	Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		#VALUE!	94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						#DIV/0!						
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong						#DIV/0!						
2	3		2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		#VALUE!	94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		3	Tangap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana (%)	95%				#DIV/0!	95%			95%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		4	Pembangunan Sistem Informasi/*Data Base* Jalan dan Jembatan	Tersedianya informasi kondisi jalan dan jembatan (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		6	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		7	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih					#DIV/0!				100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		8	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%)					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)					#DIV/0!				100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
					Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki sanitasi					#DIV/0!					Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3		10	Pengendalian Banjir	Persentase daerah rawan banjir (%)					#DIV/0!				100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh						#DIV/0!						Dinas PU
2	3		11	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)					#DIV/0!				70.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
				Program Pemb. Sarana Dan Prasarana Umum						#DIV/0!						Dinas PU
2	3		12	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	2 dok	2 dok	2 dok		#VALUE!	2 dok			2 dok	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						#DIV/0!					Pertanahan	Dinas PU
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)						#DIV/0!					Pertanahan	Dinas PU
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,						#DIV/0!					Pertanahan	Dinas PU
				Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah						#DIV/0!						
2	**4**			**PERUMAHAN**												
				Program Pengembangan Perumahan						#DIV/0!					Perumahan	Dinas PU
				Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						#DIV/0!					Perumahan	Dinas PU
2	4		1	Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)					#DIV/0!				100%	Perumahan	Dinas PU
2	4		2	Pengelolaan Area Pemakaman	TPU terkelola baik (%)					#DIV/0!					Perumahan	Dinas PU
2	**5**			**PENATAAN RUANG**												
2	5		1	Perencanaan Tata Ruang	Persentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang	90%	80%	85%		0%	90%			Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Penataan Ruang	Bappeda
				Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis	4 KSP	3 KSP	3 KSP		#VALUE!	4 KSP			8 Rencana Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					provinsi									Kawasan Strategis Provinsi		
					Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP	3 Dokumen KLHS	1 Dokumen KLHS	2 Dokumen KLHS		#VALUE!	3 Dokumen KLHS			6 Dokumen KLHS RTR KSP	Penataan Ruang	Dinas PU
2	5		2	Pemanfaatan Ruang	Tertib pemanfaatan ruang (%)					#DIV/0!				Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Penataan Ruang	Dinas PU, Bappeda
2	5		3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang (%)					#DIV/0!				10 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS	Penataan Ruang	Dinas PU
				Program Kerjasama Pembangunan						#DIV/0!						
2	**6**			**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-		#VALUE!	-			-	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				WAJIB												

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	6		1	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						#DIV/0!						
				Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Dinas PU
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
										#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		2	Kerjasama Pembangunan	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembayaran 5x Iuran APPSI, 3 X Iuran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 5 Dokumen Kerjasama daerah	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 2 Dokumen Kerjasama daerah		#VALUE!	1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah			1x Iuran APPSI, 1 X Iuran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
2	6		3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan manajamen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi bappeda	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		4	Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		5	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						27%	87.75%	27%		0%	27%			27%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian
2	6		6	Perencanaan Pembangunan Sosial	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembanguna	Bappeda

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
				Budaya	Sosial Budaya terhadap RPJMD										n	
				Perencanaan Sosial dan Budaya						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Badan Kesbangpol
										#DIV/0!						
										#DIV/0!						
2	6		7	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup	80%	80%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		8	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD		70%			#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2				Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan Otonomi daerah terhadap RPJMD	80%		75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		9	Perencanaan Kota-kota Besar dan Menengah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		10	Pengembangan Wilayah Perbatasan						#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6		11	Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas	1 (satu) kesepakatan Batas		#VALUE!	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi			Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
			32	Pengembangan Data/Informasi	persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses					#DIV/0!					Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			32	Pengembangan Data/Informasi	Pengelolaan tertib administrasi belum memadai	0	Aplikasi dan Peralatan	0		#DIV/0!	0			1 Aplikasi dan Peralatan	Perencanaan Pembangunan	Biro Pembangunan
				Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah	83%		75%		0%	83%			83%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	**7**			**PERHUBUNGAN**												

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100%		0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				WAJIB												
2	7		1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	0.00%	24.00%	25.00%	25%	#VALUE!	0.00%			25.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
						0	0	1 rute pelayaran	1 rute pelayaran perintis	#VALUE!	0			1 rute pelayaran	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		2	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	75.00%	60.00%	60.00%	75.00%	#VALUE!	75.00%			75.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		3	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)	30.00%	28.00%	29.00%	29.00%	#VALUE!	30.00%			30.00%	Perhubungan	dinas Perhubungan
						1 paket	1 paket	1 paket		#VALUE!	1 paket			Bandara Internasional	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		7.00%	8.30%	8.20%		#VALUE!	7.00%			7.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7		5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka Pelanggaran lalu lintas (%)	1.20%	2.10%	1.50%	1.50%	#VALUE!	1.20%			1.20%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	**8**			**LINGKUNGAN HIDUP**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
					Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!						
				Peningkatan Disiplin	Persentase Peningkatan disiplin	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan	BLHD

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			Aparatur	aparatur pegawai										Hidup	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
			WAJIB												
2	8	1		Cakupan Pelayanan Persampahan					#DIV/0!				3 TPA Regional di Prov.Kepulauan Bangka Belitung	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Pencemaran air Sungai	11 Sungai	9 Sungai	11 Sungai		#VALUE!	11 Sungai			11 Sungai	Lingkungan Hidup	BLHD
				TSS(mg/I)	<50	<50	<50		#VALUE!	<50			<50		
				BOD(mg/I)	<5,00	<5,26	<5,26		#VALUE!	<5,00			<5,00		
				COD(mg/I)	<29,0	<29,4	<29,4		#VALUE!	<29,0			<29,0		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO_2 Eq)	13.16	6.23	10.171		0%	13.16			15.499	Lingkungan Hidup	BLHD
					-	7 org	-		#VALUE!	-			7 org	Lingkungan Hidup	BLHD
					-	-	-		#VALUE!	-			1680 org	Lingkungan Hidup	BLHD
				Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	21 kasus	7 kasus	14 kasus		#VALUE!	21 kasus			55 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	3	Peningkatan kualitas serta akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter)	26	8	12		0%	26			30	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terinventarisasinya status lingkungan hidup aerah		-	-		#VALUE!				1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbangunnya jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	-	-	-		#VALUE!	-			8 jaringan	Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan	30	12	26		0%	30			30	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	4	Peningkatan Pengendalian Polusi		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		#VALUE!	7 Kab/Kota			7 Kab/Kota	Lingkungan Hidup	BLHD
				CO	< 10.000 µg/m3	< 10.000 µg/m3	< 10.000 µg/m3		#VALUE!	< 10.000 µg/m3			< 10.000 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					SO_2	< 365 µg/m3	< 365 µg/m3	< 365 µg/m3		#VALUE!	< 365 µg/m3			< 365 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					NO_2	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		#VALUE!	< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					PM_{10}	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		#VALUE!	< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
					Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan		7 Kab/Kota			#DIV/0!				45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
							7 Kab/Kota			#DIV/0!				7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
					Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan		14 keg/usaha			#DIV/0!				45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
										#DIV/0!				1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		5	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau (%)					#DIV/0!				30% RTH kawasan perkotaan	Lingkungan Hidup	Dinas PU
					Persentase kabupaten/kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebsar 20%	28.57	14.28	14.28		#VALUE!	28.57			28.57	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8		6	Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi Sumber Daya Alam					#DIV/0!				210 orang	Lingkungan Hidup	BLHD
										#DIV/0!						
2	**9**			**PERTANAHAN**						#DIV/0!						
2	9		1	Pembangunan sistem Pendaftaran Pertanahan	Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	-	-	-		#VALUE!	-			Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinvertarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2	9		2	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan	Tersedianya lahan / tanah untuk pembangunan gedung dan mess Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka					#DIV/0!				1000 M2	Pertanahan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			Pemanfaatan Tanah	Belitung di Jakarta yang representatif											Bangka Belitung di Jakarta
				Terlaksananya penata usahaan tanah sebagai asset tetap daerah	-	1 lahan (3.739 M2)	-		#VALUE!	-			1 lahan (bertambah 3.739 M2)	Pertanahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	9	3	Penyelesaian-penyelesaian Konflik Pertanahan	Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	1 Angkatan (40 orang)	-	1 Angkatan (40 orang)		#VALUE!	1 Angkatan (40 orang)			Peningkatan Pemahaman aparatur sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2	9	4	Pengembangan sistem informasi Pertanahan	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	-	0		#DIV/0!	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2	**10**		**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**		**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**					
2	10	1	Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya 1 (satu) data base Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %	1 (satu) SIAK Online Antar Provinsi dengan Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung serta 1 Unit Server	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 80 %		#VALUE!	Peningkatan Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %			Tersedianya data base yang lengkap yang berbasis online serta peningkatan pemahaman aparatur dan Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebesar 85 %)	Kependudukan dan Catatan Sipil	Biro Pemerintahan
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						#DIV/0!						
2	**11**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												
			RUTIN												

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
			Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	100%	100%		0%	100%			100%		
			WAJIB												
2	1	1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaraan Responsif Gender (PPRG)	55.81	51.16	55.81		#VALUE!	55.81			55.81	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	23.3	21	23.3		#VALUE!	23.3			23.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	45.45	42.42	45.45		#VALUE!	45.45			45.45	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kepala keluarga perempuan miskin yang mendapat peningkatan ekonomi keluarga	20				#DIV/0!	20			20	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
				Persentase Kelompok Usaha	14.56	13.59	14.56		#VAL	14.56			14.56	Pemberdayaa	BPPKBPA

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA					UE!					n perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	30.3	30.2	30.3		#VALUE!	30.3			30.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37	36.95	37		0%	37			37	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	1	3	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
					Persentase Data Terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100	100	100		0%	100			100		
					Persentase Kabupaten/Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28.57	28.57	28.57		#VALUE!	28.57			28.57		
					Persentase Anak yang Mengikuti Forum Anak Tingkat Nasional	15.58	15.58	15.58		#VALUE!	15.58			15.58		
2	**1**	**2**		**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**												
2	1	2	1	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Pesentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100	100	100		0%	100			100	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
					Tingkat Prevalensi peserta KB aktif	81.8	81.75	81.8		#VALUE!	81.8			81.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
					Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		#VALUE!	10.69			10.69		
					Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		#VALUE!	10.69			10.69		
2	**1**			**SOSIAL**												

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	3														
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			#DIV/0!					Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			WAJIB												
2	13	1	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1475 orang	1475 orang	1475 orang		#VALUE!	1475 orang			7375 orang	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	13	2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	2785 orang	550 orang	550 orang		#VALUE!	2785 orang			2785 orang	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
				Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	25%				#DIV/0!	25%			25%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	13	3	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	2,45	2,05	2,15		0%	2,45			10500	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	1	4	Pelayanan dan	Persentase panti sosial skala	20%				#DIV/	20%			20%	Sosial	Dinas

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
	3			Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial					0!						Kesejateraan Sosial
2	13		5	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	20%				#DIV/0!	20%			20%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	13		6	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia	20%				#DIV/0!	20%			20%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	13		7	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Sosial	Dinas Kesejateraan Sosial
2	13		8	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase daearah rawan bencana yang di intervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	36%	70%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	13		9	Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan logistik dan peralatan terhadap kejadian bencana	100%	80%	90%		0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	13		10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang di intervensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	50%	15%	40%		0%	50%			50%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	13		11	Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	25%				#DIV/0!	25%			25%	Sosial	Biro Kesra
2	**14**			**KETENAGAKERJAAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program dukungan		100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerj	Dinas Tenaga

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya											aan	Kerja dan Transmigrasi
			WAJIB												
2	14	1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi	100	87%	100	93,20%	1%	100%			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat					#DIV/0!					Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	90%	100%	83,08%	83%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25				#DIV/0!	25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25				#DIV/0!	25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	50	0,50%	30	8,31%	0%	50			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	3	Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	70	45,70%	60	62,39%	1%	70			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)	60	50	55		0%	60			70	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	4	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase pemeriksaan perusahaan	30	70,90%	25	90,91%	4%	30			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)	45	93,60%	40	62,83%	2%	45			50	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	5	Revitalisasi BLKI	Prosentase infrastruktur yang terbangun	-	-	-		#VALUE!	-			0.85	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	6	Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase kesesuaian perencanaan ketenagakerjaan dengan RPJMD	-	-	-		#VALUE!	-			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14	7	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi (%)	-	-	-		#VALUE!	-				Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**15**		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**												

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			WAJIB												
2	15	1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)		100%	-		#VALUE!				Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15	2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi		1	100%	-		#VALUE!	1			1	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	9	100%	-		#VALUE!	9			9	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15	3	Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				meningkatnya sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (%)	22	100%	-		#VALUE!	22			22	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				-	1	100%	-		#VALUE!	1			1	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Persentase masyarakat miskin	75	100%	-		#VAL	75			kop	Koperasi dan	Dinas Koperasi

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					yang mendapat akses pemodalan					UE!					Usaha Kecil Menengah	dan UMKM
					Persentase lansia yang mendapat akses pemodalan	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15		4	Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	110	100%	-		#VALUE!	110			110	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15		5	Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	Koperasi komoditi aktif (%)		100%	-		#VALUE!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	15		6	Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah	meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)		100%	-		#VALUE!					Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	**16**			**PENANAMAN MODAL DAERAH**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		80%		0%	-			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%		0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				WAJIB												

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
2	1 6		1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			7 calon investor	8 calon investor		#VALUE!					Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
						1%	96.32%	1%		0%	1%				Penanaman Modal	Biro Perekonomian
2	1 6		2	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi			1.800 (Rp Miliar)	1.900 (Rp Miliar)		#VALUE!					Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Jumlah minat (calon investor)	9 calon investor	6	8 calon investor	4	#VALUE!	9 calon investor			9 calon investor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
					Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	2.100 (Rp Miliar)	1023,2	1900	1177,2	62%	2.100 (Rp Miliar)			2.100 (Rp Miliar)	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	1 6		3	Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah		-	30%	50%		0%	-			-	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	85%	-	-		#VALUE!	85%			85%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	1 6		4	Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu		13 sektor	10 sektor	12 sektor		#VALUE!	13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha	13 sektor	-	-		#VALUE!	13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	17		**KEBUDAYAAN**												
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			WAJIB												
2	17	1	Pengembangan Nilai Budaya	Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi	4	100%	100%		0%	4			4	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah Pergub pelestarian nilai tradisi					#DIV/0!					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sanggar seni	0	0	0		#DIV/0!	0				Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				terwujudnya mutu pendidikan dan kesehtan pelajar melalui TP UKS	seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		#VALUE!	seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,			seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,	Kebudayaan	Biro Kesra
2	17	2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola					#DIV/0!					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah kegiatan penyelengaraan pagelaran kesenian daerah		100%	100%		0%					Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				Rasio Dokumen pendukung		100%	100%		0%					Kebudayaan	Dinas

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					pengembangan dengan kawasan kota tua muntok											Kebudayaan dan Pariwisata
					Persentase kerjasama kabupaten kota dalam keikutsertaan paket khusus acara pentas seni kabupaten kota di TMII	100%	0	100%		0%	100%			100%	Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
2	17		6	Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat	50	100%	0		#DIV/0!	50			50	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	17		7	Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama	terwujud kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		#VALUE!	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji			stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji	Kebudayaan	Biro Kesra
2	17		8	Pembinaan kerukunan umat beragama	terwujudnya kerukunan umat beragama	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		#VALUE!	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota			peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Kebudayaan	Biro Kesra
2	**18**			**PEMUDA DAN OLAHRAGA**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100		0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				WAJIB												
2	18		1	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan yang dibina	7	7	7		0%	7			7	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		2	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan	22	18	20		0%	22			22	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha	10				#DIV/0!	10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	20				#DIV/0!	20			20	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		3	Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	Prosentase Pemuda Peserta Pelatihan yang Tidak Terkena NARKOBA setelah pelatihan	100	100	100		0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		4	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100		0%	100			90%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		5	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS	-	-	15		0%	-			POPWIL = 6 POPNAS = 28	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS	11.39	10.13			#DIV/0!	11.39				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS	50	28.57	33.33		#VALUE!	50				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD	57.89	36.84	47.37		#VALUE!	57.89				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terwujudnya pembinaan olahraga bagi anggota KORPRI	90%	25%	90%		0%	90%			58.00%	Kepemudaan dan olahraga	Sekretariat Korpri
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rasio lansia yang mendapat pelayanan olahraga dengan kecamatan	10				#DIV/0!	10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		6	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Prosentase jumlah sarana dan prasarana di kawasan sport center Prov. Kepulauan Bangka Belitung	17	17	17		0%	17			20%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	18		7	Pembinaan Generasi Muda	Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi Paskibraka	6	6	6		0%	6				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional	7	7	7		0%	7			3.57%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				WAJIB												
2	1	9	1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	2	Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal	.....		100%	100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas (menurun)	0.00207	0,00155	0.00216	0,0013	#VALUE!	0.00207			0.00207	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					Cakupan penegakkan perda	100.00%	67,56%	72.97%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
2	1	9	3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%	100%	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	4	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1	100%	100%		0%	1				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	5	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	100%		100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	6	Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	1	1	100%		0%	1				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	7	Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masayarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.00%	2.48%	2.74%		#VALUE!	3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman			100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1		8	Kemitraan		100%		100%		0%	100%				Kesatuan	Badan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	9			Kamtibmas											Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbangpol
2	19		9	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama	100%	100%	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
					Meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat					#DIV/0!					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
					terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi					#DIV/0!					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	12 bulan	12 bulan		#VALUE!	-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						80.00%	60.00%	80.00%		#VALUE!	80.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						100.00%	99.21%	99.58%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						95.00%	93.00%	94.00%		#VALUE!	95.00%			95.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						74.70%	57.43%	66.47%		#VALUE!	74.70%			74.70%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
2	19		11	Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada	terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	3x Monev dan 1 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah	4x Monev Pemilukada	8 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah		#VALUE!	3x Monev dan 1 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah			terlaksananya 7x Monev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Biro Pemerintahan
						100.00%	64.00%	72.97%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
						3.00%	2.48%	2.74%		#VALUE!	3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	Satpol PP

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															Negeri	
						-	12 bulan	12 bulan		#VALUE!	-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada		100%	-	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1 9		1 2	Peningkatan demokrasi		100%				#DIV/0!	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	**2 0**			**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah,	Sekretariat DPRD

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
												pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Sekretariat Daerah

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
												keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat	Inspektorat Provinsi

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Badan Kepegawaian Daerah

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
												persandian	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah,	Badan Diklat

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Aparatur											pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	DPPKAD

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	DPPKAD

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												kepegawaian, dan persandian	
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan	Sekretariat Korpri

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Jakarta
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0%	0%		#DIV/0!	0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
				WAJIB												
2	2	0	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			100%	100%		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
2	2	0	2	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah		12 bln	12 bln	12 bln		#VALUE!	12 bln			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Umum dan Perlengkapan
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta					#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															kepegawaian, dan persandian	
2	2	0	3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Catatan hasil pemeriksaan	WTP	WDP	WDP		#VALUE!	WTP			WTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	100%		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 7x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah		#VALUE!	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah			Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
										#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Sekretariat Korpri

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															dan persandian	
2	2 0		4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (upgrading)	Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)	-	1 unit	-		#VALUE!	-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu	230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev	210 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 10 set buku laporan, 55 peserta, 32 peserta , 75 buku	220 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 190 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 35 SKPD dan 7 Biro, 84 Operator SiRUP dan Monev		#VALUE!	230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota ,50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Indeks Reformasi Birokrasi	65.00%	45.00%	55.00%		#VALUE!	65.00%			65.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Inspektorat Provinsi

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												persandian	
		Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (A) atau (B)	75.00%	45.00%	65.00%		#VALUE!	75.00%			75.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasn APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	98.00%	96.00%	97.00%		#VALUE!	98.00%			98.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.	97.00%	94.00%	96.00%		#VALUE!	97.00%			97.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	100.00%	100.00%	100.00%		#VALUE!	100.00%			100.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum,	4 Kasus, 2 Monev	4 Kasus	4 Kasus, 2 Monev		#VALUE!	4 Kasus, 2 Monev			50%	Otonomi daerah, pemerintahan	Biro Hukum

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
				Pelaksanaan KDH	keadilan dan supremasi hukum										umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2 0		5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD)					#DIV/ 0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD	8 orang	7 orang	8 orang		#VAL UE!	8 orang			88 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 orang	6 orang	7 orang		#VAL UE!	7 orang			32 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Pengadaan Barang dan Jasa :					#DIV/ 0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Badan Pendidikan dan Latihan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	0		6	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017	Penyempurnaan sistem dan seperangkat alat penunjang	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2016		#VALUE!	1 sistem bebasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
					Terkoordinirnya SKPD dalam pelaksanaan RB	85%	0%	80%		0%	85%			terkoordinirnya SKPD di lingkungan Pemprop.Kep Bangka Belitung	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	0		7	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	-	3 kasus	-		#VALUE!	-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
2	0		8	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1412 PHD dan 5 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1462 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum		#VALUE!	1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Biro Hukum

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
														persandian	
			Penataan Peraturan Perundang-undangan	Hasil-hasil rapat, persidangan dan produk perundang-undangan yang terdokumentasikan	100	100%	100%		0%	100				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
2	2 0	9	Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 2x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan		#VALUE!	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x			Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2	2 0	1 0	Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	460 PHD	410 PHD	450 PHD		#VALUE!	460 PHD			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0	1 1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan	8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	16 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	-		#VALUE!	8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan			Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamata	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2	2 0	1 2	Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa	87%	-	82%		0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan	Biro Organisasi

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				penguatan reformasi birokrasi	beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan										umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
				Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	87%	-	82%		0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0		1 3	Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan publik	97%	90%	95%		0%	97%			Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0		1 4	Bantuan Hukum	Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum					#DIV/0!				25%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0		1 5	Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	1512 PHD	1412 PHD	1462 PHD		#VALUE!	1512 PHD			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Biro Hukum

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2	0	16	Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien.	85%	75%	80%		0%	85%			tertatanya kelembagaan SKPD	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	17	Pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD	85%	0%	85%		0%	85%			Penataan dan sinkronisasi kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	18	Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD	75%	65%	70%		0%	75%			seluruh SKPD menerapkan manajemen	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	0	20	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional	600	550	520		0%	600			2,760.00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Badan Pendidikan dan Latihan

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												persandian	
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						#DIV/0!				1,245.00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi	80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta	360 peseta, 40 Peserta, 100 Peserta dan 40 peserta	60 peserta, 40 peserta, 60 peserta, 50 peserta		#VALUE!	80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-		#VALUE!	pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kemampuan/ketrampilan dengan mengikuti pelatihan/pendidikan		80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan	63	63	63		0%	63			90	Otonomi daerah, pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
												umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
							#DIV/0!				90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Widyaiswara yang mengikuti pengembangan SDM widyaiswara	18	18	18		0%	18			77	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-		#VALUE!	pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum	15 orang	4 orang	10 orang		#VALUE!	15 orang			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Biro Hukum

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kemampuan APIP (%)	0	0	0		#DIV/0!	0				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	0%	0	0		#DIV/0!	0%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
21	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kepulauan Bangka Belitung	90%	26%	90%		0%	90%			76%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		############	###########	############		#VALUE!	##########			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Badan Pendidikan dan Latihan

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
												persandian	
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
							#DIV/0!				90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas	115	117	115	0%	115			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	22	Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	70%	50%		0%	70%			SKPD yang SAKIPnya baik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
							#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan	Kantor Perwakilan Provinsi

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
															umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
										#DIV/0!					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
			23	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD melalui mekanisme dan tata cara penyusunan APBD dan APBD-P		100%	100%		0%				100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
				Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			25	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Pendapatan Lain-lain											perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
26	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya (%)	100%	0	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%)	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	pelaksanaan rapat	0	0		#DIV/0!	pelaksanaan rapat				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
28	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. Kepulauan Bangka Belitung dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-		#VALUE!	-			Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. Kepulauan Bangka Belitung dan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Biro Pemerintahan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
														tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	persandian	
			29	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 bimtek		-	-		#VALUE!				100	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
			31	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	.....	100%				#DIV/0!	100%				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kesbangpol
2	21			**KETAHANAN PANGAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Disiplin Aparatur											Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			Keuangan												
			WAJIB												
2	21	1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%)	35	100%	7 Kab/kota		#VALUE!	35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	35	100%	7 Kab/kota		#VALUE!	35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
2	**22**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**												
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Penataan daerah otonomi baru						#DIV/0!					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya		100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			WAJIB												
2	22	1	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif	10%	15%	10%	5%	50%	10%			50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	10%	10%	0%		#DIV/0!	10%			25%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenai RKPDes, RPJMDes, APBDes	100%	20%	90%	10%	11%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22	3	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan	5%				#DIV/0!	5%			5.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
					Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif	15%	10.00%	15.00%		#VALUE!	15%			100.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		4	Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	10%	10%	10%	10%	100%	10%			50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang	20%				#DIV/0!	20%			20%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	22		5	Raskintis	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	**23**			**STATISTIK**												
2	23		1	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Statistik	Bappeda
				Pengembangan Data dan Informasi						#DIV/0!					Statistik	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Pengembangan data/informasi	Meningkattnya wawasan masyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Beitung		1000 cd, 1000 buku			#DIV/0!				95	Statistik	Biro Umum dan Perlengkapan
2	**24**			**KEARSIPAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%		0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				WAJIB												
2	2		1	Perbaikan Sistem	Persentase SKPD Perpustakaan	100.00%	80.00%	90%		0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	4		Administrasi Kearsipan	Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya											Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	2	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan	250 arsip	230 arsip	240 arsip	240 arsip	#VALUE!	250 arsip			250 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsiapan	Persentase Arsip yang terpelihara	100%	83.33	83.33%		#VALUE!	100%			300 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan	24.19%	21.50%	21.50%		#VALUE!	24.19%			186 desa	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	5	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya	100.00%		85%		0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	**25**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
			Peningkatan Disiplin Aparatur	terwujudnya disiplin aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
			WAJIB												
2	25	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
				Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	-	-	-		#VALUE!	-			-	Komunikasi dan Informatika	Dinas PU
2	25	2	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi bidang komunikasi dan telekomunikasi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	25	3	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kualitas SDM	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan		#VALUE!	informasi dan publikasi bidang kesejhateraan			Informasi dan publikasi bidang kesejhateraan	Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	25	4	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan	Diskominfo

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
															Informatika	
2	25		5	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Masih adanya SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep, Aplikasi e-monep	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep		#VALUE!	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monep			jumlah operator SiRUP dan e-monev (35 SKPD dan 7 Biro), 1 Apilkasi	Komunikasi dan Informatika	Biro Pembangunan
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		-	-	-		#VALUE!	-			-	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
															Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	25		6	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		100%	-	100%		0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	**26**			**PERPUSTAKAAN**												
2	26		1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif (%)	85.73%	85.73%	85.73%		#VALUE!	85.73%			87%	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
					Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi	500 org	-3321 org	1221 org		#VALUE!	500 org			3500 org	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio jumlah buku di perpustakan KTM batu betumpang dengan jumlah penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang	-	-	-		#VALUE!	-			1	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3				**URUSAN PILIHAN**												
3	**1**			**PERTANIAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				Peningkatan	Persentase Peningkatan					#DIV/					Pertanian	Dinas

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0!						Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			WAJIB												
3	1	1	Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan)	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	tinggi ????				#DIV/0!	tinggi ????			tinggi ????	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)		100%	100%		0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)					#DIV/0!					Pertanian	Dinas Pertanian,

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
				Pertanian/ Perkebunan												Perkebunan dan Peternakan
3	1		3	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan(%)	100	50	66.67		#VALUE!	100			50	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
					Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)		100%	100%		0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1		4	Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	100	83.46	91.71		#VALUE!	100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
					Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	75.00%				#DIV/0!	75.00%			75	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	0.5				#DIV/0!	0.5			0.5	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	100	82.64	90.91		#VALUE!	100				Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		7	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%)	85.75	79.5	82.75		#VALUE!	85.75			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	1		8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100				#DIV/0!	100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	**2**			**KEHUTANAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan						#DIV/					Kehutanan	Dinas

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0!						Kehutanan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						#DIV/0!					Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Pendidikan kedinasan						#DIV/0!						
				WAJIB												
3	2		1	Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	tingkat pemanfaatan potensi sumber daya hutan (rekomendasi)	5	4 kelompok	1 provinsi		#VALUE!	5			5	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		2	Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pengelolaan DAS berbasis masyarakat (%)	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir	terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas	-		#VALUE!	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir			Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		3	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan (%)	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	-		#VALUE!	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal			Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan						#DIV/0!					Kehutanan	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	2		4	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya	-		#VALUE!	Terlaksananya penangan tindak pidana			Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan	Kehutanan	Dinas Kehutanan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
						60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)				kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)			tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)		
3	2		5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	-	-		#VALUE!	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas			Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		6	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	tingkat ketaatan pelaku industri hasil hutan (%)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		7	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan/KPH (13 unit)	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	-	-		#VALUE!	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam			terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2		8	Peningkatan Data/Informasi/Statistik Kehutanan	ketersediaan data dan informasi kehutanan (dokumen)	-	-	-		#VALUE!	-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	**3**			**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						#DIV/0!					Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				WAJIB												
3	3		1	Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi (%)	75	30 M Rupiah	100%		0%	75			75	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		2	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan	60 Izin Usaha Pertambangan & 10 Perusahaan Pertambang	90 Izin Usaha Pertambangan & 20 Perusahaan pertambangan		#VALUE!	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan			150 Izin Usaha Pertambangan & 60 Perusahaan pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
					Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%)	260 M Rupiah	195 M Rupiah			#DIV/0!	260 M Rupiah			325 M Rupiah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		3	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	100 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT, 60% sparepart pembangkit listrik energi baru terbarukan	-		#VALUE!	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,			2 PLTS Terpusat, 300 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3		4	Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah	Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah	20 titik geolistrik	40 titik geolistrik, 20 laporan penyelidikan kebumian dan 20 laporan supervisi pengelolaan air tanah		#VALUE!	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah			60 laporan penyelidikan kebumian dan 60 laporan supervisi pengelolaan air tanah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	**4**			**PARIWISATA**												
3	4		1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	75	100%	100%		0%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata terkelola baik (%)	10	0	0		#DIV/0!	10			10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengembangan destinasi pariwisata		10 desa wisata	100%	100%		0%	10 desa wisata			10 desa wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengembangan Destinasi Pariwisata		50	100%	100%		0%	50			90	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		3	Pengembangan Kemitraan	Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%)	75	100%	100%		0%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4		4	Ekonomi Kreasif	Meningkatnya pengembangan	10	0	0		#DIV/	10			10	Pariwisata	Dinas

ODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
			Berbasis Seni dan Budaya	ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (%)					0!						Kebudayaan dan Pariwisata
3	4	5	Pengembangan Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional	Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		100%	100%		0%					Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**5**		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**												
			RUTIN												
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-		#VALUE!	-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-		#VALUE!	-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	Persentase tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP	100%	100%	100		0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			WAJIB												
3	5	1	Pengelolaan dan Pengawasan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 180,02 Ha dan 145,55 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 500.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 162 Ha dan 176,67 kelompok POKMASWAS Aktif	#VALUE!	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif			Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5	2	Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 11.175 ton 25.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 13.765 ton dan 31.000.000 ekor benih	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton): 16,21	#VALUE!	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih			Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5	3	Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111	Produksi Perikanan Tangkap 169.000 ton, NTN : 107	Produksi Perikanan Tangkap 175.000 ton, NTN : 109	Peningkatan produksi perikanan	#VALUE!	Produksi Perikanan Tangkap			Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
									tangkap (ton): 104,06; NTN: 105,21		181.000 ton, NTN : 111			181.000 ton, NTN : 111		
3	5		5	Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujiaan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 47 (Kg/Kapita/Tahun) dan 19.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 48 (Kg/Kapita/Tahun) dan 21.000 Ton Produk Olahan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun): 105,21 dan Volume Produksi Olahan (ton): 97,84	#VALUE!	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan			Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**6**			**PERDAGANGAN**												
				RUTIN												
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					#DIV/0!					Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				WAJIB												
3	6		1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	50	100%	-		#VALUE!	50			50	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						1%		1%		0%	1%				Perdagangan	Biro Perekonomian
3	6		2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	7	100%	-		#VALUE!	7			7	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	6		3	Peningkatan dan Pengembangan	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US		100%	-		#VALUE!					Perdagangan	Dinas Perindustrian

ODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2017)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
								TARGET RKPD TAHUN 2016	REALISASI RKPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2017 (%)			
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=10/4**			**12**
				Ekspor	$)											dan Perdagangan
3	**7**			**PERINDUSTRIAN**												
3	7		1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya asosiasi UMKM (%)	75	100%	-		#VALUE!	75			75	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		2	Penataan Struktur Industri	Meningkatnya kelas struktur industri (%)	tinggi	100%	-		#VALUE!	tinggi			tinggi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		3	Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial (%)	2	1	-		#VALUE!	2			2	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		4	Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam (%)	7	100%	-		#VALUE!	7			7	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis komoditi kerajinan (%)		-	-		#VALUE!					Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	7		6	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%)		-	-		#VALUE!					Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**8**			**KETRANSMIGRASIAN**												
3	8		1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan	100%		100%		0%	100%			600 KK	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH																

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada tahun 2019, isu strategis yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 13 (tiga belas) isu yaitu:

- pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;
- kemandirian pangan rendah;
- pengendalian inflasi;
- belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah;
- tingkat investasi rendah;
- potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik;
- kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas;
- tingkat pendidikan sdm masih rendah;
- mutu pelayanan kesehatan masih terbatas;
- reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal;
- pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif;
- rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup;
- penanggulangan bencana.

Permasalahan daerah yang dianggap prioritas utama dalam

PRIORITAS 1: PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Sasaran pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, dengan arah kebijakan:

- pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;
- meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

PRIORITAS 2: PEMBANGUNAN BAHARI

Sasaran meningkatnya produksi subsektor perikanan memiliki arah kebijakan:

- pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan;
- peningkatan produksi, kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan;
- pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan.

Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan.

PRIORITAS 3: PENGEMBANGAN PARIWISATA

Sasaran meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan:

- peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
- pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah;
- peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan;
- pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja di sektor pariwisata.

PRIORITAS 4 : PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sasaran meningkatnya pendidikan bagi masyarakat memiliki arah kebijakan:

- peningkatan akses pelayanan pendidikan;
- peningkatan mutu layanan pendidikan;
- peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal;
- peningkataan pembangunan kultur masyarakat yang bertakwa dan bermoral.

PRIORITAS 5 : PEMBANGUNAN KESEHATAN

Sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan:

- peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
- peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat;
- pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
- meningkatkan pengendaliaan penyalahgunaan napza.

PRIORITAS 6 : PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien arah kebijakannya antara lain:

- peningkatan penguatan sistem manajemen SDM aparatur;
- peningkatan kompetensi dan profesional aparatur.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan perkembangan dari realisasi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir, maka upaya yang dapat direspon atas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

   Permasalahan di bidang pendidikan antara lain:

   a. masih tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat yang terlihat dari meningkatnya angka putus sekolah pendidikan menengah yang pada tahun 2016 berada di angka 7,89% sehingga sangat berpengaruh pada angka rata-rata lama sekolah. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan anaknya;
   b. masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 berada pada angka 7,78 tahun yang masih di katagorikan rendah yang diasumsikan pendidkan SMP sederajat belum tamat untuk rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan secara nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 2 terendah se-Indonesia;
   c. masih belum optimalnya sistem dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para pendidik sehingga tingkat kualitas dari peserta didik masih rendah.

Tingkat keaktifan guru masih kurang dalam memberikan pelajaran di sekolah, sehingga murid menjadi lebih pasif. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja guru yang cukup berat dan harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahunan yang harus mereka ajarkan. Masih tingginya perpindahan tenaga pengajar kepada jenjang jabatan struktural pada pemerintahan daerah hal ini akan mempengaruhi kepada ketersediaan tenaga pengajar yang dunia pendidikan.

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan antara lain:

a. perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak, hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang pada tahun 2015 berada pada angka 75,62% tetapi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada di angka 71,88%;
b. angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi yang berada pada angka 69,88 tahun pada tahun 2015 tetapi masih relatif lebih baik di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 69,72 tahun. Hal ini terjadi yang salah satunya banyak di sumbang dari tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular;
c. masih tingginya angka kematian bayi yang terlihat dari angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 berada pada angka 7,22, terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2015 yang berada pada angka 7,05;
d. Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka tidak dapat dilayani dengan cepat. Penurunan ini disebabkan karena kondisi geografis yang cukup sulit dan kesejahteraan hidup mereka belum terpenuhi sehingga mereka pindah ke tempat lain yang lebih mudah dan terjamin kesejahteraannya. Hal ini terlihat dari rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 0,000287, rasio perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 226,86 dan rasio bidan per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 88,46.

3. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya fluktuasi yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir;
b. masih lemahnya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial;
c. masih tingginya tingkat kriminalitas sehingga mengganggu peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas;

d. belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pendidikan politik masyarakat;
e. belum optimalnya penguatan kelembagaan politik yang dapat menyerasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat;
f. masih lemahnya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial:
g. masih lemahnya Pemahaman masyarakat tentang konsep Wawasan Kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang antara lain:

a. untuk sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi terganggu;
c. banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi;
d. Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada;
e. Masih adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan antara lain:

a. permasalahan dalam sektor bangunan/konstruksi adalah masih rendahnya perkembangan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga belum mengoptimalkan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan yang dialami sektor ini terutama disebabkan oleh permintaan pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk aktivitas pemerintah;
b. masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin;
c. belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan.

6. Sosial

Permasalahan di bidang sosial antara lain:

a. masih belum optimalnya pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, hal ini terlihat dari data persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya 11,01% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan dibandingan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 14,27%;

b. masih belum optimalnya pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Hal tersebut terlihat dari angka Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan masih relatif rendah berada pada angka 16,99% pada tahun 2015 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 13,88%. Sedangkan berkaitan dengan angka persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial berada pada angka 6,29% pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada angka 22,08%;

c. masih lemahnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik. Hal ini terlihat dari angka persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial hanya 50,63% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 66,34%;

d. Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan di pedasaan dan di perkotaan. Hal ini terlihat dari angka kemiskian di perkotaan sebesar 2,78% pada bulan maret 2016 dan angka kemiskinan di pedesaan berada pada angka 7,72 %. Hal ini terjadi karena garis kemiskinan di desa lebih tinggi berada pada angka 546.998 pada Maret 2016 jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di perkotaan yang berada pada angka 521.773. Garis kemiskinan yang tinggi ini disumbang dari masih tingginnya tingkat harga komoditas pangan dan non pangan yang berada di pedesaan. Kemudian garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan garis kemiskinan tertinggi di indonesia yang berada pada angka 534.229. sehingga untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan dengan mengendalikan angka inflasi komoditas pangan dan non pangan.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain:

a meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini terlihat dari angka pengangguran pada Agustus 2015 berada pada angka 6,29%

dan mengalami peningkatan terus menerus jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2013 dan Agustus 2014 yang masing-masing berada pada angka 3,70% dan 5,14%. Hal ini terjadi dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian di mana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dalam menggerakan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari data Februari 2016 sektor pertanian dan pertambangan masing-masing menyumbang tenaga kerja sebesar 32% dan 11,27%;

b masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja;

c masih kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

a. masih belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender hal ini terlihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) penduduk perempuan tahun 2015 mencapai 56,26%, naik dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar 43,97%. Sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 8,21% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,27%. Kemudian juga terlihat dari masih adanya disparitas antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dimana untuk laki-laki berada pada angka 68,01 tahun dan perempuan berada pada angka 71,85 tahun, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terlihat laki-laki berada pada angka 7,99 tahun dan perempuan 7,14 tahun, dan untuk pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di mana laki-laki berada pada angka Rp17.670.000/tahun dan perempuan berada pada angka Rp8.232.000/tahun berdasarkan data;

b. masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, hal ini terlihat dari hak kelangsungan hidup anak berada pada angka 83,60, hak perlindungan anak berada pada angka 77,64, hak tumbuh kembang anak berada pada angka 65,74, hak partisipasi anak berada pada angka 80,23 dan hak identitas anak berada pada angka 93,05 berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2015;

c. masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;

d. masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

9. Pangan

Permasalahan di bidang pangan antara lain:

a. masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya;
b. belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat;
c. kecenderungan masyarakat terhadap pangan pokok beras yang tinggi;
d. masih adanya daerah rawan pangan;
e. masih rendahnya kualitas produk olahan pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat.

10. Pertanahan

Permasalahan di bidang pertanahan antara lain:

a. masih lemahnyan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat;
b. ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat;
c. belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat;
d. masih kurangnya ketersedian tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat.

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang lingkungan hidup antara lain:

a. kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar *(ilegalloging)*;
b. kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain;
c. perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah yang masih kaya akan SDA. Sumber daya alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kebijakan pembangunan yang dibuat hanya mengejar peningkatan ekonomi semata maka yang terjadi adalah perusakan lingkungan. Oleh sebab itu perumusan kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga kelestarian sumber daya alam tetap terjaga;
d. Pengelolaan SDA seperti sumber daya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA;
e. Kurang berfungsinya aparatur penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

    Permasalahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain:

    a. masalah struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15-64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih;
    b. dalam jangka panjang terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah;
    c. masih rendahnya pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan;
    d. belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

    Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

    a. masih adanya desa tertinggal yang harus diintervensi untuk mengeluarkannya dari ketertinggalanya, hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa, dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa;
    b. masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pembangunan desa;
    c. belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing;
    d. belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Permasalahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

    a. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu lakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas;
    b. permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi. Khusus untuk Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah terpadat berpotensi terhadap tingginya beban permasalahan perkotaan yang dihadapi;
    c. masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.

15. Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan antara lain:

a. belum optimalnya pengembangan transportasi laut dan udara dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain;
b. belum optimalnya penataan transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan;
c. Masih sempitnya ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
d. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika antara lain:

a. kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar;
b. masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di dalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha;
c. masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi;
d. masih adanya wilayah *blank spot* yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi;
e. masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi;
f. masih belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah antara lain:

a. masih lemahnya koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari;

b. masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM;
c. masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian;
d. masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakan perekonomian masyarakat.

18. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang penanaman modal antara lain:
a. masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak diciptakan;
c. belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga antara lain:

a. masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik;
b. masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan di dalam mendukung pembangunan daerah;
c. masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

20. Statistik

Permasalahan di bidang statistik antara lain:

a. masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan daerah;
b. masih lemahnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan daerah;
c. belum optimalnya koordinasi dan pemberian *reward* atau *punishment* di dalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan daerah.

21. Persandian

Permasalahan di bidang persandian antara lain:

a. belum optimalnya pengelolahan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah;
b. belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat di dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah;

22. Kebudayaan

Permasalahan di bidang kebudayaan antara lain:

a. kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya;
b. kurangnya SDM bidang kebudayaan dalam pelestarian seni budaya lokal dan pengelolaan warisan budaya;
c. belum adanya komitmen pelaku seni dan budaya.

23. Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan antara lain:

a. rendahnya minat baca masyarakat.

24. Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan antara lain:

a. kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelola arsip.

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan antara lain:

a. belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing;
b. masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha;
c. masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
d. masih maraknya *ilegal fishing;*
e. belum selesainya penysunan dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
f. tidak tersedianya SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengurusi bidang pengawasan dan pembinaan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota berdasarkan nomenklatur dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

a. belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal;
b. konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian dan penurunan kualitas lahan pertanian;
c. masih rendahnya rasio ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian;
d. sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul di tingkat petani belum memadai dan belum tersedia tepat jumlah dan waktu;

e. masih rendahnya daya saing komoditas pertanian tercermin dari kualitas hasil produksi yang belum memenuhi standar mutu dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor
f. masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani/kelembagaan petani belum berjalan secara optimal (mandiri dan profesional) dan terbatasnya pengetahuan, kemampuan/ketrampilan dan kemandirian petani;
g. rata-rata kepemilikan lahan yang sempit;
h. perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.

3. Pariwisata

Permasalahan di bidang pariwisata antara lain:

a. akses menuju destinasi Bangka Belitung dan daya tarik wisata di Bangka Belitung belum maksimal untuk menunjang kebutuhan wisata;
b. belum banyak tersedia amenitas (fasilitas akomodasi dan konsumsi) untuk wisatawan, dan distribusi belum merata;
c. atraksi wisata di Bangka Belitung belum banyak variasi dan masih banyak yang dikelola secara aksidental;
d. alokasi keruangan pariwisata yang masih berhadapan dengan alokasi keruangan yang kurang mendukung;
e. pemberdayaan masyarakat dan sadar wisata (sapta pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, kenangan);
f. kurang dikenalnya beberapa tempat wisata di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang telah maju.

4. Kehutanan

Permasalahan di bidang kehutanan antara lain:

a. masih rendahnya pendapatan daerah yang di sumbang dari sektor kehutanan;
b. belum optimalnya pengelolan hasil hutan dan kawasan hutan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat;
c. belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral antara lain:

a. belum optimalnya PAD dari sektor energi dan sumber daya mineral;
b. belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi;
c. belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan;
d. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian minyak dan gas;
e. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
f. tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya;
g. masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan;
h. masih minimnya fasilitas dan informasi mengenai air tanah;

i. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KCAG (Kawasan Cagar Alam Geologi).

6. Perdagangan

Permasalahan di bidang perdagangan antara lain:

a. masih belum optimalnya perdagangan yang dilakukan dalam mendukung pemasaran produk-produk lokal keluar daerah maupun keluar negeri;
b. masih rendahnya kualitas produk daerah yang akan dipasarkan keluar daerah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal di luar;
c. masih lemahnya sistem tata kelola perdagangan dalam daerah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan di daerah untuk dipasarkan ke dalam daerah sendiri;
d. masih tingginya ketergantung daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan maupun komoditas non pangan;
e. masih kurangnya jiwa *enterprenaur* aparatur pemerintah di dalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

7. Perindustrian

Permasalahan di bidang perindustrian antara lain:

a. sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan;
b. masih rendahnya pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
c. masih lemahnya hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya;
d. masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar;
e. pengembangan industri yang masih terfokus kepada pengembangan industri smelter timah;
f. masih belum optimalnya dalam pengembangan industri yang berbasis pariwisata.

8. Transmigrasi

Permasalahan di bidang transmigrasi antara lain:

a. tidak tersedianya lagi lahan untuk pembukaan kawasan transmigrasi baru;
b. masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyediaan sarana dan prasaran dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi;

Tabel II.155

Identifikasi Isu Strategis Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
1	DINAS TENAGA KERJA	1	Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja	1	Isu Ekonomi
		2	Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di tempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;	2	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
		3	Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	3	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
2	DINAS KEHUTANAN	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan perhutanan sosial dengan skema HD, HTR, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.	1	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
		2	Lebih meningkatkan peran KPH dalam pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan	2	Kemandirian Pangan Rendah
		3	Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis.	3	Tingginya tingkat inflasi
		4	Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.	4	Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
3	DINAS UKM	1	Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;	1	Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
		2	Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;	2	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
		3	Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;	3	Tingkat Investasi Rendah
		4	Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;	4	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
		5	Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;	5	Isu Infrastruktur dan Konektivitas
		6	Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;	6	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
		7	Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;	7	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
		8	Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri	8	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			mengenai produk unggulan daerah;		
		9	Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;	9	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
		10	Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;	10	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
		11	Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;	11	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
		12	Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.	12	Isu Sumber Daya Manusia
4	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	1	Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	Tingkat pendidikan SDM masih rendah
		2	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan	2	Isu Kesehatan
		3	Masih belum optimalnya pembangunan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.	3	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	1	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
		2	Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata	2	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
		3	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata	3	Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi
		4	Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata	4	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		5	Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata	5	Kondusivitas demokrasi belum stabil
		6	Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan	6	Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		7	Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya	7	Lingkungan hidup banyak yang rusak
6	DINAS PERTANIAN	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;	1	Rawan bencana
		2	Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran;	2	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
		3	Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah.		
		4	Lahan Pertanian :		
		5	(a) Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian; (b) Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian; (c) Kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus; (d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit; (e) Lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia; (f) Ketidakpastian status kepemilikan lahan.		
		6	Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;		
		7	Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT);		
		8	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian		
			(a) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi; (b) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk; (c) Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian; (d) Belum Optimalnya peran		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;		
			Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.		
7	DINAS ESDM	1	Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;		
		2	Belum tercapainya "Kemandirian Energi"		
		3	Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah.		
8	DINAS PANGAN	1	Rentannya tingkat ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
9	BAKUDA	1	Kurang optimalnya kualitas pelayanan publik;	1	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		2	Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;	2	Isu Ekonomi
		3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;	3	Isu Ekonomi
		4	Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.	4	Isu Ekonomi
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
11	DINAS PERINDAG	1	Belum ada unit Kerja Kemetrologian Legal di Daerah Tk. II Kabupaten/Kota.		
		2	Belum terlaksananya pemisahan kewenangan antara kewenangan pelayanan dengan kewenangan pengawasan.		
		3	Belum optimalnya pengawasan mutu oleh Laboratorium Penguji Mutu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		4	Pengembangan standarisasi belum optimal.		
		5	Belum optimalnya penataan pasar tradisional.		
		6	Belum tertibnya pelaksanaan ketentuan Ekspor Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		7	Industri pengolahan potensi sumber daya alam masih bersifat hulu.		
		8	Belum optimalnya pengelolaan /		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		9	Belum terbentuknya *cluster* industri prioritas.		
12	DPMPTSP	1	Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.		Isu Ekonomi
		2	Perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		3	Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
		4	Perlunya dilakukan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan fasilitasi kemitraan.		
		5	Perlunya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		6	Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi.		
		7	Perlunya Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.		
		8	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.		Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
13	DPMD	1	Tingkat Pelayanan Pemerintah desa terhadap publik belum optimal	1	Isu Ekonomi
		2	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	2	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
		3	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa masih rendah	3	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
		4	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa masih rendah	4	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
		5	Tingkat Sarana dan Prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai	5	Kemandirian Pangan Rendah
				6	Tingginya tingkat inflasi
				7	Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
				8	Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
14	PUPR	1	Isu strategis yang tertuang didalam renstra PUPR dijabarkan perbidang	1	Belum optimalnya pengembangan Potensi

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			sehingga terlalu banyak isunya		Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
				2	Tingkat Investasi Rendah
				3	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
15	DISHUB	1	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau sesuai dengan sistem tronsportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus pembangunan pada pengembangan pelabuhan pendukung tol laut	1	Isu Infrastruktur dan Konektivitas
		2	Pembangunan transportasi umum massal perkotaan:	2	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
		a	Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
		b	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan	b	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
		c	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	c	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
		3	Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta moderinisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerahnguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau sesuai dengan sistem	3	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			tronsportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus pembangunan pada pengembangan pelabuhan pendukung tol laut		
		4	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	4	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
16	PERKIM		Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman		Isu Kesehatan
		1	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	1	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
		2	Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	2	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
		3	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	3	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
		4	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.	4	Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi
				5	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		5	Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.	6	Kondusivitas demokrasi belum stabil
		6	Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.		
			Bidang Perumahan Rakyat		Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		1	Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1	Lingkungan hidup banyak yang rusak
		2	Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.	2	Rawan bencana
		3	Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.	3	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
17	BAPPEDA	1	Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.		
		2	Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.		
		3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;		
		4	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.		
		5	Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.		
		6	Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.		
18	DISKOMINFO	1	Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik		
		2	Belum optimalnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
		3	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal		

Tabel II.156

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.	Tingginya angka anak putus sekolah (*Drop Out*) khususnya pendidikan menengah	Perkembangan Ekonomi Global
	Perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.	Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi
	Kompetensi guru masih harus ditingkatkan.	Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang	
	Angka Kematian Ibu (AKI) Masih Tinggi	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi	
	Disparitas Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masih Lebar	dibawah rata-rata nasional	
	Stunting pada Balita dan Anemia pada Ibu Hamil Masih Tinggi	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan lingkungan.	
	Persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah yang belum mengakomodir Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	
	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Penanganan kawasan kumuh yang belum terintegrasi antara sektoral serta pemerintah daerah kab/kota	
	Kapasitas & manajemen layanan air minum belum optimal	Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan Krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat	
	Kesadaran terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah	Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan	
		Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca	Dampak pemanasan Global (Global Warming)
	Kinerja sektor industri pengolahan dan ekspor mengalami penurunan	Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam (karet lada sawit dll)	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi	
	Masih rendahnya daya saing industri pengolahan yang didukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang produktif dan kompeten	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
		Lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun	Kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif
		Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Meningkatkan penyediakan subsidi operasi, memperluas area layanan, menambah trip perintis untuk Angkutan Laut, ASDP, Udara dan Kereta Api	Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembangunan sistem dan fasilitas angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau.	Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan	
	Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	Adanya desa berkategori desa tertinggal. hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa	
		Masih terjadi Kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	
	Masih kurangnya peran DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi masih berfluktuatif, pada tahun 2015 di 72,31 dan pada tahun 2014 pada 75,32	Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
		Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kepedulian dan partisipasi	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
		masyarakat	

2.4. Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD sesuai dengan daerah Pemilihannya. Pokok pikiran tersebut selanjutnya di selaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda setelah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel II.62 berikut.

Tabel II.157
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
1	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Bangka selatan	DINAS PENDIDIKAN	Bangka Selatan	a) Perwakilan Siswa SMK Negeri 1 Simpang Rimba jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) mengusulkan agar ditambahkan beberapa unit Komputer dan alat penunjang lainnya sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut; b) Perwakilan Siswa SMK Negeri 1 Simpang Rimba jurusan Multimedia (M.M) mengusulkan agar diaanggarkan 1 set peralatan Video Shooting sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;	Sedang Diverifikasi	
2	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu	DINAS PENDIDIKAN	Bangka Selatqan	Sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, mengusulkan agar kuota bea siswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu dapat di tambah;	Sedang Diverifikasi	
3	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan di Bangka Selatan	DINAS PENDIDIKAN	SMA N 1 Simpang Rimba	a) Pihak sekolah SMA NEGERI 1 TOBOALI mengusulkan kepada Pemerintah Provinisi Kepulauan Bangka Belitung untuk menambahkan kuota bea siswa untuk siswa berprestasi	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					dan kurang mampu sebanyak 500 orang; b) Pihak sekolah menanyakkan persyaratan bea siswa ke taiwan;		
4	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana di SMAN Simpang Rimba Bangka Selatan	DINAS PENDIDIKAN	SMAN 1 Simpang Rimba	a) Pihak sekolah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dibuatkan pagar sekolah sepanjang 600m sebagai sarana penunjang peningkatan akses dan mutu pendidikan di SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA; b) Pihak sekolah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dibuatkan rumah penjaga sekolah dengan anggaran dana sebesar Rp 150.000.000,00 sebagai sarana penunjang peningkatan akses dan mutu pendidikan di SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA; c) Pihak sekolah	Sedang Diverifikasi	
5	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana di SMA N 1 Simpang Rimba	DINAS PENDIDIKAN	Belitung dan Belitung Timur	e) Pihak sekolah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk di buatkan rumah dinas untuk para guru karena jarak rumah dan lokasi sekolah terlalu jauh; f) Perwakilan guru Honorer SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA mengeluhkan apabila sekolah tempat mereka	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					mengajar, akan diisi oleh Tenaga Pendidik yang baru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mereka merasa khawatir akan diganti dan status Honorer mereka akan dihilangkan; g) Perwakilan guru SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA		
6	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Belitung TImur	DINAS PENDIDIKAN	Damar Kelapa Kampit	1. Diharapkan dapat dibangun Sarana Olahraga sebagai tempat anak muda berkreasi dan beraktifitas positif melalui olahraga. 2. Permohonan renovasi SD 18 Membalong. 3. Permohonan fasilitas praktek di SMK 1 Selat Nasik seperti Kerambah Jaring Apung. 4. Perpustakaan SMAN 1 Damar membutuhkan buku-buku pengetahuan Umum. 5. Fasilitas Laboratorium di SMAN 1 Damar yang masih kurang.	Sedang Diverifikasi	
7	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana di SMAN Damar	DINAS PENDIDIKAN	SMK Selat Nasik	7. Permohonan pembangunan pagar keliling di SMAN 1 Damar. 8. Membutuhkan kepala TU untuk SMAN 1 Damar. 9. Parkiran kendaraan yang belum ada Kanopi. 10. Peralatan Laboratorium	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					yang masih kosong dan penggunaan Laboratorium yang belum maksimal. 11. TP guru berbeda dengan Sekolah lainnya, dan susahnya pengurusan sertifikasi. 12. Ruang kelas yang masih kurang dan pengadaan AC diruang Ujian dan Ruang Komputer. 13. Permohonan pembangunan Sarana Olahraga dan Fasilitas seni tempat siswa berkreasi dan ber		
8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana SMK Selat Nasik	DINAS PENDIDIKAN	Muntok Bangka Barat	Diharapkan dapat dibangun gedung serbaguna di SMK Selat Nasik untuk tempat pertemuan, pentas seni dan olahraga. SMK 1 Selat Nasik Membutuhkan fasilitas praktek seperti Kerambah Jaring Apung.	Sedang Diverifikasi	
9	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Beasiswa masyarakat tidak mampu, Gaji Guru Honorer serta Pendidikan TPA	DINAS PENDIDIKAN	Bangka Barat	1. Masyarakat Dusun Bujang Desa Tugang meminta pembangunan TPA/TPSA; 2. Usulan Masyarakat Dusun Bujang kepada pemerintah supaya bisa memberi fasilitas dan perhatian terhadap SD yang ada di Desa, karena yang selalu menjadi perhatian tidak lain hanya sekolah-sekolah yang ada di kecamatan karena pemerintah juga harus sedikit memperhatikan SD yang ada di	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					pelosok; 3. Masyarakat Desa Muntok meminta agar kesejahteraan dan insentif guru honorer lebih ditingkatkan		
10	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Bantuan Pendidikan serta Insentif Guru	DINAS PENDIDIKAN	Bangka	4. Masyarakat Desa Sinar Sari meminta perhatian khusus terhadap murid – murid berprestasi dan kurang mampu berupa beasiswa untuk divalidasi datanya dan dibantu secara maksimal; 5. Masyarakat Muntok khususnya para Guru Honorer meminta agar insentif pendidikan Paud dan TK tidak dihilangkan; 6. Masyarakat Teluk Rubiah meminta penjelasan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi;	Sedang Diverifikasi	
11	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sosialisasi ke Sekolah-sekolah terkait beasiswa pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	Desa Petaling	Masyarakat minta kejelasan masalah bantuan beasiswa pendidikan sekolah yang kurang mampu	Sedang Diverifikasi	
12	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Bantuan Bis Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Beltung	Masyarakat / Guru meminta agar adanya bantuan untuk Bus sekolah dari pangkalpinang ke daerah petaling dan sekitarnya	Sedang Diverifikasi	
13	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Desa Kundi Bangka Barat	1. Sektor pendidikan seperti TPA, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan madrasah masih kurang perhatian. Seperti Masyarakat Desa Bentaian Jaya, yang mengharapkan	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					dilengkapinya sarana dan prasarana Sekolah yang telah PAUD yg representative di Desa Mereka. 2. Masyarakat berharap agar mendapatkan Informasi pendidikan gratis/beasiswa untuk masyarakat miskin dan anak yatim, dan siswa berprestasi.		
14	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Usulan Masyarakat Kundi Untuk Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	KEcamatan Bakam	7. Bantuan beasiswa pendidikan untuk masyarakat desa kundi 8. Mengusulkan sekolah SMA/SMK di desa kundi	Sedang Diverifikasi	
15	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Kajian SMA Baru di Kecamatan Bakam	DINAS PENDIDIKAN	SMK I Sungai Selan	Masyarakat mengharap bantuan adanya pembangunan sekolah menengah atas (SMAN)	Sedang Diverifikasi	
16	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pengadaan Mesin jahit listrik karena yang sekarang sekolah hanya memiliki 3 (tiga) buah mesin jahit	DINAS PENDIDIKAN	Madrasah Tsanawiyah AIAI, Kec. Sungai Selan	SMK N I Sungai Selan mengharapkan bantuan mesin jahit listrik karena yang sekarang sekolah hanya memiliki 3 (tiga) buah mesin jahit	Sedang Diverifikasi	
17	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru serta bantuan sarana ekstrakurikuler minat bakat siswa	DINAS PENDIDIKAN	Bangka Barat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru serta bantuan sarana ekstrakurikuler minat bakat siswa Madrasah Tsanawiyah AIAI, Kec. Sungai Selan	Sedang Diverifikasi	
18	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Kesejahteraan Tenaga Pendidik Honorer	DINAS PENDIDIKAN	SMA Negeri I Lubuk Besar	Keingingan dari guru-guru honorer SMU/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					agar peningkatan kesejahteraan dan insentif guru honorer dengan gaji yang disesuaikan terhadap kondisi perekonomian saat ini. Disampaikan pula agar Pemprov tetap melanjutkan atau serta tidak menghilangkan insentif guru PAUD dan TK.		
19	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Penambahan Komputer untuk sarana Ujian di SMAN Lubuk Besar	DINAS PENDIDIKAN	SMA Negeri I Lubuk Besar	saat ini hanya berjumlah 27 Unit, sedang siswa yang akan ujian 128 siswa.	Sedang Diverifikasi	
20	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Pengadaan alat-alat kesenian dan olahraga di SMAN Lubuk Besar	DINAS PENDIDIKAN	SMA Negeri I Lubuk Besar	Alat Kesenian dan pembinaan minat bakat siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler dan sarana olahraga	Sedang Diverifikasi	
21	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Penambahan Daya Listrik SMAN I Lubuk Besar	DINAS PENDIDIKAN	SMK Negeri 1 Simpang Katis (SMK Teknik/STM)	Saat ini cuma sekitar 10KW, sedangkan butuh tambahan menjadi minimal 33.000 watt., Agar segera di realisasikan untuk kelancaran belajar siswa	Sedang Diverifikasi	
22	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Bantuan mobil praktek untuk Siswa SMKN Simpang Katis	DINAS PENDIDIKAN	Seluruh SMA dan SMK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Agar diberikan bantuan mobil untuk praktek bagi anak-anak kelas otomotif, karena saat ini mobil prakteknya adalah mobil yang sudah lama. tidak up to date.Mobil atau kendaraan yang nantinya diberkan diharapkan dalam kondisi yang up to date.	Sedang Diverifikasi	
23	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sosialisasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari Provinsi.	DINAS PENDIDIKAN	SMA Negeri 2 Sungai Selan	Belum adanya Sosialisasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari Provinsi yang	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					dapat langsung diketahui oleh siswa. banyak siswa yang mengharapkan ini.		
24	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Minat dari siswa untuk pengembangan minat dan bakan melalui ekstrakurikuler, agar dapat ditambah lagi sarana dan prasarananya, seperti alat keolaragaan, kepanduan, dan musik drumband.	DINAS PENDIDIKAN	SMK Negeri 1 Pangkalan Baru	Minat dari siswa untuk pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler, agar dapat ditambah lagi sarana dan prasarananya, seperti alat keolaragaan, kepanduan, dan musik drumband.	Sedang Diverifikasi	
25	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sosialisasi Beasiswa Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	SMA Negeri I Lubuk Besar	Kurangnya sosialisasi beasiswa Pendidikan bagi siswa tidak mampu dan berprestasi	Sedang Diverifikasi	
26	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Penambahan kapasitas mushola	DINAS PENDIDIKAN	SMK Negeri 1 Simpang Katis (SMK Teknik/STM)	Penambahan kapasitas ukuran mushola	Sedang Diverifikasi	
27	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Penambahan sarana dan prasarana jurusan kelistrikan pada SMKN2 Simpang Katis	DINAS PENDIDIKAN	SMKN2 Simpang Katis	Kekurangan sarana dan prasarana jurusan kelistrikan. Saat ini seringkali guru berinovasi untuk menciptakan peralatan yang menunjang pembelajaran. Penting bagi sekolah ini untuk difasilitasi pengadaan alat-alat praktek kelistrikan.	Sedang Diverifikasi	
28	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Pagar SMKN2 Simpang Katis	DINAS PENDIDIKAN	Belitung	Pembangunan tambahan pagar sekolah.	Sedang Diverifikasi	
29	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Belitung	a. Adanya pembangunan SMA / SMK serta statusnya agar terdaftar b. Pemberian beasiswa dari pemerintah	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					untuk siswa yang kurang mampu.		
30	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Pengembangan SMKN Pariwisata di Belitung	DINAS PENDIDIKAN	SMAN 1 Namang	Terkait perkembangan pariwisata Belitung, Masyarakat ingin didirikan juga sekolah Pariwisata yang punya stadar baik	Sedang Diverifikasi	
31	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Bantuan Sarana dan Prasarana di SMAN 1 Namang	DINAS PENDIDIKAN	Pangkalpinang	SMA Negeri 1 Namang Kabupaten Bangka Tengah meminta bantuan infokus, lapangan futsal, bantuan kipas angin disetiap ruangan dan bis sekolah	Sedang Diverifikasi	
32	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	bantuan insentif guru swasta	DINAS PENDIDIKAN	Bangka Tengah	bantuan insentif guru swasta untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan guru negeri dan swasta.	Sedang Diverifikasi	
33	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bangka Tengah	DINAS PENDIDIKAN	Belitung	Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	
34	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Sosialisasi Beasiswa Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	SMK Negeri I Manggar	Masyarakat menginginkan adanya bantuan pendidikan (beasiswa) bagi anak-anak/mahasiswa/mahasiswi berprestasi tapi berasal dari keluarga yang kurang mampu yang saat ini sedang menempuh pendidikan/perkuliahan mereka baik di Pulau Bangka Belitung maupun di luar kepulauan.	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
35	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Pembangunan Gedung Serba Guna, Beasiswa Pendidikan dan Tambahan Guru Pendamping Ekstrakurikuler	DINAS PENDIDIKAN	SMK Negeri I Simpang Rimba	1. Pihak sekolah mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membangun Gedung Serba Guna yang saat ini sama sekali belum ada dan dinilai sangat prioritas sehingga saat ini apabila ada kegiatan besar di SMKN I Manggar, dikonsentrasikan di Aula Mushola. 2. Para pengajar yang seringkali bertugas sebagai tenaga pendamping bagi para siswa/siswi kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler mengharapkan adanya perbaikan dan kenaikan dari biaya pendampingan tersebut	Sedang Diverifikasi	
36	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Kegiatan peningaktan kesehatan bagi masyarakat	DINAS KESEHATAN	Bangka Barat	1. Masyarakat Dusun Bujang meminta agar ada salah satu bantuan mobil ambulance yang standby supaya akses masyarakat menuju ke puskesmas bahkan rumah sakit menjadi mudah, bahkan bisa juga digunakan untuk mobil jenazah untuk mengantar ke tempat pemakaman;	Sedang Diverifikasi	
					2. Program BPJS ada yang memberatkan masyarakat karena harus satu KK di daftarkan semua. Mohon		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					kebijakan dan penjelasan terkait kemudahannya.		
37	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Sosialisasi penggunaan fasilitas kesehatan	DINAS KESEHATAN	Muntok Bangka Barat	1. Untuk masalah BPJS di Desa Sinar sari yang jauh dari jangkauan pemerintah, masih kurang pengetahuan mengenai kepengurusan BPJS dan masyarakat meminta agar dijelaskan prosedurnya agar mereka bisa memahami dan tidak salah dalam penggunaannya; 2. Masyarakat Dusun Bujang meminta untuk dilakukan foging di Dusun Bujang dan Desa Tugang;	Sedang Diverifikasi	
38	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Pendirian Pos Pembantu untuk Bidan	DINAS KESEHATAN	Desa Bujang Bangka Barat	Masyarakat meminta untuk didirikan klinik bersalin di Dusun Bujang karena mengingat Dusun Bujang jauh dari titik pusat perkotaan;	Sedang Diverifikasi	
39	PEMBANGUNAN KESEHATAN		DINAS KESEHATAN		1. Banyak masyarakat yang tidak mampu lagi membayar iuran bulanan untuk kepesertaan pada Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan; 2. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama antara pasien BPJS dengan pasien non	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					BPJS. 3. Pelayanan BPJS Masih Kurang;		
40	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Program BPJS	DINAS KESEHATAN	Program BPJS	Dimana kebanyakan warga membuat BPJS mandiri bukan dari Pemerintah, dimana Pemerintah selalu mensurvei melihat tempat tinggalnya bukan dr ekonominya sehingga masyarakat dianggap layak dan tidak perlu dibantu.	Sedang Diverifikasi	
41	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Kemudahan Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN		Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan terkait BPJS kesehatan, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak paham akan penggunaan kartu BPJS. Diharapkan adanya sosialisasi dari BPJS itu sendiri untuk menambah pemahaman pada masyarakat. Ditambah lagi dengan belum tepatnya sasaran untuk BPJS kesehatan pada masyarakat yang kurang mampu. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar pada BPJS.	Sedang Diverifikasi	
42	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Permasalahan BPJS	DINAS KESEHATAN	Pangkalpinag	Diharapkan kepada pemerintah agar menjembatani dalam permasalahan BPJS yang kebanyakan rumah sakit merujuk ke rumah sakit lain dikarenakan pasien penuh.	Sedang Diverifikasi	
43	PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas	DINAS	Belitung	a. Sosialisai tentang BPJS	Sedang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	KESEHATAN		kepada masyarakat ditingkatkan. b. Pelayan terhadap lanjut usia lebih diperhatikan. c. Pelayanan Ibu dan anak ditingkatkan.	Diverifikasi	
44	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Rehab poskesdes desa sangku	DINAS KESEHATAN	Desa Sangku	Rehab poskesdes desa sangku	Sedang Diverifikasi	
45	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Program BPJS bagi Lansia	DINAS KESEHATAN	Simpang Perlang	pelayanan dan bantuan kesehatan bagi para lansia (Lanjut Usia) dengan memberikan fasilitas BPJS secara gratis di Kel. Simpang Perlang	Sedang Diverifikasi	
46	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Sosialisasi dan Bantuan bagi masyarakat miskin untuk berobat	DINAS KESEHATAN	Sripemandang Sungailiat	Masyarakat menyampaikan usulan BPJS gratis bagi masyarakat miskin (tidak mampu) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan berobat	Sedang Diverifikasi	
47	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Sosialisasi dari BPJS Mengenai BPJS PBI	DINAS KESEHATAN	Seluruh tempat di Pangkalpinang	Masyarakat di Kelurahan Rejosari Menginginkan Mohon Agar dilakukannya Sosialisasi dari BPJS Mengenai BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran) Kepada Masyarakat yang Katanya Gratis dari Kelurahan tapi kenapa Untuk Kelanjutannya Kartu Tersebut Tidak Bisa di Pakai atau Belum Aktif.	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
48	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Bantuan Operasional Mobil Ambulance yang Standby di Perwakilan Babel di Pulau Belitung	DINAS KESEHATAN	Belitung	Masyarakat mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan mobil ambulance bagi pasien rujukan dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Belitung Timur ke Jakarta, mengingat untuk biaya sewa ambulance di Jakarta sangat mahal sedangkan Mess Belitung Timur tempat dimana mereka menginap belum memiliki sarana ini. Untuk itu, masyarakat menginginkan adanya bantuan mobil ambulance yang di stand by kan di Mess Belitung Timur yang ada di Jakarta agar dapat membantu para pasien rujukan yang membutuhkannya.	Sedang Diverifikasi	
49	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Sosialisasi BPJS	DINAS KESEHATAN	KAMPUNG BUGIS, KECAMATAN GANTUNG, KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Adanya sosialisasi, asistensi atau bantuan bagi masyarakat dalam pengurusan BPJS dikarenakan selama ini mereka masih belum paham dan mengerti bagaimana cara pengurusan keikutsertaan mereka dalam program pemerintah ini.	Sedang Diverifikasi	
50	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Fasilitasi kepemilikan buku nikah dan nikah masal	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pencatatan sipil dan Keluarga	Desa Pasir Garam	Masih banyaknya masyarakat Desa Pasir Garam yang belum memiliki Buku Nikah diharapkan agar Pemerintah mengadakan Program Nikah masal	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
			Berencana				
51	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pelatihan dan pemberdayaan ibu rumah tangga untuk industri kreatif berbahan baku daur ulang atau lokal.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pencatatan sipil dan Keluarga Berencana	Bangka Tengah	Pelatihan dan pemberdayaan ibu rumah tangga untuk industri kreatif berbahan baku daur ulang atau lokal.	Sedang Diverifikasi	
52	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan rehab masjid Nurul Malik Bukit Damai Petar di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	BKPSDMD	Tumbak Petar Bangka Barat	Bantuan rehab masjid Nurul Malik Bukit Damai Petar di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	Sedang diverifikasi	
53	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Sistem Rekruitment Tenaga Kontrak/Honorer	BKPSDMD	Bangka Belitung	Masyarakat sripemandang menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah dalam hal perekrutan atau penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda dilaksanakan secara transparan atau terbuka bagi Masyarakat.	Sedang diverifikasi	
54	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	pengaspalan jalan Umum yang ada di Perumnaskin air kepala 7 pangkalpinang	SETDA	Pangkalpinang	pengaspalan jalan Umum yang ada di Perumnaskin air kepala 7	Sedang diverifikasi	
55	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan TPA yang sudah begitu lama + 10 tahun dan masyarakat setempat membutuhkan gedung baru yang bertempat di belakang BB Tower	SETDA	Pangkalpinang	Mengharapkan Pembangunan TPA yang sudah begitu lama + 10 tahun dan masyarakat setempat membutuhkan gedung baru yang bertempat di belakang BB Tower	Sedang diverifikasi	
56	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Masyarakat Desa Sungai Selan Atas meminta bantuan Pagar Kuburan	SETDA	desa Sungai Selan Atas	Masyarakat Desa Sungai Selan Atas meminta bantuan Pagar Kuburan	Sedang diverifikasi	
57	PENINGKATAN	Batas Desa antara Terak dan	SETDA	Bangka Tengah	Batas Desa antara Terak dan	Sedang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	EKONOMI MASYARAKAT	Pedindang yang belum jelas untuk dapat segera diselesaiakan			Pedindang yang belum jelas untuk dapat segera diselesaiakan	diverifikasi	
58	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan insentif guru ngaji dan TPA	SETDA	Bangka Tengah	Insentif GUru Ngaji dan TPA	Sedang diverifikasi	
59	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan Balai untuk Pengajian	SETDA	Sungai Baru Muntok	Bantuan balai untuk anak-anak mengaji dan bantuan untuk gendang ibu-ibu pengajian	Sedang diverifikasi	
60	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Usulan Pemekaran Kabupaten Bangka Utara	SETDA	Kecamatan Belinyu	Kejelasan rencana pemekaran Kecamatan Belinyu menjadi Kabupaten Bangka Utara untuk terus diperjuangkan dan dindaklanjuti keinginan masyarakat ini.	Sedang diverifikasi	
61	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitas dan Honor Guru TPA	SETDA	Desa Kenanga	Guru TPA khususnya honor guru TPA agar dapat menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, pembangunan fasilitas di TPA seperti pembangunan WC sangat dibutuhkan guna menunjang proses belajar mengajar di TPA.	Sedang diverifikasi	
62	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Masjid dan TPA	SETDA	Desa Rias Bangka Selatan	a) Masyarakat Desa Rias mengusulkan agar harga sawit, Lada, dan Karet yang turun agar secepatnya dinaikkan; b) Pembiayaan alat operator alsintan yang ada di Desa Rias sudah untuk di operasionalkan karena kekurangan BBM; c) Tunjangan insentive guru TPA agar di naikkan;	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					d) Masyarakat Desa Rias Mengelukan Proposal masjid Al-Muhajirin I dusun SPA Rias dari tahun 2016 belum di setujui; e) Perwakilan pengurus Masjid Muhajirin II menanyajan perihal diajukannya proposal tentang hasil panen sawah, Zakat,		
63	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan DABA	SETDA	Membalong Belitung	7. Permohonan untuk merenovasi atap Masjid Nurul Jannah Desa Sabong yang sudah dibangun sejak tahun 80-an. 8. Permohonan untuk merenovasi SD 18 Membalong , atap bangunan bocor. 9. Permohonan bantuan lampu penerangan Jalan Dusun Sabong. 10. Permohonan pembangunan Gudang Lada dan Gudang Karet mengingat mayoritas masyarakat Desa Tanjung Rusa adalah Petani.	Sedang diverifikasi	
64	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Desa Tanjung ratu menjadi desa administratif sendiri	SETDA	Desa Tanjung Ratu	Masyarakat Tanjung Ratu mengharapkan sekali ingin menjadi Desa sendiri karena sampai sekarang masih menginduk keDesa Rebo	Sedang diverifikasi	
65	PENINGKATAN EKONOMI	Peningkatan insentif Gurun Mengaji dan TPA	SETDA	Bangka Tengah		Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	MASYARAKAT						
66	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan Mesjid	SETDA	Bangka Selatan - Desa RIas	Pengurus Masjid Al-Muhajirin 1 yang berlokasi di Desa Rias Kecamatan Toboali mengajukan permohonan bantuan dana untuk pembangunan masjid tersebut dengan anggaran sebesar Rp750.000.000;	Sedang diverifikasi	
67	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitasi Perizinan Rumah Ibadah	SETDA	Desa Bulu Tumbang	Perizinan untuk rumah agama ibadah (gereja) tanpa surat izin yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat	Sedang diverifikasi	
68	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan laporan Bola	SETDA	Desa Bakam	Masyarakat meminta adanya bantuan dana untuk pembangunan lapangan bola	Sedang diverifikasi	
69	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Mesjid Desa BEntaian Jaya	SETDA	Desa Bentaian Jaya	Masyarakat Bentaian Jaya meminta bantuan rumah Ibadah. Hal ini Desa Bentaian Jaya adalah Desa pemekaran baru, sehingga Bentaian Jaya belum memiliki Rumah Ibadah yang memadai.	Sedang diverifikasi	
70	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pengadaan tanah Pekuburan	SETDA	Bukit Tani Pangkalpinang	Lahan Pekuburan saat ini sudah sempit.	Sedang diverifikasi	
71	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan pembangunan jalan kubur ± 100 meter di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	SETDA	tumbak Petar Bangka Barat	Bantuan pembangunan jalan kubur ± 100 meter di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	Sedang diverifikasi	
72	PENINGKATAN EKONOMI	Bantuan pembangunan aula Paud di di Kampung Bukit	SETDA	Tumak Petar Jebus Bangka	Bantuan pembangunan aula Paud di di Kampung Bukit	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	MASYARAKAT	Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus		Barat	Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus		
73	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan peralatan rebana majelis ta'lim Nurul Insan di Desa sangku	SETDA	Desa Sangku Bangka Barat	Bantuan peralatan rebana majelis ta'lim Nurul Insan di Desa sangku	Sedang diverifikasi	
74	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Perpustakaan untuk Desa bagi anak-anak	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Desa Parit Padang	Perpustakaan Desa untuk anak-anak	Sedang diverifikasi	
75	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Distribusi Beras Raskin	Dinas Sosial	Desa Keranggan Atas Muntok	Raskin untuk warga sangat sedikit sekali hanya mendapatkan 5 kepala keluarga saja, sementara masyarakat yang kurang mampu sangat banyak di kelurahan tanjung kerangan atas	Sedang diverifikasi	
76	Pembangunan Pendidikan	Pengusulah Pahlawan Nasional dari Belitung	Dinas Sosial	Bangka Belitung	Terus Memperjuangkan agar ada pahlawan nasional dari Belitung	Sedang diverifikasi	
77	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan rehab masjid Nurul Malik Bukit Damai Petar di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	BKPSDMD	Tumbak Petar Bangka Barat	Bantuan rehab masjid Nurul Malik Bukit Damai Petar di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	Sedang diverifikasi	
78	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Sistem Rekruitment Tenaga Kontrak/Honorer	BKPSDMD	Bangka Belitung	Masyarakat sripemandang menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah dalam hal perekrutan atau penerimaan tenaga honorer dilingkungan Pemda dilaksanakan secara transparan atau terbuka bagi Masyarakat.	Sedang diverifikasi	
79	PENINGKATAN EKONOMI	pengaspalan jalan Umum yang ada di Perumnaskin air	SETDA	Pangkalpinang	pengaspalan jalan Umum yang ada di Perumnaskin air kepala	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	MASYARAKAT	kepala 7 pangkalpinang			7		
80	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan TPA yang sudah begitu lama + 10 tahun dan masyarakat setempat membutuhkan gedung baru yang bertempat di belakang BB Tower	SETDA	Pangkalpinang	Mengharapkan Pembangunan TPA yang sudah begitu lama + 10 tahun dan masyarakat setempat membutuhkan gedung baru yang bertempat di belakang BB Tower	Sedang diverifikasi	
81	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Masyarakat Desa Sungai Selan Atas meminta bantuan Pagar Kuburan	SETDA	desa Sungai Selan Atas	Masyarakat Desa Sungai Selan Atas meminta bantuan Pagar Kuburan	Sedang diverifikasi	
82	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Batas Desa antara Terak dan Pedindang yang belum jelas untuk dapat segera diselesaiakan	SETDA	Bangka Tengah	Batas Desa antara Terak dan Pedindang yang belum jelas untuk dapat segera diselesaiakan	Sedang diverifikasi	
83	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan insentif guru ngaji dan TPA	SETDA	Bangka Tengah	Insentif GUru Ngaji dan TPA	Sedang diverifikasi	
84	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan Balai untuk Pengajian	SETDA	Sungai Baru Muntok	Bantuan balai untuk anak-anak mengaji dan bantuan untuk gendang ibu-ibu pengajian	Sedang diverifikasi	
85	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Usulan Pemekaran Kabupaten Bangka Utara	SETDA	Kecamatan Belinyu	Kejelasan rencana pemekaran Kecamatan Belinyu menjadi Kabupaten Bangka Utara untuk terus diperjuangkan dan dindaklanjuti keinginan masyarakat ini.	Sedang diverifikasi	
86	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitas dan Honor Guru TPA	SETDA	Desa Kenanga	Guru TPA khususnya honor guru TPA agar dapat menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, pembangunan fasilitas di TPA seperti pembangunan WC sangat dibutuhkan guna menunjang proses belajar	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					mengajar di TPA.		
87	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Masjid dan TPA	SETDA	Desa Rias Bangka Selatan	a) Masyarakat Desa Rias mengusulkan agar harga sawit, Lada, dan Karet yang turun agar secepatnya dinaikkan; b) Pembiayaan alat operator alsintan yang ada di Desa Rias sudah untuk di operasionalkan karena kekurangan BBM; c) Tunjangan insentive guru TPA agar di naikkan; d) Masyarakat Desa Rias Mengelukan Proposal masjid Al-Muhajirin I dusun SPA Rias dari tahun 2016 belum di setujui; e) Perwakilan pengurus Masjid Muhajirin II menanyajan perihal diajukannya proposal tentang hasil panen sawah, Zakat,	Sedang diverifikasi	
88	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan DABA	SETDA	Membalong Belitung	1. Permohonan untuk merenovasi atap Masjid Nurul Jannah Desa Sabong yang sudah dibangun sejak tahun 80-an. 2. Permohonan untuk merenovasi SD 18 Membalong , atap bangunan bocor. 3. Permohonan bantuan lampu penerangan Jalan Dusun Sabong. 4. Permohonan pembangunan Gudang Lada	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					dan Gudang Karet mengingat mayoritas masyarakat Desa Tanjung Rusa adalah Petani.		
89	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Desa Tanjung ratu menjadi desa administratif sendiri	SETDA	Desa Tanjung Ratu	Masyarakat Tanjung Ratu mengharapkan sekali ingin menjadi Desa sendiri karena sampai sekarang masih menginduk keDesa Rebo	Sedang diverifikasi	
90	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan insentif Gurun Mengaji dan TPA	SETDA	Bangka Tengah		Sedang diverifikasi	
91	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan Mesjid	SETDA	Bangka Selatan - Desa RIas	Pengurus Masjid Al-Muhajirin 1 yang berlokasi di Desa Rias Kecamatan Toboali mengajukan permohonan bantuan dana untuk pembangunan masjid tersebut dengan anggaran sebesar Rp750.000.000;	Sedang diverifikasi	
92	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitasi Perizinan Rumah Ibadah	SETDA	Desa Bulu Tumbang	Perizinan untuk rumah agama ibadah (gereja) tanpa surat izin yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat	Sedang diverifikasi	
93	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pembangunan laporan Bola	SETDA	Desa Bakam	Masyarakat meminta adanya bantuan dana untuk pembangunan lapangan bola	Sedang diverifikasi	
94	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Mesjid Desa BEntaian Jaya	SETDA	Desa Bentaian Jaya	Masyarakat Bentaian Jaya meminta bantuan rumah Ibadah. Hal ini Desa Bentaian Jaya adalah Desa pemekaran baru, sehingga Bentaian Jaya belum memiliki Rumah Ibadah	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					yang memadai.		
95	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pengadaan tanah Pekuburan	SETDA	Bukit Tani Pangkalpinang	Lahan Pekuburan saat ini sudah sempit.	Sedang diverifikasi	
96	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan pembangunan jalan kubur ± 100 meter di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	SETDA	tumbak Petar Bangka Barat	Bantuan pembangunan jalan kubur ± 100 meter di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	Sedang diverifikasi	
97	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan pembangunan aula Paud di di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	SETDA	Tumak Petar Jebus Bangka Barat	Bantuan pembangunan aula Paud di di Kampung Bukit Damai Dusun Tumbak Petar Kec. Jebus	Sedang diverifikasi	
98	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan peralatan rebana majelis ta'lim Nurul Insan di Desa sangku	SETDA	Desa Sangku Bangka Barat	Bantuan peralatan rebana majelis ta'lim Nurul Insan di Desa sangku	Sedang diverifikasi	
99	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Perpustakaan untuk Desa bagi anak-anak	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Desa Parit Padang	Perpustakaan Desa untuk anak-anak	Sedang diverifikasi	
100	Pembangunan Agribahari	Tidak ada menu kegiatan pengerukan alur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Tanjung Laut Muntok	Pendalaman Alur Laut serta Bantuan Nelayan. Akses ke laut susah karena pendakalan pelabuhan dan tolong memperhatikan kesejahteraan masyarakat	Sedang Diverifikasi	Tidak ada menu kegiatan pengerukan alur, alternatif ada di PU/Perhubungan
101	Pembangunan Agribahari	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Kenanga	Bantuan bagi nelayan. Warga desa sebagia besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Namun kadangkala warga mengalami kendala alat penunjang mata pencaharian mereka, seperti motor tempel dan perahu. Guna menunjang mata pencaharian tersebut,	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					sangat berharap atas keikutsertaan pemerintah dalam membantu nelayan-nelayan di desa		
102	Pembangunan Agribahari	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dusun Selindang Belitung Timur	Perbaikan dermaga pelabuhan Batu Lesung di Dusun Selindang yang sudah roboh. Masyarakat mengharapkan perbaikan dermaga pelabuhan Batu Lesung di Dusun Selindang yang sudah roboh	Sedang Diverifikasi	
103	Pembangunan Agribahari	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Selat Nasik	Sarana dan prasarana untuk nelayan. Permohonan untuk pembuatan pabrik es yang mangkrak agar dioperasikan kembali. Penambahan mesin speet boat untuk nelayan. Renovasi dermaga pelabuhan	Sedang Diverifikasi	
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap					
		c. Pembangunan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)					
104	Pembangunan Agribahari	a. Pembangunan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belitung dan Belitung Timur	Sarana dan prasarana perikanan. 1) Pembangunan dan renovasi dermaga pelabuhan nelayan. 2) Permohonan penambahan mesin speet boat di atas 40 PK	Sedang Diverifikasi	
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap					
105	Pembangunan	Peningkatan dan	Dinas Kelautan dan	Dermaga	Penggunaan TPI Ketapang.	Sedang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	Agribahari	Pengembangan PPI	Perikanan	Nelayan Ketapang	Dermaga TI pemanfaatannya untuk kapal nelayan ataukah kapal PT, karena kapal nelayan sangatlah susah untuk merapat ke TPI agar diperjelas	Diverifikasi	
106	Pembangunan Agribahari	a. Peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap b. Pengawasan sumber daya perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pangkalpinang	Pengurusan PAS Kecil kapal nelayan. Masalah pas kecil sudah kita urus karena sudah ditekan oleh Pol Air , sedangkan kita sudah ikut aturan kelompok. Sulitnya mengurus PAS ini kami berharap nelayan jangan dipersulit dengan alasan apa pun. Untuk kedepannya kami berharap jika ada kami membutuhkan radio untuk memudahkan monitor bahkan berkomunikasi antara nelayan satu ke nelayan lain	Sedang Diverifikasi	
107	Pembangunan Agribahari	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan TangkapPrasarana Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dusun Baru Manggar	Bantuan perahu nelayan untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Bantuan perahu nelayan untuk masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan	Sedang Diverifikasi	
108	Pembangunan Agribahari	a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pangkalpinang	Pengawasan nelayan yang menggunakan bom dan pukat untuk yang tidak sesuai aturan. Agar mengawasiperairan Belitung, karena nelayan sering menemukan “Nelayan Kongsi” yaitu nelayan besar yang	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					memakai bom untuk mendapatkan ikan. Penggunaan bom ini tentu akan sangat merusak ekosistem yang pada akhirnya akan merusak wisata pantai Belitung dan matapencaharian nelayan juga		
109	Pembangunan Agribahari	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Rambat	Daerah pantai yang kotor. 3. Bantuan peralata alat tangkap ikan seperti perahu mesin, pukat di desa Rambat. 4. Bantuan untuk tanggul pantai untuk menahan erupsi pantai 5. Alat bantuan untuk membersihkan daerah pantai di Desa Rambat Kec. Simpang Teritip 6. Belum adanya bantuan untuk nelayan koperasi rambat mandiri di Desa Rambat	Sedang Diverifikasi	
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap					
110	Pembangunan Agribahari	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Kurau	Kartu Nelayan di Desa Kurau. Masyarakat Desa Kurau meminta untuk segera merealisasikan kartu nelayan yang selama ini dijanjikan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Diverifikasi	
111	Pembangunan Agribahari	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Kurau	Sarana dan prasarana perikanan di Desa Kurau Masyarakat Desa Kurau juga berharap pasar ikan yang ada di desa tersebut lebih	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					terintegrasi SPPL seperti ada tempat juga ikan, pos polisi, dan ruko-ruko		
112	Pembangunan Agribahari	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dusun Puput Bukit Lintang	Bantuan Kapal Nelayan. Mengharapkan kepada pemerintah provinsi agar bantuan untuk kelompok nelayan Dusun Puput Desa Bukit Lintang tidak perlu menggunakan badan hukum	Sedang Diverifikasi	
113	Pembangunan Agribahari	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Tanjung Ular	Bantuan alat tangkap bagi masyarakat. Bantuan alat tangkap nelayan di Dusun Tanjung Ular Kecamatan Mentok. Bantuan alur sungai pengalang di Dusun Tanjung Ular	Sedang Diverifikasi	
114	PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Pengaspalan Jalan menuju sekolah SMK Negeri I Sungai Selan dari jalan besar yang masih tanah merah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SMK Negeri I SUngai Selan	Pengaspalan Jalan menuju sekolah dari jalan besar yang masih tanah merah	Sedang diverifikasi	
115		Masyarakat Desa Batu Belubang meminta agar Pemerintah dapat membuatkan sebuah balai pertemuan di daerah Pesisir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Batu Belubang Bateng	Masyarakat Desa Batu Belubang meminta agar Pemerintah dapat membuatkan sebuah balai pertemuan di daerah Pesisir	Sedang diverifikasi	
116		P7) Masyarakat Desa Batu Belubang meminta kepada Pemerintah Provinsi agar dapat memperbaiki/pengaspalan jalan Pantai Tapak Hantu mengingat jalan ini	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Batu Belubang Bateng	Masyarakat Desa Batu Belubang meminta kepada Pemerintah Provinsi agar dapat memperbaiki/pengaspalan jalan Pantai Tapak Hantu mengingat jalan ini merupakan jalan menuju tempat wisata.	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
		merupakan jalan menuju tempat wisata.engaspalan jalan Pantai Tapak Hantu mengingat jalan ini merupakan jalan menuju tempat wisata.					
117		Pengaspalan Jalan Rusak di Ruas Jalan Bangka Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Bangka Selatan	Pengaspalan jalan karena Kondisi jalan-jalan, khususnya di desa-desa payung, rias, dan lainnya di Kabupaten Bangka Selatan banyak yang sudah rusak sehingga mengganggu kelancaran transportasi masyarakat	Sedang diverifikasi	
118		Masyarakat Dusun Sungai Gusung mengusulkan pembangunan Jembatan Tambat Perahu untuk nelayan, dan Normalisasi Saluran Air / irigasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Sungai Gusung Bangka Selatan	Masyarakat Dusun Sungai Gusung mengusulkan pembangunan Jembatan Tambat Perahu untuk nelayan, dan Normalisasi Saluran Air / irigasi.	Sedang diverifikasi	
119		Peningkatan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kelubi Belitung	Pelebaran jalan permukiman Air Gundang-Pasir Garam sepanjang 2 Km dan Jalan Porsekal – jl.Pertanian sepanjang 500M Pengaspalan jalan porsib ke jalan SMK Muhammadiyah	Sedang diverifikasi	
120		Peningkatan Jalan Belinyu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kecamatan Belinyu	Menginginkan agar jalan di kecamatan Belinyu untuk diperlebar, dengan tujuan mempermudah akses masyarakat dan aktivitas masyarakat	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
121		Perbaikan untuk Jalan di sekitaran Bukit Genas Taman Sari yang sudah Rusak dan berlobang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kelurahan Genas - Taman Sari - Pangkalpinang	-	Sedang diverifikasi	
122		Perbaikan Saluran Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Genas - Taman Sari - Pangkalpinang	-	Sedang diverifikasi	
123		Peningkatan dan pelebaran jalan dari desa buluh tumbang ke Desa Buding	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Buding Kelapa Kampit	Pelebaran jalan dari desa buluh tumbang ke Desa Buding	Sedang diverifikasi	
124		Penanganan Permasalahan Infrastruktur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kelumbi Manggar	6. Masyarakat mengeluhkan proyek PDAM yang mangkrak (terbengkalai) dari tahun 2016. 7. Masalah banjir di RT 04 Dusun I Desa Kelubi apabila ada hujan deras dan dalam waktu yang lama. 8. Pelebaran jalan permukiman Air Gundang-Pasir Garam sepanjang 2 Km dan Jalan Porsekal – jl.Pertanian sepanjang 500 meter. 9. Pengaspalan jalan porsib ke jalan SMK Muhammadiyah	Sedang diverifikasi	
125		Peningkatan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Membalong Belitung	3. Pelebaran jalan masuk ke Pantai Marinda yang menjadi objek pariwisata Desa Tanjung Rusa. 4. Pelebaran jalan tanjung pandan – membalong yang masih belum merata.	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
126		Sarana dan prasarana di Desa Selat Nasik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selat Nasik	1. Proyek PDAM yang sudah selasai tetapi belum dioperasikan. 2. Akses jalan dari Desa Susair ke Selat Nasik yang sudah beberapa kali di usulkan. 3. Pelebaran Akses jalan sepanjang 4 KM dari Pulau Kemang ke Selat Nasik. 4. Akses jalan dari Pasir Panjang ke Mendanau	Sedang diverifikasi	
127		Sarana dan Prasarana Desa sinar sari dan bujang di Bangka Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Sinar Sari Dan Bujang Bangka Barat	1. usulan dari masyarakat Desa Sinar Sari meminta kepada pemerintah supaya jalan setapak yang berada di desa dapat ditingkatkan karena ada beberapa jalan setapak yang belum ada jalan tembusnya; 2. Masyarakat Dusun Bujang Meminta untuk dibuatkan siring di Kiri Kanan Jalan; 3. Masyarakat Dusun Bujang meminta dibuatkan WC Umum dan sumur; 4. Masyarakat sinar sari Meminta untuk dibuatkan siring di kiri kanan jalan; 5. Masyarakat Desa Sinar Sari meminta ditambakan ruangan baru SD	Sedang diverifikasi	
128		Perbaikan dan Peningkatan Jalan di Bangka Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Muntok Bangka Barat	Masyarkat Muntok meminta perbaikan jalan menuju tanjung kalian yang dianggap masih bergelombang karena untuk menambah kenyamanan bagi pengunjung tanjung kalian	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					dan meningkatkan sektor pariwisata Kecamatan Muntok. serta Masyarakat desa Muntok meminta perbaikan akses jalan menuju bukit Menumbing;		
129		Peningkatan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangka - Desa Zed	Pengaspalan Jalan-jalan yang ada di Desa Zed (Terutama Jalan lingkar desa) untuk di sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sedang diverifikasi	
130		Peningkatan Jalan Desa Rebo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangka	Kondisi jalan-jalan batu ampar menuju Dusun Tanjung Ratu di Desa Rebo tidak memadai, dimana banyak jalan desa yang belum diaspal;	Sedang diverifikasi	
131		Pengerukan Sungai Kota Panji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangka	Masyarakat berharap untuk pengerukan alir sungai yang saat ini dangkal	Sedang diverifikasi	
132		Perbaikan Jalan di Seputaran Air Mawar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pangkalpinag	Pembangunan jalan masih 40%, sedangkan jalan ini adalah hal terpenting, apalagi akan memasuki musim penghujan. Dimana jalanan pasti sangat becek dan berlumpur.	Sedang diverifikasi	
133		Perbaikan dan Peningkatan Gorong-Gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Gandaria - Air Kepala Tujuh	mengharapkan kepedulian pemerintah terkait saluran Got-got yang ada, karena dari tahun 2007 sampai dengan sekarang belum direhab sama sekali	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					sampai dengan SD 8 Tuatunu.		
134		Jalan Tanjung Pura - Sungai Selan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangka Tengah	Peningkatan dan pemeliharaan agar tetap terjaga kebaikannya	Sedang diverifikasi	
135		Peningkatan jalan di Desa Pasir Garam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa pasir garam	Masyarakat Pasir Garam untuk membuat jalan Rintis dari ujung POM Bensin s.d SD Desa Pasir Garam	Sedang diverifikasi	
136		Peningkatan dan Perwatan Jalan di Beltung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanjung panan	a. Perbaikan jalan terutama didaerah pariwisata tolong diperlebar . b. Disepanjang jalan Tanjungpandan tolong diperhatikan saluran air yang rusak yang mengakibatkan drainase tertutup. c. Sepanjang jalan menuju tempat pariwisata banyak lobang. d. Pemasangan lampu jalan.	Sedang diverifikasi	
137		Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belitung	3. Masyarakat mempertanyakan masalah pembangunan Stadion Mini yang belum terealisasikan karena desa sudah menyiapkan lahannya. 4. Masalah infrastruktur seperti jalan tolong diperlebar dan di sosialisasikan masalah ganti rugi tanah yang terkena perlebaran jalan. 5. Masalah pembangunan jalan setapak atau gang tolong diperhatikan mengingat dana desa sangat	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					terbatas. 6. Masyarakat mengharapkan air bersih di daerah-daerah tertentu yang sumber airnya sulit di dapat.		
138		Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belitung	a. Perbaikan jalan terutama didaerah pariwisata tolong diperlebar . b. Disepanjang jalan Tanjungpandan tolong diperhatikan saluran air yang rusak yang mengakibatkan drainase tertutup. c. Sepanjang jalan menuju tempat pariwisata banyak lobang. d. Pemasangan lampu jalan.	Sedang diverifikasi	
139		Peningkatan Jalan Sumpit sampai Jalan SMK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Simpang Tiga Jebus	Jalan Sumpit sampai Jalan SMK. karena minta diaspal dari Jalan akses jalan belum ada dan masayarakat, anak-anak sekolah banyak keluar atau sekolah diluar.	Sedang diverifikasi	
140		Peningkatan normalisai saluran got	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pangkalpinang	Kami mengharapkan kepedulian pemerintah terkait saluran Got-got yang ada, karena dari tahun 2007 sampai dengan sekarang belum direhab sama sekali sampai dengan SD 8 Tuatunu. Pembuangan wc juga dari 2007 sampai dengan sekarang masih belum pernah dikuras. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai anak-anak yang termasuk dalam	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					lingkaran narkoba dan sex bebas, jujur saja kami resah dengan pergaulan anak-anak jaman sekarang. Hal ini dapat berdampak sangat buruk bagi kehidupan anak-anak muda dikampung k		
141		Sarana dan Prasarana Pembangunan di Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Rias Bangka Selatan	f) Air bendungan Mentukul airnya sangat keruh sehingga tidak dapat dipakai untuk irigasi sawah; g) Perwakilan masyarakat Desa Rias mengeluhkan rusaknya gorong-gorong di RT.002 Desa Rias; h) Perwakilan Masyarakat Desa Rias meminta bantuan aspal jalan; i) Perwakilan SD di Dusun SPA Desa Rias meminta bantuan pembangunan pagar untuk lingkungan sekolah;	Sedang diverifikasi	
142		Pelebaran Jalan Desa Nyelanding	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nyelanding - Sidoarjo	Masyarakat Desa Sidorajo mengusulkan agar jalan dari Desa Sidoarjo ke Desa Nyelanding dilakukan Pelebaran jalan	Sedang diverifikasi	
143		Pengaspalan jalan antara Air Pegantongan menuju Kepayang;	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Pengantongan	Pengaspalan jalan antara Air Pegantongan menuju Kepayang;	Sedang diverifikasi	
144		Peningkatan Jalan Lanjutan Selindang-Padan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Air Selindang menuju Padang	Masyarakat meminta melanjutkan pembangunan jalan antara selindang menuju padang yg terhenti beberapa	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					tahun belakangan.		
145		Pengaspalan Jalan Desa SImpang Tiga ke SMK simpang tiga, Bangka Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa SImpang Tiga Bangka barat	Jalan minta diaspal dari Jalan Sumpit sampai Jalan SMK. karena akses jalan belum ada dan masayarakat, anak-anak sekolah banyak keluar atau sekolah diluar	Sedang diverifikasi	
146		Peningkatan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangka Baraat	14. Bantuan lanjutan pembangunan jalan lintas dari air menduyung ke Tanjung Niur. 15. Pembanguan aspal desa di Desa kundi dari Jalan rebak ke desa air ibul 16. Pengaspalan jalan di desa bukit terak.	Sedang diverifikasi	
147		PEningkatan Jalan Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Bakam	Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk dapat membantu adanya pengaspalan jalan lingkar selatan desa bakam.	Sedang diverifikasi	
148		Perbaikan Gorong-gorong dan parit di - Daerah Bukit intan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bukit Intan Pangkalpinang	Perbaikan Gorong-gorong dan parit di - Daerah Bukit intan untuk meminimalisir genangan air saat hujan	Sedang diverifikasi	
149		Bantuan pembangunan siring di Kampung Bukit Damai Dusun Petar Desa Tumbak Petar.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kampung Bukit Damai Desa Tumbak Petar Bangka Barat	Bantuan pembangunan siring di Kampung Bukit Damai Dusun Petar Desa Tumbak Petar.	Sedang diverifikasi	
150		Pembangunan jalan ke kandang sapi ± 150 meter di jalan lingkar di Kampung Bukit Damai dusun tumbak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tumbak Petar	Pembangunan jalan ke kandang sapi ± 150 meter di jalan lingkar di Kampung Bukit Damai dusun tumbak petar	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
		petar					
151		Pembangunan jalan tembus ± 300 meter di transmigrasi semukuk jebus dan peningkatan jalan ± 3 km di transmigrasi semukuk desa jebus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Semukuk Jebus Bangka Barat	Pembangunan jalan tembus ± 300 meter di transmigrasi semukuk jebus dan peningkatan jalan ± 3 km di transmigrasi semukuk desa jebus	Sedang diverifikasi	
152		Pembangunan jalan lingkar 3 di desa mislak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Mislak Bangka Barat	Pembangunan jalan lingkar 3 di desa mislak	Sedang diverifikasi	
153		Pelebaran jalan dusun air medang desa rhomadon ke desa sarang mandi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Air medang dan Desa Rhomadon	Masyarakat dusun air medang desa rhomadon mengharapkan agar adanya pelebaran jalan dari desa air medang ke desa sarang mandi	Sedang diverifikasi	
154		Masyarakat Desa Kurau Timur meminta agar penataan rumah di gang Nifa dapat dilanjutkan kembali	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kurau Timur	Masyarakat Desa Kurau Timur meminta agar penataan rumah di gang Nifa dapat dilanjutkan kembali	Sedang diverifikasi	
155		Peningkatan Jalan Akses ke Pantai Tapak Hantu di Batu Belubang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Batu BElubang	Masyarakat Desa Batu Belubang meminta kepada Pemerintah Provinsi agar dapat memperbaiki/pengaspalan jalan Pantai Tapak Hantu mengingat jalan ini merupakan jalan menuju tempat wisata	Sedang diverifikasi	
156		Pembuatan Pemecah Gelombang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Batu Belubang	Pembuatan Pemecah Gelombang untuk meminimalisir abrasi.	Sedang diverifikasi	
157		Pengaspalan Jalan Sri Pemandang Sungailiat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Sripemandang Sungailiat	Masyarakat sripemandang meminta bantuan pengaspalan	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
			PENATAAN RUANG		jalan, karena jika musim hujan tiba jalanan digenangi air.		
158		Perbaikan Siring dan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Serandang Kampung Peruang Desa Batu Rusa	Masyarakat meminta bantuan perbaikan jalan dan siring di jalan serandang kampung peruang desa batu rusa	Sedang diverifikasi	
159		Bantuan dana untuk pembangunan jalan di RT. 1 Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. dan Bantuan dana untuk pembangunan pagar sekolah SD Negeri 9 Kelapa Kecamatan Kelapa.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Air Bulin	Bantuan dana untuk pembangunan jalan di RT. 1 Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. dan Bantuan dana untuk pembangunan pagar sekolah SD Negeri 9 Kelapa Kecamatan Kelapa.	Sedang diverifikasi	
160		Perbaikan dan Peningkatan Jalan menuru Tanjung Ular	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanjung Ular Muntok	Perbaikan jalan yang berada di dusun tanjung ular yang sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian dari pamerintah provinsi maupun kabupaten.	Sedang diverifikasi	
161		Pembangunan Siring, Selokan dan Jalan Setapak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Rejosari Pangkalpinang	Masyarakat di Kelurahan Rejosari Mengeluh Kurangnya Selokan/Bandar dijalan-jalan Utama maupun Jalan Perkampungan yang Menyebabkan Banjir yang Luas Oleh Karena Itu Masyarakat Mengharap Pembangunan Siring dan Selokan Serta Mencari Solusi Terhadap Persoalan Banjir. Masyarakat juga Berharap Pembangunan Ulang Untuk Jalan Setapak yang	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					Sudah Rusak dan Berlobang.		
162		Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Baru Selatan, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Masyarakat juga mengharapkan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah dimaksud seperti pelebaran jalan setapak, siring, lampu penerangan jalan serta pembangunan jembatan agar aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat dapat berjalan dengan baik dan lancar.	Sedang diverifikasi	
163		Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kampung Bugis, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Masyarakat menginginkan adanya perbaikan jalan dan saluran air yang ada di Kampung ini mengingat sarana yang telah ada saat ini sudah memerlukan rehabilitasi serta dalam mnghadapi musim penghujan dikarenakan kampung ini berada di alur sungai	Sedang diverifikasi	
164		Peningkatan Petaling - Paya Benua	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Petaling	BPD / Kades mengusulkan jalan sepanjang 15.000m sd 20.000 m dengan lebar 6 m untuk akses menuju Petaling ke pemukiman desa Paya benua guna untuk membentuk desa terpadu.	Sedang diverifikasi	
165	PENINGKATAN EKONOMI	BUMDES	DINAS PEMBERDAYAAN	Desa Jurung Bangka	Identifikasi masalah dan Potensi Desa	Sedang Diverifikasi	Penentuan jumlah dana desa yang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	MASYARAKAT		MASYARAKAT DAN DESA		Mengharapkan agar jumlah dana desa dapat meningkat yang dapat bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur desa maupun untuk menunjang kegiatan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat desa dapat berkembang dan bersaing.		diterima tiap-tiap desa merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan PerUUan.
166			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa Pugul Bangka	Identifikasi masalah dan potensi masyarakat desa Masyarakat meminta pemerintah untuk memberikan alternatif-alternatif lain yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa khusunya di desa pugul karena pertanian dan perkebunan dirasakan kurang efisien dan kurang membantu perekonomian masyarakat.	Sedang Diverifikasi	Berdasarkan data potensi desa yang ada di DPMD bahwa Desa Pugul mempunyai potensi diBidang Pertanian dan perkebunan. Untuk membantu mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan pembinaan dari Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi. Dari DPMD bisa penguatan untuk BUMDES dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunannya.
167			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Desa Sangku Bangka Barat	PADesa belum dilaksanakan sawit diluar HGU 59 hektar di desa sangku	Sedang Diverifikasi	Tidak ada kewenangan di DPMD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
			DAN DESA		PADesa belum dilaksanakan sawit diluar HGU 59 hektar di desa sangku		
168	Pengendalian Lingkungan Hidup	Polusi oleh Pabrik Tapioka Kenanga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Desa Kenanga	Meminta agar Pemerintah kembali mengawasi perihal perizinan dan perjanjian pabrik tepung tapioka di Kenanga, karena akhir-akhir ini kembali menimbulkan bau limbah.	Sedang diverifikasi	
169	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program TORA	DINAS KEHUTANAN	Desa Ketap Bangka Barat	TORA program Pemerintah kehutanan disarankan agar segera dilaksankan sehingga masyarakat bisa lebih leluasa berkebun.	Sedang diverifikasi	
170	Pengendalian Lingkungan Hidup	Kawasan Hutan Lindung di Desa Rebo	DINAS KEHUTANAN	Desa Rebo	Pelimpahan kawasan menjadi kawasan hutan lindung dianggap merugikan masyarakat. Masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas yang tujuannya mensejahterakan kehidupan ekonomi seperti dahulu. Dengan begitu, kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat diharapkan guna menstabilkan kembali ekonomi masyarakat.	Sedang diverifikasi	
171	Pengendalian Lingkungan Hidup	Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 400 hektar belum ada izin	DINAS KEHUTANAN	Dusun Selindang Desa Senyubok Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur	Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 400 hektar belum ada izin, Masyarakat minta segera di selesaikan.	Sedang diverifikasi	
172	Pengendalian	Pelestarian hutan bukit	DINAS	Bukit Mangkol	Agar dijaga dari perambahan	Sedang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	Lingkungan Hidup	mangkol	KEHUTANAN	bateng	kayu dan TI	diverifikasi	
173	Pengendalian Lingkungan Hidup	Menolak Hutan Tanaman Industri	DINAS KEHUTANAN	Bangka Barat	Masyarakat yang terdampak kawasan Hutan Tanaman Industri, menolak tegas keberadaan HTI di Bangka Barat	Sedang diverifikasi	
174	Pengendalian Lingkungan Hidup	Perizinan pembuatan jalan melalui hutan produksi	DINAS KEHUTANAN	Di Desa Jangkang Kec. Gantong Kab. Belitung Timur	Masalah pembangunan jalan tembusan menuju desa gantong terkendala oleh perizinan daerah hutan produksi.	Sedang diverifikasi	
175	Pengendalian Lingkungan Hidup	Perizinan Hutan Tanaman Industri yang meresahkan warga	DINAS KEHUTANAN	Bangka Barat	Perizinan Hutan Tanaman Industri yang meresahkan warga, agar diselesaikan. jika melanggar peraturan, jangan segan-segan untuk dicabut.	Sedang diverifikasi	
176	Pengendalian Lingkungan Hidup	izin pinjam pakai untuk pembangunan jalan sentra ekonomi di kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Air Bulin Kecamatan Kepala Kab. Bangka Barat.	DINAS KEHUTANAN	Desa Air Bulin	izin pinjam pakai untuk pembangunan jalan sentra ekonomi di kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Air Bulin Kecamatan Kepala Kab. Bangka Barat.	Sedang diverifikasi	
177	Pengendalian Lingkungan Hidup	Kejelasan status Kawasan Hutan Lindung di Dusun Kelekak Manau dengan Program Umaliar.	DINAS KEHUTANAN	Dusun Kelekak Manau	Mengharapkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat membantu kejelasan status Kawasan Hutan Lindung di Dusun Kelekak Manau dengan Program Umaliar.	Sedang diverifikasi	
178	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program TORA Lanjutan	DINAS KEHUTANAN	Desa Tanjung Ular	Mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat melaksanakan Program TORA di dusun tanjung ular dengan tepat sasaran.	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT						
179		Memfasilitasi Kemudahan dan Pengendalian Garam untuk Nelayan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tanjung Binga Belitung	Memfasilitasi Kemudahan dan Pengendalian Garam untuk Nelayan	Akomodir	Program Pengembangan Perdagangan
					1. Meminta dipenuhi dan dijaganya harga garam.	Akomodir	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha
					2. Menjaga kestabilan pasokan dan harga bahan bakar perahu/ kapal	Tidak di akomodir	Urusan Dinas Kehutanan
180		Peningkatan sarana dan Prasarana	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangka Barat	Peningkatan sarana dan Prasarana	-	-
					1. Membantu kejelasan status Kawasan Hutan Lindung di Dusun Kelekak Manau dengan Program Umaliar.	Tidak di akomodir	Urusan Dinas Kehutanan
					2. Masyarakat dusun kelekak manau mengharapkan bantuan sharing dari lapangan bola ± 100 meter s.d. kantor lurah.	Tidak di akomodir	Urusan Dinas Kehutanan
					3. Bantuan aspal jalan ke sungai dusun kelekak manau.	Tidak di akomodir	Urusan Dinas PU
					4. Bantuan alat dermaga laut untuk mata pencaharian masyarakat dusun kelekak manau.	Tidak di akomodir	Urusan Dinas Kelautan Perikanan
					5. Bantuan sumur bos di Dusun Kelekak Manau	Tidak di akomodir	Urusan Dinas PU/ESDM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
181		Pabrik Hilir Pengolahan Kelapa Sawit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Desa Bakam	Pabrik Hilir Pengolahan Kelapa Sawit	Akomodir	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri
					1. Masyarakat berharap adanya pembangunan pabrik pengelolaan minyak kelapa sawit.	Akomodir	Kegiatan Percepatan hilirisasi industri unggulan RPIP
182		PEmbinaan dan Pelatihan masyarakat Masyarakat terkait UKM kerajinan rotan dan hasil hutan lainnya, Karena jungpandan dan Manggar, sehingga Bentaian Jaya berpotensi men-support segala kebutuhan Parawisata di Manggar dan Tanjungpandan. Contoh bagaimana Sanen Craft di Desa Air Kelik.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belitung	Pembinaan dan Pelatihan masyarakat Masyarakat terkait UKM kerajinan rotan dan hasil hutan lainnya, Karena jungpandan dan Manggar, sehingga Bentaian Jaya berpotensi men-support segala kebutuhan Parawisata di Manggar dan Tanjungpandan. Contoh bagaimana Sanen Craft di Desa Air Kelik.	Akomodir	Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri
					1. Masyarakat meminta bantuan nyata untuk UKM kerajinan rotan dan hasil hutan lainnya. Hal ini karena Desa Bentaian Jaya adalah desa antara Tanjungpandan dan Manggar, sehingga Bentaian Jaya berpotensi men-support segala kebutuhan Parawisata di Manggar dan Tanjungpandan. Contoh bagaimana Sanen Craft di Desa Air Kelik	Akomodir	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					2. Masyarakat juga berharap Pemerintah mau mengembangkan Desa Bentaian Jaya sehingga Desa bisa lebih berdaya dalam menawarkan produk dan jasa bagi lalu lintas orang-orang dari tanju	Akomodir	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan
183		Penanganan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangka Tengah	Penanganan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi	Akomodir	Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
					1. Pupuk subsidi dan non subsidi yang sulit di dapatkan	Akomodir	
184		Pengawasan Peredaran gas Elpiji 3Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kota Pangkalpinag	Pengawasan Peredaran gas Elpiji 3Kg	Akomodir	Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
					1. masyarakat mengharapkan pada pemerintah agar lebih memperhatikan kembali akan kebutuhan Gas Elpiji, karena akhir-akhir ini Gas elpiji sangatlah susah untuk didapat. Padahal pada agent gas banyak disuplai. Yang dipertanyakan oleh masyarakat di bawa kemana gas-gas yang disuplai ke agen.	Akomodir	Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
185		Operasi Pasar Gas Elpiji	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bukit Intan Pangkalpinang	Operasi Pasar Gas Elpiji	Akomodir	Program Pengembangan Perdagangan
					1. Agar cepat dan tanggap	Akomodir	Kegiatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					lakukan operasi pasar jika terjadi kelangkaan elpiji, mengingat gas 3kg adalah untuk masyarakat kurang mampu		Pelaksanaan Pasar Murah
186		Pengawasan Barang Beredar Khususnya gas Elpiji 3kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kota Pangkalpinang	Pengawasan Barang Beredar Khususnya gas Elpiji 3kg	Akomodir	Program Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
					1. Masyarakat di Kelurahan Rejosari kelukan Ketidak stabilitasan jual gas Elpiji menyebabkan masyarakat menjadi bingung karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap harga yang dikeluarkan agen.	Akomodir	Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT						
187		Pendampingan untuk koperasi nelayan	Dinas Koperasi dan UKM	Pangkalalang	Pendampingan untuk koperasi nelayan		
					1. menghidupkan koperasi untuk mendata kembali para nelayan yang sudah atau belum memiliki kartu nelayan/ kartu kusuka.	Diterima	Pada Tahun 2019 akan dilaksanakan Pelatihan untuk Koperasi Nelayan di sekitar TPI dengan tujuan untuk Pengelolaan TPI
188		Pembinaan Masyarakat untuk Memulai UKM dan Industri berbasis bahan baku lokal	Dinas Koperasi dan UKM	Desa Pangkalalang Tanjung pandan	Pembinaan Masyarakat untuk Memulai UKM dan Industri berbasis bahan baku lokal		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					1. Pembinaan Masyarakat untuk Memulai UKM dan Industri berbasis bahan baku lokal	Diterima	Pendampingan dilakukan melalui Tenaga Konsultan PLUT dalam rangka Pembentukan Sentra Usaha
189		Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	PangkalBalam Pangkalpinang	Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM		
					1. Penyuluhan-penyuluhan mengenai lapangan untuk melakukan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM	Diterima	Telah direncanakan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2020
190		Bantuan Usaha Kecil dan Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	Sripemandang Sungailiat	Bantuan Usaha Kecil dan Mikro		
					1. Masyarakat sripemandang meminta bantuan pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap home industri atau usaha rumahan secara bergulir atau modal berupa pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang berfungsi	Diterima	Kami akan membantu dalam memfasilitasi Pendampingan untuk memperoleh akses permodalan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					untuk menopang ekonomi keluarga		
191		Sosialisasi Pengembangan UMKM dan Gallery UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Kota Pangkalpinang - Selidung	Sosialisasi Pengembangan UMKM dan Gallery UKM		
					1. Pemerintah agar melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Masyarakat juga Mengharapkan agar kelompok Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan bantuan serta di sediakan Gallery UMKM untuk ibu rumah tangga dan masyarakat.	Diterima	Untuk Penyuluhan dan Sosialisasi sudah direncanakan pada tahun 2020 namun untuk Gallery UMKM disarankan untuk dibuka di tempat Pelaku Usaha masing-masing.
192	PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah	BAKUDA	KABUPATEN BANGKA BARAT (Jadwal ke dusun bujang belum dapat dipastikan)	Sub Kegiatan Samsat SETEMPO, (Pelayanan pembayaran PKB untuk pengesahan 1 Tahun, Petugas Samsat mendatangi masyarakat di desa-desa dengan menggunakan kendaraan roda dua)	Sudah berjalan mulai 2019	Kegiatan sudah ada dalam DPA BAKUDA 2019
193	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Pembinaan petani di desa rhomadon dan sekitaranya di bangka tengah	Dinas Pertanian	Bangka Tengah		Sedang diverifikasi	Diterima : Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Petani

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
194	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penambahan Kuota Pupuk Subsidi	Dinas Pertanian	Desa Buding Kelapa Kampit	Masyarakat mengharapkan penambahan kuota pupuk subsidi.	Sedang diverifikasi	Diterima, dg catatan: Adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelp.)
195	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Pemecahan Permasalahan bidang Pertanian	Dinas Pertanian	Desa Kelumbi Manggar Beltim	1. Masyarakat mengharapkan penambahan kuota pupuk subsidi dan mengecek masalah pendistribusiannya agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan, serta adanya keluhan untuk distributor pupuk subsidi yang meminta DP terlebih dahulu untuk pengambilan pupuk. 2. Masyarakat mengharapkan kenaikan harga Lada dan Karet. 3. Masyarakat mengharapkan sosialisasi dari Dinas Pertanian mengenai wabah penyakit kuning Pohon Lada. 4. Masyarakat terkendala dalam pengolahan lahan bekas tambang dan masyarakat membutuhkan	Sedang diverifikasi	1. Diterima, Akan segera ditindak-lanjuti permasalahan tersebut. 2. Penentuan Harga Komoditas, bukan menjadi kewenangan Distan namun akan adanya sosialisasi peningkatan mutu agar komoditas mempunyai harga lebih dan perlunya kemitraan dg stakeholder 3. Diterima, akan diitindaklanjuti dg penyuluahn pertanian, kegiatan pelatihan kepada petani. 4. Diterima, akan ditindak lanjuti dengan bekerja sama dengan BPTP Provinsi.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
196	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Sarana prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	-	Hutan Tanaman Rakyat yang sudah ada izin tapi pengelolaannya yang belum maksimal serta kekurangan bantuan bibit tanaman seperti bibit karet dan sawit. Masyarakat mengharapkan penambahan kuota pupuk subsidi	Sedang diverifikasi	Diterima, dg catatan: Adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelp.)
197	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	sarana dan prasarana pertanian	Dinas Pertanian	Membalong Belitung	1. Penggarapan hutan kemasyarakatan yang terkendala Biaya, dan bantuan bibit, pupuk yang belum diterima oleh petani. 2. Bantuan alat Berat untuk pembukaan lahan baru.	Sedang diverifikasi	Diterima, dg catatan: Adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelp.) dan adanya Proposal pengajuan bibit an. Kelp tani. Perlunya permohonan bantuan peminjaman alat berat (ALSINTAN) agar dapat langsung ke Dinas setempat.
198	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyelesaian Masalah-Masalah Pertanian	Dinas Pertanian	Belitung Timur	5. Pembagian pupuk subsidi yang belum merata. 6. Penambahan bendungan air untuk pengairan sawah desa Pelulusan. 7. Permohonan pembangunan Balai pertemuan untuk kelompok tani Karya alam. 8. Permohonan pembangunan	Sedang diverifikasi	5. Pendistribusian pupuk disesuaikan dg permintaan petani khususnya yg mempunyai RDKK. 6. Kelp Tani mengiajukan proposal ke Distan setempat khususnya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					Gudang penyimpnan hasil panen. 9. Mengusulkan perternakan sapi di Kecamatan Dendang.		untuk Irigasi Tersier yang menjadi kewenangan, jika primer/sekunder menjadi kewenangan Dinas PU. 7. Ditolak, bukan menjadi kewenangan DISTAN 8. Dpt diajukan Proposal an. Kelp Tani ke Distan setempat untuk dijakukan ke Tk Prov. 9. Dpt diajukan Proposal an. Kelp Tani ke Distan setempat untuk dijakukan ke Tk Prov
199	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Sarana dan prasarana Pertanian di Belitung timur	Dinas Pertanian	Belitung TImur	5. Pembagian pupuk subsidi yang belum merata. 6. Penambahan bendungan air untuk pengairan sawah desa Pelulusan. 7. Permohonan pembangunan Balai pertemuan untuk kelompok tani Karya alam. 8. Permohonan pembangunan Gudang penyimpnan hasil	Sedang diverifikasi	- Sama dengan atas

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					panen. 9. Mengusulkan perternakan sapi di Kecamatan Dendang.		
200	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Pembinaan Bagi Petani di Desa/Kampung	Dinas Pertanian	Desa Bujang Bangka Barat	Masyarakat Dusun Bujang meminta bantuan bibit – bibit unggul pertanian untuk kelompok tani. Selain itu meminta agar PPL dan Dinas Pertanian terkait untuk aktif memberikan penyuluhan terkait informasi terbaru mengenai bibit dan cara penanaman yang profesional sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas ;	Sedang diverifikasi	Diterima: Kelp Tani mengusulkan dg Proposal ke Distan setempat, dg catatan Bibit yg diminta sdh menjadi agenda kegiatan DISTAN. Segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Distan setempat
201	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Perpanjangan HGU Sawit	Dinas Pertanian	Desa zed - Bangka	Masyarakat meminta pemerintah masalah kejelasan Hak Guna Usaha tentang perpanjangan pabrik sawit	Sedang diverifikasi	Pemberian ijin HGU disesuaikan dengan kewenangannya antara Provinsi dan Kab/Kota.
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Subsidi bibit karet dan pertanian yang merata		Bangka Tengah	Subsidi bibit yang lebih merata	Sedang diverifikasi	Menjadi Kewenangan Dinas Pertanian Setempat
202	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Program Perbaikan Harga Komoditi Pertanian	Dinas Pertanian	Bangka Barat dan Bangka Belitung	Masyarakat sudah sangat resah dengan rendahnya harga komoditi pertanian.	Sedang diverifikasi	Permasalahan harga bukan menjadi kewenangan Distan, namun perlunya peningkatan Mutu Hasil Pertanian, agar mempnyi daya saing yg lebih tinggi
203	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Harga Komoditas Pertanian	Dinas Pertanian	Bangka Barat	Peningkatan Harga Komoditas Pertanian yang semakin anjlok,	Sedang diverifikasi	Permasalahan harga bukan menjadi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
	AGROPOLITAN				mengingat ini adalah mata pencaharian masyrakat.		kewenangan Distan, namun perlunya peningkatan Mutu Hasil Pertanian, agar mempnyi daya saing yg lebih tinggi
204	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Sosialisasi dan penyuluhan teknik pertanian terkini	Dinas Pertanian	Desa Bakam	Masyarakat mengharap bantuan dinas terkait terkait tentang sosialisasi pengetahuan pertanian terkinian.	Sedang diverifikasi	Diterima, akan ditindak lanjuti berkoordinasi dg Dinas setempat melalui keg. Pemberdayaan petani /Penyuluhan pertanian
205	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Pengawasan terhadap kegiatan Pertanian Pemilik HGU	Dinas Pertanian	Dusun Bentaian Jaya, Manggar	Masyarakat Desa Bentaian Jaya meminta dengan sangat Pemerintah menata ulang keberadaan Perusahaan-perusahaan (PT-PT) Perkebunan Sawit yang barada di Desa Bentaian Jaya. Perusahaan-perusahaan tersebut terkesan semena-mena. Mulai dari perusakan lingkungan melalui penyedotan sumber air yang berlebihan, tenaga kerja perusahaan yang hampir semua orang dari Desa Bentaian jaya, hingga dua tahun sebelum HGU Hutan Habis mereka sudah berani membuat lubang-lubang untuk penanaman bibit kembali.	Sedang diverifikasi	Pemberian ijin HGU atau Perusahaan disesuaikan dengan kewenangannya antara Provinsi dan Kab/Kota.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
206	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Masyarakat desa sangku mengeluhkan rendahnya harga sawit, karet dan sahang yang merupakan mata pencaharian masyarakat desa sangku	Dinas Pertanian	Desa Sangku	Masyarakat desa sangku mengeluhkan rendahnya harga sawit, karet dan sahang yang merupakan mata pencaharian masyarakat desa sangku.		1. Harga Sawit, ditetapkan oleh Pemerintah bagi Petani Sawit yg bermitra/Plasma, shg perlunya dibentuk Korporasi Petani swadaya dan bermitra dg PKS shg dapat memegang DO; 2. Harga karet bukan menjadi kewenangan Distan, namun demikian perlunya petani karet membentuk korporasi dan bermitra dg Pabrik Karet dg catatan Zat Pembeku menggunakan Rekomendasi yg telah ditetapkan. 3. Harga Sahang/Lada bukan menjadi kewenangan Distan
207	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Perbaikan harga komoditi pertanian yang saat ini sangat merugikan petani	Dinas Pertanian	Bangka	Perbaikan harga komoditi pertanian yang saat ini sangat merugikan petani, khususnya lada putih, sawit dan karet		1. Harga Sahang/Lada bukan menjadi kewenangan Distan;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
							2. Harga Sawit, ditetapkan oleh Pemerintah bagi Petani Sawit yg bermitra/Plasma, shg perlunya dibentuk Korporasi Petani swadaya dan bermitra dg PKS shg dapat memegang DO; 3. Harga karet bukan menjadi kewenangan Distan, namun demikian perlunya petani karet membentuk korporasi dan bermitra dg Pabrik Karet dg catatan Zat Pembeku menggunakan Rekomendasi yg telah ditetapkan.
208	PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Simpang SMAN 3	Usulan: Traffic Light di Simpang SMAN 3	Sedang diverifikasi	
209		Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN	Pelabuhan Nyatoh Belitung	Permohonan bantuan lampu navigasi Pelabuhan Nyatoh.	Sedang diverifikasi	
210		Pembangunan Dermaga/Pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	-	Usulan: Pembangunan Dermaga Untuk Nelayan di Tanjung Binga.	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					Dibangunnya kembali Dermaga Nelayan di RT 29 yang sudah rusak sejak 5 tahun lalu. Dermaga ini sudah diperbaiki sendiri oleh masyarakat secara swadaya, namun karena tingkat kerusakannya sudah krusial, maka perbaikan tersebut tidak optimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat. Dalam 3 tahun berturut-turut sudah diusulkan di Musrembang Desa, namun selalu kandas di Musrembang Kecamatan. Mengingat Tanjung Binga adalah Kampung Nelayan, maka hampir semua aktivitas masyarakat bertumpu di Dermaga		
211		Pengadaan Bus Sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Rambat	Usulan: Bantuan Bis untuk anak sekolah Masyarakat Desa Rambat mengharapkan bantuan transportasi / mobil antar jemput anak Sekolah SD desa rambat.	Sedang diverifikasi	
212		Pengadaan Bus Sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Bakam dan Desa Cit	Usulan: Bantuan Bus Pendidikan Masyarakat berharapkan kepada Pemerintah Provinsi mau pun Pemerintah Kabupaten untuk dapat membantu alat transportasi	Sedang diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
					bus sekolah		
213		-	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Air Bulin	Status izin pinjam pakai untuk pembangunan jalan sentra ekonomi di kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Air Bulin Kecamatan Kepala Kab. Bangka Barat	Ditolak	Bukan merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam TUPOKSI Dinas Perhubungan

Tabel II.158

Konsistensi hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2018 dengan Permasalaahan dan Isu Strategis

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB										
	TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1	PENDIDIKAN										
		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	15.919.209.000,00	58,97	15.248.589.828,00		√	a. Masih tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat	a. Tingkat pendidikan SDM masih rendah	Dinas Pendidikan
		APK SMA	35,29		36,18		√				Dinas Pendidikan
		Persentase SMA terakreditasil A	33,33		31,88			√			Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SMA	6,3		5,1			√			Dinas Pendidikan
		APK SLB	22,95	9.359.178.000,00	52,68	7.846.773.703,00	√		b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	b. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Dinas Pendidikan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase SLB terakreditasi A	100%		62,50%			√			Dinas Pendidikan
		APK SMK	34,98		32,03			√			Dinas Pendidikan
		Persentase SMK terakreditasi A	33,93%						c. Masih belum optimalnya sistem dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para pendidik sehingga tingkat kualitas dari peserta didik masih rendah		Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SMK	6,4		4,7			√			Dinas Pendidikan
		Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	95%	3.587.971.904,00	92,83%	3.348.899.834,00		√			Dinas Pendidikan
		Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	36,00%	-	34,54%			√			Dinas Pendidikan
		Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	85,00%	-	81,89%			√			Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**										
		Persentase kepesertaaan JKN	78,00%	18.669.348.588,00	78,52%	16.662.075.472,00	√		a. Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi	a. Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas	Dinas Kesehatan
		Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	69,55%	6.233.035.570,00		4.871.707.419,00				b. Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas	Dinas Kesehatan
		Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	74,95%	3.944.108.600,00		3.152.191.325,16					Dinas Kesehatan
		LOS (Length of Stay)	6-9 hari	3.311.070.600,00		1.974.089.816,00					RSUP
		Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	90	766.203.283,00		692.664.452,00					RSJ
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
		Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	93,51%								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,07%								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0,00%	15.468.247.000,00		14.499.789.281,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	10,00%								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	39,32%								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pertumbuhan volume air baku	0,00%								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
		Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	12%	2.406.632.870,00		2.332.864.400,00					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	4%								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	0%								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	0%								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,49	15.725.733.700,25		15.721.594.637,00					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		Cakupan penegakan perda	100%	194.128.600,00	100%	154.888.700,00	√		a. Masih lemahnya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan social		SATPOL PP
		Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	1,51%	88.091.500,00	1,51%	85.907.220,00	√				SATPOL PP
		Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	1.888.084.150,00	100%	1.745.123.800,00	√		b. Masih tingginya tingkat kriminalitas sehingga mengganggu peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas		SATPOL PP
6	Kesbangpol										
		Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	200	177.751.960,00		174.255.910,00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	25								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	17	336.701.040,00		316.049.170,00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	1.157.874.740,00		1.063.837.150,00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	3								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Sosial										
		Persentase korban nazpza	14,89	348.445.000,00		321.244.838,00					Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	23,94								Dinas Sosial
		Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	16,67								Dinas Sosial
		Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	2,47%		4,34%		√		a. Masih belum optimalnya Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas		Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	100%	321.557.500,00	100%	184.720.600,00	√		b. Masih lemahnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik		Dinas Sosial
		Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	0,73		0,73						Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Penanggulangan Bencana**										
		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	72	816.541.930,00		707.181.663,00					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	2.838.890.000,00		2.395.024.990,00					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	262.925.000,00		158.022.050,00					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
9	**Ketenagakerjaan**										
		Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	100%								Dinas Tenaga Kerja
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	14,29%								Dinas Tenaga Kerja
		persentase penurunan kecelakaan kerja	34%								Dinas Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	27,30%	58.329.400,00		43.997.400,00					Dinas Tenaga Kerja
10	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
		Persentase perempuan yang bekerja	8,08	462.910.500,00		431.231.470,00					Dinas PPA, Capil dan KB
		Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	10,69		5,31			√	a. Masih belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran		Dinas PPA, Capil dan KB

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									perempuan dalam pembangunan		
		Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85		14,29			√	b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan		Dinas PPA, Capil dan KB
11	**Pangan**										
		Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	79	1.055.153.500,00		935.702.747,00					Dinas Pangan
		persentase pangan yang aman dikonsumsi	80		81		√		a. Masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya		Dinas Pangan
		Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	79,8	1.357.747.000,00		1.321.851.450,00					Dinas Pangan
		Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1		0,9			√	b. Masih adanya daerah rawan pangan		Dinas Pangan
		Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	592.752.455,00		566.757.750,00					Dinas Pangan
		Persentase Cadangan Pangan	3								Dinas Pangan
12	**Lingkungan Hidup**										
		Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	0,05%	1.323.820.000,00	39,36%	1.263.273.529,00	√				Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%		0%			√	a. Pengelolaan SDA seperti sumber daya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan	a. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase BOD, COD dan	2%	534.465.000,00		480.023.302,00					Dinas

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TSS									Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%								Dinas Lingkungan Hidup
		Luas lahan kritis yang terehabilitasi dan terevegetasi di luar kawasan hutan	0%								Dinas Lingkungan Hidup
		persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	10%		10%		√		b. Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam		Dinas Lingkungan Hidup
13	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
		Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	90	1.818.862.562,00	99,68	1.648.832.016,00	√		a. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		Dinas PPA, Capil dan KB
		Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100		100		√		b. Dalam jangka panjang terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (aging population)		Dinas PPA, Capil dan KB
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	9,37		18,75		√		c. Masalah struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun		Dinas PPA, Capil dan KB
		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk	82,50%		86,66%		√				Dinas PPA, Capil dan KB

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mendapat hak identitas									
14	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
		Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	12,94%	2.257.005.000,00	12,94%	2.108.388.299,00	√		a. Belum maksimlanya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Posyandu aktif	9,33		9,33		√				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	20%	850.121.157,00		832.348.550,00			b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	0,86%	829.902.600,00	0,86%	814.307.620,00	√		c. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa di dalam menjalakan pembangunan desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	**Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**										
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,69	1.230.249.350,00	40,5	1.142.588.330,00	√		a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu lakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana		Dinas PPA, Capil dan KB

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase unmeet need	7,65		10,15		√				Dinas PPA, Capil dan KB
		presentase KB MKJP	8,3								Dinas PPA, Capil dan KB
16	**Perhubungan**										
		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	50,00%	7.295.258.300,00		4.453.994.522,00					Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	2,00%								Dinas Perhubungan
		Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	12,00%	1.095.967.200,00		1.010.430.204,00					Dinas Perhubungan
		Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	10,00%								Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	-								Dinas Perhubungan
		Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolahan perhubungan udara	-	2.496.213.700,00		2.297.512.322,23					Dinas Perhubungan
		Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20,00%								Dinas Perhubungan
17	**Komunikasi dan Informatika**										
		Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yamg dapat diakses masyarakat	0,15	3.029.205.000,00		2.862.346.336,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan	0,51	3.296.250.000,00		3.103.130.045,00					Dinas Komunikasi dan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Internet									Informatika
		Persentase masyarakat yang memanfaaatkan layanan interaktif	0,2	340.799.622,00		325.001.500,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
18	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
		Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	0,05	669.868.970,00		614.307.840,00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	0,613	3.761.482.045,00		3.680.045.900,00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase wirausaha	0,15								Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	10%	632.406.900,00		605.011.630,00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	1.38%	2.947.276.745,00		2.907.202.350,00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan produk parekraf (%)	10	77.200.000,00	10	71.830.100,00	√		a. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	**Penanaman Modal**										
		Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	3	264.546.000,00	7	247.038.221,00	√		a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan	- Tingkat investasi masih rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,43	0	56		√		b. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Terpadu Satu Pintu
		Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,43		0			√			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0,43		70		√				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,43		62,5		√				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	78	599.807.818,00	10	514.517.984,00		√			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	**Kepemudaan dan Olahraga**										
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	2	3.256.275.750,00	14	2.912.277.664,00	√		a. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Persentase pemuda yang bekerja	0,102						b. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Persentase Pemuda Berprestasi	0,2287								Dinas Kepemudaan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik		Dan Olahraga
21	Kebudayaan										
		Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	0,56%	4.627.640.199,00	0,56%	3.439.792.148,00	√		a. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
22	Perpustakaan										
		Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	1500	580.317.900,00	0	472.547.874,00		√			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	360.585.140,00	4,5	234.761.740,00		√	a. Rendahnya minat baca masyarakat	− Tingkat pendidikan SDM masih rendah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23	Kearsipan										
		Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	290	290.887.400,00	320	248.859.200,00	√		a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelola arsip		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PILIHAN										
24	Kelautan dan Perikanan										
		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	815.077	3.774.814.000,00	815.077	1.023.608.634,00	√				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	211300	5.323.540.000,00	220.249	3.816.775.846,00		√	a. Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11.620	2.506.175.000,00	9.327	2.277.617.150,00	√		b. Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	− Kemandirian pangan rendah	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	53		55,47		√		c. Tidak tersedianya SDM di provinsi yang mengurusi bidang pengawasan dan pembinaan kelautan dan perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Volume Produksi Olahan (ton)	20.610		24.246		√				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	65,00%	1.061.719.000,00	70%	636.447.500,00	√				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	8,75	1.075.458.400,00	0	973.685.031,00		√			UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
25	**Pariwisata**										
		Persentase tingkat kunjungan wisatawan	5	3.579.524.000,00		3.109.085.303,00					Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			392.292 Wisnus (9%)		2.040.338 wisnus -420,11%		√		a. Akses menuju Destinasi Bangka Belitung dan Daya Tarik Wisata di Bangka Belitung belum maksimal untuk menunjang kebutuhan wisata		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			7.758 Wisman (8%)		31.685 wisman -308,41%		√				Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Presentase objek wisata yang terkelola	0,04	1.488.330.000,00		1.107.039.842,00			b. Belum banyak tersedia amenitas (fasilitas akomodasi dan konsumsi) untuk wisatawan dan distribusi belum merata		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	2,77	1.709.261.000,00	2,77	1.304.489.098,00	√		e. Pemberdayaan masyarakat dan sadar wisata (Sapta Pesona: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk,		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Indah, Kenangan)		
		Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	1,52		1,52		√				Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
26	**Pertanian**										
		Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	13.090	3.649.402.000,00	13.276	3.346.114.866,00	√		a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal	− Kemandirian pangan rendah	Dinas Pertanian
		Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12.075.000		10.340.943			√	b. Masih rendahnya rasio ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana Pertanian		Dinas Pertanian
		Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	1		1		√				Dinas Pertanian
		NTP subsektor Tanaman Pangan	94,08		92,08		√				Dinas Pertanian
		Peningkatan produksi lada	41.111	3.738.441.500,00	35.642	3.613.271.425,00		√			Dinas Pertanian
27	**Kehutanan**										
		Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	20	1.768.852.150,00	20	1.462.545.640,00	√				Dinas Kehutanan
		Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	20		0,25			√	a. Belum optimlanya pengelolan hasil hutan dan kawasan hutan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat		Dinas Kehutanan
		Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	50	1.867.122.000,00	50	1.585.192.333,00	√		b. Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah		Dinas Kehutanan
		Jumlah Kawasan Hutan yang	0								Dinas Kehutanan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dikelola									
		Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20	3.341.750.313,00	204,02	1.530.886.554,00	√				Dinas Kehutanan
		Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20		0			√			Dinas Kehutanan
		Persentase DAS kritis yang di kelola	9,11	2.842.355.000,00	9,25	1.388.597.287,00	√				Dinas Kehutanan
		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	32,93		89,8		√				Dinas Kehutanan
28	**Energi dan Sumber Daya Mineral**										
		Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	50	346.381.000,00	16,02	342.826.966,00		√			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	0,15								Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Nilai jaminan reklamasi	10 Milyar		10 Milyar		√		a. Masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan	− Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase penggunaan EBT	6,82	6.361.100.000	6,93	5.449.801.159,40	√		b. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	16,28	1.121.750.000	1,37	1.043.867.495,00		√			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1.500.000.000		789.000.000			√	c. Belum Optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29	**Perdagangan**										
		Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	860.000	2.282.875.500,00	849.653	2.047.403.519,00		√	a. Masih kurangnya jiwa enterprenaur aparatur pemerintah didalam memfasilitasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Evaluasi (2018)		Interpretasi		Permasalahan	Isu Strategis	PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	Tercapai	Tidak Tercapai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat		
		Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	0		0				b. Masih lemahnya sistem tata kelola perdagangan dalam daerah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilakan didaerah		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	0		0						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	0		0						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	**Perindustrian**										
		Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	2								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	0,051								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	2,96								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	**Transmigrasi**										
		Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	15	97.920.000,00		87.836.400,00					Dinas Tenaga Kerja

2.5. Capaian Inovasi Daerah



BAB III

➢ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam Temu Konsultasi Triwulanan I di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2019 disampaikan antara lain arah kebijakan ekonomi makro Tahun 2020 adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia.
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi.
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari, yang merupakan misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Kebijakan peningkatan ekonomi daerah diarahkan pada:

1. penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
2. peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan kehutanan;
3. pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;
4. pembinaan hubungan industri sektor pertanian;
5. peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor pertanian;
6. pengembangan produk pertaniaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah;
7. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian;
8. pengembangan kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri Batu Betumpang;
9. pengembangan kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung;
10. pengembangan kawasan budidaya pertanian dan peternakan;
11. pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
12. pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanaan;
13. peningkatan Produksi, Kualitas dan produktivitas tenaga kerja sektor kelautan dan perikanaan;
14. pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan;

15. peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan;
16. pengembangan produk kelautan dan perikanaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan;
17. pengembangan kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok;
18. pengembangan kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik;
19. pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga;
20. pengembangan kawasan pedesaan minapolitan Manggar;
21. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
22. peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
23. pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah;
24. peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan
25. peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan;
26. peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan;
27. pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata;
28. pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian;
29. pengembangan kawasan strategis pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang;
30. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka;
31. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang;
32. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kawasan kota tua Mentok;
33. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kawasan Gunung Permisan Simpang Rimba;
34. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung;
35. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Gunung Menumbing;
36. pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera;
37. pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil;
38. peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
39. pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing produk sumber daya mineral;
40. pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral;
41. pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral;
42. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular;
43. pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK);
44. pengembangan pelabuhan dan kawasan strategis ekonomi khusus Tanjung Berikat;

45. pengembangan kawasan strategis industri Sadai;
46. pengembangan kawasan strategis industri terpadu di Teluk Klabat Belinyu;
47. peningkatan pembangunan kawasan industri;
48. pemenuhan energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
49. pemenuhan energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
50. penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja;
51. peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan;
52. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
53. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
54. mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi;
55. pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi pertama RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk tahun 2019 dan 2020.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2016-2018 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2016 sebesar Rp47.848.372 juta, meningkat menjadi sebesar Rp49.986.847 juta pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp52.212.088.

Tabel III.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*)	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.123.187	9.089.992	9.588.864	10.056.988	10.515.165
B	Pertambangan dan Penggalian	6.490.563	6.634.752	6.562.956	6.857.285	7.148.717
C	Industri Pengolahan	10.680.473	11.345.075	11.803.244	12.335.482	12.896.172
D	Pengadaan Listrik dan Gas	43.742	45.864	49.274	49.604	51.266
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	8.567	9.406	8.879	9.922	10.253
F	Konstruksi	4.021.606	4.248.461	4.493.147	4.698.712	4.915.811
G	Perdagangan Besar dan EceranMotor	6.727.660	7.253.257	7.445.122	7.778.494	8.134.158
H	Transportasi dan Pergudangan	1.752.264	1.892.222	2.021.344	2.114.965	2.215.817
I	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	1.086.468	1.136.527	1.207.181	1.264.619	1.321.516
J	Informasi dan Komunikasi	926.926	1.002.849	1.110.309	1.166.502	1.218.984
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	859.981	881.273	936.324	981.170	1.013.922
L	Real Estate	1.494.629	1.572.154	1.702.532	1.782.458	1.868.350
M, N	Jasa Perusahaan	120.419	127.462	135.984	147.175	153.797
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.478.742	2.604.173	2.843.213	2.878.097	3.013.284
P	Jasa Pendidikan	1.139.292	1.183.252	1.289.760	1.324.579	1.389.870
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559.444	605.202	632.789	659.564	677.846
R,S.T.U	Jasa Lainnya	334.409	354.926	381.166	403.370	415.822
	PDRB	**47.848.372**	**49.986.847**	**52.212.088**	**54.508.985**	**56.960.750**

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019 -2020 Proyeksi Bappeda*

Dilihat dari perkembangan sektoral, kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, hampir seluruh sektor PDRB mengalami peningkatan. Sektor informasi dan komunikasi yang merupakan sektor dengan kontibusi terbesar terhadap PDRB, dari Rp1.002.849 juta pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp1.110.309 juta pada tahun 2018 diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dari Rp2.604.173 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp2.843.213 juta pada tahun 2018.

Tahun 2018 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp11.803.244 juta, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp9.588.864 juta, sektor perdagangan besar dan eceran Rp7.445.122 juta, dan sektor pertambangan Rp6.562.956 juta. Kontribusi keempat sektor tersebut sebesar Rp35.400.186 juta atau sebesar 67,8%. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp16.811.902 juta atau sebesar 32,2%.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan ecceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2019 dan 2020 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp54.508.985 juta dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp56.960.750 juta.

Tren peningkatan PDRB sepanjang tahun 2019 dan 2020, diperkirakan masih dipengaruhi oleh tren peningkatan pada sektor-sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2016-2018 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2016 sebesar Rp25.027.249 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp26.300.217 juta pada tahun 2017 dan sebesar Rp27.794.140 juta pada tahun 2018.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2016 nilai ekspor mencapai sebesar Rp19.416.749 juta menurun menjadi sebesar Rp25.592.322 juta pada tahun 2017, namun menurun menjadi sebesar Rp25.021.253 juta pada tahun 2018.

Tabel III.2

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

	Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.027.249	26.300.217	27.794.140	29.402.381	30.730.837
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	302.278	319.466	345.741	365.216	392.460
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.868.523	5.030.469	5.119.335	5.347.394	5.684.683
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.450.945	11.111.056	11.779.865	12.526.294	13.095.276
5	Perubahan Inventori	509.575	341.149	389.331	414.272	439.281
6	Ekspor Luar Negeri	19.416.749	25.592.322	25.021.253	25.385.049	26.827.887

	Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Impor Luar Negeri	2.091.352	1.414.959	2.007.892	2.655.109	3.127.145
8	Net Ekspor Antar Daerah	(10.635.595)	(17.292.873)	(16.229.685)	(16.276.512)	(17.082.529)
	PDRB	**47.848.372**	**49.986.847**	**52.212.088**	**54.508.985**	**56.960.750**

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019-2020 Proyeksi Bappeda*

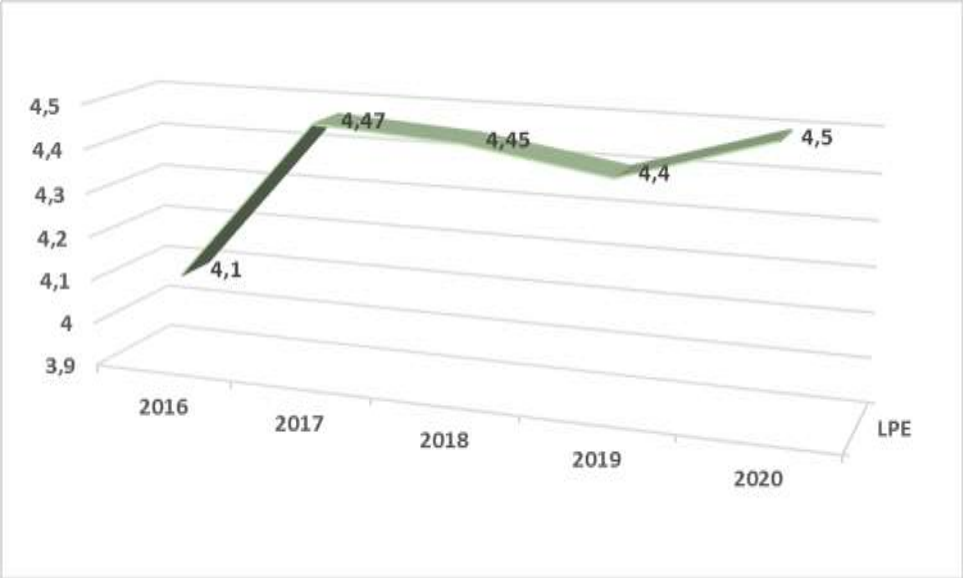
Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2016-2018, yaitu masing-masing sebesar Rp10.450.945 juta pada tahun 2016, sebesar Rp11.111.056 juta pada tahun 2017 dan sebesar Rp11.779.865 juta pada tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp4.868.523 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp5.030.469 juta pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp5.119.335 juta pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan memengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2016-2018 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar III.1 berfluktuasi, di mana pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,47 persen meningkat dari tahun 2016 sebesar 4,1 persen dan melambat menjadi sebesar 4,45 persen pada tahun 2018.

Grafik III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019-2020 Proyeksi Bappeda*

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,72 persen; diikuti lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan yang masing-masing tumbuh sebesar 9,18 persen dan 9,00 persen.

Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri pengolahan (20,64 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (18,01 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (15,70 persen), pertambangan dan penggalian (10,59 persen) serta konstruksi (9,73 persen). Dari Tabel III.3 terlihat bahwa lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif (terkontraksi). Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2018 juga dipengaruhi oleh industri pengolahan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya surat edaran ICDX (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*) pada bulan Oktober 2018 yang menolak surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia. Sementara sebagian besar perusahaan smelter timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jasa Surveyor Indonesia. Dengan ditolaknya surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia, sebagian besar perusahaan smelter timah berhenti berproduksi pada akhir tahun 2018.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,27	-0,36	5,49	4,88	4,56
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,51	2,19	(1,08)	4,48	4,25
C.	Industri Pengolahan	2,77	6,31	4,04	4,51	4,55
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,44	4,85	7,44	0,67	3,35
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,52	9,79	(5,60)	11,74	3,34
F.	Konstruksi	6,95	5,73	5,76	4,58	4,62
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	5,08	7,91	2,65	4,48	4,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,41	7,99	6,82	4,63	4,77
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	4,99	4,61	6,22	4,76	4,50
J.	Informasi dan Komunikasi	9,18	8,19	10,72	5,06	4,50
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,44	2,48	6,25	4,79	3,34
L.	Real Estate	3,67	5,20	8,29	4,69	4,82
M, N.	Jasa Perusahaan	0,06	5,85	6,69	8,23	4,50
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.06	5,06	9,18	1,23	4,70
P.	Jasa Pendidikan	7,59	3,86	9,00	2,70	4,93
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,82	8,19	4,56	4,23	2,77
R,S.T.U	Jasa Lainnya	9,79	6,14	7,39	5,83	3,09
	PDRB	**4,11**	**4,51**	**4,45**	**4,40**	**4,50**

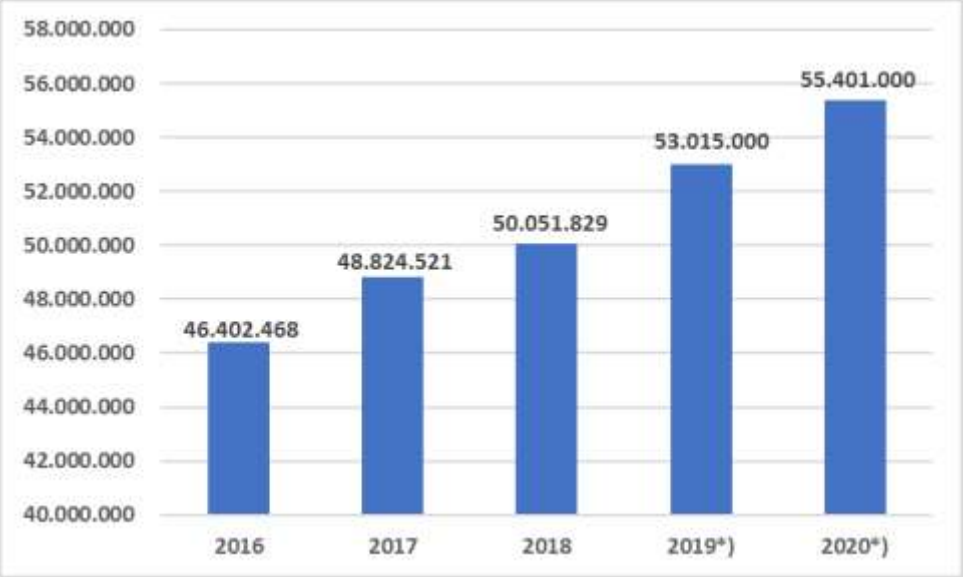
Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019-2020 Proyeksi Bappeda*

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Dalam kurun waktu 2016-2018, sebagaimna diperlihatkan pada Gambar III.2 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB perkapita sebesar Rp46.402.468,- meningkat menjadi sebesar Rp48.824.521,- pada tahun 2017 dan menjadi sebesar Rp50.051.829,- pada tahun 2018. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada tahun 2019-2020 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp53.015.000,- dan sebesar Rp55.401.000,-.

Grafik III.2
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020
(dalam rupiah)



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019 - 2020 Proyeksi Bappeda*

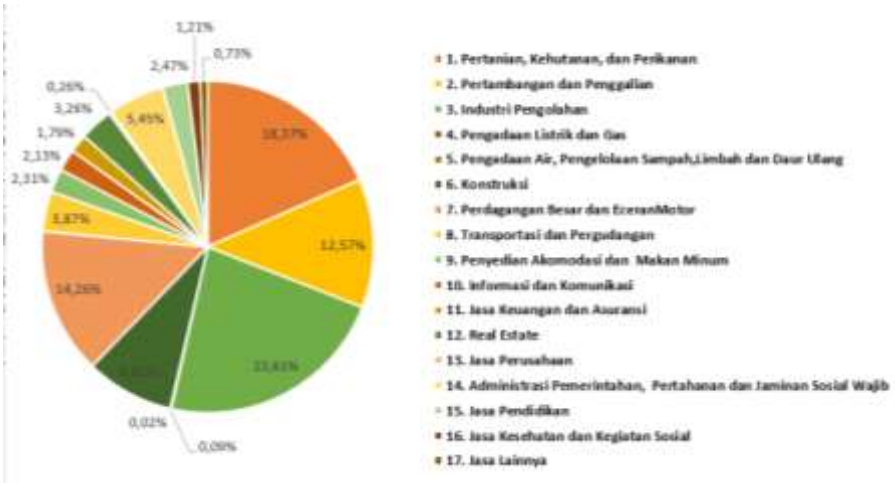
3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada Gambar III.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 22,61 persen, namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai sebesar 22,70 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 18,37 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,26 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,57 persen.

Apabila dicermati secara mendalam memperlihatkan bahwa struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami pergeseran struktur dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), bergeser menjadi didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa) dengan kontribus terhadap PDRB mencapai sebesar 45,56 persen. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor industri pengolahan) meskipun secara relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun cenderung mengalami peran yang menurun.

Grafik III.3
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2019 dan 2020, diperkirakan struktur perekonomian daerah masih tetap sama seperti yang terjadi pada tahun 2018. Namun sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran relatif dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sekitar 22,64 persen dan 18,46 persen.

Tabel III.4
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,07	18,18	18,37	18,45	18,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	13,56	13,27	12,57	12,58	12,55
C.	Industri Pengolahan	22,32	22,70	22,61	22,63	22,64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,40	8,50	8,61	8,62	8,63
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	14,06	14,51	14,26	14,27	14,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,66	3,79	3,87	3,88	3,89
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,27	2,31	2,32	2,32
J.	Informasi dan Komunikasi	1,94	2,01	2,13	2,14	2,14
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	1,76	1,79	1,80	1,78
L.	Real Estate	3,12	3,15	3,26	3,27	3,28
M, N.	Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,21	5,45	5,28	5,29

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P.	Jasa Pendidikan	2,38	1,21	1,21	1,21	1,19
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	0,71	0,73	0,74	0,73
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,70	18,18	18,37	18,45	18,46
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019-2020 Proyeksi Bappeda*

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2016-2018 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 50 persen, diikuti oleh komponen ekspor dan investasi yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan di atas 20 persen terhadap PDRB. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan kontribusi terhadap PDRB di 9-10 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2018 dan 2019 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor dan investasi serta konsumsi pemerintah. Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2016 – 2020 diperlihatkan pada Tabel III.5 di bawah ini.

Tabel III.5
Ditribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2016–2020 (dalam persen)

	Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,31	52,61	53,23	53,94	53,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,63	0,64	0,66	0,67	0,69
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,17	10,06	9,80	9,81	9,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,84	22,23	22,56	22,98	22,99
5	Perubahan Inventori	1,06	0,68	0,75	0,76	0,77
6	Ekspor Luar Negeri	40,58	51,20	47,92	46,57	47,10
7	Impor Luar Negeri	4,37	2,83	3,85	4,87	5,49
8	Net Ekspor Antar Daerah	(22,23)	(34,59)	(31,08)	(29,86)	(29,99)
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019 dan 2020 Proyeksi Bappeda*

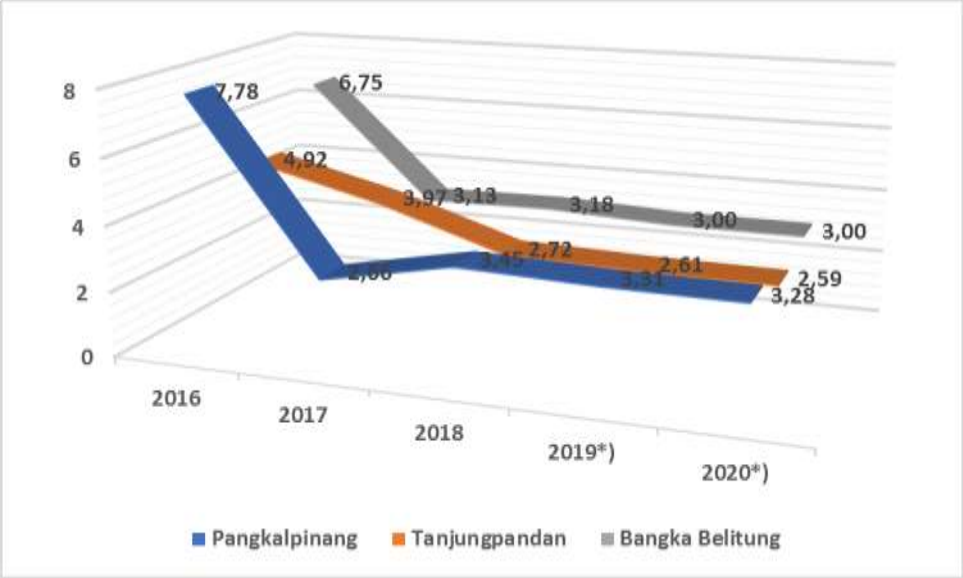
3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2018, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 3,45 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 2,72 persen *year on year*. Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar 3,18

persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi. Dengan memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan tahun 2018, inflasi tahun 2019 dan tahun 2020 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditekan hingga mencapai kisaran 3 ± 1 persen.

Grafik III.4

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Bangka Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : 2016-2018 BPS Bangka Belitung,
**)2019-2020 Proyeksi Bappeda*

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2018 di Kota Pangkalpinang sebesar 3,45 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2016) sebesar 3,45 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2017 mengalami inflasi sebesar 2,66 persen dan pada Desember 2016 mengalami inflasi sebesar 7,78 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2017 terhadap Desember 2016 dan Desember 2016 terhadap Desember 2015 masing-masing sebesar 2,66 persen dan 7,78 persen.

Tabel III.6

Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2014-2018

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	6,81	4,66	7,78	2,66	3,45
1. Bahan Makanan	3.39	6.63	3,49	0,52	5,74
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	8.63	7.92	0,91	0,16	3,62
3. Perumahan	8.85	3.74	0,90	1,26	2,11

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Sandang	6.61	2.60	0,33	0,08	1,87
5. Kesehatan	8.13	5.50	0,18	0,08	1,89
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	6.56	8,62	0,27	0,21	3,26
7. Transportasi dan Komunikasi	6.98	-2.04	1,70	0,35	2,26

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2019

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2018 di Kota Tanjungpandan sebesar 2,72 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 2,72 persen. Sedangkan periode yang sama tahun kalender 2017 mengalami inflasi sebesar 3,97 persen dan tahun kalender 2016 mengalami inflasi sebesar 4,92 persen. Sementara itu, untuk tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2017 terhadap Desember 2016 dan Desember 2016 terhadap Desember 2015 masing-masing sebesar 3,97 persen dan 4,92 persen.

Tabel III.7

Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2015-2018

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	0.88	4,92	3,97	2,72
1. Bahan Makanan	-4.52	2,26	0,37	-1,35
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau	4.63	2,01	1,36	3,43
3. Perumahan	2.91	0,17	1,42	3,53
4. Sandang	1.26	0,15	0,16	4,62
5. Kesehatan	3.87	0,10	0,27	4,58
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8.07	0,18	0,19	5,87
7. Transportasi dan Komunikasi	0.42	0,05	0,20	6,73

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2019

3.1.1.7 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah sebesar Rp620,12 juta dan investasi PMDN sebesar Rp3.112,92 juta. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Investasi		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	Jumlah Proyek	47	76	93	141	105
	Nilai (Rp juta)	1.123,90	1.033,29	726,66	2.046,28	620,12
PMDN	Jumlah Proyek	8	28	63	94	161
	Nilai (Rp juta)	615,41	1.023,74	2.201,96	1.734,73	3.112,92
Total Investasi		**1.739,31**	**2.057,03**	**2.928,62**	**3.781,01**	**3.733,04**

Sumber : Dinas PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah: peningkatan kapasitas kelembagaan; menjaga stabilitas sosial dan politik; menjaga stabilitas perekonomian daerah; pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik; selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.8 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Pada tahun 2018 ekspor timah mengalami penurunan, di mana pada tahun 2017 nilai ekspor timah sebesar US$ 1.390,9 juta dan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar US$ 1.361,2 juta. Sebaliknya, ekspor barang-barang non timah mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar US$ 393,2 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar US$ 415,4 juta pada tahun 2018. Secara umum total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menurun dari tahun 2017 yaitu dari US$1.784,1 menjadi US$1.776,5.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 s.d. 2018 dan proyeksi ekspor pada tahun 2019 dan 2020, sebagaimana tersaji pada Gambar III.5 berikut ini.

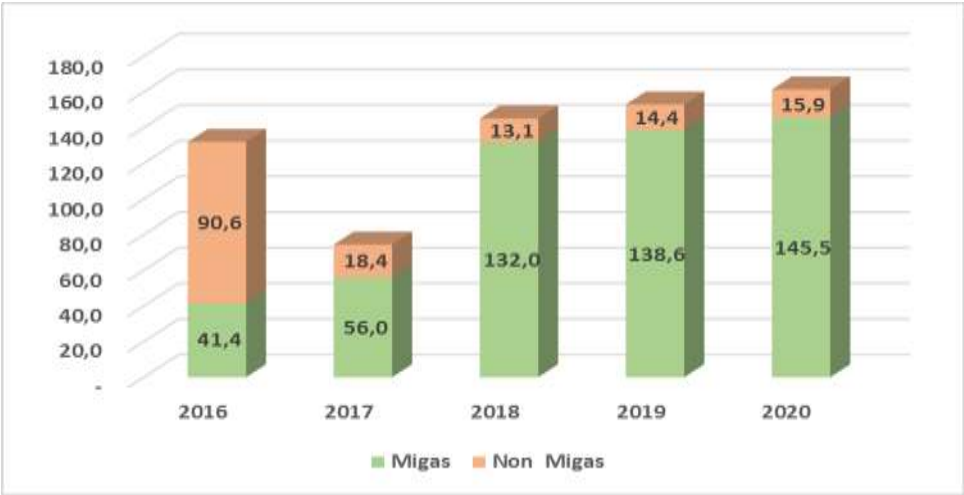
Grafik III. 5
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020 (dalam juta US$)



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019 dan 2020 Proyeksi Bappeda*

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang tahun 2016-2018 cenderung meningkat untuk komoditas migas, yaitu dari sebesar US$41,4 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar US$132 juta pada tahun 2018. Sedangkan impor untuk komoditas non migas mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari sebesar US$90,6 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar US$13,1 juta pada tahun 2018. Secara rinci perkembangan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2018 dan proyeksi tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Gambar III.6 di bawah ini.

Grafik III. 6
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020 (dalam juta US$)



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,
**)2019 dan 2020 Proyeksi Bappeda*

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 3,65 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dari kondisi tahun 2017 yang semula berada di angka 3,78. Meskipun pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 28.901 orang dari kondisi tahun 2017 yang berada di angka 699.017 orang namun diiringi dengan meningkatnya angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. Tingkat partisipasi angka kerja pada tahun 2018 menjadi 67,79 persen dari tingkat partisipasi angka kerja tahun 2017 sebesar 66,72 persen. Angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha diarahkan untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja diharapkan akan berdampak pada penyerapan angkatan kerja. Demikian juga pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, kelautan serta membaiknya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap peningkatan angkatan kerja. Memperhatikan tren tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 dan 2018, maka tahun 2019 dan 2020 diproyeksikan TPT sebesar 3,54 persen dan 3,50 persen.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2020 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2016	2017	2018	2019*	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60	3,78	3,65	3,54	3,50

Sumber : 2016 – 2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung
**) 2019 dan 2020 Proyeksi Bappeda*

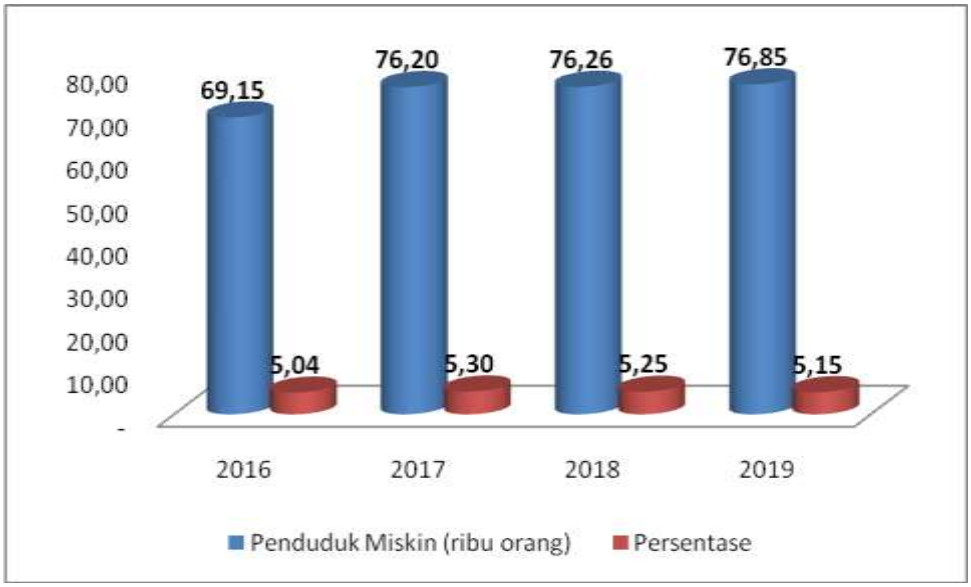
Pada tahun 2018 secara umum mulai terjadi pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah pertanian sebesar 30,99 persen, kedua adalah perdagangan sebesar 18,81 persen, dan yang ketiga adalah pertambangan dan penggalian sebesar 13,59 persen.

3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2016-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 69,15 ribu orang atau sebanyak 5,04 persen dari total jumlah penduduk, naik menjadi 76,20 ribu orang atau 5,30 persen pada tahun 2017 dan diproyesi menurun pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi sebanyak 76,26 ribu orang atau sebanyak 5,25 persen dan 76,85 ribu orang atau sebesar 5,15 persen.

Grafik III.7
Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019
(dalam persen)



Sumber : 2014-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung
**) 2018 – 2019 Proyeksi Bappeda*

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan *Williamson*, dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan *Williamson* adalah:

Besarnya IW adalah 0 < IW < 1
Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,
Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,
IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,
IW mendekati 1 , berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks *Williamson* menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2012 angka indeks sebesar 0,284 meningkat menjadi sebesar 0,304 pada tahun 2013, kemudian cenderung turun menjadi sebesar 0,294 pada tahun 2014 dan sebesar 0,291 pada tahun 2015. Berdasarkan angka indeks tersebut, mengindikasikan bahwa angka indeks ketimpangan *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, hal ini berarti bahwa pembangunan wilayah semakin mendekati merata atau dengan kata lain menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tahun 2018 dan 2019, indeks *williamson* diperkirakan cenderung turun, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara lebih rinci, gambaran indeks *wiliamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagimana diilustrasikan pada Tabel III.10 di bawah ini.

Tabel III.10
Indeks *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012–2019)

Tahun	Indeks Ketimpangan *Willamson*
2012	0,284
2013	0,304
2014	0,294
2015	0,291
2016 *)	0,288
2017 *)	0,251
2018 *)	0,248
2019 *)	0,245

Sumber: 2012-2015(BPS)
**) 2016-2019 (Proyeksi Bappeda)*

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Apabila koefisien gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila koefisien gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 adalah sebesar 0,307, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,295. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan

distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,275, angka tersebut merupakan yang paling rendah sepanjang tahun 2013-2017. Selanjutnya, koefisien gini untuk tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

Tabel III.11
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013-2019)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2013	0,307
2014	0,295
2015	0,275
2016	0,288
2017	0,276
2018*	0,278
2019*	0,269

Sumber: 2013-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015
**) 2018 - 2019 Proyeksi Bappeda*

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan berasal dari pelemahan ekonomi China. Dengan pelemahan tersebut akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih belum seutuhnya terlepas dari tantangan pada 2017 akibat harga minyak dunia yang belum bisa diprediksi, kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih serta dampak kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump (efek Trump) yang juga memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Namun demikian, melemahnya perekonomian global mendapatkan response yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai negara tujuan investasi dunia, tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Tetapi, di sisi lain perlu diwaspadai bahwa dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam menjawab tantangan perekonomian global, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat perekonomian domestik. Faktor integral yang menentukan kekuatan ekonomi domestik Indonesia antara lain adalah: 1) pengelolaan konsumsi yang efektif; 2) pengetuan sektor pangan; 3) pengunaan energi yang efisien; 4) investasi dan perdagangan internasional. Keempat faktor tersebut bersifat komplementer, sehingga penanganannya harus simultan dan terkoordinasi dengan baik.

Pada intinya, kelemahan–kelemahan di sektor daya saing, rendahnya kapasitas produksi pangan, minimnya penguasaan R&D dan inovasi serta faktor politis yang terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu segera dibenahi.

Sementara, kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah, momentum untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, serta aspek demografis dan kemajemukan bangsa, perlu terus dipertahankan guna mendorong berbagai kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, pangan dan kerjasama internasional yang efektif.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019

Pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019, yaitu:

1. belum pulihnya perekonomian global;
2. harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;
4. depresiasi nilai tukar rupiah terus menerus;
5. kapasitas pengolahan CPO yang ada di Kepulauan Bangka Belitung relatif masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun dstribusi yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lain yang memengaruhi prospek pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 juga mencakup tantangan terkait dengan persaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi sebagai berikut.

1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk lokal akan semakin terpinggirkan.
2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.

3) Pengembangan sektor unggulan Kepulauan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.
4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.
5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah. Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.
8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-privatepartnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019.
2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2017 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2017 dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

1) pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM;
2) peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
3) pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
4) peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;

6) peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).
7) mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah degan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
8) pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta terutama peningkatan peran tanggung jawab sosial dan lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada

gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, di mana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2) disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3) mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
4) terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 diarahkan untuk:

1) memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2) langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3) memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
4) menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) dana perimbangan yang, meliputi : dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; 3) lainlain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah; b) dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dbh pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang

memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah pada Tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.12

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Target 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	2	3	4	5	6
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**781.894.777.172,23**	**817.000.396.952,00**	**953.634.371.637,38**	**1.072.323.085.898,38**
1.1.1	Pajak Daerah	724.905.163.659,80	711.679.306.721,08	840.307.137.560,93	957.133.368.140,97
1.1.2	Retribusi Daerah	6.471.734.422,00	12.127.100.000,00	16.194.194.546,00	14.540.696.077,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.114.092.291,88	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.863.350.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.403.786.798,55	87.693.990.230,92	91.633.039.530,45	94.785.671.679,91
1.2	**Dana Perimbangan**	**2.087.564.920.886,00**	**1.806.768.440.000,00**	**1.665.662.123.165,26**	**1.819.512.903.008,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak	204.685.102.006,00	228.805.440.000,00	228.805.440.000,00	241.549.903.008,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.018.435.140.809,00	1.046.862.622.000,00	1.046.862.622.000,00	1.046.862.622.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	864.444.678.071,00	505.614.576.000,00	389.994.061.165,26	505.614.576.000,00
1.2.4	Dana Intensif Daerah	-	25.485.802.000,00	-	25.485.802.000,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**12.317.177.850,00**	**98.604.435.517,75**	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**
1.3.1	Hibah	-	86.102.500.000,00	103.000.000.000,00	100.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	12.317.177.850,00	12.501.935.517,75	-	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		**2.881.776.875.908,23**	**2.722.373.272.469,75**	**2.722.296.494.802,64**	**2.991.835.988.906,38**

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2020 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara:

1) memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2) memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3) meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4) meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
5) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7) meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1) mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2) meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut.

1) Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
    a) penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
    b) pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    c) pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    d) melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
    e) mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
    f) penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
    g) revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
    h) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
    i) melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;
    j) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2) Strategi pencapaian target dana perimbangan:
    a) sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
    b) peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
    c) peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
    d) peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut belanja aparatur dan belanja pelayanan publik (berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung (berdasaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian sebagai berikut.

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri darijenis belanja:
    a) belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b) belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD;
    c) belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberianhibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
    d) belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
    e) belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki;

f) belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
g) belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

a) belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah;
b) belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah;
c) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.13.

Tabel III.13

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Target 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	2	3	4	5	6
2.1	**Belanja tidak Langsung**	**1.360.271.599.568,02**	**1.561.707.981.959,72**	**1.623.642.235.154,19**	**1.608.559.221.418,51**
2.1.1	Belanja Pegawai	659.776.062.379,62	776.087.070.545,72	798.891.424.073,01	799.369.682.662,09
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	3.000.000.000,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	268.038.087.969,00	276.570.769.060,00	113.754.640.000,00	284.867.892.131,80
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	479.075.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	772.500.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah	261.064.334.164,64	386.269.536.485,00	338.703.584.812,13	397.857.622.579,55
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah	170.854.282.754,76	116.835.479.172,00	19.097.844.172,00	120.340.543.547,16
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	59.757.300,00	5.195.126.697,00	5.000.000.000,00	5.350.980.497,91
2.2	**Belanja Langsung**	**1.010.184.299.315,78**	**1.360.313.717.873,00**	**1.642.614.377.293,00**	**1.496.173.789.252,80**
Jumlah Belanja Daerah		**2.370.440.159.091,80**	**2.922.021.699.832,72**	**2.921.156.845.242,64**	**3.116.816.024.406,99**
Defisit murni / (surplus)		**193.977.365.641,55**	**(199.648.427.362,97)**	**(198.860.350.440,00)**	**(124.980.035.500,61)**

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".
4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
   a) pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
   b) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
   c) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
   d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2017-2025, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.14, diarahkan pada:

1) meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2020;
2) menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4) penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel III.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Target 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	2	3	4	5	6
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**109.638.518.332,24**	**252.150.362.880,72**	**238.860.350.440,00**	**249.980.035.500,61**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	**109.638.518.332,24**	**125.793.001.881,15**	**238.860.350.440,00**	**249.980.035.500,61**
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	**126.357.360.999,57**	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	**40.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**125.000.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-	**40.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**125.000.000.000,00**
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Netto		**109.638.518.332,24**	**212.150.362.880,72**	**198.860.350.440,00**	**277.365.399.168,80**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		**303.615.880.973,79**	**12.501.935.517,75**	-	**0,00**



BAB IV

- **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pembangunan daerah tahun 2020 adalah bagian dari tahap III (2017-2022) pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap III ini adalah **meningkatnya ekonomi daerah dan terpenuhinya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Gambar IV.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2020 terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022



b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu **"Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis**

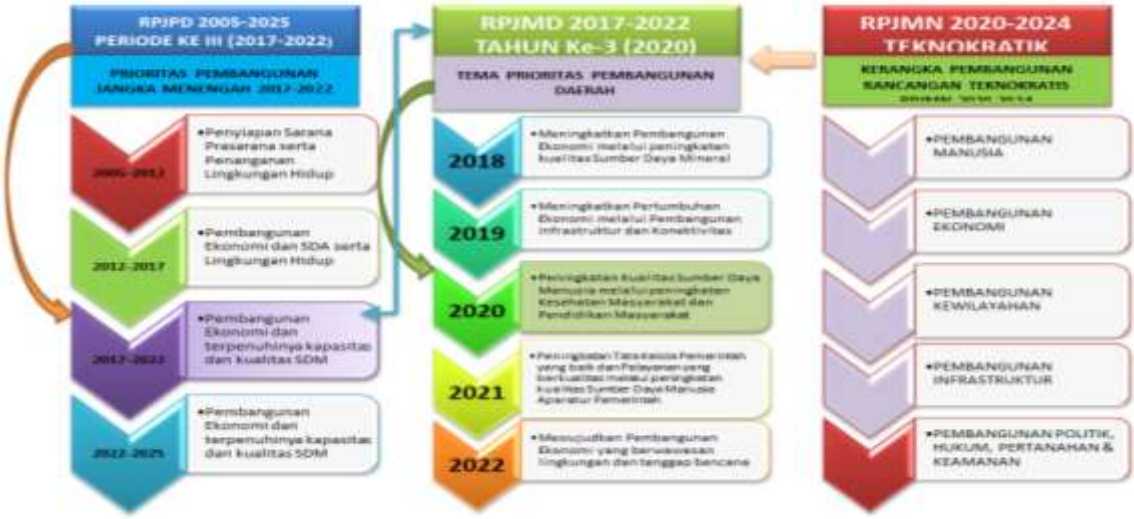
Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan" maka pembangunan daerah tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka:

1. pemantapan sistem perkotaan;
2. perwujudan sistem prasarana wilayah;
3. perwujudan rencana pola ruang;
4. perwujudan kawasan strategis.

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Tahun 2020 merupakan tahun ke-tiga dari RPJMD Tahun 2017-2022. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tersebut tema proritas pembangunan tahun 2020 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat".**

Gambar IV.2
Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dalam Dokumen RPJMD 2017-2022



d. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah tercakup dalam hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan capaian kinerja tahun-tahun yang direncanakan dalam RPJMD periode sebelumnya (sebagaimana diuraikan pada bab II). Kesenjangan antara realita, capaian dan target kinerja menjadi permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada tahun 2020 sebagai pertimbangan dalam penentuan tema RKPD tahun 2020. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

<u>Isu Ekonomi</u>

- Ketergantungan terhadap komoditas pangan dari luar masih tinggi.
- Produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan yang masih rendah.
- Kemadirian pangan rendah.
- Tingkat investasi masih rendah.

Isu Infrastruktur dan Konektivitas

- Pengembangan transportasi laut dan udara untuk mendukung pengendalian inflasi.
- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas.
- Belum ditetapkannya Perda RZWP3K.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak di kawasan regional.

Isu Sumber Daya Manusia

- Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
- Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Isu Kesehatan

- Tingginya prevalensi stunting.
- Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
- Cakupan jaminan pelayanan kesehatan masih rendah.

Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi

- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal

Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

- Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
- Mitigasi kesiapsiagaan bencana belum berjalan

e. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Rancangan Awal RKPD ini disusun Rancangan RKP 2020 mengangkat tema **"Peningkatan Sumber Daya manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".**

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.

- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas dan terutama dengan telah dimuatnya tema proritas pembangunan tahun 2020 dalam RPJMD 2017-2022 maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat".** Dengan penjelasan makna tema sebagai berikut.

1) **Peningkatan** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengalami peningkatan dari waktu kewaktu.
2) **Kualitas sumber daya manusia** adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual. Konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya Pengembangan dan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan:
3) **Pembangunan pendidikan** dimaknai suatu usaha yang terencana dan terarah dalam menyediakan atau menciptakan tenaga terdidik yang berdaya saing dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara.
4) **Pembangunan kesehatan** dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka pembangunan daerah tahun 2020 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan: meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan di semua lapisan masyarakat. Hubungan antara visi-misi dan tujuan-sasaran pembangunan 2017-2022 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1

Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Visi RPJMD 2017-2022: *"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".*

No.	Tujuan	Sasaran	
1	*2*	*3*	
Misi I. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
		2	Meningkatnya produksi subsektor perikanan
		3	Meningkatnya kunjungan Wisatawan
		4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan
		5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri
		6	Terwujudnya kemandirian energi
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah
		2	Menurunnya angka Pengangguran
		3	Menurunnya angka kemiskinan
		4	Menurunnya angka Inflasi
		5	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas			
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berkualitas	1	Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah;
		2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
		3	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
Misi III.Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal			
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	1	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat
Misi IV.Meningkatkan kesehatan masyarakat			
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.	Meningkatnya kesehatan masyarakat
Misi V.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2	Terwujudnya Birokrasi yangefektif dan efisien
		3	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	1	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat
Misi VI . Pengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup			
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	1	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana
9	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	1	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi yang diharapkan dapat mencapai 9 (sembilan) tujuan yang ditandai dengan 22 sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target nasional yang akan dicapai pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2

Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Tahun 2020

Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020				
			Nasional		Babel		
	RKP	RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	*RPJMN 2020-2024*	BaPPenas	*RPJMD 2017-2022*	RKPD 2020	Proyeksi BaPPenas
1	2	3	4	5	6	7	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	*3,50*	5,7	5,3-5,5	4,50	4,50	4,60
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,5	*4,75*	8,5-9,0	8,5-9,0	5,10	5,10	4,16
Tingkat Pengangguran (%)	4,8-5,2	*3,64*	4,0-4,6	4,7-5,1	5,50	5,50	3,30
Gini Ratio	0,380-0,385	*0,272*	0,371-0,373	0,375-0,380	0,259	0,265	0,279
IPM	*71,98*	*70,70*	-	72,51	70,57	71,05	72,27
Laju Inflasi (%)	*2,5-4,6*	*4,50*	-	2,0-4,0	6,24	4,00	4,00

Sumber : RPJMN 2020-2024 teknokratik, RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022. Dari dokumen RPJMD diketahui sasaran dan target sasaran tahun 2020 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.3 dan Tabel IV.4.

Tabel IV.3

Target Tujuan Tahun 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2020
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	4,50
2.	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	2. Pengeluaran pemerintah perkapita (dalam ribuan)	1.980
		3 Pendapatan perkapita,(dalam ribuan)	55.401
3.	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang	4. Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	7,10

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2020
1	*2*	*3*	*4*
	berkualitas		
4.	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	5. Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuaan	7,89 L = 7,96 P = 6,99
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6. Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuaan)	70,23 L = 68,40 P = 72,23
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	7. Indeks Reformasi Birokrasi	67.41
7.	Terwujudnya pembangunan demokrasi	8. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,65
8.	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	9. Indeks Resiko Bencana	153
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,81

Tabel IV.4

Target Sasaran Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET TAHUN 2020
1	*2*	*3*		*4*
1.	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1.	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	5,00
2.	Meningkatnya produksi subsektor perikanan	2.	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor perikanan	3,90
3.	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3.	jumlah kunjungan wisatawan domestik	419.594
4.	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4.	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,63
5.	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5.	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,67
6.	Terwujudnya kemandirian energi	6.	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor ketenagalistrikan	12,86
7.	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	7.	Persentase pertumbuhaan pengeluaran Pemerintah daerah	5.70
8.	Menurunnya angka Pengangguran	8.	Persentase Angka Pengangguran	5,50
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase AngkaKemiskinan	5,10
10.	Menurunnya angka Inflasi	10.	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.24
11.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	11.	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08
12.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	12.	Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.187
		13.	Ketersediaan air baku (m3)	90.000
13.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	14.	Persentase lingkungan yang tertata	54%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET TAHUN 2020
1	*2*	*3*		*4*
		15.	Persentase bangunan yang tertata	56%
		16.	Persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	
14.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	17.	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.19%
		18.	Persentase armada pengangkutan	0.35%
		19.	Persentase jalan kondisi mantap	95.50
15.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	20.	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11.93 L=12,51 P=12,63
16.	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	21.	Angka Kesehatan Masyarakat	82,97
17.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		23.	Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3
		24.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	72
		25.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	2,8
18.	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	26.	Nilai rata-rata delapan area perubahan	40
		27.	Indeks Profesionalitas ASN	73,5
19.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	28.	Unit KerjaBerpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	5
		29.	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	B
20.	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	30.	Skor aspek kebebasan sipil	87,79
		31.	Skor aspek hak-hak politik	81,79
		32.	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36
21.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	33.	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25
22.	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	34.	Indekskualitasairsungai	67,16
		35.	Indekskualitas udara	90,49
		36.	Indeks tutupan lahan	38,64
		37.	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	6.843,99

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2020 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Hubungan antara sasaran pembangunan 2017-2022 dengan strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.5 berikut ini.

Tabel IV.5

Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	
Misi I. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah						
1	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan	1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
			2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	1	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan
					2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
					3	Pembinaan hubungan industri sektor pertaniaan
					4	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor pertanian
					5	Pengembangan produk pertaniaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
					6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertaniaan
			3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan	1	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
					2	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
					3	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
					4	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	
						peternakan
2	Meningkatnya produksi subsektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor perikanan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
			2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan
					3	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan
					4	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan
					5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan
					6	Pengembangan produk Kelautan dan perikanaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan
			3	Mengembangakan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan	1	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
					2	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
					3	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
					4	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar
3	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan	1	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunaan pariwisata	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
				2	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
				3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
				4	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataa
				5	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataa
				6	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan
				7	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata
			2 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	1	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
				2	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
				3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	
					4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
					5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
					6	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
					7	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
					8	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
			3	Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	1	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
					2	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	1	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	1	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral
					2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
					3	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
					4	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	1	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular

No.	Sasaran	Indikator sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	*2*	*3*		*4*		*5*
					2	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
					3	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
					4	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
					5	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
					6	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
6	Terwujudnya kemandirian energi	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor ketenagalistrikan	1	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah	1	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhaan pengeluaaran pemerintah daerah	1	Meningkatakan pendapataan asli daerah	1	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi
8	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	1	Meningkatkan pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	1	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
					2	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	1	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
					2	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
10	Menurunnya angka Inflasi	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap	1	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

No.	Sasaran	Indikator sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				komoditas penyumbang inflasi		
					2	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	1	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas						
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	Persentase Luas Daerah irigasi (ha)	1	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
		Ketersediaan air baku (m3)	1	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	1	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
		Persentase kawasan permukiman yang tertata	1	Meningkatkan penataan kawasan permukiman	1	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
		Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	1	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	1	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
		Persentase armada pengangkutan	1	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
		Persentase jalan kondisi mantap	1	Meningkatakan aksesibilitas	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal						
15	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat	Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama	1	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	1	peningkatan akses pelayanan pendidikan

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	
		sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)				
			2	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	1	peningkatan mutu layanan pendidika
					2	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
					3	Peningkataan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat						
16	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
					2	peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat
					3	peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat
					4	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza
					5	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi						
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	1	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	1	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
		Tingkat kapabilitas APIP	1	Meningkatkan tata kelola pengawasan	1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	1	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	1	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
					2	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
			2	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	1	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
			3	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	1	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai rata-rata delapan area perubahan	1 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	1 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
				2 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
		Indeks Profesionalitas ASN	2 Meningkatkan tata kelola manjemen SDM aparatur pemerintah daerah	1 Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)	1 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanaan publik	1 Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
		Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
				2 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
				3 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas
				4 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik
				5 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
				6 Menjamin hak anak dalam pembangunan
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	Skor aspek kebebasan sipil	1 Menciptakan iklim berdemokarsi yang kondusif	1 Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
				2 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta

No.	Sasaran	Indikator sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	*2*	*3*		*4*		*5*
						perlindungan masyarakat (Linmas)
		Skor aspek hak-hak politik	1	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	1	Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat
		Skor aspek lembaga demokrasi	1	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	1	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Misi VI . Pengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup						
21	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	1	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	1	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			2	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	1	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
					2	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air Sungai	1	Meningkatkan kualitas air	1	Pengendalian kualitas air
		Indeks Udara	1	Meningkatkan kualitas udara	1	pengendalian kualitas udara
		Indeks Tutupan Lahan	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	1	Peningkatan tutupan lahan
					2	Peningkatan tutupan lahan
		Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	1	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	1	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
					2	Pengembangan TPA Regional

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan daerah tahun 2020

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, disusun dengan memerhatikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi,

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan; 2) isu strategis global/nasional/daerah; 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah; dan 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2020.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memerhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial.
2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022.
4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2020.
5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.
6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.
7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2020 terdiri dari 2 kriteria yaitu: 1) Prioritas pembangunan daerah I (utama) berisi program-program unggulan yang yang berkorelasi dan sesuai tema pembangunan tahun 2020, 2) Prioritas pembangunan daerah II (penunjang) berisi program-program unggulan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan tema pembangunan, namun mendukung tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2020. Dalam penentuan prioritas pembangunan I dan II, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Prioritas pembangunan daerah I (utama) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, yaitu:

1. **Pengembangan pembangunan agropolitan**

   Fokus kegiatan yaitu memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai "provinsi lada" bisa dicapai kembali, melalui; membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. **Pembangunan bahari**

   Fokus kegiatan yaitu memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitung, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. **Pengembangan pariwisata**

   Fokus kegiatan yaitu menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui *event-event* seni-budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional, seperti: festival budaya melayu, festival kuliner bangka-belitung, karnaval budaya serumpun sebalai, triathlon, maraton, dll; rebranding pantai-pantai di Bangka Belitung melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. **Pembangunan pendidikan**

   Pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih difokuskan kepada pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, untuk meningkatkan cakupan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, hingga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pemenuhan akses layanan pendidikan berkualitas ini juga diharapkan dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin (gender). Sementara itu, khusus pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah (vokasi) terhadap dunia kerja, terutama dalam upaya mendukung capaian prioritas unggulan daerah.

5. Pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, hingga lansia. Target sasaran yang telah dilaksanakan antara lain upaya peningkatan dan pemenuhan terhadap: percepatan penurunan stunting melalui status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil/pedesaan/pulau-pulau; cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta responsivitas sistem kesehatan.

6. Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanaan publik

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan peraturan daerah inisiatif DPRD; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah I (utama) dengan arah kebijakan serta dukungan program perangkat daerah untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6
Arah Kebijakan dan Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (utama)
RKPD 2020

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**					
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	0,17	UPTDBLKI
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	21	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD Balai Produktifitas

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang memiliki akreditasi A	100	Dinas Pendidikan
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	4,68%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,36%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	Disnaker
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	Dinas KUKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan	Persentase produk Usaha kecil sektor	43,48%	Dinas KUKM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Pemberdayaan Usaha Kecil	pertanian yang tersertifikasi		
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,44%	Disperindag
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	2	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	75	Biro Ekonomi
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pertambahan Jumlah UKM pertaniaan yang bermitra dengan investor	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,45%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	Dinas KUKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang	Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna	58%	Dinas PMD

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....		pertaniaan	Guna Dan Pelatihan Masyarakat	(TTG) di sektor pertanian		
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	50	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	81	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	20	Dinas Pertanian
2	**PEMBANGUNAN BAHARI**					
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanaan yang berkompetensi	0,15%	UPTDBLKI
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	21,3%	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanaan	0,12%	UPTD Balai Produktifitas
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi	100%	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....				pihak 1 (LSP-P1)		
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	Dinas KUKM
				persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difaslitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	0%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	3%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
				persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	0,71%	Disperindag
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	216	DKP
				Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	55	DKP
				Volume Produksi Olahan (ton)	21.610	DKP
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	219.300	DKP
				Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	110	DKP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	10,59	UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
			Program	Pertambahan Jumlah	0,07	UPTD Balai

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
						UPTD Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0,36	UPTD Balai Benih Ikan Sentral (Bbis) Pemali
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	Disnaker
3	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**					
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,80%	Budpar
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,50%	Budpar
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		Budpar
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	1,51%	Dinas KUKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,32%	Dinas KUKM
			Program	persentase Usaha Kecil		Dinas KUKM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1%	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100%	Dinas Pendidikan
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3%	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15%	UPTDBLKI
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05%	UPTD Balai Produktifitas
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	Dinas KUKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	Diskepora

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....		pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan				
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	Diskepora
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	Diskepora
			Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	Budpar
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisataan	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	Budpar
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	Disnaker
4	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN					
		peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21	Dinas Pendidikan
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	Dinas Pendidikan
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	Diskepora
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	Diskepora
			Program Pengembangan	presentase perpustakaan	18,18	DKPus

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Sumber Daya Perpustakaan	terakreditasi;		
			Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;		DKPus
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	Diskepora
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		Diskepora
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	Dinas Perhubungan
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	Diskominfo
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	Biro Kesra
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	Biro Kesra
			Program Pengelolaan	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)			
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
5	**PEMBANGUNAN KESEHATAN**					
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	Dinkes
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	82,83%	Dinkes
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	50 sekolah	Biro Kesra
			Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	Dinas PRKM
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	Dinas PRKM
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	Dinas PRKM
				Persentase	21%	Dinas PRKM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....				pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi		
				Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	65%	Dinas PRKM
				Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	60%	Dinas PRKM
				Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	60%	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	Biro Kesra
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	35%	Kominfo
			Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	Dinas Pangan
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	Dinas Pangan
			Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	Dinas Pangan
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	Dinas Pangan
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	Disperindag
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD Hyperkes
			Program	Persentase peserta	0,00%	Diskepora

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional		
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas		Dishub
		peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	85,60%	Dinkes
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	17	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	85%	RSUP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)	6-9 hari	RSUP
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	85%	RSUP
			Program Badan Layanan Umum Daerah RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar	95	RSJ
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	100	RSJ
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
				Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
			Program Badan	Persentase dana BLUD	85	RSJ

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Layanan Umum Daerah RSJ	RSJ yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat		
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanaan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	35%	Diskominfo
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	88,26%	Dinkes
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100%	Dinas Pendidikan
		Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL) Napza		Dinkes
		Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	40	RSJ
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	700	Kesbangpol
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban nazpza	21,28	Dinas Sosial
6	**PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK**					
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	Biro Humas
			Program Peningkatan	Persentase kesesuaian antar informasi yang	100	Biro Humas

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan It	dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah		
			Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100	Biro Humas
			Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
				Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
				Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	Setwan
				Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	77%	Setwan
		Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	92%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	93%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	83%	BKPSDM
			Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Asn	Persentase ASN yang menerima penghargaan	2,21%	BKPSDM
				Persentase kasus	0,13%	BKPSDM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pelanggaran disiplin minimal sedang		
				Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	76%	BKPSDM
				Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	90%	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	60%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	41,90%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	97%	BKPSDM
				Nilai akreditasi Diklat	81	BKPSDM
			Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Asn	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaiaan	40,40%	BKPSDM

Prioritas Pembangunan II (penunjang) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, yaitu:

1. Pengembangan tata kelola pertambangan

Fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Dikarenakan tambang konvensional dan tambang rakyat menjadi pemasukan utama bagi Bangka Belitung. Maka, zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

2. Peningkatan pendapatan pemerintah

Fokus kegiatan fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat daerah dan meningkatan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

3. Peningkatan ekonomi masyarakat

Fokus kegiatan mengembangakn bisnis KUKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui bantuan Promosi (Gelar Pameran KUKM), temu investor atau *buyer* (*Business Gathering*), dan pendampingan pelatihan

kapasitas KUKM (*training*); memberikan kemudahan bagi KUKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

4. **pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan**

   Fokus kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; pembangunan masjid terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; pembanguan museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan *brand* BABEL sebagai tempat GMT paling bersejarah; meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan H.A.S. Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata level internasional; melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kementerian ESDM, PLN dan investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di BABEL bisa segera direalisasiskan untuk membangun kemandiriaan energi.

5. **Pembangunaan berdemokrasi**

   Fokus kegiatan mengoptimlakan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

6. **Peningkatan pembangunan bidang kebencanaan**

   Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

7. **Pengendalian lingkungan hidup**

   Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pegendalian terhadap efek gas rumah kaca.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah II (penunjang) dengan arah kebijakan serta dukungan program perangkat daerah untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel IV.7
Arah Kebijakan dan Program Prioritasyang Mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2020

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	**Arah Kebijakan**	**Program Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)**	**Target 2020**	**Perangkat Daerah**
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN					
		Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	70%	DINAS ESDM
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	65%	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	49%	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	75	Biro Ekonomi
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	1,04%	Disperindag
				pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan		Disperindag
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	2	Disperindag
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	0,71	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
		Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	73	Biro Ekonomi

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral				
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	3	Dinas PMPTSP
				Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral	1	Dinas PMPTSP
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	Dinas PMPTSP
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,45%	Dinas PMPTSP
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	82%	Dinas PMPTSP
		Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	1%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan	1%	Dinas PUPR

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pelabuhan Tanjung ular		
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	35%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	Disperindag
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	7%	Dishub
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	1%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan strategis industri terpadu air kelik	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan strategis industri terpadu air kelik	35%	Dinas PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	50%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunkan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air	0%	Dishub

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Kelik		
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasikan	50	Dinas PUPR
		Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	91,78%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	88,00%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	10%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	Dishub
			Program Penataan	Persentase jumlah		Dinas PUPR

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Ruang Dan Pertanahan	Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan		
				Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan Industri dan pelabuhan tanjung Berikat	25%	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Program Kebinamargaan	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	1%	Dinas PUPR
				Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	35%	Dinas PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	50%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	7%	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai		Dinas PUPR
				Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	25%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	Disperindag
			Program Peningkatan	Tersedianya		DLH

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Tata Kelola Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan		
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	30%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	Dinas PUPR
				Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	160	DKP
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	3.000	DKP
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	DINAS KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	10,00%	DINAS KUKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan	1,00%	DINAS KUKM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Diseminasi dan pendampingan akses permodalan		
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	Disperindag
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	15%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	1	DLH
		Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	2	Disperindag
		Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT	6,84%	Dinas ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	65%	Dinas ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	65%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	Biro Ekonomi

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
2	PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH					
		Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24,62%	Bakuda
			Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	75,38%	Bakuda
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	200%	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	1,15%	DLH
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	100%	Dinkes
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	18,60%	Bkpsdm
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25%	Dinas PUPR
			Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	25%	UPTD Pengawasan Dan Peralatan Belitung
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral	80 Miliar	DINAS ESDM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Logam		
			Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	420 Ribu Barel	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,9 Miliar	DINAS ESDM
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	441 juta	DKP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	28,88	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	173,25 juta	UPTD Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolahan perhubungan udara	10%	Dishub
3	**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**					
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20	Disnaker
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,24%	Disperindag
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	Diskepora
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,84%	DKP

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,16%	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	35%	Diskominfo
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	95,51%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	14%	Dinas PUPR
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	15%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	Dinas PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	Dinas PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	7,52	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	Dinsos
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	100	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27	Dinsos
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	Disperindag
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		Disnaker
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	Disnaker
				persentase	0,3	Disnaker

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				penurunan kecelakaan kerja		
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrologian	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	18	Disperindag
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	25	Disperindag
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	50	Disperindag
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862.000	Disperindag
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	89	Disperindag
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan	12	Disperindag
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	40	Disperindag
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	Disperindag
				Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	10	Disperindag
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervesi program/kebijakan	100%	Biro Ekonomi
			Program Pengembangan Perhubungan Laut	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi	30%	Dinas Perhubungan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				optimal		
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	95,51%	Dinas PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	3.113,22	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	3.095,08	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	114,51	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	Dinas Kelautan Perikanan
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	Dinas Pangan
					CV Cabe≤ 35%	Dinas Pangan
					CV Daging Ayam 10%	Dinas Pangan
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang		Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	7,39	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan	Persentase grand		Dinas PPA,

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				presentase KB MKJP	9,7	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
4	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	75	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku	20%	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	56%	Dinas PRKM
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	63%	Dinas PRKM
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	50%	Dinas PRKM
		Peningkatan, pemeliharaan dan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis	Persentase dana pendamping desa yang terlayani	86%	Kominfo

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Teknologi Informasi	jaringan Internet		
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	1 unit	Dinas Perhubungan
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	30%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Program Kebinamargaan	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		Dinas PUPR
5	**PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI**					
		Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	-	Kesbangpol
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	Kesbangpol
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7	Kesbangpol

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	45	Kesbangpol
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	50	Kesbangpol
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	Satpol PP
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PP
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	28,79	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	Kesbangpol
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	60	Kesbangpol
6	**PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN**					
		Peningkatan penyelenggara	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase Daerah Rawan Bencana yang	76	BPBD

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		an penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	Dinsos
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	2,8	Dinas Pangan
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	Kominfo
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%	Dinkes
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	Satpol PP
			Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	85	BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	20%	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	50,00%	Dinas PUPR
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan	36,80%	Dinas PUPR

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana		
			Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	0%	PRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,96%	Dinas PUPR
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,17%	Dinas PUPR
			Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80	BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	85	RSJ
		Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	52,50%	Dinas PUPR
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	45,00%	Dinas PUPR
				panjang penahan tanah akibat erosi	64,00%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk	100%	Dinas PUPR

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		bencana teluk bayur		bayur		
				Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	70%	Dinas PUPR
			Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	0,27	Dinas PRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	97%	Dinas PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	83%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		Dinas PUPR
7	**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**					
		Pengendalian kualitas air sungai	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	Dinas Kehutanan
		pengendalian kualitas udara	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	Dinas Kehutanan
		Peningkatan tutupan lahan	Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Perhutanan	Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan	Persentase luas kawasan Perhutanan	2%	Dinas Kehutanan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Sosial	Pemberdayaan Masyarakat	Sosial (%)		
			Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	Dinas Kehutanan
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
			Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	25%	DLH
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	5%	DLH
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB Laboratorium Lingkungan
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	12%	Dinas ESDM
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	62%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	63,64%	Dinas ESDM
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	2%	Dinas ESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan	10 Obyek	Dinas ESDM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				cagar alam geologi		
			Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		Dinas Kehutanan
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	1,20%	Dishub
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20,00%	Dishub
		Pengembangan TPA Regional	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	0,05	DLH
			Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	25%	Dinas PRKM
				Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional	25%	Dinas PRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	1%	Dinas PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	1%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	50%	Dinas PUPR
				Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	35%	Dinas PUPR

4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV.8

Keselarasan antara Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal	1	Kemandirian pangan masih rendah	1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2	Masih rendahnya rasio ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana Pertanian				
3	Masih rendahnya daya saing komoditas pertanian tercermin dari kualitas hasil produksi yang belum memenuhi standar mutu dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor				
4	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani/kelembagaan petani belum berjalan secara optimal (mandiri dan profesional) dan terbatasnya pengetahuan, kemampuan/ ketrampilan dan kemandirian petani				
5	a. Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing	2	Produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan yang masih rendah	2	Pembangunan Bahari
6	Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing				
7	Tidak tersedianya SDM di provinsi yang mengurusi bidang pengawasan dan pembinaan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota				
8	Rendahnya kualitas Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan	3	Masih rendahnya Nilai tambah Sektor pariwisata	3	Pengembangan pariwisata

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
9	Belum banyak tersedia amenitas (fasilitas akomodasi dan konsumsi) untuk wisatawan dan distribusi belum merata				
10	Pemberdayaan masyarakat dan sadar wisata (Sapta Pesona: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Kenangan)				
11	Masih tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat	4	Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4	Pembangunan Pendidikan
12	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja				
13	Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi dan masih di bawah capaian Nasional	5	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas	5	Pembangunan Kesehatan
14	Masih tingginya angka kematian bayi				
15	Masih tingginya angka kematian Ibu				

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan paparan berjudul "Tema, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 2020, dan Strategi Pengembangan Wilayah" oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Temu Konsultasi Triwulan I BAPPENAS-BAPPEDA di Jakarta tanggal 1 Februari 2019, telah disampaikan tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas nasional. Terdapat 5 (lima) prioritas nasional tahun 2020, yaitu:

1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2) infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3) nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5) stabilitas pertahanan dan keamanan.

Prioritas Nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional sebagaimana Tabel IV.8. Matrik ini menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetap program dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional tahun 2020.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 harus diselaraskan untuk mendukung Pencapaian 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut.

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) kualitas sumber daya manusia; b) meratanya kesejahteraan masyarakat.
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) konektivitas antar wilayah; b) meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); c) meningkatnya ketahanan bencana di pantai utara Jawa; d) perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk rumah tangga.
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja dengan sasaran pembangunan antara lain: meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sector unggulan pertanian, kemaritiman, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital.
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) kebutuhan konsumsi pangan masyarakat; b) kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sda; c) energi; d) kualitas lingkungan hidup; e) indeks resiko bencana Indonesia.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan sasaran pembangunan antara lain : a) keutuhan wilayah dan rasa aman masyarakat; b) pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri; c) sistem hokum nasional yang mantap.

Untuk mencapai 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.9.

Tabel IV.9
Keselarasan antara Prioritas Nasional, Prioritas dan Sasaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah
1	2	3	4		5
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan Pendidikan	1	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat
			Pembangunan Kesehatan	1	Meningkatnya kesehatan masyarakat
			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1	Menurunnya angka Pengangguran
				2	Menurunnya angka kemiskinan

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	
1	2		3	4	5	
		2	Meningkatnya dan meratanya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1	Menurunnya angka Pengangguran
					2	Menurunnya angka kemiskinan
					3	Menurunnya angka Inflasi
					4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah
		2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi		1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
		3	Meningkatnya ketahanan bencana di pulau jawa			
		4	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuik rumah tangga		1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
3	Nilai Tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	1	Meningkatnya Nilai tambah, Investasi, Ekspor, Komponen Dalam Negeri dan Lapangan Kerja pada sektor unggulan Pertanian, Kemaritiman, Industri, Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	1	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian
				Pembangunan Bahari	1	Meningkatnya produksi subsektor perikanan
				Pengembangan pariwisata	1	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
				Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	1	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan
					2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri
				Peningkatan	1	Menurunnya angka

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020			Prioritas Daerah		Sasaran Daerah
1	2		3	4		5
				Ekonomi Masyarakat		Pengangguran
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1	Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	1	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian
				Pembangunan Bahari	1	Meningkatnya produksi subsektor perikanan
		2	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas SDA untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah
				Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup
		3	Terpenuhinya energi Nasional	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	1	Terwujudnya kemandirian energi
		4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup
		5	Menurunnya indeks resiko bencana	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	1	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1	Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat	Pembangunan Berdemokrasi	1	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat
		2	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri			
		3	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah

yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tabel IV.10

Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**	**Meningkat kan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan**	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64%	Dinsos
				Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54%	Dinas PRKM
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
				Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	100%	Dinas Kesehatan
				Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk	Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			mencapai penduduk tumbuh seimbang				
					Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	7,39%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
					Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
					presentase KB MKJP	9,7%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27%	Dinsos
				Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
					Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	Disperindag
				Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08	Dinas Pertanian

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
				Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	N.A	Disnaker
					persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	Disnaker
					persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3%	Disnaker
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	Dinkes
				Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	82,83%	Dinkes
				Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	50 sekolah	Biro Kesra
				Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
					Persentase cakupan pelayanan akses air minum	70%	Dinas PRKM

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
					di kawasan permukiman kumuh Provinsi		
					Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	Dinas PRKM
					Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	Dinas PRKM
					Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi	21%	Dinas PRKM
					Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	65%	Dinas PRKM
					Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	60%	Dinas PRKM
					Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	60%	Dinas PRKM
				Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75%	Biro Kesra
				Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	35%	Kominfo
				Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	Dinas Pangan
					persentase pangan yang aman dikonsumsi	86%	Dinas Pangan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	Dinas Pangan
					Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1%	Dinas Pangan
				Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71%	Disperindag
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73%	UPTD Hyperkes
				Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	Diskepora
				Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	N.A	Dishub
			peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	85,60%	Dinkes
				Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	17	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	85%	RSUP
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)	6-9 hari	RSUP
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	85%	RSUP
				Program Badan Layanan Umum	Persentase dana BLUD	100%	RSUP

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah RSUP	RSUP yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat		
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar	95%	RSJ
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	100	RSJ
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95%	RSJ
					Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95%	RSJ
				Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	85%	RSJ
				Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanaan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	35%	Diskominfo
			Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	88,26%	Dinkes
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
					Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang	100%	Dinas Pendidikan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
					mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)		
		Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk Semua penduduk	peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA	40,63	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21	Dinas Pendidikan
		Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa ber prestasi	peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	Dinas Pendidikan
					Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	Dinas Pendidikan
					Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UN SMA	6,8	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	Dinas Pendidikan
					Rata-rata nilai UN SMK	6,7	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	Diskepora
				Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	Diskepora
				Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	Diskepora
				Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPus
				Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;	N.A	DKPus
				Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	Diskepora
				Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	Diskepora
					Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan	N.A	Diskepora
				Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	Dinas Perhubungan
					Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	Dinas Perhubungan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	Diskominfo
				Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80%	Biro Kesra
				Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	Biro Kesra
				Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan
			Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
2	**Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**	**Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau**	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
					Persentase cakupan pelayanan akses air minum	70%	Dinas PRKM

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
					di kawasan permukiman kumuh Provinsi		
					Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	Dinas PRKM
					Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	Dinas PRKM
					Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi	21%	Dinas PRKM
		Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah ,keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	**Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut**	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2,13%	DKP
		Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik		**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	18,00%	DKP
			Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	**Program Pengembangan Perhubungan Laut**	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	1%	Dinas Perhubungan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	**Program Pengembangan Perhubungan Darat**	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	30%	Dinas Perhubungan
		Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	**Program Kebinamargaan**	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	N.A	Dinas PUPR
					Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap	N.A	Dinas PUPR
		Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%	Kominfo
		Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan					

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Nilai Tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja**	**Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan KUKM**	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor pertaniaan	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5,0%	Dinas KUKM
					persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	Dinas KUKM
				Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	43,48%	Dinas KUKM
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	2%	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
			Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanaan yang berkualitas sesuai standar	3,60%	Dinas KUKM
					Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	Dinas KUKM
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	88,00%	UPTD Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
			Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya	**Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	Dinas KUKM

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			saing kepariwisataan				
				Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,33%	Disperindag
				Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	3%	Disperindag
			Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk**	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	0,71%	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	0,17%	UPTDBLKI
				Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	21,3%	Disnaker
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02%	UPTD Balai Produktifitas
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
					Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50%	Dinas Pendidikan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	0,03%	DINAS KUKM
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	4,68%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
					persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,36%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanaan yang berkompetensi	0%	UPTDBLKI
				Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	21,3	Disnaker
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanaan	0,12	UPTD Balai Produktifitas
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
					Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100%	Dinas Pendidikan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	3%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
					persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
				Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	0,71%	Disperindag
			Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisataan**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,80%	Budpar
					Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,50%	Budpar
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	1,51%	Dinas KUKM
					persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,32%	Dinas KUKM
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100%	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan	Persentase peningkatan	21,30%	Disnaker

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi		
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15%	UPTDBLKI
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66%	Dinas Pendidikan
			Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	21,30%	Disnaker
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutaan	0,17%	UPTDBLKI
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	1,51%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
					Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0,13%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Mempercepat transformasi struktural.					
		Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjagas tabilitas ekonomi					

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pengendalian kualitas air	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
				Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	Dinas Kehutanan
			pengendalian kualitas udara	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
				Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	Dinas Kehutanan
			Peningkatan tutupan lahan	**Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem**	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	Dinas Kehutanan
				Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	Dinas Kehutanan
				Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	Dinas Kehutanan
4	**Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**	**Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.**	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	**Program Pengembangan Sumber Daya Energi**	Persentase penggunaan EBT	6,84%	Dinas ESDM
					Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai	65%	Dinas ESDM

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
					standar		
					Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	65%	Dinas ESDM
				Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	Biro Ekonomi
		Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	**Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian**	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15%	Dinas Pertanian
					Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10%	Dinas Pertanian
					Persentase Kelembagaan pertaniaan aktif	10%	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	175	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
					Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1750	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
					Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2,00%	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	2,00%	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	6%	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
					Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
				Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	47.017	Dinas Pertanian
		Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
				Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	10%	Dinas PUPR
			Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	20%	Dinas PUPR
		Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
				Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	25%	DLH
				Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	5%	DLH
				Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	5%	Dinas Kehutanan
				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB Laboratorium Lingkungan
				Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	0,12%	Dinas ESDM
					Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
					Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	62%	Dinas ESDM
				Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	1,20%	Dishub
		Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76%	BPBD
				Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	280%	Dinas Pangan

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	25,00%	Kominfo
				Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%	Dinkes
				Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4%	Satpol PP
				Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	50%	DinasPUPR
					Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	36,80%	DinasPRKM
				Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	0	DinasPRKM
				Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,96%	DinasPUPR
					Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat	0,17%	DinasPUPR

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
					bencana		
5	**Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**	**Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan**					
		Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah**	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	83%	Biro Pemerintahan
		Menegakkan hukum dan anti korupsi.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	**Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur**	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	8	Inspektorat
				Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90%	Inspektorat
					Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	95	Inspektorat
					Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100%	Inspektorat
				Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
					Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah**	Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN	99%	Biro Organisasi
					Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	67	Biro Organisasi
				Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)	35%	BaPPeda
					Persentase dokumen perencanaaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku	35%	BaPPeda
				Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	3	Bakuda
					Prosentase kesesuain antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	100%	Bakuda
				Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	95%	Bakuda
			Peningkatan Penataan peraturan perundang-	**Program Peningkatan Penataan Peraturan**	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang	90%	Biro Hukum

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
			undangan	**Perundang-Undangan**	tindih		
				Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	90%	Biro Hukum
				Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	90%	Biro Hukum
		Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba ,penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
				Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	Satpol PP
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
				Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PP
			Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	Kesbangpol
					Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	Kesbangpol

No	RKP 2020		RKPD 2020				
	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7	Kesbangpol
				Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
				Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	100%	Satpol PP
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
		Meningkatkan keamanan siber.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	60%	Diskominfo
				Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	60%	Diskominfo

4.2.5. Penyelarasan Target Capaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2020-2024): **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2020, antara lain:

1. pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-Bali sebesar 5,7 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,2 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 6,6 persen; Maluku sebesar 6,1 persen dan Papua sebesar 5,6 persen;
2. pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen (*); dengan sasaran tingkat kemiskinan per wilayah: Sumatera sebesar 7,9 persen; Jawa-Bali sebesar 7,73 persen; Nusa Tenggara sebesar 16,85 persen; Kalimantan sebesar 4,06 persen; Sulawesi sebesar 9,65 persen; Maluku sebesar 11,49 persen dan Papua sebesar 23,28 persen;
3. pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 4,7-5,1 persen (*); dengan sasaran tingkat pengangguran per wilayah: Sumatera sebesar 4,7 persen; Jawa-Bali sebesar 5,5 persen; Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen; Kalimantan sebesar 4,7 persen; Sulawesi sebesar 3,9 persen; Maluku sebesar 6,1 persen dan Papua sebesar 2,8 persen; dan
4. sasaran laju inflasi 2,0-4,0.

Keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam Tabel IV.11 dibawah ini.

Tabel IV.11
Keselarasan Target Indikator Pembangunan Makro antara Target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Indikator	Tahun 2020		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,5	5,0	4,50
Tingkat Kemiskinan %	5,0-5,7	7,9	5,10
Tingkat Pengangguran %	4,0-4,6	4,7	5,50
Laju Inflasi (%)	2,0-4,0	5,3	6,24

**) data tidak tersedia*
Sumber: Ranwal RKP 2020, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Setelah pelaksanaan *Millenium Development Goals (*MDGs*)* periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat *top down*, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu *Sustainability Development Goals (*SDGs*)* sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh

MDGs. SDGs memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *MDGs* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini Tabel IV.10 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Tabel IV.12

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian *Sustainabel Developement Goals* (SDGs)

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	Dinsos
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	12:51	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	100	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27	Dinsos
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang	12,50%	Disperindag

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08%	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	Diskomonfo
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	Disnaker
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,30%	Disnaker
2	Mengentaskan kelaparan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan *agriculture* berkelanjutan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	Dinas Pangan
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	Dinas Pangan
			Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	Dinas Pangan
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	Dinas Pangan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	Dinas PRKM
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,65%	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	-	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	-	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
3	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	Dinkes

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	82,83%	Dinkes
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	35%	Kominfo
		Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	40	RSJ
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	30	RSJ
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	700	Kesbangpol
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban nazpza	21,28	Dinas Sosial
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	7,39	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan	APK SLB	26,21%	Dinas Pendidikan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pendidikan Khusus			
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	Dinas Pendidikan
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	45%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5.08%	Diskepora
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22.87%	Diskepora

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPus
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%	Diskepora
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	Dinas Perhubungan
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	Diskominfo
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80%	Biro Kesra
				Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	Biro Kesra
			Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	7,52%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3,58	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	35,47	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,42	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak		Dinkes
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67%	Dinas Sosial

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak	57,14	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99%	Dinas Sosial
			Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,25%	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	28,79%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
6	Menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	Dinas PRKM
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan	0,22	Dinas PRKM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				strategis Provinsi		
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	Dinas PRKM
		Pengendalian kualitas air	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	Dinas Kehutanan
7	Menjamin akses energy yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	70%	Dinas ESDM
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	65%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	49%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	75%	Biro Ekonomi
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	1,04%	Disperindag
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	2%	Disperindag

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT	6,84%	Dinas ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	65%	Dinas ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	65%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	Biro Ekonomi
		Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel	Dinas ESDM
8	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inclusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	73%	Biro Ekonomi
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim	Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Penanaman Modal			
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.45%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	Disnaker
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5.24%	Disperindag
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10.20%	Diskepora
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.84%	Diskepora
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1.16%	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	35%	Diskominfo
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan	95,51%	Dinas PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				dengan pendekatan padat karya		
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	14%	Dinas PUPR
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	15%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	Dinas PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24%	Dinas PMD
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	75%	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku	20%	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%	Kominfo

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	30%	Dishub
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri					
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan					
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	56%	Dinas PRKM
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	63%	Dinas PRKM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%	Kominfo
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
			Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	25%	DLH
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	5%	DLH
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB Laboratorium Lingkungan
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	12%	Dinas ESDM
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	62%	DinasESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	63,64%	Dinas ESDM
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	2,00%	DinasESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		Dinas Kehutanan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	1,20%	Dishub
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20.00%	Dishub
		Pengembangan TPA Regional	Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	25%	DinasPRKM
				Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional	25%	DinasPRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	2%	DinasPUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		DinasPUPR
			Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	50%	DinasPUPR
13	Membuat langkah aksi untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76%	BPBD
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20%	Dinsos
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan	Persentase Cadangan Pangan	2,80%	Dinas Pangan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Cadangan Pangan			
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	Kominfo
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%	Dinkes
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	Satpol PP
			Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	85%	BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	20%	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	50%	DinasPUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	36,80%	DinasPUPR
			Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	0%	DinasPRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,96%	DinasPUPR
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,17%	DinasPUPR
			Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%	BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	85%	RSJ
		Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	0,525	Dinas PUPR
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	45,00%	Dinas PUPR
				panjang penahan tanah akibat	64,00%	Dinas PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				erosi		
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	DinasPUPR
				Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	70%	DinasPUPR
			Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	27,00%	DinasPRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	97%	DinasPUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	83%	DinasPUPR
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan laut, samudra dan sumberdaya maritime yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	825.077	DKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2,13%	DKP
				Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	75	DKP
			Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	18%	Dishub
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	219.300	DKP
				Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	110	DKP
		Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	22.500	DKP
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar	30%	Dishub

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pongok		
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	75	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	35.000	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	75	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	13.125	DKP
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	75	Dinas PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	4.375	DKP
15	Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Peningkatan tutupan lahan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakaan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	1 Dok	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Perhutanan Sosial	Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	Dinas Kehutanan
16	Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan.	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	35,47	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,42	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67$	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	8	Inspektorat
			Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90	Inspektorat
				Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	95	Inspektorat
				Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	Inspektorat
			Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
				Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi	28,79	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat		dilembaga politik		Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	Biro Layanan Pengadaan
17	Penguatan moi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan					

4.2.7. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel IV.13

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan menengah	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas**	APK SMA	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Khusus		**Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus**	APK SLB	26,21	Dinas Pendidikan
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	Dinas Pendidikan
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	Dinas Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	Dinas Pendidikan
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	**Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus**	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan

b. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan untuk kabupaten/kota antara lain: 1) setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar; 2) setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; 3) setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 4) setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 5) setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar; 6) setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 7) setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 8) setiap penderita hipertensi

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 9) setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 11) setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; 12) setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; 13) setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. Sedangkan SPM bidang kesehatan untuk Provinsi antara lain: 1) Kejadian luar biasa (KLB): 2) Kebencanaan.

Tabel IV.14

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%	Dinkes
		Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	20%	Dinkes
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	Dinkes

c. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: 1) setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih; 2) setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar.

Tabel IV.15

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	75	DinasPUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	20%	DinasPUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DinasPUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DinasPUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai		Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DinasPUPR

d. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang

diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1) penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada pedoman umum penanganan kawasan permukiman kumuh nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh bupati/walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada: a) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat; b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan permukiman; 2) data dan profil perumahan di daerah; 3) penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai *universal access* melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.

Tabel IV.16

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**Program Pembangunan Perumahan**	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	Dinas PRKM
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Perumahan Rakyat**	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	51%	Dinas PRKM
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	**Program Perumahan Rakyat**	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	0,27	Dinas PRKM

e. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: 1) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar; 2) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan; 3) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar; 4) setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); 5) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan

trantibum; 6) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Tabel IV.17

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	Kesbangpol
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	Kesbangpol
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7	Kesbangpol
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	45	Kesbangpol
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	50	Kesbangpol
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	Satpol PP
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PP

f. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial (pemerintah provinsi): 1) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga, setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 2) rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 3) rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga, setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 4) rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga, setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga: 5) pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Tabel IV.18

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	Dinsos
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti					Dinsos
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti					Dinsos
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti					Dinsos
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial**	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28	UPTD Panti Sosial
			Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan	80,62	UPTD Panti Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pelayanan Panti Sosial		
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0,19%	Diskepora
				Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4,02%	Diskepora
				Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2,67%	Diskepora
			Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	80%	Biro Kesra
				Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	Biro Kesra
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,28	Disnaker
				Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10,64	Disnaker
				Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8,62	Disnaker
				Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,78	Disnaker
		Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22,84	Dinsos
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan	17	Dinsos

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				peranan dan fungsi sosial		
				Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanaan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15,63	Dinsos
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37,97	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,43	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	Diskominfo
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	Dinas Sosial
		Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	Dinsos
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu	18,28	UPTD Panti Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2020				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Panti Sosial	melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial		
			Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62	UPTD Panti Sosial
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	Dinas Sosial
		Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase korban nazpza	21,28	Dinas Sosial

4.2.8. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah pada kondisi yang lebih baik dalam arti ekonomi, sosial budaya dan politik. Upaya pengentasan kemiskinan mencakup banyak bidang, seperti tren kemiskinan, bantuan sosial, jaminan sosial, program berbasis masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.19

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64%	Dinsos

NO.	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		miskin				
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54%	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	100%	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27%	Dinsos
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	Disperindag
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08%	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	Diskominfo
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	Disnaker

NO.	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
.....				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3	Disnaker

4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Semakin meningkatnya angka penganguran menjadi salah satu masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini menjadi alasan utama bertambahnya angka pengangguran. Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.20

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penciptaan Lapangan Kerja	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	Disnaker
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,24%	Disperindag
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	Diskepora
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,84%	DKP
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,16%	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari	35%	Diskominfo

NO.	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				kerja		
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	95,51%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	14%	Dinas PUPR
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUKM
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	Dinas PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24%	Dinas PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase perempuan yang bekerja	7,52%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

4.2.10. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Revolusi Mental

Pembangunan Revolusi Mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan revolusi mental merupakan kebijakan nasional yang termuat di dalam sasaran RPJMN 2015-2019 dan bersifat lintas bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pengukurannya menggunakan indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu (sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental). Untuk itu pembangunan revolusi mental menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.21

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	Bakuda
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	3 Unit	Biro Organisasi
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	N.A	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	81,97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	81,97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	81,97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	81,97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Dinas KUKM	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT DINAS KUKM	94%	DINAS KUKM

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
.....			**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis**	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (75%)	RSUP
			Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pelayanaan Teknis Medik Kejiwaan	85%	RSJ
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	N.A	UPTD Dinkes
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	Biro Pemerintahan
				Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	100%	Biro Pemerintahan
				Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	100%	Biro Pemerintahan
			Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	N.A	Biro Pemerintahan
			Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	83%	Biro Pemerintahan
			Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20%	DKPus
			Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	378	DKPus
				Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan	400	DKPus

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan pengunjung perpustakaan	12,500	DKPus
			Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan	160	DKPus
			Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase masyarakat yang memanfaaatkan layanan interaktif	40%	Diskominfo
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	60%	Diskominfo
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	50%	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	60%	Kominfo
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan	20%	Kominfo
			Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	**Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan**	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	92%	Bkpsdm
				Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	93%	Bkpsdm
				Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	83%	Bkpsdm
			Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Asn	Persentase ASN yang menerima penghargaan	2,21%	Bkpsdm
				Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	0.13%	Bkpsdm
				Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	76%	Bkpsdm
				Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	90%	Bkpsdm
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	60%	Bkpsdm

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
.....				Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	41.90%	Bkpsdm
				Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	97%	Bkpsdm
				Nilai akreditasi Diklat	81%	Bkpsdm
			Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Asn	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaiaan	40,40%	Bkpsdm
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	**Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi**	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	Biro Humas
			Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan It	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100%	Biro Humas
			Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100%	Biro Humas
			Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
				Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
				Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	Setwan
				Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	77%	Setwan
		Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	**Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	90%	Biro Hukum

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	90%	Biro Hukum
			Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	90%	Biro Hukum
			Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80%	Setwan
		Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	N.A	Kesbangpol
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	Kesbangpol
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7	Kesbangpol
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	45%	Kesbangpol
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	50%	Kesbangpol
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6.05%	Satpol PP
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16.23%	Satpol PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PP

4.2.11. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik atau kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 88,37 pada tahun 2015 menjadi 88,90 pada tahun 2016 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 56,12 pada tahun 2014 menjadi 56,29 pada tahun 2015. Untuk itu pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.22

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Gender	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase perempuan yang bekerja	7.52	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3.58%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
	Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	35,47%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0.42%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Persentase Kab/Kota Layak Anak	57,14%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

NO.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Gender	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
.....			**Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil**	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	28,79%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

4.2.12. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial. Modal sosial budaya tampak dalam keseharian, seperti; sifat kekeluargaan, sifat saling menolong, bantu-membantu; kesetia-kawanan sosial; bentuk-bentuk koperatif; saling percaya antar sesama; semua tampak dalam perilaku dan tindakan social, yang terdiri dari lembaga-lembaga sosial; etika sosial dan etika lingkungan, kekayaan dan keragaman budaya serta kearifan lokal.

Tabel IV.23

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Modal Sosial Budaya	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pembangunan Inklusif berwawasan budaya	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	Diskepora

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Modal Sosial Budaya	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	Diskepora
			Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	Disbudpar
2	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelestarian Lingkungan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
			Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	25%	DLH
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	32,50%	Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Hutan	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola	5 Kawasan	Dinas Kehutanan
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	12%	Dinas ESDM
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	0,62	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	0,6364	Dinas ESDM
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	0,02	Dinas ESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	Dinas ESDM

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Modal Sosial Budaya	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
3	Mengembangkan Produk dan jasa berbasis seni, Budaya dan Inovasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	0,05%	Dinas Budpar
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	25%	Dinas Budpar
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	25%	Dinas Budpar

4.2.13. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang tinggi, yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Pada akhirnya *digital transformation* merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat. Memasuki era revolusi Industri 4 atau *Industry 4.0.* Transformasi digital mutlak diperlukan karena pengguna digitalisasi merupakan sarana utama yang harus digunakan baik di tingkat pemerintah maupun swasta dalam persaingan teknologi dan perdagangan. Untuk tataran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu untuk memunculkan arah kebijakan dan program pendukung penggunaan digitalisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasinya.

Tabel IV.24

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaan Transformasi Digital RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Transformasi Digital	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86,00%	Dinas Kominfo

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Transformasi Digital	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	60,00%	Dinas Kominfo
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pemerintah dan pelayanan masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat	94%	Biro ULP
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan	96%	Biro ULP
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Penggunaan e-Procrument terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat	46,00%	Biro ULP
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Big Data	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	**Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi**	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100%	Biro Humas
			Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100%	Dinas PPA, Dukcapil Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	14,28%	Dinas PPA, Dukcapil Pengendalian Penduduk KB

4.2.14. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Lintas Bidang Kerentanan Bencana

Tabel IV.25

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Kerentanan Bencana RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaam Pembanguna Lintas Bidang Kerentananan Bencana	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	86,00%	BPBD
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	Satpol PP
2	Mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat melalui pengembangan teknologi peringatan dini sederhana yang dapat dimanfaatkan langsung dan dipelihara oleh masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	86,00%	BPBD
			Program Pengembangan Informasi dan komunikasi	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	Dinas Kominfo
3	Mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil,	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan cadangan pangan**	Persentase Cadangan Pangan	2,80%	Dinas Pangan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20,00%	Dinas Sosial

4.2.15. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran hutan, yang berakibat menumpuknya gas-gas seperti koarbon dioksida (CO2), Metana (CH4) dan nitro Oksida (N2O) pada atmosfir. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas atau lebih dikenal dengan istilah Gas Rumah Kaca. Untuk menurunkan efek dari gas rumah kaca, pemerintah provinsi focus pada penurunan gas rumah kaca dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan efek gas rumah kaca dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel IV.26

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
			Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	25%	DLH
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	5%	DLH
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		Dinas Kehutanaan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB Laboratorium Lingkungan
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	12%	Dinas ESDM
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	62%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan	Persentase cadangan air tanah yang	63,64%	Dinas ESDM

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	potensial yang dapat dimanfaatkan		
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	2%	Dinas ESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		Dinas Kehutanan
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	1,2%	Dishub
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20%	Dishub
2	Menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon	Pengembangan TPA Regional	**Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	0,05%	DLH
			Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	25%	Dinas PRKM
				Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional	25%	Dinas PRKM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	1%	Dinas PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	1%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional	N.A	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	50%	Dinas PUPR
				Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	35%	Dinas PUPR

4.2.16. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel IV.27
Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	Bakuda
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	3 Unit	Biro Organisasi
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	N.A	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	81.97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	81.97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	81.97%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	81.97%	Dinas Pendidikan

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Dinas KUKM	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT DINAS KUKM	94%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (75%)	RSUP
			Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pelayanaan Teknis Medik Kejiwaan	90	RSJ
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	N.A	UPTD Dinkes
2	Meningkatkan kapasitas birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	Biro Layanan Pengadaan
			Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	Biro Pemerintahan
				Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	100%	Biro Pemerintahan
				Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	100%	Biro Pemerintahan
			Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	N.A	Biro Pemerintahan
			Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar	83	Biro Pemerintahan

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				negeri yang diimplementasikan		
			Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20%	DKPus
			Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	378	DKPus
				Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan ;	400	DKPus
				Pertambahan pengunjung perpustakaan	12.500	DKPus
			Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	160	DKPus
			Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase masyarakat yang memanfaaatkan layanan interaktif	40%	Kominfo
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	60%	Kominfo
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	50%	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	60%	Kominfo
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan	20%	Kominfo
			Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

4.2.17. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari. Fokus pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai dapat diukur melalui pencapaian sasaran meningkatnya pengendalian lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas air sungai, Indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dengan arah kebijakan (1) Pengendalian kualitas air, (2) Pengendalian kualitas udara dan (3) Peningkatan tutupan lahan.

Tabel IV.28

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian Sumber Daya Alam	Pengendalian kualitas air sungai	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	Dinas Kehutanan
		pengendalian kualitas udara	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	Dinas Kehutanan
		Peningkatan tutupan lahan	**Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem**	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Perhutanan Sosial	**Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	Dinas Kehutanan

4.2.18. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan

Arah kebijakan dalam pemerataan antar kelompok pendapatan pada tahun 2019 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin untuk sasaran menurunnya angka Kemiskinan. Sedangkan untuk sasaran menurunnya angka pengangguran diintervensi melalui arah kebijakan (1)

Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja, (2) Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan. Untuk keselarasan arah kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.29

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	Disnaker
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,24%	Disperindag
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	Diskepora
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,84%	DKP
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,16%	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	35%	Diskominfo
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	20%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	5,24%	Dinas PUPR
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	10,20%	Dinas KUKM

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	6,84%	Dinas PMD
				Persentase KPM yang aktif	1,16%	Dinas PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase perempuan yang bekerja	35%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64%	Dinsos
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54%	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	100%	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27%	Dinsos
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	Disperindag
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08%	Dinas Pertanian

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	Kominfo
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	Disnaker
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3	Disnaker

4.2.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Energi

Pembangunan energi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung hanya difokuskan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan kewenangan provinsi, sedangkan untuk energi primer (minyak dan gas) menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga agak sulit bagi provinsi untuk mengembangkan ketahanan energi di wilayahnya. Untuk pengembangan EBT permasalahan yang dihadapi adalah masih sulit dan mahalnya teknologi yang akan digunakan seperti energi *hydro* (air) sedangkan energi geotermal atau panas bumi terkendala kecilnya potensi yang di miliki Provinsi Bangka Belitung, untuk energi nuklir (*thorium*) masih dalam kajian sehingga untuk EBT hanya dapat menggunakan tenaga surya dengan jumlah penggunaan yang masih terbatas. Namun untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat tahun 2020 terkait ketahanan energi pemerintah provinsi menentukan arah kebijakan dan program yang mendukung ketahanan energi seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.30

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Energi RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Energi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	**Program Pengembangan Sumber Daya Energi**	Persentase penggunaan EBT	6,84%	Dinas ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	65%	Dinas ESDM

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Energi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	65%	Dinas ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	Biro Ekonomi

4.2.20. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 17. Fokus ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah (1) Peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti padi dan tanaman holtikultura sebagai salah satu tujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan kebutuhan pokok dari luar, (2) Menjaga angka inflasi yang stabil pada kisaran 4%-5% melalui distribusi bahan pangan yang terjaga terutama beras. Untuk itu arah kebijakan dan ketahanan pangan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.31

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Pangan RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	1	Dinas Pertanian
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	Dinas Pertanian
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	Dinas Pertanian
				Persentase Kelembagaan pertaniaan aktif	10	Dinas Pertanian

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	785.000	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	785.000	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	175	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1.750	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	75.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	6	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	8.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	25	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD Balai Benih Pertanian
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	47.017	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	46.628	Dinas Pertanian
				Peningkatan produksi karet	61.407	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	15.838	Dinas Pertanian

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	13.312.700	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	Dinas Kehutanan
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	Dinas Kehutanaan
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dok	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yamg dapat diakses masyarakat	35%	Kominfo
	Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	18	Disperindag
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	25	Disperindag
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	50	Disperindag
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862.000	Disperindag
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	89	Disperindag
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan	12	Disperindag
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	40	Disperindag
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	Disperindag
				Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	10	Disperindag
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi	100%	Biro Ekonomi

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	dengan intervesi program/kebijakan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	30%	Dinas Perhubungan
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	95,51%	Dinas PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	3.113,22	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	3.095,08	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	114,51	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	Dinas Pangan
					CV Cabe≤ 35%	Dinas Pangan
					CV Daging Ayam 10%	Dinas Pangan

4.2.21. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Dunia USAHA dan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata dan peningkatan sumber daya manusia atau tenaga kerja pada sektor pariwisata. Selama lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri berfluktuatif di mana pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 238.405 orang meningkat menjadi 369.422 pada tahun 2017. Di samping kunjungan wisatawan, jumlah hotel berbintang dan non berbintang juga meningkat, tahun 2016 jumlah hotel berbintang sebanyak 135 buah meningkat menjadi 166 buah tahun 2017.

Tabel IV.32

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisataan**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,80%	Budpar
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,50%	Budpar
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		Budpar
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	1,51%	Dinas KUKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,32%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1%	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100%	Dinas Pendidikan
		Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Presentase objek wisata yang terkelola	15%	Budpar
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	30%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	95,51%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	87,00%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kukm	Pertumbuhan produk parekraf	10%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	35%	Kominfo
	Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3%	Disnaker

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15%	UPTDBLKI
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05%	UPTD Balai Produktifitas
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	Dinas KUKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	Diskepora
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	Diskepora
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	Diskepora
			Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	Budpar

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisataan	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	Budpar
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	Disnaker
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,33%	Disperindag
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	3%	Disperindag
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	**Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya**	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	73	Biro Ekonomi
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	N.A	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0,45%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2.22. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

Sesuai dengan misi ke-tiga RPJMD 2017-2022 yaitu mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah maka pada tahun 2019 arah kebijakan pembangunan infrastruktur masih fokus pada (1) Penyediaan sarana dan prasana pada pelayanan dasar, (2) Penyediaan infrastruktur pada sektor unggulan seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menuju kawasan wisata serta meningkatkan sarana penunjang penggunaaan internet ke daerah terpencil (3) Penyediaan sarana irigasi dan air baku untuk peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.33

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Konektivitas	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	75	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				(RTRWP)		
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	20%	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	56%	Dinas PRKM
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	63%	Dinas PRKM
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	50%	Dinas PRKM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%	Kominfo
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	**Program Pengembangan Perhubungan Laut**	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	1%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	**Program Pengembangan Perhubungan Darat**	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	30%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	**Program Kebinamargaan**	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		Dinas PUPR

4.2.23. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Wilayah

Pembangunan kewilayahan difokuskan pada pengembangan kawasan strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 dan diperkuat pada RPJMD tahun 2017-2022 dengan membagi kawasan strategis ke dalam misi-misi kepala daerah. Untuk fokus tahun 2020 adalah pengembangan kawasan strategis sektor pertanian, bahari, pariwisata dan industri.

Tabel IV.34

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah RKP 2020

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	96,50%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	90%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	1%	Dinas PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	N.A	Disnaker
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	50%	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	93,95%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	86%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan	1	Dinas

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung		Pertanian
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	1	Dinas Pertanian
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	1	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	48%	Disnaker
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	100%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	Dinas Pertanian
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	ada	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	-	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	-	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	1	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
		Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	22.500	DKP
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	270	DKP
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	1%	Dinas KUKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengawasan Koperasi			
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	0	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongokyang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	3	Disperindag
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	75%	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1%	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	**Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanaan selat nasik	163	DKP
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	35.000	DKP
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	1%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang	0	Dinas KUKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Usaha Kecil	mendapatkan Izin Uaha		
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	2	Disperindag
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	1%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	1%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik		Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	75	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	1%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	0	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	35%	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	50%	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	98%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	96%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	13.125	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	30%	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	75	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	4.375	DKP
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		Dinas KUKM
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	25%	Dishub
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	30%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		Dishub
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan	50	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan	1%	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				strategis ASDP Manggar dan Ketapang		
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	1%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan	ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang		Dishub
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	33%	Budpar
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	33%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	25%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	96,44%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	90,00%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	100	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	10%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata	1%	DinasPUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang		
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	1%	DinasPUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	75	DinasPUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	30%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	Budpar
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	1%	DinasPUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	1%	DinasPUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan	50	DinasPUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	ada	DLH
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan	50	DinasPUPR
			Program	Persentase sarana dan	30%	Budpar

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Destinasi Pariwisata	prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba		
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	10%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	2%	DinasPUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	2%	DinasPUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	50%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	30%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	15%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	DinasPUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	DinasPUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	50%	DinasPUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	30%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	5%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	2%	DinasPUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	2%	DinasPUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	92,25%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	83,00%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	35%	Dinas PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	50%	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	75,00%	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	4%	Dishub
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	1%	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	35%	Dinas PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	50%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	25%	Dishub
		Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	Dinas PUPR
				Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1%	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	35%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	Disperindag
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	7%	Dishub
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan strategis industri terpadu air kelik	35%	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	50%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	0%	Dishub
		Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	91,78%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	88%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		Dinas Kehutanaan
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	10%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	0%	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	**Program Kebinamargaan**	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	Dinas PUPR
				Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	Dinas PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	5%	Dinas PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	0%	Dishub
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai	1%	Dinas PUPR
				Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	25%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	50%	Disperindag
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	7%	DLH
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	30%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	Dinas PUPR
				Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	160	DKP
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	3.000	DKP
			Program	Persentase koperasi aktif	1%	Dinas KUKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu		
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	10%	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	Disperindag
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	100%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	**Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri**	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	1	Disperindag

4.2.24. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Tabel IV.35

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	Kesbangpol
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	Kesbangpol

NO.	Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7	Kesbangpol
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	45%	Kesbangpol
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	50	Kesbangpol
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	Satpol PP
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PPP
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	28,79%	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	Kesbangpol
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	**Program Pembinaan Politik Dalam Negeri**	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	60%	Kesbangpol

4.2.25. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tabel IV.36

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan merata	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas**	APK SMA	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21	Dinas Pendidikan
	Menyediakan afirmasi pendidikan	peningkatan mutu layanan pendidikan.	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	Dinas Pendidikan
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	Diskepora

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	Diskepora
			Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPus
			Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;		DKPus
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	Diskepora
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	Diskepora
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		Diskepora
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	Dinas Perhubungan
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	Kominfo
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	Kominfo
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	Biro Kesra
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	Biro Kesra

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan
	Meningkatkan Kualitas pembelajaran dan akademik	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**Program Kesehatan Masyarakat**	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	Dinkes
	Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana		**Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	82,83%	Dinkes
	Mempercepat penurunan stunting		**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda Dan Pariwisata**	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	50 sekolah	Biro Kesra
	Mencegah dan pengendalian penyakit		**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	Biro Kesra
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	35%	Kominfo
			Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	Dinas Pangan
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	Dinas Pangan
			Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	Dinas Pangan
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	Dinas Pangan

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	Disperindag
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD Hyperkes
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	Diskepora
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas		Dishub
	Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan	peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	**Program Pelayanan Kesehatan**	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	85,60%	Dinkes
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	17	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	85%	RSUP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)	6-9 hari	RSUP
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	85%	RSUP
			Program Badan Layanan Umum Daerah RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar	95	RSJ
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	100	RSJ
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
				Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
			Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanaan langsung	85	RSJ

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				kemasyarakat		
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanaan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	35%	Kominfo
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	88,26%	Dinkes
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
				Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100%	Dinas Pendidikan

4.2.26. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Sumber Daya Air

Tabel IV.37

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air RKP 2020

NO.	Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	75	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	20%	Dinas PUPR

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Dengan adanya perubahan paradigma penganggaran dari prinsip *money follow fuction* menjadi *money follow priority program* dan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan melalui pembangunan lintas bidang 2017-2022, maka pada tahun 2020 dilakukan pendekatan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam proses perencanaan.

Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik-tematik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan 8 prioritas lintas bidang provinsi menjadi fokus. Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi sasaran dan indikator sasaran pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan perangkat daerah penanggung jawab program sebagai fokus pendekatan.

Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.

Adapun poses dan tahapan implementasi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut.

4.3.1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.38 berikut.

Tabel IV.38
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran		Indikator Sasaran		Terget	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3	4	
1	Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	4,9	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan
					a	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
					2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian,

Sasaran	Indikator Sasaran	Terget	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
			a Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan
			b Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
			c Pembinaan hubungan industri sektor pertaniaan
			d Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor pertaniaan
			e Pengembangan produk pertaniaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
			f Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
			a Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
			b Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
			c Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
			d Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor

pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program, baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.39 berikut.

Tabel IV.39
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas
Pengembangan Pembangunan Agropolitan

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	**Arah Kebijakan**	**Program Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)**	**Target 2020**	**Perangkat Daerah**
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	**Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian**	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	1	Dinas Pertanian
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	**Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian**	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	Dinas Pertanian
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	Dinas Pertanian
				Persentase Kelembagaan pertaniaan aktif	10	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	785.000	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	785.000	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	175	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1.750	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman**	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	75.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	6	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	8.000	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	25	UPTD Balai Benih Pertanian
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD Balai Benih Pertanian
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	47.017	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan produksi lada	46.628	Dinas Pertanian
				Peningkatan produksi karet	61.407	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	15.838	Dinas Pertanian
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	13.312.700	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	Dinas Kehutanan
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	Dinas Kehutanan
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dok	DLH
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yamg dapat diakses masyarakat	35%	Kominfo

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	0,17	UPTDBLKI
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	21	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD Balai Produktifitas
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang memiliki akreditasi A	100	Dinas Pendidikan
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	Dinas KUKM
				persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	4,68%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,36%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Pembinaan hubungan industri sektor pertaniaan	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	Disnaker
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	Dinas KUKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		sektor pertaniaan				
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	43,48%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,44%	Disperindag
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	2	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
		Pengembangan produk pertaniaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian	**Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	75	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....			**Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	3	Dinas KUKM
				persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0,45%	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	90	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DinasKUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan	**Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat**	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	42%	Dinas PMD
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	40	Dinas PMD
			Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	Dinas Pertanian

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
.....		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	Dinas Pertanian
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	95,50%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	90%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	Dinas PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	N.A	Disnaker
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	50%	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	93,95%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	86%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	1	Dinas Pertanian
				Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu	1	Dinas Pertanian

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2020			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				mandiri Gantung		
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	1	Dinas Pertanian
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	1	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	48%	Disnaker
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	100%	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.40 berikut.

Tabel IV.40

Stakeholder yang mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Terget	Strategi yang perlu Dukungan dari Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya produksi subsektor pertanian,	1 Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor	4,9	1 Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah	Lembaga Swadaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sasaran	Indikator Sasaran	Terget	Strategi yang perlu Dukungan dari Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
peternakan, dan pekerbunaan	pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan		pertanian berkelanjutan	
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

4.3.2. Pembangunan Bahari

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya produksi subsektor perikanan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.41 berikut.

Tabel IV.41
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Bahari

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatnya produksi subsektor perikanan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor perikanan	4.1	1 Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
			a Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
			a Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan
			b Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			sektor Kelautan dan perikanaan
		c	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan
		d	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan
		e	Pengembangan produk Kelautan dan perikanaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan
		3	Mengembangakan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
		a	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
		b	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
		c	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
		d	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.42 berikut.

Tabel IV.42

Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Bahari

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
1	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	**Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut**	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	825,077	DKP
			Persentase sarana dan	2.13	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
			prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		
			Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	75%	DKP
		Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75%	DKP
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	18%	Dishub
2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanaan yang berkompetensi	0,15%	UPTDBLKI
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	21,3%	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanaan	0,12%	UPTD Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100%	Dinas Pendidikan
3	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi**	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	-	Dinas KUKM
			persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difaslitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	3%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	0.71%	Disperindag
		Program Pengembangan	Volume Produksi Perikanan	216	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
		Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Budidaya (Ton)		
			Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	55	DKP
			Volume Produksi Olahan (ton)	21,610	DKP
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	219.300	DKP
			Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	110	DKP
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	10,59	UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0,07	UPTD Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0,36	UPTD Balai Benih Ikan Sentral (Bbis) Pemali
4	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6%	Disnaker
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanaan yang berkualitas sesuai standar	3.60%	Dinas KUKM
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	88%	UPTD Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
6	Pengembangan produk Kelautan dan perikanaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan.	**Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanaan yang bermitra dengan investor	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman	Pertambahaan Jumlah Investor sektor kelautan dan	2	Dinas Penanaman Modal Dan

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
		Modal	perikanaan		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.45%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	Dinas KUKM
			pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelauatan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	150	Dinas KUKM
7	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	22.500	DKP
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	270	DKP
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	1%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	0	Dinas KUKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongokyang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DinasKUKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	3	Disperindag
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	75%	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1%	Dinas PUPR

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
8	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	**Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanaan selat nasik	163	DKP
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	35.000	DKP
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	1%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	0	Dinas KUKM
			Persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	2	Disperindag
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	1%	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	ada	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik		Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	75%	Dinas PUPR
9	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	1%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	0	Dinas KUKM
			Persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di	35%	Dinas PUPR

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
			kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga		
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	50%	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	98%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	13.125	DKP
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	30%	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	75%	Dinas PUPR
10	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	4.375	DKP
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	25%	Dishub

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.43 berikut.

Tabel IV.43

Stakeholder yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Bahari

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1		2	3	4		
1	Meningkatnya produksi subsektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor perikanan	4.1	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Lembaga Swadaya Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	
		2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
		3	Mengembangakan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

4.3.3. Pengembangan Pariwisata

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.44 berikut.

Tabel IV. 44
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020	Strategi	
1		2		3	4	
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunaan pariwisata
					a	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
					b	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
					c	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
					d	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Strategi
1	2	3		4
				olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan
			e	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
			f	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan
			g	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
			1	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
			a	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
			b	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
			c	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
			d	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
			e	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
			f	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
			g	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
			h	Pengembangan Kawasan

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Strategi
1	2	3	4
			Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
		3	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		a	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
		b	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.45 berikut.

Tabel IV. 45

Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
2	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisataan**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,80%	Budpar
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,50%	Budpar
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		Budpar
			Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	1,51%	Dinas KUKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,32%	Dinas KUKM

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha		Dinas KUKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	Dinas KUKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100%	Dinas Pendidikan
		Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Presentase objek wisata yang terkelola	15%	Budpar
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	30%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	95,51%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	87,00%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kukm	Pertumbuhan produk parekraf	10%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	35%	Kominfo
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3%	Disnaker
			Program	Persentasepencari kerja	0,15%	UPTDBLKI

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	pariwisata yang mendapat pelatihan		
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05%	UPTD Balai Produktifitas
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66%	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	Dinas KUKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	Diskepora
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	Diskepora
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	Diskepora
			Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	Budpar
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisataan	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	Budpar
		Pembinaan hubungan industri dan	**Program Peningkatan Pengawasan**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa	1,6	Disnaker

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan kerja disektor pariwisata	**Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan		
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,33%	Disperindag
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	3	Disperindag
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	**Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya**	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	73%	Biro Ekonomi
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0,45%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Dan Sistem Informasi			Pintu
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	30%	Dishub
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		Dishub
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan	50	Dinas PUPR
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	1%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	ada	Dishub
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	33%	Budpar
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	33%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	25%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	96,44%	Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	10%	Dishub

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang		Tanjung Kelayang		
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	1%	DinasPUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	75%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	30%	Dishub
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	Budpar
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	1%	DinasPUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	1%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	ada	DLH
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan	50%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	30%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	10%	Dishub

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	2%	DinasPUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	50%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	30%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	10%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	DinasPUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	50%	DinasPUPR
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	30%	Budpar
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	5%	Dishub
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	2%	DinasPUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	92,25%	Dinas PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	83,00%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau	35%	Dinas PUPR

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Sumatera		
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	50%	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	75,00%	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	45%	Dishub
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	1%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	35%	Dinas PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	50%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	25%	Dishub

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.46 berikut.

Tabel IV.46
Stakeholder yang Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1		2		3	4		5
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunaan pariwisata	PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
					2	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
					3	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	PHRI, ASITA, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

4.3.4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya produksi sektor pertambangan, meningkatnya pembangunan berbasis industri dan terwujudnya kemandirian energi. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.47 berikut.

Tabel IV. 47

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3	4	
1	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	1	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0.51	1	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
					a	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
					b	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
					c	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
					d	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor sumber daya mineral
					e	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri		Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan		2	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
					a	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
					b	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
					c	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
					d	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
					e	Pengembangan Kawasan

Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2	3	4	
					strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
				f	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
3	Terwujudnya kemandirian energi	Persentase Pertumbuhan Produksi subsektor ketenagalistrikan	19.59	3	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
				a	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.48 berikut.

Tabel IV. 48

Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
1	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	**Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan**	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	65%	Dinas ESDM
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	60%	Dinas ESDM
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	33%	Dinas ESDM
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;		Disperindag
			pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4	Disperindag
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar		Disperindag
2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan**	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber	17.54	Disnaker

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
	daya saing Produk Sumber daya mineral	**Tenaga Kerja**	daya mineral bersertifikat kompetensi		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutaan	00.14	UPTDBLKI
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	00.05	UPTD Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	2.06%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0.18%	UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	0	Dinas KUKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	Dinas KUKM
			persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	2	Dinas KUKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	Dinas KUKM
3	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	04.08	Disnaker
4	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk**	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	00.07	UPTD Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
5	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	72	Biro Ekonomi
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			mineral		
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	79%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	Dinas PUPR
			Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1%	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	1%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	35%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	Disperindag
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	7%	Dishub
7	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	1%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan strategis industri terpadu air kelik	35%	Dinas PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	50%	Dinas PUPR
8	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	91,78%	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	88%	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis		Dinas Kehutanan

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			Ekonomi khusus Tanjung Berikat		
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	10%	Dishub
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	0%	Dinas PUPR
9	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	**Program Kebinamargaan**	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	1%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	35%	Dinas PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	50%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	7%	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	25%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	Disperindag
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
10	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Teluk Klabat	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90.36%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	160	DKP
		Program Pengembangan	Pertumbuhan Produksi	3.000	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
		Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat		
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	10%	Dinas KUKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	Dimas KUKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	Disperindag
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	100%	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
10	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	**Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri**	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	2	Disperindag
11	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	**Program Pengembangan Sumber Daya Energi**	Persentase penggunaan EBT	6.83%	Dinas ESDM
			Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	Dinas ESDM
			Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	60%	Dinas ESDM

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.49 berikut.

Tabel IV.49

Stakeholder yang Mendukung Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0.51	1 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	PT. Timah, Pengusaha Pertambangan, Asosiasi Tambang Timah Rakyat (ASTAMITRA), KADIN

4.3.5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya belanja pemerintah daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.50 berikut.

Tabel IV.50

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase pertumbuhaan pengeluaaran pemerintah daerah	5.65	1 Meningkatakan pendapataan asli daerah
			a Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.51 berikut.

Tabel IV.51

Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2020	
1		2	3	4	5
1	Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24.19%	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	75.81%	Bakuda
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	150%	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	1%	DLH
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	100%	Dinkes
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	15.54%	Bkpsdm
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20%	Dinas PUPR
		Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	20%	UPTD Pengawasan Dan Peralatan Belitung
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	80 Miliar	DinasESDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel	Dinas ESDM
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,7 Miliar	Dinas ESDM
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	420 juta	DKP
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	26,25 juta	UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	165 juta	UPTD Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
		Indikator (Outcome)	Target 2020	
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolahan perhubungan udara	20%	Dishub

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.52 berikut.

Tabel IV.52
Stakeholder yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	
1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhaan pengeluaaran pemerintah daerah	5.65	1 Meningkatakan pendapataan asli daerah	Lembaga Swadaya MasyarakatForum Kajian Kebijakan Pemerintah daerah, KADIN, Kepolisian, Dunia Usaha

4.3.6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah menurunnya angka pengangguran, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka inflasi dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.53 berikut.

Tabel IV. 53
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran	5.6	1 Meningkatkan pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
			a Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3		4
					b	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
2	Menurunnya angka kemiskinan	2	Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
					a	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
					b	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
3	Menurunnya angka Inflasi	3	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
					a	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
					b	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
					a	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.54 berikut.

Tabel IV.54

Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
3	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	Disnaker
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,17%	Disperindag
			Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	Diskepora
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	Diskepora
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,14%	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	Kominfo
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	Dinas PUPR
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	15%	Dinas KUKM
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	Dinas PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	Dinas PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	Dinsos

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	Dinas PRKM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	92	Dinas Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72,07%	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9,47	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18,15	Dinsos
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	Disperindag
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		Disperindag
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	Kominfo
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,08	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		Disnaker
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	Disnaker
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,32	Disnaker
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	**Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrologian**	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	Disperindag
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	Disperindag

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	20	Disperindag
			Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862	Disperindag
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	Disperindag
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan	63	Disperindag
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	Disperindag
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	Disperindag
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervesi program/kebijakan	100%	Biro Ekonomi
			Program Pengembangan Perhubungan Laut	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	20%	Dinas Perhubungan
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	94,51%	Dinas PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2.813,28	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	2.651,13	Dinas Pertanian
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98,11	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DKP
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	Dinas Pangan
					CV Cabe≤ 35%	Dinas Pangan
					CV Daging Ayam 10%	Dinas Pangan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	**Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil**	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	7,48	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				presentase KB MKJP	8,9	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.55 berikut.

Tabel IV.55

Stakeholder yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1		2		3	4		5
1	Menurunnya angka Pengangguran	1	Persentase Angka Pengangguran	5.6	1	Meningkatkan pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	KADIN, Dunia Usaha, Persatuan Wartawan Indonesia (PW
2	Menurunnya angka kemiskinan	2	Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi,	Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Persatuan

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1		2		3	4	5
					partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	Wartawan Indonesia (PWI)
3	Menurunnya angka Inflasi	3	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, KADIN
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Yayasan Babel peduli Dukungan Sebaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

4.3.7. Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah, Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.56 berikut.

Tabel IV. 56

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2020	Strategi	
1		2		3		4
1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	1	Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135	1	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
		2	Ketersediaan air baku (m3)	N,A	2	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku

Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2020	Strategi	
1		2		3	4	
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
		3	Persentase lingkungan yang tertata	34%	3	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
		4	Persentase bangunan yang tertata	38%	4	Meningkatkan penataan kawasan permukiman
					a	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
		5	Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	85%	5	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0,17%	6	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
		2	Persentase armada pengangkutan	0,34%	7	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
		3	Persentase jalan kondisi mantap	94.50	8	Meningkatakan aksesibilitas
					a	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja

program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.57 berikut.

Tabel IV.57
Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	**Arah Kebijakan**	**Program Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)**	**Target 2020**	**Perangkat Daerah**
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	10%	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	Dinas PRKM
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	Dinas PRKM
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	Dinas PRKM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	66%	Kominfo
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	**Program Pengembangan Perhubungan Laut**	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	17%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan, pemeliharaan	**Program Pengembangan**	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan		Dinas Perhubungan

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	**Perhubungan Darat**	perintis lintas kabupaten dalam provinsi		
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	10%	Dishub
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	**Program Kebinamargaan**	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		Dinas PUPR

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.58 berikut.

Tabel IV.58

Stakeholder yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi Yang perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
1 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	1 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135	1 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian	Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, Kelompok TANI
	2 Ketersediaan air baku (m3)	N,A	2 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, PDAM
	3 Persentase lingkungan yang tertata	34%	3 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK
	4 Persentase bangunan yang tertata	38%	4 Meningkatkan penataan kawasan permukiman	Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi Yang perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
	5 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	85%	5 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Provider Telokomunikasi, Balai Loka Monitor
2 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0,17%	6 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	PELINDO, Perusahaan Perkapalan
	2 Persentase armada pengangkutan	0,34%	7 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	Organda
	3 Persentase jalan kondisi mantap	94.50	8 Meningkatakan aksesibilitas	Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK

4.3.8. Pembangunan Pendidikan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.59 berikut.

Tabel IV. 59
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan 2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatanmutu layanan pendidikan. b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			c. Peningkataan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.60 berikut.

Tabel IV.60
Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
			Indikator (out come)	Target 2020	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
1	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas**	APK SMA	38,88%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	38,38%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB		Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	40%	Dinas Pendidikan
			Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	42,42%	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UN SMA	6,5	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	38,60%	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UN SMK	6,5	Dinas Pendidikan
		Program	Persentase SLB	100%	Dinas Pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
			Indikator (out come)	Target 2020	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
		Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	terakreditasi A		
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	Diskepora
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	Diskepora
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	Diskepora
2	peningkatan mutu layanan pendidikan.	**Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan**	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPus
		Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	Diskepora
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	Diskepora
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	Dinas Perhubungan
			Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	Kominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	Diskominfo
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	Biro Kesra
			Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	Biro Kesra

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
			Indikator (out come)	Target 2020	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
		Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	Dinas Pendidikan
3	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	Dinas Pendidikan
4	Peningkataan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	**Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan**	APK sekolah kegamaan		Biro Kesra

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.61 berikut.

Tabel IV.61

Stakeholder yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI
			Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI

4.3.9. Pembangunan Kesehatan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.62 berikut.

Tabel IV.62
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.63 berikut.

Tabel IV.63
Program Pembangunan Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
1		2	3	4	5
1	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**Program Kesehatan Masyarakat**	Persentase status kesehatan masyarakat	72,07%	Dinkes
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77,60%	Dinkes
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	Biro Kesra
		Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	Dinas PRKM

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
1		2	3	4	5
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	Dinas PRKM
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi		Dinas PRKM
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	Dinas PRKM
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi		Dinas PRKM
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%	Dinas PRKM
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi		Dinas PRKM
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%	Dinas PRKM
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	Biro Kesra
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	25%	Kominfo
		Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81	Dinas Pangan
			persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	Dinas Pangan
		Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81,9	Dinas Pangan
			Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	Dinas Pangan
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4,68	Disperindag
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD Hyperkes

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
1		2	3	4	5
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	Diskepora
2	peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	**Program Pelayanan Kesehatan**	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77,12%	Dinkes
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	80%	RSUP
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80%	RSUP
		Program Badan Layanan Umum Daerah RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	90	RSJ
2	peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza**	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	95	RSJ
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
			Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
		Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	80	RSJ
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanaan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	Diskominfo
3	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83,39%	Dinkes
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0	Dinas Pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
1		2	3	4	5
4	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza**	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	Kesbangpol
5	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase korban nazpza	21,28	Dinas Sosial

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel IV.64 berikut.

Tabel IV.64

Stakeholder yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholde	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	IDI, IBI, Badan Pengawas RS

4.3.10. Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan pembangunan berdemokrasi. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.65 berikut.

Tabel IV.65

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Strategi Dan Arah Kebijakan
1	2		3
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
			2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
			3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
	2	Tingkat kematangan Maturitas SPIP	1. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	1. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakanPeningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
Birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Profesionalitas ASN	1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
			a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
			Meningkatkan tata kelola manjemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan integritas, kompetensi dan profesional aparatur

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan
1		2	3
Birokrasi yang memiliki Pelayanan public yang yang berkualitas	1	Unit KerjaBerpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanaan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
	2	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
			a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
			b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
			c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
			d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
			e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
			f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.66 berikut.

Tabel IV. 66

Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
1	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	**Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan**	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	100%	Bakuda
		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100%	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya		Bakuda
			Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	0,34%	Bakuda
		Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	22	Dinas Sosial
2	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	**Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur**	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	7	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	95	Inspektorat
			Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	94	Inspektorat
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
			Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	82	
3	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)	30%	BaPPeda
			Persentase dokumen perencanaaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku		BaPPeda

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	30%	BaPPeda
			Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	30%	BaPPeda
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPD	30%	BaPPeda
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan RKPD	30%	BaPPeda
		Program Perencanaan Sosial,Budaya Dan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	30%	BaPPeda
		Program Penelitian Dan Pengembangan	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	30%	BaPPeda
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3,55	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	3	Bakuda
			Prosentase kesesuain antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	100%	Bakuda
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	85%	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD	9500%	Biro Pembangunan
		Program Perencanaan Setda	Nilai Lakip Setda Provinsi	80%	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbn	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 % pelaksanaan sumber dana APBN	80%	Biro Pembangunan
		Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian	Baik	Kominfo

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	200 data	Kominfo
5	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	**Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	85%	Biro Hukum
			Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	85%	Biro Hukum
		Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	85%	Biro Hukum
		Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80	Setwan
6	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat	92%	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan	94%	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e-Procrument terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat	44%	Biro Layanan Pengadaan
7	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	**Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi**	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	Biro Humas
		Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan It	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	Biro Humas
		Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100	Biro Humas
		Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	100%	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	100%	Badan Penghubung Provinsi

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			dengan arah kebijakan pembangunan daerah		
		Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	Setwan
			Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	76%	Setwan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	75%	Biro Organisasi
8	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan		Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik	46%	Biro Organisasi
			Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatanya	80%	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	B	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	75	Biro Organisasi
9	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	**Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan**	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	87%	Bkpsdm
			Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	92%	Bkpsdm
			Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	74%	Bkpsdm
		Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Asn	Persentase ASN yang menerima penghargaan	2,19%	Bkpsdm
			Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	0,15%	Bkpsdm
			Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	65%	Bkpsdm
			Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	84%	Bkpsdm
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	42%	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	39,90%	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan	96%	Bkpsdm

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			manajerial		
			Nilai akreditasi Diklat	81	Bkpsdm
		Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Asn	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaiaan	30,67%	Bkpsdm
10	Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	Bakuda
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79,29%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79,29%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	79,29%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79,29%	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Dinas KUKM	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT DINAS KUKM	92%	Dinas KUKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	RSUP
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	80%	RSUP
		Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pelayanaan Teknis Medik Kejiwaan	85	RSJ
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap		UPTD Dinkes

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			layanan labkes		
11	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	Biro Pemerintahan
			Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	1	Biro Pemerintahan
			Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	1	Biro Pemerintahan
		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan		Biro Pemerintahan
		Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	75	Biro Pemerintahan
		Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	DKPus
		Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	· Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	350	DKPus
			Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan ;	350	DKPus
			Pertambahan pengunjung perpustakaan	11.500	DKPus
		Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;		DKPus
		Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	30%	Diskominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	40%	Diskominfo
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	25%	Dinas PUPR
		Program Informasi Dan Komunkasi Publik	persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita	60%	Kominfo

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			dengan Informasi yang dipulikasi		
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	14,28	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	71%	Dinas PUPR
			Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi	40%	Dinas PUPR
			Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	70%	Dinas PUPR
12	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	34%	DinasPMD
			Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	Dinas PMD
			Persentase PKK aktif	78%	Dinas PMD
		Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	40%	Dinas PMD
		Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	42%	Dinas PMD
			Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	21 Desa/ Kel	Dinas PMD
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	10	Disnaker
13	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	Dinsos
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28	UPTD Panti Sosial

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
		Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62	UPTD Panti Sosial
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0,19%	Diskepora
			Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4,02%	Diskepora
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2,67%	Diskepora
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan		Dinkes
		Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	80%	Biro Kesra
			Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	Biro Kesra
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		Disnaker
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,28	Disnaker
			Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10,64	Disnaker
			Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8,62	Disnaker
			Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,78	Disnaker
14	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22,84	Dinsos
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	17	Dinsos

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target 2020	
	1	2	3	4	5
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanaan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15,63	Dinsos
15	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37,97	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,43	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak		Dinkes
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67	Dinas Sosial
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	Diskominfo
16	Menjamin hak anak dalam pembangunan	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	N.A	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	Dinas Sosial
		Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,30%	Dinas Kesehatan

4.3.11. Pembangunan Demokrasi

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah peningkatan pembangunan berdemokrasi. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.67 berikut.

Tabel IV.67

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Pembangunan Demokrasi

Sasaran		Indikator Sasaran		Target 2020	Strategi	
1		2		3	4	
1	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	1	Menciptakan iklim berdemokarsi yang kondusif
						Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
						Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
		2	Skor aspek hak-hak politik	81.76	2	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
						Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat
		3	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33	3	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
						Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.68 berikut.

Tabel IV. 68

Program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Demokrasi

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	-	Kesbangpol

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	Kesbangpol
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	Kesbangpol
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	Kesbangpol
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	Kesbangpol
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	Satpol PP
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	Satpol PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%	Satpol PP
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27,77	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk KB
			Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	Kesbangpol
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	**Program Pembinaan Politik Dalam Negeri**	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	50	Kesbangpol
			Program Penelitian Dan Pengembangan	persentase rekomendasi kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	30%	BaPPeda

NO	RKPD 2020					
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Program Perencanaan Sosial,Budaya Dan Pemerintahan	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	30%	BaPPeda

4.3.12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.69 berikut.

Tabel IV.69

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi
1	2	3	4
Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,2	1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
			Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
			Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.70 berikut.

Tabel IV. 70
Program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas
Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
01.00	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	BPBD
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	Dinsos
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	2,7	Dinas Pangan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	15%	Kominfo
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	Dinkes
		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	Satpol PP
		Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	Dinas PUPR
			Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26,80%	DinasPUPR
		Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	51%	DinasPRKM
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,86%	DinasPUPR
			Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,12%	DinasPUPR
		Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	80	RSJ
02.00	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41,40%	Dinas PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40,00%	Dinas PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	49,00%	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	Dinas Kehutanaan
03.00	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		DinasPUPR
			Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	DinasPUPR
		Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		DinasPRKM
		Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	DinasPUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	82%	DinasPUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	DinasPUPR

4.3.13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.71 berikut.

Tabel IV.71

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Lingkungan	1. Indeks Air	57,25	1 Meningkatkan kualitas air
			Pengendalian kualitas air
	2. Indeks Udara	89,9	2 Meningkatkan kualitas Udara
			pengendalian kualitas udara
	3. Indeks Tutupan Lahan	34,9	3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			Peningkatan tutupan lahan
			Pengembangan Perhutanan Sosial
	4. Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	4.203,34	4 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan
			Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel IV.72 berikut.

Tabel IV.72

Program Perangkat Daerah yang mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pengendalian kualitas air	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	Dinas Kehutanan
2	pengendalian kualitas udara	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	Dinas Kehutanan
3	Peningkatan tutupan lahan	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakaan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	1 Dok	DLH
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	Dinas Kehutanan
4	Pengembangan Perhutanan Sosial	**Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	Dinas Kehutanan
5	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
		Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	18%	DLH
		Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0%	DLH
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB Laboratorium Lingkungan
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	13%	Dinas ESDM
			Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	Dinas ESDM
			Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	43%	Dinas ESDM
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40,91%	Dinas ESDM
			Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air		Dinas ESDM
			Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	Dinas ESDM

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		Dinas Kehutanan
		Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Rasio jumlah perusahaan dengan jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup yang diimplementasikan	15 Dok	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	0,70%	Dishub
		Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20,00%	Dishub
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian perencanaan yang bendukung sektor lingkungan hidup yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan Renja PD	30%	BaPPeda
		Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	30%	BaPPeda
6	Pengembangan TPA Regional	**Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	-	DLH
		Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional		DinasPRKM
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional		DinasPRKM
		Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	DinasPUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	0%	DinasPUPR
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan TPA Regional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	30%	BaPPeda
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		DinasPUPR

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	DinasPUPR
			Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	5%	DinasPUPR

4.4. Pagu Indikatif per Prioritas Daerah Tahun 2020

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang telah ditentukan untuk masing-masing Prioritas Pembangunan yang mencakup program dan kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah untuk tahun 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penentuan pagu indikatif untuk masing-masing prioritas pembangunan tahun 20120 dapat dilihat pada Table IV.73 di bawah ini.

Tabel IV.73

Pagu Indikatif per-Prioritas Daerah Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	**Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian**	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Draf Perda	1	1.000.000.000	Dinas Pertanian
		Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	**Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian**	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	Pembangunan jaringan irigasi tersier	Luasan jaringan irigasi pertanian	1.000	3.500.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan jalan produksi pertanian	Jalan produksi pertanian	10	1.200.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan gudang alsintan	Gudang alsintan	10	2.750.000.000	Dinas Pertanian
					Pengembangan optimasi lahan	Luasan peningkatan indeks pertanaman (IP)	1.000	3.250.000.000	Dinas Pertanian
					Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Pengawalan ketersediaan pupuk,pestisida dan alat mesin pertanian	2	700.000.000	Dinas Pertanian
					Penyusunan Rencana Desain Kawasan,dan DED berbasis Demonstration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rencana Desain Kawasan dan DED Agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	Dinas Pertanian
					Audit lahan pertanian	Peta spasial lahan pertanian	10.000	800.000.000	Dinas Pertanian
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian	Petani dan penyuluh dibidang pertanian	3000	900.000.000	Dinas Pertanian
					Fasilitasi asuransi peternakan	Polis asuransi ternak sapi	2.000	200.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Fasilitasi asuransi pertanian	Polis asuransi lahan sawah	4.000	400.000.000	Dinas Pertanian
			Persentase Kelembagaan pertaniaan aktif	Rembug Tani Nasional	Rembug Tani Nasional (Event)	1	250.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Penyuluh pertanian	300	1.350.000.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Pengawasan dan pembinaan produsen benih yang mengedarkan benih	47	230.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian	Jumlah benih pangan yang tersertifikasi	175	200.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
					Jumlah benih hortikultura yang tersertifikasi	1.750	0	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
					Jumlah benih perkebunan yang tersertifikasi	1.570.000	0	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	Penilaian kultivar/ varietas unggul lokal	Jumlah varietas unggul lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	250.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	UPTD BPSMB (UPTD)	1	200.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	Pembinaan produsen benih	Jumlah komoditas terbina	3	200.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5	270.000.000	Uptd Balai Proteksi Tanaman Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	UPTD Balai Proteksi Tanaman	1	350.000.000	Uptd Balai Proteksi Tanaman Pertanian
				Penyediaan peralatan laboratorium pestisida	peralatan laboratorium pestisida untuk pengujian pupuk	0	0	Uptd Balai Proteksi Tanaman Pertanian
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah bibit lada	75.000	0	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan bibit karet	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah bibit karet	40.000	0	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah benih padi	6	1.650.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Jumlah bibit ayam	8.000	900.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Jumlah bibit sapi	25	0	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	Integrasi jagung dan sapi	Alat pengolah pakan	0	0	Uptd Balai Benih Pertanian
					Luasan tanaman jagung	10	75.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
					Gudang pakan ternak silase	0	0	Uptd Balai Benih Pertanian
				Pembangunan akses informasi perbenihan	sistem informasi perbenihan (Dokumen)	1	250.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	Penanganan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah luasan areal terserang OPT yang tertangani	100	800.000.000	Dinas Pertanian
				Fasilitasi penerapan budidaya padi	Penerapan budidaya padi	2.000	750.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Produksi Cabai (120 Ton) dan Bawang Merah (20 Ton)	32	1.450.000.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	Pelaksanaan GP-PTT tanaman padi (400 Ha) dan jagung (200 Ha)	800	2.500.000.000	Dinas Pertanian
				Pengelolaan sistem penyediaan benih bermutu	Jumlah benih komoditi pangan	200	650.000.000	Dinas Pertanian
				Penerapan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) komiditi pangan	Jumlah Kelopok tani yang mengikuti SL - PHT	10	700.000.000	Dinas Pertanian
				Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	3	70.000.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Jumlah komoditas hortikultura lokal yang unggul (Ha)	30	1.000.000.000	Dinas Pertanian
				Registrasi kebun pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan hasil	Jumlah pelaku usaha/kelompok tani yang kebunnya teregistrasi	30	450.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan produksi lada	Intensifikasi tanaman perkebunan	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	1.500	6.000.000.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan model klaster/kawasan agribisnis lada putih	Pengembangan model klaster/kawasan agribisnis lada di kabupaten/kota	1	1.500.000.000	Dinas Pertanian
				Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman perkebunan	Kelembagaan pekebun lada dan karet	400	1.000.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan kelembagaan perbenihan	Lembaga yang bergerak dalam usaha perbenihan tanaman lada	6	120.000.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan sumber benih unggul perkebunan	Pengembangan kebun sumber lada di 6 kabupaten	6	900.000.000	Dinas Pertanian
				Sekolah lapang iklim (SLI) lada	Sekolah lapang iklim di tingkat lapang	6	570.000.000	Dinas Pertanian
				Penanganan organisme Pengganggu Tanaman perkebunan	penerapan penanggulangan OPT perkebunan	300	500.000.000	Dinas Pertanian
				Sekolah lapang pengamatan hama terpadu (SLPHT) lada	SLPHT lada	15	1.425.000.000	Dinas Pertanian
				Penanganan gangguan usaha pencegahan kebakaran lahan kebun dan konflik perkebunan	operasional brigade proteksi	2	120.000.000	Dinas Pertanian
				Peremajaan tanaman perkebunan	peremajaan tanaman perkebunan di kabupaten	400	6.000.000.000	Dinas Pertanian
				Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Perluasan tanaman perkebunan pada kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	50	950.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah kelompok penerima bantuan (sapi dan unggas)	20	17.000.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Meningkatnya fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan	1	450.000.000	Dinas Pertanian
				Pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan (Surat izin)	450	175.000.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Jumlah izin usaha hasil hutan kayu (Izin)	12	330.000.000	Dinas Kehutanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	2	500.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah izin pemanfaatan kawasan	14	500.000.000	Dinas Kehutanaan
				Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Jumlah expo/promosi hasil hutan yang diikuti	1	650.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	Jumlah Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	0	0	Dlh
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yamg dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola		300.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Kominfo
	Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan			Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Kominfo
	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pertaniaan	2 paket	250.000.000	Upd Blki

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pertanian							
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja pertaniaan bersertifikat kompetensi	80 orang	420.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perkebunan	30 orang	57.857.000	Uptd Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		127.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		83.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even pameran lokal dan /atau nasional		131.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi produktif yang siap melakukan expor-impor atau perdagangan antar pulau		65.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		93.000.000	Dinas Kumkm
				Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		60.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		40.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang dapat menggunakan aplikasi pengolah data koperasi		61.998.000	Dinas Kumkm
				Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		148.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		76.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		72.000.000	Dinas Kumkm
			persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		22.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		31.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even pameran lokal dan /atau nasional		32.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi produktif yang siap melakukan expor-impor atau perdagangan antar pulau		65.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		25.000.000	Dinas Kumkm
				Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		30.142.000	Dinas Kumkm
					Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		40.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang dapat menggunakan aplikasi pengolah data koperasi		25.000.000	Dinas Kumkm
				Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		90.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		30.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		20.000.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	0	409.500.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0	1.105.545.280	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	Pembinaan hubungan industri sektor pertaniaan	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan,**	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan perkebunan dan pertanian yang diperiksa dan dibina	50 perusahaan	41.554.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	pemeriksaan perusahaan					
	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor pertaniaan	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	11	114.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	6	82.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	22.000.000	Dinas Kumkm
			persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan penyusunan regulasi internal	20	40.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	20	40.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis SOP koperasi	10	40.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi	10	45.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis tentang partisipasi keanggotaan koperasi	10	28.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	28.350.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang melakukan kerja sama dengan lembaga lain	5	45.650.000	Dinas Kumkm
				Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan	15	35.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah calon penerima penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional	2	48.800.000	Dinas Kumkm
					jumlah calon penerima penghargaan tokoh penggerak koperasi	2	48.800.000	Dinas Kumkm
					Rapat koordinasi peran dekopinwil	1	35.400.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	25.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengawas/pembina koperasi yang mendapatkan pembekalan mengenai penilaian kesehatan KSP/USP	10	25.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi (pengawas) yang mendapatkan bimbingan teknis mengenai teknik pengawasan koperasi	15	50.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian koperasi berkualitas	30	90.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan/pemeriksaan (KSP/USP)	20	75.000.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	200	900.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	Fasilitasi Teknologi Industri	Jumlah Website	1 website	200.000.000	Disperindag
				Peningkatan kemampuan teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah teknologi Tepat Guna	4 TTG	200.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium	Jumlah ruang lingkup	4	150.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Pembelian alat laboratorium UPTD BSPM	jumlah alat (unit)	10	500.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Jejaring kerjasama antar lab	jumlah laporan	1	65.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Pelatihan teknis personil laboratorium UPTD BSPM	jumlah personil (aparatur)	12	129.712.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Monitoring Mutu Pengujian	jumlah laporan	1	250.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sosialisasi mutu produk unggulan daerah	jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)	50	200.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Jejaring kerjasama antar lab	jumlah laporan	1	65.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Peningkatan Pelayanan pemerintah UPTD BSPM	jumlah orang (aparatur)	23	945.195.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Monitoring Mutu Pengujian	jumlah laporan	1	250.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
				Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium	Jumlah ruang lingkup	4	150.000.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
	Pengembangan produk pertaniaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	**Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah (SIPID)				Terpadu Satu Pintu
				Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM pertaniaan yang bermitra dengan investor	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	1 umkm	225.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop	1 kali	125.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10 peserta	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2 calon investor	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	2 pameran sektor pertanian	265.796.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor pertanian	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Promosi investasi melalui media massa	Jumlah media massa untuk informasi investasi	2 media massa sektor pertanian	235.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor pertanian	62.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	25 Perusahaan Sektor Pertanian	140.183.310	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	15 perusahaan sektor pertanian	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor pertanian	43.750.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Bimbingan dan Fasilitasi Penyelesaian masalah Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kasus penyelesaian masalah di bid. Penanaman modal	1 Permasalahan sektor Pertanian	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah perusahaan bermasalah yang difasilitasi	1 Perusahaan Sektor Pertanian	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pintu
		Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	100	120.000.000	Dinas Kumkm
			persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	10	175.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan IUMK	500	50.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	5	310.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	35	50.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi	10	40.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			akses permodalan		dan pendampingan akses permodalan			
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan	**Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat**	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan	5 Peserta	894.478.497	Dinas Pmd
					Jumlah Peserta workshop TTG yang hadir	30 Orang		Dinas Pmd
					Jumlah alat TTG yang diberikan kepada POKMAS	10 Alat		Dinas Pmd
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Kajian mutu beras dalam peningkatan mutu beras di provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah pelaku usaha yang di kaji mutu hasil produksi (Pelaku usaha.kelompok tani)	30	400.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan penerapan penanganan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen berkualitas baik (Kelompok tani)	5	1.500.000.000	Dinas Pertanian
				Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya saing	Jumlah promosi produk pangan dan hortikultura (Kegiatan)	3	300.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan pelayanan informasi pasar pada produk tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaku usaha/kelompok tani yang meningkatnya informasi pasar (Pelaku usaha/kelompok tani)	50	700.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	81	9.600.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan (Unit)	12	2.100.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	pemasaran komoditas strategis perkebunan (%)	100	500.000.000	Dinas Pertanian
				Pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP)	pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP) (Unit)	48	3.000.000.000	Dinas Pertanian
				Standarisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan	standarisasi dan standar mutu hasil perkebunan (%)	89	450.000.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan pengolahan tanaman perkebunan	pengembangan pengolahan tanaman perkebunan (Unit)	12	1.200.000.000	Dinas Pertanian
				Pelayanan informasi pemasaran hasil perkebunan	informasi pemasaran hasil perkebunan (Dokumen)	36	850.000.000	Dinas Pertanian
				Fasilitasi pengembangan akses pasar	fasilitasi pengembangan akses pasar (Unit)	1	1.500.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	20	1.700.000.000	Dinas Pertanian
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan (Kontes Ternak)	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan (%)	100	400.000.000	Dinas Pertanian
				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular/zoonosis pada ternak (%)	100	500.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengawasan mutu hasil ternak (Kesmavet)	Terlaksananya pengawasan mutu hasil ternak (Pelaku usaha)	120	300.000.000	Dinas Pertanian
				Pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak / pupuk kompos / organik	Terlaksananya pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak / pupuk kompos / organik (Kelompok)	30	500.000.000	Dinas Pertanian
	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya padi	700	700.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya cabai	30	1.500.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya bawang merah	15	500.000.000	Dinas Pertanian
			Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	Pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik di KTM Batu Betumpang	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	7	70.000.000	Dinas Pertanian
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di kawasan KTM batu betumpang	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di kawasan KTM batu betumpang	5 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun di kawasan KTM batu betumpang	1 Dok	250.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan KTM batu betumpang			Dinas PUPR
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	peningkatan fungsi POKJA KTM tingkat provinsi	jumlah laporan hasil rapat dengan Tim POKJA KTM	1 laporan	81.520.000	Disnaker
				peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	150 orang	250.000.000	Disnaker
	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP KTM Mandiri Gantung	1 Dokumen RRTR KSP KTM Mandiri Gantung	1.000.000.000	Dinas PUPR
			Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas			Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di KSP KTM Mandiri Gantung	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM gantung	Penerapan budidaya padi	500	500.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM gantung	Penerapan budidaya cabai	30	1.500.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM gantung	Penerapan budidaya bawang merah	15	500.000.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	Pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik di KTM gantung	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	7	70.000.000	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	120 orang	200.000.000	Disnaker
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	**Program Pengembangan Perkebunan**	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Perluasan tanaman perkebunan pada kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	50	950.000.000	Dinas Pertanian
					Fasilitasi teknis pengembangan tanaman perkebunan	sarana prasarana mendukung pengembangan tanaman perkebunan	2	570.000.000	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	Pemantapan kawasan budidaya ternak Prov.Kep.Bangka Belitung	tertetapkannya kawasan budidyaa padi Prov.Kep.Bangka Belitung	1	4.085.000.000	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	Dlh
3	PEMBANGUNAN BAHARI	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-	**Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut**	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luas kawasan konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan (Ha)	554.000	300.000.000	Dkp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	undangan kelautan dan perikanan.							
				Review Profil Pulau Pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terdata (Pulau)	120	1.920.000.000	Dkp
			Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Pembangunan Dermaga Jetty	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Jetty)	4	10.517.200.000,00	Dkp
				Desalinasi Air Laut	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Unit)	3	610.000.000,00	Dkp
			Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	5	216.000.000,00	Dkp
				Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (Rekomendasi Izin)	14	282.000.000,00	Dkp
		Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Pengawasan sumber daya kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari Operasi)	170	1.680.000.000	Dkp
				Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Pokmaswas aktif (Kelompok)	60	470.000.000	Dkp
				Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang	12	220.000.000	Dkp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan fungsi BOOST Center	Jumlah Bulan layanan fungsi BOOST Center (Bulan Layanan)	12	260.000.000	Dkp
				Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan	Jumlah SDM Pengawasan yang dibina (Orang)	60	230.000.000	Dkp
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Pengawasan atas Rekomendasi Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Jumlah Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) diawasi.	40 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	315.000.000	Dishub
					Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran	Jumlah Pengguna Jasa Pelayaran yang mendapatkan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	100 orang	197.500.000	Dishub
					Survey dan Inventarisas kebutuhan sektor perhubungan laut	Jumlah Dokumen Survey dan Inventarisas kebutuhan sektor perhubungan laut	1 Dok	175.000.000	Dishub
					Pembinaan bagi Stakeholder Sektor Perhubungan Laut	Jumlah Peserta Pembinaan bagi stake holder transportasi laut mengenai Peraturan-peraturan Bidang Transportasi Laut.	40 orang	114.686.220	Dishub
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanaan yang berkompetensi	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang Kelautan dan perikanaan yang mendapat pelatihan	2 paket	250.000.000	Uptd Blki
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	30 orang	310.000.000	Disnaker
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja	pengembangan kompetensi SDM di	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	30 orang	45.000.000	Uptd Balai Produktifitas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	sektor Perikanaan	desa produktif	peningkatan produksi sektor perikanan			
	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi**	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		180.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		120.140.000	Dinas Kumkm
					Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even pameran lokal dan /atau nasional		200.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi produktif yang siap melakukan expor-impor atau perdagangan antar pulau		95.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		175.000.000	Dinas Kumkm
				Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		102.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		90.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang dapat menggunakan aplikasi pengolah data		75.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					koperasi			
				Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		110.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		110.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		110.000.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	10	175.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan IUMK	950	95.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	13	512.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	20	80.000.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difaslitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difaslitasi promosi/ pemasaran produknya	55	100.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					melalui web			
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	0	227.500.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0	725.514.090	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	Peningkatan kapasitas SDM industri sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	20	170.000.000	Disperindag
				Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian	Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan (Orang)	200	385.000.000	Dkp
				Vaksinasi Perikanan Budidaya				
				Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	10	550.000.000	Dkp
				Percontohan Budidaya Perikanan	Jumlah Luasan Areal Budidaya (Paket)	6	650.000.000	Dkp
			Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Jumlah promosi usaha perikanan (Kegiatan)	5	735.000.000	Dkp
				Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah promosi usaha perikanan (Pameran)	5	750.000.000	Dkp
				Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil	30	180.000.000	Dkp
				Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ikan	(Pelaku Usaha)			
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Peningkatan dan Pengembangan PPI	Jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan (PPI)	2	2.500.000.000	Dkp
				Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Kapal)	22	15.000.000.000	Dkp
				pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	1.050	7.320.000.000	Dkp
				Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	Jumlah Nelayan yang dipantau dan dievaluasi kesesuaian sarana dengan Aktivitas perikanan Tangkap (Orang)	90	110.000.000	Dkp
				Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi)	300	300.000.000	Dkp
				peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan	Jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan (Bulan)	12	140.000.000	Dkp
			Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Jumlah Nelayan yang dibantu sarana dan prasarananya (Orang)	700	2.500.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	2.904,00	1.000.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
				Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Tingkat survival rate benih (%)	33	140.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	0,075	480.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rusa				
				Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Laut	Tingkat Survival Rate Benih (%)	33	120.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	126.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Sentral (Bbis) Pemali
	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina	10 perusahaan	8.311.000	Disnaker
	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanaan yang berkualitas sesuai standar	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan penyusunan regulasi internal	30	60.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	30	50.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis SOP koperasi	10	45.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi	10	55.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis tentang partisipasi keanggotaan koperasi	10	28.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	28.350.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang melakukan kerja sama dengan lembaga lain	10	85.650.000	Dinas Kumkm
				Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan	20	85.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah calon penerima penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional	2	48.800.000	Dinas Kumkm
					jumlah calon penerima penghargaan tokoh penggerak koperasi	2	48.800.000	Dinas Kumkm
					Rapat koordinasi peran dekopinwil	1	75.400.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	25.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pengawas/pembina koperasi yang mendapatkan pembekalan mengenai penilaian kesehatan KSP/USP	10	25.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi (pengawas) yang mendapatkan bimbingan teknis mengenai teknik pengawasan koperasi	20	75.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian koperasi berkualitas	30	90.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan/pemeriksaan (KSP/USP)	20	75.000.000	Dinas Kumkm
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	11	114.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	6	82.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	22.000.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya (sampel)	700	3.500.000.000	Uptd Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
				Pembinaan, Supervisi dan Sosialisasi Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)	100	250.000.000	Uptd Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
				Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan	jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan	12	950.000.000	Uptd Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
				pengendalian mutu hasil perikanan	pengendalian mutu hasil perikanan (Bulan Layanan)			
	Pengembangan produk Kelautan dan perikanaan, serta mendorong	**Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan.		perikanan dan Kelautan					Pintu
				Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanaan yang bermitra dengan investor	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahaan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanaan	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran sektor kelautan dan perikanan	200.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor kelautan dan perikanan	60.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor kelautan dan perikanan	62.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	Nilai realisasi PMA/PMDN	80 (Miliyar) Sektor Kelautan	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	20 Perusahaan Sektor Kelautan	134.692.452	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	10 perusahaan sektor kelautan dan perikanan	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor kelautan dan perikanan	43.750.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(LKPM)				Terpadu Satu Pintu
				Bimbingan dan Fasilitasi Penyelesaian masalah Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kasus penyelesaian masalah di bid. Penanaman modal	1 Permasalahan sektor Kelautan	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah perusahaan bermasalah yang difasilitasi	1 Perusahaan Sektor Kelautan	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	2.475.000.000	Dinas Kumkm
			pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelauatan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	150	134.000.000	Dinas Kumkm
	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	175	1.220.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	1	113.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	3	10.500.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang mengikuti benah koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongokyang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan	-	0	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pongok		Strategis Minapolitan Lepar Pongok			
				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	3 unit	2.800.000.000	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	0,00%	-	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1,5 Km	7.800.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1,5 Km	3.900.000.000	Dinas PUPR
	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	**Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanaan selat nasik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	1	113.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	175	1.220.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mengikuti benah koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	3	10.500.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah koperasi yang memahami revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	3 Km	8.280.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Dlh

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	3 unit (Nasik)	2.800.000.000	Dishub
	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	**Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi**	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang mengikuti benah koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	3	10.500.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	3	10.500.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	Dinas Kumkm
			persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	Dinas Kumkm
				Pembangunan prasarana pengaman pantai	Panjang pengaman pantai yang terbangun	900 m	4.500.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun Kawasan Strategis Industri	1,5 Km	7.590.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
				Perikanaan Tanjung Binga		Perikanan Tanjung Binga			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	1,5 Km	4.554.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	125	915.000.000	Dkp
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	462.500.000	Dishub
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga			Dinas PUPR
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	50	305.000.000	Dkp
4	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisataan**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Sumber Daya Pariwisata		350	918.750.000	Budpar
					Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata		200	768.828.375	Budpar
					Penyelenggaraan sertifikasi Lanjutan bagi		250	735.000.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sumber Daya Pariwisata				
				Kerjasama Pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP		2	385.875.000	Budpar
				penerapan sistem magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan		20	462.000.000	Budpar
				pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata		1	156.040.500	Budpar
			Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner		50	194.040.000	Budpar
				Pengembangan Industri Perfilman, Animasi, Video dan Fotografi		1	318.313.000	Budpar
				pengembangan seni pertunjukan dan industri musik		1	211.431.150	Budpar
				Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya		1	361.416.000	Budpar
				pelatihan pengembangan industri Ekonomi Kratif		30	313.352.550	Budpar
				Dukungan Event Festival Nusantara		30	549.728.550	Budpar
			Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	Penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan Bangka Belitung		1	547.942.500	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah		1	165.375.000	Budpar
				Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah		1	193.709.250	Budpar
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata		1	110.250.000	Budpar
				pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan		4	156.030.000	Budpar
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	6	57.000.000	Kumkm
					jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	2	30.000.000	Kumkm
					jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	22.000.000	Kumkm
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	0	136.500.000	Kumkm
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan	jumlah SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0	967.352.120	Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKM				
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan IUMK	940	94.000.000	Kumkm
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	10	40.000.000	Kumkm
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Pariwisata Bekerja Memiliki Unit Produksi	100,00%		Dinas Pendidikan
	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Presentase objek wisata yang terkelola	Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung		100%	165.375.000	Budpar
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata		100%	300.000.000	Budpar
				Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata		500%	199.136.700	Budpar
				Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Destinasi Pariwisata		700%	3.119.864.000	Budpar
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)		6	564.217.500	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelayanan Informasi Pariwisata		4	148.200.800	Budpar
				Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		2	197.714.000	Budpar
				Pembuatan Bahan Publikasi		1	105.000.000	Budpar
				Publikasi Pariwisata		5	262.500.000	Budpar
				Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		1	149.100.000	Budpar
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam Negeri		4	300.685.000	Budpar
				Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		1	82.500.000	Budpar
				Partisipasi Event Promosi Pariwisata		15	2.887.500.000	Budpar
				Pelaksanaan Fam Trip		1	246.034.800	Budpar
				Pelaksanaan Tour d' Bangka Belitung Island		1	990.000.000	Budpar
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Media		10	363.000.000	Budpar
				Roadshow Stakeholder Pariwisata		5	641.300.000	Budpar
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri		2	660.000.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Profil Pasar Pariwisata Bangka Belitung		1	317.625.000	Budpar
				Babel Tourism Run		1	770.000.000	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	3 Dokumen (P.lengkuas, memperak dan pulau tinggi)	1.380.000.000	Dishub
				SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan	4 Dokumen (P.Lengkuas dan P.Ketawai)	1.560.000.000	Dishub
				Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	1 Dokumen (P.Mendanau)	500.000.000	Dishub
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di daerah destinasi wisata	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di daerah destinasi wisata	30%	2.300.000.000	Dishub
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Perencanaan Jalan	tersedianya dokumen perencanaan jalan di destinasi dan pemasaran pariwisata	4 dok	3.640.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di destinasi dan pemasaran pariwisata	24 km	124.800.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di destinasi dan pemasaran pariwisata	30 km	78.000.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di destinasi dan pemasaran pariwisata	845,33 km	32.967.870.000	Dinas PUPR
				Inspeksi Kondisi Jalan	tersedianya dokumen Data kondisi jalan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	281.716.305	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	Terpeliharanya alat-alat laboratorium kebinamargaan	1 paket	152.021.375	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik di destinasi dan pemasaran pariwisata	216 unit	2.776.109.700	Dinas PUPR
				Perencanaan Pembangunan Jembatan	tersedianya dokumen perencanaan jembatan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	2.176.391.100	Dinas PUPR
				Inspeksi Kondisi Jembatan	tersedianya dokumen Data kondisi jembatan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	281.717.055	Dinas PUPR
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik yang terbangun di destinasi dan pemasaran pariwisata	2 dok	9.257.500.000	Dinas PUPR
				Operasional Jembatan Baturusa II	Terpeliharanta jembatan Baturusa II	784 m	2.749.213.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kukm	Pertumbuhan produk parekraf	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	jumlah pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online	35	245.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah kelembagaan sentra usaha	7	255.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan	35	415.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					produktivitas			
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola		300.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Diskominfo
	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	30 orang	310.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pariwisata yang mendapat pelatihan	9 paket	1.125.000.000	Upd Blki
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor pariwisata	40 orang	77.143.000	Uptd Balai Produktifitas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		35.000.000	Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		35.000.000	Kumkm
					Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even pameran lokal dan /atau nasional		70.000.000	Kumkm
					jumlah koperasi produktif yang siap melakukan expor-impor atau perdagangan antar pulau		80.000.000	Kumkm
					jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		35.000.000	Kumkm
				Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		25.000.000	Kumkm
					Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		44.320.000	Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang dapat menggunakan aplikasi pengolah data koperasi		45.000.000	Kumkm
				Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		48.000.000	Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		20.000.000	Kumkm
					jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		20.000.000	Kumkm
	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Jumlah Pemuda luar negri yang mengikuti Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara di Bangka Belitung	34 Pemuda	502.150.000	Diskepora
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	Bangka Belitung Sport Tourism	Jumlah event olahraga tingkat nasional dan regional	1000 peserta	605.000.000	Diskepora
		Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengadaan sarana Olahraga	1 Sarana	2.000.000.000	Diskepora
				Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	4 Prasarana	150.000.000.000	Diskepora
				Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen prasarana olahraga	2 Dokumen DED	1.500.000.000	Diskepora

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana olahraga yang di Revitalisasi dan Rehabilitasi	3 Prasarana	1.500.000.000	Diskepora
				Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dilakukan penilaian	3 Laporan	600.000.000	Diskepora
				Revisi Amdal dan Perizinan lainnya Sport Center Provinsi Kepuluan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Amdal dan perizinannya	1 Dokumen	500.000.000	Diskepora
		Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Kajian Tradisi Bangka Belitung		2	250.000.000	Budpar
				Penulisan Sejarah Bangka Belitung		1	275.000.000	Budpar
				Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung		250	160.000.000	Budpar
				Partisipasi dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya		1 LAM, 1 DK, 25 duk event & 6 Kombud	2.750.000.000	Budpar
				Pelatihan sejarah dan tradisi Bangka Belitung		50	250.000.000	Budpar
				Pagelaran pameran sejarah dan tradisi Bangka Belitung		6	130.000.000	Budpar
				Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI		300	458.794.350	Budpar
				Fasilitasi sarana dan prasarana cagar budaya dan museum daerah		2	200.000.000	Budpar
				Pengelolaan cagar budaya		1	93.453.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman		25	300.000.000	Budpar
				Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		1	716.625.000	Budpar
				Pengiriman Misi Kesenian Daerah		2	405.783.000	Budpar
				Pelaksanaan Workshop kesenian daerah		2	325.000.000	Budpar
				Pentas Seni Budaya		35	500.000.000	Budpar
				Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai		60	281.470.000	Budpar
				Bantuan Sarana dan prasarana Seni Tradisional		14	325.000.000	Budpar
				Pelaksanaan Dialog Budaya		1	350.000.000	Budpar
				Penyelenggaran Perlindungan dan Pengembangan Lagu Daerah		20	160.000.000	Budpar
				Pengembangan Seni Kriya Tradisional		5	145.000.000	Budpar
				Penyelengaraan Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi &Penuliasan Naskah)		5	275.000.000	Budpar
				Festival Budaya Melayu		1	1.047.375.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan pariwisata yang diperiksa dan dibina	50 perusahaan	41.554.000	Disnaker
	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil**	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	1.125.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	Seminar Halal Nasional	Jumlah Peserta	100	220.000.000	Disperindag
				Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif	35	118.819.440	Disperindag
				Peningkatan kapasitas SDM Kawasan Wisata melalui pelatihan	Jumlah SDM yang Terlatih	15	180.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	Peningkatan pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah peserta yang memahami standar produk industri (peserta)	85	250.000.000	Disperindag
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	1	475.000.000	Disperindag
				Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	50	500.000.000	Disperindag
	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar	**Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya**	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	Koordinasi Program CSR	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR	3 Rekomendasi	150.000.000	Biro Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.							
				Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Prov.Kep.Babel	Jumlah penyertaan Modal	1 Berkas	130.000.000	Biro Ekonomi
				Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah kesepakaten bersama terbentuknya bank umum syariah Bangka Belitung	1 Kesepakatan	130.000.000	Biro Ekonomi
				Monitoring dan Evaluasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kep.Babel yang aktif	1 Berkas	120.000.000	Biro Ekonomi
				Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data potensi investasi	1 Laporan	120.000.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi dan Monev Kajian Penyertaan Kebijakan Destinasi wisata baru di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan pengembangan Destinasi wisata baru	1 Laporan	117.352.500	Biro Ekonomi
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian dan penyusunan perlindungan benda cagar budaya (BCB) atau benda diduga cagar budaya	jumlah BCB dan Benda diduga BCB yang dilindungi	1 Laporan	103.622.500	Biro Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	2 pameran sektor pariwisata	280.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor pariwisata	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor pariwisata	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	25 Perusahaan Sektor Pariwisata	140.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	10 perusahaan sektor pariwisata	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor pariwisata	40.942.452	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Bimbingan dan Fasilitasi Penyelesaian masalah Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kasus penyelesaian masalah di bid. Penanaman modal	1 Permasalahan sektor Pariwisata	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah perusahaan bermasalah yang difasilitasi	1 Perusahaan Sektor Pariwisata	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	462.500.000	Dishub
				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)			Dishub
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	16%	2.000.000.000	Dishub
	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan ASDP Manggar-Ketapang	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan ASDP Manggar-Ketapang	1.500.000.000	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	4 Km	20.240.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	10 Km	30.360.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Dlh

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kawasan					
				Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Dokumen Penyusunan DED dan SID Pelabuhan Baru ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	2 Dokumen	700.000.000	Dishub
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di kawasan Pariwisata Tanjung Gunung		2	759.150.000,00	Budpar
			Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka		2	759.150.000,00	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	50%	5.500.000.000	Dishub
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	6 Km	18.216.000.000	Dinas PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung	1 Dokumen Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung	750.000.000	Dinas PUPR
					Jumlah Dokumen Regulasi KSP Lintas Timur Pulau Bangka	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka	750.000.000	Dinas PUPR
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	50%	5.500.000.000	Dishub
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	Subsidi Angkutan Pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	Jumlah Bus yang disubsidi melayani angkutan pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	30%	3.300.000.000	Dishub
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Kota Tua Muntok		1	379.575.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	3 Km	15.180.000.000	PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	5 Km	15.180.000.000	PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi KSP Kawasan Kawasan Kota Tua Muntok	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Kota Tua Muntok	1.000.000.000	PUPR
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Kota Tua Muntok	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Kota Tua Muntok	20%	2.257.000.000	Dishub
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok	Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang tersusun	1 Dokumen	800.000.000	Dlh
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba		0	PUPR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan		1	379.575.000	Budpar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Simpang Rimba	Gunung Permisan Simpang Rimba				
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	10%	1.570.000.000	Dishub
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Jumlah Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Dlh
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	2 Km	10.120.000.000	PUPR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung		100%	361.500.000,00	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu	15%	1.780.000.000	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung			
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	1 Dokumen	850.000.000	Dlh
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	1,5 Km	7.590.000.000	PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	1,5 Km	4.554.000.000	PUPR
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing			PUPR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		1	361.500.000	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas	5%	1.200.000.000	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing			
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	1,5 Km	7.590.000.000	PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	1,5 Km	4.554.000.000	PUPR
	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	10 km	52.000.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	12 km	31.200.000.000	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan jembatan di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	1 dok	2.000.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun			Dinas PUPR
				Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	800 m	2.450.000.000	Dinas PUPR
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	2	72.000.000,00	Dkp
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	462.500.000	Dishub
				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)			Dishub
	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	4 Km	12.144.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	800 m	2.450.000.000	Dinas PUPR
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun			Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	1 Dokumen (tanjung tedung)	3.120.000.000	Dishub
					Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	10 Dokumen (lepar, sekunyit, sumedang, pulau batun dan buku limau)	3.750.000.000	Dishub
					Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	3 Dokumen (Liat, Gresik, Seliu)	1.650.000.000	Dishub
				Jumlah armada pengangkutan	Pengadaan Kapal Ro-Ro 200 GT	Junlah unit Kapal Roro yang dibangun	-	0%	Dishub
5	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	**Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan**	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi	176	450.000.000	Dinas Esdm
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah IUP mineral logam yang dibina dan diawasi	567	650.000.000	Dinas Esdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	Penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah cadangan mineral yang diselidiki	200 Juta Ton	500.000.000	Dinas Esdm
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	Peningkatan Kapasitas SDM Industri turunan pertambangan melalui pelatihan	jumlah SDM yang terlatih	15	150.000.000	Disperindag
			pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan sumber daya mineral melalui pelatihan/pendamping an	Jumlah SDM yang Terlatih			Disperindag
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	Peningkatan pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah peserta yang memahami standar produk industri (peserta)	85	250.000.000	Disperindag
				Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	1	475.000.000	Disperindag
				Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	50	500.000.000	Disperindag
	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja sektor pertambangan Timah bersertifikat kompetensi	30 orang	310.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutaan	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pertambangan Timah yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutaan	2 paket	250.000.000	Upd Blki
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor pertambangan	40 orang	60.000.000	Uptd Balai Produktifitas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kerja			timah			
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	0	136.500.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0,13%	345.482.900	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan IUMK	1000,00%	1.000.000	Dinas Umkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	200,00%	88.000.000	Dinas Umkm
			persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha kecil sektor pertambangan yang difaslitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1000,00%	20.000.000	Dinas Umkm
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	200,00%	8.000.000	Dinas Umkm
	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial**	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan pertambangan yang diperiksa dan dibina	30 perusahaan	24.933.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan subsidi listrik di Provinsi Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi bidang energi dengan Rekomendasi yang di tindak lanjuti	1 rekomendasi	140.000.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas	Jumlah laporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas	1 Laporan	120.000.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta pengembangan lahan kritis di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi kebijakan kerjasama investasi pertambangan Timah dengan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	124.125.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi komoditi pangan di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan komoditi pangan	1 Laporan	100.000.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan penambangan timah di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi penanganan masalah pertambangan timah	2 Rekomendasi	400.000.000	Biro Ekonomi
				Koordinasi dan Monitoring pengembangan potensi	Jumlah potensi energi baru terbarukan	1 Laporan	100.000.000	Biro Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				energi baru terbarukan di Prov.Kep.Babel				
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	1 Kajian	425.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	1	225.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop	1	125.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10	27.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2	37.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran sektor sumber daya mineral	235.796.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor sumber daya mineral	60.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor sumber daya mineral	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	Nilai realisasi PMA/PMDN	70 (Miliyar) sektor sumber daya mineral	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	17 Perusahaan Sektor sumber daya mineral	110.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	15 perusahaan sektor sumber daya mineral	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor sumber daya mineral	43.750.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(LKPM)				Terpadu Satu Pintu
				Bimbingan dan Fasilitasi Penyelesaian masalah Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kasus penyelesaian masalah di bid. Penanaman modal	1 Permasalahan sektor sumber daya mineral	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah perusahaan bermasalah yang difasilitasi	1 Perusahaan Sektor sumber daya mineral	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah izin yang diterbitkan	1150 izin	1.370.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	**Program Penataan Ruang Dan Pertanahan**	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan		25.000.000.000	Dinas PUPR
			Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1	750.000.000	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	3 Km	9.108.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	800 m	2.450.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	Dishub
				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	3 unit	2.800.000.000	Dishub
	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	1,5 Km	7.590.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	3 Km	9.108.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan strategis industri terpadu air kelik	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun			Dinas PUPR
				Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	800 m	2.450.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunkan untuk perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Dlh
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	-	0	Dishub
				Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	-	0	Dishub
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi KSP Kawasan Kawasan Industri Air Kelik (KIAK)	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Industri Air Kelik (KIAK)	1.500.000.000	Dinas PUPR
	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	**Program Kebinamargaan**	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	2 km	10.400.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	3 km	7.800.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan	6	497.042.000	Dinas Kehutanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	3.600	300.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	-	0	Dishub
				Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1 Dokumen	1.000.000.000	Dishub
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	-	0	Dishub
			Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan Industri dan pelabuhan tanjung Berikat	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan	25%	20.000.000.000	Dinas PUPR
	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	**Program Kebinamargaan**	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Industri Sadai	7,5 km	39.000.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Industri Sadai	10 km	26.000.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun			Dinas PUPR
				Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	800 m	2.450.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategis Industri Sadai	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	450.000.000	Dishub
			Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan		15.000.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag
	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	**Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut**	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Jumlah Dokumen Study KelayakanPembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1 Dokumen	780.000.000	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	3 Km	15.180.000.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	3 Km	9.108.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	1	310.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	175	1.220.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi/pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	3	14.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	3	14.000.000	Dinas Kumkm
					Jumlah koperasi yang memahami peningkatan peran kelembagaan koperasi dalam mendukung ketahanan pangan	3	14.000.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag
	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	**Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri**	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	Peningkatan pengembangan pembangunan kawasan strategis	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	Disperindag
				Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	450.000.000	Disperindag
				Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	20.000.000	Disperindag
				Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	350.000.000	Disperindag
				Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	300.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyusunan profil kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah profil yang tersusun (buku)	1	300.000.000	Disperindag
		Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	**Program Pengembangan Sumber Daya Energi**	Persentase penggunaan EBT	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel	Jumlah kepasitas daya listrik menggunkan energi baru terbarukan	20.000 W	15.000.000.000	Esdm
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah pelaku usaha di bidang pendistribusian MIGAS yang diawasi dan dibina	81	250.000.000	Esdm
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan oleh aparatur dan inspektur ketenagalistrikan	98	250.000.000	Esdm
6	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah ; Jumlat spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik ; jumlah hari pameran yang diikuti	280;30;14	693.375.000	Bakuda
					Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	2	115.474.000	Bakuda
					Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12	855.040.650	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3	105.251.613	Bakuda
				Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan, PPBKB dan Pajak Rokok	##########	832.305.125	Bakuda
				Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4	jumlah pelaksanaan Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4 di wilayah kab/kota	2	410.000.000	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	Jumlah kunjungan dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	-	-	Bakuda
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	38	96.800.000	Bakuda
				Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	12	69.610.448	Bakuda
				Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	2	185.000.000	Bakuda
				Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1	205.700.000	Bakuda
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	45	484.939.590	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tim peningkatan pengawasan pendapatan daerah	Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	########## #	600.000.000	Bakuda
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	pembinaan dan pengendalian TKA	jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA	25 perushaan	150.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun	1350 Sampel	1.265.000.000	Dlh
				Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboatorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk akreditasi	34 Parameter Usulan	356.500.000	Dlh
				Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan Kabupaten/kota yang dibina	5 Laboratorium	150.000.000	Dlh
				Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM yang terlatih	40 SDM	132.000.000	Dlh
				Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan bagi sektor usaha	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yag dilayani	40 Titik Sampling	125.000.000	Dlh
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 Paket	1.000.000.000	Dlh
				Peningkatan Eksistensi Laboratorium	Jumlah promosi dan Publikasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kali	70.000.000	Dlh

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	Peningkatan dan pengembangan pelayanan Laboratorium kesehatan	Jumlah PAD dari layanan lab kesehatan	100%	600.000.000	Dinkes
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	Retribusi Umum dan Jasa Usaha	Jumlah penyelenggaraan diklat; jumlah sewa aula/ruang kelas; Jumlah pemakaian komputer	3 Diklat; 12 ruangan/kelas; 200 unit komputer	3.100.000.000	Bkpsdm
		Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari alat-alat laboratorium DINAS PUPR	Retribusi Alat-alat Laboratorium	190.016.800		Uptd Pengawasan Dan Peralatan Belitung
				Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	1.068.853.500	Uptd Pengawasan Dan Peralatan Belitung
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat berat yang dipelihara	1 paket	349.532.700	Uptd Pengawasan Dan Peralatan Belitung
				Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dok	60.500.000	Uptd Pengawasan Dan Peralatan Belitung
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Jumlah DBH SDA Mineral	80 Miliar	250.000.000	Dinas Esdm
		Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	Koordnasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Jumlah lifting MIGAS Babel	420 Ribu	350.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	Pengadaan sarana pendukung pelayanan cetak peta	Jumlah pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,9 Miliar	200.000.000	Dinas Esdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Bulan Layanan)	12	2.400.000.000	Dkp
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	1.900.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	1.300.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolahan perhubungan udara	Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Aprraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Aprraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	-	0	Dishub
					DED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.	Jumlah Dokumen DED Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.	1 Dok	800.000.000	Dishub
7	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	**Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	sosialisasi informasi pasar kerja	jumlah peserta sosialisasi yang mendapat informasi tentang IPK	0	-	Disnaker
					penyuluhan bimbingan jabatan siswa SMK	jumlah peserta bimbingan	10 SMK	200.000.000	Disnaker
					job fair	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	600 orang	300.000.000	Disnaker
					job convassing	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100 perusahaan	90.000.000	Disnaker
					pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui TKM	Jumlah tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis	5 paket	500.000.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					enterpreunership			
				bimtek metodologi bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Jumlah Peserta Bimtek Metologi Bagi Instruktur LPKS	25 lpks	115.000.000	Disnaker
				bimtek penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK yang mampu mencapai kompetensi sesuai standar yang berlaku	25 lpks	115.000.000	Disnaker
				sosialisasi program pemagangan dalam dan luar negeri	jumlah peserta pemagangan	30 orang	165.000.000	Disnaker
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	Pengembangan SDM melalui pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	100 Pelaku Industri/masyarakat	440.000.000	Disperindag
				Inkubator wirausaha baru	Jumlah Kelompok	4 Kelompok	294.134.400	Disperindag
				pemberdayaan dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	500 Pelaku Usaha/Masyarakat	866.184.638	Disperindag
				rumah pengembangan produk	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	450 pelaku	651.103.200	Disperindag
				penyuluh, pendampingan dan pemetaan database pelaku industri oleh PFPP & TPL	jumlah pelaku industri	354 Pelaku Industri	288.838.800	Disperindag
				promosi/gelar produk industri	jumlah event	9 Event	1.893.615.413	Disperindag
				pembinaan dan pengembangan produk	jumlah ovop	9 OVOP	198.000.000	Disperindag
				Fasilitasi magang SDM pelaku industri	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	5 pelaku Industri	170.000.000	Disperindag
				Visualisasi pengembangan industri	jumlah program/pelaku industri	52 Program/pelaku	275.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				melalui media elektronik		industri		
				peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri	jumlah dokumen	1 dokumen	140.000.000	Disperindag
				Sosialisasi, Fasilitasi dan Digitalisasi Industri	jumlah peserta	20 Pelaku Industri	190.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	98 Pemuda	363.931.828	Diskepora
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina (Orang)	70	300.000.000	Diskepora
				Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah Nelayan yang dibina (Orang)	70	300.000.000	Diskepora
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina (Pasar)	7	90.000.000	Dkp
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat	12	2.480.000.000	Dkp
				Pengolahan Hasil Perikanan	pengolahan (Pasar)			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi	8	904.000.000	Dkp
					masyarakat (Paket)			
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	-	300.000.000	Diskominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah				
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Diskominfo
		Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	845,33 km	32.967.870.000	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik	216 unit	2.776.109.700	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	Pembersihan/Rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/Kali	Panjang saluran / sungai	9.000 m	2.223.926.213	Dinas PUPR
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Luasan jaringan irigasi	388 ha	776.073.787	Dinas PUPR
		Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan pembinaan		-	Dinas Kumkm
					jumlah wirausaha yang mendapatkan pemahaman dan motivasi berwirausaha	500	200.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah wirausaha yang bertambah pengetahuan	500	250.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					teknis berwirausaha			
					terpilihnya pelaku usaha berprestasi tingkat provinsi	10	270.000.000	Dinas Kumkm
				Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah dokumen kesepakatan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil	1	100.000.000	Dinas Kumkm
					jumlah dokumen data usaha kecil	1	250.000.000	Dinas Kumkm
				Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Terbangunnya 1 (satu) unit Gedung Pemasaran Produk KUKM	Tahap 3	10.255.600.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan masyarakat	Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 orang	750.000.000	Dinas Pmd
			Persentase KPM yang aktif	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader KPM yang dibina	50 Kader	269.885.753	Dinas Pmd
	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase perempuan yang bekerja	Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program iR	2	Rp111.100.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan dan pemberian batuan bagi pelaku IR	Jumlah IR yang mendapatkan pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha	50	163.108.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan dii Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	14	150.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pameran hasil karya perempuan	Jumlah kab/kota yang ikut serta dalam pameran hasil karya perempuan	7	187.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan TOT kewiraausahaan bagi perempuan produktif dan remaja perempuan putus sekolah	Jumlah perempuan produktif dan remaja perempuan putus sekolah yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30	187.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah peserta Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan	16	150.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Prov. Kep. Bangka Belitung	12	450.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**Program Penanganan Farkir Miskin**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Subsidi Beras Secara Gratis	43,019	15.131.000.000	Dinsos
		Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH Yang di renovasi	300 unit	24.897.000.000	Dinas Prkp
				Rapat koordinasi bidang perumahan	Jumlah peserta rapat bidang perumahan	50 peserta	198.375.000	Dinas Prkp
				Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kab/Kota	Jumlah peseta yang tersosialisasi Pembiayaan Perumahan Kab/Kota	50 peserta	198.375.000	Dinas Prkp
				Survey Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan tidak tetap	Jumlah laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang tersusun	1 lap	153.509.188	Dinas Prkp
				survey dan pendataan rumah tidak layak huni	Jumlah laporan survey dan pendataan rumah tidak layak huni yang tesusun	1 lap	150.000.000	Dinas Prkp
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu juta rumah	Jumlah MBR yang termonitor dan terevaluasi	1000 unit	100.000.000	Dinas Prkp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah Siswa SMA tidak mampu menerima beasiswa	2,534	3.040.800.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah Siswa SMK tidak mampu menerima beasiswa	1,845	2.214.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaaan JKN	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	67%	21.189.941.395	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Prevalensi kekurangan gizi underweigth pada anak balita	14,25%	2.073.459.243	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	Kegiatan Pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif perempuan (percontohan)	Jumlah kelompok kepala keluarga perempuan miskin yang diberikan pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif	35	212.451.195	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Advokasi dan Pembentukan Desa Cikar	Jumlah Desa cikar yang terbentuk di kab/kota	2	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	2	229.955.055	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Jumlah warga miskin pedesaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha	70	280.000.000	Dinsos
				Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Perdesaan	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan stimulan UEP dan KUBE	450	1.800.000.000	Dinsos
				Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Pra Sejahtera	Jumlah warga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis	35	200.000.000	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					berusaha dan bimbingan teknis			
				Peningkatn Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha	80	450.000.000	Dinsos
				Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah keluarga miskin penerima pelayanan program penanganan Fakir miskin	200	702.000.000	Dinsos
				Pelatihan Keterampilan dan Menajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha	250	500.000.000	Dinsos
				Stimulan penguatan sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan stimulan penguatan sosial ekonomi	115	750.000.000	Dinsos
				Peningkatan kwalitas dukungan program pusat	Jumlah dukungan terhadap peningkatan kwalitas progaram pusat	14	150.000.000	Dinsos
		Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Peningkatan kemampuan SDM perdagangan dan produk	Jumlah orang (masyarakat)	190	460.000.000	Disperindag
				Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha	60	110.352.000	Disperindag
				pengadaan gerobak	Jumlah gerobak (unit)	20 Unit	180.000.000	Disperindag
			Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	Pelaksanaan pasar murah	JumlahPelaksanaan (kali)	55	600.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Operasi pasar murah	Jumlah Masyarakat (KK)	30.000	3.900.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Diskominfo
		Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	Jumlah Peserta TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	35	165.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan seminar parenting temukenali dan penajaman bakat dan minat anak menuju masa depan yang sukses	Jumlah Peserta	150	300.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	14	165.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Pembinaan dan peningkatan keterampilan dan kemampuan kepada	Jumlah kader yang mampu dan terampil dalam membina BKB BKR dan BKL	126	165.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pengelola kader BKB,BKR dan BKL				
				Kegiatan Promosi Penguatan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Peserta	350	175.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas UPPKS	Kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	70	165.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	4	423.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga di Kab/Kota	Jumlah kunjungan pembinaan dan monev kab/kota yang dievaluasi	28	100.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	Jumlah Peserta Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	1500	800.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	peningkatan fungsi Dewan Pengupahan, pembahasan UMP, UMP/UMSK dan sosialisasi UMP	jumlah rapat pembahasan UMP	4 kali	350.000.000	Disnaker
			persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan bidang lain yang diperiksa dan dibina	231 perusahaan	191.982.000	Disnaker
				pemetaan kerawanan kondisi HI	jumlah kondisi kerawanan HI	225 perusahaan	135.000.000	Disnaker
				peningkatan fungsi LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	jumlah rapat LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	5 kali	350.000.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				penegekan hukum ketenagakerjaan	jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan	2 kasus	117.470.000	Disnaker
				pembinaan dan penyelesaian PHK pekerja di luar pengadilan HI	jumlah kasus PHK pekerja yang dibina dan diselesaikan di luar pengadilan HI	160 perusahaan	190.000.000	Disnaker
				peningkatan sarana Hubungan Industrial	jumlah peserta yang mengikuti bimtek PP/PKB	160 peserta	120.000.000	Disnaker
			persentase penurunan kecelakaan kerja	upgrading pengetahunan K3 personil	jumlah personil K3 yang di upgrading	20 orang	97.410.000	Disnaker
				Peningkatan Kapasitas Kader Norma Kerja di perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kader norma kerja	30 orang	90.000.000	Disnaker
				gema bulan bhakti K3	jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan	3 perusahaan	150.000.000	Disnaker
	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	**Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrologian**	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Pegawasan barang beredar dan jasa	Produk SNI wajib (barang/Jasa)	10	88.000.000	Disperindag
				Pengembangan SDM dalam rangka pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	Pelaku usaha dan instansi terkait	310	620.000.000	Disperindag
				peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	Laporan Rapat dan Koordinasi (dokumen)	6	430.000.000	Disperindag
				pemetaan produk dalam pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	informasi atau data yang teridentifikasi (jenis barang dan jasa)	14	320.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelaksanaan penentuan penegakan hukum pelanggaran dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta terrib niaga	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)	3	500.000.000	Disperindag
				pengembangan SDM penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK), petugas pegawas barang beredar dan jasa (PPBJ), Penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS Dag) dan petugas pengawasan Tertib Niaga (PPTS)	Jumlah PPNSPK, PPBJ, PPNS Dag dan PPTN (orang)	16	200.000.000	Disperindag
				Pengawasan Tertib niaga	Jumlah pengawasan (kali)	21	750.000.000	Disperindag
			Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	Peringatan hari konsumen nasional	jumlah Peserta (orang)	250	160.000.000	Disperindag
				sosialisasi kelembagaan dan perlindungan konsumen	jumlah peserta sosialisasi (orang)	600	655.000.000	Disperindag
				pos layanan pengaduan konsumen	jumlah lokasi/pengaduan	34	365.000.000	Disperindag
				Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)	Jumlah kab/Kota	7	285.000.000	Disperindag
				Survey pengukuran indeks keberdayaan konsumen	jumlah Responden	400	140.000.000	Disperindag
				Bimbingan teknis kelembagaan dan pemberdayaan	jumlah peserta	36	350.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				konsumen				
				Diseminasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen di berbagai media cetak	jumlah media publikasi	3	120.000.000	Disperindag
				klinik konsumen terpadu bagi pelajar	jumlah sekolah yang dibuka klinik	4	200.000.000	Disperindag
				forum dialog dengan perguruan tinggi	jumlah peserta forum dialog	-	-	Disperindag
				Peningkatan Fungsi BPSK	jumlah BPSK	5	750.000.000	Disperindag
			Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	Penyediaan informasi dan publikasi standarisasi dan kemetrologian	Jumlah sarana/media informasi (sarana/media)	1	80.000.000	Disperindag
				Monitoring pelayanan kemetrologian legal	Laporan monitoring (dokumen)	1	115.000.000	Disperindag
				Penyusunan Daftar jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur	Dokumen Daftar Jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)	1	55.000.000	Disperindag
				kalibrasi standar ukur	Jumlah alat yang terkalibrasi (alat)	3	55.000.000	Disperindag
				penyediaan sarana dan prasarana lab kemetrologian	Jumlah sarana dan prasarana	2	170.000.000	Disperindag
				verifikasi dan interkomparasi standar ukur	Jumlah standar ukur (alat)	4	80.000.000	Disperindag
				bimbingan teknis dan diklat penguji mutu dan pranata lab	Jumlah Orang (orang)	2	60.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	Verifikasi dan pengawasan	Jumlah Pelaku usaha	50	700.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				perdagangan sumber daya mineral				
				Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah Pelaksanaan	15	1.500.000.000	Disperindag
				Partisipasi Papper Day	Jumlah UKM (Unit Usaha)	0	0	Disperindag
				peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Jumlah Pelaku usaha	50	150.000.000	Disperindag
				peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian	Jumlah Pelaku usaha	50	150.000.000	Disperindag
				Verifikasi dan pengawasan perdagangan sumber daya mineral	Jumlah Pelaku usaha	50	700.000.000	Disperindag
			Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	Pelaksanaan pasar murah	JumlahPelaksanaan (kali)	55	600.000.000	Disperindag
				Operasi pasar murah	Jumlah Masyarakat (KK)	30.000	3.900.000.000	Disperindag
				Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	60	300.000.000	Disperindag
				Informasi perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Komoditi (Komoditi)	20	204.000.000	Disperindag
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan	Pengadaan Lahan Untuk PUJASERA	Jumlah Lahan yang dibebaskan (lahan PUJASERA)	0	-	Disperindag
				Pembangunan PUJASERA	Jumlah pujasera yang dibangun (PUJASERA)	1	5.500.000.000	Disperindag
			Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi	Pengadaan lahan untuk Gudang	Jumlah lahan yang dibebaskan (lahan)	2	3.000.000.000	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gudang					
				Pembangunan Gudang	Jumlah Gudang yang dibangun (gudang)	2	9.000.000.000	Disperindag
				Peningkatan kemempuan pengelola Resi Gudang	Jumlah Orang (orang)	12	250.000.000	Disperindag
			Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah Penyelenggaraan	3 Kali	234.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervesi program/kebijakan	Koordinasi, Monev Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta penguatan kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Rekomendasi	350.000.000	Biro Ekonomi
				Pengendalian Evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	130.000.000	Biro Ekonomi
				Pengawasan Supply, Demand dan Evaluasi Makro dan Mikro Ekonomi di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi Makro dan Mikro Ekonomi	2 Rekomendasi	150.000.000	Biro Ekonomi
				Promosi potensi produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan perkembangan destinasi wisata baru	1 Laporan	220.000.000	Biro Ekonomi
				Pengendalian Evaluasi Industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan pengendalian,evaluasi industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	170.000.000	Biro Ekonomi
				Peningkatan Sarana,Prasarana dan Evaluasi Resi Gudang di Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan peningkatan sarana prasarana perekonomian yang Representative	1 Laporan	136.000.000	Biro Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi data perkembangan ekonomi daerah	1 rekomendasi	200.000.000	Biro Ekonomi
		Program Pengembangan Perhubungan Laut	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Pangkal Balam	-	0	Dinas Perhubungan
				Penyusunan SID dan DED Pembangunan PelabuhanPengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	-	0	Dinas Perhubungan
				Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	1 Dokumen	1.000.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap yang terbangun	24 km	124.800.000.000	Dinas PUPR
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik yang terbangun	2 unit	9.257.500.000	Dinas PUPR
	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	**Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura**	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	Fasilitasi penerapan budidaya cabai besar di Prov.Kep.Bangka Belitung	Penerapan budidaya cabai	3.113,22	1.097.030.000	Dinas Pertanian
			Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	Fasilitasi penerapan budidaya cabai rawit di Prov.Kep.Bangka Belitung	Penerapan budidaya cabai	3.095,08	1.097.030.000	Dinas Pertanian
			Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di Prov.Kep.Bangka	Penerapan budidaya cabai	114,51	1.097.030.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Belitung				
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	Pengadaan Coldstorage	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Unit)	2	6.120.000.000	Dinas Kelautan Perikanan
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	Pengendalian Distribusi pangan	Jumlah Pengawasan pemantauan harga pangan pokok di tingkat produsen, konsumen dan pasokan di 6 pelabuhan (Pengawasan)	4	200.000.000	Dinas Pangan
				Database harga dan Stock pangan tingkat distributor	Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor (Dokumen)	1	120.000.000	Dinas Pangan
				Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi (GAPOKTAN)	5	350.000.000	Dinas Pangan
				Penindakan hukum kasus penyimpangan pangan	Jumlah Kasus Penyimpangan Pangan yang ditangani (Kasus)	1	80.000.000	Dinas Pangan
				Penyusunan Neraca Prognosa Pangan	Jumah Dokumen Neraca Prognosa Pangan (laporan)	1	50.000.000	Dinas Pangan
				Pelatihan peningkatan mutu hasil gabah dan beras	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk kelompok masyarakat (Angkatan)	1	145.000.000	Dinas Pangan
	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	**Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil**	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media	Jumlah Laporan dan media sosialisasi	1	110.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	2	60.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penduduk Kb
				Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Sosialisasi/Rapat Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2	120.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2	60.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kematian	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	2	120.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah rapat	2	115.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	Kegiatan workshop peningkatan kualitas penggerakan Motivator KB Pria	Jumlah peserta yang bersedia menjadi motivator KB pria	35	121.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pembinaan dan peningkatan Peserta KB	Persentase peserta yang menjadi akseptor MKJP	98,18	750.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Penggerakan KB MKJP	Jumlah Aksi Penggerakan KB MKJP	14	190.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan peningkatan promosi program KB melalui kerjasama dengan media informasi (media cetak, media elektronik)	Jumlah MoU dengan media informasi	1	75.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
					Jumlah Iklan di radio	1	40.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil,

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan peningkatan kapasitas PLKB dalam mengelola Kampung KB	Jumlah PKB yang mendapatkan pelatihan	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Peningkatan Peran Serta TOMA, TOGA dalam mendukung Program KKBPK	jumlah TOMA TOGA yang mendapatkan AKIE program KKBPK di 7 Kab/Kota	150	250.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Penggerakan Pelayanan KBKR	Jumlah penggerakan	2 kali (2 Kab/Kota)	200.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	100	250.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	4	50.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov.Kep.Babel	Jumlah Peserta Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov.Kep.Babel	70	300.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (fasilitasi KB Muspida)	Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan di Kab/Kota	1400	800.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kegiatan pendampingan penyusunan kebijakan (grand design kependudukan) tk Kab/Kota	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan) tk Kab/Kota	7	250.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Grand design kependudukan	Kab/kota yang telah mengimlementasikan grand design kependudukan	1	181.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				presentase KB MKJP	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kampung KB	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan kampung KB	50	100.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
					Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Kampung KB	6	300.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
					Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dilakukan Monev	7	100.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
8	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi			Dinas PUPR
					Pembangunan jaringan irigasi	Luas layanan irigasi	52 ha	1.237.500.000	Dinas PUPR
					Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen	1 Dok	110.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Survey pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRWP	jumlah dokumen dan alat survey pengawasan pemanfaatan ruang	1 dokumen	400.000.000	Dinas PUPR
					Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah dokumen arahan teknis pemanfaatan ruang	1 dokumen	400.000.000,00	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Pertumbuhan volume air baku	Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air	Jumlah kapasitas tampungan air baku	16.700 m3	4.180.000.000	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	infrastruktur air baku			lainnya				
				Inspeksi kondisi prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen	1 Dok	110.000.000	Dinas PUPR
	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	Pembanguna/peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun di Kawasan Strategis Provinsi	15.000	10.250.000.000	Dinas Prkp
			Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kawasan Permukiman kumuh	Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun di Kawasan kumuh	10909 m'	2.727.000.000	Dinas Prkp
	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	**Program Keciptakaryaan Dan Permukiman**	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Penyusunan DED Cluster Melayu di Kawasan Kota Tua Mentok	Dokumen DED Cluster Melayu Kawasan Kota Tua Mentok yang tersusun	0%	-	Dinas Prkp
				Penataan bangunan dan Lingkungan	Luas Kawasan yang tertata	15 Ha	2.000.000.000	Dinas Prkp
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	5 Dok	300.000.000	Dinas Prkp
				Bimbingan Teknis pengelola bangunan gedung negara	jumlah peserta Bimbingan Teknis pengelola bangunan gedung negara	20 peserta	150.000.000	Dinas Prkp
				Pembangunan Ruang Terbuka Ramah Anak	Jumlah Ruang Terbuka Ramah Anak yang terbangun	1 lokasi	5.000.000.000	Dinas Prkp
	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi	Jumlah dana pendampingan kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi di daerah	66%	357.720.000	Kominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	masyarakat							
	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	**Program Pengembangan Perhubungan Laut**	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	Pemeliharaan pelabuhan/dermaga	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang dipelihara	-	0	Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara	6 unit (3 unit di tg.sangkar) dan (3 unit tg.labu)	1.653.600.000	Dinas Perhubungan
				Rehabilitas Pelabuhan/ Dermaga	Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang direhab	1 unit	3.000.000.000	Dinas Perhubungan
	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	**Program Pengembangan Perhubungan Darat**	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	Subsidi Angkutan Perintis	Jumlah trayek yang disubsidi	2 trayek	1.000.000.000	Dinas Perhubungan
				Survey Kebutuhan Angkutan Umum.	Jumlah Dokumen Survey Kebutuhan Angkutan Umum	1 dokumen	385.000.000	Dishub
				DED Pembangunan Terminal Type B	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Terminal Type B	1 Dokumen	750.000.000	Dishub
		Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Aprraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Aprraisal Harga Tanah untuk Pengembangan Bandara Depati Amir	-	0	Dishub
				Pengadaan Tanah untuk Pengembangan di Bandara Depati Amir	Luas Tanah yang dibebaskan	5 Ha	17.500.000.000	Dishub
				Pengadaan dan pemasangan jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati	Jumlah panjang jaringan air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir			Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					Amir				
					Pengadaan dan Pemasangan X-Ray, Walkthrought dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir.	Jumlah unit X-Ray, Walkthrought dan Hand Metal Detector untuk Gedung VIP Bandara Depati Amir			Dishub
					Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	Jumlah Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir			Dishub
					DED gedung VIP di Bandara hananjoedin Belitung	Jumlah Dokumen DED gedung VIP di Bandara hananjoedin Belitung	1 Dok	800.000.000	Dishub
					Pembangunan gedung VIP di bandara hanandjoedin Belitung	Jumlah unit Pembangunan gedung VIP di bandara hanandjoedin Belitung	100%	21.000.000.000	Dishub
9	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas**	APK SMA	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Jumlah RKB SMA Terbangun (Ruang)	12	2.400.000.000	Dinas Pendidikan
						Tersedianya Meubelair SMA (Unit)	12	600.000.000	Dinas Pendidikan
						Tersedianya Asrama Siswa SMA	4	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah USB SMA Terbangun	1	3.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Jumlah RKB SMA Terbangun (Ruang)	40	8.000.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah RKB SMK Terbangun (Ruang)	10	2.000.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Meubelair SMK (Unit)	20	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Tersedianya Asrama Siswa SMK	1	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Reguler)	Jumlah RKB SMK Terbangun (Ruang)	40		Dinas Pendidikan
		Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SLB	RKB SLB terbangun (Ruang)	2		Dinas Pendidikan
					Tersedianya meubelair SLB (Paket)	7	154.000.000	Dinas Pendidikan
					Tersedianya Mobil Siswa SLB	1	300.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SLB (DAK Reguler)	RKB SLB terbangun (Ruang)	0	0	Dinas Pendidikan
					Tersedianya Asrama Siswa SLB	1	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
	peningkatan mutu layanan pendidikan.	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah guru SMA menerima beasiswa S1 dan S2 (Orang)	25	3.000.000.000	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik		Tersedianya analisis kebutuhan guru SMA (Dokumen)	1		Dinas Pendidikan
			Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50		Jumlah guru dan tenaga kependidikan terlatih (Orang)	450		Dinas Pendidikan
				Peningkatan Mutu PTK SMK	Jumlah guru SMK menerima beasiswa S1 dan S2 (Orang)	25	3.500.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Mutu PTK SLB	Guru SLB menerima beasiswa S1 (Orang)	15	2.500.000.000	Dinas Pendidikan
					Jumlah guru dan Tenaga kependidikan SLB terlatih (Orang)	150		Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Tersedianya Peralatan CBT SMA (Paket)	10	11.500.000.000	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UN SMA		Pagar Sekolah terbangun (Sek)	1		Dinas Pendidikan
				Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMAi (Jenis)	7	6.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA (Siswa)	250		Dinas Pendidikan
				Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan UNBK (Sekolah)	68	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum (Sekolah)	68		Dinas Pendidikan
				Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	25	18.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK	Terlaksananya Gebyar SMK (Kali)	100,00%	20.000.000.000	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UN SMK		Terlaksananya Revitasilitasi Prodi SMK (Sek)	57		Dinas Pendidikan
					Tersedianya Peralatan Praktik Siswa (Paket)	15		Dinas Pendidikan
					Sekolah yang siap di akreditasi (%)	100		Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Rehabilitasi SMK (Paket)	20		Dinas Pendidikan
					Terbangunnya RPS SMK (Ruang)	10		Dinas Pendidikan
				Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Sekolah melaksanakan pendidikan karakter (Sekolah)	58	7.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK (Jenis)	7		Dinas Pendidikan
					Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK (Sekolah)	58		Dinas Pendidikan
				Pengembangan Kurikulum SMK	SMK melaksanakan UNBK (Sekolah)	58	3.200.000.000	Dinas Pendidikan
					Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK (Sekolah)	58		Dinas Pendidikan
					Tersedianya Assesor (Orang)	50		Dinas Pendidikan
					Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK (Dok)	1		Dinas Pendidikan
					Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK (Dok)	1		Dinas Pendidikan
				Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	20	14.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Terbangunnya RPS (Unit)	30		Dinas Pendidikan
					Terbangunnya WC/KM Siswa (Unit)	30		Dinas Pendidikan
		Program Peningkatanan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan	Persentase SLB terakreditasi A	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan	RPS SLB terbangun (Ruang)	2	2.700.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Khusus		kelembagaan pendidikan khusus				
					Tersedianya Peralatan praktik siswa (Paket)	1		Dinas Pendidikan
					SLB yang direhabilitasi (Paket)	1		Dinas Pendidikan
				Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB (Sekolah)	9	1.600.000.000	Dinas Pendidikan
					Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB (Jenis)	4		Dinas Pendidikan
				Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga (Sekolah)	9	900.000.000	Dinas Pendidikan
					Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 (Sekolah)	9		Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis (Bulan)	12	2.500.000.000	Dinas Pendidikan
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	4	7.000.000.000	Dinas Pendidikan
					Terlaksananya Rehabilitasi SLB (Paket)	4		Dinas Pendidikan
					KM/WC dan sarana air bersih terbangun	4		Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah)	27	14.000.000.000	Uptd Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sekolah terlayani (Sekolah)	12	6.000.000.000	Uptd Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah)	28	14.300.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Jumlah Sekolah terlayani	21	10.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina	48 atlet	1.345.139.153	Diskepora
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan	142 atlet	1.905.573.733	Diskepora
				Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out	105 atlet	1.692.465.539	Diskepora
				Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi	8 medali	1.886.704.177	Diskepora
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	Pengiriman dan Pemberian Penghargaan kepada Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang memperoleh bantuan dan penghargaan	10 orang	181.500.000	Diskepora
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	48 Pemuda	432.272.500	Diskepora
				Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan wawasan Pemuda	70 Pemuda	369.050.000	Diskepora

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan, Pembinaan dan pelatihan Generasi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan, Pembinaan dan pelatihan generasi pemuda	234 Pemuda	3.707.654.170	Diskepora
		Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;	Kegiataan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov Kep Babel		42	82.687.500	Dkpus
				Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov Kep Babel	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Lomba (Perpustakaan)	14	192.937.500	Dkpus
				Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahaan dan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibina (Orang)	42	112.455.000	Dkpus
				Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (orang)	15	225.000.000	Dkpus
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan yang ahli dan terampil (orang)	550	2.125.000.000	Dkpus
				Rapat Kerja Forum/Organisasi Pustakawan	Jumlah peserta rapat kerja wadah/forum kepustakawanan (orang)	50	210.000.000	Dkpus
				Kegiatan Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi	20	120.000.000	Dkpus
				Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan	Jumlah DUPAK pustakawan dan calon pustakawan	30	52.000.000	Dkpus
				Kegiatan Seminar Kepustakawanan	Jumlah peserta seminar kepustakawanan	100	250.000.000	Dkpus

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pustakawan/Pengelola Perpustakaan	Jumlah pustakawan/pengelola perpustakaan yng memahami sertifikasi dan uji kompetensi	50	210.000.000	Dkpus
				Kegiatan Pelaksanaan Sertikasi dan Uji Kompetensi bagi Pustakawan	jumlah pustakawan yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan jabatan	15	120.000.000	Dkpus
				Penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan	jumlah peraturan daerah tentang perpustakaan (perda dan pergub)		-	Dkpus
				Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi (perpustakaan)	4	125.000.000	Dkpus
		Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengadaan sarana Kepemudaan	1 Sarana	1.500.000.000	Diskepora
				Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Prasarana kepemudaan	1 Dokumen DED	750.000.000	Diskepora
				Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana Kepemudaan yang di Revitalisasi dan direhabilitasi	1 Prasarana	350.000.000	Diskepora
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	Pengiriman dan Pemberian Bagi Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan	10 Pemuda	121.000.000	Diskepora
			Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan					Diskepora
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah	18 unit	14.500.000.000	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	Jumlah unit Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	2 unit	860.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola		300.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Diskominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government	k	90%	507.268.300	Diskominfo
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Prov	jumlah yang mengikuti kegiatan hut RI	6000 org	1.319.258.000	Biro Kesra
				Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat ndi Provinsi	Jumlah yang mengikuti kegiatan Hut Babel	3500 org	1.150.000.000	Biro Kesra
				Rapat koordinasi bidang pendidikan KB Pemuda dan Parawisata	jumlah rekomendasi bidang pendidikan KB Pemuda dan Parawisata	4 rakor	550.000.000	Biro Kesra

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Festifal seni Budaya Bangka Belitung	Jumlah seniman Bangka Belitunng	0	0	Biro Kesra
			Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Prov		50 sekolah	350.000.000	Biro Kesra
		Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	539.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Sungailiat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	238.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Muntok	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	181.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Koba	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	173.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Toboali	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	185.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Tanjung Pandan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	266.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Manggar	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	220.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.754.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.054.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	434.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	643.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	609.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.212.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	931.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.161.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	453.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	275.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.056.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	860.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.270.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.271.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.463.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	399.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.211.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	578.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	150.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	534.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	258.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	258.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.666.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.309.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	860.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	828.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	254.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.039.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	851.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	233.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	323.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.439.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	2.664.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.193.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	927.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	572.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	386.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	851.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	882.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	356.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	702.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.353.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	819.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	544.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.512.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar,	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	161.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kabupaten Bangka				
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.064.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.092.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	685.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.063.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	614.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.112.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	710.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	688.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	779.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah				
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	399.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	927.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	988.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	402.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	330.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.007.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	245.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	669.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.478.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	806.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	775.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	801.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, KabupatenBelitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.170.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.283.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	547.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.056.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	728.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.123.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	773.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.468.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.299.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.427.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	1.067.000.000	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Keberbakatan Olahraga	Pengelolaan BOS di Sekolah	12 Bln	275.000.000	Dinas Pendidikan
	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruaan**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK	Tersedianya Bengkel Produktif SMK (Unit)	1	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal		Terlaksananya Revitasilitasi Prodi SMK (Sek)	57		Dinas Pendidikan
				Pengembangan Kurikulum SMK	SMK memiliki TUK (Sekolah)	45		Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
10	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**Program Kesehatan Masyarakat**	Persentase status kesehatan masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1kebijakan baru pertahun	90%	928.565.108	Dinkes
					Upaya peningkatan Kesehatan Keluarga	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS (%)	90%	963.997.320	Dinkes
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) provinsi	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS (%)	90%	2.205.021.720	Dinkes
					Penurunan kematian Ibu	Angka kematian ibu per kelahiran hidup	21/KH	1.572.063.799	Dinkes
					Penurunan angka kematian bayi	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (per seribu kelahiran hidup)	7,16/1000 KH	1.297.208.814	Dinkes
					Peningkatan Penyehatan lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat (%)	84,46%	1.189.266.323	Dinkes
					Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga (%)	70%	315.392.913	Dinkes
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% (%)	85,70%	227.908.098	Dinkes
					Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Prevalensi HIV (% pada penduduk beresiko	<10%	648.809.018	Dinkes
					Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Presentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	100%	226.136.295	Dinkes
					Penanganan penyakit menular lainnya	persentase penanganan penyakit menular lainnya	88%	863.105.100	Dinkes

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	27,50%	103.860.350	Dinkes
				Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya	Presentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	87%	243.955.360	Dinkes
				Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	90%	813.326.910	Dinkes
				Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%	2.660.741.842	Dinkes
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Prov		50 sekolah	350.000.000	Biro Kesra
		Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	Peningkatan/perluasan jaringan distribusi Air Minum dan sambungan rumah	jaringan distribusi air minum yang terpasang	400 SR	800.000.000	Dinas Prkp
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	Peningkatan/perluasan jaringan distribusi air minum di Kawasan permukiman kumuh	Jaringan distribusi air minum yang terpasang di Kawasan kumuh	2 lokasi	550.000.000	Dinas Prkp
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	Peningkatan/ penyediaan sarana air limbah di Kawasan Strategis Provinsi	jumlah sarana air limbah yang terbangun di Kawasan Strategis Provinsi	11 unit	5.500.000.000	Dinas Prkp
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	Peningkatan/penyediaan sarana air limbah di Permukiman kumuh	Jumlah sarana air limbah yang terbangun di Kawasan kumuh	Pemb. 2 unit ipal komunal	900.000.000	Dinas Prkp
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi	Pembanguna/peningkatan drainase lingkungan permukiman di Kawasan Strategis	panjang drainaselingkungan permukiman yang terbangun di di Kawasan Strategis Provinsi	8294 m	13.000.000.000	Dinas Prkp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Provinsi				
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	Pembanguna/peningkatan drainase/gorong-gorong di Kawasan Permukiman kumuh	Panjang drainase yang terbangun di Kawasan kumuh	13604 m'	4.761.400.000	Dinas Prkp
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	Pembangunan/Peningkatan Sarana Persampahan di kawasan strategis provinsi	Jumlah sarana persampahan yang tersedia di kawasan strategis provinsi	120 unit tong sampah 4 unit gerobak motor sampah 2 unit kontainer sampah	640.000.000	Dinas Prkp
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Pembangunan/Peningkatan Sarana Persampahan di kawasan Permukiman kumuh	Jumlah sarana persampahan yang tersedia dikawasan kumuh	120 unit tong sampah 4 unit gerobak motor sampah 2 unit kontainer sampah	640.000.000	Dinas Prkp
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	Rapat Bagian Sosial,Kesehatan,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemerintahan Kab/Kota	22 rekomendasi	450.000.000	Biro Kesra
				Monitoring dan Evaluasi dan bantuan Sosial dan Hibah	Terlaksasnya Kegiatan Monitoring Proposal Hibah dan bansos yang tepat Sasaran	236 proposal	250.000.000	Biro Kesra
				Evaluasi dan Analisa Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksanaya evaluasi dan analisis Proposal bantuan yang tepat sasaran	570 proposal	400.000.000	Biro Kesra
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Kominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Kominfo
		Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Perkarangan pada kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan (kelompok)	47	350.000.000	Dinas Pangan
				Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah, kacang-kacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Jumlah Event Gerakan GEMA SABUK AMANG (Kali)	3	600.000.000	Dinas Pangan
				Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Jumlah Event Daerah dan Nasional (Event)	2	500.000.000	Dinas Pangan
				Pengembangan produk pangan lokal hasil pertanian (one village one product)	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina (Pelaku usaha)	40	600.000.000	Dinas Pangan
				Lomba KRPL Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Lomba KRPL (Event)	1	200.000.000	Dinas Pangan
				Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan	14	350.000.000	Dinas Pangan
				Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen data Skor PPH (DOkumen)	1	300.000.000	Dinas Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan menu/resep olahan unggulan rumah tangga/masyarakat melalui diversifikasi pengolahan produk pangan lokal yang berdaya saing (resep/menu/sajian unggulan/kerjasama PKK dan Dinas Pangan	Meningkatnya menu unggulan daerah dalam destinasi wisata Babel 2020	21	350.000.000	Dinas Pangan
			persentase pangan yang aman dikonsumsi	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan (Kali)	8	500.000.000	Dinas Pangan
				Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Lokal (Sertifikat (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT)	Jumlah Komoditi yang mendapat Sertifikat Produk Pertanian (Komoditi)	100	500.000.000	Dinas Pangan
				Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah jenis alat uji Rappid Test (Paket)	7	800.000.000	Dinas Pangan
				Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	Jumlah Bimtek Keamanan Pangan (kali)	1	200.000.000	Dinas Pangan
				Pengadaan Mobil Lab Keliling Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Laboratorium Keliling (Unit)			Dinas Pangan
				Penguatan kerjasama dalam investigasi Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan Daerah (Tim Jejaring Keamanan Pangan)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan)	1	450.000.000	Dinas Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pendampingan dan pembinaan pada Pelaku Usaha yang telah Bersertifikasi Prima 3, 2, PSAT	Jumlah Pelaku Usaha dalam menerapkan GAP, GMP dan GHP	75	400.000.000	Dinas Pangan
				Penguatan kelembagaan OKKPD daerah dalam operasional Pengawasan PSAT yang bersertifikat	Jumlah Kab/Kota dalam Pelaksanaan koordinasi antar lembaga PSAT	4	300.000.000	Dinas Pangan
				Sosialisasi Perda dan Peraturan Gubernur Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tersosialisasinya Perda dan Pergub	4	250.000.000	Dinas Pangan
		Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pangan (Dokumen)	-	0	Dinas Pangan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan(Rekomendasi)	1	200.000.000	Dinas Pangan
				Peningkatan Koordinasi produktivitas komoditi pangan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan (laporan)	1	200.000.000	Dinas Pangan
				Penyediaan Sarana Pengelolan hasil pangan	Jumlah Sarana Pengelolahan Hasil Pangan (Unit)	1	1.000.000.000	Dinas Pangan
				Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan pangan (Buku)	1	250.000.000	Dinas Pangan
				Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah Dokumen Analisis akses pangan masyarakat (Dokumen)	1	400.000.000	Dinas Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Desa Rawan Pangan (Dokumen)	1	40.000.000	Dinas Pangan
			Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah orang yang tertangani di daerah rawan pangan (orang)	1.000	450.000.000	Dinas Pangan
				Gerakan pemenuhan Gizi 1000 hari Pertama kehidupan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gerakan pemenuhan gizi (orang)	340	300.000.000	Dinas Pangan
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Terbentuknya Desa Mandiri Pangan (Desa	8	550.000.000	Dinas Pangan
				Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung (Dokumen)	1	175.000.000	Dinas Pangan
				Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan APN tingkat Provinsi (kali)	1	200.000.000	Dinas Pangan
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	Peningkatan Daya Saing Produk	Jumlah Pelaku industri yang terfasilitasi	810	892.366.200	Disperindag
				Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah Produk yang memiliki Informasi Nutrisi	140 Produk	180.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	pengujian lingkungan kerja	Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa	11 perusahaan	63.300.000	Uptd Hyperkes
				kalibrasi alat pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan	jumlah alat uji kesehatan yang diperiksa	0	0	Uptd Hyperkes
				pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Jumlah Tenaga kerja yang diperiksa kesehatan kerjanya	60 TK	65.300.000	Uptd Hyperkes

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pengujian lingkungan kerja dai UMKM	Jumlah UMKM yang diperiksa lingkungan kerjanya	20 UMKM	100.000.000	Uptd Hyperkes
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional	60 peserta	424.754.246	Diskepora
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	Study Identifikasi Daerah Rawah Kecelakaan di Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Study Identifikasi Daerah Rawah Kecelakaan di Jalan Provinsi	0	0	Dishub
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Pulau Bangka	20%	4.144.000.000	Dishub
					Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Pulau Belitung	20%	3.300.000.000	Dishub
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Pengadaan dan Pemasanagan Lampu Penerangan Jalan Umum	250 unit	9.162.609.389	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	85%	1.489.000.000	Dishub
				Pengadaan Alat-Alat Berat Operasional	Jumlah unit Alat Berat	1 unit derek	1.300.000.000	Dishub
				Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu lintas	Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu lintas	160 orang	185.000.000	Dishub
				Pengadaan dan Pemasangan Biboard Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah unit Pengadaan dan Pemasangan Biboard Keselamatan Lalu Lintas	28 unit	560.000.000	Dishub
				Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	25 Orang	185.000.000	Dishub
				Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Peserta Pekan Keselamatan di 7 Kabupten Kota	500 orang	700.000.000	Dishub
				Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah Peserta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	14 orang	120.000.000	Dishub
				Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30 orang	212.750.000	Dishub
				Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha	7 kab/ kota	243.000.000	Dishub
		peningkatan pelayanaan	**Program Pelayanan Kesehatan**	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu	47 Kec	1.444.130.974	Dinkes

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kesehatan masyarakat				Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi			
				Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 RSUD	1.579.981.458	Dinkes
				Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Presentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	85%	442.414.236	Dinkes
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Peningkatan dan pengembangan pelayanan labkes	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	2.200	1.266.696.607	Uptd Balai Laboratorium Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SDM yang sesuai standar Tipe B	90%	12.500.000.000	Rsup
					1 unit gudang obat	1	700.000.000	Rsup
					Jumlah Gedung RS yang dipelihara	1	2.500.000.000	Rsup
					Pembangunan gedung IPSRS	1	1.000.000.000	Rsup
				Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RS,pemeliharaan rutin/berkala RS	1 unit instalasi pengolahan limbah rumah sakit		400.000.000	Rsup
					jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit		5.000.000.000	Rsup
					Jumlah mobil ambulance/jenazah yang terpelihara	1	500.000.000	Rsup
					Jumlah unit instalasi pengolahan air rumah sakit terpelihara	1	350.000.000	Rsup
					Jumlah unit instalasi gas medis terpelihara	1	400.000.000	Rsup

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah jaringan listrik rumah sakit terpelihara	1	400.000.000	Rsup
					Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit terpelihara	1	200.000.000	Rsup
		Program Badan Layanan Umum Daerah Rsup	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit	Persentase tingkat kepuasan pelayanan pasien (persen)	90%	7.000.000.000,00	Rsup
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	Penyusunan clinical pathway dan discharge planning	Jumlah dokumen CP dan jumlah kunjungan keluarga	350	672.000.000	Rsj
				Promosi Kesehatan Jiwa	Jumlah Promosi yang dilaksanankan (Kegaiatan promosi)	85	350.000.000	Rsj
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	Jumlah porsi makanan dan minuman pasien dan petugas khusus (porsi)	240	2.499.715.440	Rsj
				Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	Jumlah Pelayanan rehabilitasi Mental sosial, Napza dan tumbuh kembang anak dan remaja yang terlaksana (jenis terapi)	6000	960.000.000	Rsj
				Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visite	Jumlah Petugas Puskesmas dan Maasyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa (Kabupaten/Kota)	45	680.000.000	Rsj
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	Penyusunan Panduan Praktik Klinis	Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis (Dokumen)	5	49.005.000	Rsj
				Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis (Buku)	10	132.000.000	Rsj

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan asuhan keperawatan anak dan remaja serta psikogeriatrik	Jumlah buku askep (buku)	-	0	Rsj
				Penyusunan standar asuhan keperawatan rawat inap dan rawat jalan	Jumlah buku askep (buku)	2	150.000.000	Rsj
				Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan keperawatan	Jumlah buku SOP (buku)	-	0	Rsj
				Penyusunan pedoman standar etik dan profesi keperawatan	Jumlah buku pedoman standar etik dan keperawatan (buku)	-	0	Rsj
				Penyusunan standar asuhan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi NAPZA	Jumlah buku standar asuhan rehabilitasi (buku)	2	150.000.000	Rsj
				Penyusunan pedoman standar etik dan profesi keperawatan	Jumlah buku pedoman standar etik dan keperawatan (buku)	-	0	Rsj
				Penyusunan standar asuhan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi NAPZA	Jumlah buku standar asuhan rehabilitasi (buku)	2	150.000.000	Rsj
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang terawat (tahun)	1	943.300.000	Rsj
				Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, kelas I, II, dan III)	Jumlah rawat inap yang terawat (paket)	1	360.000.000	Rsj
				Rehabilitasi gedung rehabilitasi psikososial	Jumlah gedung rehabilitasi psikososial yang direhab (paket)	1	50.000.000	Rsj

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan keperawatan	Jumlah buku SOP (buku)	-	0	Rsj
				Penyusunan pedoman standar etik dan profesi keperawatan	Jumlah buku pedoman standar etik dan keperawatan (buku)	-	0	Rsj
				Pengadaan master plan rumah sakit	Tersedianya dokumen master plan rumah sakit (dokumen)	-	0	Rsj
				Pembangunan gedung rawat inap	Jumlah gedung rawat inap yang dibangun (paket)	1	3.000.000.000	Rsj
				Pengembangan dan peningkatan gedung rawat inap	Jumlah gedung rawat inap yang dikembangkan (paket)	1	1.000.000.000	Rsj
				Pembangunan gedung stroke centre	Jumlah gedung stroke yang dibangun (paket)	1	3.500.000.000	Rsj
				Rehabilitasi gedung rawat inap (DAK)	Jumlah gedung rawat inap yang direhabilitasi (gedung)	1	2.000.000.000	Rsj
				Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana promosi kesehatan	Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa (promosi)	4	144.000.000	Rsj
				Pemusnahan obat dan perbaikan kesehatan rumah sakit	Jumlah obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan (persen)	100	19.000.000	Rsj
				Pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit (tahun)	1	100.000.000	Rsj
			Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara	18	100.000.000	Rsj
				Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi	34	100.000.000	Rsj

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli (paket)	1	1.200.000.000	Rsj
				Pengadaan pakaian pasien dan linen	jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli (pcs)	450	450.000.000	Rsj
				Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli (paket)	1	250.000.000	Rsj
				Pengembangan SIMRS	Jumlah SIMRS yang dikembangkan (paket)	1	200.000.000	Rsj
				Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit	Jumlah jenis obat yang dibeli (jenis)	60	2.500.000.000	Rsj
				Pengadaan alat radiologi	Jumlah alat radiologi yang dibeli (paket)	1	1.000.000.000	Rsj
				Pengadaa alkes rawat jalan (DAK)	Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli (paket)	1	1.000.000.000	Rsj
				Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun (paket	1	1.000.000.000	Rsj
				Pengadaan alat CSSD	Jumlah alat yang dibeli (paket)	1	2.500.000.000	Rsj
				Penyusunan formularium	1 dokumen formularium rumah sakit (dokumen)	1	-	Rsj
		Program Badan Layanan Umum Daerah Rsj	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanaan langsung kemasyarakat	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Pertumbuhan pendapatan BLUD RSJ (%)	6,25	8.500.000.000	Rsj
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanaan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Diskominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten	0%	160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda	0%	175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi	0%	215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah	0%	130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan	0%	110.000.000	Diskominfo
	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	Pengembangan sumberdaya kesehatan/SDK	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) (orang)	4.746	2.289.244.230	Dinkes
				Peningkatan pelayanan kefarmasian	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	96%	1.456.350.233	Dinkes
				Peningkatan ketersediaan ales dan PKRT	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	92%	227.016.570	Dinkes
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Kesehatan Bekerja Memiliki Unit Produksi	0%		Dinas Pendidikan
			Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)		Jumlah SMK Kesehatan Bekerja sama dengan DUDI	0%		Dinas Pendidikan
	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	**Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular**	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL) Napza					Dinkes
	Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan	**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza**	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	Penjangkauan bebas pasung	Jumlah ODGJ yang terjangkau (orang)	60	400.000.000	Rsj

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Napza							
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	Audit mutu pelayanan keperawatan dan MPKP	Jumlah laporan (laporan)	-	0	Rsj
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.	Jumlah Peserta yang memahami bahaya Narkotika (orang)	350	333.000.000	Kesbangpol
					Kegiatan Penyuluhan Pekat Terhadap Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang memahami tentang Pekat (orang)	600	302.500.000	Kesbangpol
					Forum komunikasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Rekomendasi	4	110.000.000	Kesbangpol
					Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Narkotika	Jumlah Peraturan Gubernur (dokumen)	1	254.100.000	Kesbangpol
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban nazpza	Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah masyarakat dan korban napza yang mendapatkan pembinaan penyalahgunaan napza	100	350.000.000	Dinas Sosial
11	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	**Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan**	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120	369.076.620	Bakuda
					Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	4	169.400.000	Bakuda
					Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	Jumlah Peserta sosialisasi	100	145.200.000	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	12	145.496.450	Bakuda
		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	Revisi Pergub Tentang Sistem Akuntansi	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Sistem Akuntansi			Bakuda
				Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	7	160.000.000	Bakuda
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	140.000.000	Bakuda
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	390.000.000	Bakuda
				Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1	240.000.000	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	12	690.000.000	Bakuda
				Revisi Pergub Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi	1	240.000.000	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	190.000.000	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	275.000.000	Bakuda
				Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25	265.000.000	Bakuda
				Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	1	222.000.000	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Jumlah Laporan Pengadaan Barang	1	480.000.000	Bakuda
				Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20	350.000.000	Bakuda
				Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	2	225.850.735	Bakuda
				Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	144.000.000	Bakuda
				Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan	Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100	264.000.000	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bangka Belitung				
				Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	140.000.000	Bakuda
				Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan	1	80.000.000	Bakuda
			Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	100,00%	287.738.000	Bakuda
				Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100,00%	135.000.000	Bakuda
		Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya	500	100.000.000	Dinas Sosial
	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara	**Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur**	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 laporan	363.000.000	Inspektorat

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	transparan dan akuntabel							
				Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	8	300.000.000	Inspektorat
				Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan	140.000.000	Inspektorat
				Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	5	250.000.000	Inspektorat
				Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	165.000.000	Inspektorat
				Penanganan whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	135.000.000	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi	150 Obrik	3.087.000.000	Inspektorat
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi	150 Obrik	472.500.000	Inspektorat
				Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	150 Obrik	800.000.000	Inspektorat
				Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan	100%	178.957.000	Inspektorat
				Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor	2 rakor 1 PKPT	329.000.000	Inspektorat
			Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	15%	611.100.000	Inspektorat

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti	15 laporan pengaduan	270.112.000	Inspektorat
				Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	2 laporan	417.000.000	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	42 PD	275.625.000	Inspektorat
				Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	100 peserta	375.000.000	Inspektorat
				Sosialisasi SPIP	Jumlah sosialisasi SPIP	4 kali sosialisasi dalam setahun	165.000.000	Inspektorat
				Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Jumlah Monev SPIP	4 kali	158.000.000	Inspektorat
			Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	172.000.000	Inspektorat
	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	2	1.250.000.000	Bappeda
			Persentase dokumen perencanaaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola	2	175.000.000	Bappeda
			Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah	10	1.434.455.000	Bappeda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembungan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terbaharukan dan tervalidasi.	500	560.000.000	Bappeda
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPD	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I yang dihasilkan	8	315.000.000	Bappeda
				Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II yang dihasilkan	8	415.000.000	Bappeda
				Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah studi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan	1	500.000.000	Bappeda
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan RKPD	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I yang dihasilkan	8	452.000.000	Bappeda
				Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan	8	551.250.000	Bappeda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan			
				Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah studi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dihasilkan	1	350.000.000	Bappeda
		Program Perencanaan Sosial,Budaya Dan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan	8	600.000.000	Bappeda
				Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan	8	375.000.000	Bappeda
				Forum Revolusi Mental Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rekomendasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Revolusi Mental	2	120.000.000	Bappeda
				Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Jumlah studi perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasilkan	1	350.000.000	Bappeda
		Program Penelitian Dan Pengembangan	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakukan	5	470.000.000	Bappeda
				Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan	12	420.000.000	Bappeda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dalam Pembangunan	yang dirumuskan oleh DRD			
				Penguatan Jaringan Kelitbangan	Jumlah kerja sama/kemitraan dibidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	1	290.000.000	Bappeda
				Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	2	299.000.000	Bappeda
				Kajian Science Technology Park	Jumlah rumusan pengembangan Science Technology Park yang disusun	1	330.000.000	Bappeda
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	Kegiatan penyusunan kebijakan tentang PUG dan PPRG	Jumlah kebijakan tentang PUG dan PPRG	1	82.500.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Pelaksanaan sistem informasi gender dan anak	Jumlah OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	7	82.500.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop	65	250.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Monev Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kab/kota yang memperoleh pembinaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7	110.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Babel Gender award	Jumlah kab/kota yang mendapatkan predikat babel Gender Award	1	71.500.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan	Jumlah Advokasi dan KIE	12	165.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				Penduduk Kb
		Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200	400.000.000,00	Bakuda
				Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	300	300.000.000,00	Bakuda
				Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8	300.000.000,00	Bakuda
				Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	7	400.000.000,00	Bakuda
				Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	7	425.000.000,00	Bakuda
				Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD	1	400.000.000,00	Bakuda
				Penyusunan Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Jumlah Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	1	425.000.000,00	Bakuda
				Peningkatan fungsi pelayanan aplikasi SIMDA	terlaksananya asistensi aplikasi SIMDA	3	315.000.000,00	Bakuda
			Prosentase kesesuain antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	4	1.783.558.150,00	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				APBD				
				Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4	757.653.600,00	Bakuda
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1 Laporan RTL	437.517.500	Biro Pembangunan
				Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sismontep	4 Laporan (Triwulan)	761.802.097	Biro Pembangunan
				Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan/Rekomendasi	3 Laporan	287.281.500	Biro Pembangunan
				Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1 dokumen	381.529.750	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD	Koordinasi Sistem e-Monep APBD	Jumlah Dokumen dan Laporan	-	627.328.194	Biro Pembangunan
				Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monep	Jumlah Aplikasi e-Monep APBD	1 Aplikasi	619.074.900	Biro Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				APBD				
				Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Jumlah Laporan dan Rekomendasi	1 Laporan	175.547.500	Biro Pembangunan
				Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-monev berkelanjutan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1 dokumen	250.000.000	Biro Pembangunan
				Penggunaan Aplikasi e-monev APBD	Jumlah SDM yang memahami aplikasi	-	-	Biro Pembangunan
		Program Perencanaan Setda	Nilai Lakip Setda Provinsi		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	233.001.500	Biro Pembangunan
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Pelaporan	4 Dokumen	259.558.450	Biro Pembangunan
				Pengintegrasian Sistem Informasi Data	Data yang Terintegrasi	1 Dokumen	350.000.000	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbn	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 % pelaksanaan sumber dana APBN	Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monep APBN	Jumlah Aplikasi e-Monep APBN	1 Aplikasi	429.852.588	Biro Pembangunan
				Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN	Jumlah Kesepakatan/Rekomendasi	2 Laporan	280.444.479	Biro Pembangunan
				Koordinasi Kebijakan APBN	Draft Regulasi atau Rekomendasi Evaluasi APBN	1 Dokumen	185.380.000	Biro Pembangunan
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	**Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian**	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah	4 layanan	72.905.485	Diskominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian					
			Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral & Spatial dengan Format Dashboard	Jumlah layanan sistem informasi basis data sektoral dan spatial berbasis dashboard	1 aplikasi	1.022.487.759	Diskominfo
				Pengembangan Satu Data/ One Data	Jumlah aplikasi sistem informasi database dukungan kebijakan daerah	1 aplikasi	661.020.000	Diskominfo
				Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	Jumlah ketersedian data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	8 kelompok parameter (43.200 data)	261.916.358	Diskominfo
				Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah data informasi statistik daerah yang dipublikasikan	1000 data	258.504.000	Diskominfo
	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	**Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraaturan Daerah	Jumlah usulan Propemda dan Raperda yang selesai disusun	1200%	1.550.000.000	Biro Hukum
				Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah PHD yang selesai disusun	50 Pergub an 1000 Kepgub	600.000.000	Biro Hukum
				Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang telah selesaidisusun	100 NHL	170.000.000	Biro Hukum
				Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase perda yang di tindaklanjuti	10	430.000.000	Biro Hukum
				Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rekomendasi	40	180.000.000	Biro Hukum

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bimtek Legal Drafting	Jumlah pelaksanaan bimtek	1	170.000.000	Biro Hukum
				Pembinaan Teknis Penyusunan PHD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis	50	170.000.000	Biro Hukum
		Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa antara Pemda dengan orang/masyarakat secara litigasi atau non litigasi	Jumlah Kasus	1	320.000.000	Biro Hukum
				Penyelesaian Sengketa TUN akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus	1	320.000.000	Biro Hukum
				Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan penyelsaian Sengketa akibat pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan pemda di Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kab/Kota	1	170.000.000	Biro Hukum
				Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Provinsi Kab/Kota	Jumlah Laporan	1	240.000.000	Biro Hukum
				Bantuan Hukum kepada MAsyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum	45	260.000.000	Biro Hukum
				Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten /	Jumlah orang yang diberikan penyuluhan	350	370.000.000	Biro Hukum

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kota				
				Bimtek Penyelesaian Akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Peserta	50	150.000.000	Biro Hukum
		Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan JDIH	Jumlah PHD yang di publikasi melalui Website JDH	80	650.000.000	Biro Hukum
				Pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Hukum	Jumlah Rak dan Buku Perpustakaan Hukum	50	90.000.000	Biro Hukum
				Penyusunan Kompilasi Perda dan Pergub dan Katalog Perda-Pergubtahun 2017 dan katalog perda dan Pergub Tahun 2001-2017	Jumlah Buku	150	90.000.000	Biro Hukum
				Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah (PHD)	Jumlah PHD yang diarsipkan	550	90.000.000	Biro Hukum
				Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi	1	190.000.000	Biro Hukum
				Sosialisasi Perda	Jumlah Perda yang disosialisasikan	6	110.000.000	Biro Hukum
				Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah	Jumlah Buku Abstrak PHD yang disusun	100	140.000.000	Biro Hukum
				Rapat Koordinasi JDIH Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi di Bidang JDIH	1	150.000.000	Biro Hukum

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bimbingan Teknis Sistem Infromasi Hukum	Jumlah Peserta Bimtek	40	160.000.000	Biro Hukum
		Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat	90 anggota	1.818.690.500	Setwan
				Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas	30 Perda	23.380.709.000	Setwan
				Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum	10 tenaga ahli dan pakar hukum	882.561.900	Setwan
				Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Jumlah dokumen/ laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi	5 Dokumen/ laporan	242.000.000	Setwan
				Kunjungan kerja komisi	Jumlah Dokumen/ laporan Kegiatan Komisi	384 Dokumen/ laporan	33.877.797.800	Setwan
				Kunjungan kerja badan musyawarah	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Banmus	6 Dokumen/ laporan	1.598.676.200	Setwan
				Kunjungan kerja badan anggaran	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Banggar	6 Dokumen/ laporan	3.014.533.500	Setwan
				Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Bapemperda	6 Dokumen/ laporan	2.331.707.147	Setwan
				Kunjungan kerja badan kehormatan	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan BK	6 Dokumen/ laporan	1.137.279.000	Setwan
				Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan	3 kesepakatan	644.022.500	Setwan
				Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	701.496.290	Setwan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Reses	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat	3 dokumen/ laporan	8.983.161.000	Setwan
				Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	JumlahDokumen nota/kesepakatan	4 dokumen/ laporan	457.380.000	Setwan
	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	**Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi**	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah (Eksemplar)	31.247	327.951.170	Biro Humas
				Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah di Dalam dan Luar Daerah	Persentase Tingkat Pendampingan Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (Kali)	306 kali di dalam daerah dan 25 kali di luar daerah	455.487.780	Biro Humas
				Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Informasi dan Dokumentasi yang bisa diakses Publik (PD Pembantu)	30	417.290.276	Biro Humas
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan layanan kehumasan dan keprotokolan	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan dalam mendukung layanan kehumasan dan keprotokolan (Buah)	7.218	910.975.691	Biro Humas
				Peningkatan kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di Luar Daerah (Orang)	8	45.509.076	Biro Humas
				Penyediaan Pakaian khusus lapangan Humas dan Protokol	Persentase Tersedianya Kelengkapan Khusus kerja(Orang)	63	115.000.000	Biro Humas
		Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan It	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Publikasi Media Massa / Cetak	Jumlah Publikasi di Media Massa/Cetak (Tayang)	106	2.578.875.000	Biro Humas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Publikasi Media Elektronik/ IT	Jumlah Tayangan Publikasi di Media elektronik dan IT (Tayang)	178	527.189.630	Biro Humas
				Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Jumlah Tayang Publikasi Media Luar (Tayang)	45	300.034.517	Biro Humas
				Penerbitan Majalah/ Bullettin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)	6348	435.168.492	Biro Humas
				Media Gathering	Jumlah peserta Media Gathering dari Media Lokal maupun Nasional (Orang)	53	60.024.250	Biro Humas
				Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT (Orang)	15	34.862.952	Biro Humas
				Workshop Bidang Kehumasan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan (Orang)	55	84.294.000	Biro Humas
		Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Buah)	6.017	90.673.906	Biro Humas
				Workshop Bidang Keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan (Orang)	80	225.072.558	Biro Humas
				Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Meningkatnya layanan tamu pemerintah dan negara (orang)	496	97.410.986	Biro Humas
				Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Tersedianya IT untuk Keprotokolan (Aplikasi)	1	172.500.000	Biro Humas
		Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek Pimpinan Daerah	24 kali	1.400.000.000	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah	Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Meningkatkan Peran	1 kali	200.000.000	Badan Penghubung Provinsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kebijakan pembangunaan daerah	Organisasi Kemasyarakatan Perantauan	Hubungan Antar Lembaga			
			Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah pendampingan kepala daerah/wakil kepala daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya	14 kali	350.000.000	Badan Penghubung Provinsi
				Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	2 acara	2.000.000.000	Badan Penghubung Provinsi
				Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	Frekuensi Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan Daerah	1x	65.000.000	Badan Penghubung Provinsi
				Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terpublikasinya Tayangan Jadwal Kalender Promosi Wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan	4.500.000.000	Badan Penghubung Provinsi
				Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan KEgiatan Penyusunan Informasi dan Promosi	100%	1.000.000.000	Badan Penghubung Provinsi
				Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	Jumlah Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	2 kali	750.000.000	Badan Penghubung Provinsi
		Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan	30 publikasi	2.976.224.900	Setwan
				Forum komunikasi sekwan se-Indonesia	Jumlah keikutsertaan sekretaris DPRD dalam forum	3 Dokumen/ Laporan	605.000.000	Setwan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Persentase Pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	77%	4.983.167.200	Setwan
	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan**	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibina	1	175.000.000	Biro Organisasi
			Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik	pembinaan kelembagaan UPT/Cabang dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah UPT/ Cabang Dinas Provinsi	1	180.000.000	Biro Organisasi
			Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatanya	sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	1	185.000.000	Biro Organisasi
				Rapat Koordinasi kelembagaan dan analisa jabatan	Jumlah peserta	7 kabupaten/kota	180.000.000	Biro Organisasi
				Monitoring kelembagaan UPT/Cabang Dinas Kabupaten Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang di monitoring	7 kabupaten/kota	190.000.000	Biro Organisasi
				Kompilasi peningkatan Data Kelembagaan Provinsi, Kabupaten, Kota	Jumlah Data Kelembagaan Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Data 7 Kab/Kota	190.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina	7 kabupaten/kota	190.000.000	Biro Organisasi
				Review pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat	Dokumen review pelaksanaan peraturan gubernur	1 Dok.	160.000.000	Biro Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				
				Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Evaluasi	1 Dok.	160.000.000	Biro Organisasi
				Evaluasi UPT/Cabang Dinas Perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Evaluasi	1 Dok.	170.000.000	Biro Organisasi
				Review pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT/ Cabang Dinas pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Dokumen review	1 Dok.	190.000.000	Biro Organisasi
				Rapat Penataan kelembagaan non perangkat daerah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah Dokumen kesepakatan	1 Dok.	210.000.000	Biro Organisasi
				Sinkronisasi uraian tugas perangkat daerah kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah laporan sinkronisasi uraian tugas	1 Dok.	160.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan kelembagaan perangkat daerah provinsi kab/kota	monitoring pelaksanaan Peraturan gubernur tentang uraian tugas kelembagaan non perangkat daerah	1	170.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan Standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil pada perangkat daerah	Persentase ASN yang memahami Standar Kompetensi Teknis	1	1.390.000.000	Biro Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dilingkunan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				
				Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	Jumlah dokumen pembinaan dan analisa beban kerja	1	160.000.000	Biro Organisasi
				evaluasi jabatan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah Jabatan ASN/PNS yang terevaluasi	1 Dok	160.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan dan analisa jabatan kabupaten dan kota	Jumlah dokumen pembinaan penyusunan jabatan kabupaten dan kota	1	170.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil pada perangkat daerah di lingkungan prov.kep. Bangka belitung	Jumlah dokumen kompetensi jabatan/teknis kabupaten/kota	1 Dok	190.000.000	Biro Organisasi
				Pelaksanaan analisa jabatan PNS Provinsi kepulauan bangka belitung	Persentase ASN yang memahami analisa jabatan	1 Dok	210.000.000	Biro Organisasi
				Pelaksanaan analisa beban kerja PNS Provinsi kepulauan bangka belitung	Persentase ASN/PNS yang memahami Analisa beban kerja	1	160.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan peta jabatan pns pemprop kep bangka belitung	Persentase usulan jabatan ASN/ PNS	1	170.000.000	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	30%	200.000.000	Biro Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	% OPD yang memahami penyusunan proposal dan mengikuti Sinovik	100%	300.000.000	Biro Organisasi
				Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah dokumen Rekomendasi hasil evaluasi yang dapat ditindaklanjuti	1 Dok.	200.000.000	Biro Organisasi
				Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk samsat sungailiat	jumlah ketetapan atas ISO	2 unit	260.000.000	Biro Organisasi
				Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	jumlah dokumen	1 dok	200.000.000	Biro Organisasi
				pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan pembinaan pelaksanaan SOP	1 Dok.	190.000.000	Biro Organisasi
				Rapat Koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta	7 Kab/kota	210.000.000	Biro Organisasi
				Roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dok.	290.000.000	Biro Organisasi
				penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan optimalisasi penyelenggaraan SPM	1 Lap.	300.000.000	Biro Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja	Jumlah buku laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja	20 buku	225.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	Jumlah buku pedoman indikator kinerja utama provinsi	0	0	Biro Organisasi
				Bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja,perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja, di lingkungan pemprov babel	Jumlah peserta bimtek	50 org	225.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Laporan	1 laporan	225.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, capdin dan UPT dilingkungan pemprov babel	Jumlah laporan	1 laporan	175.000.000	Biro Organisasi
				Rakor evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Laporan	1 laporan	175.000.000	Biro Organisasi
				Bimbingan teknis pengisian LHKPN	Jumlah peserta	50	200.000.000	Biro Organisasi
				Pembangunan zona integritas	Jumlah laporan	1 laporan	175.000.000	Biro Organisasi
				Rapat Koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	-	4 laporan	225.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan data base capaian kinerja individu	Jumlah laporan	1 laporan	260.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan standar capaian kinerja	Jumlah buku, pergub dan laporan	50 buku	275.000.000	Biro Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				individu ASN				
				Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah	Jumlah pergub, jumlah laporan	50 buku	275.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan pedoman pengembangan penerapan budaya kerja ASN	Jumlah pergub, jumlah laporan	50 buku	275.000.000	Biro Organisasi
				Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN dilingkungan pemprov babel	jumlah peserta	43 orang	275.000.000	Biro Organisasi
				Penyusunan profil aparatur jabatan struktural	Jumlah laporan	1 laporan	165.000.000	Biro Organisasi
				Pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT Pemprop	Jumlah laporan	1 laporan	175.000.000	Biro Organisasi
				Forum sekretaris daerah	Jumlah laporan	1 laporan	185.000.000	Biro Organisasi
				Forum staf ahli kepala Daerah	Rakor dan laporan	1 laporan	195.000.000	Biro Organisasi
	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	**Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan**	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Perencanaan dan pengadaan ASN	jumlah yang lulus CASN/ASN; jumlah dokumen perencanaan kepegawaian; jumlah peserta yang lulus seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan	150 Org; 4 Dokumen; 25 Org	1.350.400.000	Bkpsdm
			Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	Pengelolaan administrasi kepangkatan dan pensiun	jumlah ASN yang diusulkan naik pangkat dan pensiun	600 Orang	210.000.000	Bkpsdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Promosi dan mutasi ASN	jumlah ASN yang lulus seleksi mutasi; jumlah ASN yang diusulkan promosi/mutasi	63 Orang; 270 Orang	1.040.000.000	Bkpsdm
		Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Asn	Persentase ASN yang menerima penghargaan	Peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan pengembangan profesi ASN	jumlah ASN berprestasi; jumlah ASN yang menerima Karis/Karsu/Karpeg/KGB,jumlah ASN Penerima Satyalencana; jumlah ASN Purnabhakti; Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi; jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran; Jumlah atlet ASN yang mengikuti kejuaraan KORPI antar instansi Pemprov/PRONAS; jumlah kegiatan bhakti sosial KORPRI; Jumlah ASN yang dibina rohaninya;	5 Org; 2138 Org; 100 Org; 124 Org; 3 Dokumen; 14 Org; 1380 Org; 5 Kegiatan 1600 Org	3.537.096.000	Bkpsdm
			Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	Pembinaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	jumlah regulasi kepegawaian; jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani; jumlah ASN yang diperiksa untuk cuti sakit/kejiwaan; jumlah ASN yang dibina pernikahan/perceraian; jumlah ASN yang diperiksa Narkoba; jumlah ASN yang mengikuti Workshop; jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi; jumlah ASN yang dibina disiplinnya	3 dokumen; 6 Kasus; 3 Org; 2 Org; 1300 Org; 46 Org; 3000 Org; 4000 Org	1.460.500.000	Bkpsdm
			Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	jumlah ASN yang di monev SKP nya	4100 Org	201.250.000	Bkpsdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	Penguatan sistem informasi dan pengelolaan database/arsip kepegawaian	Jumlah buku profil kepegawaian dan DUK; jumlah aplikasi kepegawaian yang dirilis; jumlah data kepegawaian yang diupdate; jumlah artikel,konten, terjemahan; jumlah arsip kepegawaian; jumlah ID Card; jumlah ASN yang diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir	280 Buku; 5 Aplikasi; 8500 data; 350 artikel/terjemahan/konten; 4500 arsip; 10 org	852.000.000	Bkpsdm
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional; jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bimtek melalui jalur kontribusi; jumlah ASN yang mengikuti magang	1000 Orang	7.562.000.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	Peningkatan pendidikan formal	jumlah ASN yang menerima beasiswa dan cost sharing	38 Orang	3.000.000.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	Pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	jumlah ASN yang lulus diklat dasarjumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan	120 Orang; 160 Orang	4.235.000.000	Bkpsdm
			Nilai akreditasi Diklat	Peningkatan mutu kediklatan	jumlah dokumen; Nilai akreditasi Diklat	4 Dokumen	437.500.000	Bkpsdm
		Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Asn	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaiaan	Pengukuran dan penilaian kompetensi aparatur	Jumlah ASN yang dipetakan rekam jejaknya; Jumlah ASN yang mengikuti Assesment; Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II; Jumlah ASN yang lulus seleksi PIM III dan IV; Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN; Jumlah	200 Org; 100 Org; 100 Org; 1 Org; 10 Org; 0 Org; 200 Org	2.000.000.000	Bkpsdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ASN yang dianalisa kebutuhan Uji Kompetensinya; jumlah ASN yang mengikuti Roadshow penilaian kompetensi ASN; jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scouting			
	Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	**Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	12	1.100.000.000,00	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	12	1.017.000.000,00	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	12	600.000.000,00	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	12	504.987.500,00	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	12	682.137.500,00	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	12	853.012.500,00	Bakuda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	12	986.591.612,50	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	12	102.089.231,25	Bakuda
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12	628.893.618,75	Bakuda
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Rakor Forum PTSPse provinsi kepulauan bangka Belitung	Jumlah pelaksanaan rakor forum ptsp	3 kali	400.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rakor tim teknis perizinan dan non perizinan	Jumlah pertemuan untuk penataan dan regulasi dalam penyelenggaraan PTSP	2 pertemuan	350.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan	Jumlah buku kompilasi berisikan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan	40 buku	55.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyediaan Sistem Informasi Perizinan	Aplikasi database	0	350.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	Jumlah buku penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	797	1.704.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bangka	Pangkalpinang dan Bangka					
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	1573 Siswa	3.000.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	625	1.250.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	550	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	404	808.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	800	1.434.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	775	1.395.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	859	1.546.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	663	1.193.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa terlayani	270	1.785.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa terlayani	1	2.248.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa terlayani	723	1.446.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Jumlah siswa terlayani	385	770.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa terlayani	428	856.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa terlayani	345	690.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	345	642.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	514	925.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	552	993.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	239	430.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	480	864.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali,	Jumlah siswa terlayani	800	1.440.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kabupaten Bangka				
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	553	995.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	370	666.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	890	1.600.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa terlayani	224	403.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah siswa terlayani	116	812.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	729	1.458.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	618	1.236.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	671	1.342.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	364	728.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	192	384.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	658	1.184.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	665	1.197.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	646	1.162.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	471	847.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	655	1.179.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa terlayani	406	730.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Jumlah siswa terlayani	95	665.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	729	1.458.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	802	1.604.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	824	1.648.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	900	1.800.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	287	574.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	726	1.306.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	486	874.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	481	865.800.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	481	955.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	296	532.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa terlayani	615	1.107.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Jumlah siswa terlayani	128	1.620.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Jumlah siswa terlayani	80	560.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	851	1.702.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	377	790.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	153	306.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	377	754.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	158	316.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	438	876.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	646	1.162.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	302	543.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	257	462.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	653	1.175.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	209	376.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	460	828.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	900	1.620.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	542	975.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa terlayani	100	700.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Jumlah Sekolah terlayani	1	2.200.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa terlayani	834	1.668.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa terlayani	564	1.128.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa terlayani	555	1.110.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Jumlah siswa terlayani	196	392.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Jumlah siswa terlayani	528	950.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa terlayani	539	970.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa terlayani	750	1.350.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, KabupatenBelitung	Jumlah siswa terlayani	821	1.477.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa terlayani	150	750.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa terlayani	758	1.516.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	573	1.146.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	202	1.414.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	212	424.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	387	696.600.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	689	1.240.200.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	498	896.400.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	676	1.216.800.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	525	945.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	120	840.000.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa terlayani	128	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Kumkm	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha	94%	915.000.000	Dinas Kumkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KUMKM		Terpadu (PLUT) KUKM			
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase akreditasi pelayanan rumah sakit	100	251.710.000	Rsup
					Persentase unit Pelayanan yang telah memiliki SOP	70%	8.000.000.000	Rsup
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi kesehatan	90%	15.269.290.000	Rsup
		Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pelayanaan Teknis Medik Kejiwaan	Survey kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	82	61.000.000	Rsj
				Penilaian Akreditasi RS	Jumlah Sertifikat Akreditasi dari Tim KARS (Dokumen)	1	536.000.000	Rsj
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	Akreditasi Laboratorium			195.693.300	Uptd Dinkes
	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan**	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	Peningkatan pelayanan publik	Jumlah dokumen SOP dan Penerapannya	1	267.149.850	Biro Layanan Pengadaan
				Pengelolaan Data dan Informasi	jumlah sosialisasi	41	284.955.000	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan Administrasi dan Ketatausahaan	Jumlah RUP OPD yang terinput melalui sistem pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	8	452.358.500	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung aplikasi sistem pengelolaan	1	422.615.490	Biro Layanan Pengadaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					informasi barang/jasa			
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan	3	544.971.900	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Frekuensi Pendampingan dan Monev Pengadaan	2	445.376.800	Biro Layanan Pengadaan
				Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Pengaduan	2	653.412.100	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan fungsi pelayanan ULP	Jumlah Bulan Layanan Pengadaan oleh ULP	12	3.894.264.000	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan e-procrument terhadap belanja pengadaan	2	1.059.106.950	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE	1	860.007.500	Biro Layanan Pengadaan
				Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa	12	1.275.158.500	Biro Layanan Pengadaan
				Peningkatan Fungsi LPSE	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE	12	2.327.749.600	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah bidang tanah yang disertifikat	9 bidang tanah	110.250.000	Biro Pemerintahan
			Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rekomendasi penyelesaian batas daerah (1 sengketa)	1	124.260.000	Biro Pemerintahan
			Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah	Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan,	Jumlah pulau yang terinventarisir	109 pulau	165.300.000	Biro Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			administrasi yang diselesaikan	Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)				
				Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah	Jumlah pilar batas yang diinventarisir dan dipelihara	30 pilar batas	85.300.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Bangka	jumlah pilar batas yang dipasang	10 pilar batas	137.300.000	Biro Pemerintahan
				Pengadaan Lahan	Jumlah Lahan yang tersedia	0	0	Biro Pemerintahan
		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dokumen	1	386.500.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	Dokumen LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 50 Dokumen	50	450.000.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan, laporan internal Biro Pemerintahan dan evaluasi. 6 Dokumen	6	110.250.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di	Jumlah dokumen EKPPD Kabupaten/Kota yang tersusun 7 Dokumen	7	490.000.000	Biro Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
				Kegiatan Desk Pilkada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Kabupaten/Kota	3	100.000.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penngangkatan KDH dan WKDH	Jumlah KDH dan WKDH Kabupaten/Kota yang dilantik di Provinsi 6 Orang	6	220.000.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	Jumlah SK PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 5 SK	5	165.375.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	Jumlah Izin ke Luar Negeri yang dikeluarkan 10 Surat Izin	10	165.375.000	Biro Pemerintahan
				koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Prosentase terlaksananya secara optimal penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomidaerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 %	100	241.100.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah peserta Rakor NSPK 50 orang	50	241.100.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi	Jumlah pelaksanaan workshop 1 kali workshop	1	241.100.000	Biro Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
		Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	401.508.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Jumlah keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam APPSI 4 Kali	4	241.980.000	Biro Pemerintahan
				Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	Jumlah keikutsertan dalam BKS Provinsi Kepulauan 4 Kali	4	273.290.000	Biro Pemerintahan
				Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi 4 proposal bantuan	4	82.560.000	Biro Pemerintahan
				Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah dokumen kerjasama 10 dokumen	10	151.631.000	Biro Pemerintahan
				Inventarisasi potensi kerjasama	Jumlah dokumen inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 1 dokumen	1	130.000.000	Biro Pemerintahan
				Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat			470.000.000	Biro Pemerintahan
		Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	Jumlah peserta bimtek (Orang)	115	260.150.000	Dkpus

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi (orang/entitas)	61	234.517.350	Dkpus
				Penilaian Angka Kredit Arsiparis	Jumlah PAK yang dinilai (PAK)	80	121.435.600	Dkpus
				Pembinaan kearsipan di pemerintah prov. Kep. Bangka belitung	Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan dan Jumlah SMA/SMK dan SLB (SMA/SMK dan SLB), Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung yang dibina (Perangkat Daerah)	75	418.383.850	Dkpus
				Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan (Perangkat Daerah)			Dkpus
				Arsip Masuk Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip (Desa/Kel)	42	317.872.800	Dkpus
				Sosialisasi peraturan kearsipan	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan kearsipan (orang)	150	165.000.000	Dkpus
				Pembinaan kearsipan SMA/SMK dan SLB, Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah SMA/SMK dan SLB, Ormas, Perusahaan, BUMD dan PARPOL Prov Kep Bangka Belitung yang dibina (SMA/SMK dan SLB)			Dkpus
				Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	Persentase pengawasan kearsipan di Ormas, Perusahaan, BUMD dan parpol (kab/kota) dan jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD	45	346.346.700	Dkpus

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)			
				Pengawasan kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung SMA/SMK dan SLB	jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung (Instansi)			Dkpus
				Revisi Peraturan daerah tentang Kearsipan	jumlah peraturan daerah tentang kearsipan (perda dan pergub)		0	Dkpus
		Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip yang dipelihara provinsi (arsip)	200	70.000.000	Dkpus
				Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/Kota Provinsi kep Bangka Belitung	jumlah LKD di kab/kota (LKD Kab/Kota)	7	115.000.000	Dkpus
				Pengelolaan dan pendataan arsip asset di 7 Kab/Kota Prov Kep Babel	jumlah arsip asset yang terdata di 7 kab/kota (Arsip)	50	255.000.000	Dkpus
				Pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Provinsi kep Bangka Belitung	Jumlah arsip terjaga yang terdata di 6 Perangkat Daerah (Arsip)	50	95.000.000	Dkpus
				Pengelolaan arsip kacau di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi kep Bangka Belitung	Jumlah arsip kacau yang terdata di 6 perangkat daerah (arsip)	60	95.000.000	Dkpus
				Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	jumlah LKD di kab/kota (LKD Kab/Kota)	7	255.000.000	Dkpus

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pendataan arsip Inaktif di SKPD Pmerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah arsip Inaktif di Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	6	82.687.500	Dkpus
				Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pengunjung pameran (orang)	300	385.875.000	Dkpus
				Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota	Jumlah LKD kab/kota yang didampingi (arsip)	7	141.750.000	Dkpus
				Penerapan E-Arsip	Jumlah PD yang ter daftar elektronik arsip (40 PD)	40	250.000.000	Dkpus
			Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan ;	Penyediaan Bahan Pustaka	jumlah judul Koleksi Bahan Pustaka perpustakaan prov (judul)	250	150.000.000	Dkpus
				Penerbitan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah terbitan (eksemplar)	4.000	357.000.000	Dkpus
				Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah (dokumen)	2	145.000.000	Dkpus
				Pengembangan dan Pengumpulan Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka (buah)	107	186.322.500	Dkpus
				Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Jumlah koleksi hasil terbitan daerah yang terkumpul berupa karya cetak dan karya rekam (terbitan)	160	85.000.000	Dkpus
			Pertambahan pengunjung perpustakaan	Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan terkelola (Bahan Pustaka)	500	125.000.000	Dkpus
				Workshop Pembuatan Resensi Buku	Jumlah peserta yang memahami pembuatan resensi buku (orang)	100	167.350.000	Dkpus
				Kegiatan Pengembangan Minat	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam	1.200	600.000.000	Dkpus

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Budaya Baca	kegiatan (orang)			
				Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat (orang)	5	450.000.000	Dkpus
				Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum (Orang)	10.000	300.000.000	Dkpus
				Kegiatan Pengelolaan Layanan Website	Jumlah informasi yang tersedia dalam website (informasi)	250	75.000.000	Dkpus
				Kegiatan Pameran buku	Jumlah pengunjung pameran dan bedah buku (Orang)	4.000	700.000.000	Dkpus
				Monitoring dan Evaluasi Bantuan Penyediaan Buku Bacaan pada Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima bantuan penyediaan bahan pustaka (Sekolah)	70	50.000.000	Dkpus
		Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	Penyediaan Buku Bacaan pada Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan buku bacaan (Sekolah)	1.030	600.000.000	Dkpus
		Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase masyarakat yang memanfaaatkan layanan interaktif	Pemberdayaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat	40%	650.492.086	Diskominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Pengawasan dan pengendalian keamanan sistem informasi	Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi	60%	189.000.000	Diskominfo
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang	Jumlah peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang	250 eksemplar	150.000.000	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government	60%	1.521.804.900	Kominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	5.797.060.500	Kominfo
				Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat	Jumlah media penyebaran informasi masyarakat	2 unit (Belitung, Belitung Timur), 5 unit operasional	4.146.906.500	Kominfo
				Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Kapasitas jaringan komunikasi data	6 interkoneksi, 1 server, 2 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	360.000.000	Kominfo
				Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Jumlah kebijakan di bidang keamanan informasi	1 insiden	170.000.000	Kominfo
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten	0%	160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda	0%	175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi	0%	215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah	0%	130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan	0%	110.000.000	Diskominfo

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola SIAK Provinsi	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	2	120.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat provinsi	100	70.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50	150.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Konsolidasi Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan konsolidasi Database Kependudukan Tingkat Provinsi	2	70.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2	60.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola SIAK Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang mampu mengelola SIAK	21	120.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Database Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan PD Provinsi dan Jumlah Rapat Pelaksanaan dengan instansi terkait	5	275.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rapat Teknis Penyelengaraan Adminduk	80	85.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Pengembangan SDM	Jumlah aparatur yang mampu melayani administrasi kependudukan secara profesional	2	210.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50	325.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	150 Orang	802.252.124	Dinas PUPR
			Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi		Jumlah layanan kerjasama lembaga dan masyarakat jasa konstruksi	3 Laporan	687.338.307	Dinas PUPR
			Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	3 Layanan	1.034.586.871	Dinas PUPR
	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Pendampingan Kelembagaan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu aktif	75 Pokjanal Posyandu	1.099.122.436	Dpmd
					Jumlah Lembaga CPPD yang terbentuk dan terbina	10 Lembaga		Dpmd
					Jumlah BUMDES yang aktif	30 BUMDes		Dpmd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif	10 Lembaga Adat		Dpmd
				Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	2 Rakor		Dpmd
					Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	1.466.325.000	Dpmd
					Jumlah peserta yang hadir	160 orang		Dpmd
					Jumlah alat yang diberikan	8 unit		Dpmd
			Persentase Posyandu aktif	Pendampingan Kelembagaan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu aktif			Dpmd
			Persentase PKK aktif	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok PKK yang dibina	12 Kelompok PKK		Dpmd
					Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM	7 Desa/Kel	1987256250	Dpmd
					Jumlah Rakor PKK Provinsi yang terlaksana	20 Rakor		Dpmd
		Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Rakor PKP yang terlaksana	2 Rakor	1.441.961.026	Dpmd
					Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen		Dpmd
					Jumlah Kerjasama	2 Kerjasama		Dpmd
		Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	3 Layanan	1.034.586.871	Dpmd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kapasitas Apatur Desa dan BPD	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	50 aparatur	758.520.000	Dpmd
					Jumlah BPD yang dibina	40 orang		Dpmd
				Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	Jumlah Bendahara Desa yang dibina	30 orang	150.000.000	Dpmd
			Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya	12 Desa/ Kel	1.059.974.004	Dpmd
					Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun dan terbina	21 Desa/ Kel		Dpmd
					Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun	2 Laporan		Dpmd
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen rencana kawasan transmigrasi	1 dokumen	267.430.000	Disnaker
				peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi Jebus yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi			Disnaker
				gema hari bhakti transmigrasi tingkat provinsi kep. Bangka belitung	Jumlah laporan tentang pelaksanaan hari bhakti transmigrasi	1 laporan	150.000.000	Disnaker
				pendampingan warga msyarakat kawasan transmigrasi	jumlah masyarakat kawasan yang dibina	30 orang	160.000.000	Disnaker
				pelayanan pertanahan transmigrasi	jumlah lahan yang diselesaikan permasalahannya	1 lahan	170.000.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/ Yayasan/ Organisasi Sosial dan Kader Masyarakat dalam Pelayanan Lanjut Usia	300	300.000.000	Dinsos
				Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	270	400.000.000	Dinsos
				Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas	100	350.000.000	Dinsos
				Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial	140	250.000.000	Dinsos
				Optimalisasi Kinerja Komda Lanjut Usia	Meningkatnya Kinerja dan Peran serta KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota dalam Memberikan Pelayanan Kepada Lanjut Usia	8	100.000.000	Dinsos
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial	55	600.000.000	Uptd Panti Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan	10	300.000.000	Uptd Panti Sosial
				Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja	20	50.000.000	Uptd Panti Sosial
				Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan	20	75.000.000	Uptd Panti Sosial
				Rehabilitasi ringan prasarana panti	Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi	1	150.000.000	Uptd Panti Sosial
				Pembangunan prasarana panti	Jumlah sarana dan prasarana panti yang dibangun		0	Uptd Panti Sosial
		Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	Pendampingan dan pembinaan lanjutan klien	Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan	10	40.000.000	Uptd Panti Sosial
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	20	60.000.000	Uptd Panti Sosial
				Pengelolaan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Panti	Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti	20	700.000.000	Uptd Panti Sosial
				Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti	Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP	4	40.000.000	Uptd Panti Sosial
				Penyediaan dan dukungan sarana penunjang panti	Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti	1	400.000.000	Uptd Panti Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelola panti	Jumlah pengelola panti yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan	4	20.000.000	Uptd Panti Sosial
				Pembangunan prasarana panti	Jumlah sarana dan prasarana panti yang dibangun		0	Uptd Panti Sosial
				Rehabilitasi ringan prasarana panti	Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi	1	150.000.000	Uptd Panti Sosial
				Rehabilitasi sedang/ berat prasarana panti	Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi			Uptd Panti Sosial
				Sosialiasi penyalahgunaan Napza	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	20	40.000.000	Uptd Panti Sosial
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia	70 peserta	90.750.000	Diskepora
			Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out	18 atlet	118.580.000	Diskepora
				Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi	2 medali	194.810.000	Diskepora
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional	60 peserta	424.754.246	Diskepora
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan	Upaya Kesehatan masyarakat	Jumlah petugas puskesmas yang terorientasi kesehatan lansia dan geriaatri	90	1.163.501.325	Dinkes
		Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep bangka Belitung	Persentase pembinan Masyarakat	85%	1.550.000.000	Biro Kesra

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	Peningkatan kehidupan beragama pda bulan Ramadahn	Frekuensi Penyelenggaraan safari ramadhan	22 masjid	600.000.000	Biro Kesra
				Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	60 orang	350.000.000	Biro Kesra
				Pendampingan jamaah haji	Terseleksinya Petugas haji daerah TPHD/TKHD	11 orang	650.000.000	Biro Kesra
				Pembiayaan Transportasi Domestiik Jemaah Haji	jumlah jemaah haji yang dibantu	1.200 org	3.200.000.000	Biro Kesra
				Penyelenggaraan Pemberangkatan dan pemulangan Haji	Jumlah jemaah haji yang di fasilitasi	1.200 orang	1.100.000.000	Biro Kesra
				Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Jumlah Kafilah yang mengikuti MTQ/STQ	32 orang	1.550.000.000	Biro Kesra
				Musabaqoh Hafidz Quran Internasional	terlaksananya musabaqoh hafiz	1 kali	2.450.000.000	Biro Kesra
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang lainnya yang mendapat pelatihan berkelanjutaan	10 paket	1.250.000.000	Disnaker
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	pemberdayaan tenaga kerja lansia	jumlah peserta pemberdayaan tenaga kerja lansia	100 orang	170.000.000	Disnaker
			Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	pemberdayaan tenaga kerja eks korban napza	jumlah peserta pemberdayaan tenaga kerja eks korban napza	50 orang	190.000.000	Disnaker
			Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	pemberdayaan tenaga kerja wanita tuna sosial	jumlah peserta pemberdayaan tenaga kerja wanita tuna sosial	50 orang	200.000.000	Disnaker
			Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	pemberdayaan tenaga kerja disabilitas	jumlah peserta pemberdayaan tenaga disabilitas	50 orang	180.000.000	Disnaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	-. Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial; -. Jumlah keluarga miskin penerima santunan kematian	1,5	500.000.000	Dinsos
				Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH	45	1.000.000.000	Dinsos
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3	80	250.000.000	Dinsos
				Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan	1	300.000.000	Dinsos
				Peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Jumlah peserta dan partisipasi dalam memperingati Hari pahlawan dan HKSN	116	148.000.000	Dinsos
				Penyuluhan Sosial	Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial	325	250.000.000	Dinsos
				Pameran Produk Pemberdayaan Sosial Bagi Penerima Manfaat	Jumlah kelompok usaha/penerima manfaat/produk binaan yang berpartisipasi	10	200.000.000	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanaan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah dunia usaha/lembaga/masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku	35	150.000.000	Dinsos
				Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah pilar-pilar Sosial yang diberdayakan	100	200.000.000	Dinsos
	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	1	250.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan sosialisasi undang-undang PKDRT, perlindungan anak dan TPPO	Jumlah kab/kota yang melaksanakan sosialisasi UU PKDRT, perlindungan anak dan TPPO	7	232.216.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
					Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT	100		Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak yang tersusun di kab/kota	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan sosialisasi three ends	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Three Ends	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban traficking	Jumlah peserta pelatihan pencegahan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban traficking	100	242.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta bimtek aplikasi data kekerasan perempuan dan anak	50	187.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Jumlah penanganan korban tindak kekerasan dan TPPO	5	205.758.400,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan sosialisasi SOP layanan korban kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta sosialsasi SOP layanan korban kekerasan perempuan dan anak	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah Peserta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga	100	250.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pelatihan pendampingan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Peserta pelatihan pendampingan perlindungan perempuan dan anak	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	Kegiatan rapat koordinasi pemenuhan hak anak antar stakeholder	Jumlah OPD, Lembaga dan Instansi yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	11 OPD, 5 (LM, Dunia Usaha, Media Massa), 4 instansi lain	132.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak indonesia	89	200.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Jumlah advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	7	130.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	800	300.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penduduk Kb
				Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	100	300.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	Jumlah peserta workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	120	150.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah korban tindak kekerasan bermasalah sosial yang mendapat perlindungan dan bantuan usaha	31	250.000.000	Dinas Sosial
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Diskominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Diskominfo
	Menjamin hak anak dalam pembangunan	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak**	Persentase Kab/Kota Layak Anak	Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi	Kelancaran fungsi KPAD	1	270.000.000	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kepulauan Bangka Belitung				
				Kegiatan Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	Jumlah peserta Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	80	110.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	4	110.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan workshop kab/kota Menuju Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta workshop workshop kab/kota Menuju Provinsi Layak Anak (PROVILA)	40	200.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Sosialisasi mengenai perlindungan hak-hak anak	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat pemahaman mengenai hak-hak anak	80	132.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi antar Stakeholder dan SKPD terkait hak-hak anak	Jumlah Lembaga, Dunia Usaha dan OPD yang sepakat terhdap upaya pencegahan pekerja anak	60	88.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan pemdampingan anak korban kekerasan	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pendampingan	5	66.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kekerasan dan anak	Jumlah kabupaten/kota yang di monitor dan di evaluasi terkait kekerasan terhadap anak	7	49.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran	2	60.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan	2	120.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					Kelahiran	Akta Kelahiran			Penduduk Kb
					Pembinaan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah rapat Pembinaan Kepemilikan Akta Kelahiran	2	115.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi	5	90.000.000	Dinas Sosial
					Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum	10	120.000.000	Dinas Sosial
			Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	Peningkatan kesehatan gizi anak	Jumlah bantuan makanan sehat lokal untuk pemulihan ke balita gizi kurang/buruk	200 paket	2.436.525.000	Dinas Kesehatan
12	PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	**Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.	Jumlah Peserta Yang Memahami Wawasan Kebangsaan (orang).	120	164.000.000	Kesbangpol
					Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai - nilai Sejarah Perjuangan Bangsa.	Jumlah Peserta yang memahami nilai - nilai sejarah (orang).	147	339.000.000	Kesbangpol
					TOF Pendidikan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah Fasilitator Pendidikan Wawasan Kebangsaan (orang).	50	164.000.000	Kesbangpol
					Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah Sekolah yang dikunjungi (sekolah)	14	242.000.000	Kesbangpol
					Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan kader bela negara	Jumlah Kader Bela Negara (orang).	78	273.000.000	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penguatan Wawasan Kader Bela Negara.	Jumlah Kader Bela Negara yang Terlatih (orang).	78	182.000.000	Kesbangpol
				Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	2	121.000.000	Kesbangpol
				Penguatan Data Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Data dan informasi (berkas)	4	102.000.000	Kesbangpol
				Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Komponen Masyarakat/Aparatur yang terlibat dalam setiap aksi Gerakan Revolusi Mental (kelompok masyarakat)	13	363.000.000	Kesbangpol
				Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT RI (Orang)	5000	1.265.000.000	Kesbangpol
			Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	TOT Pembauran Kebangsaan.	Jumlah Kader Pembauran Kebangsaan (Orang)	50	164.000.000	Kesbangpol
				Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan.	Jumlah Cakupan yang Kategori Lomba (kategori)	3	339.000.000	Kesbangpol
				Pagelaran Budaya Nusantara.	Jumlah Budaya Nusantara di Bangka Belitung (jenis)	12	164.000.000	Kesbangpol
				Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	3	224.000.000	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Penguatan Kerjasama Intelijen lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung.	Jumlah Laporan (Laporan)	4	360.000.000	Kesbangpol
				Rapat Koordinasi Daerah Forum Kemasyarakatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangka Belitung (Rakorda dan evaluasi FKUB, FKDM, FPK, PPWK, FKPT).	Jumlah Rekomendasi Kesepahaman Bersama Forum Daerah (rekomendasi).	5	260.000.000	Kesbangpol
				Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA.	Jumlah Laporan (Laporan)	4	320.000.000	Kesbangpol
				Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung.	Jumlah Laporan (Laporan)	4	125.000.000	Kesbangpol
				Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme.	Jumlah Pemuda dan Pelajar yang Memahami akan Potensi Terorisme dan Radikalisme (orang)	350	395.000.000	Kesbangpol
				Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial	Peringkat pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Peringkat)	4	720.000.000	Kesbangpol
				Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian	Jumlah Data dan Informasi yang diperoleh dari Masyarakat (berkas)	4	105.000.000	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat.				
				Pemetaan Situasi dan kondisi Konflik sosial di daerah	Jumlah laporan daerah yang terdata Konflik Sosial (laporan)	1	230.000.000	Kesbangpol
				Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini.	Jumlah unsur elemen masyarakat yang ikut dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini (orang)	20	90.000.000	Kesbangpol
				Pemberdayaan FKDM (amanat Permendagri No. 12 Tahun 2016).	Data dan Informasi mengenai Potensi Ancaman Keamanan, Gejala/Peristiwa Bencana. (berkas)	10	140.000.000	Kesbangpol
				Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Rekomendasi Pencegahan Radikal Terorisme (rekomendasi)	1	550.000.000	Kesbangpol
				Studi pengembangan manajemen Konflik dan Pengelolaan daerah Konflik	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	3	90.000.000	Kesbangpol
				Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerah Kab/Kota dalam rangka peningkatan Keamanan	Jumlah Rekomendasi Kerjasama antar daerah kabupaten/kota (Rekomendasi)	3	155.000.000	Kesbangpol
		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	Evaluasi dan Verifikasi Data Ormas.	Jumlah Ormas yang diverifikasi (ormas)	52	182.000.000	Kesbangpol
				Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	3	121.000.000	Kesbangpol
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas.	Jumlah Peserta yang memahami Undang - Undang Ormas (orang)	80	84.000.000	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Forum Koordinasi Peran Pemda dalam menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Sembako di Daerah.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	4	182.000.000	Kesbangpol
				Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah	Jumlah Dokumen (Dokumen)	4	270.000.000	Kesbangpol
				Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	4	176.000.000	Kesbangpol
				Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Data dan Informasi Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Bangka Belitung (laporan)	4	302.500.000	Kesbangpol
				Penguatan Komunikasi dan Kerjasama antara Pemerintah daerah dan Ormas	Jumlah Ormas (Ormas)	10	484.000.000	Kesbangpol
			Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya.	Jumlah Rekomendasi (rekomenndasi)	4	84.000.000	Kesbangpol
				Peran serta Seniman dan Budayawan dalam Melestarikan Seni dan Budaya.	Jumlah seniman dan budayawan yang melestarikan seni dan budaya (orang)	70	84.000.000	Kesbangpol
				Workshop Optimalisasi Peran Aparatur, Ormas dan Masyarakat dalam Menjaga Seni dan Budaya.	Jumlah Peserta dalam Menjaga Seni dan Budaya (orang)	90	84.000.000	Kesbangpol
	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	**Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	Penyelanggarakan ketertiban umum dan ketentraman	Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP	12 bulan	669.700.050	Satpol Pp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			masyarakat	(penertiban, pengawalan, pengawalan dan patroli)			
				Pengamanan aset	Jumlah bulan pengamanan aset	12 bulan	1.622.799.950	Satpol Pp
				Patroli	Jumlah patroli	12 bulan	280.000.000	Satpol Pp
				Gelar pasukan dalam rangka penyelenggaraan tibumtranmas, linmas dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran	Jumlah peserta gelar pasukan	800 orang	149.297.500	Satpol Pp
				Penyelenggaraan deteksi dini	Jumlah kegiatan rapat	4 kali	100.000.000	Satpol Pp
		Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	Pembinaan dan penyelenggaraan kantrantibmas bagi satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung	jumlah peserta satlinmas			Satpol Pp
				Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung	jumlah peserta satlinmas			Satpol Pp
				Jambore Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah peserta satlinmas	198 orang satlinmas	446.642.000	Satpol Pp
				Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah peserta satlinmas	90 orang satlinmas	333.559.000	Satpol Pp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol Pp	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	Pembinaan peningkatan personil bagi satuan Polisi Pamong Praja (pembinaan mental, beladiri dan senam, pelatihan pengamanan unjuk rasa, kesemaptaan dan instruktur upacara)	Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan	740 orang kali	200.000.000	Satpol Pp
				Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat	25 orang	157.903.500	Satpol Pp
				Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta diklat dasar pol pp	50 orang	500.000.000	Satpol Pp
				Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta uji kompetensi	50 orang	200.000.000	Satpol Pp
				Pendidikan dan latihan pemadam kebakaran bagi Satpol PP	Jumlah peserta	80 orang	350.000.000	Satpol Pp
				Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Jumlah peserta	50 orang	150.000.000	Satpol Pp
				Bimtek peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dalam menciptakan tibumtranmas, stabilitas politik, penegakkan perda dan perkada	jumlah peserta	80 orang	110.000.000	Satpol Pp
		Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	Pembinaan dan penindakan non yustisial	Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial	352 orang	261.811.500	Satpol Pp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan)	10 penyelidikan dan 3 penyidikan	141.657.000	Satpol Pp
				Penatakelolaan sekretariat PPNS	Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksana dan penertiban Satpol PP	10 kali kegiatan rapat	41.120.000	Satpol Pp
				Pemberdayaan peran dan tugas PTI Satpol PP Provinsi Kep. Babel	Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP	12 dokumen	23.950.000	Satpol Pp
				Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel	Jumlah peserta rakor satpol pp dengan PPNS	20 orang	58.367.000	Satpol Pp
	Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	Jumlah kader partai perempuan yang mendpatkan kegiatan peningkatan partisipasi politik	30	82.500.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				KegiatanPelatihan dan Pembentukan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan	Jumlah failitator pendidikan politik perempuan	20	82.500.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan advokasi Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif	Jumlah partai politik yang diadvokasi	10	89.100.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Seminar, workshop, FGD dan diseminasi tentang peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga publik	Jumlah peserta yang menikuti seminar, workshop, FGD, dan diseminasi tentang peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga publik'	40	132.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kampanye peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampanye peningkatan	5	46.200.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				publik melalui media	keterwakilan perempuan di lembaga publik melalui media			Penduduk Kb
				Kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender	30	85.000.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Kegiatan Pemberdayaan ormas dan LM yang berbasis gender	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang aktif dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30	82.500.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
				Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender bagi Institusi Media Massa	Jumlah peserta pengembangan organisasi dan lembaga masyarakat yang aktif dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30	82.500.000,00	Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	Dialog Penguatan Partisipasi Politik	Jumlah peserta yang memahami undang-undang mengenai Politik (orang)	50	85.000.000	Kesbangpol
				Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	4	240.000.000	Kesbangpol
				Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi politik di Daerah.	Data dan informasi (berkas)	4	275.000.000	Kesbangpol
				Sosialisasi Undang - Undang Politik.	Jumlah peserta yang Memahami Undang - undang politik (orang)	280	254.000.000	Kesbangpol
				Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik.	Jumlah peserta yang memahami Etika dan Budaya Politik (orang)	350	330.000.000	Kesbangpol
				Sosialisasi Undang - Undang Pemilu.	Jumlah peserta yang memahami Undang-Undang Pemilu (orang)	420	423.500.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	**Program Pembinaan Politik Dalam Negeri**	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Jumlah rekomendasi pembangunan berdemokrasi(rekomendasi)	4	265.000.000	Kesbangpol
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik.	Jumlah Lembaga Demokrasi yang Membangun bidang Politik (lembaga)	5	85.000.000	Kesbangpol
					Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam Rangka Penguatan Leadership dan kaderisasi.	Jumlah perwakilan dari Partai Politik dalam Penguatan Leadership dan Kaderisasi (orang)	48	85.000.000	Kesbangpol
					Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP).	Data dan informasi (berkas)	10	102.000.000	Kesbangpol
					Verifikasi Penyaluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan (parpol)	13	72.000.000	Kesbangpol
					Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat.	Jumlah Rekomendasi (rekomendasi)	3	85.000.000	Kesbangpol
					Sosialisasi metode pengaduan masyarakat & penanganannya (peraturan perundangan sudah ada, SOP sudah banyak, tapi kurang disosialisasikan).	Jumlah Peserta yg memahami metode (orang)	50	85.000.000	Kesbangpol
13	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	**Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan	Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	Terselenggaranya Mitigasi Penanggulangan Bencana di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/Kota (Peserta)	100	370.000.000	Bpbd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Bencana					
				Sosialisasi Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa	Terselenggaranya Mitigasi Penanggulangan Bencana di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/Kota (Peserta)	100	584.589.600	Bpbd
				Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat	Terlaksananya Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa (Peserta)	100	30.000.000	Bpbd
				Sosialisasi Pencegahan Bencana	Terlaksananya Rencana Evakuasi partisipasif masyarakat di zona penangganan bencana (Peserta)	100	330.000.000	Bpbd
				Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana	Terpasang nya papan Himbauan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana (Unit)	30	300.000.000	Bpbd
				Penyusunan Rencana Kontinjensi	Terlaksananya Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi di 7 Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	330.000.000	Bpbd
				Kajian Daerah Rawan Bencana	Terselenggaranya Kajian Titik Daerah Bencana di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/kota (Kegiatan)	1	220.000.000	Bpbd
				Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	Terbangunnya Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat Sebanyak 2 Paket Kegiatan di 7 Kabupaten/Kota (Paket Kegiatan)	1	385.875.000	Bpbd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelematan Dini Saat Terjadi Bencana Sebanyak 7 Kegiatan di setiap 7 Kabupaten/kota (Media Cetak/Elektronik)	10	325.000.000	Bpbd
				Fasilitasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Terselenggaranya Koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana (Kegiatan)	1	350.000.000	Bpbd
				Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (orang)	100	710.000.000	Bpbd
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	-. Jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; -. Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial; -. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana alam	1 25 56	771.750.000	Dinsos
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	-. Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; -. Jumlah korban bencana sosial yang mendapat	7 50 70	350.000.000	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					perlindungan dan jaminan sosial; -. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial			
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	Pengembangan Cadangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah (ton)	50	575.000.000	Dinas Pangan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	300.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		160.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		175.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		215.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		130.000.000	Kominfo
				Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		110.000.000	Kominfo
		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Satpol PP	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas dan pol pp	37	200.000.000	Satpol Pp
				Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	40	165.000.000	Satpol Pp
				Tanggap darurat pengurangan resiko	Jumlah bulan tanggap darurat	55	200.000.000	Satpol Pp

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				bencana dan kebakaran (Satpol PP)				
				Pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran	Jumlah dokumen peta rawan bencana dan kebakaran	7	150.000.000	Satpol Pp
				Simulasi akbar pemadam kebakaran	Jumlah simulasi pemadam kebakaran	4	200.000.000	Satpol Pp
		Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC BPBD (Bulan)	12	2.000.000.000	Bpbd
				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM TRC (Orang)	37	200.000.000	Bpbd
				Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya kegiatan pelatihan penguatan TRC BPBD (Orang)	40	165.000.000	Bpbd
				Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	Terlaksananya penyediaan perlengkapan tanggap darurat (Orang)	55	200.000.000	Bpbd
				Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana (Kabupaten/Kota)	7	150.000.000	Bpbd
				Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketersediaan logistik untuk Penanggulangan Bencana (Item Barang)	4	200.000.000	Bpbd
				Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana (Item Peralatan)	11	1.000.000.000	Bpbd
				Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan /	Meningkatnya dan terpelihara serta terawatnya Sarana dan	1	250.000.000	Bpbd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perawatan Sarana Dan Sarana Gudang Dan Tempat Penyimpanan	Prasarana Tempat penyimpanan / Gudang (Paket)			
				Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Logistik dan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana (Jenis Peralatan PB)	9	300.000.000	Bpbd
				Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bantuan dari BNPB untuk Penanggulangan Bencana (Paket)	1	100.000.000	Bpbd
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	20%	575.125.000	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Kegiatan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	6.000.000.000	Rsup
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	Rehabilitasi turap / talud / bronjong	Panjang talud yang direhab	880 m	1.100.000.000	PUPR
			Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran / sungai	25.800 m	14.740.000.000	PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan, dibangun dan direhabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	0,3 km	3.370.176.942	PUPR
			Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik yang terbangun dan	0,04 km	726.000.000	PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					direhabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana			
		Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi,Kab/Kota	Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasacabencana Kabupaten/Kota dan Provinsi 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 (Peserta)	40	145.000.000	Bpbd
				Rapat Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Penanganan Tindakan Dini Pascabencana 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 (Peserta)	40	140.000.000	Bpbd
				Koordinasi dan Konsultasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Jitu Pasna bagi Aparatur Kabupaten/Kota dan Provinsi 160 orang (Peserta)	40	220.500.000	Bpbd
				Pengadaan Jembatan Portable	Tersusunnya Laporan Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Laporan)	1	100.000.000	Bpbd
				Pemeliharaan Jembatan Portable	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Pascabencana di Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	7	210.000.000	Bpbd
				Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	Tersedianya 4 Unit Jembatan Portable dalam Tahun 2017 - 2022 (Unit)	1	2.625.000.000	Bpbd

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Terpeliharanya 8 Unit Jembatan Portable dalam Tahun 2017 - 2022 (Unit)	2	115.000.000	Bpbd
				Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Terlaksananya Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable (Unit)	1	105.000.000	Bpbd
				Pengadaan Alat Berat Penunjang Jembatan Portable	Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 (Peserta)	40	115.000.000	Bpbd
				Pengadaan Peralatan Lapangan Pascabencana	Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable 200 orang dalam Tahun 2017 - 2022 (Peserta)	1	145.000.000	Bpbd
					Tersedianya Sarana dan Prasarana 5 Unit Alat Berat Penunjang Jembatan Portable (Unit Dump Truck)	1	735.000.000	Bpbd
					Tersedianya Peralatan Survey Lapangan Pascabencana (Paket)	1	40.000.000	Bpbd
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	480.000.000,00	Dinkes
	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun	880 m	3.080.000.000,00	Dinas PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Inspeksi kondisi pantai	Jumlah dokumen	1 Dok	110.000.000,00	Dinas PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran / sungai	43.000 m	17.303.574.479,18	Dinas PUPR
				Inspeksi kondisi saluran/sungai	Jumlah dokumen	1 Dok	110.000.000,00	Dinas PUPR
				Perencanaan Pengendalian Banjir	Jumlah dokumen	2 Dok	1.400.000.000,00	Dinas PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang talud penahan tanah yang terbangun	2.200 m	8.193.750.000,00	Dinas PUPR
				Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah dokumen	2 Dok	1.400.000.000,00	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase DAS kritis yang di kelola	Pembinaan dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	Luas DAS kritis yang terehabilitasi	200	300.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Jumlah IPPKH yang melaksanakan rehabilitasi DAS	6	230.750.000	Dinas Kehutanaan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan	6	497.042.000	Dinas Kehutanaan
	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang talud yang terbangun	1.400 m	5.000.000.000	PUPR
			Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran / sungai	1.900 m	1.100.000.000	PUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Tertampungnya masyarakat dari daerah rawan bencana teluk bayur ke lokasi yang aman	50 unit	3.450.000.000	Prkp
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	1,5 km	7.800.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	3 km	7.800.000.000	PUPR
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan	80%	44.000.000.000	PUPR
14	PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian kualitas air	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Persentase BOD, COD dan TSS	Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung	Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai yang teridentifikasi	81 Titik Pantau	250.000.000	Dlh
					Pengendalian Beban Pencemaran Air	Rekomendasi pengendalian Beban pencemaran air	.. Ton	30.000.000	Dlh
					Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai	0%	-	Dlh
					Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung	1 Dokumen	750.000.000	Dlh
					Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan	Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Dokumen	330.000.000	Dlh

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bangka Belitung				
				Pemantauan dan Pelaporan tindak lanjut Rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Sungai berbasis kinerja Tim Pokja	Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti	0%		Dlh
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	Identifikasi, Inventarisasi dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem essensial	Jumlah kawasan ekosistem essensial yang terbentuk dan terjaga	2	319.527.000	Dinas Kehutanaan
	pengendalian kualitas udara	**Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup**	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21 Titik Pantau	330.625.000	Dlh
				Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien	200%	300.000.000	Dlh
				Pengendalian Beban Pencemaran Udara dari sektor Industri	Volume penurunan beban pencemaran BOD, COD, TSS	.. Ton	30.000.000	Dlh
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas penurunan kawasan hutan yang terbakar	2.373	500.000.000	Dinas Kehutanaan
	Peningkatan tutupan lahan	**Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem**	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	80	852.073.000	Dinas Kehutanaan
				Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ Gaharu dan	Luas sumber benih yang terbangun	20	400.000.000	Dinas Kehutanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelawan				
				Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tegakan benih yang teridentifikasi dan terseleksi	20	177.515.000	Dinas Kehutanaan
				Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau		300.000.000	Dinas Kehutanaan
		Pengembangan Perhutanan Sosial	**Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas perhutanan sosial	20.000	800.000.000	Dinas Kehutanaan
					Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbina	100	680.000.000	Dinas Kehutanaan
					Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka	Jumlah kelompok kelompok pecinta alam/pramuka	2	250.000.000	Dinas Kehutanaan
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	0%	-	Dlh
					Penyusunan Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Reviu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	0%	-	Dlh
					Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0%	-	Dlh

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	135.850.000	Dlh
		Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	Layanan Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani	10 Usaha/Kegiatan	161.345.000	Dlh
				Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi	7 Rekomendasi	140.200.000	Dlh
				Penyediaan informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan	Jumlah Informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan	1 Kali	175.000.000	Dlh
		Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	0%		Dlh
				Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Kawasan TPA Regional	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Kawasan TPA Regional	1 Dokumen	700.000.000	Dlh
				Operasional TPA Regional	Volumen Sampah yang dikelola	54000 Ton	2.000.000.000	Dlh
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	Jumlah perkara yang ditangani	2	600.000.000	Dinas Kehutanaan
				Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan	Jumlah Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan	15	550.000.000	Dinas Kehutanaan
				Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	60	750.000.000	Dinas Kehutanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboatorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk akreditasi	34 Parameter	356.500.000	Uptb Laboratorium Lingkungan
				Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan Kabupaten/kota yang dibina	5 Laboratorium	80.000.000	Uptb Laboratorium Lingkungan
				Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM yang terlatih	40 SDM	132.000.000	Uptb Laboratorium Lingkungan
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	Inventarisasi dan pemetaan kawasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan di dalam dan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Jumlah pendataan penurunan luasan lahan kritis di areal IUP yang sudah direklamasi	93300%	-	Dinas Esdm
			Nilai jaminan reklamasi	Verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	Jumlah nilai nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	10 Miliar	350.000.000	Dinas Esdm
			Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	Inventarisasi dan pemetaan kawasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan di dalam dan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Jumlah pendataan luasan lahan terganggu di areal IUP	17988%	2.250.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	Survey Geolistrik untuk pendugaan lapisan akuifer bawah permukaan	Jumlah cadangan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang potensial	400,00%	200.000.000	Dinas Esdm

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	DED dan pembangunan fasilitas pemakaian Air Tanah	Jumlah pembangunan fasilitas air tanah	200%	1.300.000.000	Dinas Esdm
			Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	Dukungan percepatan pembangunan Geopark	Jumlah obyek / kawasan yang diusulkan	10 Obyek	175.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin	4	350.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca	4	350.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas	4	300.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Jumlah pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan	4	350.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Jumlah pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung	4	350.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Tenis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan	4	300.000.000	Dinas Kehutanaan
				Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu Mendanau	4	300.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	Peningkatan Peralatan Automatic Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pemasangan ATCS	2 lokasi	2.300.000.000	Dishub
				Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	4 Dokumen	132.250.000	Dishub
				Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	3 dokumen	151.800.000	Dishub
		Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	Pengendalian Disiplin Pengoperasian	Jumlah Angkutan Umum yang diperiksa terkait	600 unit	208.660.000	Dishub

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dan Kebandarudaraan		Angkutan Umum di Jalan Raya	surat-surat kendaraan, Penimbangan Muatan dan pengukuran dimensi kendaraan			
				Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Jumlah hari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal,Bandara dan Pelabuhan pada Hari Besar Keagamaan.	3 hari	85.000.000	Dishub
				Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepuluauan Bangka Belitung	1 dokumen	106.143.850	Dishub
				Pengendalian dan Pengawasan Angkutan pada hari-hari peringatan daerah dan nasional.	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada hari-hari peringatan daerah dan nasional.	15 kali	150.000.000	Dishub
	Pengembangan TPA Regional	**Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional					Dlh
		Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	Penyusunan dokumen perencanaan Pembanguna/peningkatan drainase/gorong-gorong di Pengembangan kawasan TPA Regional	jumlah dokumen perencanaan Pembanguna/peningkatan drainase/gorong-gorong di Pengembangan kawasan TPA Regional yang tersusun	0%	-	Dinas PRKM
				Pembanguna/peningkatan drainase/gorong-gorong di Pengembangan kawasan TPA Regional	Panjang drainase terbangun di Pengembangan kawasan TPA Regional	1.276 m'	2.000.000.000	Dinas PRKM

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di Pengembangan kawasan TPA Regional	Dokumen Perencanaan Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan ke Pengembangan kawasan TPA Regional yang tersusun	0%	-	Dinas PRKM
				Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di Pengembangan kawasan TPA Regional	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di Kawasan Pengembangan kawasan TPA Regional	1500 m	2.000.000.000	Dinas PRKM
		Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di kawasan Pengembangan TPA Regional	1,5 Km	7.590.000.000	PUPR
				Panjang jalan yang terpelihara	Panjang jalan yang terpelihara di kawasan Pengembangan TPA Regional	3 Km	9.108.000.000	PUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	Perencanaan Jembatan	Dokumen perencanaan jembatan yang terbangun di kawasan Pengembangan TPA Regional			PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan TPA regional yang dibebaskan			PUPR
		Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun			PUPR
				Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku	10.000 m3	2.500.000.000	PUPR
			Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah dokumen yang tersusun			PUPR



BAB V

- **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

BAB V

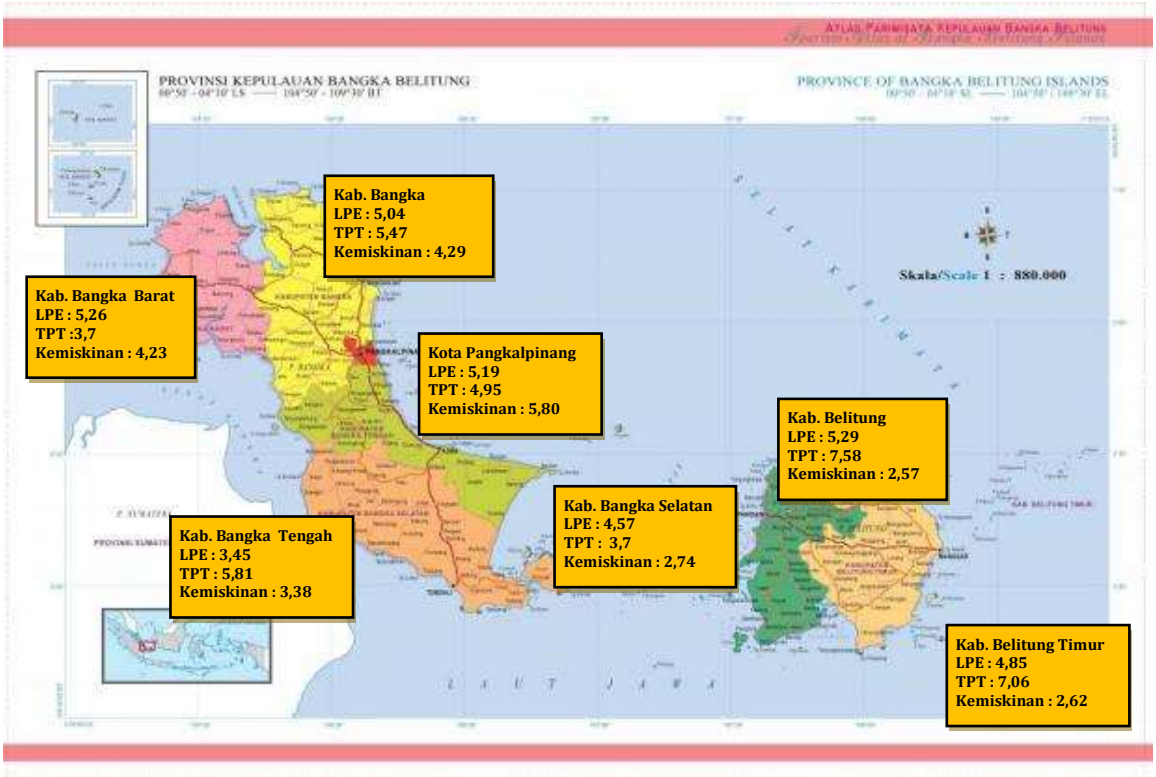
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.

Prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang juga sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar V.I
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Berdasarkan Gambar V.I maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 diarahkan pada:

Tabel V.1
Sasaran Pemerataan Pembangunan antar Kabupaten/Kota: Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Kab. Bangka	18,21	18,25	18,28	18,18	18,25
Kab. Belitung	11,95	12,07	12,18	12,36	12,45
Kab. Bangka Barat	19,00	19,17	19,07	18,92	18,84
Kab. Bangka Tengah	12,35	12,00	11,73	11,53	11,36
Kab. Bangka Selatan	11,60	11,55	11,55	11,65	11,64
Kab. Belitung Timur	10,13	10,17	10,18	10,20	10,19
Kota Pangkalpinang	16,76	16,79	17,01	17,17	17,26

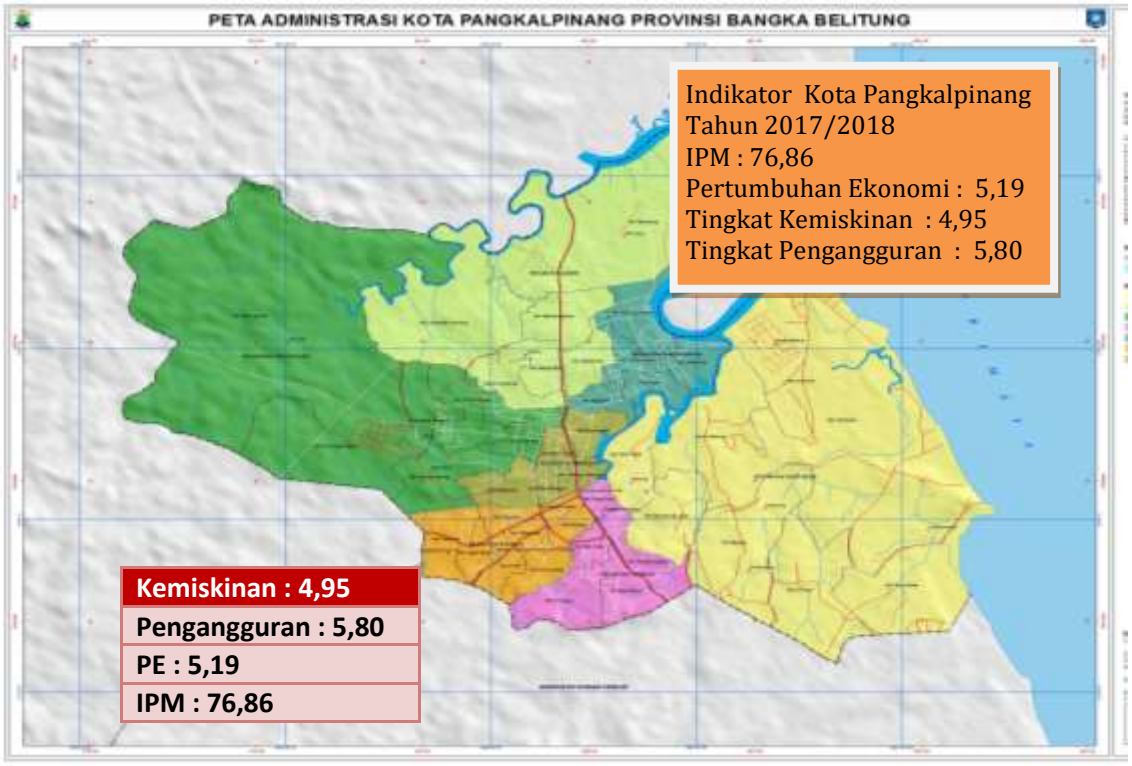
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Pembangunan Kota Pangkalpinang diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2020 diarahkan pada menurunkan angka pengangguran dan menurunkan angka prevalensi stunting.

Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2020 diarahkan pada: 1) penurunan angka pengangguran dengan kebijakan penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan; 2) menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.2
Perkembangan Indikator Makro Kota Pangkalpinang
Tahun 2018



Tabel V.2
Indikator Capaian Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
1	Jumlah masyarakat miskin	7.800	10.000	10.100	9.760	
2	Angka melek huruf	99,26	98,60	99,41	98,31	
3	Rata-rata lama sekolah	9,67	9,99	9,66	9,77	
4	APK SD/MI	111,73	110,16	109,63	108,47	109,79
5	APK SMP/MTs	83,59	83,88	80,40	76,22	80,94
6	APM SD/MI	97,53	95,40	97,75	99,33	99,18
7	APM SMP/MTs	75,14	66,34	72,99	70,34	75,13
8	APS SD/MI	99,64	100	98,50	100	99,99
9	APS SMP/MTs	96,03	96,12	94,81	96,09	95,43
10	Stunting				26,7	

Gambar V.3

Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020



Tabel V.3

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya angka Pengangguran	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	**PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20	DISNAKER
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,24%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,84%	DKP

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,16%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	35%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	95,51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	14%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN**	Persentase perempuan yang bekerja	7,52	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
2	Menurunkan angka Prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	DINKES
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA,	Persentase kandungan nutrisi industri	6,71	DISPERINDAG

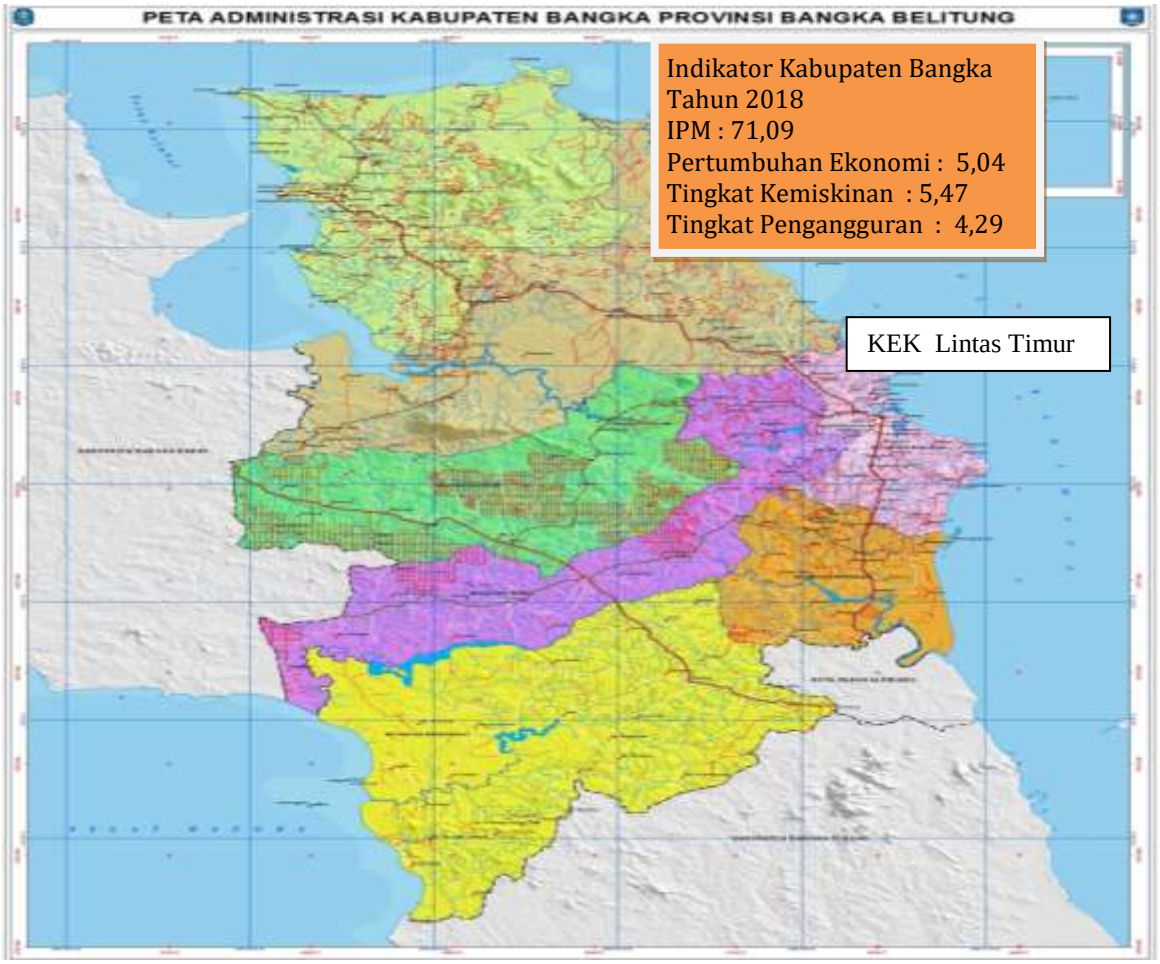
No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	olahan pangan.		
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Pembangunan Kabupaten Bangka diarahkan berdasarkan 3 (tiga) sasaran pokok meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2020 diarahkan pada meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya pembangunan berbasis industri dan menurunkan angka prevalensi stunting.

Pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2020 diarahkan pada 1) meningkatnya kunjungan wisatawan dengan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata; pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah; peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan, pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka; 2) Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan arah kebijakan pengembangan kawasan strategis industri terpadu di Teluk Klabat Belinyu; 3) menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.4
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka
Tahun 2018



Tabel V.4
Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
1	Jumlah masyarakat miskin	16.000	17.000	17.300	16.450	
2	Angka melek huruf	98,24	97,87	97,77	97,83	
3	Rata-rata lama sekolah	7,89	7,98	8,38	8,19	
4	APK SD/MI	120,75	111,44	111,42	114,19	109,13
5	APK SMP/MTs	79,22	89,30	86,45	88,77	90,68
6	APM SD/MI	99,00	97,39	96,39	95,97	94,58
7	APM SMP/MTs	75,88	77,11	73,86	75,51	74,12
8	APS SD/MI	100,00	100,00	100,00	100	100

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
9	APS SMP/MTs	94,97	95,20	93,83	95,33	95,35
10	Stunting				27,7	

Gambar V.5
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka
Tahun 2020



Tabel V.5
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,80%	BUDPAR
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,50%	BUDPAR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	1,51%	KUMKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,32%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	78%	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100	Dindik
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3	DISNAKER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTI FITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66	DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan	16,67%	DISKEPORA

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				nasional		
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	BUDPAR
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	DISNAKER
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	0,25	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	0	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	0,9644	DISHUB

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	0,9	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	100	PUPR
2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT**	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	30%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	DINAS PUPR
				Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	90,36%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	160	DKP

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	3.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	10,00%	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1,00%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat		DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk		DLH

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				perencanaan kawasan		
3	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%	DINKES
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN

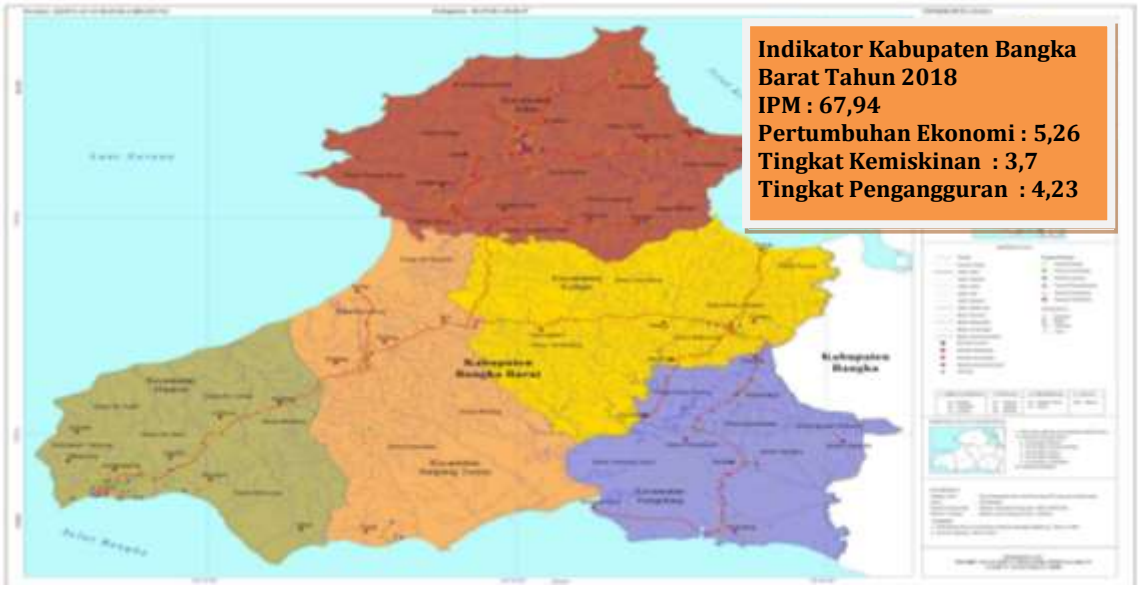
No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 diarahkan pada meningkatnya pembangunan berbasis industri, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka prevalensi stunting .

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 diarahkan pada 1) meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan kebijakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular; 2) meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal; 3) menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.6
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2018



Tabel V.6
Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	
1	Jumlah masyarakat miskin	6.100	6.000	5.500	6.060	
2	Angka melek huruf	95,15	96,36	96,51	97,78	
3	Rata-rata lama sekolah	7,19	7,43	7,56	7,06	
4	APK SD/MI	105,60	111,46	111,99	114,43	114,96
5	APK SMP/MTs	85,15	95,40	71,21	69,45	72,01
6	APM SD/MI	92,26	98,29	97,10	99,34	100
7	APM SMP/MTs	65,84	73,01	64,92	65,74	66,43
8	APS SD/MI	97,57	98,74	97,78	99,34	100
9	APS SMP/MTs	88,72	90,03	89,19	90,79	90,10
10	Stunting				25,0	

Gambar V.7

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020



Tabel V.7

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	**PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	1%	DINAS PUPR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	1%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	35%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	7%	DISHUB
2	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS**	APK SMA	40,63%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	40,63%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB	26,21	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasil A	50%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;		DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	DINAS PENDIDIKAN
3	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN**	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN

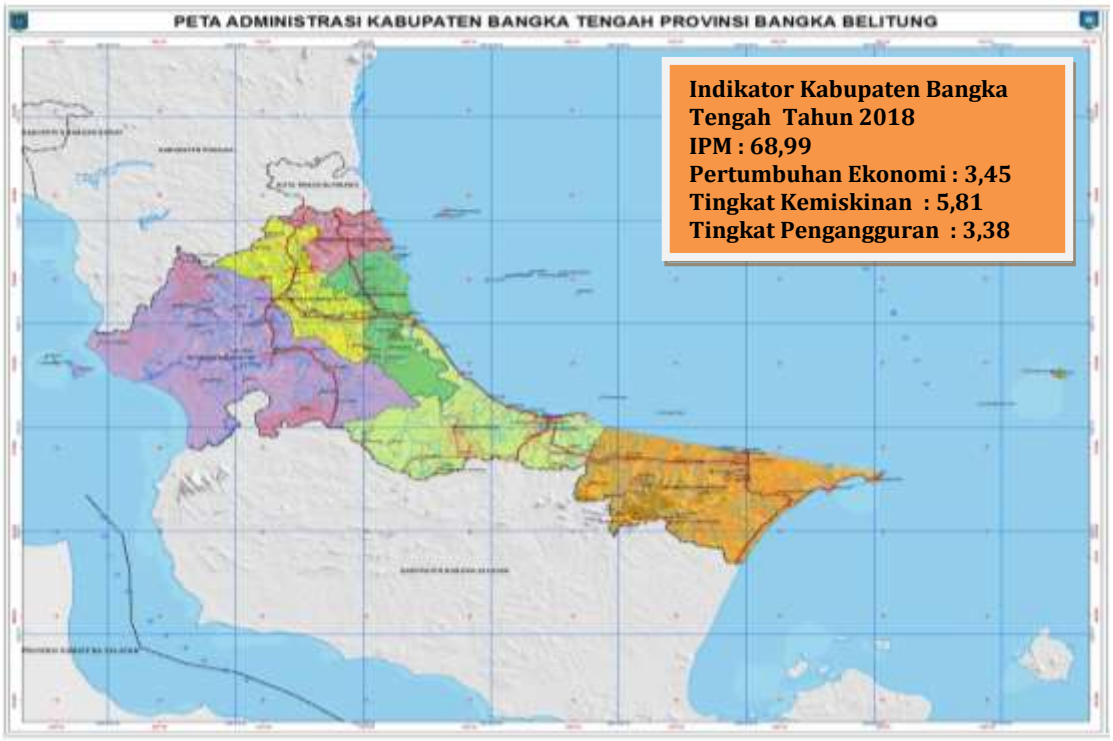
No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 diarahkan pada meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka prevalensi stunting .

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 diarahkan pada: 1) meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan arah kebijakan pengembangan standarisasi sdm dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan; 2) menurunnya angka kemiskinan dengan arah kebijakan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; 3) meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal; 4) menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.8
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2017/2018



Tabel V.8
Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah masyarakat miskin	9.400	10.200	10.400	11.390	
2	Angka melek huruf	97,29	97,78	97,47	96,43	
3	Rata-rata lama sekolah	7,00	6,97	7,17	6,79	
4	APK SD/MI	110,60	114,15	112,45	109,57	108,58
5	APK SMP/MTs	82,55	90,10	94,71	92,20	88,75
6	APM SD/MI	93,97	95,08	93,30	96,59	97,88
7	APM SMP/MTs	65,71	71,05	68,98	69,82	69,05
8	APS SD/MI	98,77	99,49	100	100	99,73
9	APS SMP/MTs	87,84	91,52	92,27	91,29	90,84
10	Stunting				25,6	

Gambar V.9
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2020



Tabel V.9
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	0,17	UPD BLKI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	21	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	4,68%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,36%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	DISNAKER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	DINAS KUMKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	43,48%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,44%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	75	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pertaniaan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,45%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT**	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	58%	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	50	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	81	DINAS PERTANIAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	20	DINAS PERTANIAN
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaaan JKN	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27	DINSOS

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	DISKOMiNFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3	DISNAKER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS**	APK SMA	40,63%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	40,63%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB	26,21	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasil A	50%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;		DKPUS

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	DISKOMINFO

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	DINAS PENDIDIKAN
4	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN**	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 diarahkan pada: meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan; meningkatnya pembangunan berbasis industri; meningkatnya rata-rata lama sekolah; dan menurunkan angka prevalensi stunting.

Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 diarahkan pada: 1) meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan arah kebijakan pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan, pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang dan pengembangan kawasan agropolitan dan *technopark* Pertanian Lada Air Gegas; 2) meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan arah kebijakan pengembangan kawasan strategis industri Sadai; 3) meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal; 4) menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke

desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.10
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018



Tabel V.10
Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah masyarakat miskin	7.400	7.200	7.100	7.880	
2	Angka melek huruf	95,71	95,44	96,84	97,54	
3	Rata-rata lama sekolah	6,40	5,75	6,63	6,12	
4	APK SD/MI	106,73	106,13	108,34	103,36	115,77
5	APK SMP/MTs	81,36	85,28	82,76	81,93	85,91
	APK SMA/SMK/MA	68,90	48,81	75,17	73,65	48,47
6	APM SD/MI	97,45	95,48	94,93	95,45	96,95
7	APM SMP/MTs	71,35	73,28	68,73	70,70	73,88
	APM SMA/SMK/MA	56,47	37,62	52,30	52,19	48,47
8	APS SD/MI	98.,47	98,04	98,46	98,37	99,25
9	APS SMP/MTs	87,67	88,98	87,42	87,11	87,59

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	APS SMA/SMK/MA	66,45	46,01	58,73	56,28	57,28
10	Stunting					

Gambar V.11
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2020



Tabel V.11
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi sub sektorpertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI**	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertaniaan yang berkompetensi	0,17	UPD BLKI

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		pertanian				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertaniaan yang bersertifikasi	21	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan perternakan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	4,68%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,36%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
						ASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	DINAS KUMKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	43,48%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,44%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujiaan	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	75	BIRO EKONOMI

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pertaniaan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertaniaan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,45%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertaniaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT**	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	58%	DINAS PMD

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	50	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	81	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	20	DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	**PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	96,50%	DINAS PUPR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	90,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	1	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		DISNAKER
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan		DINAS PUPR
2	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	**PROGRAM KEBINAMARGAAN**	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0,01	DINAS PUPR
				Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0,01	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	0,35	DINAS PUPR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	0,5	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	0,07	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai		DINAS PUPR
				Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai	0,25	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan		DLH
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	peningkatan akses pelayanan pendidikan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS**	APK SMA	40,63%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	40,63%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB	26,21	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasil A	50%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah		DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	50 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN**	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
4	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN**	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

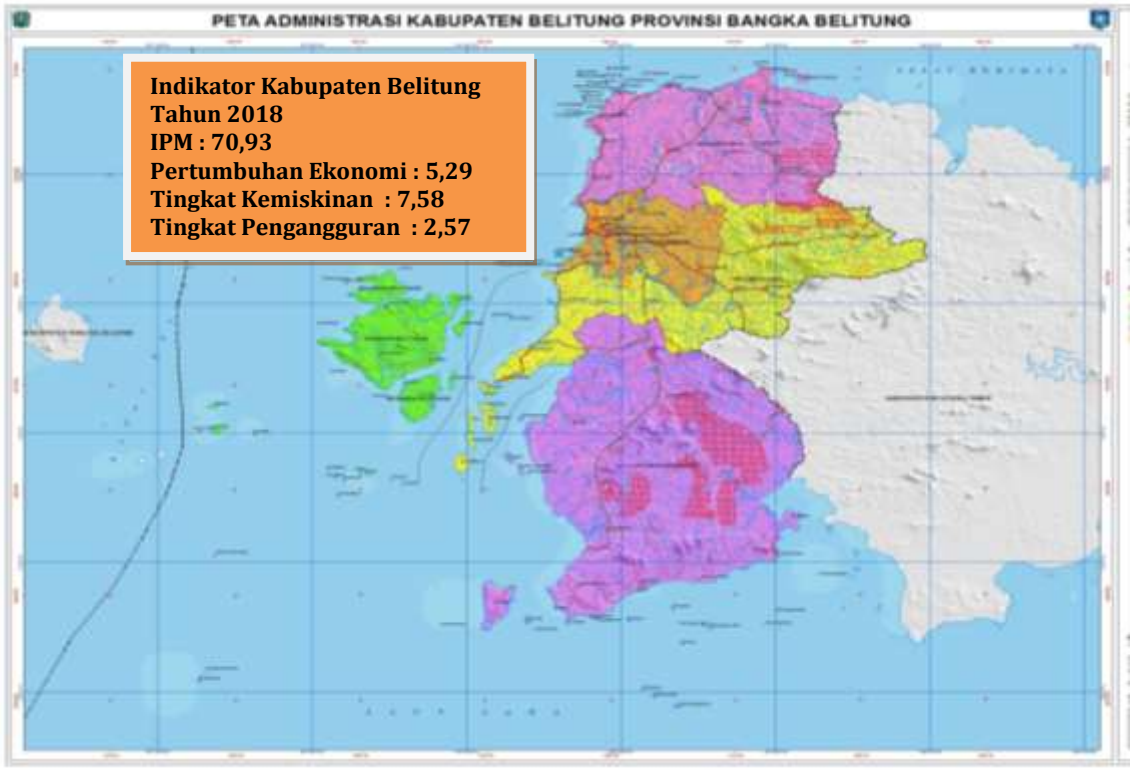
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Pembangunan Kabupaten Belitung diarahkan berdasarkan 3 (tiga) sasaran pokok meliputi: 1) kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran; 2) meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB; dan 3) terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020 diarahkan pada meningkatnya kunjungan wisatawan, menurunnya angka kemiskinan dan menurunkan angka prevalensi stunting.

Pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020 diarahkan pada: 1) meningkatnya kunjungan wisatawan dengan arah kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata, pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah, peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan, peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang; 2) menurunnya angka kemiskinan dengan arah kebijakan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; 3) meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal 4). menurunkan angka prevalensi stunting dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke

desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Gambar V.12
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung
Tahun 2018



Tabel V.12
Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah masyarakat miskin	12.700	14.600	13.900	14.110	
2	Angka melek huruf	98,68	98,86	97,35	98,69	
3	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,27	8,14	8,11	
4	APK SD/MI	119,73	109,56	116,61	108,60	110,75
5	APK SMP/MTs	80,45	84,68	92,63	100,96	92,20
	APK SMA/SMK/MI	70,62	75,65	58,95	62,75	69,55
6	APM SD/MI	97,24	95,60	100	97,41	99,13
7	APM SMP/MTs	69,14	71,31	82,93	81,81	79,72

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	APM SMA/SMK/MI	54,99	55,65	40,97	46,11	50,73
8	APS SD/MI	100	97,84	100	100	100
9	APS SMP/MTs	91,46	91,64	95,87	95,27	96,35
	APS SMA/SMK/MI	62,14	65,06	53,09	61,26	68,90
10	*Stunting*				27,6	

Gambar V.13
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung
Tahun 2020



Tabel V.13

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	0,078	BUDPAR
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	0,085	BUDPAR
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		BUDPAR
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	0,027	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	0,0151	KUMKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	100,00%	KUMKM

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0,00%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66	DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	KUMKM

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	BUDPAR
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan	1,6	DISNAKER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				perusahaan		
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT**	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	10%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	1%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	1%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	75	PUPR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	30%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaaan JKN	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan	75,09%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				dan Gizi		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	DISKOMiNFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3	DISNAKER
3	Menurunnya angka prevalensi Stunting	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN**	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

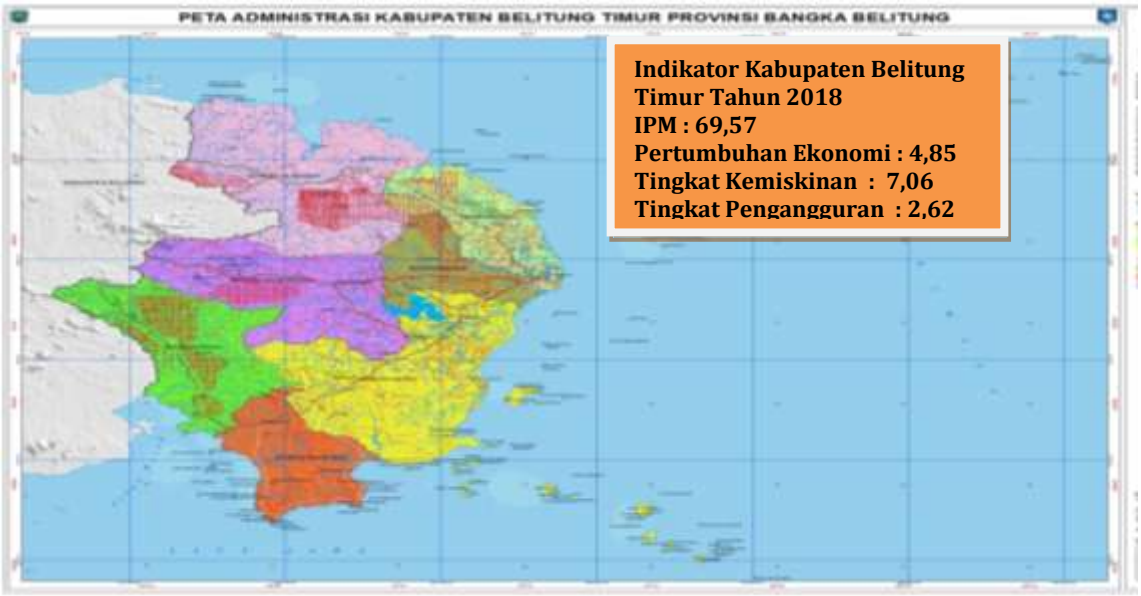
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020 diarahkan pada menikatnya kunjungan wisatawan, menurunnya angka kemiskinan dan menurunkan angka prevalensi stunting

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 diarahkan pada 1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan arah kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata, Pengembangan

standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah, Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan 2) Menurunnya Angka Kemiskinan dengan arah kebijakan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 3) Meningkatnya Rata-rata lama sekolah dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal 4). Menurunkan Angka Prevalensi Stunting dengan arah kebijakan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa,

Gambar V.14
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2017



Tabel V.14
Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah masyarakat miskin	7.900	8.700	8.500	8.440	
2	Angka melek huruf	98,92	98,77	98,28	97,93	
3	Rata-rata lama sekolah	7,98	7,86	8,51	8,00	

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
4	APK SD/MI	116,17	115,99	114,40	115,79	108,67
5	APK SMP/MTs	88,75	82,56	79,73	81,74	88,69
	APK SMA/SMK/MA	64,50	78,59	74,46	75,97	72,75
6	APM SD/MI	97,08	99,62	100,00	99,88	98,46
7	APM SMP/MTs	79,72	72,30	77,74	79,64	81,09
	APM SMA/SMK/MA	47,82	63,15	56,59	59,07	61,51
8	APS SD/MI	99,63	100	100	99,88	100
9	APS SMP/MTs	93,02	85,48	87,87	89,16	90,95
	APS SMA/SMK/MA	55,94	69,78	58,92	64,60	66,12
10	Stunting				29,3	

Gambar V.15
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2020



Tabel V.15

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	0,078	BUDPAR
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	0,085	BUDPAR
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata		BUDPAR
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	0,027	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	0,0151	KUMKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	100,00%	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0,00%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	**PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	21,3	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentasepencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	66,66	DINDIK

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	2%	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA**	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,25%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	6,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	15,24%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	15	BUDPAR

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN , PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	DISNAKER
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaaan JKN	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09%	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	8,86	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	**PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN**	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	NTP subsektor Tanaman Pangan	97,08	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	35%	DISKOMiNFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%	DISNAKER

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,3	DISNAKER
3	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN**	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	31%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi	22%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	87%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	86	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84	DINAS PANGAN

No	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	6,71	DISPERINDAG
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
				Persentase PKK aktif	3,07	DPMD

5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan rencana pola ruang, rencana struktur ruang, serta rencana kawasan strategis.

a) Rencana Pola Ruang

A. Kawasan Lindung.
B. Kawasan Budidaya.

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi:

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
3. kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan suaka alam;
5. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
6. kawasan rawan bencana alam.

b) Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Rencana Sistem Perkotaan.
B. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
C. Rencana Sistem Jaringan Energi.
D. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi.
E. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
F. Sistem Prasarana Lingkungan.

c) Rencana Kawasan Strategis

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Bahwa dalam perencanaan pembangunan, diharuskan adanya suatu keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Oleh karenanya, di dalam dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan sektoral harus mengacu kepada dokumen RTRW yang merupakan dokumen perencanaan spasial sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang berorientasi pada kesesuaian antara sektoral dan spasial.

Adapun indikasi program dan kegiatan utama di dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Tabel V.16.

Tabel V.16

Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	**Pemantapan Sistem Perkotaan**												
A1	**Perwujudan PKNP Pangkal Pinang**	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD)									APBD Kokab	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD)
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar									APBD Kokab	Dinas Budpar
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A2	**Perwujudan PKW Muntok**	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN										BPN
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum									APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkhungan Hidup Daerah									APBD Kokab	Badan Lingkhungan Hidup Daerah
A3	**Perwujudan PKW Tanjung Pandan**	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag									APBD Prov	Disperindag
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala	Disperindag									APBD Prov	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		regional (pulau)											
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar									APBD Prov	Disbudpar
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BHLD									APBD Kokab	BHLD
A4	Perwujudan **PKW Manggar**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BHLD									APBD Prov/ APBD Kokab	BHLD
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
A5	Perwujudan **PKL Kelapa**	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag									APBD Prov/ APBD Kokab	Diperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A6	Perwujudan **PKL Puding Besar**	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perdagangan											
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A7	Perwujudan **PKL Sungai Selan**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU										Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A8	Perwujudan **PKL Payung**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A9	Perwujudan **PKL Sungailiat**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub									APBD Kokab	Dishub
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar									APBD Kokab	Dibudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU										Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A10	Perwujudan **PKWp Koba**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan	Dishub									APBD Kokab	Dishub

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		terminal tipe C											
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
A11	Perwujudan **PKWp Toboali**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Kokab	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B	**Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah**												
B1	**Perwujudan Sistem Transportasi**												
a	**Sistem Transportasi Darat**	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU									APBN	Dinas PU
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
b	**Sistem Transportasi Laut**	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok),	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)											
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
c	**Sistem Transportasi Udara**	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
B2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik**	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN									APBN/APBD Prov/Masyarakat	PLN
		Pengembangan sumber	Dinas									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Pertambangan dan Energi									Prov/Masyarakat	Pertambangan dan Energi
		Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
B3	**Perwujudan Sistem Telekomunikasi**	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo									APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*)	Dinas Kominfo									Swasta	Dinas Kominfo
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan.	Dinas Kominfo									APBN/Swasta	Dinas Kominfo
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo									APBN/ Swasta	Dinas Kominfo
B4	**Perwujudan Sistem Sumber Daya Air**	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU										Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
B5	**Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman**	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar											
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	BLHD									APBN/APBD Prov	BLHD
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
C	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**												
C1	**Perwujudan Kawasan Lindung**												
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
	Pengelolaan kawasan perlindungan	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	setempat												
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/Masyarakat	BLHD
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-									-	-
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	BLHD									APBN/APBD	BLHD
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
C2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**												
a	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
b	**Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat**	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
c	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian**	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
e	Perwujudan	Pemantapan tata batas	Dinas									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Pertembangan dan Energi									Prov/ APBD Kokab	Pertembangan dan Energi
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi									APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertembangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertembangan dan Energi

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
f	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag									APBN	Dinas Perindag
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag									APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
g	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata**	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*)	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
h	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman**	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Penyusunan masterpal	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perencanaa kota yang ditetapkan											
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota)	Dinas PU									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat	Dinas PU
D	**Perwujudan Kawasan Strategis**												
D1	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian**	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D2	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D3	**Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
D4	**Perwujudan**	Penyusunan RDTR KTM Batu	Dinas PU									APBN/APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	KTM Batu Betumpang	Betumpang										Prov/APBD Kokab	
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
D5	**Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok**	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan	Dinas Kelautan &Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan &Perikanan
D6	**Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik**	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D7	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag/PU
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D8	**Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri**	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur	Dinas PU									APBN/APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		permukiman										Prov/APBD Kokab	
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BHLD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BHLD
D9	**Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur penunjang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D10	**Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang**	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D11	**Perwujduan**	Identifikasi dan klasifikasi	Dinas Budpar									APBN/APBD	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kota Tua Muntok	lokasi dan jenis bangunan *heritage*										Prov/APBD Kokab	
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage*	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan heritage map dan promosi kawasan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
D12	**Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim**	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam										APBN/APBD Prov/APBD Kokab	
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D14	**Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)**	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fasilitas karantina hewan											

Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.17.

Tabel V.17

Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahuln 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi	Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata unggulan sesuai tema yang ditetapkan							
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan provinsi	Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata pada setiap kawasan wisata unggulan							
		Penyusunan rencana detil pengembangan pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan							
2. Pengembangan Produk Wisata	Pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang memunculkan keunikan/ identitas lokal dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata	Penyusunan pedoman perencanaan dan pengelolaan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang spesifik Kepulauan Bangka Belitung							
		Penataan ruang dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pulau-pulau kecil yang menjadi unggulan							
	Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan	Sosialisasi tema pengembangan pariwisata provinsi dan kawasan wisata unggulan							
		Pengemasan budaya pesisir dan budaya etnis Cina sebagai daya tarik wisata							
	Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata provinsi dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah	Penelitian mengenai pengembangan bekas galian tambang menjadi wisata buatan yang mendukung tema wisata bahari dan pulau-pulau kecil							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahuln 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengembangan program interpretasi pariwisata pada lahan-lahan bekas penambangan timah							
	Pengembangan wisata terpadu antar kawasan wisata unggulan dan dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu antara kawasan wisata unggulan							
		Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kepulauan Bangka Belitung							
3. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur	Peningkatan aksesibilitas ke kawasan wisata unggulan provinsi	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan antar kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan angkutan umum menuju dan antar kawasan wisata unggulan yang aman dan nyaman							
	Peningkatan kemudahan aksesibilitas antar provinsi dan antar kota, khususnya yang mendukung aksesibilitas antara ibukota provinsi, PKW, PKL, dan kawasan wisata unggulan	Peningkatan kapasitas dan jumlah lalu lintas penumpang dengan menggunakan moda transportasi udara dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (antara lain melalui perpanjangan landasan pacu (runway)).							
		Pengkajian terhadap permintaan perjalanan dengan berbagai moda transportasi bagi wisatawan ke dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahuln 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan dan perbaikan kondisi fisik dan pelayanan pelabuhan laut untuk kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan.							
		Perencanaan pengembangan transportasi terpadu yang memperhatikan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan.							
	Peningkatan aksesibilitas antar daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi	Peningkatan kualitas pelayanan jalan antar daya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung disetiap kawasan wisata unggulan							
		Penyediaan angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi							
	Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih dan listrik untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan wisata unggulan	Pengkajian analisis kebutuhan air bersih dan penyediaan sumber air bersih di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan pemenuhan kebutuhan jaringan listrik di daerah tujuan wisata melalui penambahan jaringan dan atau pengembangan sumber-sumber tenaga listrik yang potensial untuk dikembangkan							
4. Pengembangan Pasardan Pemasaran	Pengembangan pasar wisnus dengan memanfaatkan masyarakat Kep. Bangka Belitung sebagai sumber pasar utama dan menjaring wisnus dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisnus Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Jambi terhadap produk wisata Kepulauan Bangka Belitung							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahuln 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan pasar wisman dengan menjaring wisman dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisman yang datang ke Kepulauan Bangka Belitung							
		Penelitian profil dan preferensi potensi wisman yang berkunjung ke daerah sumber pasar terdekat							
	Pengembangan pasar wisatawan yang memiliki ketertarikan dengan budaya pesisir dan budaya/ etnis Cina	Penellitian profil dan preferensi potensi pasar dan pasar wisata waneksisting terhadap budaya pesisir dan etnis Cina							
	Maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dg swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan forum koordinasi rutin untuk pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung							
	Pengembangan kemitraan/kerjasama dengan negara-negara tetangga, organisasi dunia, maupun ahli-ahli dalam negeri dalam pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil serta pengembangan bekas penambangan timah untuk menjadi daya tarik wisata	Pembuatan MoU dengan negara-negara maupun organisasi dunia tentang pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum diskusi internasional tentang pengembangan lahan bekas penambangan timah menjadi daya tarik wisata							
		Pengadaan kerjasama dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pemanfaatan bekas penambangan dan ahli-ahli lingkungan dan pariwisata Indonesia							
	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata sebagai pencetak SDM pariwisata yg kompeten/berkualitas dan	Pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata yang berkualitas dan sesuai tuntutan pasar							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahuln 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sesuai dg tuntutan pasar	Pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan yang sesuai dengan tuntutan pasar							
5. Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk membatasi kegiatan penambangan	Perumusan peraturan daerah mengenai pengendalian kegiatan penambangan timah inkonvensional							
		Perumusan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan	Pembentukan tim pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum koordinasi rutin antara instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan							
	Peningkatan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan di kawasan wisata unggulan dan sekitarnya	Pembinaan sadar lingkungan pada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyelenggaraan gerakan cinta lingkungan di kawasan wisata unggulan provinsi							



BAB VI

- **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut.

A. Program yang dilaksanakan setiap PD

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan.
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan.
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru serta Tenaga Kependidikan.
e. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik).
f. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
g. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
h. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
i. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat.

2. Urusan Kesehatan

a. Program Pelayanan Kesehatan.

b. Program Kesehatan Masyarakat.
c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
d. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
e. Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan.
f. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.
g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis.
h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan.
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum.
j. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP.
k. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza.
l. Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza.
m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa.
n. Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Kebinamargaan.
b. Program Penataan Ruang dan Pertanahan.
c. Program Pengembangan Sumber Daya Air.
d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
e. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Program Keciptakaryaan dan Permukiman.
b. Program Pembangunan Perumahan Rakyat.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Program Penegakan Perda dan Perkada.
c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat.
d. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
e. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
f. Program Penguatan Kewasdapadaan Nasional.
g. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.
h. Program Bina Ideologi dan Wawasa Kebangsaan.

6. Urusan Kesbangpol
a. Program Ketahanan Ekonomi, seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
b. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional.
c. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.
d. Program Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan.

7. Urusan Sosial
a. Program Rehabilitasi Sosial.
b. Program Penanganan Fakir Miskin.
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
d. Program Pemberdayaan Sosial .
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial.
f. Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial.
g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.

8. Urusan Penanggulan Bencana

a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulan Bencana.
b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulan Bencana.
c. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi dan Penanggulan Bencana.

9. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.
b. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
c. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri.
d. Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

11. Urusan Pangan

a. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
b. Program Peningkatan Ketersediaan Pangan.
c. Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan.

12. Urusan Pertahanan

a. Program Penataan Ruang dan Pertanahan.

13. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup.
b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.
c. Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup.
d. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

14. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pengadministrasian Kependuduan dan Catatan Sipil.

15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
b. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
c. Program Pembinaan Pemerintah Desa.
d. Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknoogi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat.

16. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk dan KB.

17. Urusan Perhubungan

a. Program Pegembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat.
b. Program Pegembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut.

c. Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandar Udaraan.

18. Urusuan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik.
b. Program Peningatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Tekonologi Informasi.
c. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian.

19. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil.
c. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro dan Menengah.
e. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM.

20. Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
b. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
c. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.
d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
b. Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.
c. Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.

22. Urusan Statistik

a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian.

23. Urusan Persandian

a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian.

24. Urusan Kebudayaan

a. Program Pelestarian Budaya.

25. Urusan Perpustakaan

a. Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan.
b. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

26. Urusan Kearsipan

a. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.

27. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan

a. Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
b. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
d. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
e. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

2) Urusan Keuangan

a. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah.
b. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.
c. Program Penganggaran Pembangunan Daerah.
d. Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi.
e. Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan.
f. Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah.

3) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Perencanaan dan Pengadaan ASN serta Pelayanan Promosi Kepangkatan dan Pensiun.
b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
c. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
d. Progam Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN.

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan.

5) Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan.
b. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan.
c. Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur.
d. Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
e. Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya.

6) Urusan Sekretariat Daerah

a. Program Perencanaan Setda.
b. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
c. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD.
d. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN.
e. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan.
f. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata.
g. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
h. Program Peningkatan Pelayanan dan Protokoler.
i. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT.
j. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi.
k. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian.

l. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya.
m. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam.
n. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan.
o. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah.
p. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah.
q. Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan.
r. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
s. Program Peningkatan Pengadaan Secara Elektronik.
t. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang Undangan.
u. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.
v. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintahan Daerah.
w. Program Pengembangan Otonomi Daerah.
x. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan.
y. Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah.

7) Urusan Penunjang Lainnya

a. Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga.

C. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut.
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap .
c. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.
d. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau.
g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut.
h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar.

2. Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata .
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan.

3. Urusan Pertanian

a. Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman.

c. Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
d. Program Pengembangan Perkebunan.
e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih.
f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian.
g. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluh Pertanian.

4. Urusan Kehutanan
a. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem.
b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan.
c. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
d. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat .

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam.
b. Program Pengembangan Sumber Daya Energi.
c. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.
d. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

6. Urusan Perdagangan
a. Program Pengembangan Perdagangan.

7. Urusan Perindustrian
a. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri.
b. Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri.
c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk.

8. Urusan Transmigrasi
a. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

6.2. PAGU INDIKATIF

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel VI.1, penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut "*money follow function*" akan tetapi berasaskan "*money follow priority program*".

Tabel VI.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu Belanja Langsung 2020
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	325.109.104.050
2	Dinas Kesehatan	74.400.894.857
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	112.904.380.668

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu Belanja Langsung 2020
1	2	3
4	Rumah Sakit Jiwa	34.407.632.064
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	322.766.787.000
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	55.947.269.750
7	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	14.996.874.300
8	Dinas Perhubungan	38.487.006.500
9	Dinas Lingkungan Hidup	13.832.671.830
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	8.845.197.000
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.784.000.397
12	Dinas Sosial	14.775.626.688
13	Dinas Tenaga Kerja	15.868.547.004
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.811.104.252
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	18.960.416.755
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	44.694.775.200
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	26.937.280.335
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.223.872.692
19	Satuan Polisi Pamong Praja	13.274.178.391
20	Sekretariat DPRD	91.465.487.923
21	Badan Keuangan Daerah	29.420.088.233
22	Inspektorat Daerah	16.441.297.246
23	Badan Penghubung Provinsi	12.698.483.540
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.288.252.994
25	Dinas Pangan	8.864.175.629
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.118.921.740
27	Dinas Komunikasi Dan Informatika	29.012.869.618
28	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	10.768.654.882
29	Dinas Pertanian	48.823.681.000

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu Belanja Langsung 2020
1	2	3
30	Dinas Kehutanan	20.761.187.974
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	16.186.983.540
32	Dinas Kelautan Dan Perikanan	46.120.271.741
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	38.732.401.500
34	Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	3.937.747.114,00
35	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	10.583.498.751,00
36	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	2.593.086.000,00
37	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah	1.772.334.022,00
38	Biro Umum Sekretariat Daerah	44.036.121.427,00
39	Biro Hukum Sekretariat Daerah	2.722.661.990,00
40	Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	1.772.334.022,00
41	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	3.886.500.250,00
42	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah	2.722.661.933,00
	TOTAL	**1.639.757.322.802**



BAB VII

- **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

Tujuan perumusan dan penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET 2020	Kondisi akhir RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,76	5,00	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,74	3,9	4.00
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3 Tingkat kunjungan wisatawan	330.322	419.594	477.181
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,49	0,63	0,54
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,62	2.67	2.86
6	Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	15,35	12.86	12.95
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	7 Persentase pertumbuhaan pengeluaaran pemerintah daerah	5,50	5.70	5.80
8	Menurunnya angka Pengangguran	8 Persentase Angka Pengangguran	3.7	5.5	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase Angka Kemiskinan	5,04	5.10	4,0
10	Menurunnya angka Inflasi	10 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6.24	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	11 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,11	2,08	2,08
12	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	12 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.034	1.187	1.294
		13 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	90.000	175.000
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	14 Persentase lingkungan yang tertata	N.A	54	100
		15 Persentase bangunan yang tertata	N.A	30	60
		16 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	N.A	66%	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET 2020	Kondisi akhir RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	17 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17	0.19	2.495 (RPJMD)
		18 Persentase armada pengangkutan	N.A	0.35	4.875 (RPJMD)
		19 Persentase jalan kondisi mantap	92,2	94.50	96.50
15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	20 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11,71	11.94	12.00
			L=11.93	L=12,51	L=12,81
			P=12.07	P=12,63	P=12,93
16	Meningkatnya kesehatan masyarakat	21 Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	82,97	89,98
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
		23 Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	4
		24 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	63	85	92
		25 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	N.A	2,8	2,9
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	26 Nilai rata-rata delapan area perubahan	N.A	40	50
		27 Indeks Profesionalitas ASN	60	73,.5	90
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	28 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N.A	10	20
		29 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	N.A	B	B
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	30 Skor aspek kebebasan sipil	81.70	87,79	87.82
		31 Skor aspek hak-hak politik	80.25	81.79	81,85
		32 Skor aspek lembaga demokrasi	80,10	80,36	80,54
21	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	33 Indeks kapasitas bencana daerah	0,10	0,25	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	34 Indeks kualitas air sungai	64,56	67,16	69,88
		35 Indeks kualitas udara	82,81	90,49	96,01
		36 Indeks tutupan lahan	37,51	38,64	39,81
		37 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N.A	6.843,99	6.047,35

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan usulan Indikator Kinerja Kunci yang diterima dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang dilakukan setiap bulan Desember. IKK disusun untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah utnuk masing-masing urusan pemerintahan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.2.

Tabel VII.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
Urusan Wajib			
1	PENDIDIKAN	Angka melek huruf	97,78
		Angka rata-rata lama sekolah	7,89
		Angka partisipasi kasar	96,98
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	40,63
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK/MA	40,63
		Harapan Lama Sekolah	11,93
		Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	57,7
2	KESEHATAN	Angka kelangsungan hidup bayi	8,07
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7,16
		Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	7
		Angka usia harapan hidup	70,23
		Prevalensi Kurang Gizi anak balita	14
		Kematian ibu (per 100.000 orang)	21
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	15.57
		Ketaatan terhadap RTRW	100%
		Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	20
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	4
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,19
		Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	93,5
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)	84

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	69,21%
		Persentase Rumah layak huni	22,54%
		Persentase lingkungan yang tertata	10%
		Persentase bangunan yang tertata	30%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Polisi Pamong Praja	1.501,15
		Jumlah penduduk	1.458.809,45
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	10,42
		Jumlah Siskamling	1.570,85
		Jumlah Desa	309
		Rasio Jumlah siskamling	5,09
		persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	1
		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7
		persentase menurunnya kasus konflik sosial	60,80%
		persentase partisipasi pemilih	71%
6	Sosial	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	4.900
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	45.000
7	Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,35
		Tingkat Pengangguran	5,5
		persentase kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	5%
		persentase lansia, disabilitas, korban eks napza dan tuna sosial yang mendapat pelatihan	0,57%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,15
		Jumlah KDRT	54
		Jumlah Rumah Tangga	331.490,50
		Persentase Capaian Provinsi Layak Anak	57,14
		Rasio KDRT	0,00016

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
		Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	40
		Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	50
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	46%
		Angka Fertilitas Total (TFR)	2,54%
9	Ketahanan Pangan	Regulasi ketahanan pangan	1
		Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 87	83
		persentase pangan yang aman dikonsumsi	86
		Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	84
		Persentase Cadangan Pangan	2,80%
10	Pertanahan	Luas Lahan (m2) Berdasarkan Sertifikat	81.359.224,46
		Penyelesaian kasus tanah Negara	42,78
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.18
		Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	81
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan KTP	100
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran	719,12
		Persentase penyajian database kependudukan skala provinsi	100
		Jumlah pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh OPD Provinsi	20 OPD
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok LPM	5.885,25
		Kelompok PKK	14.774,25
		Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang berkualitas	5 alat
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	50
		Jumlah kewirausahaan	100 lembaga
		Jumlah Pokjanal Posyandu dipedesaan	75
		Jumlah PKK aktif di pedesaan	12 Pokja
		Jumlah kelembagaan ekonomi dan keuangan di perdesaan	30 BUMDesa
		Jumlah Kawasan pedesaan yang dibangun	2 kawasan

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,9
		Jumlah akseptor KB	332.529,25
		Jumlah pasangan usia subur	295.248,50
		Rasio akseptor KB	117,51
		Persentase Grand design Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	60
		Jumlah keluarga pra sejahtera	34.069,75
		Jumlah keluarga sejahtera I	387.896,50
		Jumlah keluarga sejahtera I +	-90.475,75
		Jumlah keluarga	331.490,50
15	Perhubungan	Terminal Bus/Angkot/Angdes	13
		Pelabuhan Udara	2
		Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	90,96
		Jumlah ijin trayek	28,41
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum	7%
		Persentase peningkatan jumlah angkutan barang	16%
		persentase penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung	18%
		Persentase angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang laik jalan	100%
		persentase penurunan pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum penumpang dan angkutan barang	20%
16	Komunikasi dan Informatika	Web site milik pemerintah daerah	10
		Pameran/expo	1
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Koperasi Aktif	901,5
		Jumlah Koperasi	1.321,25
		Persentase Koperasi Aktif	76,65
		Jumlah UKM	298.016,07
18	Penanaman Modal	Jumlah Investor	115,63
		NilaiInvestasi (Trillin Rp)	168,81
19	Kepemudaan dan	Jumlah Organisasi Pemuda	270

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
	Olahraga		
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7,41
		Klub/Organisasi Olahraga	595
20	Statistik	Buku daerah dalam angka	8
		Buku PDRB prov/kabupaten/kota	8
		Kebudayaan	
21	Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	26
		Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya	8
22	Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	3.800
		Perpustakaan Milik Pemda	12
		Perpustakaan Non Pemda	1.369
23	Kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	59
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	19
		Kelautan dan Perikanan	
Urusan Pilihan			
24	Kelautan dan Perikanan	Potensi perikanaan Tangkap	1.059.000,00
		Potensi perikanaan budidaya	1.316.000,00
		Produksi perikanaan tangkap	207.431,89
		Produksi perikanaan budidaya	-3.536,83
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	55
		Produksi olahan ikan (Ton)	21.610
		Jumlah Produksi Benih Ikan air payau (Juta Ekor)	10,59
		Jumlah Produksi Benih Ikan air Laut (Juta Ekor)	0,07
		Jumlah Produksi Benih Ikan air Tawar (Juta Ekor)	0,36
		Luas kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha)	825.077
25	Pariwisata	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	419.594,00
		Jumlah Wisatawan Luar Negeri	5.637,25
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif	4,44%
		Pertumbuhan lembaga kepariwisataan yang difasilitasi	15

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
26	Pertanian	Distribusi Persentase PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	14,55
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Pangan	0,48
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Hortikultura	2,11
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Perkebunan	10,75
		Distribusi Persentase PDRB Peternakan	1
		Distribusi Persentase PDRB Jasa Pertanian dan Perburuan	0,25
27	Kehutanan	Luas Hutan Produksi	432.883,57
		Luas Hutan Lindung	179.993,09
		Luas Hutan Konservasi	35.421,06
		Luas Hutan Produksi Konversi	693,18
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Potensi bahan galian Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
		Potensi bahan galian Pasir Bangunan	666.188,06 ton
		Potensi bahan galian Kaolin	205.487,50 ton
		Potensi bahan galian Granit	55.508,29 m8
		Potensi bahan galian Diabas	89.551,12 m8
29	Perdagangan	Ekspor (us Dollar)	799,1
		Timah	380,8
		Non Timah	418,04
		Impor (us Dollar)	250,09
		Migas	72,95
		Non Migas	178,43
30	Perindustrian	Jumlah Industri Kecil	19.224,50
		Laju pertumbuhan	0,1
		Industri Menengah	19.366,25
		Laju pertumbuhan	0,1
31	Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi	3
		jumlah KTM	2
urusan penunjang			
32	Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2020
1	2	3	4
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
33	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pajak Kendaraan Bermotor	356.268,42
		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	201.462,22
		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	349.470,82
		Pajak Air Permukaan	9.890,27
		Pajak Rokok	141.664,04
		Pajak Rokok	141.664,04
		Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,31



BAB VIII

➢ PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu, prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui forum gabungan perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ini, dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2020.

Pangkalpinang, Juli 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-								
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 100 %					DINAS PENDIDIKAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Persentase aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	2.586.050.000	2.200.000.000	
			Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Provinsi, SKPD			Jenis kegiatan siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 jenis	3 jenis	2.200.000.000	3.000.000.000	
			Peningkatan pelaksanaan pendidikan paud oleh kab/kota	Provinsi			Terbinanya Pendidikan PAUD 7 Kab/Kota Tersedianya Majalah Pendidikan PAUD Tk. Provinsi 120.000 Eksemplar	7 Kab/Kota 120.000 Eksemplar	-	2.000.000.000	
			Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	Provinsi			Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi 1 Dok	1 Dok	-	-	
			Pencetakan Majalah Pendidikan	Provinsi, SKPD			Jumlah Paket Majalah Pendidikan 1 Paket	1 Paket	859.550.000	900.000.000	
			Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	Provinsi, SKPD			Jumlah triwulan pelaksanaan rekonsiliasi 4 triwulan Jumlah peserta Bimtek Keuangan 180 orang	4 triwulan 180 orang	372.900.000	380.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			DED Taman Edukasi Tata Surya 1 Dokumen Persentase aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1 Dokumen 100 %	9.877.260.000	1.200.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	1	350.000.000	230.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	1	499.960.000	500.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah aplikasi satu data 1 unit Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	1 unit 2 dokumen	2.200.000.000	200.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah kabupaten/kota pelaksanaan SPM 7 kabkot Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 6 laporan	7 kabkot 6 laporan	500.000.000	500.000.000	
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Provinsi, SKPD			Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 Jenjang	3 Jenjang	-	1.150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Terseleksinya anggota tim Lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi 21 tim	21 tim	8.169.878.300	8.500.000.000	
			Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah masyarakat berprestasi menerima beasiswa ke luar negeri 20 orang Jumlah lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa 1.100 orang	20 orang 1.100 orang	16.000.000.000	16.000.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi; Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes	90 NILAI; 80 %					DINAS KESEHATAN
			pelayanan administrasi perkantoran	SKPD			Jumlah alat tulis kantor 1 tahun Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar, Batery Kering) 1 tahun Jumlah Tabung APAR yang Terisi 10 tabung Jumlah Rekening Telpon dan Listrik yang Dibayarkan 12 rekening Jumlah Surat Kabar / Majalah 96 eksemplar Jumlah Paket Pengiriman 300 kali Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor (4	1 tahun 1 tahun 1 tahun 10 tabung 12 rekening 96 eksemplar 300 kali 6 kendaraan 1.162 paket 257.000 lembar 1 tahun 1 tahun	2.903.799.500	2.945.618.918	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							mobil, 2 motor) 6 kendaraan Jumlah Cetak (60 kotak, 152 buku, 950 lembar) 1.162 paket Jumlah Penggandaan 257.000 lembar Jumlah Makan Minum 1 tahun Jumlah Perjadin dalam dan luar daerah 1 tahun				
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SKPD			Jumlah galon diisi ulang 200 galon Jumlah perawatan/rehab/pengecatan gedung dinas kesehatan 1 paket Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun Jumlah pengadaan alat pengolahan pertanian dan peternakan (mesin potong rumput 1 unit, mesin semprot elektrik 3 unit) 4 unit Jumlah pengadaan peralatan kantor (AC 2 PK) 4 unit Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (almari arsip 1 paket, televisi 3 unit) 1 tahun Jumlah Pengadaan Komputer (komputer 7 unit, notebook 10 unit, printer 3 unit, scanner 2 unit, UPS 2 unit) 24 unit Jumlah pengadaan mebeulair (meja rapat	200 galon 1 paket 1 tahun 4 unit 4 unit 1 tahun 24 unit 95 unit 3 unit 1 unit	5.551.449.000	921.127.384	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							25 unit, kursi kerja 20 unit, kursi rapat 50 unit) 95 unit Jumlah pengadaan alat studio (kamera 1 unit, proyektor dan layar 1 unit, sound system 1 unit) 3 unit Jumlah pengadaan konstruksi jaringan air (sumur bor) 1 unit				
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD					213.510.000	227.346.737	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen renja kab/kota 1 dokumen Jumlah dokumen Renja PD dan dokumen Renja Perubahan PD 2 dokumen Jumlah bank data dan profil kesehatan 8 bank data, 10 dokumen profil Jumlah dokumen DAK bidang kesehatan tahun 2019 1 dokumen Jumlah laporan evaluasi (LAKIP dan LAPTAN) 2 dokumen laporan evaluasi Jumlah kab./kota yang terbina data kesehatan, SIKDA dan e-Puskesmas nya, dan dilakukan monitoring capaian kinerja 7 kab/kota Jumlah dokumen laporan koordinasi data dan informasi,	1 dokumen 2 dokumen 8 bank data, 10 dokumen profil 1 dokumen 2 dokumen laporan evaluasi 7 kab/kota 2 dokumen laporan	256.576.000	517.062.953	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							konsultasi perencanaan dan penganggaran 2 dokumen laporan				
			Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD					61.397.000	548.149.884	
			Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes	SKPD			Jumlah bahan habis pakai 1 tahun Jumlah belanja jasa kantor 1 tahun Jumlah belanja perawatan kendaraan bermotor (1 mobil, 1 motor) 2 kendaraan Jumlah belanja cetak dan penggandaan 1 tahun Jumlah belanja makanan dan minuman 300 kotak Jumlah belanja perjalanan dinas 1 tahun Jumlah belanja pemeliharaan 1 tahun Jumlah honorarium PNS 1 orang	1 tahun 1 tahun 2 kendaraan 1 tahun 300 kotak 1 tahun 1 tahun 1 orang	3.078.616.000	1.886.953.171	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan; Nilai	100 persen; 82 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SAKIP Perangkat Daerah						
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 165 orang	165 orang	3.417.600.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 165 orang	165 orang	1.916.458.944	29.651.070.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Laporan	2 Laporan	539.090.000	600.000.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Laporan	5 Laporan	263.480.000	220.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 50 orang	50 orang	150.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 80 %					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan 68 Orang	68 Orang	1.298.425.000	1.926.158.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur PD yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1	700.000.000	1.828.319.429	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur PD yang meningkat disiplinnya 68 Orang	68 Orang	113.200.000	97.163.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Jumlah Aparatur PD yang meningkat kapasitasnya 20 Orang	20 Orang	120.000.000	328.504.110	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen) 2	2	50.000.000	130.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 9 Laporan	9 Laporan	172.230.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat SAKIP Bappeda	100 Predikat; 85 Predikat					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantorann	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang menerima pelayanan administrasi secara baik 100 Orang	100 Orang	3.385.900.800	3.400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang menerima pelayanan sarana prasarana pendukung pekerjaan secara baik 100 orang	100 orang	2.043.350.000	3.190.434.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang disiplin 100 Stel	100 Stel	74.850.000	145.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 27 orang	27 orang	318.000.000	600.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	279.677.000	225.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 7 laporan	7 laporan	155.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Perhubungan	4 Nilai; 100 %; 80 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Presentase aparatur perangkat daerah yangmemanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur 100 %	1	1.903.459.948	1.000.000.000	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan	Luar Daerah, Provinsi			Terselenggaranya Pendaftaran dan seleksi Calon Taruna/i Sekolah Tinggi Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan 100 orang	100 orang	1.771.624.500	1.871.624.500	
			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayaran	Provinsi			Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayaran 70 orang	70 orang	212.308.000	215.800.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 % Jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) 16 orang	100 % 16 orang	2.729.628.000	2.873.225.250	
			Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	SKPD			Jumlah konten yang dipublikasikan 150 konten	150 konten	25.050.000	75.200.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah ASN wanita 16 orang Jumla P3K Wanita 4 orang Jumlah ASN Pria 50 orang Jumlah P3K Pria 12 orang	16 orang 4 orang 50 orang 12 orang	129.705.000	-	
			Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa Perhubungan	Provinsi			Tersedianya Dokumen Data Pelayanan Jasa Perhubungan 1	1 Dokumen	57.775.000	95.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dokumen				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis 15 orang	15 orang	180.000.000	183.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat daerah diatas 85 % 4 Dokumen	4 Dokumen	184.000.000	195.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000	81.985.897	
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	Provinsi			Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan. 1 Dokumen	1 Dokumen	84.400.000	95.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka,			Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang terlayani dan responsive gender 95 Orang	95 Orang	2.254.245.000	2.240.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah							
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Responsive Gender 9 Paket Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Responsive Gender 11 Paket	9 Paket 11 Paket	1.831.640.000	2.000.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah pakaian dinas Pegawai Harian Lepas yang terpenuhi dan responsive gender 76 Stel Jumlah pakaian dinas aparatur sipil negara yang terpenuhi dan responsive gender 240 Stel	76 Stel 240 Stel	176.400.000	262.460.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang responsive gender 20 Orang	20 Orang	247.000.000	346.830.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen Jumlah peserta rapat	3 Dokumen 70 Orang 10 Dokumen	432.845.000	320.237.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup yang responsive gender 70 Orang Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender 10 Dokumen				
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Jenis Laporan	4 Jenis Laporan	117.900.000	181.500.000	
			Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Peraturan dan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang Tersusun 1 Jenis Peraturan Daerah	1 Jenis Peraturan Daerah	165.455.000	192.500.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3 Nilai					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan administrasi perkantoran	SKPD					2.103.658.000	2.200.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD					204.060.000	150.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD					69.975.000	100.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Orang	5 Orang	40.000.000	100.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah PD 2 Dokumen	2 Dokumen	64.900.000	125.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD 5 Laporan	5 Laporan	84.000.000	190.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	78 %; 100 %					DINAS SOSIAL
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani 100 pegawai	100 pegawai	3.612.381.688	3.100.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani 100 pegawai	100 pegawai	907.950.000	1.000.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencananan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 dokumen	4 dokumen	200.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	250.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi			Jumlah pegawai yang wawasan dan pengetahuannya meningkat 300 Pegawai	300 Pegawai	150.000.000	300.000.000	
			Pengelolaan Data, Informasi Kesejahteraan Sosial	Provinsi			Jumlah data fakir miskin cakupan Daerah provinsi yang terhimpun 2 laporan	2 laporan	600.000.000	600.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 85 nilai					DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	3.807.494.457	4.807.494.457	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran Pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan 100 %	1	4.048.000.000	700.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 % 100 %	1	1.115.749.197	1.115.749.197	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 % 100 %	1	300.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	250.000.000	37.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100 %	1	50.000.000	50.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan 100 %	1	1.047.000.000	532.024.547	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 81 Orang	81 Orang	3.029.585.700	2.850.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran 81 Orang	81 Orang	972.420.000	1.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang ditingkatkan kemampuannya 10 Orang	10 Orang	135.000.000	200.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	114.827.000	170.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkal Pinang			Jumlah pegawai DPMPTSP yang terlayani 62 orang	62 orang	1.913.100.000	1.900.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkal Pinang			Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana kantor 8 paket Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 6 Paket Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara 4 Unit	8 paket 6 Paket 4 Unit	800.000.000	900.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkal Pinang			Persentase aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya 100 Persen	100 Persen	150.000.000	200.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Persentase aparatur perangkat daerah yang	100 Persen	80.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							meningkat kapasitasnya 100 Persen				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkal Pinang			Jumlah peserta rakor 35 Peserta (20 laki2 dan 15 perempuan) Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah 4 Dokumen	35 Peserta (20 laki2 dan 15 perempuan) 4 Dokumen	69.250.000	76.175.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkal Pinang			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 4 Laporan	4 Laporan	20.180.000	22.198.000	
			Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP	Belitung			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana Prasarana UPTD yang terkelola 12 Bulan	12 Bulan	1.164.415.000	1.280.856.500	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelayanan Kesekretariatan	80 nilai; 77 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah ASN Disbudpar yang terlayani 57 orang	57 orang	3.087.672.213	5.127.250.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 6 dokumen	6 dokumen	204.249.850	317.057.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 141 unit Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana 6	141 unit 6 paket 9 unit	4.541.006.787	2.899.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							paket Jumlah kendaraan yang terpelihara 9 unit				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah ASN Disbudpar yang meningkat kapasitasnya 15 orang	15 orang	157.425.700	177.825.000	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pelaporan dan capaian kinerja yang tersusun 5 dokumen	5 dokumen	124.549.700	447.778.500	
			Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	Provinsi, Belitung			Jumlah ASN UPTD yang terlayani 4 orang	4 orang	298.493.000	695.750.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahragaan	100 %; 73 nilai					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	3.285.365.000	3.408.559.379	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 80 %	0,8	226.975.001	890.818.335	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat Kapasitasnya 8 Pegawai	8 Pegawai	75.000.000	100.490.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 5 dokumen	5 dokumen	238.250.000	239.580.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	181.450.000	163.979.200	
			Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Proposal Penerima Bantuan Keuangan APBD di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Proposal yang diverifikasi dan dievaluas 3 dokumen	3 dokumen	37.200.000	169.037.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	19.579.473.735	29.508.970.254	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1	21.413.861.692	21.557.659.604	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	1	384.000.000	1.137.621.240	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Provinsi, SKPD			Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah 100 %	1	2.658.786.000	3.298.490.370	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD; Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	90 %; 77 Predikat					SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	55.000.000	50.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan) 7 dokumen	7 dokumen	55.000.000	50.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 80 orang	80 orang	300.000.000	846.516.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah (Stel) 562 stel	562 stel	750.000.000	1.064.453.940	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani (Orang) 265 orang	265 orang	5.169.600.000	13.003.735.569	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap	80 %; 82 Skor					INSPEKTORAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pelayanan Kesekretariatan; Skor (Nilai) SAKIP Perangkat daerah						
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	1.816.900.000	2.153.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1	8.638.410.000	8.539.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 95 Orang	95 Orang	-	-	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Prosentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	1	529.000.000	723.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	16.719.206	34.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Laporan	7 Laporan	12.700.000	88.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD; Nilai LAKIP BKPSDMD; Nilai Indeks Profesionalitas ASN; Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi	95 %; 65 ; 76 Nilai; 91 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Pegawai BKPSDMD yang terlayani 189 Orang	189 Orang	4.790.361.994	5.500.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor 15 Paket Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara 7 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 8 Paket Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara 1 Unit	15 Paket 7 Unit 8 Paket 1 Unit	2.751.225.000	6.060.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender 9 Dokumen Jumlah Dokumen 2 Dokumen	9 Dokumen 2 Dokumen	107.000.000	240.000.000	
			Penguatan Kelembagaan / Organisasi	SKPD			Jumlah Laporan 1 Laporan	1 Laporan	117.328.000	235.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya 1.092 Orang	1.092 Orang	650.000.000	1.075.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya 189 Orang	189 Orang	297.672.000	375.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Laporan 9 Laporan	9 Laporan	50.000.000	170.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	1	9.414.175.233	13.924.579.208	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 dokumen	3 dokumen	62.518.000	52.080.000	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat 30 orang	30 orang	215.973.000	347.287.500	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 75 %	0,75	4.847.859.900	5.390.476.879	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 laporan	7 laporan	49.257.000	52.080.000	
			Pengelolaan Kehumasan	Provinsi			Jumlah bulan layanan	12 bulan	64.413.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pada Bakuda				Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA 12 bulan			161.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Satpol PP; Nilai LAKIP Satpol PP	100 %; 72 nilai					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 233 orang	233 orang	7.753.078.200	6.486.203.900	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 233 orang	233 orang	1.336.009.000	712.463.648	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya 7 orang	7 orang	55.460.000	41.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah 4 dokumen	4 dokumen	49.860.000	80.949.500	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah 8 dokumen/laporan	8 dokumen/laporan	67.860.000	109.560.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS PANGAN
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD					50.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang					1.172.175.629	1.300.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD					910.000.000	1.000.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 90 Persen	90 Persen	180.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Persentase capaian dokumen perencanaan 93 persen	93 persen	200.000.000	210.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 95 persen	95 persen	50.000.000	55.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung; Nilai Lakip Badan Penghubung	72 Nilai; 75 Nilai					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani 65 Orang	65 Orang	5.123.308.540	8.000.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %	1	588.525.000	1.200.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	65 Orang	142.005.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							65 Orang				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 33 Orang	33 Orang	245.165.000	1.000.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	26.400.000	110.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah 6 Laporan	6 Laporan	26.200.000	120.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 3 NILAI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 84 Orang	84 Orang	1.750.500.000	2.436.221.813	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 Bulan 84 Orang	84 Orang	202.910.000	707.308.875	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkat Disiplinnya 84 Orang	84 Orang	66.145.000	69.457.500	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang	10 Orang	-	115.762.500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	190.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 5 laporan	5 laporan	125.500.000	210.000.000	
			Pembangunan Gedung Kantor & Ruang Kantor	Provinsi			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana &Prasarana Perkantoran selama 12 bulan 0 Orang	0 Orang	-	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai LAKIP DKPUS; Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DKPUS	3 Nilai; 75 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 60 Orang	60 Orang	3.019.829.932	2.559.014.314	
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang	60 Orang	5.913.794.950	89.153.493.818	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Aparatur				terlayani 60 Orang				
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 15 Orang	15 Orang	50.000.000	112.926.319	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 8 Laporan	8 Laporan	53.660.000	170.980.000	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	45.650.000	218.576.964	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 4 Nilai					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 53 orang	53 orang	2.673.154.194	2.501.256.159	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 53 orang	53 orang	142.230.000	330.505.463	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang	53 orang	132.550.000	104.880.825	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							meningkat disiplinnya 53 orang				
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 200 orang	200 orang	578.328.000	506.426.208	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	222.985.000	54.600.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	39.715.000	66.145.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	6 Nilai; 100 %					DINAS PERTANIAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD					6.528.530.000	7.528.530.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD					1.000.000.000	1.352.300.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD					350.000.000	400.000.000	
			Peningkatan disiplin aparatur	SKPD					350.000.000	270.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	SKPD					400.000.000	397.535.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Pertanian								
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						472.465.000	482.465.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pelayanan Dinas Kehutanan	80,2 Nilai; 100 %					DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	2.058.318.100	2.250.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca	Bangka					-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Bangka					-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas	Bangka Selatan					-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan	Bangka Tengah					-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau	Belitung					-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren	Belitung Timur					-	-	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	25 Orang	200.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			25 Orang				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	4.581.878.224	4.000.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 186 Orang	186 Orang	65.000.000	100.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 90 %	0,9	125.000.000	150.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 95 %	0,95	50.000.000	50.000.000	
			Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Tersedianya sistem informasi pembangunan kehutanan 1 Unit	1 Unit	200.000.000	250.000.000	
			Pelayanan Administrasi	Bangka Barat					-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung								
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Bangka Barat					-	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 ; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun	1 Tahun	1.808.893.000	2.100.000.000	
			RAKORNAS Dinas ESDM	Provinsi			Jumlah Provinsi RAKORNAS 34 Provinsi	34 Provinsi	500.000.000	-	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	Bangka			Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bangka 1 Tahun	1 Tahun	725.000.000	700.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	Bangka Barat			Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Barat 1 Tahun	1 Tahun	625.000.000	700.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Bangka Selatan, Bangka Tengah			Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten BangkaTengah dan Bangka Selatan 1 Tahun	1 Tahun	655.000.000	700.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	Belitung			Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Belitung 1 Tahun	1 Tahun	835.000.000	750.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas	Belitung Timur			Operasional Cabang Dinas Wilayah	1 Tahun	665.000.000	750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wilayah Belitung Timur				Kabupaten Belitung Timur 1 Tahun				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun	1 Tahun	850.000.000	2.000.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat 30 Pegawai	30 Pegawai	200.000.000	200.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	150.000.000	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD 5 Dokumen	5 Dokumen	120.000.000	150.000.000	
			Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Keikutsertaan dalam kegiatan Penyebaraan data dan informasi 3 Kegiatan	3 Kegiatan	215.000.000	215.000.000	
			Pendataan Aset SKPD	Provinsi, SKPD			Pendataan Aset Dinas 60 %	0,6	135.000.000	250.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	150.000.000	
			Rapat Koordinasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah peserta RAKOR Dinas ESDM se-Provinsi Kep, Babel 75 Peserta	75 Peserta	100.000.000	120.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 100 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang	1	3.722.501.258	3.660.196.321	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							terlayani selama 12 bulan 100 %				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1	2.150.005.000	2.186.186.389	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD					465.000.000	110.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	1	450.000.000	1.704.880.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	505.780.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	231.000.000	254.100.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	2.555.401.500	2.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	500.000.000	601.880.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 10 orang	10 orang	150.000.000	155.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di atas 85 % 2 Dokumen	2 Dokumen	237.000.000	242.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% 5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	15.000.000	78.081.806	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Lakip Badan Kesbangpol; Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Badan Kesbangpol	3 nilai; 100 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 65 Orang	65 Orang	1.565.020.000	2.078.886.480	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana	65 orang	437.252.000	2.693.460.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							prasarana perkantoran selama 12 bulan 65 orang				
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 65 orang	65 orang	50.850.000	145.200.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 65 orang	65 orang	50.000.000	145.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 laporan	4 laporan	137.390.000	363.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 laporan	5 laporan	94.250.000	179.625.600	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 76 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 %	0,9	1.823.187.397	1.869.772.747	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			, Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka TengahPersentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	1	970.743.000	1.419.032.500	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	1	115.000.000	60.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Luar Daerah			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 75 %	0,75	37.500.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah Diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	400.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	85 persen; 75 persen; 55 persen					RUMAH SAKIT UMUM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pelayanan kesekretariatan; Nilai sakip perangkat daerah; tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit						PROVINSI
			Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Provinsi, Bangka, Merawang					14.241.800.000	17.000.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Bangka, Merawang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 persen	90 persen	10.747.944.750	10.197.194.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, Bangka, Merawang			Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana kantor 14 paket	14 paket	4.205.043.070	4.838.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah pegawai RSUP yang mengikuti bimtek 190 orang	190 orang	940.885.000	2.300.000.000	
			Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah dokumen pelaporan 3 laporan	3 laporan	7.480.000	210.000.000	
			penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Provinsi, Bangka, Merawang			dokumen perencanaan 3 dokumen	3 dokumen	3.245.000	35.000.000	
			Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan promosi 6 fasilitas kesehatan	6 fasilitas kesehatan	500.000.000	251.710.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90 persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan 12 bulan	12 bulan	4.716.461.064	5.250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan 12 bulan	12 bulan	1.269.660.000	2.750.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinya 1 tahun	1 tahun	-	300.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Persentase peningkatan kapasitas aparatur 90 persen	90 persen	850.000.000	1.250.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	65.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	60.000.000	66.000.000	
			Pendidikan								
	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	**Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	81,97 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah sekolah terlayani 27 Sekolah	27 Sekolah	16.848.981.840	16.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani 684 Siswa	684 Siswa	984.100.000	1.251.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani 237 Siswa	237 Siswa	1.216.800.000	2.009.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani 1.044 Siswa	1.044 Siswa	1.734.000.000	2.312.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani 655 Siswa	655 Siswa	1.063.900.000	1.510.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani 270 Siswa	270 Siswa	447.900.000	898.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani 406 Siswa	406 Siswa	692.000.000	984.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani 356 Siswa	356 Siswa	612.000.000	818.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani 262 Siswa	262 Siswa	382.700.000	700.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani 515 Siswa	515 Siswa	795.200.000	950.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani 528 Siswa	528 Siswa	776.300.000	993.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani 864 Siswa	864 Siswa	1.403.600.000	1.800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani 247 Siswa	247 Siswa	377.600.000	487.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani 443 Siswa	443 Siswa	662.600.000	921.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani 838 Siswa	838 Siswa	1.226.200.000	1.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani 449 Siswa	449 Siswa	660.400.000	1.053.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani 395 Siswa	395 Siswa	595.400.000	723.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani 907 Siswa	907 Siswa	1.359.900.000	1.650.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani 129 Siswa	129 Siswa	201.800.000	518.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Bangka			Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani 122 Siswa	122 Siswa	636.500.000	882.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani 1.549 Siswa	1.549 Siswa	2.542.000.000	3.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani 759 Orang	759 Orang	1.251.500.000	1.314.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani 616 Orang	616 Orang	1.028.000.000	1.164.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani 329 Siswa	329 Siswa	526.400.000	872.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani 946 Siswa	946 Siswa	1.377.400.000	1.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani 851 Siswa	851 Siswa	1.207.300.000	1.452.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani 899 Siswa	899 Siswa	1.306.300.000	1.603.800.000	
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	81,97 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Sekolah terlayani 12 Sekolah	12 Sekolah	7.063.423.360	7.100.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani 504 Siswa	504 Siswa	705.600.000	905.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip,	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani 617 Siswa	617 Siswa	863.800.000	1.236.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Bangka Barat								
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani 412 Siswa	412 Siswa	576.800.000	788.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Bangka Barat			Jumlah siswa SLB N Muntok terlayani 77 Siswa	77 Siswa	397.300.000	735.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani 737 Siswa	737 Siswa	1.312.700.000	1.522.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani 577 Siswa	577 Siswa	1.022.000.000	1.300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani 757 Siswa	757 Siswa	1.211.200.000	1.406.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani 345 Siswa	345 Siswa	525.000.000	792.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani 315 Siswa	315 Siswa	504.000.000	512.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani 691 Siswa	691 Siswa	967.400.000	1.242.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani 651 Siswa	651 Siswa	911.400.000	1.254.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani 750 Siswa	750 Siswa	915.900.000	1.220.400.000	
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	81,97 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Bangka Tengah, Bangka Selatan			Jumlah sekolah terlayani 29 Sekolah	29 Sekolah	15.714.760.000	15.800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani 514 Siswa	514 Siswa	719.600.000	1.013.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan 247 Siswa	247 Siswa	345.800.000	590.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani 606 Siswa	606 Siswa	848.400.000	1.164.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani 48 Siswa	48 Siswa	3.600.000.000	2.060.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Bangka Tengah			Jumlah siswa SLB N Koba terlayani 80 Siswa	80 Siswa	400.000.000	630.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani 713 Siswa	713 Siswa	1.140.800.000	1.830.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani 359 Siswa	359 Siswa	574.400.000	854.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani 102 Siswa	102 Siswa	273.150.000	370.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani 324 Siswa	324 Siswa	518.400.000	818.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani 147 Siswa	147 Siswa	289.950.000	380.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani 475 Siswa	475 Siswa	828.580.000	1.522.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani 317 Siswa	317 Siswa	552.400.000	940.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani 317 Siswa	317 Siswa	792.800.000	1.220.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani 245 Siswa	245 Siswa	343.000.000	601.200.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani 194 Siswa	194 Siswa	271.600.000	520.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani 608 Siswa	608 Siswa	851.200.000	1.233.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani 154 Siswa	154 Siswa	233.400.000	433.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N Simpang Rimba terlayani 414 Siswa	414 Siswa	579.600.000	885.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani 880 Siswa	880 Siswa	1.232.000.000	1.620.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani 473 Siswa	473 Siswa	705.222.000	1.033.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani 83 Siswa	83 Siswa	415.000.000	735.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani 785 Siswa	785 Siswa	1.256.000.000	1.668.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani 763 Siswa	763 Siswa	1.220.800.000	1.712.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani 844 Siswa	844 Siswa	1.350.400.000	1.800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani 242 Siswa	242 Siswa	387.200.000	638.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani 665 Siswa	665 Siswa	931.000.000	1.364.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 LubukBesar terlayani 476 Siswa	476 Siswa	666.400.000	932.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani 421 siswa	421 siswa	589.400.000	923.400.000	
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	81,97 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Belitung, Belitung Timur			Jumlah sekolah terlayani 21 Sekolah	21 Sekolah	12.477.294.040	12.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA	Belitung			Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan	741 Siswa	1.119.300.000	1.535.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung				terlayani 741 Siswa				
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani 150 Siswa	150 Siswa	734.600.000	800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani 820 Siswa	820 Siswa	1.552.320.000	1.644.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani 525 Siswa	525 Siswa	904.240.000	1.210.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani 220 Siswa	220 Siswa	731.860.000	1.638.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggiang terlayani 214 Siswa	214 Siswa	666.180.000	488.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani 375 Siswa	375 Siswa	714.000.000	754.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Gantung terlayani 706 Siswa	706 Siswa	1.015.700.000	1.297.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit terlayani 470 Siswa	470 Siswa	699.300.000	954.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Manggar terlayani 673	673 Siswa	1.027.000.000	1.274.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur				Siswa				
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani 868 Siswa	868 Siswa	1.576.860.000	2.200.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Pesak terlayani 500 Siswa	500 Siswa	769.460.000	1.002.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SLB N Manggar terlayani 102 Siswa	102 Siswa	537.300.000	910.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah Siswa SMK N 1 Sijuk terlayani 159 Siswa	159 Siswa	387.200.000	384.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani 800 Siswa	800 Siswa	1.398.300.000	1.732.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani 576 Siswa	576 Siswa	907.960.000	1.192.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani 500 Siswa	500 Siswa	830.000.000	1.174.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Belitung			Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani 165 Siswa	165 Siswa	264.000.000	456.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani 536 Siswa	536 Siswa	764.400.000	1.008.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani 507 Siswa	507 Siswa	729.400.000	1.027.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani 750 Siswa	750 Siswa	1.077.300.000	1.350.000.000	
			Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMA,; Persentase SMA terakreditasi A; Rata-rata nilai UN SMA; APK SMA Perempuan; APK SMA Laki-Laki	100 Persen; 40,63 Persen; 50 Persen; 6,8 point; 43,52 Persen; 37,91 %					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Provinsi, SKPD			Tersedianya Peralatan Lab SMA 7 Paket Tersedianya Meubelair SMA 12 Unit Lab SMA Terbangun 7 Ruang Jumlah RKB SMA Terbangun 12 Ruang Pagar Sekolah terbangun 1 Sek Ruang SMA yang Direhabilitasi 15 Paket Tersedianya Peralatan CBT SMA 10 Paket	7 Paket 12 Unit 7 Ruang 12 Ruang 1 Sek 15 Paket 10 Paket	11.000.000.000	12.000.000.000	
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Peserta Sosialisasi Parenting 100 orang Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA 70 Sekolah Terlaksananya Pendidikan Karakter	100 orang 70 Sekolah 2.192 Orang 12 Jenis 1 Kali 1 Paket	8.147.885.000	8.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Siswa SMA 2.192 Orang Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMA 12 Jenis Terselenggaranya raker dan pelatihan kesiswaan SMA 1 Kali Terlaksananya Student Innovation Program (NanoEdu) bagi Siswa SMA 1 Paket				
			Pengembangan Kurikulum SMA	Provinsi, SKPD			SMA melaksanakan pendidikan karakter 68 Sekolah SMA melaksanakan UNBK 68 Sekolah Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum 68 Sekolah	68 Sekolah 68 Sekolah 68 Sekolah	1.200.000.000	1.300.000.000	
			Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Provinsi, SKPD			Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa 2.534 Siswa	2.534 Siswa	2.511.760.000	3.100.800.000	
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Provinsi, SKPD			Terlaksananya rehabilitasi sekolah 20 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 40 Paket Jumlah RKB SMA Terbangun 40 Ruang Tersedianya Sarpras SMA 23 Sekolah Terbangunnya RPS 12 Ruang Tersedianya peralatan Praktik Siswa 25 Paket	20 Paket 40 Paket 40 Ruang 23 Sekolah 12 Ruang 25 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-		Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal; Persentase SMK Pertaniaan Terkareditasi A; Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK Kelautan dan perikanaan Terkareditasi I A; Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A; Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMK; Rata-rata nilai UN SMA; Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal;	100 Persen; 100 Persen; 50 %; 100 Persen; 100 Persen; 66,66 Persen; 100 Persen; 40,63 Persen; 6,7 Poin; 100 Persen; 100 Persen; 41,15 Persen; 40,09 Persen					DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkareditasi A; Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; APK SMK Laki-laki; APK SMK Perempuan						
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK	Provinsi, SKPD			Terlaksananya Rehabilitasi SMK 20 Paket Terlaksananya Gebyar SMK 1 Kali Sekolah yang siap di akreditasi 100 % Terbangunnya RKB SMK 20 Ruang Tersedianya Meubelair SMK 20 Set Terbangunnya RPS SMK 10 Ruang Tersedianya Peralatan Praktik Siswa 15 Paket Tersedianya Bengkel Produktif SMK 2 Unit Terlaksananya Revitasilitasi Prodi SMK 57 Sek	20 Paket 1 Kali 100 % 20 Ruang 20 Set 10 Ruang 15 Paket 2 Unit 57 Sek	22.717.500.000	21.000.000.000	
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah siswa mengikuti pembinaan karakter oleh Danrem 747 siswa Jumlah Peserta Sosialisasi Parenting 100 orang Terlaksananya Student Innovation Program	747 siswa 100 orang 1 Paket 5 Jenis 58 Sekolah 58 Sekolah	6.373.376.500	6.300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(NanoEdu) bagi Siswa SMK 1 Paket Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK 5 Jenis Sekolah melaksanakan pendidikan karakter 58 Sekolah Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK 58 Sekolah				
			Pengembangan Kurikulum SMK	Provinsi, SKPD			Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK 1 Dok Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK 1 Dok Tersedianya Assesor 50 Orang SMK memiliki TUK 40 Sekolah SMK melaksanakan UNBK 58 Sekolah Jumlah guru yang mengikuti diklat pengembangan kurikulum 120 orang Jumlah guru yang mengikuti pendidikan penyusunan dokumen mutu Pembentukan LSP P1 SMK 40 orang	1 Dok 1 Dok 50 Orang 40 Sekolah 58 Sekolah 120 orang 40 orang	2.000.000.000	2.100.000.000	
			Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Provinsi, SKPD			Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai 2.088 Siswa	2.088 Siswa	1.231.060.000	2.257.200.000	
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Provinsi, SKPD			Terbangunnya RKB SMK 30 Ruang Terbangunnya RPS 30 Unit Tersedianya rumah dinas /asrama 4 Unit	30 Ruang 30 Unit 4 Unit 20 Paket 30 Unit	1.500.000.000	1.500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Tersedianya peralatan Praktik Siswa 20 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 30 Unit				
			Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-		APK SLB; Persentase SLB terakreditasi A	29,47 Persen; 100 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Provinsi, SKPD			Jumlah Microbus Operasional SLB 3 Unit Jumlah Pagar Sekolah 2 Paket Jumlah Mushola SLBN 3 Unit Jumlah Ruang UKS SLBN 2 Unit Jumlah Gallery SLBN 1 Unit Jumlah Ruang Keterampilan SLBN 1 Ruang Jumlah Talud SLBN 2 Paket	3 Unit 2 Paket 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Ruang 2 Paket	5.750.000.000	6.000.000.000	
			Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Provinsi, SKPD			Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB 9 sekolah Terlaksananya lomba-lomba siswa SLB 3 jenis	9 sekolah 3 jenis	1.678.877.500	1.700.000.000	
			Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Provinsi, SKPD			Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 9 Sekolah Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga 9 Sekolah	9 Sekolah 9 Sekolah	1.382.150.000	1.400.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	SKPD			Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis 12 Bulan	12 Bulan	3.042.360.510	3.100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Provinsi, SKPD			Tersedianya RKB SLB 3 Unit Terlaksananya Rehabilitasi SLB 4 Paket Tersedianya peralatan Praktik Siswa 15 Paket	3 Unit 4 Paket 15 Paket	1.000.000.000	2.000.000.000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-		Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4, ; Persentase Guru Bersertifikat Pendidik; Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	100 Persen; 45 Persen; 95 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Mutu PTK SMA	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah guru SMA yang mengikuti seleksi dan pembekalan olimpiade guru 105 orang Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA mengikuti kursus Mahir Lanjutan 137 orang Jumlah guru SMA mengikuti master teacher guru mata pelajaran 228 orang Jumlah guru SMA mengikuti seleksi beasiswa S2 guru mapel dan pembinaan olimpiade guru nasional dan pengelolaan Taman Sains. 80 orang Jumlah guru SMA menerima beasiswa S2 40 orang JUmlah guru SMA mengikuti pendidikan profesi guru dalam	105 orang 137 orang 228 orang 80 orang 40 orang 17 orang	9.579.605.000	9.600.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jabatan 17 orang				
			Peningkatan Mutu PTK SMK	Provinsi			Jumlah guru SMK menerima beasiswa S2 40 orang Jumlah tenaga kependidikan terlatih 140 orang Jumlah guru SMK mengikuti PPG 30 orang Jumlah guru SMA/SMK/PK mengikuti lomba guru berprestasi 125 orang Jumlah kepala sekolah mengikuti pelatihan sertifikasi kepsek 30 orang Jumlah guru SMK terlatih 56 orang Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMK 1 Dok	40 orang 140 orang 30 orang 125 orang 30 orang 56 orang 1 Dok	5.815.995.000	5.900.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Mutu PTK SLB	Provinsi, SKPD			Jumlah guru tuna rungu mengikuti pelatihan bina wicara 27 orang Jumlah guru tuna grahita dan autis mengikuti pelatihan bina diri dan kemampuan sosial 35 orang Jumlah guru SMA/SMK/SLB mengikuti pelatihan penulisan/penyusunan karya ilmiah (best practise) 150 orang Jumlah guru mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan 10 orang Jumlah guru PLB menerima beasiswa S2 2 orang Jumlah dokumen analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SLB 1 dokumen	27 orang 35 orang 150 orang 10 orang 2 orang 1 dokumen	1.206.273.000	1.250.000.000	
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)		Persentase Sekolah penerima BOS	100 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Pengeloaan Dana BOS Afirmas	Provinsi			Sekolah penerima bantuan BOS 20 sekolah	20 sekolah	1.627.922.000	15.125.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS Kinerja	Provinsi			Sekolah penerima BOS Kinerja 40 sekolah	40 sekolah	1.000.000.000	8.731.810.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	33.600.000	300.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	1	92.800.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(DAK Non Fisik)				Bulan 100 %				
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	474.000.000	181.353.533	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.260.000.000	788.231.498	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	960.400.000	602.404.898	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.382.400.000	1.397.102.884	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	2.497.600.000	2.622.333.184	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.214.400.000	1.090.795.309	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	985.600.000	801.504.821	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	526.400.000	592.194.645	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	366.800.000	223.604.530	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	742.000.000	497.239.297	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	722.400.000	496.218.272	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	244.000.000	102.102.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	345.800.000	180.721.469	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	621.600.000	415.557.277	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.174.600.000	771.895.089	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	628.600.000	502.344.423	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	180.600.000	60.240.490	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	554.400.000	258.319.388	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.269.800.000	880.123.766	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	579.200.000	498.600.664	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	649.600.000	515.617.751	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	433.600.000	437.339.149	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	148.000.000	102.102.525	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.675.200.000	1.807.214.693	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.049.600.000	1.133.338.028	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	903.000.000	608.531.049	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	862.400.000	616.699.251	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	966.000.000	596.278.746	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	658.000.000	327.749.105	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	865.200.000	510.512.625	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	537.600.000	355.316.787	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	902.400.000	888.291.968	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.179.200.000	1.131.636.319	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	166.000.000	102.102.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.142.400.000	1.038.042.338	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	448.000.000	469.671.615	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	935.200.000	614.657.201	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	666.400.000	375.737.292	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	589.400.000	417.599.327	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	728.000.000	404.325.999	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	345.800.000	236.877.858	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	848.400.000	535.017.231	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	760.000.000	670.473.248	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.257.600.000	1.335.841.369	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	160.000.000	102.102.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.350.400.000	1.487.293.448	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.220.800.000	1.215.020.048	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	387.200.000	338.640.041	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	879.200.000	470.692.640	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	271.600.000	177.658.394	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	343.000.000	221.562.479	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	854.000.000	570.753.115	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	215.600.000	92.913.298	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	579.600.000	372.674.216	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.232.000.000	840.303.781	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	272.000.000	130.059.169	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	662.200.000	465.587.514	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	515.200.000	627.930.529	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	163.200.000	175.276.001	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	574.400.000	563.265.596	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	235.200.000	98.699.108	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.166.400.000	1.180.985.873	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	518.400.000	447.549.401	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	690.200.000	453.335.211	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	676.200.000	464.566.489	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.010.800.000	674.086.918	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.038.800.000	715.738.700	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	204.000.000	102.102.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	764.800.000	779.382.608	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	243.200.000	224.625.555	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.499.200.000	1.827.635.198	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.276.800.000	1.334.139.660	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	806.400.000	850.854.375	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	450.800.000	327.749.105	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	907.200.000	578.921.317	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	637.000.000	399.220.873	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	926.800.000	617.720.276	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.324.400.000	812.736.099	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	642.600.000	398.199.848	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	201.600.000	311.412.701	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	795.200.000	777.680.899	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.096.000.000	1.024.428.668	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	262.400.000	250.151.186	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	1	1.191.400.000	731.054.079	
			Kesehatan								
	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Meningkatnya kesehatan masyarakat	**Program Kesehatan Masyarakat**		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ; Angka kematian ibu per kelahiran hidup; Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun; Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat; Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	14,25 %; 21 per kelahiran hidup; 7,16 per seribu kelahiran hidup; 90 %; 84,46 %; 70 %					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Provinsi			Jumlah Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media KIE 4 paket media Jumlah pamong dan instruktur yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Saka Bakti Husada (laki-laki 17 orang, perempuan 17 orang) 34 orang Jumlah Kader yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan Posyandu	4 paket media 34 orang 64 orang	553.418.000	1.096.696.710	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(perempuan) 64 orang				
			Upaya Peningkatan kesehatan Keluarga	Provinsi					834.054.000	1.049.890.227	
			Penurunan Angka kematian Ibu	Provinsi					519.773.000	1.661.391.867	
			Penurunan angka kematian bayi	Provinsi					562.741.000	1.293.503.002	
			Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Provinsi			Jumlah peserta penguatan kapasitas kader UKBM di desa stunting 228 orang, 1 laporan kegiatan Jumlah desa yang dilakukan monev upaya penurunan stunting 7 desa, 1 laporan kegiatan Jumlah kader di desa stunting yang ditingkatkan kemampuannya dalam PMBA 228 orang, 1 laporan kegiatan Jumlah peserta Kelas ibu hamil dan ibu Balita di desa stunting 1.920 orang ibu hamil, 1440 ibu balita, 1 laporan kegiatan	228 orang, 1 laporan kegiatan 7 desa, 1 laporan kegiatan 228 orang, 1 laporan kegiatan 1.920 orang ibu hamil, 1440 ibu balita, 1 laporan kegiatan	4.434.714.000	2.198.608.400	
			Peningkatan Penyehatan lingkungan	Provinsi					301.011.000	1.492.268.144	
			peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Provinsi					168.520.500	377.890.046	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BOX PROVINSI (Dak Non Fisik)	SKPD					1.033.962.357	-	
			Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase kab/kota yang 20% Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Persentase anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus); Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%); Prevalensi HIV pada penduduk beresiko; Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria; Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon; persentase anggaran penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	90 %; 27,5 %; 87 %; 85,7 %; 10 %; 100 %; 90 %; 88 %					DINAS KESEHATAN
			pencegahan dan pengendalian penyakit	Provinsi					152.827.000	298.453.629	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			menular TB								
			Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Provinsi					469.183.000	746.432.525	
			Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Provinsi					31.373.000	298.453.629	
			Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	Provinsi					498.096.000	994.845.430	
			Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Provinsi					132.643.000	149.226.814	
			Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes militus)	Provinsi					221.696.000	298.453.629	
			Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Provinsi			Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan KIE Pencegahan dan Pengendalian Faktor Resiko Masalah Keswa dan Napza 80 orang, 1 dokumen laporan hasil Jumlah Siswa SMA yang dilakukan Screening Keswa dan Napza (Mobile Keswa) 700 siswa, 1 dokumen laporan kegiatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Program Keswa dan Napza 1 dokumen laporan hasil kegiatan	80 orang, 1 dokumen laporan hasil 700 siswa, 1 dokumen laporan kegiatan 1 dokumen laporan hasil kegiatan	472.865.000	895.360.886	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Provinsi			Jumlah dokumen pertemuan rencana kontijensi 1 dokumen Jumlah dokumen penanggulangan kejadian luar biasa dan krisis kesehatan 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1.008.312.000	1.492.268.144	
			Program Pelayanan Kesehatan		Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi; Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional; Persentase kepesertaaan JKN; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	47 kecamatan; 10 RSUD; 67 %; 85 %					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Provinsi			Jumlah alat-alat kesehatan yang terpelihara 1 tahun Jumlah belanja habis pakai kedokteran 1 tahun Jumlah Pelayanan P3K ke Ke Kab/Kota 1 laporan Jumlah Pembinaan penilaian akreditasi FKTP 14 laporan	1 tahun 1 tahun 1 laporan 14 laporan	1.570.440.000	1.989.690.858	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Provinsi			Jumlah rekomendasi kesepakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RS oleh BPRS 4 rekomendasi kesepakatan Jumlah RS Provinsi/Kab/Kota yang tersertifikasi akreditasi Nasional 20 RS Jumlah Nakes di Provinsi dan Kab/Kota yang ditingkatkan dalam pelaksanaan PPI Dasar 108 nakes Jumlah RMC di Kab/Kota yang terbentuk 7 kab/kota Jumlah Nakes di Provinsi dan Kab/Kota yang ditingkatkan dalam pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit 108 nakes Jumlah laporan rapat Koordinasi pelayanan kesehatan, Monev Program SISRUTE, Monev BPRS, Monev Program Pelayanan kesehatan Rujukan, Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Yankes (4 laporan) 8 laporan	4 rekomendasi kesepakatan 20 RS 108 nakes 7 kab/kota 108 nakes 8 laporan	795.665.000	1.989.690.858	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Provinsi			Jumlah klaim jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan/atau tidak mampu 65.925 jiwa, 1 dokumen laporan Jumlah klaim masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak mempunyai kartu JKN/KIS 25 klaim Jumlah kesepakatan pertemuan monitoring dan evaluasi pengelola program JKN 1 dokumen kesepakatan Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan JKN 2 laporan jumlah pasien rujukan, pemulasaran jenazah masyarakat, tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan, keluarga pendamping pasien rujukan 20 pasien & pendamping pasien rujukan, 5 jenazah, 15 tenaga kesehatan	65.925 jiwa, 1 dokumen laporan 25 klaim 1 dokumen kesepakatan 2 laporan 20 pasien & pendamping pasien rujukan, 5 jenazah, 15 tenaga kesehatan	43.379.083.543	18.203.824.926	
			Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Provinsi					124.172.000	596.907.258	
			Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif); Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial;	4.746 orang; 96 %; 92 %					DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat						
			Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan / SDMK	Provinsi			Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pendidikan 7 orang Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih (dokter, drg, bidan, perawat, kefarmasiaan,gizi,kesmas,kesling, dan labkes) 3 nakes teladan Jlh tenaga kesehatan khusus di klinik provinsi dan bidan PTT (dr. Umum 2 org, bidan 7 org, perawat 3 org, apoteker 2 org, perawat mahir 3 org) 17 nakes PTT Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Ujian Kompetensi 250 orang	7 orang 3 nakes teladan 17 nakes PTT 250 orang	2.547.540.000	2.065.708.987	
			Peningkatan pelayanan kefarmasian	Provinsi			Jumlah obat buffer dan Perbekalan Kesehatan stok prov 2 paket Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kefarmasian (Obat) dan IRTPangan 200 sarana Jumlah Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 300 peserta	2 paket 200 sarana 300 peserta	1.064.323.757	1.483.528.427	
			Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	Provinsi					34.928.000	330.846.791	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan		Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	2.600 sampel					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	Provinsi			Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar 2.100 sampel	2.100 sampel	1.424.206.200	4.023.159.348	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP		Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat ; persentase ketersediaan pelayanan di RS dari dana BLUD	25 Persen; 90 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pelayanan dan Pendukung pelayanan	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah sarana dan prasarana dari dana BLUD 2 paket Jumlah obat, perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dari dana BLUD 2 paket	2 paket 2 paket	22.500.000.000	25.000.000.000	
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan		indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan di RSUP; Lama hari rawat (Length of Stay)	100 nilai; 0					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Penyusunan Standar Sarana dan Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					11.450.000	12.595.000	
			Penyusunan SOP Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang			Tersedia Dokumen SOP Keperawatan 125 dokumen	125 dokumen	17.000.000	18.700.000	
			Audit Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					10.000.000	11.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana (Logistik) Keperawatan	Luar Daerah, Bangka, Merawang					250.000.000	275.000.000	
			Pelayanan Keperawatan Berbasis IT	Provinsi, Bangka, Merawang					100.000.000	110.000.000	
			Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					17.000.000	18.700.000	
			Peningkatan etika keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang			bertambahnya tenaga keperawatan yang berkompeten 90 orang	90 orang	42.803.000	150.000.000	
			Penyusunan Uraian Tugas Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					8.000.000	8.800.000	
			Penyusunan Pedoman Pelayanan Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					8.700.000	9.570.000	
			Penyusunan Program Kerja Pelayanan Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					8.800.000	9.680.000	
			Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang			Tersedia Dokumen Hasil Evaluasi Teknis Keperawatan 2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000	7.150.000	
			Penyusunan Program Pengembangan SumerDaya Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					8.000.000	8.800.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					229.700.000	252.670.000	
			In House Training(IHT) Keperawatan	Provinsi, Bangka, Merawang					330.034.000	363.037.400	
			Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis		indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis medis dan penunjang medis; Persentase ketersediaan pelayanan di rumah sakit; Persentase kesiapan sumber daya RS dalam	100 persen; 75 persen; 75 persen; 0 ; 0 ; 0					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					penanggulangan bencana; Persentase SDM yang sesuai standar rumah sakit kelas B; Nilai tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS); Jumlah pegawai yang sudah mendapat latihan siaga bencana						
			Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Provinsi, Bangka, Merawang			0	0	1.228.200.000	3.550.000.000	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 3 paket	3 paket	9.547.875.000	8.000.000.000	
			kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Provinsi, Bangka, Merawang			meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan 2 Kemitraan	2 Kemitraan	3.386.500.000	1.800.000.000	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum		1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit; Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit; Persentase sarana prasarana yang tersedia sesuai standar kelas B; Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana rumah sakit	85 persen; 85 persen; 0 ; 0					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Gedung Jenazah Rumah Sakit 0 gedung	0 gedung	2.437.540.000	-	
			Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 0 persen	0 persen	250.000.000	7.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Gedung C	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah gedung yang terbangun 1 gedung	1 gedung	18.145.799.948	-	
			Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di RS 10 paket	10 paket	2.243.770.900	2.730.810.000	
			Penyusunan DED Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			DED Pembangunan Gedung Rumah Sakit 6 dokumen	6 dokumen	1.926.880.000	2.500.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			persentase sarana dan prasarana RS yang dipelihara 85	85	9.906.210.000	9.210.000.000	
			Pembangunan Gedung B	Provinsi, Bangka, Merawang			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 0 gedung	0 gedung	9.637.220.000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ		Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar; Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ	85 persen; 85 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diberikan 1 Tahun	1 Tahun	10.000.000.000	10.000.000.000	
			Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza		Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA	95 Persen; 42 Hari					RUMAH SAKIT JIWA
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah tenaga kesehatan non PNS 133 0rang	133 0rang	7.875.600.000	5.850.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penilaian Akreditasi				Sertifikat dari KARS 1 sertifikat	1 sertifikat	536.000.000	536.000.000	
			Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Petugas Puskesmas dan Maasyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	-	748.000.000	
			Survey Kepuasan Masyarakat	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota 100 Persen	100 Persen	21.950.000	67.000.000	
			Penyusunan Clinical Pathway	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Clincal Pathway 1 Dokumen	1 Dokumen	33.700.000	55.500.000	
			Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah kunjungan pasien ke rehabilitasi Psikososial 5.500 kunjungan	5.500 kunjungan	385.950.000	540.000.000	
			Promosi Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Promosi yang dilaksanankan 4 Kegaiatan promosi	4 Kegaiatan promosi	-	375.000.000	
			Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 10 Dokumen	10 Dokumen	52.500.000	-	
			Penyusunan Panduan Praktik Klinis	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis 5 dokumen	5 dokumen	29.050.000	-	
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza		Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis	65 persen; 100 Persen					RUMAH SAKIT JIWA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					keperawatan jiwa dan NAPZA						
			Penjangkauan Bebas Pasung	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah ODGJ yang bebas pasung 60 persen	60 persen	296.370.000	440.000.000	
			Discharge Planning	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Kunjungan keluarga pasien 360 orang	360 orang	477.049.000	700.000.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	100 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Provinsi, SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Alat Kesehatan yang dibutuhkan 10 unit	10 unit	3.118.017.000	4.000.000.000	
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli 1 paket	1 paket	900.000.000	1.000.000.000	
			Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli 1 tahun	1 tahun	85.925.000	500.000.000	
			Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan 100 Persen	100 Persen	9.400.000	20.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli 1 unit	1 unit	-	-	
			Pengembangan SIMRS	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah SIM RS yang dikembangkan 1 paket	1 paket	200.000.000	200.000.000	
			Pembangunan Rumah Dinas	Provinsi, Bangka, Sungai Liat			jumlah rumah dinas yang dibangun 1 paket	1 paket	-	500.000.000	
			Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah jalan dilingkungan komplek dan halaman RSJD	1 paket	500.000.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							yang terpelihara 1 paket				
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung rumah sakit yang terawat 1 tahun	1 tahun	1.100.000.000	966.884.375	
			Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)	SKPD, Bangka, Sungai Liat					-	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah alat kesehatan yang terpelihara 1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	110.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli 1 paket	1 paket	200.000.000	250.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah ruang rawat inap yang terawat 1 tahun	1 tahun	200.000.000	432.000.000	
			Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	
			Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 tahun	1 tahun	150.000.000	100.000.000	
			Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Tersedianya Dokumen Master Plan 1 dokumen	1 dokumen	1.000.000.000	-	
			Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa 4 promosi	4 promosi	85.000.000	172.000.000	
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor	**Program Kebinamargaan**		Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi	92,8 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pertanian, peternakan, dan pekerbunaan			mantap						PENATAAN RUANG
			Pendamping DAK						500.000.000	-	
			Pembangunan Jalan PHNJD	Provinsi					103.000.000.000	104.000.000.000	
			Inspeksi Kondisi Jembatan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah jembatan yang dilakukan inspeksi 214 unit	214 unit	219.220.000	323.974.613	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Selatan			Panjang jalan yang terpelihara 812,89 Km	812,89 Km	26.022.421.397	73.456.710.000	
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pangkal Pinang			terpeliharanya jembatan 1 unit	1 unit	-	7.766.651.131	
			Operasional Jembatan Baturusa II	Pangkal Pinang			Terpeliharanya jembatan Baturusa II 1 Unit	1 Unit	1.788.810.000	3.161.594.950	
			Inspeksi Kondisi Jalan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Panjang Jalan yang terinspeksi 850,99 km	850,99 km	294.220.000	323.973.751	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi Baik 5,2 km	5,2 km	26.775.300.000	15.281.125.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	SKPD			Jumlah alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan yang terpelihara 10 unit	10 unit	161.121.375	152.998.450	
			Leger Jalan	Bangka			Tersedianya Dokumen Leger Jalan 2 Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	-	660.000.000	
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jembatan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Panjang jembatan dalam kondisi baik 3.037,61 meter	3.037,61 meter	1.600.755.000	1.700.755.000	
			Perencanaan Pembangunan Jalan	Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			tersedianya dokumen perencanaan jalan 2 Dokumen	2 Dokumen	1.568.750.000	4.060.000.000	
			Pembangunan Jalan	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Panjang Jalan yang terbangun 13,1 km	13,1 km	57.953.525.000	53.675.383.878	
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	Luar Daerah, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen perencanaan jembatan 2 Dokumen	2 Dokumen	2.908.210.000	3.440.695.000	
			Pembangunan Jembatan	Belitung, Belitung Timur			Jumlah jembatan yang ditingkatkan / dibangun dalam kondisi baik 2 unit	2 unit	5.620.725.000	11.444.725.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Air		Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku dan Panjang Talud Sumber Air Baku ; Panjang Penahan Abrasi pantai ; Panjang Pengerukan dan Pengendalian ;	3 hektar; 250 meter; 3.000 meter; 60 hektar					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi						
			Pembangunan turap / talud / bronjong	Bangka Barat, Bangka Selatan			Panjang talud yang terbangun 210 Meter 0	210 Meter 0	2.077.825.000	3.280.300.000	
			Pembangunan Peningkatan Drainase	Belitung Timur, Bangka			Panjang Drainase yang terbangun 550 meter	550 meter	1.506.800.000	2.805.085.500	
			Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat			saluran pembuangan yang terpelihara 4.000 meter panjang jalan inspeksi yang terpelihara 1.000 meter	4.000 meter 1.000 meter	6.424.400.000	1.657.210.535	
			Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang			Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi 22.000 meter	22.000 meter	5.293.300.000	18.912.931.927	
			Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	Bangka Barat			Jumlah kapasitas tampungan air baku 10.000 M3	10.000 M3	15.052.775.000	4.477.000.000	
			Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang			Panjang sungai yang terpelihara 3.000 meter Panjang Saluran Primer yang terpelihara 10.000 meter	3.000 meter 10.000 meter	4.624.100.000	12.012.525.000	
			Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang terberdayakan 4 Kelompok	4 Kelompok	1.154.950.000	644.750.611	
			Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Luar Daerah, Bangka Selatan, Bangka, Bangka			Jumlah kegiatan melalui dana DAK yang diusulkan 4 kegiatan	4 kegiatan	3.868.494.000	1.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat							
			Program Penataan Ruang dan Pertanahan		Persentase Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif; Persentase Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum ; Persentase Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel; Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog	55 persen; 67 persen; 85 persen; 100 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Regulasi RRTR KSP 2 Regulasi	2 Regulasi	930.190.000	976.190.000	
			Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Provinsi			jumlah pembinaan dan pelatihan Bidang Penataan dan pertanahan 2 kali	2 kali	100.000.000	120.000.000	
			Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Provinsi			Jumlah peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan 50 peserta	50 peserta	50.000.000	60.000.000	
			Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi			luas lahan yang dibebaskan 3 hektar	3 hektar	42.500.000.000	800.000.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Provinsi			Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang 10 rekomendasi	10 rekomendasi	239.555.800	240.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan 1 dokumen	1 dokumen	593.070.000	686.070.000	
			Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan Negara	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah			Panjang jalan yang terinventarisasi 34 km	34 km	94.945.000	100.945.000	
			Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 10 pelanggaran	10 pelanggaran	120.000.000	130.000.000	
			Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Luas sempadan pantai 4.000 Hektar	4.000 Hektar	847.740.000	857.740.000	
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi		Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	20 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat			Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi 3 kali Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan kriteria 4 Dokumen Jumlah tenaga kerja konstruksi ahli yang bersertifikasi 150 Orang	3 kali 4 Dokumen 150 Orang	356.855.000	400.000.000	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung,			Jumlah Administrator SIPJAKI yang terlatih 30 orang	30 orang	639.081.150	616.481.897	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat							
			Program Pengawasan dan Peralatan PUPR		Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah	80 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Belitung			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 30 Orang	30 Orang	1.112.112.334	103.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Provinsi			Alat berat yang dipelihara 1 Paket	1 Paket	425.907.000	410.000.000	
			Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Provinsi			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan Workshopas PUPR 1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	72.000.000	
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
			Program Keciptakaryaan dan Permukiman		Persentase bangunan yang tertata; Persentase lingkungan yang tertata; Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh; Persentase rumah tangga berakses air minum layak ; Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak; Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan kawasan TPA Regional; Persentase drainase dalam kondisi	30 persen; 10 persen; 0 Persen; 69,21 Persen; 83,68 Persen; 13 Persen; 13 Persen					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					baik/aliran air tidak tersumbat di Pengembangan kawasan TPA Regional						
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	Provinsi			terselenggaranya bangunan gedung 6 unit	6 unit	32.432.200.000	25.000.000.000	
			Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Bangka Barat, Muntok			Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun 250 Meter	250 Meter	295.350.000	10.250.000.000	
			Peningkatan / Penyediaan Sarana Air Limbah di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Sungai Selan			Jumlah sarana air limbah yang terbangun di Kawasan Kumuh 1 Unit	1 Unit	533.370.000	900.000.000	
			Pembangunan / Peningkatan Drainase/gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Belitung, Sungai Selan, Tanjung Pandan			Panjang drainase yang terbangun di Kawasan Kumuh 1.800 Meter	1.800 Meter	990.660.000	2.975.700.000	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bangka Barat, Muntok			Jumlah bangunan ikonik yang direvitalisasi 1 Unit	1 Unit	1.050.350.000	2.000.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Gantung, Koba, Tempilang, Muntok, Sungai Selan, Tanjung Pandan			Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun 8 Dokumen	8 Dokumen	1.257.803.750	-	
			Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Sungai Selan			Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun dikawasan kumuh 900 Meter	900 Meter	934.550.000	1.704.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Barat, Belitung Timur, Gantung, Muntok			Jaringan distribusi air minum yang terpasang 5.000 Meter	5.000 Meter	2.740.700.000	800.000.000	
			Program Pembangunan Perumahan Rakyat		Persentase Rumah Layak Huni; Persentase Rumah akibat bencana; Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	22,54 persen; 0 Pesen; 0,27 Persen					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direnovasi 161 Unit	161 Unit	12.931.000.000	27.403.700.000	
			Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	Provinsi			Jumlah rapat yang dilaksanakan 2 Kali	2 Kali	78.681.000	228.131.250	
			Survey dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Rumah tidak layak huni yang terdata dan terverifikasi 150 unit	150 unit	178.750.000	150.000.000	
			Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah rumah yang menggunakan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdata dan terverifikasi 120 Unit	120 Unit	70.000.000	176.535.566	
			Perencanaan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Birokrasi yang efektif dan efisien	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**		Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD); Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG; Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	90 Persen; 90 Persen; 75 Persen					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun 2 dokumen	2 dokumen	1.151.648.000	1.300.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola 2 Aplikasi	2 Aplikasi	234.250.000	250.000.000	
			Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi			Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah 2 laporan/rekomendasi	2 laporan/rekomendasi	881.275.000	1.577.900.500	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun 16 Laporan	16 Laporan	315.800.000	1.400.000.000	
			Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan	500 Elemen Data	233.500.000	560.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							500 Elemen Data				
			Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem 2 instrumen	2 instrumen	187.500.000	175.000.000	
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi 2 Laporan	2 Laporan	349.000.000	475.000.000	
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti ; Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	90 Persentase; 90 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	214.925.000	476.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	254.625.000	578.812.500	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			umlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I yang dihasilkan 1 rekomendasi/laporan	1 rekomendasi/laporan	149.125.000	350.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan 1 Rekomendasi/Laporan	1 Rekomendasi/Laporan	159.125.000	400.000.000	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Dokumen	1 Dokumen	-	325.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ; Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	90 Persentase; 90 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencannaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	199.500.000	347.287.500	
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perecanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian,	4 Rekomendasi/Laporan	206.425.000	447.287.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan				
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Provinsi, SKPD			"Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 dokumen	1 dokumen	-	375.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I yang dihasilkan 1 Rekomendasi/Laporan	1 Rekomendasi/Laporan	189.125.000	430.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II yang dihasilkan 1 Rekomendasi/Laporan	1 Rekomendasi/Laporan	159.125.000	400.000.000	
			Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan		Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang sosial budaya dan pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ; Persentase rumusan hasil pengendalian dan	90 Persentase; 80 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti						
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti. 4 rekomendasi/laporan	4 rekomendasi/laporan	235.375.000	600.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	184.125.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan 1 Rekomendasi/Laporan	1 Rekomendasi/Laporan	154.125.000	350.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan 1 Rekomendasi/Laporan	1 Rekomendasi/Laporan	194.125.000	450.000.000	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000	345.000.000	
			Perhubungan								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	**Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat**		Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan	0 %; 50 %; 30 %; 15 %; 16 %; 10 %; 5 %; 10 %; 20 %; 20 %; 10 %; 20 %; 7 %; 3,72 %; 9 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					lintas timur Pulau Bangka; Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung; Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang						

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba; Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi; Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid; Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas; Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi						
			Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha 5 Kabupaten Kota	5 Kabupaten Kota	120.000.000	279.450.000	
			Pengoperasian Bus Sekolah	Provinsi			Pelaksanaan kegiatan pengoperasian Bus Sekolah 1 paket	1 paket	274.470.000	1.597.172.000	
			Pengadaan Bus Sekolah	Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah Pengadaan Bus Sekolah 3 unit	3 unit	2.175.000.000	16.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Peralatan Area Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah ATCS yang peralatannya ditingkatkan 3 unit	3 unit	1.200.000.000	-	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah Unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 100 unit	100 unit	4.000.000.000	12.117.550.917	
			Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 Paket	1 Paket	1.489.000.000	1.712.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap kondisi Optimal pada ruas jalan Provinsi di Pulau Bangka 20 %	0,2	2.000.000.000	4.765.600.000	
			Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan					1.800.000.000	-	
			Penyusunan RIP ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan					950.000.000	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe-B	Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna Terminal Type-B 1 Dokumen	1 Dokumen	530.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Provinsi			Jumlah Rekomendasi hasil Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	521.800.000	174.570.000	
			Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas 4 Dokumen	4 Dokumen	112.090.000	152.087.500	
			Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan 14 orang	14 orang	90.000.000	125.000.000	
			Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepuluauan Bangka Belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	67.590.000	122.065.428	
			Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 30 orang	30 orang	420.000.000	244.662.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut		Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin; Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian; Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang; Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera; Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil; Jumlah armada pengangkutan; Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri	25 %; 30 %; 30 %; 50 %; 20 %; 4 %; 25 %; 0 unit; 7 %; 0 %; 10 %; 7 %; 30 %; 40 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat; Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu; Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal						
			Rehabilitas Pelabuhan/ Dermaga	Provinsi, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah unit pelabuhan/ dermaga yang direhab 1 unit	1 unit	2.600.000.052	-	
			Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran	Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah Pengguna Jasa Pelayaran yang mendapatkan Sosialisasi Keselamatan	100 orang	120.000.000	205.375.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pelayaran 100 orang				
			Survey dan Inventarisas kebutuhan sektor perhubungan laut	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen Survey dan Inventarisas kebutuhan sektor perhubungan laut 1 Dokumen	1 Dokumen	135.556.000	-	
			Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Bangka Selatan			Jumlah unit Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 3 unit	3 unit	2.800.000.000	-	
			Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara 10 unit	10 unit	489.800.000	390.000.000	
			Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	Belitung, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Pulau Mendanau, Pulau Seliu dan Pulau Pongok 3 Dokumen	3 Dokumen	1.080.000.000	-	
			SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Provinsi, Bangka Tengah, Lepar Pongok			Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok 2 Dokumen	2 Dokumen	462.500.000	-	
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan		Prosentase Angkutan Umum yang laik jalan; Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolahan perhubungan udara; Persentase sarana dan prasarana fasilitas	15 %; 10 %; 30 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi.						
			Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Prosentase Penurunan angka pelanggaran perizinan angkutan umum dan barang 15 %	0,15	312.990.000	350.000.000	
			Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional 15 kali	15 kali	2.395.470.000	150.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 Paket	1 Paket	1.486.790.000	-	
			Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Posko Pemantauan Lalu Lintas dan penumpang Pada hari-hari besar keagamaan 9 Lokasi	9 Lokasi	300.000.000	90.000.000	
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Pangkal Pinang			Terselenggaranya Pembangunan Fasilitas Zona Aman Selamat Sekolah (Z0SS) 1 unit	1 unit	400.000.000	870.000.000	
			Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 Tahun	1 Tahun	1.336.000.000	1.350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pagar Panel Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Pemasangan Pagar Panel di Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir 1.500 meter	1.500 meter	1.100.000.000	-	
			Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan jalan	Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan 320 Siswa/i Jumlah SLTA/sedrajat yang mendapatkan penyuluhan 3 Lokasi	320 Siswa/i 3 Lokasi	85.000.000	185.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Bilboard Keselamatan Lalu Lintas	Belitung, Bangka Barat			Tersedianya Billboard Keselamatan Lalu Lintas 10 unit	10 unit	300.000.000	560.000.000	
			Lingkungan Hidup								
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup		Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Laboratorium Lingkungan; Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang terakreditasi	1,5 %; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun 1.350 Sampel Jumlah Laporan Kepuasan Pelanggan yang Tersusun 1 Laporan Jumlah Laboran yang terlayani dan responsive gender 27 Orang	1.350 Sampel 1 Laporan 27 Orang	1.490.419.000	1.310.000.000	
			Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk Akreditasi 34 Parameter	34 Parameter	265.877.000	270.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Paket Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium 2 Paket	2 Paket	791.000.000	1.100.000.000	
			Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang Terlayani 40 Titik Sampling	40 Titik Sampling	148.632.000	175.000.000	
			Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM UPT Laboratorium Lingkungan yang terlatih 40 Orang	40 Orang	93.190.000	110.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup		Persentase Pertumbuhan Perusahaan yang memiliki kajian lingkungan; Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	25 %; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	845.023.000	1.000.000.000	
			Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tersusun 1 Dokumen Rekomendasi Hasil Kajian yang Diterbitkan	1 Dokumen 1 Rekomendasi	297.115.000	325.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 Rekomendasi				
			Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota 7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	120.340.000	154.374.000	
			Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	258.500.000	
			Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani 12 Usaha/Kegiatan	12 Usaha/Kegiatan	116.725.000	139.397.500	
			Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Komisi Penilai AMDAL 7 Komisi Penilai Amdal Jumlah peserta bimbingan teknis Komisi Penilai Amdal yang terlatih dan responsive gender 25 Orang	7 Komisi Penilai Amdal 25 Orang	134.325.000	115.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi; Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas; Persentase penurunan Konsentrasi BOD ; Persentase penurunan Konsentrasi COD ; Persentase penurunan Konsentrasi TSS ; Persentase Penurunan Konsentrasi SO2; Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi	65 %; 2 %; 2 %; 2 %; 2 %; 2 %; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah titik pantau Kualitas Air Sungai yang teridentifikasi 108 Titik Pantau	108 Titik Pantau	352.880.000	400.000.000	
			Pengendalian Beban Pencemaran Air	Luar Daerah, Provinsi, Bangka			Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Pengendalian Beban Pencemaran Air 1 Rekomendasi Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung 1 Dokumen	1 Rekomendasi 1 Dokumen	238.260.000	270.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	Provinsi, SKPD			Dokumen Rencana Aksi Daerah yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000	185.000.000	
			Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi 100 Usaha/Kegiatan	100 Usaha/Kegiatan	412.674.830	313.500.000	
			Identifikasi Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang teridentifikasi 21 Titik Pantau	21 Titik Pantau	161.600.000	185.735.000	
			Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi 14 Kasus	14 Kasus	103.946.000	131.000.000	
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas		Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan; Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah terhadap baseline BAU; Persentase Volume Sampah yang terolah berbasis peran serta masyarakat ;	5 %; 7,84 %; 3 %; 1 Dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pertumbuhan kebijakaan Taman Kehati						
			Peningkatan Aksi Peduli Lingkungan	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Aksi Peduli lingkungan yang dilaksanakan 5 Aksi Volume sampah yang terinventarisasi 1 Ton	5 Aksi 1 Ton	574.150.000	625.000.000	
			Pengelolaan Sampah Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah laut 1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	325.000.000	
			Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional 1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	-	
			Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Dokumen Inventarisasi emisi gas rumah kaca 1 Dokumen	1 Dokumen	90.980.000	104.918.000	
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih 45 Kader/Kelompok	45 Kader/Kelompok	971.800.000	473.495.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi 14 Jenis Penghargaan Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan Adipura Tingkat Nasional 4 Kabupaten/Kota Jumlah nominasi penerima kalpataru yang terverifikasi 3 Penghargaan Jumlah Nominasi Kampung Iklim Tingkat Kabupaten/Kota yang terverifikasi 3 Kampung Iklim	14 Jenis Penghargaan 4 Kabupaten/Kota 3 Penghargaan 3 Kampung Iklim	465.750.000	521.840.000	
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Meningkatnya kesehatan masyarakat	**Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil**		Persentase Penyediaan database kependudukan tk. Provinsi yang akurat; Persentase pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran; Persentase masyarakat yang mempunyai KTP; Persentase Masyarakat yang memiliki Akte Kematian	100 %; 21,87 %; 89 &; 93 %; 70 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Rakor Teknis Pemanfaatan data base	Provinsi					-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kependudukan kab/Kota								
			Pengembangan bank data kependudukan	SKPD			Tersedianya data base kependudukan tingkat provinsi 100 %	1	35.872.500	40.000.000	
			Peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	SKPD			Jumlah peserta rapat pemanfaatan database kependudukan 80 Orang	80 Orang	128.220.000	130.000.000	
			Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi	SKPD					46.177.000	50.000.000	
			Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se-provinsi kepulauan bangka belitung	SKPD			Jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	262.937.500	275.000.000	
			Peningkatan kapasitas Apartur pengelola SIAK	SKPD			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis 2 kali	2 kali	-	-	
			Sosialisasi pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	SKPD			Jumlah pelaksanaan sosialisasi 2 kali	2 kali	-	-	
			Sosialisasi tertib administrasi kependudukan melalui media	SKPD			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	-	-	
			Pengelolaaan pemanfataan data kependudukan	SKPD			Jumlah peserta rapat pemenfaatan database kependudukan 80 Orang	80 Orang	38.870.000	40.000.000	
			Penyusunan buku profil perkembangan kependudukan	SKPD					-	-	
			Konsolidasi data base	SKPD			Jumlah Aplikasi 1	1 Aplikasi	45.076.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kependudukan tingkat provinsi				Aplikasi			50.000.000	
			Sosialisasi kebijakan pencatatan sipil	SKPD			Jumlah pelaksanaan sosialisasi 2 kali	2 kali	-	-	
			Peningkatan kapasitas aparatur bidang pencatatan sipil	SKPD					-	-	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**		Persentase perempuan yang tidak bekerja; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender; Persentase kepala keluarga miskin yang diberdayakan; Persentase anggaran resfonsif Gender (ARG) dalam APBD	7,52 %; 10,2 %; 15,3 %; 8,86 %; 3,58 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	SKPD					194.209.000	200.000.000	
			Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota	SKPD					229.420.000	230.000.000	
			Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan	SKPD					183.240.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kualitas Hidup Perempuan								
			Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka					159.831.000	175.000.000	
			Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	Provinsi					181.919.000	150.000.000	
			Pelatihan dan Pembentukan Fasilitator Pendidikan Politik Untuk Perempuan	Provinsi					121.089.000	110.000.000	
			Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Provinsi					-	-	
			Pameran hasi karya perempuan	Luar Daerah					280.688.000	300.000.000	
			Pembinaan Organisasi Perempuan	SKPD			Jumlah organisasi perempuan yang dibina 300 Orang	300 Orang	258.794.000	275.000.000	
			Peningkatan nilai nilai kejuangan perempuan indonesia	SKPD			Jumlah Peserta Peringatan Hari Ibu 800 Orang	800 Orang	412.769.000	400.000.000	
			Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase	16,83 Persen; 2,3 Persen; 85,71 Persen					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kab/Kota Layak Anak						PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi					270.000.000	270.000.000	
			Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	SKPD			Jumlah peserta workshop 700 Orang	700 Orang	272.350.000	-	
			Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	Provinsi, SKPD			Jumlah peserta rapat advokasi dan KIE PROVILA 100 Orang	100 Orang	212.798.000	-	
			Advokasi dan pembinaan KIE kebijakan Forum Anak kab/Kota	Provinsi, SKPD			0 0 Jumlah Advokasi dan KIE 7 Kab/Kota	0 0 7 Kab/Kota	130.175.000	-	
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Perserta Peringatan Anak Tk. Provinsi 900 Orang	900 Orang	380.035.000	450.000.000	
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	Provinsi, SKPD			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 0	0	105.620.000	120.000.000	
			Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	SKPD					258.975.000	300.000.000	
			Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	Provinsi					184.710.000	160.000.000	
			Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Provinsi					159.021.000	100.000.000	
			Sosialisasi Mengenai Perlindungan Hak Anak	Provinsi					167.400.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Partisipasi Anak dalam pembangunan (Forum Anak)	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur					424.395.000	375.000.000	
			TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Provinsi			Jumlah aktivis yang mengikuti TOT PATBM 70 Orang	70 Orang	190.508.000	200.000.000	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
			Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase Gran disign kependudukan; Prevalensi keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I; Unmeet Need; Persentase Desa/Kampung yang menjadi kampung KB	50 %; 9,47 %; 7,39 %; 59,9 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Kampung KB yang terbentuk 7 Kampung KB	7 Kampung KB	240.995.000	230.000.000	
			Pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Provinsi			Jumlah peserta pendidik dan konselor sebaya 70	70 Orang	162.190.000	180.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Orang				
			Monitoring dan Evaluasi implementasi Grand Design Kependudukan	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang					23.940.000	50.000.000	
			Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan kepada pelajar	Provinsi					62.040.000	50.000.000	
			Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga	Provinsi			Jumlah pemenang lomba hari keluarga 8 Kategori	8 Kategori	215.850.000	250.000.000	
			Advokasi dan KIE program KKBPK	Provinsi, SKPD					49.800.000	50.000.000	
			Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Provinsi, SKPD			Jumlah Peserta 70 Orang	70 Orang	188.690.000	175.000.000	
			Sosial								
			Program Rehabilitasi Sosial		Persentase korban napza; Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Opitimalisasi Kinerja Komda Lanjut Usia	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah lanjut usia yang Mendapatkan pelayanan dari KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota 8 Komda LU	8 Komda LU	80.000.000	100.000.000	
			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatn ya Peranan Panti/Yayasan/ Organisasi Sosial dan kader masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia 300 orang	300 orang	309.100.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas 100 orang	100 orang	350.000.000	350.000.000	
			Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah anak yang direhabilitasi dan memperoleh perlindungan sosial 250 orang	250 orang	300.000.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah masyarakat dan korban napza yang mendapatkan pembinaan penyalahgunaan napza 100 orang	100 orang	75.000.000	75.000.000	
			Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial 100 orang	100 orang	200.000.000	200.000.000	
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah korban tindak kekerasan bermasalah sosial yang mendapat perlindungan dan bantuan usaha 10 orang	10 orang	25.000.000	50.000.000	
			Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	Provinsi, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur			Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi 6 orang	6 orang	100.000.000	108.600.000	
			Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum 10 orang	10 orang	75.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	Provinsi, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan Bencana Alam 56 orang Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Alam yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Desa/Kel Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial 25 KK	56 orang 1 Desa/Kel 25 KK	795.600.000	650.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial 70 orang Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 1 Desa/Kel Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 50 KK	70 orang 1 Desa/Kel 50 KK	350.000.000	350.000.000	
			Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial 1.445 orang Jumlah keluarga miskin penerima santunan kematian 55 orang	1.445 orang 55 orang	400.000.000	500.000.000	
			Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH 42.942 orang	42.942 orang	134.000.000	125.000.000	
			Program Penanganan Farkir Miskin		Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera; Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Usaha; Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha	100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM)						
			Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Provinsi, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah warga miskin pedesaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha 50 KK	50 KK	200.000.000	-	
			Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Pusat 14 Kube	14 Kube	95.200.000	102.000.000	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra dan BPNT	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Rastra dan BPNT yang tersalur kepada Keluarga Miskin 43.019 KK	43.019 KK	40.000.000	750.000.000	
			Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Wilayah Perdesaan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Keluarga Miskin dan rentan di pedesaan yang mendapat pendampingan UEP KUBE 50 KK	50 KK	150.000.000	200.000.000	
			Penguatan dan Peningkatan KUalitas Sosial Ekonomi Pra Sejantera	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah warga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha 50 KK	50 KK	130.000.000	-	
			Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung,			Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan	50 KK	236.995.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			bimbingan teknis berusaha 50 KK				
			Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang mendapat pendampingan UEP KUBE 10 KK	10 KK	70.000.000	200.000.000	
			Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapat pendampingan UEP KUBE 50 KK	50 KK	340.000.000	300.000.000	
			Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kecintaan Terhadap Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Provinsi			Jumlah orang/pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 300 orang Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan 1 TMP	300 orang 1 TMP	650.000.000	650.000.000	
			Penyuluhan Sosial	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial 250 orang	250 orang	150.000.000	275.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Provinsi			Jumlah dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku 15 Lembaga	15 Lembaga	40.000.000	40.000.000	
			Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka			Jumlah Pilar-pilar Sosial yang diberdayakan 100 orang	100 orang	500.000.000	525.000.000	
			Peningkatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Partisipasi Acara HKSN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 300 orang	300 orang	150.000.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan psikososial 30 orang	30 orang	50.000.000	50.000.000	
			Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja 30 orang	30 orang	40.000.000	60.000.000	
			Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan	20 orang	80.000.000	85.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Binaan Sosial				dipulangkan 20 orang				
			Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan 50 orang Jumlah peralatan dan perlengkapan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan 10 paket	50 orang 10 paket	1.027.400.000	900.000.000	
			Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi 12 bulan	12 bulan	150.000.000	150.000.000	
			Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan 10 orang	10 orang	40.000.000	40.000.000	
			Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi 100 orang	100 orang	50.000.000	-	
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan 20 orang	20 orang	60.000.000	60.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabiltasi Sosial Dalam Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti 20 Orang	20 Orang	836.500.000	710.000.000	
			Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan 4 orang	4 orang	40.000.000	40.000.000	
			Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti 12 bulan	12 bulan	645.500.000	600.000.000	
			Rehabilitasi ringan prasarana panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi 1 paket	1 paket	150.000.000	-	
			Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah pengelola panti yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan 4 orang	4 orang	40.000.000	40.000.000	
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah peserta yang mendapat ilmu pengetahuan tentang Mitigasi penanggulangan bencana Di 7 Kab/Kota 100 Peserta	100 Peserta	162.125.000	300.000.000	
			Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Jumlah Koordinasi berkala Tim Penangggulangan Bencana /Tim Tantangan dalam	1 Kegiatan	350.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bencana Daerah	Barat, Bangka Selatan			penyelenggaraan penanggulangan bencana 1 Kegiatan				
			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah orang Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	100 orang	750.000.000	400.000.000	
			Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah peserta yang mendapat Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Di 7 Kab/Kota 100 Peserta	100 Peserta	213.775.000	200.000.000	
			Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelematan Dini Saat Terjadi Bencana di setiap 7 Kabupaten/kota 10 Media Cetak/Elektronik	10 Media Cetak/Elektronik	160.750.000	200.000.000	
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	80 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Jumlah peserta yang mendapat Bimbingan Teknis Rehabilitasi Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi 40 Peserta	40 Peserta	104.200.000	145.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat							
			Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah (Laporan) Tersusunnya Data Sarana Prasarana Pascabencana laporan dalam Tahun 2017 - 2022 1 Laporan	1 Laporan	68.250.000	145.000.000	
			Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah peserta Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana Di Provinsi, dan 7 Kab/Kota 40 Peserta	40 Peserta	98.700.000	140.000.000	
			Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi,Kab/Kota	Provinsi			Jumlah peserta Bimbingan Teknis tenaga terampil Jitu Pasna bagi Aparatur Kabupaten/Kota dan Provinsi 160 orang 160 Peserta	160 Peserta	74.550.000	200.000.000	
			Pemeliharaan Jembatan Portable	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Unit Jembatan Portable Dalam Tahun 2017 - 2022 yang di pelihara 2 Unit	2 Unit	53.950.000	100.000.000	
			Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah unit Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable 1 Unit	1 Unit	111.270.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan							
			Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penangulangan Bencana	100 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Bulan honor Tim Reaksi Cepat yang terbayarkan 12 Bulan	12 Bulan	2.457.800.000	1.900.000.000	
			Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Luar Daerah			Jumlah Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bantuan dari BNPB untuk Penanggulangan Bencana 4 Item Barang	4 Item Barang	79.500.000	100.000.000	
			Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana Di (Kabupaten/Kota) 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	355.300.000	150.000.000	
			Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah ketersediaan logistik untuk Penanggulangan BencanaDi Provinsi, dan 7 Kab/Kota 4 Item Barang	4 Item Barang	122.600.000	150.000.000	
			Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	Provinsi			Jumlah Item Peralatan ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana 11 Item Peralatan	11 Item Peralatan	143.600.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Jenis Peralatan PB Kualitas Logistik dan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana yang di Pemelihara dan dirawat 10 Jenis Peralatan PB	10 Jenis Peralatan PB	311.200.000	175.000.000	
			Tenaga Kerja								
			Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi; Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan; persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan; persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan; Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibinasesuai standar; Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja; persentase penyelesaian kasus tenaga kerja; persentase penurunan kecelakaan kerja	0 %; 2 %; 1,6 %; 1,6 %; 4,8 %; 0 %; 0,75 %; 0,3 %					DINAS TENAGA KERJA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemetaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi			Jumlah perusahaan yang di data untuk penilaian klasifikasi 1.500 perusahaan	1.500 perusahaan	200.000.000	-	
			Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi			Jumlah Perusahaan yang mendapat penghargaan 3 perusahaan	3 perusahaan	150.000.000	150.000.000	
			Peningkatan sarana Hubungan Industrial	Provinsi			Jumlah perusahan dalam pembuatan PP/ PKB 30 Perusahaan	30 Perusahaan	80.000.000	-	
			Pembinaan dan Penyelesaian PHK Pekerja Di luar Pengadilan HI	Provinsi			Jumlah Kasus PHK Pekerja yang dibina dan diselesaikan di luar pengadilan HI 160 Perusahaan	160 Perusahaan	90.000.000	130.000.000	
			Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi			Jumlah Perusahaan Pertambangan yang diperiksa dan dibina 250 Perusahaan	250 Perusahaan	250.000.000	370.000.000	
			Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	Provinsi			Jumlah kondisi Perusahaan yang rawan 225 Perusahaan	225 Perusahaan	135.000.000	125.000.000	
			Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	Provinsi			Jumlah Laporan LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan 5 Laporan	5 Laporan	175.000.000	250.000.000	
			Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	Provinsi			Jumlah Laporan Pembahasan UMP 8 Laporan	8 Laporan	175.000.000	250.000.000	
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Provinsi			Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan 2 Kasus	2 Kasus	117.470.000	117.470.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral; Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi; Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi; Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing; Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi; Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi; Persentase pencari kerja yang ditempatkan; Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan; Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan; Persentase wanita Tuna sosial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan; Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaa	0,05 %; 21,3 %; 21,3 %; 250.000.000 Rp.; 21,3 %; 21,3 %; 22,86 %; 0,28 %; 10,64 %; 8,62 %; 0,78 %					DINAS TENAGA KERJA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sertifikasi Tenaga Kerja	Provinsi			Jumlah Tenaga kerja pertanian bersertifikat kompetensi 80 orang Jumlah Tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi 30 Orang Jumlah Tenaga kerja Pariwisata bersertifikat kompetensi 30 orang Jumlah Tenaga kerja sektor pertambangan timah bersertifikat kompetensi 30 Orang	80 orang 30 Orang 30 orang 30 Orang	400.000.000	400.000.000	
			Bimtek Penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	Provinsi			Jumlah LPK yang mampu mencapai kompetensi sesuai standar yang berlaku 25 LPK	25 LPK	115.000.000	125.000.000	
			Pembinaan dan Pengendalian TKA	Provinsi			Jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA 25 Perusahaan	25 Perusahaan	300.000.000	400.000.000	
			Pemasaran Tenaga kerja (Job Convassing)	Provinsi			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 100 Perusahaan	100 Perusahaan	174.733.000	150.000.000	
			Bimtek metodologi bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Provinsi			Jumlah Peserta bimtek metologi bagi instruktur LPKS 25 Orang	25 Orang	115.000.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja		Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja Di UMKM	Provinsi			Jumlah UMKM yang diperiksa lingkungan kerjanya 20 UMKM	20 UMKM	165.300.000	170.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengujian Lingkungan Kerja	Provinsi			Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa 11 Perusahaan	11 Perusahaan	163.000.000	167.600.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi; Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi; Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan; Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan; Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	0,17 %; 0 %; 0,15 %; 0,17 %; 0 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pemasaran UPTD Balai Latihan Kerja	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Tersedianya informasi dan program kegiatan UPTD balai latihan kerja bagi masyarakat serta terciptanya dan meningkatnya SDM yang terampil, kompeten dan berdaya saing 0	0	355.280.000	423.808.000	
			Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka			Jumlah Pencari kerja bidang pertanian lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan 25 Paket	25 Paket	1.500.000.000	3.750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang							
			Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian; Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	0,02 %; 0,12 %; 0,05 %; 0,05 %					DINAS TENAGA KERJA
			pelayanan dan peningkatan produktivitas	Provinsi			jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produktifitas pelaku usaha / UMKM 75 UMKM	75 UMKM	350.000.000	200.000.000	
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		persentase peningkatan volume usaha koperasi; persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan; persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	11 %; 4 %; 7 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Koperasi yang melakukan pengembangan jaringan usaha koperasi 15 koperasi Jumlah Koperasi yang melakukan Pengembangan pemasaran produk 15 koperasi Jumlah Koperasi yang melakukan kerjasama/kemitraan 15 MoU Jumlah Koperasi yang difasilitasi pendampingan akses pembiayaan koperasi 35 koperasi Jumlah Pameran yang diikuti 1 Pameran Jumlah Koperasi yang melakukan kerjasama/kemitraan 10 Koperasi	15 koperasi 15 koperasi 15 MoU 35 koperasi 1 Pameran 10 Koperasi	432.837.000	1.600.000.000	
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Pengurus/Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek SPI 60 Pengurus/Pengawas koperasi Aplikasi pengolah data usaha koperasi 0 aplikasi Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti Pola Pengembangan Usaha 35 Pengurus Koperasi Jumlah Pengurus Koperasi yang	60 Pengurus/Pengawas koperasi 0 aplikasi 35 Pengurus Koperasi 35 Pengurus Koperasi 35 Pengurus Koperasi 60 Koperasi	577.194.000	1.170.720.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							mengikuti Bimtek Komoditi Unggulan 35 Pengurus Koperasi Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Bimtek Koperasi Komoditi perikanan 35 Pengurus Koperasi Jumlah pengurus koperasi yg mengikuti bimtek pengembangaan unit usaha 60 Koperasi				
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan 13 PPKL Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapatkan pengetahuan tentang Kewirausahaan Koperasi 42 pengurus koperasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perkoperasian 40 Pembina Koperasi/PPKL Jumlah Peserta Pemasyarakatan Koperasi 150 Orang	13 PPKL 42 pengurus koperasi 40 Pembina Koperasi/PPKL 150 Orang	1.512.596.000	1.100.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil		persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang	15 %; 15 %; 4 %; 20 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dikembangkan; pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi						
			Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pendampingan perizinan bagi usaha kecil dan wirausaha pemula 1.000 Naskah IUMK Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pendampingan akses permodalan 70 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui PRJ 20 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan sosialisasi aplikasi mobile platform pemasaran produk UMKM 0 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui Web Online 100 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran melalui Gelar Produk Halal 0 Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses	1.000 Naskah IUMK 70 pelaku usaha 20 pelaku usaha 0 pelaku usaha 100 pelaku usaha 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha	4.102.408.755	1.080.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui Festival Babel 0 Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran produk usaha kecil melalui Pameran 150 Pelaku Usaha				
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Rapat Koordinasi 1 rakor Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang tersusun 1 pergub Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Akses teknologi tepat guna 21 pelaku usaha Jumlah MoU Kerjasama Pelaku Usaha antar daerah 1 Naskah Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi akses promosi dan pemasaran melalui Gelar Produk Halal 1 kali Jumlah Sertifikat Halal 250 sertifikat halal Jumlah dokumen data usaha kecil 1 Dokumen Jumlah Produk yang difasilitasi untuk barcode produk 30 Produk	1 rakor 1 pergub 21 pelaku usaha 1 Naskah 1 kali 250 sertifikat halal 1 Dokumen 30 Produk 100 Orang 7 Pelaku Usaha	1.595.420.000	5.950.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peserta Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM 100 Orang Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Kerjasama antar Daerah 7 Pelaku Usaha				
			Peningkatan kualitas kewirausahaan	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Pelaku Usaha yang meningkatnya kualitas kewirausahaan 50 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti workshop kewirausahaan 100 pelaku usaha Jumlah Wirausahawan yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi 50 pelaku usaha Jumlah Pelaku Usaha berprestasi tingkat provinsi 5 pelaku usaha Jumlah wirausaha Pemula yang mengikuti magang 50 Wirausaha Pemula Jumlah Peserta Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru 1.500 Wirausaha Pemula	50 pelaku usaha 100 pelaku usaha 50 pelaku usaha 5 pelaku usaha 50 Wirausaha Pemula 1.500 Wirausaha Pemula	1.145.215.000	470.000.000	
	PENINGKATAN TATA KELOLA	Birokrasi yang efektif dan	**Program Peningkatan Pembinaan**		persentase pertumbuhan koperasi	15,5 %; 12,7 %; 6,6 %					DINAS KOPERASI,

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	efisien	**Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**		aktif; persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi ; persentase peningkatan koperasi berkualitas						USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Sosialisasi kepada Kelompok Strategis 80 orang Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 80 orang Jumlah Peserta yang meningkatnya pemahaman nilai-nilai dan prinsip perkoperasian 35 koperasi Jumlah pembuatan akta notaris untuk koperasi 14 akta Jumlah Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) 40 Koperasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 0 Orang Jumlah Peserta mengikuti Diseminasi Pembentukan Koperasi Baru 300 Orang Jumlah Duta Koperasi Tingkat Provinsi 3 Orang Jumlah Peserta Bimtek Bagi Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) 30 Koperasi	80 orang 80 orang 35 koperasi 14 akta 40 Koperasi 0 Orang 300 Orang 3 Orang 30 Koperasi	864.004.800	1.240.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peraturan internal perkoperasian pada koperasi provinsi 35 ART dan Persus Jumlah Pengurus Koperasi yang meningkatnya pemahaman tentang peraturan penerapan sanksi 35 Pengurus Koperasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi terhadap Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus) Tahun 2018 35 ART dan Persus Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus) 100 ART dan Persus Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Buku Wajib Koperasi bagi Koperasi 35 Koperasi Jumlah Peserta yang mengikuti Diseminasi Penambahan Jumlah Anggota Koperas 100 Orang Jumlah Peserta Pengkaderan Koperasi 50 Orang	35 ART dan Persus 35 Pengurus Koperasi 35 ART dan Persus 100 ART dan Persus 35 Koperasi 100 Orang 50 Orang	378.974.500	680.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi 3 Koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan Koperasinya 30 Koperasi Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi tingkat Provinsi 2 Tokoh Penggerak Koperasi Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 30 Orang Jumlah Pengawasan terhadap Koperasi 30 Koperasi Jumlah Lokasi yang diawasi 7 kab/Kota	3 Koperasi 30 Koperasi 2 Tokoh Penggerak Koperasi 30 Orang 30 Koperasi 7 kab/Kota	525.489.000	670.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		persentase SDM koperasi terlatih ; persentase SDM Usaha Kecil terlatih	10,32 %; 1,12 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM	SKPD			Jumlah Aparatur yang terlayani selama 12 bulan 19 Orang	19 Orang	1.661.000.000	1.000.000.000	
			Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	SKPD, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Peserta Pelatihan bidang Perkoperasian yang terlatih 210 orang Jumlah Peserta Pelatihan bidang Usaha Kecil yang terlatih 360 orang Jumlah pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan perkoperasian	210 orang 360 orang 5 Kurikulum 24 SOP 0 Sertifikat	743.783.000	3.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan kewirausahaan yang disusun 5 Kurikulum Jumlah SOP yang diimplementasikan dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 24 SOP Jumlah sertifikat ISO 9001:2015 0 Sertifikat				
			Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM	SKPD			Jumlah Audit Surveillance ISO 9001: 2015 1 Sertifikat Audit Surveillance Jumlah Dokumen Kajian Mutu Pelatihan Perkoperasian dan UMKM 1 Dokumen Mutu Pelatihan Jumlah Resertifikasi ISO 9001: 2015 0 Sertifikat	1 Sertifikat Audit Surveillance 1 Dokumen Mutu Pelatihan 0 Sertifikat	274.735.000	420.000.000	
			Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM		Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT KUMKM; Pertumbuhan produk parekraf	0 %; 10 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Produk UKM yang difasilitasi Pendampingan inovasi produk 21 produk Jumlah UKM yang didampingi 50 pelaku usaha Jumlah Sentra Usaha yang disurvey 3 sentra usaha	21 produk 50 pelaku usaha 3 sentra usaha 150 pelaku usaha	894.927.000	1.720.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Klinik usaha terpadu 150 pelaku usaha				
			Penanaman Modal								
			Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertambahan jumlah UKM pertanian yang bermitra dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi sektor pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian; Pertambahan jumlah profil investasi sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor perikanan dan kelautan; Pertambahan jumlah UKM perikanan dan kelautan yang bermitra dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi sektor pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pariwisata; Pertambahan jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi	1 UKM Sektor Pertanian; 0 Profil Sektor Pertanian; 0 Profil Sektor Perikanan dan Kelautan; 1 UKM Sektor Perikanan dan Kelautan; 0 Profil sektor Pariwisata; 1 UKM Sektor Pariwisata; 3 Profil sektor Sumber Daya Mineral; 1 UKM Sektor Sumber Daya Mineral					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sektor sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor sumber daya mineral; Pertambahan jumlah UKM sumber daya mineral yang bermitra dengan investor						
			Studi Kelayakan Potensi Investasi	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah dokumen kajian potensi investasi 1 Kajian	1 Kajian	425.000.000	450.000.000	
			Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah	Pangkal Pinang			Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi 1 kali Jumlah peserta forum komunikasi 50 Peserta (35 laki-laki dan 15 perempuan)	1 kali 50 Peserta (35 laki-laki dan 15 perempuan)	72.060.000	78.000.000	
			Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah elemen data SIPID 6 elemen data SIPID Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih 20 Peserta (14 laki2 dan 6 perempuan)	6 elemen data SIPID 20 Peserta (14 laki2 dan 6 perempuan)	144.700.000	160.000.000	
			Pelaksanaan matchmaking daerah	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah penyelenggaraan matchmaking dalam negeri yang diikuti 4 kali	4 kali	444.040.000	488.444.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Workshop Pengembangan usaha daerah	Pangkal Pinang			Jumlah penyelenggaraan workshop 1 kali Jumlah peserta yang mengikuti workshop 40 peserta (30 laki-laki dan 10 perempuan)	1 kali 40 peserta (30 laki-laki dan 10 perempuan)	71.825.000	79.000.000	
			Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)	Bangka			Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi 1 kali Jumlah peserta yang mengikuti Rakor 45 Peserta (30 laki-laki dan 15 perempuan)	1 kali 45 Peserta (30 laki-laki dan 15 perempuan)	145.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Pertambahan Jumlah Investor Sektor Perikanan dan Kelautan; Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian; Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pariwisata; Pertambahan Jumlah Investor Sektor Sumber Daya Mineral	2 Investor Sektor Perikanan dan Kelautan; 3 Investor Sektor Pertanian; 3 Investor Sektor Pariwisata; 3 Investor Sektor Sumber Daya Mineral					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah pameran investasi yang diikuti 6 (5 Pameran dan 1 Kegiatan RIF)	6 (5 Pameran dan 1 Kegiatan RIF)	890.000.000	1.400.000.000	
			Pembuatan Bahan Promosi	Provinsi			Jumlah bahan promosi yang tersusun 4 bahan promosi	4 bahan promosi	165.000.000	255.000.000	
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi		Persentase Perusahaan Sektor Perikanan dan Kelautan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Persentase Perusahaan	45 %; 45 %; 45 %; 45 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sektor Pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Persentase Perusahaan Sektor pariwisata yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Persentase Perusahaan Sektor Sumber Daya Mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi						
			Workshop laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Online	Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Perusahaan yang mengikuti workshop 110 Perusahaan Jumlah aparatur yang mengikuti workshop 40 aparatur	110 Perusahaan 40 aparatur	120.000.000	148.750.000	
			Pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah perusahaan yang terpantau 55 Perusahaan	55 Perusahaan	500.000.000	555.000.000	
			Bimbingan dan penyelesaian masalah penanaman modal	Provinsi			Jumlah kasus yang diselesaikan 4 kasus/permasalahan	4 kasus/permasalahan	100.000.000	100.000.000	
			Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah dokumen LKPM pertahun 1 dokumen	1 dokumen	135.000.000	183.750.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan		Persentase ketepatan waktu penerbitan	82 %; 10 Hari Kerja					DINAS PENANAMA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terpadu		perizinan sumber daya mineral; Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian perizinan						N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen	1 dokumen	57.075.000	-	
			Rakor Forum PTSP se-Provinsi kepulauan bangka Belitung	Provinsi			Jumlah pelaksanaan rakor forum ptsp 1 kali Jumlah peserta yang hadir 50 peserta (15 perempuan dan 35 laki-laki)	1 kali 50 peserta (15 perempuan dan 35 laki-laki)	250.000.000	400.000.000	
			Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan 1.150 Izin	1.150 Izin	1.094.459.252	1.380.000.000	
			Kebudayaan								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	**Program Pelestarian Budaya**		Persentase budaya lokal yang dimanfaatkan; Persentase budaya lokal yang dikembangkan; Persentase budaya lokal yang dilindungi; Persentase budaya lokal yang dibina	42,38 %; 42,38 %; 42,38 %; 42,38 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Tradisi Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah naskah kajian tradisi 2 naskah	2 naskah	253.920.000	104.803.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan cagar budaya	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat			Jumlah cagar budaya yang dikelola 1 Cagar budaya	1 Cagar budaya	500.000.000	598.126.000	
			Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Bangka Selatan, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah Festival yang diselenggarakan 3 event	3 event	766.625.000	752.456.000	
			Penulisan Sejarah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung 2 naskah	2 naskah	666.500.000	245.568.000	
			Pentas seni budaya	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			jumlah sanggar yang dipentaskan 138 pentas/event	138 pentas/event	1.609.000.000	2.311.726.900	
			Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Dukungan Event yang difasilitasi dan penyelenggaraan operasional lembaga adat 31 dukungan/LAM	31 dukungan/LAM	2.500.000.000	6.394.341.000	
			Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta gita bahana dan aubade 256 orang	256 orang	343.150.000	481.734.000	
			Festival Budaya Melayu	Provinsi, Bangka			Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan 1	1 Festival/event	730.711.000	1.099.743.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Festival/event				
			Kepemudaan dan Olahraga								
	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Birokrasi yang efektif dan efisien	**Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**		Persentase Pemuda Berprestas yang dibinai; Persentase Kunjungan Pemuda Lintas Negara; Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan berdedikasi Yang mendapatkan pembinaan; Persentase Pemuda yang menciptakan lapangan Pekerjaan	0,06 %; 240 %; 19,23 %; 0,11 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			0				jumlah Event yang terselenggara 10 Event	10 Event	-	-	
			Pemberdayaan Peran serta Pemuda	Provinsi			Jumlah pemuda yang mengikuti pemberdayaan peran serta pemuda 52 Pemuda	52 Pemuda	240.000.000	475.499.750	
			Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Provinsi, SKPD			Jumlah pemuda Lintas Negara yang mengikuti pemberdayaan pemuda lintas negara 34 Pemuda	34 Pemuda	225.000.000	552.365.000	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	Provinsi			Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas, kreativitas dan wawasan pemuda 50 Pemuda	50 Pemuda	750.000.000	405.955.000	
			Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi yang Berdedikasi dan Berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan dan penghargaan 10	10 Pemuda	50.000.000	133.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemuda				
			Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	Provinsi			Jumlah pemuda yang Mengikuti pengembangan, pembinaan dan pelatihan generasi pemuda 91 Pemuda	91 Pemuda	2.284.465.000	4.078.419.587	
			Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda 35 Pemuda	35 Pemuda	220.073.500	400.325.011	
			Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga		Pertumbuhan Peserta yang mengikuti Babel Sport Tourism; persentase atlet pelajar berprestasi yang memperoleh medali yang dibina di tingkat provinsi; Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	24 %; 6,44 %; 0,01 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Jumlah Event yang Terselenggara 14 Event	14 Event	-	-	
			Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina 64 Atlet	64 Atlet	1.518.688.333	1.479.653.068	
			Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional 175 peserta	175 peserta	478.613.333	593.674.671	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Khusus	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang							
			Bangka Belitung Sport Tourism	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			jumlah peserta yang mengikuti Bangka Belitung Sport Tourism 200 Peserta	200 Peserta	50.000.000	1.995.500.000	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan 142 Atlet	142 Atlet	3.181.682.333	2.096.131.107	
			Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Atlet Yang Mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out 168 Atlet	168 Atlet	806.389.000	1.992.150.092	
			Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Luar Daerah			Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestas 5 Medali	5 Medali	1.872.652.500	22.289.665.594	
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga		Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Terbangun; Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Event Olahraga Tingkat Regional dan Nasional Yang Terbangun; Persentase sarana dan prasarana kepemudaan yang terbangun	20 %; 16,67 %; 20 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah pengadaan sarana Keolahragaan 2 Sarana	2 Sarana	3.000.000.000	1.633.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah Prasarana Kepemudaan yang direvitalisasi dan direhabilitasi 1 Prasarana	1 Prasarana	7.997.131.335	1.500.000.000	
			Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			jumlah prasarana yang dilakukan penilaian 1 laporan	1 laporan	218.345.000	1.000.000.000	
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	**Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**		Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Provinsi			Jumlah penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan dan pengawalam) 467 kali	467 kali	1.251.190.000	2.332.500.000	
			Patroli	Provinsi			Jumlah patroli 1.080 kali	1.080 kali	116.150.000	280.000.000	
			Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	Pangkal Pinang			Jumlah peserta gelar pasukan 600 orang	600 orang	117.507.000	149.297.500	
			Penyelenggaraan Deteksi	Provinsi			Jumlah deteksi dini	12 kali	79.600.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dini Pelanggaran Tibumtranmas				pelanggaran tibumtranmas 12 kali			100.000.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja		Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	16,23 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan 740 orang kali	740 orang kali	141.174.000	200.000.000	
			Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	Luar Daerah			Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat 25 orang	25 orang	440.937.000	157.903.500	
			Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Pangkal Pinang			Jumlah pejabat fungsional polisi pamong praja yang dibina 50 orang	50 orang	131.582.000	150.000.000	
			Program Penegakan Perda dan Perkada		Cakupan penegakan perda	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada	Provinsi			Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial 252 orang	252 orang	59.145.391	261.811.500	
			Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Provinsi			Jumlah penyidikan (pemberkasan) 3 penyidikan Jumlah penyelidikan 10 penyelidikan	3 penyidikan 10 penyelidikan	235.524.800	308.725.000	
			Penatakelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel	Pangkal Pinang			Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan, dan penertiban Satpol PP 10 kali kegiatan rapat	10 kali kegiatan rapat	87.000.000	41.120.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat Koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kep. Babel dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta Rapat koordinasi Satpol PP dengan PPNS 30 orang	30 orang	42.000.000	58.367.000	
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat		Persentase peningkatan kualitas Linmas dalam penyelenggaraan kantrantibnas; Persentase Satlinmas yang terlatih dalam penanganan bencana dan kebakaran	2,72 %; 6,05 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Simulasi akbar pemadam kebakaran	Provinsi			Jumlah peserta simulasi 350 orang	350 orang	129.210.000	129.166.000	
			Jambore satlinmas seprovinsi kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta satlinmas dalam kegiatan jambore 198 orang satlinmas	198 orang satlinmas	528.458.000	446.642.000	
			Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se provinsi kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibnas 60 orang satlinmas	60 orang satlinmas	266.433.000	333.559.000	
			Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas	Belitung Timur, Bangka			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas 200 orang	200 orang	386.000.000	386.293.000	
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Daerah yang Kondusif 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	343.050.000	2.750.000.000	
			Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Daerah Potensi Konflik (Daerah) 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	430.000.000	2.500.000.000	
			Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0 %; 1 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penguatan Wawasan Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (orang) 20.000 Orang	20.000 Orang	1.718.808.000	2.400.000.000	
			Penguatan Pembauran Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Masyarakat yang melestarikan budaya dan menjaga kerukunan (orang) 5.000 Orang	5.000 Orang	214.600.000	750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Masyarakat yang Memahami Ideologi Kebangsaan (Orang) 1.080 Orang	1.080 Orang	300.995.000	1.050.000.000	
			Penguatan Bela Negara	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Masyarakat yang cinta tanah air (orang) 840 Orang	840 Orang	235.455.000	900.000.000	
			Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7 Jumlah; 60 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Pembinaan Politik Daerah	, Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah()			Jumlah Masyarakat yang memahami Politik (Orang) 840 Orang	840 Orang	620.900.000	875.000.000	
			Penguatan Kelembagaan Parpol	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Parpol yang menjalankan tugas dan fungsinya (Lembaga) 15 Lembaga	15 Lembaga	245.950.000	875.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Laporan (Laporan) 4 Laporan	4 Laporan	314.900.000	300.000.000	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Lembaga Demokrasi yang membangun bidang politik (Berkas) 5 Berkas	5 Berkas	460.950.000	750.000.000	
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	45 %; 700 Orang; 50 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah pelaku seni yang ikut menjaga kesenian dan budaya (orang) 140 Orang	140 Orang	90.790.000	1.000.000.000	
			Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Laporan Angka Kesejangan Ekonomi (Laporan) 10 Laporan	10 Laporan	190.625.000	1.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang							
			Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah rekomendasi 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000	350.000.000	
			Pencegahan dan penanggulangan Napza	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan napza (orang) 350 Orang	350 Orang	268.475.692	1.200.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Ormas yang ikut serta dalam pembangunan (Ormas) 30 Ormas	30 Ormas	253.612.000	1.200.000.000	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Birokrasi yang efektif dan efisien	**Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian**		Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi Sistem Resi Gudang 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	125.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Forum Pengembangan Ekonomi	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rekomendasi Pengembangan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	200.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Barat					100.000.000	150.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Rekomendasi Data Perindag di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	150.000.000	
			Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah Rekomendasi Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	250.000.000	1.000.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Selatan, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi Data Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	150.000.000	
			Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung			Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi	2 Rekomendasi	150.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			daerah 2 Rekomendasi				
			Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah Rekomendasi Promosi Potensi Daerah 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	150.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam		Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Monitoring dan Evaluasi Sektor Hulu dan Hilir Migas	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi Sektor Hulu dan Hilir Migas 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	175.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rekomendasi Pengembangan Potensi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	115.000.000	150.000.000	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi Penataan Lahan Kritis 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	115.000.000	125.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepulauan Bangka Belitung								
			Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rekomendasi Pengembangan Komoditi Pangan Prov. Kep. Babel 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	125.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya		Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengembangan Kemitraan BUMD	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Rekomendasi Pengembangan Kemitraan BUMD 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	200.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	125.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Rekomendasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	150.000.000	
			Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah Kesepakatan Bersama Terbentuknya Bank Umum Syariah Bangka Belitung 1	1 Kesepakatan	150.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Kesepakatan				
			Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Rekomendasi/Kesepakatan	3 Rekomendasi/Kesepakatan	217.661.933	250.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka, Belitung			Jumlah Rekomendasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000	200.000.000	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Provinsi, SKPD, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rekomendasi benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	150.000.000	
			Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	85 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monep APBN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Aplikasi e-Monep APBN 1 Aplikasi	1 Aplikasi	420.292.000	494.330.476	
			Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang	Pangkal Pinang			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	182.207.000	322.511.150	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bersumber dari APBN								
			Koordinasi Kebijakan APBN	Provinsi			Rekomendasi Evaluasi APBN 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	121.961.022	213.187.000	
			Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan		Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD	80 %					SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Provinsi			Jumlah dokumen/ laporan 5 dokumen/ laporan	5 dokumen/ laporan	150.000.000	266.200.000	
			Rapat-rapat paripurna	SKPD			Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan 15 paripurna istimewa/biasa	15 paripurna istimewa/biasa	350.000.000	771.645.919	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Luar Daerah			Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas 23 Raperda & Produk hukum lainnya	23 Raperda & Produk hukum lainnya	17.922.000.000	25.718.779.900	
			Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	SKPD			Dokumen nota/kesepakatan 4 dokumen/laporan	4 dokumen/laporan	200.000.000	503.118.000	
			Kunjungan kerja badan anggaran	Luar Daerah			Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Anggaran 6 Laporan	6 Laporan	1.500.000.000	3.315.986.850	
			Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Luar Daerah			Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah 6 Laporan	6 Laporan	950.000.000	2.564.877.862	
			Kunjungan kerja badan kehormatan	Luar Daerah			Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan 6 Laporan	6 Laporan	550.000.000	1.251.006.900	
			Reses	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD (dokumen/laporan) 3 dokumen/laporan	3 dokumen/laporan	7.130.487.923	9.881.477.100	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah			Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat 90 anggota	90 anggota	1.500.000.000	2.000.559.550	
			Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Luar Daerah			Jumlah rekomendasi / kesepakatan 3 kesepakatan	3 kesepakatan	250.000.000	708.424.750	
			Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	SKPD			Jumlah tenaga ahli dan Kelompok Pakar/tim ahli 7 Tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/ tim ahli	7 Tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/ tim ahli	853.000.000	970.818.090	
			Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi 5 laporan	5 laporan	-	266.200.000	
			Kunjungan kerja komisi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja komisi 384 Laporan	384 Laporan	43.000.000.000	37.265.577.580	
			Kunjungan kerja badan musyawarah	Luar Daerah			Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah 6 Laporan	6 Laporan	1.500.000.000	1.758.543.820	
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan		Persentase Kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah ; Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD	95 %; 77 %					SEKRETARIAT DPRD
			Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	SKPD			Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan 100	100 persen	3.180.400.000	3.250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							persen				
			Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi fungsi kelembagaan 200 publikasi	200 publikasi	2.000.000.000	3.273.847.390	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	SKPD			Persentase pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran 77 %	0,77	4.100.000.000	5.481.483.920	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur		Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK	75 %					INSPEKTORAT DAERAH
			Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN 0 100%	0 100%	158.864.490	90.000.000	
			Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korsupgah	Provinsi, SKPD			Prosentase pemenuhan laporan atas penyelesaian renaksi stranas PPK dan korsupgah 100 %	1	10.250.000	5.000.000	
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 4 Laporan	4 Laporan	75.350.000	381.000.000	
			Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupatan/Kota	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka			Jumlah evaluasi Sakip dan EKPPD pada provinsi dan Kab./Kota 8	8 Instansi	250.000.000	325.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Instansi				
			Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP 4 Laporan	4 Laporan	-	150.000.000	
			Penilaian Internal Zona Integritas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk ZI 5 Unit kerja	5 Unit kerja	16.950.000	300.000.000	
			Monev Laporan Gratifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan gratifikasi 12 Laporan	12 Laporan	31.799.800	175.000.000	
			Penanganan Whistle Blower System	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan pengaduan melalui WBS 12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	142.000.000	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah		Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti; Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah; Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	90 %; 95 %; 100 %					INSPEKTORAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi/pemantauan 150 Obrik	150 Obrik	2.787.000.000	3.241.000.000	
			Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK 150 Obrik	150 Obrik	-	496.125.000	
			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK 150 obrik	150 obrik	593.950.000	836.000.000	
			Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	SKPD			Tingkat akurasi data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan APIP 100 %	1	-	187.905.000	
			Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1 PKPT	1 PKPT	203.719.000	346.000.000	
			Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah 15 %	0,15	98.000.000	642.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah 15 Laporan	15 Laporan	235.000.000	283.618.000	
			Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah 2 Laporan	2 Laporan	325.000.000	438.000.000	
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP; Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP	3 level; 3 level					INSPEKTORAT DAERAH
			Peningkatan sistem aplikasi pengawasn	SKPD			Tingkat akurasi data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan APIP 100 %	1	80.000.000	90.000.000	
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Perangkat Daerah 42 Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	42 Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	45.799.750	289.406.000	
			Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP 100 Peserta	100 Peserta	245.885.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi SPIP	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah sosialisasi SPIP 4 kali sosialisasi dalam setahun	4 kali sosialisasi dalam setahun	-	175.000.000	
			Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah monev SPIP yang dilakukan 4 Kali	4 Kali	-	170.000.000	
			Konsultasi Audit	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah konsultasi yang dilaksanakan 42 Perangkat Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah Provinsi	15.000.000	185.000.000	
			Survei Penilaian Integritas	Provinsi, Luar Daerah, SKPD					200.000.000	220.000.000	
			Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi		Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta	100 %					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek 24 kali	24 kali	474.775.000	1.400.000.000	
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil	12 Kali	176.100.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintah Daerah Lainnya				Kepala Daerah di Luar Jakarta 12 Kali				
			Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 3 acara	3 acara	1.378.600.000	2.100.000.000	
			Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	Luar Daerah, SKPD			Persentase Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan 100 %	1	300.275.000	350.000.000	
			Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Luar Daerah, SKPD			Jumlah anjungan yang direhabilitasi berat 1 Anjungan	1 Anjungan	3.000.000.000	-	
			Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi 7 Kegiatan	7 Kegiatan	602.050.000	1.600.000.000	
			Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Kegiatan Expo Serumpun Sebalai 1 kali	1 kali	564.580.000	1.000.000.000	
			Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik 12 kali	12 kali	50.500.000	300.000.000	
			Pangan								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan,	**Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**		Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi; Capaian Skor PPH Ketersediaan	1,1 persen; 84 Skor					DINAS PANGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan pekerbunaan									
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Provinsi			Jumlah Dokumen Rekomendasi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan 1 dokumen	1 dokumen	190.000.000	200.000.000	
			Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			jumlah dokumen data rawan pangan, FSVA dan SKPG 3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	220.000.000	
			Penyediaan Sarana Pengelolahan Hasil Pangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Sarana Pengelolah Hasil Pangan 4 unit	4 unit	100.000.000	120.000.000	
			Sosialiasai Rencana Induk Pembangunan Pangan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Provinsi, SKPD			jumlah peserta sosialisasi 210 orang	210 orang	-	-	
			Business Plan Pengembangan Komoditas Pangan Potensial	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen Business Plan Pengembangan Komoditas Pangan Potensial 1 dokumen	1 dokumen	-	-	
			Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Orang yang Kegiatan Gerakan Pemenuhan Gizi 700 orang	700 orang	450.000.000	500.000.000	
			Pengembangan Daerah Mandiri Pangan	Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah terbentuknya daerah mandiri pangan	8 desa	400.000.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			8 desa				
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Orang yang Tertangani di Daerah Rawan Pangan 1.000 Orang	1.000 Orang	310.000.000	550.000.000	
			Penyusunan dokumen ketersediaan dan akses pangan	Provinsi			Jumlah dokumen ketersediaan dan akses pangan 2 dokumen	2 dokumen	260.000.000	320.000.000	
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan		persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah; Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras); Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah); Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam)	2,7 persen; 4,8 Persen; 25 persen; 10 persen					DINAS PANGAN
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah					200.000.000	350.000.000	
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung					155.000.000	350.000.000	
			Pengendalian Distribusi Pangan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung,					250.000.000	270.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Pangkal Pinang							
			Pengembangan Cadangan Pangan	Provinsi, SKPD					600.000.000	650.000.000	
			Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Database Harga, Stock Pangan dan dokumen pragnosa pangan 2 Dokumen	2 Dokumen	97.000.000	120.000.000	
			Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	SKPD			Jumlah Peserta Pelatihan 30 orang	30 orang	100.000.000	125.000.000	
			Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Pangan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang					50.000.000	90.000.000	
			Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan		Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50; Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	83 Skor PPH; 86 Persen					DINAS PANGAN
			Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Event Gerakan GEMA SABUK AMANG 3 (Kali)	3 (Kali)	300.000.000	350.000.000	
			Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	Provinsi			Jumlah peserta bimtek 21 orang	21 orang	100.000.000	150.000.000	
			Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung					285.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Timur, Pangkal Pinang, Bangka							
			Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan yang di fasilitasi (kelompok) 15	15	355.000.000	375.000.000	
			Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Event Daerah dan Nasional 2 Event	2 Event	710.000.000	750.000.000	
			Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat					100.000.000	150.000.000	
			Pengembangan produk pangan lokal hasil pertanian (one village one product)	Provinsi					355.000.000	400.000.000	
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang					305.000.000	400.000.000	
			Penilaian Pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat produk pertanian (Prima 3, Prima 2 dan No registerasi PSAT)	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan					250.000.000	300.000.000	
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Provinsi					180.000.000	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan Pemerintah Desa		Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya; Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	1,94 %; 21 Desa/Kel					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan Keuangannya 169 desa	169 desa	137.750.000	202.584.375	
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah BPD yang dibina 40 BPD Jumlah Aparatur Desa yang dibina 60 Aparatur	40 BPD 60 Aparatur	469.258.000	796.446.000	
			Penataan Kewenangan Desa	Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi Perkembangannya 12 Desa/kelurahan Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tervalidasi dan terbina 21 Desa/Kelurahan Jumlah desa yang terbina untuk menyusun perdes Kewenangan Desa 50 Desa	12 Desa/kelurahan 21 Desa/Kelurahan 50 Desa	833.928.000	1.112.972.704	
			Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung			Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan kapasitasnya 32 Aparatur Desa	32 Aparatur Desa	150.000.000	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa berbasis SIPADES	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Aparatur Desa yang dilatih dalam SIPADES 21 Orang	21 Orang	150.000.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif; Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	3,07 %; 7 %; 19,69 %					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pendampingan Kelembagaan Desa	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Anggota pokjanal posyandu yang mendapatkan pelatihan sistem informasi posyandu 63 Orang Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapatkan pelatihan sistem keuangan BUMDesa 33 Orang Jumlah Lembaga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa di kabupaten yang dibina 11 Lembaga Jumlah Lembaga Adat Desa yang dibina 11 Lembaga Adat	63 Orang 33 Orang 11 Lembaga 11 Lembaga Adat	805.252.480	1.154.078.558	
			Pemberdayaan Masyarakat	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan 7 Sekolah Jumlah Desa/kelurahan yang dinilai dalam pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 kegiatan jumlah rakornas yang dilaksanakan 1 kali	7 Sekolah 1 kegiatan 1 kali 12 Kali 4 Kegiatan 3 Kegiatan	4.853.937.500	2.086.619.063	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah pertemuan yang dihadiri Kabupaten/Kota 12 Kali Jumlah kegiatan Nasional yang diikuti di tingkat Nasional 4 Kegiatan Jumlah lomba untuk meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3 Kegiatan				
			Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 80 orang	80 orang	348.150.000	1.000.000.000	
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat		Persentase KPM yang aktif ; Persentase Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan; Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	3,24 %; 14,48 %; 10,64 %					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Luar Daerah, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan 33 peserta	33 peserta	508.931.000	939.202.422	
			Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung,			Jumlah Kader KPM yang dibina 40 orang Jumlah Masyarakat	40 orang 80 orang	676.650.000	1.093.037.301	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan 80 orang				
			Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		Persentase kawasan perdesaan yang diintervensi	0,65 %					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembangunan Kawasan Perdesaan	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah rakor kerjasama dan pengembangan perdesaan 2 kali jumlah bimtek yang dilaksanakan 1 kali jumlah desa yang melakukan kerjasama 30 desa	2 kali 1 kali 30 desa	750.000.000	1.514.059.077	
			Peningkatan Kualitas Tenaga Ahli Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur			1. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Ahli PKP, 2. Terselesainya masalah yang dihadapi Tenaga Ahli 6 orang	6 orang	100.009.760	347.510.000	
			Statistik								
	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Birokrasi yang efektif dan efisien	**Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian**		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi			Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard 1 aplikasi	1 aplikasi	259.113.209	1.226.985.311	
			Inventarisasi dan Pengelolaan Data	Provinsi			Jumlah ketersediaan data informasi statistik	8 kelompok parameter	109.430.650	314.299.630	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sektoral Daerah				daerah yang telah diinventarisasi dan diolah 8 kelompok parameter				
			Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel 104 orang	104 orang	95.863.080	793.224.000	
			Komunikasi dan Informatika								
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan; Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	0 ; 5 Jenis; 13 Jenis; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 1 Saluran	1 Saluran	1.173.000.000	3.150.000.000	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,			Jumlah berita/informasi pemerintah daerah yang	5.238 berita/informasi	15.016.060.000	1.850.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang			dipublikasikan 5.238 berita/informasi pertahun 0	pertahun 0			
			Pengelolaan Kemitraan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah anggota PWI yang difasilitasi 4 orang Jumlah anggota KIM yang difasilitasi 175 orang	4 orang 175 orang	707.147.000	2.150.000.000	
			Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah pengelola aspirasi publik lingkup pemerintah daerah yang difasilitasi 30 orang	30 orang	303.793.000	1.400.000.000	
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	5 Jaringan; 1 Ada; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi 1 paket data center Jangka waktu layanan colocation 12 bulan Jangka waktu layanan	1 paket data center 12 bulan 12 bulan	4.157.015.000	3.559.543.250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							paket internet 12 bulan				
			Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment	Provinsi			kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 5 lisensi aplikasi pendukung kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 5 aplikasi layanan kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 40 website	5 lisensi aplikasi pendukung 5 aplikasi layanan 40 website	860.380.000	2.231.980.520	
			Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	SKPD			Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 6 interkoneksi Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 2 instalasi jaringan komunikasi Kapasitas Jaringan Komunikasi Data 10 peralatan jaringan komputer	6 interkoneksi 2 instalasi jaringan komunikasi 10 peralatan jaringan komputer	545.000.000	432.000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	SKPD			Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi 0 insiden	0 insiden	113.000.000	198.450.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah kebijakan teknis di Bidang Keamanan Informasi 2 kebijakan	2 kebijakan	1.421.000.000	190.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Persentase peningkatan permberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk	6					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					birokrasi						
			Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi			Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat 21 kali	21 kali	390.700.000	683.016.690	
			Perpustakaan								
			Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan		Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	1.030 buku; 400 judul; 12.500 orang					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Provinsi			Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah 2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	160.000.000	
			Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Provinsi			jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat 1.100 orang	1.100 orang	130.000.000	480.000.000	
			Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum 500 Orang	500 Orang	58.150.000	350.000.000	
			Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah 270 orang	270 orang	225.000.000	650.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Provinsi					70.000.000	90.000.000	
			program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan		presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	18,18 %; 40 orang					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi 10 Orang	10 Orang	53.465.000	150.000.000	
			Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel	Provinsi			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti Lomba 14 Perpustakaan	14 Perpustakaan	85.690.000	202.584.375	
			Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan	Provinsi			Jumlah peserta bimtek 40 orang	40 orang	110.451.000	340.000.000	
			Kegiatan Akreditasi Perpustakaan	Provinsi			Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi 4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	75.000.000	150.000.000	
			Pertanian								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	**Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura**		Peningkatan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang	47.017 ton; 3.113,22 ton; 3.095,08 ton; 114,51 ton; 0 (kaw/unit); 0 (kaw/unit); 0 (kaw/unit); 50 (pelaku usaha/poktan); 97,08 %; 100,95 %					DINAS PERTANIAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Merah) ; Pengembangan Kawasan Padi; Pengembangan kawasan cabai ; Pengembangan kawasan bawang merah; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura ; NTP subsektor Tanaman Pangan; NTP subsektor Hortikultura						
			Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Provinsi					1.000.000.000	1.450.000.000	
			Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya saing	Provinsi					100.000.000	300.000.000	
			Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	Provinsi					1.400.000.000	2.750.000.000	
			Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Provinsi					600.000.000	1.000.000.000	
			Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian		ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian ; Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ; Peningkatan	15 (%); 1 (Dok); 10 (%); 10 (%)					DINAS PERTANIAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian ; Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian						
			Pembinaan asuransi usaha tani	Provinsi					100.000.000	500.000.000	
			Pemberian asuransi peternakan	Provinsi					385.600.000	200.000.000	
			Fasilitasi asuransi pertanian	Provinsi					200.000.000	500.000.000	
			Pengembagan optimasi lahan	Provinsi					1.600.000.000	3.250.000.000	
			Pembangunan jaringan irigasi tersier	Provinsi					2.000.000.000	3.500.000.000	
			Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Provinsi					285.900.000	-	
			Pembangunan jalan produksi pertanian	Provinsi			jalan produksi pertanian 59 km	59 km	14.750.000.000	1.200.000.000	
			Rembug Tani Nasional	Luar Daerah			Terlaksananyan Rembug Tani Nasional 100 %	1	900.000.000	1.000.000.000	
			Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Provinsi					300.000.000	700.000.000	
			Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Provinsi					1.000.000.000	1.350.000.000	
			Program Pengembangan Perkebunan		Peningkatan produksi lada; Peningkatan produksi karet; Pengembangan kawasan lada ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya	46.628 ton; 61.407 ton; 1 (kaw/unit); 81 (pelaku usaha/poktan); 102,4 %					DINAS PERTANIAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					saing, dan nilai tambah hasil perkebunan ; NTP subsektor Perkebunan						
			Intensifikasi tanaman perkebunan	Provinsi					4.000.000.000	4.000.000.000	
			Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Provinsi					800.000.000	950.000.000	
			Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	Provinsi			sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan 12 Unit	12 Unit	600.000.000	2.100.000.000	
			Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	Provinsi					300.000.000	500.000.000	
			Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan		populasi ternak besar sapi ; populasi ternak ayam; Pengembangan kawasan ternak sapi ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan ; NTP subsektor Peternakan	15.838 (ekor); 13.312.700 (ekor); 0 (kaw/unit); 20 (pelaku usaha/poktan); 95,86 %					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan populasi ternak	Provinsi			Meningkatnya populasi ternak (sapi dan unggas) 6 %	0,06	2.500.000.000	2.506.930.000	
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	Provinsi			pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan 100 %	1	200.000.000	500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Provinsi			fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan 100 %	1	500.000.000	500.000.000	
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis	Provinsi			angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit	1	150.000.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zoonosis dan Gangguan Reproduksi				menular/zoonosis pada ternak 100 %				
			Pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik	Provinsi			pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik 30 Kelompok	30 Kelompok	250.000.000	252.900.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih		Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel; Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel ; Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel; Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	1.570.000 (polibag) ; 175 (ton); 1.750 (polibag); 47 Produsen; 2 Varietas					DINAS PERTANIAN
			Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Provinsi					128.225.000	128.225.000	
			Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	Provinsi					100.000.000	200.000.000	
			Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	Provinsi					100.000.000	100.000.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	SKPD					350.000.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman		Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5 (%)					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Provinsi					410.600.000	160.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	SKPD					200.000.000	300.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian		Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana; Ketersediaan bibit ayam ; Ketersediaan anakan sapi ; Ketersediaan benih sumber padi ; Ketersediaan bibit lada ; Ketersediaan bibit karet	1 Dok/Unit; 8.000 (ekor); 25 (ekor); 6 (ton); 75.000 polibag; 40.000 polibag					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	SKPD					550.000.000	480.000.000	
			Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	SKPD			sarana dan prasarana di UPTD Balai Benih Pertanian 1 Paket	1 Paket	970.160.995	1.500.000.000	
			Pembangunan akses informasi perbenihan	Provinsi, SKPD			sistem informasi perbenihan 1 Dokumen	1 Dokumen	686.700.000	-	
			Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Provinsi, SKPD					1.000.000.000	938.670.000	
			Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Provinsi, SKPD			Jumlah bibit ayam 8.000 ekor Jumlah bibit sapi 25 Ekor	8.000 ekor 25 Ekor	1.200.000.000	1.000.000.000	
			Integrasi jagung dan sapi	SKPD			Tersedianya pakan ternak (jagung) 10 Ha	10 Ha	105.500.000	150.000.000	
			Kehutanan								
			Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan		Persentase luas Kawasan Hutan yang dikelola; Persentase pertumbuhan nilai hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	75 %; 0 %					DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemanfaatan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 13 Izin	13 Izin	232.918.150	250.000.000	
			Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan 2 Jenis	2 Jenis	307.321.500	350.000.000	
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola 6 Unit	6 Unit	232.380.000	250.000.000	
			Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah izin usaha hasil hutan kayu 12 Izin	12 Izin	180.972.000	200.000.000	
			Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Luar Daerah, Provinsi			Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 2 Kali	2 Kali	150.000.000	350.000.000	
			Penyelesaian usulan perubahan ststus kawasan hutan/TORA	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Luas penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA 3.600 Hektar	3.600 Hektar	117.300.000	125.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Luas sumber benih Gaharu dan Pelawan 20 Hektar	20 Hektar	450.000.000	500.000.000	
			Pembangunan Kantor KPH/Kantor Resort KPH (DAK Kehutanan)	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Bangunan Kantor KPH 1 Unit Bangunan Kantor Resort KPH 0 Unit Sarana dan Prasarana KPH 1 Paket	1 Unit 0 Unit 1 Paket	1.600.000.000	1.500.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Kendaraan Roda Dua (R-2) 3 Unit	3 Unit	105.000.000	105.000.000	
			Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem		Jumlah Penanganan tindak pidana Kehutanan; Persentase Kawasan Lindung; Menurunya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan	2 Berkas Perkara; 13,39 %; 600 Hektar					DINAS KEHUTANAN
			Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani 2 Berkas	2 Berkas	213.000.000	350.000.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 791 Hektar	791 Hektar	300.000.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah masyarakat mitra POLHUT 60 Orang Jumlah tenaga pendukung POLHUT 15 Orang Luas kawasan hutan yang terlindungi 155.000 Hektar	60 Orang 15 Orang 155.000 Hektar	1.753.900.000	1.700.000.000	
			Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem essensial	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Luas Kawasan ekosistem essensial yang terlindungi dan termanfaatkan 2 Kawasan	2 Kawasan	250.000.000	300.000.000	
			Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Luas kawasan hutan yang terlindungi 155.000 Hektar	155.000 Hektar	-	450.000.000	
			Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan/PAMHUT 15 Orang	15 Orang	-	550.000.000	
			Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 60 Orang	60 Orang	-	750.000.000	
			Perlindungan dan pengamanan hutan (DBH	Pangkal Pinang			Luas perlindungan dan pengamanan hutan 85	85 Hektar	450.000.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DR)				Hektar				
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat		Luas Kawasan Perhutanan Sosial; Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Dikelola	32.019 Hektar; 2.794,44 Hektar; 0 Jumlah DAS					DINAS KEHUTANAN
			Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Luas rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH 200 Hektar Luas pengelolaan Daerah Aliran Sungai 200 Ha	200 Hektar 200 Ha	360.000.000	450.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan (DBH DR)	Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Luas rehabilitasi hutan dan oleh Dinas Kehutanan 5 Hektar	5 Hektar	300.000.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Rambat Menduyung (DBH DR)	Bangka Barat			Luas RHL oleh KPHP Rambat Menduyung 5 Hektar	5 Hektar	250.000.000	250.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh KPHP Jebu Bembang Antan (DBH DR)	Bangka Barat			Luas RHL UPTD KPHP Jebu Bembng Antan 6 Hektar	6 Hektar	250.000.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin (DBH DR)	Bangka			Luas RHL olehh KPHP Sigambir Kotawaringin 5 Hektar	5 Hektar	135.000.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Bubus Panca (DBH DR)	Bangka			Luas RHL oleh KPHP Bubus Panca 2	2	75.000.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan LahanUPTD KPHP Sungai Sembulan (DBH DR)	Bangka Tengah			Luas RHL oleh KPHP Sungai Sembulan 20 Hektar	20 Hektar	250.000.000	250.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan	Bangka Selatan			Luas RHL oleh KPHP	10 Hektar	250.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			LahanUPTD KPHP Muntai Palas (DBH DR)				Muntai Palas 10 Hektar			300.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Gunung Duren (DBH DR)	Belitung Timur			Luas RHL oleh KPHP Gunung Duren 10 Hektar	10 Hektar	250.000.000	250.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHL Belantu Mendanau (DBH DR)	Belitung			Luas RHL olehKPHL Belantu Mendanau 20 Hektar	20 Hektar	250.000.000	250.000.000	
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Luas rehabilitasi hutan dan lahan 80 Hektar	80 Hektar	600.000.000	900.000.000	
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur					-	-	
			Pengembangan Perhutanan Sosial	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Luas Pemberdayaan Masyarakat melalui Perhutanan Soaial 20.000 Hektar	20.000 Hektar	400.000.000	800.000.000	
			Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Provinsi, SKPD			Jumlah kelompok kelompok pecinta alam/pramuka 2 Kelompok	2 Kelompok	150.000.000	250.000.000	
			Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung,			Jumlah pemegang IPPKH yang memenuhi kewajiban rehabilitasi DAS 6 Izin	6 Izin	-	230.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka							
			Penyelenggaaraan Penyuluhan Kehutanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbina 100 Kelompok	100 Kelompok	300.000.000	400.000.000	
			Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Luas sumber benih gaharu dan pelawan 20 Hektar	20 Hektar	-	-	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DA K Kehutanan)	Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah kelompok penerima sarpras ekonomi produktif 20 Kelompok	20 Kelompok	835.000.000	1.000.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan		Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	66,67 %					DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka, Merawang, Pemali, Puding Besar, Mendo Barat, Sungai Liat			Persentase luas pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung	Bangka Barat, Muntok, Riau Silip, Simpang Teritip			Jumlah aparatur UPRD KPHP Rambat Menduyung yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	217.200.000	225.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Parittiga			Jumlah aparatur UPTD KPHP Jebu Bembang Antan yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	214.000.000	220.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca	Bangka, Belinyu, Riau Silip, Sungai Liat, Bakam			Jumlah aparatur UPTD KPHP Bubus Panca yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	218.800.000	225.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Bangka, Bakam, Mendo Barat, Merawang, Pemali, Puding Besar, Sungai Liat			Jumlah Aparatur UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	222.000.000	230.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan	Bangka Tengah, Namang, Koba, Lubuk, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Sungai Selan			Jumlah aparatur UPTD KPHP Sungai Sembulan yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	252.000.000	255.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas	Bangka Selatan, Air Gegas, Batu Betumpang, Kepulauan Pongok, Lepar Pongok, Payung			Jumlah aparatur UPTD KPHP Muntai Palas yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	242.800.000	240.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau	Sijuk, Tanjung Pandan, Badau, Membalong, Selat Nasik			Jumlah aparatur UPTD KPHL Belantu Mendanau yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	258.200.000	265.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren	Belitung Timur, Dendang, Kelapa Kampit, Manggar, Membalong			Jumlah aparatur UPTD KPHP Gunung Duren yang terlayani selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	258.200.000	265.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,			Persentase luas pengelolaan hutan oleh	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka, Belinyu, Riau Silip			KPHP Bubus Panca 66,66 Persen				
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Pulau Besar, Simpang Rimba, Air Gegas, Toboali, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Lubuk			Persentase luas pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Koba, Lubuk, Sungai Selan, Namang			Persentase luas pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Muntok, Simpang Teritip			Persentase luas pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Tenis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Parittiga			Persentase luas pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Sijuk, Tanjung Pandan, Badau, Membalong, Selat Nasik			Persentase luas pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu Mendanau 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Dendang, Gantung, Kelapa			Persentase luas pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren 66,66 Persen	66,66 Persen	75.000.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kampit							
			Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Luas penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA 3.000 Hektar	3.000 Hektar	-	-	
			Energi dan Sumber Daya Mineral								
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah		Persentase cadangan Mineral yang potensial; Persentase Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	48,83 %; 56,1 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Data Hasil Penyelidikan Kebumian 1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	950.000.000	
			Penyajian data dan peta potensi Sumber Daya Mineral	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah peta yang dihasilkan 3 Peta	3 Peta	200.000.000	-	
			Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Laporan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 30 Laporan	30 Laporan	200.000.000	525.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta	Luar Daerah, Provinsi			Tercapainya Pendapatan Daerah dari Retribusi Pergantian	1,9 Miliar	200.000.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Biaya Cetak Peta 1,9 Miliar				
			Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah kajian pengelolaan dan pemanfaatan mineral ikutan 1 Kajian	1 Kajian	318.426.000	-	
			Indentifikasi Potensi Mineral ikutan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah laporan data potensi mineral ikutan dan peta yang dihasilkan 1 Laporan dan Peta	1 Laporan dan Peta	354.564.000	600.000.000	
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam		Persentase DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam; Persentase luasan lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,; Persentase perusahaan yang menempatkan Nilai jaminan reklamasi; Persentase Perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices	58,9 %; 12 %; 60 %; 70 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam 567 IUP	567 IUP	250.000.000	500.000.000	
			Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah DBH SDA Mineral 80 Milyar	80 Milyar	100.000.000	275.000.000	
			Verifikasi , Evaluasi terhadap dokumen	Provinsi			Jumlah Data Rencana Reklamasi dan Rencana	1 Dokumen	100.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Reklamasi (RR)				Penutupan Tambang 1 Dokumen				
			Pembinaan Pengembangan dan Pemerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Social Responsibilty / CD-CSR)	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Pembinaan pengembangan dan pemerdayaan masyarakat sekitar (CDCSR) 20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000	175.000.000	
			Penyusunan dokumen IPR (Izin Pertambangan Rakyat) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah dokumen IPR yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 150 Dokumen	150 Dokumen	3.150.000.000	2.100.000.000	
			Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Persentase Perusahaan pertambangan mineral non logam yang menerapkan good mining practices	65 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	Luar Daerah, Provinsi					275.000.000	600.000.000	
			Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tingkat Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah peserta KTT (Kepala Teknik Tambang) Tingkat Nasional 250 Peserta	250 Peserta	500.000.000	-	
			Penyusunan Naskah Akademis pengelolaan pertambangan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah kajian akademis yang disusun 1 Kajian Teknis	1 Kajian Teknis	250.000.000	-	
			Program Pengembangan Sumber Daya Energi		Persentase penggunaan EBT; Persentase perusahaan pendistribusian Minyak dan Gas yang taat	6,84 %; 65 %; 62,2 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					aturan; Persentase Dana Bagi Hasil dari lifting MIGAS Babel						MINERAL
			Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumah Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) 50 Unit	50 Unit	1.855.100.540	15.000.000.000	
			Pemeliharaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Terpeliharanya PJUTS 1 Tahun	1 Tahun	125.000.000	250.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan 98 Perusahaan	98 Perusahaan	125.000.000	300.000.000	
			Optimalisasi lifing MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS)	Luar Daerah, Provinsi			Persentase lifting MIGAS Babel 420 Ribu Barel	420 Ribu Barel	125.000.000	350.000.000	
			Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Pembinaan dan Pengendaliaan Pendistribusian Minyak Gas 81 Pelaku Usaha	81 Pelaku Usaha	100.000.000	250.000.000	
			Pariwisata								
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan	**Program Pengembangan**		Presentase sarana prasarana di daya tarik	70,37 %					DINAS KEBUDAYAA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pembangunan pariwisata	**Destinasi Pariwisata**		wisata yang terbangun dan memenuhi standar						N DAN PARIWISATA
			Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Belitung			Tersusunnya intreprestasi di Daya Tarik Wisata 1 dokumen	1 dokumen	329.006.000	359.330.100	
			Pengembangan kawasan pariwisata provinsi	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka			Jumlah kawasan pariwisata provinsi yang dikembangkan 5 dokumen	5 dokumen	3.831.703.000	1.478.130.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas Sektor Pariwisata	Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Jumlah pengelola pokdarwis yang tersosialisasi 150 orang	150 orang	150.000.000	200.000.000	
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah kawasan ekonomi khusus yang termonitoring dan terevaluasi 3 kawasan	3 kawasan	315.000.000	375.000.000	
			Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen kesepaktan yang tersusun 2 pertemuan	2 pertemuan	370.500.000	250.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah desa wisata dan pokdarwis yang diberdayakan 8 desa wisata/pokdarwis	8 desa wisata/pokdarwis	286.224.450	309.093.000	
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah sarana prasarana yang terbangun 49 unit	49 unit	10.484.520.000	4.605.499.900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Persentase kunjungan wisatawan domestik melalui media promosi ; Persentase kunjungan wisatawan mancanegara melalui media promosi	466.082 %; 9.049 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Pemasaran Pariwisata	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen	2 dokumen	450.000.000	486.000.000	
			Pelaksanaan Promosi Geowisata	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya event promosi pariwisata 4 event	4 event	592.238.000	644.250.000	
			Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya event promosi pariwisata 2 event	2 event	370.385.000	525.000.000	
			Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata 6 bahan promosi dan informasi	6 bahan promosi dan informasi	718.260.000	867.086.000	
			Pelayanan Informasi Pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan			Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung 4 TIC	4 TIC	120.345.000	147.362.000	
			Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata	Luar Daerah, SKPD			Jumlah media informasi yang berbasisi IT 5 media	5 media	570.000.000	354.396.000	
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di	4 event	1.521.000.000	1.687.694.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dalam dan luar daerah 4 event				
			Partisipasi Event Promosi Pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang			Jumlah dukungan penyelenggaraan event yang difasilitasi 20 event	20 event	2.450.000.000	6.067.856.900	
			Pelaksanaan Fam Trip	Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peserta widyawisata pengenalan destinasi pariwisata 20 orang	20 orang	333.745.000	396.594.900	
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah kerjasama dengan maskapai dan media 5 media	5 media	1.355.155.000	1.535.973.000	
			Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah buku profil pariwisata 1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	318.346.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan		Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi; Persentase kelembagaan pariwisata yang berkualitas; Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	7,38 %; 100 %; 3,08 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Pelatihan dasar Sumber Daya Pariwisata 400 orang	400 orang	900.000.000	1.545.670.335	
			Penyelenggaraan	Provinsi, Pangkal			Jumlah peserta	300 orang	1.150.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	Pinang, Belitung			sertifikasi sumber daya pariwisata 300 orang			1.429.441.000	
			penyelengaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang			Jumlah sumberdaya manusia yang mampu mempromosikan pariwisata daerah 66 orang	66 orang	950.000.000	997.802.000	
			Penyelengaraan kegiatan wisata kuliner	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah pelaku ekonomi kreatif wisata kuliner 50 orang	50 orang	181.700.000	205.495.000	
			Pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah pelaku ekonomi kreatif industri perfilman, animasi, video dan fotografi 70 orang	70 orang	385.000.000	748.195.030	
			Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen kesepakatan pengembangan kelembagaan pariwisata daerah 1 dokumen	1 dokumen	105.375.000	173.643.000	
			Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah naskah kesepakatan yang disepakati 3 naskah	3 naskah	111.315.500	205.806.000	
			Partisipasi Event Festival Nusantara	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah event / festival yang diselenggarakan 30 duk event / festival	30 duk event / festival	780.000.000	1.736.437.500	
			Kelautan dan Perikanan								
	PEMBANGUNAN BAHARI	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	**Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut**		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan; Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang	825.077 Ha; 75 %; 2,13 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					terekomendasi; Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
			Pembangunan Dermaga Jetty	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah sarana dan prasarana yang dmanfaatkan oleh masyarakat pesisir 4 Jetty	4 Jetty	12.700.000.000	10.517.200.000	
			Desalinasi Air Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir 3 Unit	3 Unit	610.000.000	800.000.000	
			Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 14 Rekomendasi Izin	14 Rekomendasi Izin	282.000.000	294.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	288.000.000	345.600.000	
			Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Luas kawasan konservasi Daerah yang Ditetapkan 554.000 Ha	554.000 Ha	800.000.000	325.000.000	
			Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)	Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana uang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir 2 Jetty	2 Jetty	-	3.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi BOOST Center	Luar Daerah, Provinsi			jumlah layanan fungsi BOOST Center 12 Bulan	12 Bulan	168.200.000	280.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Volume Produksi Perikanan Tangkap; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap; Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat ; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga; Nilai Tukar Nelayan; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	219.300 Ton; 8,84 %; 406 Juta Rupiah; 3.000 Ton; 22.500 Ton; 35.000 Ton; 17.500 Ton; 110 Indeks; 13.125 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Provinsi			jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 12 Bulan	12 Bulan	3.409.500.000	2.600.000.000	
			Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah nelayan yang dipantau dan dievaluasi kesesuaian sarana	90 Orang	110.000.000	130.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dengan aktivitas perikanan tangkap aktifitas nelayan 90 Orang				
			peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD					300.000.000	325.000.000	
			Peningkatan dan Pengembangan PPI	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan 2 PPI	2 PPI	700.000.000	8.500.000.000	
			Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD					1.000.000.000	12.200.000.000	
			Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Belitung Timur					450.000.000	350.000.000	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah nelayan yang dibina 280 Orang	280 Orang	1.300.000.000	350.000.000	
			peningkatan kesejahteraan nelayan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah nelayan yang dibantu sarana dan prasarananya 700 Orang	700 Orang	200.000.000	2.600.000.000	
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan		Volume Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran; Persentase kontribusi komoditas ikan terhadap inflasi; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis	12.620 Ton; 55 Kg/Org/Thn; 21.610 Ton; 1,16 %; 22,22 %; 160 Ton; 270 Ton; 163 Ton; 163 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Industri Perikanaan Terpadu Teluk Kelabat; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga						
			Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina 7 Pasar	7 Pasar	90.000.000	120.000.000	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan 6 UPI	6 UPI	1.650.000.000	3.200.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah luasan areal budidaya 2 KJA	2 KJA	650.000.000	1.330.000.000	
			Percontohan Budidaya Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket) 3 Paket	3 Paket	817.665.483	850.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Cold Storage	Provinsi, SKPD			4 Cold Storage	4 Cold Storage	1.139.800.000	2.000.000.000	
			Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD					180.000.000	185.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan								
			Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan 200 orang	200 orang	385.000.000	-	
			Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.235.000.000	740.000.000	
			Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 5 Promosi	5 Promosi	1.000.000.000	760.000.000	
			Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan	75 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan sumber daya kelautan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan 12 Bulan	12 Bulan	1.036.400.000	1.820.000.000	
			Pengawasan sumber daya perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD					670.000.000	490.000.000	
			Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD					220.000.000	260.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan		Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	88 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan	12 Bulan	950.000.000	1.000.000.000	
			Pembinaan,supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan	100 UPI	250.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			hasil kelautan dan perikanan				keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan 100 UPI				
			Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan				Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya 700 Sampel	700 Sampel	350.000.000	2.000.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	10,59 Juta Ekor; 28,88 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	1.991.000.000	1.925.000.000	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produksi benih 42,35 Juta Ekor	42,35 Juta Ekor	600.000.000	1.100.000.000	
			Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Tingkat survival rate benih dan calon induk unggul 32,5 %	32,5 %	140.000.000	145.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	0,07 Juta Ekor; 86,63 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 bulan	12 bulan	1.409.200.000	1.350.000.000	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produksi benih 0,075 %	0,075 %	900.000.000	520.000.000	
			Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Tingkat survival rate benih dan calon induk	32,5 %	120.000.000	125.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							unggul 32,5 %				
			Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (air Laut) (DAK)	Provinsi			Tersedianya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana BBIL 1 Paket	1 Paket	-	1.250.000.000	
			Perdagangan								
	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Birokrasi yang efektif dan efisien	**Program Pengembangan Perdagangan**		Pertumbuhan Volume Ekspor; Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan; Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok); Persentase peningkatan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun; Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan; Pertumbuhan komoditi yang terjual malalui Pasar Lelang; Persentasse peningkatan promosi produk dalam negeri	862.000 ton; 10 %; 89 %; 12 %; 40 %; 1 Komoditi; 10 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelaksanaan Pasar murah	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Manggar, Bukit			Jumlah Pasar Murah dilaksanakan 50 kali	50 kali	400.000.000	700.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Intan, Gabek, Gerunggang, Rangkui, Girimaya, Pangkal Balam, Taman Sari							
			Partisipasi Pepper Day	Provinsi					150.000.000	467.741.000	
			Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Luar Daerah, Provinsi					500.000.000	296.000.000	
			Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Provinsi			Jumlah Pelaku usaha 50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	200.000.000	800.000.000	
			Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	Provinsi			jumlah lahan yang dibebaskan 1 lahan	1 lahan	25.100.000.000	10.000.000.000	
			Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	Provinsi, Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah Distributor dan Pelaku Usaha yang dimonitoring 60 Distributor dan Pelaku Usaha	60 Distributor dan Pelaku Usaha	175.000.000	330.000.000	
			Peningkatan dan perluasan akses pasar	Luar Daerah			Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Akses Pasar 15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	1.550.000.000	2.000.000.000	
			Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Provinsi			Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang terlatih 40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	350.000.000	500.000.000	
			Informasi perdagangan dalam negeri	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya 20 Komoditi	20 Komoditi	300.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perindustrian								
			Program Pengembanga Wilayah dan Pengawasan Industri		Jumlah kawasan strategis/kawasan industri/kawasan sentra; Jumlah industri yang memenuhi standar industri	1 kawasan; 15 Industri					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Industri yang diawasi 50 industri	50 industri	150.000.000	500.000.000	
			Pengembangan Kawasan stategis/kawasan industri/sentra	Provinsi					750.000.000	500.000.000	
			Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Provinsi					200.000.000	350.000.000	
			Pendataan Perizinan Industri	Provinsi			Jumlah Buku yang disusun 1 buku	1 buku	200.000.000	350.000.000	
			Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri		Persentase tenaga kerja Industri terhadap total tenaga kerja; Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan; Persentase Tenaga Kerja yang tererap di Industri Pariwisata; Persentase industri yang memiliki informasi kandungan nutrisi olahan pangan; Pertumbuhan industri pada sektor pertanian; Persentase tenaga kerja industri pada sektor pertanian; Pertumbuhan	5,24 %; 0,71 %; 0,33 %; 6,71 %; 1.524 unit; 10,44 %; 5 unit; 1,04 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan; Persentase tenaga kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan`						
			Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Lokal	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat			Jumlah Teknologi Tepat Guna 4 TTG	4 TTG	300.000.000	200.000.000	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Provinsi					650.000.000	480.000.000	
			Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Produk Industri yang terstandarisasi Perizinan 720 Produk	720 Produk	500.000.000	1.070.839.440	
			Rumah Pengembangan Produk	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah Kemasan Produk Industri yang terfasilitasi 450 kemasan	450 kemasan	500.000.000	781.323.840	
			Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah IKM OVOP yang dibina 9 IKM OVOP	9 IKM OVOP	100.000.000	220.000.000	
			Pemberdayaan Dekranasda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 500 Pelaku Industri	500 Pelaku Industri	800.000.000	909.493.869	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningktan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian		Indeks Keberdayaan Konsumen; Persentase pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga); Persentase pengembangan standarisasi dan lab. kemetrologian	25 Indeks; 18 %; 50 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Sungai Liat, Kelapa, Taman Sari, Koba, Tanjung Pandan, Manggar, Mendo Barat, Namang, Merawang, Muntok, Rangkui, Pangkal Balam, Bukit Intan, Toboali, Pangkalan Baru, Gabek			Jumlah Barang beredar yang diawasi 16 barang Jumlah Jasa yang diawasi 2 jasa	16 barang 2 jasa	350.000.000	1.030.000.000	
			Pelaksanaan Penentuan Penegakan hukum pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Provinsi			Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum 2 kasus	2 kasus	100.000.000	600.000.000	
			Pengawasan Tertib Niaga	Provinsi			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang	25 pelaku usaha	150.000.000	800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							diawasi 25 pelaku usaha				
			Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kabupaten/Kota 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	150.000.000	365.000.000	
			Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah					50.000.000	150.000.000	
			Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Provinsi					250.000.000	360.000.000	
			Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang					100.000.000	480.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran); 2	18 %; 0 Juta Rupiah					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi					600.000.000	1.045.195.000	
			Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Provinsi			Jumlah Lingkup Akreditasi 4 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	500.000.000	150.000.000	
			Monitoring Mutu Pengujian	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Laporan Mutu Komoditi 1 laporan	1 laporan	150.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Transmigrasi								
			Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigarasi		Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang; Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung; Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	0 %; 0 %; 0 %					DINAS TENAGA KERJA
			perencanaan pembangunan Kawasan transmigrasi	Provinsi			Jumlah Dokumen rencana kawasan transmigrasi 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen	-	267.430.000	
			Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah dokumen hasil pembahasan dengan tim POKJA KTM 1 Laporan	1 Laporan	89.200.000	90.520.000	
			peningkatan kapasitas SDM bidangTransmigrasi	Provinsi			Jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi 40 orang	40 orang	150.320.350	190.652.000	
			Keuangan								
			Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah :	24,62 %; 3 NILAI					BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Realisasi Penerimaan Pajak daerah pada sektor PBBKB 273.896.952.762,4 Rp jumlah razia gabungan yang dilakukan 7 kali	273.896.952.762,4 Rp 7 kali	993.276.000	853.112.753	
			Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Bangka			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka 93.306.550.800 Rp Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka 90 nilai	93.306.550.800 Rp 90 nilai	1.090.083.000	1.134.580.354	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Belitung			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Belitung 73.918.418.200 Rp Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung 84 nilai	73.918.418.200 Rp 84 nilai	944.974.000	1.217.000.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 56.679.552.300 Rp Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 80 nilai	56.679.552.300 Rp 80 nilai	686.366.000	633.707.000	
			Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat 82 nilai Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Barat 49.884.839.100 Rp	82 nilai 49.884.839.100 Rp	832.599.000	625.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 84,5 nilai Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 45.815.267.200 Rp	84,5 nilai 45.815.267.200 Rp	794.164.000	750.351.250	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur 79 nilai Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Belitung Timur 48.221.410.407,78 Rp	79 nilai 48.221.410.407,78 Rp	787.886.000	980.965.000	
			Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan tentang tata kelola pajak daerah tersusun 3 Peraturan	3 Peraturan	71.783.000	107.882.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	SKPD			Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah 12 Bulan	12 Bulan	583.154.000	876.416.666	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Pangkal Pinang			Nilai IKM pada layanan Samsat corner 80,5 nilai	80,5 nilai	69.626.000	104.641.462	
			Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Provinsi			Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait 2 kali	2 kali	75.158.000	128.160.753	
			Sosialisasi Pajak Daerah	Provinsi			Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik 30 kali	30 kali	187.169.000	745.378.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang 84 nilai Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kota Pangkalpinang 121.210.574.800 Rp	84 nilai 121.210.574.800 Rp	928.798.000	1.200.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah		Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Daerah	75,38 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi			Jumlah data objek baru yang dapat dijadikan sumber PAD 10 data	10 data	303.915.000	533.433.549	
			Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi			Tersusunnya dokumen rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten kota 1 dokumen	1 dokumen	20.970.000	76.571.492	
			Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Provinsi			Tersusunnya dokumen kesepakatan untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 1 dokumen	1 dokumen	115.078.000	226.270.000	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 38 orang	38 orang	48.905.000	-	
			Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Provinsi			Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 laporan	2 laporan	405.114.000	650.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah 2 Peraturan	2 Peraturan	25.090.000	-	
			Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD; Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	3 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 4 rancangan peraturan	4 rancangan peraturan	1.341.250.000	1.961.913.965	
			Penyusunan Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah 0 rancangan peraturan	0 rancangan peraturan	-	-	
			Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD			Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	423.259.000	833.418.960	
			Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	SKPD, Pangkal Pinang			jumlah peraturan tentang regulasi/kebijakan bidang anggaran 0 Peraturan	0 Peraturan	-	225.000.000	
			Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman	200 orang	166.472.000	450.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyusunan APBD 200 orang				
			Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 0 orang	0 orang	-	-	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD 14 keputusan	14 keputusan	436.950.000	450.000.000	
			Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi			jumlah asistensi pemecahan permasalahan penyusunan APBD Kabupaten/Kota 3 asistensi	3 asistensi	154.989.000	375.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan		Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	222.894.000	410.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan 12 bulan layanan	12 bulan layanan	200.000.000	710.000.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 laporan	1 laporan	95.482.000	160.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 7 keputusan	7 keputusan	117.459.000	180.000.000	
			Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen	1 dokumen	103.303.000	260.000.000	
			Penyusunan regulasi/Kebijakan bidang akutansi dan pelaporan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan tentang regulasi / kebijakan bidang akuntasi dan pelaporan 2 peraturan	2 peraturan	50.000.000	-	
			Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya; Prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	5.244.499.204.715,99 Rp; 0,36 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	100 orang	175.800.000	276.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan				Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan 1 keputusan	1 keputusan	54.561.000	100.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	SKPD, Pangkal Pinang			Tersedianya dan beroperasinya aplikasi sistem SIMDA ter-update 12 bulan	12 bulan	277.928.000	480.000.000	
			Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 dokumen	0 dokumen	-	150.000.000	
			Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga 1 dokumen	1 dokumen	238.214.000	316.511.800	
			Penyusunan Regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan Tentang regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah 1 Peraturan	1 Peraturan	128.600.000	240.000.000	
			Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 orang	0 orang	-	156.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 orang	0 orang	-	285.000.000	
			Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Provinsi			Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah 2 laporan	2 laporan	154.007.000	248.435.809	
			Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	187.555.000	280.000.000	
			Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	267.100.000	135.000.000	
			Penyusunan laporan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 laporan	2 laporan	128.341.000	200.000.000	
			Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Provinsi			Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 sertifikat bidang tanah	20 sertifikat bidang tanah	334.189.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi		prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 120 orang	120 orang	189.972.000	405.984.282	
			Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta sosialisasi 100 orang	100 orang	188.675.000	159.720.000	
			Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan 4 dokumen	4 dokumen	164.784.100	186.340.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			jumlah dokumen rekonsiliasi IWP TASPEN dan BPJS 0 dokumen	0 dokumen	-	160.046.095	
			Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan								
			Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan		Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	83 %; 92 %; 93 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Perencanaan ASN	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan ASN 1	1 Dokumen	90.465.000	261.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dokumen				
			Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	
			Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	SKPD			Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi CASN/ASN 86 Orang Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan 25 Orang	86 Orang 25 Orang	483.000.000	1.156.168.000	
			Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Provinsi, SKPD			Jumlah ASN Yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun 600 Orang	600 Orang	109.365.000	230.000.000	
			Promosi dan Mutasi ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Diusulkan Promosi / Mutasi 250 Orang Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting 50 Orang Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment 300 Orang	250 Orang 50 Orang 300 Orang	1.638.169.000	1.970.000.000	
			Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara		Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu; Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian; Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang; Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	76 %; 90 %; 0,13 %; 2,21 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Peningkatan Kesejahteraan ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana 100 Orang Jumlah ASN Yang Berprestasi 5 Orang Jumlah ASN Yang	100 Orang 5 Orang 1.500 Orang 70 Orang	413.324.200	850.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Menerima Kenaikan Gaji Berkala 1.500 Orang Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti 70 Orang				
			Pengembangan Profesi ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional 18 Orang	18 Orang	1.439.325.000	6.100.000.000	
			Pembinaan ASN	SKPD			Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani 7 Kasus Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya 3.500 Orang Jumlah ASN Yang Dibina Rohaninya 600 Orang Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan 3 Orang	7 Kasus 3.500 Orang 600 Orang 3 Orang	404.631.000	850.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Dimonitoring dan Dievaluasi SKPnya 3.500 Orang	3.500 Orang	150.000.000	231.437.000	
			Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	SKPD			Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan 250 Kartu Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan 3 Buku Jumlah ID Card 4.000 Buah	250 Kartu 3 Buku 4.000 Buah	892.719.800	1.035.000.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara		Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial; Persentase	97 %; 60 %; 81 ; 41,9 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional; Nilai Akreditasi Diklat; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya						NGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Sertifikasi 100 Orang	100 Orang	137.597.355	250.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	SKPD			Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Administrator 40 Orang Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Pengawas 80 Orang	40 Orang 80 Orang	2.400.000.000	4.658.500.000	
			Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	SKPD			Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 1.000 Orang	1.000 Orang	3.636.693.645	8.226.000.000	
			Peningkatan Pendidikan Formal	SKPD			Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing 26 Orang	26 Orang	1.298.400.000	3.151.000.000	
			Peningkatan Mutu Kediklatan	SKPD			Nilai Akreditasi Diklat 81 Nilai Jumlah Dokumen 3 Dokumen	81 Nilai 3 Dokumen	330.976.000	460.000.000	
			Persandian								
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di	100 %					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					lingkungan Pemprov Babel						
			Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi			Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah 5 Layanan	5 Layanan	72.405.485	77.405.485	
			Kearsipan								
			Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	Provinsi			Jumlah peserta bimtek kearsipan OPD 50 Orang Jumlah peserta bimtek kearsipan SMA, SMK dan SLB 50 orang	50 Orang 50 orang	99.814.000	286.165.000	
			Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi			Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat provinsi dan Lomba pengelolaan kearsipan 25 Orang	25 Orang	120.000.000	254.110.335	
			Arsip Masuk Desa	Provinsi			Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip 42 Desa/Kel	42 Desa/Kel	50.000.000	333.766.440	
			Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	Provinsi			Persentase pengawasan kearsipan di Ormas, Perusahaan, BUMD dan parpol (kab/kota) dan jumlah instansi yang dilaksanakan pengawasan kearsipan di 10 OPD Pemerintah Prov Kep Bangka	28 Instansi	80.000.000	370.924.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Belitung dan 28 di SMA/SMK Prov Kep Bangka Belitung 28 Instansi				
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	378 arsip					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Provinsi			Jumlah arsip yang dipelihara provinsi 200 arsip	200 arsip	7.000.000	80.000.000	
			Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung 16 Buku	16 Buku	120.000.000	-	
			Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/kota Provinsi kep. Bangka Belitung	Provinsi			jumlah arsip vital yang terdata di 7 kab/kota 450 arsip	450 arsip	115.000.000	120.000.000	
			Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	Provinsi			jumlah LKD di kab/kota 7 LKD Kab/Kota	7 LKD Kab/Kota	125.000.000	260.000.000	
			Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah pengunjung pameran 300 Pengunjung	300 Pengunjung	81.150.000	405.168.750	
			Penelitian dan Pengembangan								
			Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase hasil inovasi daerah yang dikembagkan; Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	75 %; 80 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											DAERAH
			Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakuka 4 penelitian	4 penelitian	486.086.000	694.575.000	
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan 2 Dokumen	2 Dokumen	1.370.000.000	463.050.000	
			Penguatan Jaringan Kelitbangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah kegiatan pendukung/penunjang dibidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan 3 Kegiatan	3 Kegiatan	358.312.500	752.456.250	
			Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DR 8 Rekomendasi/Penelitian	8 Rekomendasi/Penelitian	548.000.000	1.331.000.000	
			Sekretariat Daerah								
			Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan		Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	85.000.000 meter persegi; 40 bidang; 60 persentase					SEKRETARIAT DAERAH
			Kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi administrasi kewilayahan	Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Kelengkapan data 7 Kabupaten/kota	7 Kabupaten/kota	70.440.842	95.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan perapatan dan pembangunan pilar batas daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Terlaksanakannya penegasan batas daerah provinsi 0 pro. kep. bangka belitung	0 pro. kep. bangka belitung	50.000.000	60.000.000	
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketapertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	50.000.000	200.000.000	
			Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 bidang 50 Bidang	50 Bidang	200.250.000	850.000.000	
			Kegiatan penegasan batas daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Terlaksananya proses penegasan batas daerah 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	50.000.000	100.000.000	
			Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data rupabumi	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Terlaksananya inventarisasi data rupabumi 7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	50.578.000	75.000.000	
			Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data pulau di prov. kep. bangka belitung	Provinsi			Terlaksananya proses penyusunan database pulau-pulau kecil diwilayah adm. prov.	6 Kabupaten	50.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kep. bangka belitung 6 Kabupaten				
			Program Pengembangan Otonomi Daerah		Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi ; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	11 peringkat; 20 Prosentase; 20 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Kegiatan implementasi proses pergantian antar waktu DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan calon anggota DPRD Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Terverifikasinya Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Babel dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel 0 surat keputusan	0 surat keputusan	75.000.000	80.000.000	
			Kegiatan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung 7 Kab/Kota LKPJ akhir tahun anggaran dan	7 Kab/Kota 1 Dokumen 2 dokumen	751.810.000	800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							sosialisasi penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 1 Dokumen Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tersusunnya LPPD dan ILPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 2 dokumen				
			Kegiatan peresmian pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah di prov. kep. bangka belitung	Luar Daerah, Provinsi			Terlaksananya pelantikan KDH dan WKDH provinsi, kabupaten/kota 1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	50.000.000	70.000.000	
			Kegiatan optimalisasi penerapan dan pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di prov. kep. bangka belitung 6 urusan	6 urusan	78.940.000	85.000.000	
			Kegiatan administrasi izin keluar negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke luar negeri	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan 10 surat izin	10 surat izin	100.000.000	150.000.000	
			Kegiatan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren (UPK)	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Terlaksananya rapat koordinasi dan optimalisasi penerapan pelayanan urusan pemerintah konkuren (UPK) kewenangan	50 orang	217.181.408	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat			provinsi kep. bangka belitung 50 orang				
			Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Terlaksana pelayanan administrasi penatausahaan pada biro pemerintahan 6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000.000	1.200.000.000	
			Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah		Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung; Meningkatnya jumlah kerjsasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Kegiatan pengembangan kerjasama daerah	Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Tersusunnya rekomendasi kerjasama 20 kesepakatan kerjasama Terlaksananya inventarisasi potensi kerjasama dengan luar negeri yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 1 laporan dan rapat	20 kesepakatan kerjasama 1 laporan dan rapat	100.000.000	150.000.000	
			Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat			Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Kali	2 Kali	500.000.000	421.580.000	
			Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Provinsi			Terlaksananya rapat penyelarasan program pemerintah daerah dengan program	1 kali pertemuan	200.000.000	450.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							instansi vertikal di Prov. Kep. Bangka Belitung 1 kali pertemuan				
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	SKPD			Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI 1 Kali iuran Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI 6 Rapat APPSI	1 Kali iuran 6 Rapat APPSI	91.150.000	254.080.000	
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	SKPD			Terlaksananya keikutsertan dalam BKS Provinsi Kepulauan 1 Kali iuran Terlaksananya keikutsertan dalam BKS Provinsi Kepulauan 6 pertemuan	1 Kali iuran 6 pertemuan	151.150.000	286.960.000	
			Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Provinsi			Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD 6 proposal bantuan	6 proposal bantuan	50.000.000	86.688.000	
			Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan		Prosentase pembinaan keagamaan	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka			persentase pembinaan masyarakat 80 %	0,8	2.785.819.501	1.602.648.000	
			Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Bangka			Frekunsi Peyelenggaraan Safari Ramadhan 0 Masjid dan rumah jabatan	0 Masjid dan rumah jabatan	843.200.000	775.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Barat							
			Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan 1.069 jemaah/orang	1.069 jemaah/orang	957.920.000	1.098.600.000	
			Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah			Tersedianya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 8 orang	8 orang	934.500.000	654.080.000	
			Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Provinsi, Luar Daerah, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Belitung, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji 1.069 orang	1.069 orang	3.213.777.000	3.350.000.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata		prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Sekolah yang dinilai 28 sekolah	28 sekolah	388.439.750	484.090.000	
			Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung 3.000 orang	3.000 orang	839.812.500	1.196.630.000	
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan		Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Transmigrasi								
			Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Provinsi			terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	220.030.000	530.233.000	
			Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah 200 Proposal	200 Proposal	200.000.000	533.985.000	
			Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Provinsi, Luar Daerah, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka			Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah 500 proposal	500 proposal	200.000.000	253.204.000	
			Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembentukan Peraturan Daerah	Provinsi			Jumlah Usulan Raperda yang selesai disusun 10 Raperda Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun 1 Propemperda Jumlah Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 21 Raperda	10 Raperda 1 Propemperda 21 Raperda	368.050.000	1.600.000.000	
			Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi			Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun 70 Pergub	70 Pergub 900 Kepgub	363.750.000	700.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun 900 Kepgub				
			Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi			Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang selesai disusun 100 NHL	100 NHL	109.900.000	180.000.000	
			Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis 30 Rancangan PHD	30 Rancangan PHD	262.250.000	460.000.000	
			Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang Selesai dievaluasi 10 Raperda	10 Raperda	252.484.800	450.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Hukum	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Provinsi			Jumlah Kasus Sengketa TUN yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian 1 Kasus	1 Kasus	236.750.000	330.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota 1 Laporan	1 Laporan	52.000.000	190.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kab/Kota 1 Laporan	1 Laporan	52.000.000	270.000.000	
			Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh	Provinsi			Jumlah Masyarakat Miskin yang diberikan	45 Orang	111.500.000	290.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				Bantuan Hukum 45 Orang				
			Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat/Badan Hukum secara Litigasi atau Non Litigasi	Provinsi			Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian 1 Kasus	1 Kasus	170.550.000	340.000.000	
			Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum		Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Provinsi			Jumlah Artike yang dipublikasikan melalui website JDIH 120 Artikel Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui Website JDIH 100 Peraturan Perundang-undangan	120 Artikel 100 Peraturan Perundang-undangan	452.637.190	700.000.000	
			Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum	Provinsi			0 Jumah Buku Perpustakaan Hukum 50 Buku	0 50 Buku	60.030.000	95.000.000	
			Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	Provinsi			Jumlah Buku Katalog dan Kompilasi Perda/Pegub yang tersedia 150 Buku	150 Buku	67.550.000	95.000.000	
			Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum yang tersusun 1 Rakor	1 Rakor	163.210.000	210.000.000	
			Program Perencanaan Setda		Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan	85 %					SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kinerja meningkat						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen	3 Dokumen	71.460.000	267.951.725	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Provinsi			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	61.072.000	298.492.218	
			Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	97 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota 1 Laporan	1 Laporan	276.887.000	503.145.125	
			Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd		Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Fungsi Sistem E-Monep APBD	Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monep 1 Laporan	1 Laporan	125.061.000	652.328.194	
			Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	73.090.000	201.879.625	
			Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Pangkal Pinang			Rekomendasi APBD 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	301.540.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi dan Laporan 1 laporan	1 laporan	138.764.000	-	
			Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan		Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT; Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	94 persen; 80 Nilai indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Penerapan aplikasi sistem pengelolaan informasi Pengadaan barang/jasa 1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	645.947.610	
			Pengelolaan data dan informasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Admin OPD Sistem Informasi Pengadaan 42 Admin OPD	42 Admin OPD	181.806.073	313.450.500	
			Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan 8 Dokumen	8 Dokumen	193.850.980	497.594.350	
			Peningkatan Pelayanan Publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah SOP dan Penerapannya 1 Dokumen	1 Dokumen	106.722.500	293.864.835	
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa		Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	94 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pengadaan Barang dan Jasa						
			Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP 12 Bulan	12 Bulan	2.171.800.000	4.283.690.400	
			Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan 3 kali	3 kali	48.150.000	599.469.090	
			Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan 2 Kali	2 Kali	30.150.000	489.914.480	
			Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Sosialisasi 2 kali	2 kali	32.150.000	718.753.310	
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	94 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Fungsi	Luar Daerah,			Jumlah Bulan Layanan	12 Bulan	1.199.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi, SKPD			oleh LPSE 12 Bulan			2.560.524.560	
			Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE 2 Aplikasi	2 Aplikasi	162.408.960	1.165.017.645	
			Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 1 Aplikasi	1 Aplikasi	106.000.000	946.008.250	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE 12 Bulan	12 Bulan	397.350.000	1.402.674.350	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan		Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya; Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi teknis; Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi; Persentase jumlah OPD	80 %; 85 %; 85 %; 80 %					SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien						
			Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan aturan yang berlaku 2 Draf Peraturan	2 Draf Peraturan	81.820.000	130.000.000	
			Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Unit Pelaksanaan dinas dan cabang dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	85.830.000	130.000.000	
			Validasi Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beliungt	Provinsi			Perangkat Daerah yang terevaluasi jabatan ASNnya 32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	105.800.000	120.000.000	
			Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen laporan pembinaan 1 Dokumen	1 Dokumen	107.980.000	180.000.000	
			Analisa beban kerja jabatan apratur sipil negara pada perangkat daerah dilingkungan pemrintah provinsi kepulauan bangka	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal			Jumlah dokumen evaluasi jabatan 1 Dokumen	1 Dokumen	222.320.000	200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			belitung	Pinang, Bangka, Bangka Barat							
			standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 Dokumen	1 Dokumen	111.250.000	180.000.000	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah; Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung; Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	80 %; 80 %; 67 ; 99 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Laporan Pembinaan standar Manajemen Mutu pada OPD 0 Dokumen loporan	0 Dokumen loporan	165.295.000	295.000.000	
			Manajemen Perubahan	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Nilai Manajemen Perubahan 4 Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota 1 Poin	4 1 Poin	462.865.000	500.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan							
			Penigkatan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan					164.435.000	200.000.000	
			Data dan Informasi Kinerja	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung					284.001.000	300.000.000	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah		Peningkatan kepuasan masyarakat; Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	0 ; 60 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah laporan,evaluasi dan pelaksanaan SOP 1 laporan	1 laporan	102.500.000	210.000.000	
			Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik 1 Dokumen	1 Dokumen	152.820.000	200.000.000	
			Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	158.520.000	175.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur							
			Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi 1 Dokumen	1 Dokumen	66.455.000	210.000.000	
			Peningkatan administrasi ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah laporanvdukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan 1 laporan	1 laporan	209.000.000	1.350.000.000	
			Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			jumlah inovasi yang di kompetisikan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	112.195.000	300.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT		Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Media Massa / Cetak	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi di media massa/cetak 185 Tayang	185 Tayang	1.001.052.188	1.305.267.850	
			Publikasi Media Elektronik/IT	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi di media elektronik dan IT	150 Tayang	512.967.850	666.858.205	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							150 Tayang				
			Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi media luar 30 Tayang	30 Tayang	167.364.200	217.572.160	
			Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi 1.788 Eksemplar	1.788 Eksemplar	145.250.000	188.825.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Protokoler		Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi, SKPD			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 3.680 Buah	3.680 Buah	68.100.938	885.312.194	
			Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Provinsi, SKPD			Jumlah layanan tamu pemerintah dan negara 1.640 Orang	1.640 Orang	180.600.000	234.780.000	
			Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Provinsi, SKPD			Tersedianya Alat Pendukung Keprotokolan 60 Orang	60 Orang	299.375.000	389.025.000	
			Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi		Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD			Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah 18.480 Eksemplar	18.480 Eksemplar	209.346.200	377.143.846	
			Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Provinsi, SKPD			Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik 33 PD	33 PD	301.340.738	391.742.960	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Provinsi, SKPD			Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 6.103	6.103 Buah	600.000.000	780.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Buah				
			Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah 5 Orang	5 Orang	50.000.000	65.000.000	
			Pengumpulan Infromasi, Layanan Kehumasan, dan Keprotokolan	Provinsi, SKPD			Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan Keprotokolan 260 Kali	260 Kali	402.350.000	523.810.940	
	TOTAL								1.642.614.377.288	1.972.528.585.201	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2,Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149